



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT  
TAHUN 2023**



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR **40** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektivitas pembangunan di daerah dan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka



Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang bertugas membantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat Daerah untuk setiap program.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD Tahun 2024.
  - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

### Pasal 3

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dapat diubah dalam hal terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

### Pasal 4

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

### Pasal 5

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

Kaidah-kaidah Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:



- a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, masing-masing Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan;
- b. Kepala BP4D menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Setiap Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Perangkat Daerah; dan
- d. Kepala BP4D melaksanakan dan menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

  
H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

  
SEKRETARIA  
DAERAH  
MUHAMMAD SOLEH



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1- 1
1.2 Dasar Hukum .....	1 - 4
1.3 Hubungan Antar Dokumen .....	1 - 5
1.4 Maksud dan Tujuan .....	1 - 6
1.5 Sistematika Dokumen RKPD .....	1 - 6

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Daerah .....	2 - 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi .....	2 - 1
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 11
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 13
2.1.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 15
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	2 - 15
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	2 - 15
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat .....	2 - 25
2.1.2.3 Fokus Seni Budaya .....	2 - 40
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum .....	2 - 40
2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib .....	2 - 40
2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	2 - 96
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah .....	2 - 113
2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah .....	2 - 113
2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	2 - 118
2.1.4.3 Iklim Berinvestasi .....	2 - 123
2.1.4.4 Sumber Daya Manusia .....	2 - 124
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD .....	2 - 126
2.2.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021 .....	2 - 126
2.2.2 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022 .....	2 - 137
2.2.3 Realisasi RPJMD 2021- 2026 Sampai dengan Tahun 2022 .....	2 - 143





2.3	Capaian Standar Pelayanan Minimal.....	2 - 146
2.4	Permasalahan Pembangunan Daerah .....	2 - 152
2.4.1	Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	2 - 152
2.4.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ...	2 - 153
2.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .....	2 – 157

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	3 - 1
3.1.1	Kondisi Ekonomi .....	3 - 2
3.1.2	Kebijakan Ekonomi Nasional.....	3 - 8
3.1.3	Tantangan dan Prospek Prekonomian Provinsi Tahun 2023 dan 2024 .....	3 - 11
3.1.4	Tantangan dan Prospek Prekonomian Kabupaten Tahun 2023 dan 2024 .....	3 - 11
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	3 - 14
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	3 - 15
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	3 - 18
3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	3 - 18
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	3 - 23
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	3 - 25

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	4 - 1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	4 - 1
4.1.2	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	4 - 2
4.1.3	Perumusan Isu Strategis Daerah .....	4 - 10
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024.....	4 - 27
4.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	4 - 29
4.2.2	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi .....	4 - 32
4.2.3	Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	4 - 33
4.3	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum	4 - 33



4.4 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan  
Berkelanjutan ..... 4 - 38

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan ..... 5 - 1

5.1.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ..... 5 - 1

5.1.2 Program Urusan Wajib ..... 5 - 2

5.1.3 Program Urusan Pilihan ..... 5 - 8

5.1.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ..... 5 - 9

5.1.5 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..... 5 - 10

5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan ..... 5 - 11

5.1.7 Unsur Pemerintahan Umum ..... 5 - 11

5.1.8 Unsur Kewilayahan ..... 5 - 11

5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan ..... 5 - 13

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ..... 6 - 1**

**BAB VII PENUTUP ..... 7 - 1**





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Kabupaten Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 2
Tabel 2.2	Penggunaan Lahan Existing Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 .....	2 - 8
Tabel 2.3	Jumlah Kulong di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 9
Tabel 2.4	Sebaran Kulong Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 10
Tabel 2.5	Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 14
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2022 .....	2 - 15
Tabel 2.7	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022 (persentase) .....	2 - 17
Tabel 2.8	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 -2022 (persentase) .....	2 - 20
Tabel 2.9	Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 .....	2 - 23
Tabel 2.10	Persentase TPT Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018 -2022 .....	2 - 24
Tabel 2.11	Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 30
Tabel 2.12	Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 31
Tabel 2.13	Prevalensi Balita <i>stunting</i> di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	2 - 37
Tabel 2.14	Cakupan Pelayanan HIV/AIDS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022.....	2 – 38
Tabel 2.15	Cakupan Pelayanan Tuberkulosis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022 .....	2 – 38
Tabel 2.16	Cakupan Pelayanan Malaria Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022 .....	2 – 39
Tabel 2.17	Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	2 - 41
Tabel 2.18	Penilaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 41
Tabel 2.19	Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 43
Tabel 2.20	Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011-2022.....	2 - 45
Tabel 2.21	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2022 .....	2 - 46
Tabel 2.22	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 48
Tabel 2.23	Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 49



Tabel 2.24	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	2 - 51
Tabel 2.25	Rasio Tenaga Kesehatan dan Indikator Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	2 - 53
Tabel 2.26	Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	2 - 54
Tabel 2.27	Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2022 .....	2 - 55
Tabel 2.28	Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020-2022 .....	2 - 56
Tabel 2.29	Persentase PBG Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022.....	2 - 58
Tabel 2.30	Pola Ruang dalam RTRWP Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 58
Tabel 2.31	Produk Perencanaan Tata Ruang di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020.....	2 - 59
Tabel 2.32	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2022 .....	2 - 65
Tabel 2.33	Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021 .....	2 - 66
Tabel 2.34	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2018 – 2022 .....	2 - 66
Tabel 2.35	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022.....	2 - 67
Tabel 2.36	Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2020 .....	2 - 69
Tabel 2.37	Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 .....	2 - 71
Tabel 2.38	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2022.....	2 - 72
Tabel 2.39	Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok Tahun 2018-2022.....	2 - 74
Tabel 2.40	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 75
Tabel 2.41	Rekapitulasi Indeks Desa Membangun Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 76
Tabel 2.42	Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 77
Tabel 2.43	Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 78
Tabel 2.44	Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020.....	2 - 79
Tabel 2.45	Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 80
Tabel 2.46	Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 81
Tabel 2.47	Jumlah UMi per Sektor Usaha di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	2 - 84
Tabel 2.48	Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2022.....	2 - 87
Tabel 2.49	Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 .....	2 - 88





Tabel 2.50	Peringkat Lomba PORPROV, POPDA, dan Kejurda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020 .....	2 - 89
Tabel 2.51	Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 .....	2 - 89
Tabel 2.52	Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2021 .....	2 - 92
Tabel 2.53	Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 96
Tabel 2.54	Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (ton) .....	2 - 97
Tabel 2.55	Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2021 (ribu rupiah).....	2 - 97
Tabel 2.56	Jumlah Kapal Penangkapan Ikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 97
Tabel 2.57	Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 98
Tabel 2.58	Jumlah Hotel dan Penginapan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020 .....	2 - 99
Tabel 2.59	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020.....	2 - 100
Tabel 2.60	Usaha Jasa Makanan/Minuman Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020.....	2 - 101
Tabel 2.61	Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 .....	2 - 101
Tabel 2.62	Luas, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Hortikultura Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020.....	2 - 103
Tabel 2.63	Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 105
Tabel 2.64	Populasi dan Produksi Ternak Unggas Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2022 .....	2 - 106
Tabel 2.65	Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022 .....	2 – 109
Tabel 2.66	Jumlah IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 112
Tabel 2.67	Jumlah Industri Sedang dan Besar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022 .....	2 - 113
Tabel 2.68	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah) Kabupaten Bangka Barat, 2020-2022 .....	2 - 115
Tabel 2.69	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase) .....	2 - 116
Tabel 2.70	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 118
Tabel 2.71	Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 .....	2 - 120
Tabel 2.72	Jumlah Produksi Listrik dan Daya Terpasang pada PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021.....	2 - 122
Tabel 2.73	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 125
Tabel 2.74	Rasio Ketergantungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 126



Tabel 2.75	Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan APBD Tahun 2021 .....	2 - 127
Tabel 2.76	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.....	2 - 131
Tabel 2.77	Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022.....	2 - 137
Tabel 2.78	Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	2 - 140
Tabel 2.79	Capaian Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022.....	2 - 143
Tabel 2.80	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2022 .....	2 - 148
Tabel 2.81	Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Nasional .....	2 - 149
Tabel 2.82	Pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	2 - 149
Tabel 3.1	Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - Tahun 2024 .....	3 - 13
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 s.d. Tahun 2024 .....	3 - 16
Tabel 3.3	Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 .....	3 - 19
Tabel 3.4	Target Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 .....	3 - 22
Tabel 3.5	Rincian Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024 .....	3 - 24
Tabel 3.6	Rincian Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 – 2024 .....	3 - 25
Tabel 3.7	Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 – 2024 .....	3 - 26
Tabel 4.1	Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 .....	4 - 1
Tabel 4.2	Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	4 - 2
Tabel 4.3	Keselarasan Tema Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	4 - 5
Tabel 4.4	Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tingkat Nasional .....	4 - 8
Tabel 4.5	Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	4 - 11
Tabel 4.6	Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	4 - 17
Tabel 4.7	Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan dan Sasaran Daerah.....	4 - 27



Tabel 4.8	Sasaran, Indikator serta Target Indikator Pembangunan Daerah Tahun 2024 .....	4 - 28
Tabel 4.9	Keterkaitan antara Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	4 - 29
Tabel 4.10	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	4 - 33
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024.....	4 - 40
Tabel 4.12	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Nasional .....	4 - 52
Tabel 4.13	Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Provinsi .....	4 - 64
Tabel 4.14	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).....	4 - 35
Tabel 4.15	Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	4 - 39
Tabel 5.1	Pagu Indikatif berdasarkan Urusan Tahun 2024 .....	5 - 13
Tabel 5.2	Pagu Indikatif berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024 .....	5 - 16
Tabel 5.3	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bangka Barat .....	5 - 17
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	6 - 1
Tabel 6.2	Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 .....	6 - 13





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Dokumen RKPD .....	1 - 3
Gambar 1.2	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran .....	1 - 6
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 2
Gambar 2.2	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar) .....	2 - 5
Gambar 2.3	Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar) .....	2 - 6
Gambar 2.4	Luasan Kawasan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha) .....	2 - 7
Gambar 2.5	Peta Penggunaan Lahan Existing Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 9
Gambar 2.6	Peta Sebaran Kulong di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 10
Gambar 2.7	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat.....	2 - 12
Gambar 2.8	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya.....	2 - 14
Gambar 2.9	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017- 2022 .....	2 - 16
Gambar 2.10	Indeks Pembangunan Manusia se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 .....	2 - 17
Gambar 2.11	PDRB ADHB, ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 19
Gambar 2.12	PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018- 2022 .....	2 - 21
Gambar 2.13	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (juta rupiah).....	2 - 22
Gambar 2.14	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 -2022 .....	2 - 23
Gambar 2.15	Perkembangan Jumlah dan Angka Krimilitas per 10.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 .....	2 - 25
Gambar 2.16	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018- 2022 .....	2 - 26
Gambar 2.17	APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 27
Gambar 2.18	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022 .....	2 - 28
Gambar 2.19	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 .....	2 - 28
Gambar 2.20	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 .....	2 - 29



Gambar 2.21	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 .....	2 - 30
Gambar 2.22	Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 33
Gambar 2.23	Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu per per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 34
Gambar 2.24	Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 -2022 .....	2 - 35
Gambar 2.25	Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 .....	2 - 35
Gambar 2.26	Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2022 .....	2 - 36
Gambar 2.27	Jumlah Sanggar Kesenian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 .....	2 - 38
Gambar 2.28	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 42
Gambar 2.29	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 42
Gambar 2.30	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 .....	2 - 43
Gambar 2.31	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022 .....	2 - 45
Gambar 2.32	Angka Melanjutan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (persentase) .....	2 - 50
Gambar 2.33	Jumlah Posyandu, Persentase Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 51
Gambar 2.34	Perkembangan Luasan RTH (Ha) Publik di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 57
Gambar 2.35	Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Ilmau..	2 - 60
Gambar 2.36	Kondisi Pantai Tanjung Ular .....	2 - 61
Gambar 2.37	Persentase Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 62
Gambar 2.38	Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Barat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 62
Gambar 2.39	Indikator Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 63
Gambar 2.40	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 64
Gambar 2.41	Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 .....	2 - 70
Gambar 2.42	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 .....	2 - 70



Gambar 2.43	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaataan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	2 – 73
Gambar 2.44	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel dalam 3 bulan terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022 .	2 – 82
Gambar 2.45	Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 bulan terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022 .....	2 – 82
Gambar 2.46	Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 83
Gambar 2.47	Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 84
Gambar 2.48	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020.....	2 - 85
Gambar 2.49	Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada Perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017– 2021 .....	2 - 86
Gambar 2.50	Pertambahan Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (miliar rupiah) .....	2 - 86
Gambar 2.51	Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 .....	2 - 88
Gambar 2.52	Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 .....	2 - 90
Gambar 2.53	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 .....	2 - 93
Gambar 2.54	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 .....	2 - 94
Gambar 2.55	Jumlah Judul Buku, Jumlah Koleksi Buku dan Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2022 .....	2 - 94
Gambar 2.56	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 95
Gambar 2.57	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 .....	2 - 99
Gambar 2.58	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 - 102
Gambar 2.59	Jumlah Produksi (ton) dan Produktivitas (ton/ha) Padi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 .....	2 - 103
Gambar 2.60	Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (ton) .....	2 - 104
Gambar 2.61	Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 107
Gambar 2.62	Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat .....	2 - 108



Gambar 2.63	Nilai, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 - 110
Gambar 2.64	Jumlah Pertokoan di Kabupaten Bangka Barat per Kecamatan Tahun 2018-2020 .....	2 - 111
Gambar 2.65	Jumlah dan Pertumbuhan IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 .....	2 - 112
Gambar 2.66	Laju Pertumbuhan dan Peranan Komsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (persen).....	2 -114
Gambar 2.67	Pengeluaran Komsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bagka Barat Tahun 2018-2022 .....	2 -114
Gambar 2.68	Produktifitas Total Daerah dan Jumlah engkatan Kerja Kabbupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 -116
Gambar 2.69	Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 .....	2 -117
Gambar 2.70	Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 .....	2 -118
Gambar 2.71	Nilai Subsektor Makan Minum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022.....	2 -121
Gambar 2.72	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2022.....	2 -124
Gambar 2.73	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020 dan 2021 .....	2 -129
Gambar 2.74	Rata-rata Capaian Knerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2021 .....	2 -129
Gambar 2.75	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV Tahun 2021 dan 2022 .....	2 -138
Gambar 2.76	Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2022 .....	2 -139
Gambar 3.1	Capaian Pengeluaran Perkapita (dalam ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Perkapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 .....	3 - 8
Gambar 3.2	Data Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024 .....	3 - 24





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selanjutnya dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen rencana pembangunan secara sistematis, terukur, terarah dan berorientasi pada hasil serta berkelanjutan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kabupaten Bangka Barat disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan perencanaan pembangunan sampai pada penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pendekatan perencanaan pembangunan dalam penyusunan RPKD terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pendekatan yang berorientasi pada substansi.

Pendekatan Pembangunan yang berorientasi pada proses terdiri dari pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, atas – bawah dan bawah – atas. Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilaksanakan melalui pelaksanaan forum konsultasi publik, Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendekatan atas –

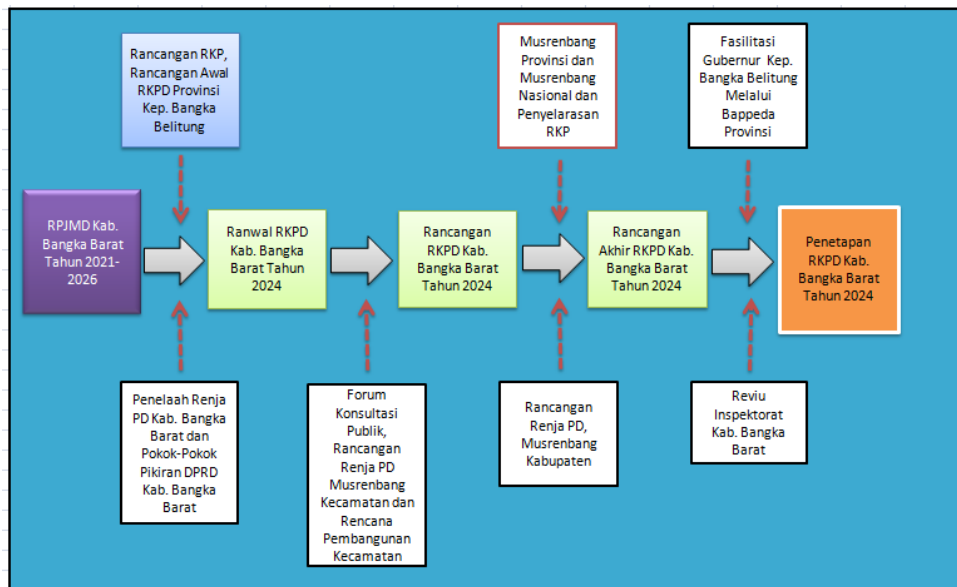


bawah dan bawah – atas merupakan hasil saran/ masukan/ arahan yang diselaraskan dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang disesuaikan dengan jenjang pelaksanaan.

Pendekatan perencanaan pembangunan yang berorientasi pada substansi terdiri dari pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah serta pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Berdasarkan pendekatan perencanaan tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan tahapan dan proses sebagai berikut :

1. Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode 2021-2026 Tahun ke III, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Rancangan awal RKPD Provinsi Tahun 2024, Pengendalian dan Evaluasi terhadap RKPD Tahun 2022, Berita Acara Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan hasil telaahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Rancangan RKPD dengan tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan serta penyempurnaan Rancangan Renja PD Tahun 2024 melalui Forum Perangkat Daerah dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Anggota DPRD;
3. Rancangan Akhir RKPD dengan tahapan proses penyempurnaan dokumen RKPD dan sekaligus bagian dari penyelarasan antara Daerah dan Pusat melalui kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten, Musrenbang RKPD Tingkat Provinsi, serta Musrenbang Nasional. Kemudian Rancangan Akhir RKPD dibahas kembali bersama Kepala Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dan selanjutnya dilakukan review oleh inspektorat daerah; dan
4. Penetapan RKPD merupakan proses terakhir melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah setelah dilakukan evaluasi dengan fasilitasi Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi. Selanjutnya dokumen RKPD akan menjadi acuan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD.



**Gambar 1.1** Proses Penyusunan Dokumen RKPD

Agar penyusunan RKPD Tahun 2024 memenuhi kaidah-kaidah perencanaan, maka dilakukan penelaahan terhadap beberapa materi, mencakup :

- A. Analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- B. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- C. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- D. Penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- E. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- F. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- G. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- H. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
- I. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan program strategis provinsi;
- J. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
- K. Perumusan prioritas pembangunan daerah; serta
- L. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.



## 1.2 Dasar Hukum

Landasan Hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah :

1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tata Pembantuan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



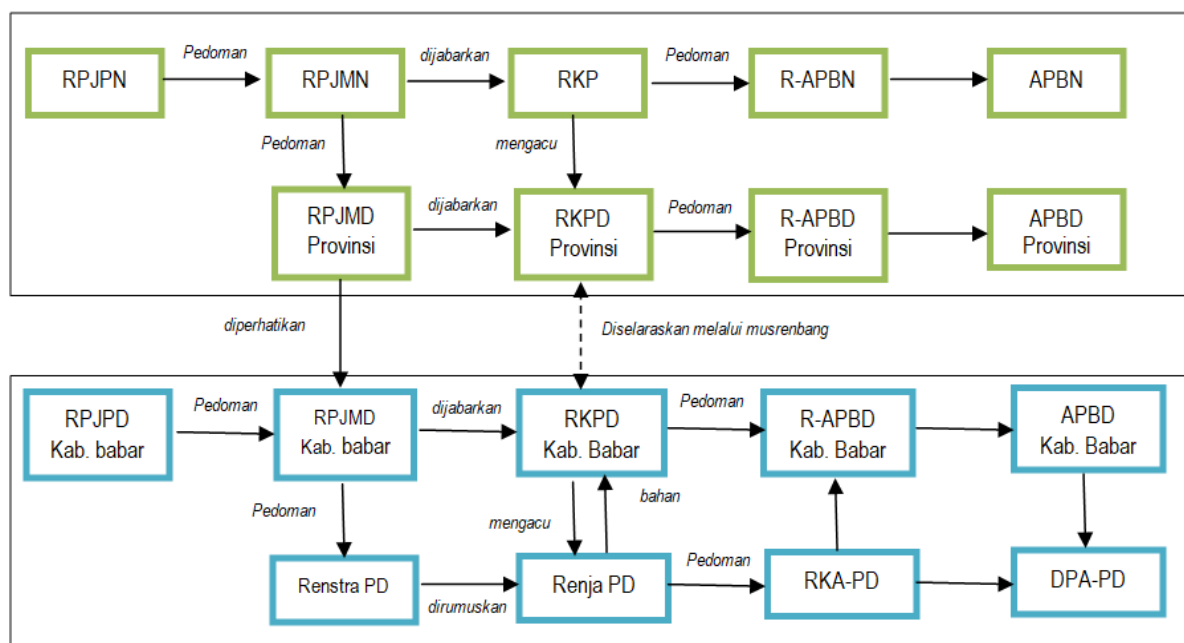


10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 09 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
  21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan dokumen yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat dilakukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan dan penganggaran. RKPD juga sebagai jembatan perencanaan pembangunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga menjadi Rancangan APBD yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah, seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dimaksudkan sebagai landasan awal dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya terkait kebijakan tema dan prioritas pembangunan yang digambarkan melalui rencana program, kegiatan serta subkegiatan strategis lengkap dengan indikator kinerja beserta target dan pagu indikatif dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2024, serta acuan untuk menyusun dokumen KUA dan PPAS APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024.

#### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD.

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2. Dasar Hukum

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik peraturan perundangan dan turunannya serta peraturan daerah yang berlaku.

##### 1.3. Hubungan Antardokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

##### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

##### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan sistematika dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.



## **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan tentang gambaran umum kondisi daerah berdasarkan urusan pemerintahan, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, serta permasalahan pembangunan yang berkaitan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

### **2.1. Kondisi Umum Daerah**

Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Berisikan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana.

#### **2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Berisikan penjelasan dan analisis kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.1.3. Aspek Pelayanan Umum**

Berisikan penjelasan dan analisis kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan yang diuraikan berdasarkan urusan pemerintahan.

#### **2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah**

Berisikan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah.

### **2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD**

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah yaitu berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD.

### **2.3. Capaian Standar Pelayanan Minimal**

Berisi uraian singkat terkait capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

### **2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.





2.4.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah

Menyajikan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas serta tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD.

2.4.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Menyajikan permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arah kebijakan dibidang ekonomi secara nasional dan kebijakan ekonomi daerah pada tahun perencanaan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Menjelaskan tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2024 dan keselarasan dengan prioritas pembangunan tingkat nasional dan provinsi serta menyajikan program pendukung prioritas nasional, provinsi dan daerah.



- 4.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum  
Menjelaskan tentang keselarasan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimum.
- 4.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan  
Menjelaskan tentang keselarasan antara Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2024.

### **5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan**

Berisi uraian rencana program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan urusan pemerintahan.

### **5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan**

Berisi uraian pagu indikatif pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan perangkat daerah.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian kinerja melalui penetapan target pada Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci.

## **BAB VII PENUTUP**

Pada bagian ini menjelaskan tentang kaedah-kaedah pelaksanaan dan operasionalisasi dari RKPD Kabupaten Bangka Barat di tahun perencanaan.



## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Daerah

Rencana pembangunan suatu daerah disusun berdasarkan pertimbangan karakteristik serta kondisi wilayah supaya pembangunan yang dilakukan dapat dijalankan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan pembangunan, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Pada bagian ini dijabarkan secara menyeluruh gambaran umum kondisi Kabupaten Bangka Barat yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan publik meliputi urusan wajib maupun pilihan, serta dari aspek daya saing daerah.

##### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

###### 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bangka Barat

###### A. Luas dan Batas

Kabupaten Bangka Barat berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 memiliki luas wilayah 284.886,05 ha.

Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi :

- Sebelah utara : Laut Natuna;
- Sebelah timur : berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat : berbatasan dengan Selat Bangka.



Sumber: RTRW Kab. Bangka Barat, Tahun 2014-2034

**Gambar 2.1** Peta Administrasi Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat secara langsung berbatasan dengan Kabupaten Bangka, yang merupakan kabupaten induknya pada era sebelum pemekaran. Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan dan 60 desa, dengan uraian per kecamatan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1** Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten  
Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
<b>Total</b>		<b>6 kelurahan, 60 desa</b>	<b>284.886,05</b>	<b>100</b>

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.





Kecamatan Simpangteritip memiliki wilayah terluas yaitu 27,54 persen dari wilayah Kabupaten Bangka Barat, sedangkan Kecamatan Parittiga memiliki wilayah terkecil yaitu sebesar 11,47 persen dari luas wilayah Kabupaten Bangka Barat. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara umum Kabupaten Bangka Barat tidak termasuk pada kategori daerah pedalaman, dan tidak ada wilayah di Kabupaten Bangka Barat yang letaknya terisolir atau terpencil yang sulit untuk diakses. Kabupaten Bangka Barat memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan  $\pm 214,85$  ha meskipun sampai dengan saat ini belum berpenghuni. Kabupaten Bangka Barat memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

#### B. Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Kondisi topografi Kabupaten Bangka Barat dilihat berdasarkan ketinggian dan kemiringan lahan. Kondisi ketinggian Kabupaten Bangka Barat mulai ketinggian 25 meter di atas permukaan laut (mdpl) sampai dengan 425 mdpl. Ketinggian 25 mdpl tersebar di seluruh kecamatan, sedangkan ketinggian 425 mdpl hanya terletak di Kecamatan Muntok, tepatnya di Bukit Menumbing atau lebih dikenal dengan sebutan Gunung Menumbing. Bukit-bukit lainnya relatif lebih rendah dari Gunung Menumbing tersebut, namun merupakan puncak relatif bagi area di sekitarnya, antara lain adalah Bukit Kelumpang, Bukit Kukus (Kecamatan Muntok), Bukit Mayang, Bukit Penyabung (Kecamatan Simpangteritip), Bukit Kebon Kapit, Bukit Pasukan, Bukit Penyabung, Sinar Kelabat (Kecamatan Jebus), Bukit Galang (Kecamatan Kelapa), dan Bukit Telimpuk (Kecamatan Tempilang).

Terkait struktur dan karakteristik geologi, tanah di wilayah Kabupaten Bangka Barat mempunyai pH rata-rata dibawah 5 yang mengandung mineral biji timah dan bahan galian lainnya, seperti: pasir kuarsa, kaolin, batu gunung, dan sebagainya. Jenis tanah di Kabupaten Bangka Barat meliputi: podsolik coklat, podsolik kuning, podsolik merah kuning, asosiasi podsolik-regosol, asosiasi podsolik litosol, regosol, gleisol, alluvial, asosiasi alluvial regosol. Di samping itu, Kabupaten Bangka Barat juga memiliki potensi kandungan mineral yang sangat beragam pula, seperti kaolin di Kelabat, pasir kuarsa di Bakit, zirkon di Semulut, batu granit di Air Putih, bauksit di Teluk Limau, dan mineral timah yang sudah terkenal sejak zaman penjajahan atau dikenal juga dengan istilah daerah sabuk timah.

Terkait hidrologi, Kabupaten Bangka Barat memiliki 87 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas keseluruhan 96.513 Ha, dimana DAS Mancung dengan luas 59.844 Ha merupakan DAS terluas. Kabupaten Bangka Barat memiliki 470 sungai yang tersebar



di seluruh kecamatan. Secara umum, kerusakan lingkungan juga terjadi pada DAS di Kabupaten Bangka Barat seperti mulai berkurangnya debit dan menurunnya kualitas air karena aktifitas masyarakat yang kurang memperhatikan lingkungan sekitar khususnya DAS.

Iklm di Kabupaten Bangka Barat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu iklim tropis dan basah. Iklim tropis dan iklim basah merupakan daerah dengan bulan basah selama 7-9 bulan dan bulan kering selama 3 bulan per tahun pada keadaan normal. Berdasarkan hasil digitasi peta curah hujan Kabupaten Bangka Barat yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), tingkat curah hujan tertinggi sebesar 3000-3200 mm/tahun dan terendah pada kisaran antara 2500-2700 mm/tahun. Intensitas curah hujan tertinggi terletak di daerah Bakit Kecamatan Parittiga, sedangkan tingkat curah hujan terendah terletak di Kecamatan Muntok, Tempilang, dan sebagian besar Kecamatan Simpangteritip. Variasi curah hujan berkisar antara 84,5 mm-406,1 mm setiap bulannya dengan curah hujan terendah pada bulan Februari.

Kabupaten Bangka Barat juga memiliki intensitas penyinaran matahari rata-rata bervariasi, yakni antara 19,0-57,3 persen dengan tekanan udara antara 1.008,9-1.011,1 mbs. Arah angin terbanyak terjadi di bulan Desember dan Januari yang berasal dari arah utara, arah angin bulan April berasal dari arah barat, sedangkan pada bulan berikutnya bergeser ke arah selatan, tenggara, timur, dan pada bulan November kembali ke arah barat.

Suhu udara per bulannya antara 26,20°C sampai 27,80°C dengan tingkat kelembaban rata-rata 80 - 87 persen. Intensitas curah hujan di Kabupaten Bangka Barat Hampir sama dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional (2.364,25 mm/tahun). Adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi ini berpotensi meningkatkan persediaan air, baik air tanah maupun air permukaan jika lingkungan tetap terjaga dengan baik.

### C. Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan berada pada kawasan budidaya yang secara detail penataan ruang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 terdiri dari Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan budidaya secara detail diperuntukkan untuk kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan perkotaan dan permukiman perdesaan, serta untuk kawasan peruntukan lainnya.

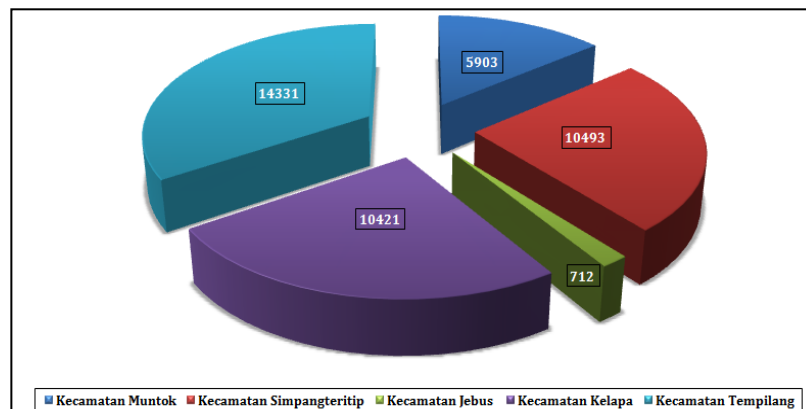
## 1. Kawasan Budidaya

- Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bangka Barat tersebar disemua Kecamatan dengan total luasan mencapai  $\pm 77.742$  Ha yang terdiri dari hutan tanaman industri, hutan tanaman rakyat, hutan kemasyarakatan, hutan desa, serta hutan tanaman hasil rehabilitasi.
- Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bangka Barat dengan total luasan  $\pm 2.050$  Ha juga tersebar di semua kecamatan. Kecamatan yang memiliki kawasan peruntukan hutan rakyat yang terluas yaitu Kecamatan Simpangteritip dengan luasan  $\pm 851$  Ha, dan diikuti dengan Kecamatan Kelapa dengan luasan  $\pm 741$  Ha.
- Terkait kawasan peruntukan pertanian diklasifikasi menjadi empat (4) yaitu untuk peruntukan pertanian tanaman pangan, peruntukan pertanian hortikultur, peruntukan peternakan serta peruntukan perkebunan.

Untuk Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan mempunyai luasan  $\pm 15.812$  Ha, akan tetapi sebagian besar kawasan tersebut ( $\pm 11.099$ ) berada di kawasan hutan. Untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultur mempunyai luasan  $\pm 1.598$  Ha. Untuk kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Muntok dan Kecamatan Jebus dengan luasan  $\pm 72$  Ha.

Terkait kawasan peruntukan perkebunan dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu kawasan peruntukan perkebunan besar serta kawasan peruntukan perkebunan rakyat. Luasan kawasan peruntukan perkebunan  $\pm 121.645$  ha dipilah menjadi  $\pm 41.860$  Ha untuk peruntukan perkebunan besar dan  $\pm 79.785$  Ha untuk peruntukan perkebunan rakyat.

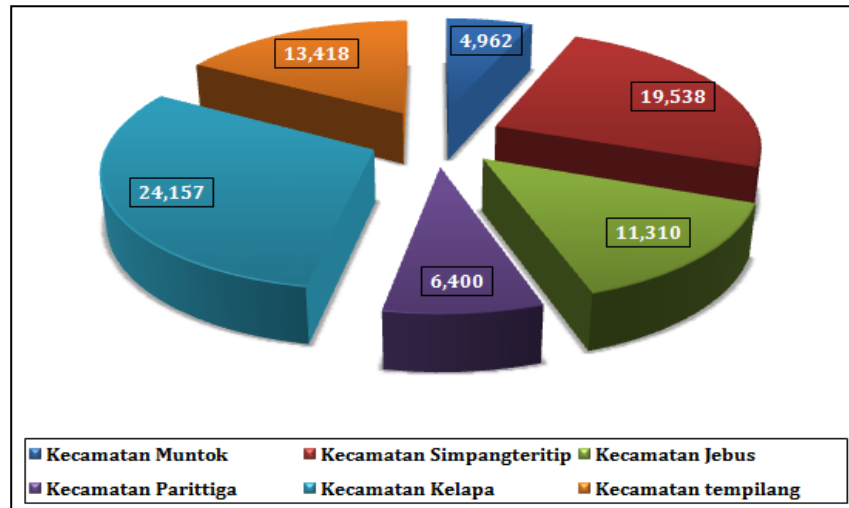
Kawasan peruntukan perkebunan besar di Kabupaten Bangka Barat tersebar hampir di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Paritiga. Secara detail terkait luasan per kecamatan terkait kawasan peruntukan perkebunan besar dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

**Gambar 2.2** Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Besar Per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (hektar)

Kawasan peruntukan perkebunan rakyat di Kabupaten Bangka Barat tersebar di semua kecamatan. Dari luasan perkebunan rakyat sebesar  $\pm 79.785$  Ha, terdapat  $\pm 166$  Ha berada di kawasan hutan produksi. Secara detail luasan per kecamatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, 2014.

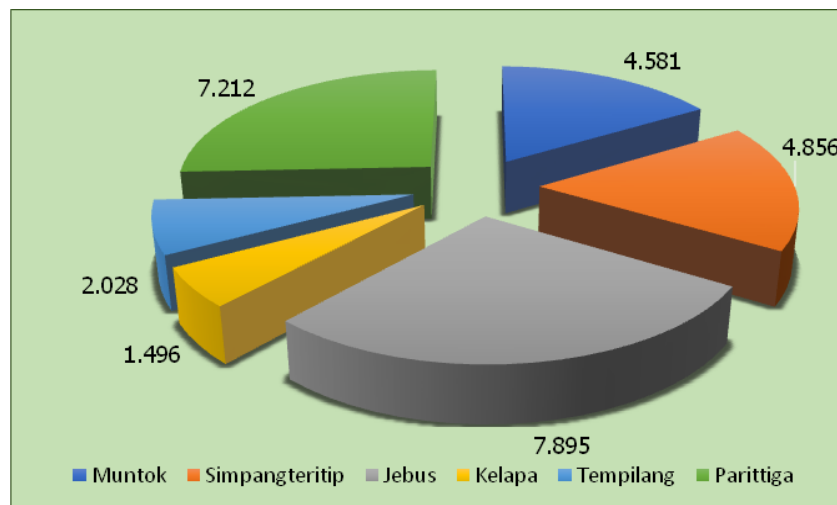
**Gambar 2.3** Luasan Kawasan Peruntukan Perkebunan Rakyat Per Kecamatan Kabupaten Bangka Barat (hektar)

- d. Kawasan Peruntukan Perikanan secara umum dibagi menjadi 3 (tiga) klasifikasi yaitu peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan (air tawar dan air payau) serta peruntukan pengolahan hasil perikanan. Kawasan peruntukan perikanan saat ini telah didukung dengan adanya pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) dan tempat pelelangan ikan (TPI) yang berlokasi di Kecamatan Muntok, serta didukung oleh balai benih ikan lokal (BBIL) di Kecamatan Kelapa.
- e. Kawasan Peruntukan Pertambangan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat. Akan tetapi sampai dengan saat ini masih banyak kawasan peruntukan pertambangan yang belum dikelola dan terdapat juga ruang pasca tambang yang sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan sebagai kegiatan pembudidayaan kawasan.
- f. Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Bangka Barat terdapat di Kecamatan Muntok yang dibagi menjadi dua kawasan industri yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Tanjung Ular dengan luas  $\pm 1.275$  Ha serta kawasan industri di sekitar tanjung kalian dengan luas  $\pm 139$  Ha.
- g. Kawasan peruntukan pariwisata dibagi menjadi 3 (tiga) satuan kawasan wisata (SKW) yaitu SKW I yang terdapat di Kecamatan Muntok dan Kecamatan Simpangteritip, SKW II yang terdapat di Kecamatan Jebus dan Kecamatan Parittiga, serta SKW III yang terdapat di Kecamatan Kelapa dan Kecamatan Tempilang.

- h. Kawasan Peruntukan Perkotaan dan Permukiman Perdesaan di Kabupaten Bangka Barat tersebar di seluruh kecamatan. Luasan Kawasan Perkotaan yang ada yaitu  $\pm 9.331$  Ha serta luasan Kawasan Permukiman Perdesaan yang ada yaitu  $\pm 11.987$  Ha.

## 2. Kawasan Lindung

Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup sumber alam, sumber daya buatan, nilai sejarah dan budaya bangsa guna kepentingan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, kawasan lindung terdiri dari kawasan hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, hutan konservasi, pantai berhutan bakau, dan hutan cagar budaya, serta ilmu pengetahuan. Kawasan hutan lindung terdapat di pulau utama/induk Pulau Bangka yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luas  $\pm 28.068$  ha. Dari 6 kecamatan tersebut, Kecamatan Jebus memiliki kawasan hutan lindung terluas yaitu 7.895 ha (28%), sedangkan Kecamatan Kelapa memiliki kawasan hutan lindung terkecil yaitu 1.496 ha (6%).



sumber: RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034

**Gambar 2.4** Luasan Kawasan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat (ha)

Selain itu, di Kabupaten Bangka Barat terdapat pula Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestraian Alam (KPA) dan cagar budaya

- KSA/KPA Menumbing seluas  $\pm 3.333$  ha yang terdapat di Kecamatan Muntok;
  - KSA/KPA Jering Menduyung seluas  $\pm 3.538$  ha yang terdapat di Kecamatan Simpangteritip; dan seluas  $\pm 71$  ha yang terdapat di Kecamatan Tempilang;
  - KSA/KPA Gunung Maras seluas  $\pm 1.216$  ha yang terdapat di Kecamatan Kelapa;
- dan



- d. Pulau-pulau kecil yang tersebar di setiap kecamatan dijadikan sebagai kawasan konservasi dengan luas  $\pm 185$  ha, kecuali Pulau Nanas yang direncanakan sebagai kawasan wisata pulau kecil dengan luas  $\pm 27$  ha. Kawasan Pantai berhutan mangrove tersebar di semua kecamatan dengan total luas 22.640 ha. Kecamatan Simpangteritip memiliki luasan terbesar pantai berhutan mangrove dengan luas 6.354 ha dan Kecamatan Parittiga memiliki luasan pantai berhutan mangrove terkecil, yakni seluas 1.508 ha.

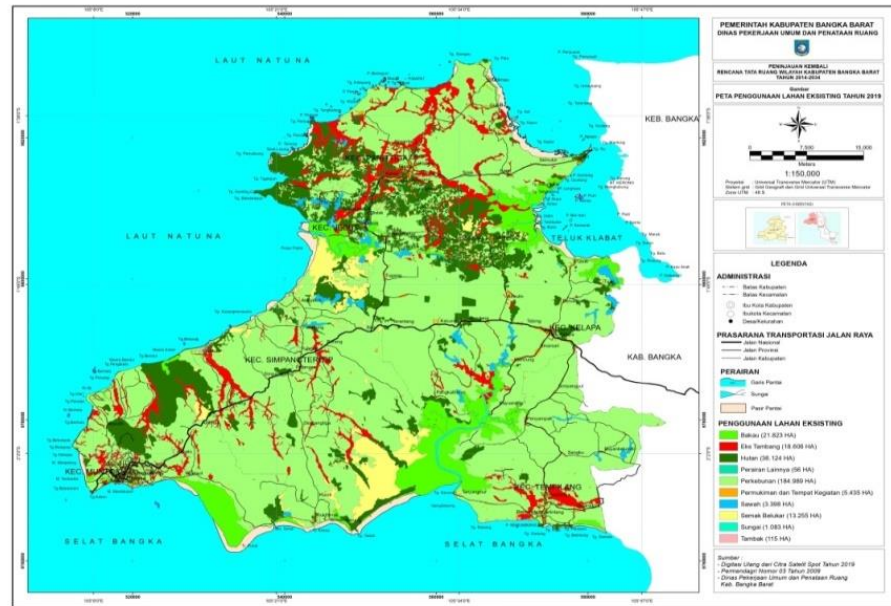
Berdasarkan kegiatan peninjauan kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014 -2034 yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kondisi penggunaan lahan *existing* tahun 2019 di Kabupaten Bangka Barat secara rinci.

**Tabel 2.2** Penggunaan Lahan *Existing*  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Mangrove/bakau	21.823
2	Eks tambang	18.606
3	Hutan	36.124
4	Perairan lainnya	56
5	Perkebunan	184.989
6	Permukiman dan tempat kegiatan	5.435
7	Sawah	3.398
8	Semak belukar	13.255
9	Sungai	1.083
10	Tambak	115

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2020.

Lahan di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar digunakan untuk perkebunan seluas 184.989 ha. Selain itu, peruntukkan hutan seluas 36.124 ha, kawasan mangrove seluas 21.823 ha, dan lahan bekas pertambangan timah seluas 18.606 ha. Penggunaan lahan terkecil untuk perairan lainnya seluas 56 ha.



Sumber: PK RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014–2034, 2020

**Gambar 2.5** Peta Penggunaan Lahan Existing Kabupaten Bangka Barat

Tipe penggunaan lahan bekas tambang timah merupakan empat teratas dalam penggunaan lahan existing di Kabupaten Bangka Barat seluas 18.606 ha. Hal ini disebabkan Kabupaten Bangka Barat merupakan kabupaten potensial di sektor pertambangan dan penggalian. Pertambangan yang paling banyak dilakukan adalah pertambangan bijih timah. Namun kegiatan pertambangan timah, terutama pertambangan ilegal ini akan meninggalkan lubang-lubang bekas galian yang tergenang oleh air yang biasa disebut *kulong*.

**Tabel 2.3** Jumlah *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Kulong
1	Jebus	839
2	Kelapa	225
3	Muntok	481
4	Parittiga	1.216
5	Simpangteritip	1.011
6	Tempilang	264
<b>Total</b>		<b>4.036</b>

Sumber Inventarisasi dan Model Pemanfaatan Kulong di Bangka Belitung, 2020.

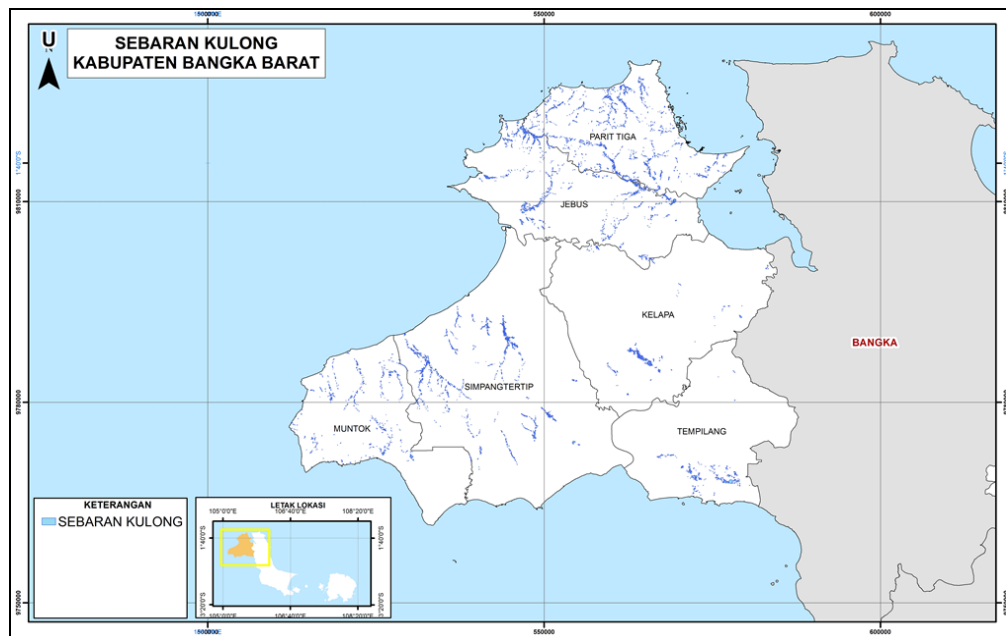
Sebaran kulong di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berada di dalam kawasan hutan sebanyak 2.524 kulong seluas 1.161.043 ha. Jumlah kulong terbanyak berada di Hutan Produksi (HP) sebanyak 2.097 kulong seluas 916,974 ha. Selain itu, terdapat juga di Area Penggunaan Lain (APL) di luar Hutan Produksi sebanyak 1,512 kulong seluas 711,547 ha. Di kawasan Hutan Lindung terdapat 377

kulong seluas 228,037 ha sedangkan jumlah kulong yang paling sedikit terdapat di kawasan KPA/KSA yaitu sebanyak 50 kulong seluas 16,033 ha. Adanya *kulong* di kawasan HL dan KSA/KPA menandakan bahwa kegiatan pertambangan atau pembukaan lahan telah dilakukan secara ilegal

**Tabel 2.4** Sebaran *Kulong* Berdasarkan Kawasan Hutan Tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kulong
1.	APL	711.547	1.512
2.	HL	228.037	377
3.	HP	916.974	2.097
4.	KPA/KSA	16.033	50
<b>Total</b>		<b>1.872.591</b>	<b>4.036</b>

sumber: Inventarisasi dan Model Pemanfaatan *Kulong* di Bangka Belitung, 2021.



sumber: Inventarisasi dan Model Pemanfaatan *Kulong* di Bangka Belitung, 2020

**Gambar 2.6** Peta Sebaran *Kulong* di Kabupaten Bangka Barat

Keberadaan *kulong* dari kegiatan pertambangan mengindikasikan bahwa suatu kawasan telah mengalami degradasi mutu lingkungan atau dengan kata lain lingkungan tersebut telah rusak. Akan tetapi, kerusakan tersebut dapat diminimalisasi dengan upaya pemulihan kesehatan lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan *kulong*. Hal ini cukup beralasan, mengingat banyaknya jumlah *kulong* dan sangat potensial untuk dimanfaatkan. Adanya pemanfaatan *kulong* juga bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sumber daya *kulong* dengan karakteristiknya masing-masing dapat menjadi potensi yang berpeluang dimanfaatkan untuk budidaya perikanan, sumber air baku, mandi dan mencuci, serta pariwisata.

*Kulong* di Kabupaten Bangka Barat yang telah dimanfaatkan adalah *Kulong* Sekar Biru menjadi tempat ekowisata, *Kulong* PAM Perumnas digunakan sebagai sumber air baku, dan *Kulong* PDAM Menumbing. Selain itu, *kulong* yang berpotensi dikembangkan sebagai tempat ekowisata karena memiliki keunikan karakteristik warna *kulong*, keberadaan *kulong* di luar kawasan hutan, dan pengembangan yang telah dilakukan oleh masyarakat sekitar adalah *Kulong* Telaga Biru Muntok.

#### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Bangka Barat

Kabupaten Bangka Barat memiliki posisi yang strategis sebagai pintu masuk regional Sumatera yang menggunakan jalur laut. Sistem perkotaan wilayah Kabupaten Bangka Barat meliputi susunan hirarki perkotaan yaitu terdapat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034, rencana pengembangan sistem perkotaan Kabupaten Bangka Barat meliputi:

- a. Kota Muntok ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- b. Kota Kelapa dan Kota Paritiga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- c. Pelangas, Airputih, Jebus, Tempilang, Bakit, dan Ibul ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan
- d. Airnyatoh, Kundi, Rukam, Kapit, Cupat, Kacung, Pusuk, Kayuarang, Penyampak, dan Sangku ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL).

Pemerintah menetapkan beberapa kawasan strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai prioritas dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten Bangka Barat meliputi :

##### a. Kawasan Strategis Provinsi :

1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular (Kecamatan Muntok).
2. Kepentingan sosial budaya yaitu Kawasan konservasi budaya "Muntok Lama" Kecamatan Muntok.
3. Kepentingan Fungsi dan daya Dukung lingkungan yaitu Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Gunung Menumbing dan Jering Menduyung.

##### b. Kawasan strategis Kabupaten:

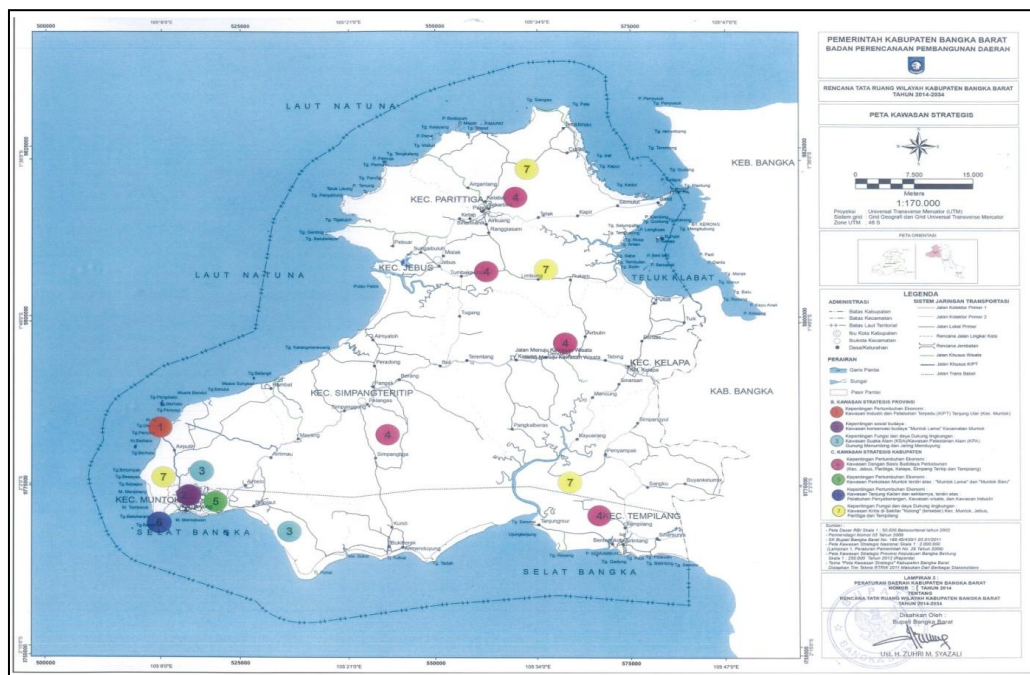
1. Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu :

- Kawasan dengan Basis Budidaya Perkebunan, yaitu Kecamatan Jebus, Kelapa, Simpang Teritip, dan Tempilang.
- Kawasan Perkotaan Muntok di Kecamatan Muntok terdiri atas; "Muntok Lama" dan "Muntok Baru".
- Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular di Kecamatan Muntok.
- Kawasan Tanjung Kalian dan sekitarnya, terdiri atas Pelabuhan Penyeberangan, Kawasan wisata, dan Kawasan Industri.

## 2. Kepentingan sosial dan budaya

Kawasan strategis yang ditetapkan adalah kawasan konservasi budaya Muntok Lama di Kecamatan Muntok yang akan dikembangkan dan ditata untuk pemanfaatan wisata budaya dan ilmu pengetahuan.

## 3. Kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Kritis di sekitar "Kulong" tersebar di Kecamatan Muntok, Jebus, Parittiga dan Tempilang.



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

**Gambar 2.7** Peta Kawasan Strategis Kabupaten Bangka Barat

## 4. Potensi Wisata

Kawasan peruntukan pariwisata berdasarkan RTRW Kabupaten Bangka Barat 2014—2034 dibagi menjadi 3 SKW (Satuan Kawasan Wisata), yaitu:

- a. SKW I meliputi Kecamatan Muntok dan Simpangteritip. Objek wisata yang ada di SKW I terdiri dari:





1) Wisata Alam: Pantai Tanjung Kalian, Tanjung Ular, Pantai Bidadari, Pantai Muntok Asin, Pantai Batu Rakit, Pantai Air Mas Rambat, Pantai Air Nyatoh, Pantai Menggris dan Pantai Karang Aji, Gunung Menumbing, Batu Balai, Tanah Merah, Tungau, dan Mentiba.

2) Wisata Budaya: Pesanggrahan Menumbing, Pesanggrahan Muntok, Rumah Mayor Chung A Thiam, Masjid Jami Muntok, Kelenteng Cina Muntok, Peleburan Timah Muntok, Makam Keluarga Abdi Dalem Hamengkubuwono IX, BTW, Makam Bangsawan Melayu, dan Kampung Melayu.

b. SKW II meliputi Kecamatan Jebus dan Parittiga. Objek wisata yang ada di SKW II terdiri dari:

1) Wisata Alam: Pantai Tanjung Ru, Pulau Nanas, Pantai Blembang, Bukit Mempari, Kebun Teh Tayu, Pulau Beri-Beri, Bembang, Siangau, dan Pala Jebu.

2) Wisata Budaya: Kelenteng Cina, Makam Haji Khotamarrayid Bin H. Usman, Sembahyang Bulan, dan Sembahyang Kubur.

c. SKW III meliputi Kecamatan Tempilang dan Kelapa, terdiri dari kawasan:

1) Wisata Alam: Pantai Pasir Kuning, Pantai Kedacak, Air Panas Dendang, perkebunan sawit, sarang burung walet.

2) Wisata Budaya: Benteng Kota Tempilang.

Adapun Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat (KPPK) terdiri dari:

a. KPPK Pariwisata Budaya Bahari Simpangteritip dan sekitarnya;

b. KPPK Pariwisata Minat Khusus Alam dan Pesisir Jebus sekitarnya;

c. KPPK rest area wilayah Kelurahan Kelapa dan sekitarnya; dan

d. KPPK Pariwisata Budaya atau Tradisi Tempilang dan sekitarnya.

### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan analisis dan kondisi alam lingkungan, potensi bahaya beraspek geologi di Kabupaten Bangka Barat yang utama adalah daerah berpotensi banjir/genangan dan daerah berpotensi abrasi.

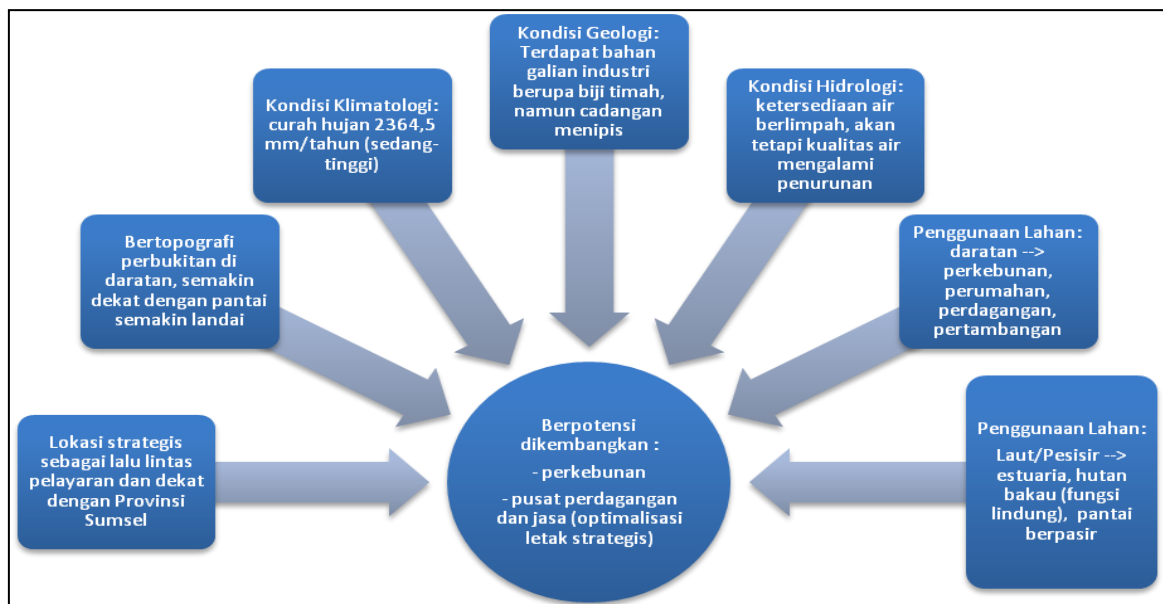
Banjir yang terjadi di Kabupaten Bangka Barat diakibatkan oleh faktor alam dan kerusakan lingkungan. Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bangka Barat terletak di Ibukota Kecamatan Muntok khususnya di daerah Teluk Rubiah, Tanjung, dan Ibukota Kecamatan Parittiga yaitu Desa Puput. Sementara daerah pesisir pantai yang berpotensi mengalami bencana abrasi adalah Desa Teluk Limau Kecamatan Parittiga dan Desa Benteng Kota Kecamatan Tempilang.

**Tabel 2.5** Jumlah Bencana Alam di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JENIS BENCANA					
		PETIR	SAR	ANGIN KENCANG	TANAH LONGSOR	BANJIR	BANJIR BANDANG
1.	KELAPA	1	1	1			
2.	TEMPILANG	1					
3..	MUNTOK		4	5			
4.	SIMPANGTERITIP	1		1			
5.	JEBUS						
6.	PARITTIGA	1					

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Dari gambaran kondisi umum geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan kondisi wilayah rawan bencana, dapat tergambar keterhubungan ketiga kondisi tersebut sebagai berikut:



Sumber : RPJPD Kab. Bangka Barat Tahun 2005-2025

**Gambar 2.8** Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Budidaya

Potensi pengembangan wilayah dengan mengoptimalkan kondisi geografis mengarah pada dua hal, yaitu potensi di sektor pertanian (dalam hal ini perkebunan) dan sektor perdagangan dan jasa. Perkebunan cenderung dapat dilakukan dengan kondisi topografi berupa berbukitan dan tanah yang memiliki tingkat kesuburan “sedang”. Sedangkan perdagangan dan jasa, dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan letak Kabupaten Bangka Barat sebagai jalur lalu lintas laut yang melewati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, keindahan ekosistem pantai dapat menjadi daya tarik tersendiri dan dimungkinkan untuk pengembangan sektor pariwisata sebagai turunan sektor perdagangan dan jasa.

#### 2.1.1.4 Kondisi Demografi Kabupaten Bangka Barat

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebanyak 209.791 jiwa. Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 54.239 jiwa atau 25,85 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk terendah dengan jumlah penduduk 22.890 jiwa atau 11,06 persen.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 terdiri dari 108.102 jiwa laki-laki (51,53 persen) dan 101.689 jiwa perempuan (48,47 persen). Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 106.205 jiwa laki-laki (51,49 persen) dan 100.041 jiwa perempuan (48,51 persen) pada Tahun 2021. Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 – 2022

NO.	KECAMATAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Muntok	27.099	26.362	53.388	27.547	26.692	54.239
2	Simpangteritip	15.856	15.145	30.937	16.117	15.401	31.518
3	Jebus	11.744	10.994	22.672	11.968	11.225	23.193
4	Kelapa	18.259	16.722	35.032	18.502	16.961	35.463
5	Tempilang	14.923	13.672	28.552	15.206	13.874	29.080
6	Parittiga	18.344	17.146	35.425	18.762	17.536	36.298
<b>TOTAL</b>		<b>106.205</b>	<b>100.041</b>	<b>206.246</b>	<b>108.102</b>	<b>101.689</b>	<b>209.791</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Barat, Tahun 2023.

#### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

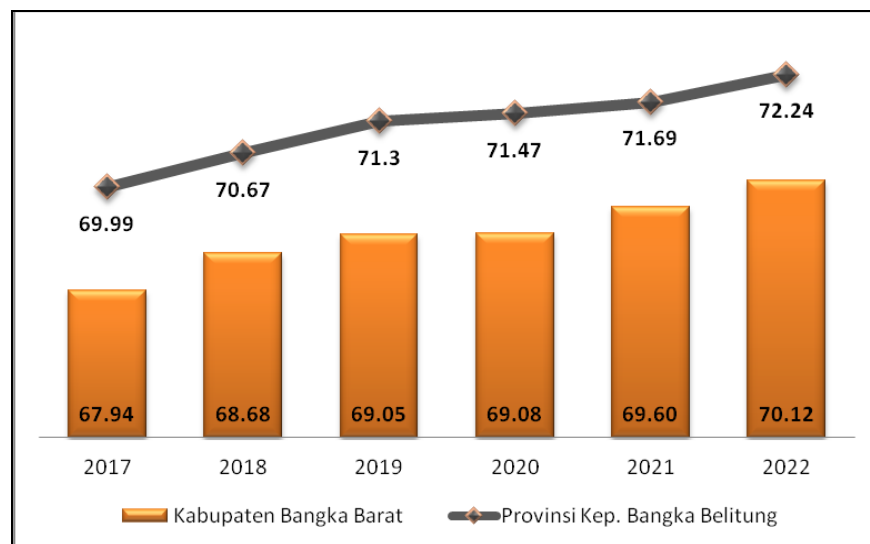
##### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Dalam menganalisis kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dapat ditinjau melalui empat aspek analisis, yaitu (1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (2) PDRB Per Kapita; (3) Angka Kemiskinan; dan (4) Angka Kriminalitas. Selanjutnya, melalui analisis empat aspek ini diharapkan mampu memproyeksikan rencana pembangunan jangka menengah dalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Jika dilihat dari perkembangan IPM Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2017 sampai tahun 2022 kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat secara nasional mengalami peningkatan. Hal ini seiring dengan peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, serta dimensi standar hidup layak. Pada tahun 2022, dimensi umur panjang dan hidup layak sehat yang diukur berdasarkan umur harapan hidup dan lahir (UHH) meningkat 0,17 tahun atau 0,24 persen dari 70,08 tahun menjadi 70,25 tahun. Harapan lama sekolah (HLS) dalam dimensi pengetahuan juga meningkat 0,02 tahun atau 0,15 persen dari 11,70 tahun menjadi 11,72 tahun. Kemudian, rata-rata lama sekolah (RLS) dalam dimensi yang sama meningkat dari 7,44 tahun menjadi 7,46 tahun. Sementara, dimensi hidup layak yang berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun sebesar Rp12,80 juta. Jumlah itu meningkat Rp521.000,00 atau 4,25 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp12,27 juta.

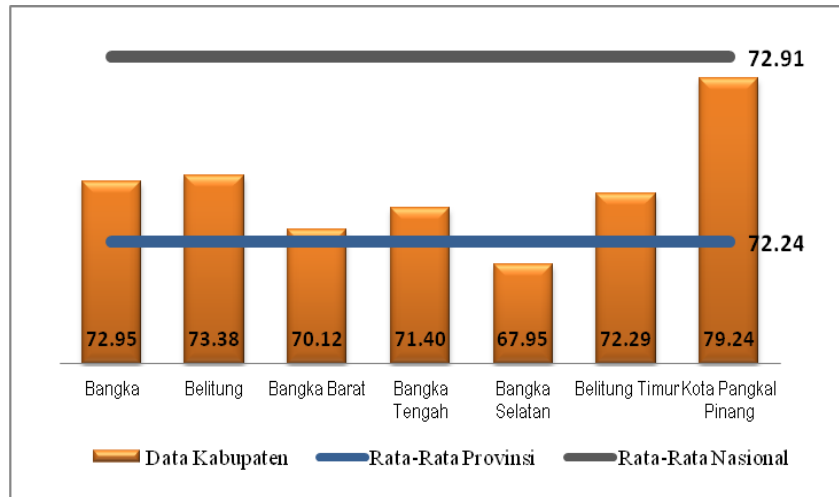


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023.

**Gambar 2.9** Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022

IPM Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 sebesar 70,12 atau tumbuh 0,74 persen dibandingkan capaian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota

lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka IPM Kabupaten Bangka Barat tergolong masih rendah bahkan selama lima tahun terakhir selalu menduduki peringkat ke 6 atau terendah setelah Kabupaten Bangka Selatan. Sementara dibandingkan dengan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 72,24 dan IPM Nasional mencapai 72,91, IPM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 cukup jauh tertinggal dengan perbedaan 2,12 poin dari IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 2,79 poin dari IPM Nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023.

**Gambar 2.10** Indeks Pembangunan Manusia se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

#### b. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak pembangunan yang dilaksanakan di suatu wilayah, khususnya di bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) secara berkala.

**Tabel 2.7** Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020 <sup>r</sup>	2021 <sup>*</sup>	2022 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,57	(0,10)	3,53	0,01	4,03
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	1,39	(13,82)	10,11	1,82
C	Industri Pengolahan	6,97	12,46	(7,00)	(4,46)	(1,03)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,55	15,06	19,30	8,54	(3,58)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	2,01	7,50	3,97	3,31



Kategori	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020 <sup>r</sup>	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
F	Konstruksi	7,23	3,85	(1,46)	1,71	1,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,53	2,55	(6,17)	5,81	9,21
H	Transportasi dan Pergudangan	6,54	3,34	(12,99)	8,29	11,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,80	3,70	(0,65)	6,29	9,94
J	Informasi dan Komunikasi	10,51	12,55	18,32	5,93	8,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,55	7,14	(0,44)	5,36	8,60
L	Real Estate	7,29	1,57	5,02	4,29	8,19
M,N	Jasa Perusahaan	4,49	0,37	(9,11)	4,09	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,08	6,08	(0,63)	4,64	(0,44)
P	Jasa Pendidikan	9,12	6,01	(0,77)	1,86	3,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,52	7,37	1,07	9,24	2,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,13	4,48	(4,69)	2,20	7,40
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>5,20</b>	<b>7,06</b>	<b>(5,35)</b>	<b>0,20</b>	<b>2,01</b>

Keterangan : r) angka revisi

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

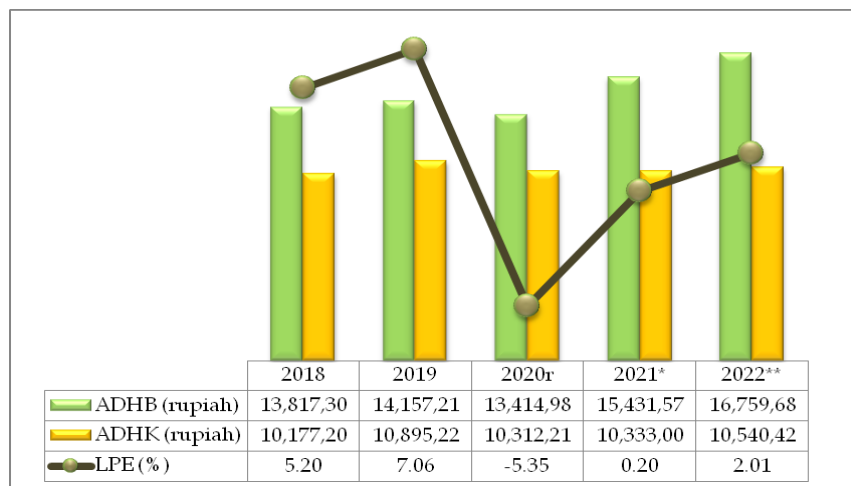
Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 mencapai Rp10,54 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2021 mencapai Rp10,33 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2022.

Selama tahun 2022, hampir seluruh kategori lapangan usaha tumbuh positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun tiga sektor lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bangka Barat terbesar di Tahun 2022 yaitu Transportasi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Perdagangan. Beberapa kategori yang mengalami kontraksi adalah Administrasi dan Pemerintahan, Pengadaan Listrik dan Gas, dan Industri pengolahan. Sektor Industri Pengolahan sebagai kategori dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Bangka Barat justru mengalami kontraksi sebesar 1,03 persen secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini didominasi oleh penurunan produksi pada sub kategori industri logam dasar yang memegang peranan terbesar pada kategori ini.



### c. Perkembangan PDRB di Kabupaten Bangka Barat

Kondisi perekonomian Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan yang cukup baik, walaupun mengalami penurunan di sebagian sektor pada tahun 2020-2021. Perekonomian Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 cenderung meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 16,75 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 8,61 persen dibanding tahun 2021 yang hanya mencapai 15,43 triliun rupiah. Sementara itu, nilai tambah yang mampu diciptakan oleh seluruh lapangan usaha di Kabupaten Bangka Barat yang dihitung atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) mengalami peningkatan dari 10,33 triliun rupiah di tahun 2021, menjadi 10,54 triliun rupiah di tahun 2022. Berdasarkan PDRB ADHK ini, perekonomian di Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 cenderung membaik dengan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 2,01 persen. Hal ini menunjukkan adanya indikasi peningkatan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat di tahun 2022. Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan pada sebagian besar sektor ekonomi unggulannya, seperti pertambangan dan penggalan, pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.



Keterangan : r) angka revisi  
\*) angka sementara  
\*\*) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

**Gambar 2.11** PDRB ADHB, ADHK dan LPE  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

### d. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode

tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

**Tabel 2.8** Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020 <sup>r</sup>	2021 <sup>*</sup>	2022 <sup>**</sup>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12,06	11,34	13,25	12,46	12,91
B	Pertambangan dan Penggalian	9,48	8,31	7,51	8,72	7,95
C	Industri Pengolahan	44,03	45,61	42,95	45,08	44,65
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,07	0,09	0,08	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	7,22	7,51	7,83	7,17	7,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,55	14,06	14,11	13,28	14,38
H	Transportasi dan Pergudangan	0,96	0,99	0,93	0,90	0,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,20	1,26	1,40	1,32	1,36
J	Informasi dan Komunikasi	0,33	0,37	0,45	0,42	0,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,42	0,45	0,47	0,45	0,49
L	Real Estate	2,09	2,08	2,33	2,14	2,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,15	0,15	0,14	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,52	4,73	5,16	4,71	4,35
P	Jasa Pendidikan	1,82	1,91	2,11	1,92	1,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,85	0,91	0,88	0,85
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,31	0,32	0,34	0,31	0,31
<b>PDRB ADHB</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Keterangan : r) angka revisi

\*) angka sementara

\*\*\*) angka sangat sementara

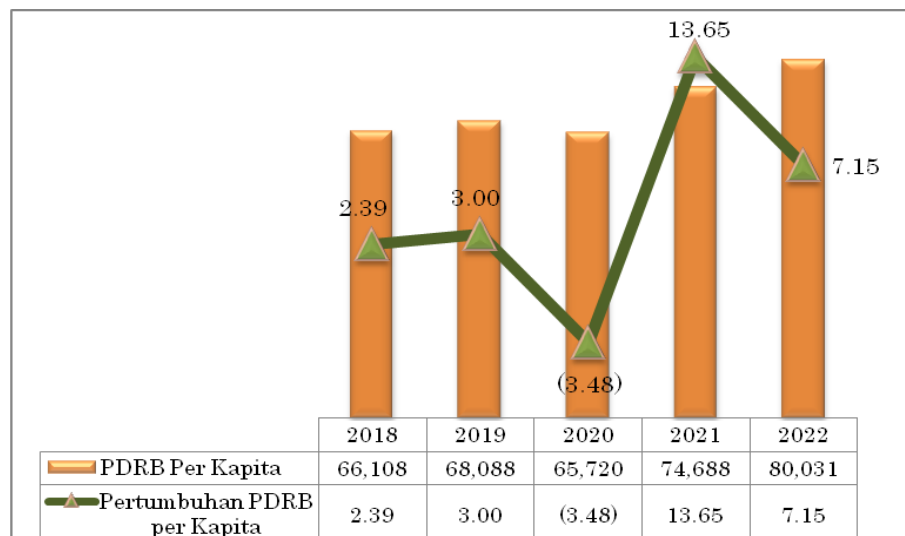
Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 terdapat tiga kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Pertanian. Kontribusi yang dihasilkan Industri pengolahan memiliki peranan sebesar 44,65 persen terhadap total PDRB di Bangka Barat. Adanya gap yang besar antara nilai kontribusi Industri Pengolahan dengan Kategori Lapangan Usaha Lainnya. Hal ini yang membuat

PDRB di Bangka Barat sangat bergantung kepada sektor Industri Pengolahan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2022 kontribusinya kembali meningkat, yaitu menjadi sebesar 12,91 persen. Salah satu penyebab meningkatnya adalah meningkatnya produksi beberapa komoditas strategis perkebunan dan rendahnya harga komoditas strategis perkebunan di pasar internasional.

#### e. PDRB per Kapita

Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

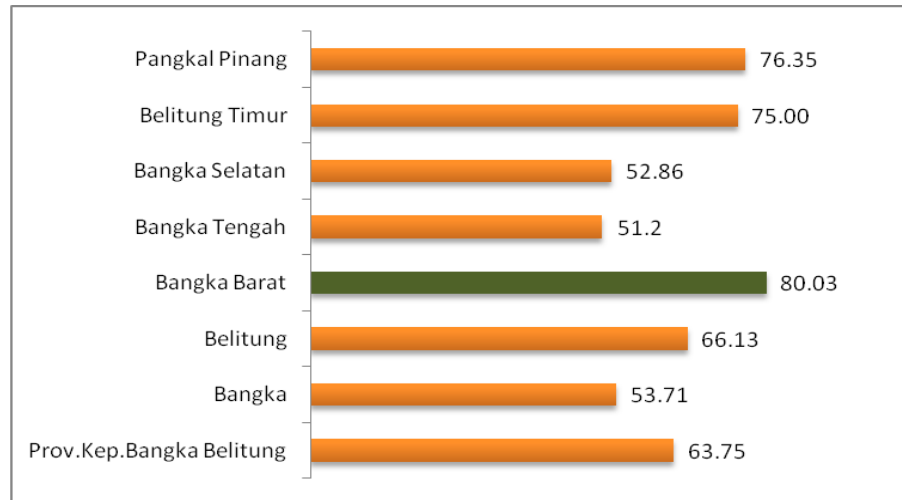


Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

**Gambar 2.12** PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022 (juta rupiah)

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat

sempat mengalami penurunan sebesar 65,72 juta rupiah. Sementara di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,03 juta rupiah.



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

**Gambar 2.13** PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 (juta rupiah)

Sementara jika dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2022 PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum semakin membaik dari tahun ke tahun.

#### f. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan penyakit sosial dimana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak sesuai dengan standar tertentu sehingga dikategorikan miskin. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk mengurangi dan mengentaskan penduduk dari kemiskinan. Hal ini terlihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat yang pada periode 2019-2021 cenderung naik. Namun pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin turun menjadi 5,30 ribu jiwa atau sebesar 2,46 persen dari total penduduk di Kabupaten Bangka Barat. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu sebesar 5,85 ribu jiwa. Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Pada tahun 2022, garis kemiskinan Kabupaten Bangka Barat sebesar Rp635.861 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2021 yang besarnya Rp599.887 per kapita per bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa

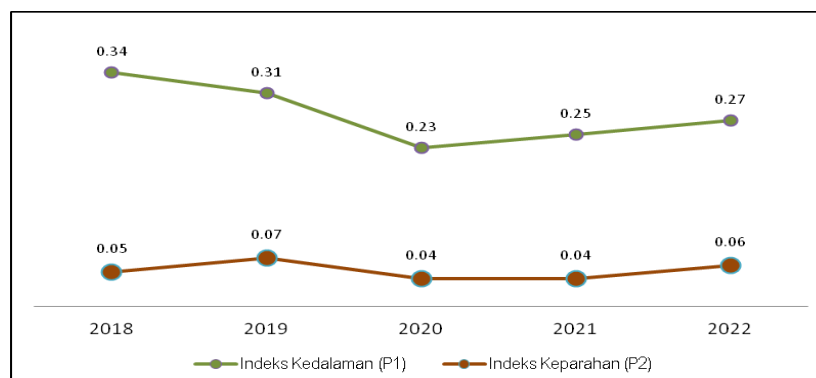
jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan pokok makanan dan bukan makanan per kapita per hari pada tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin. Meningkatnya garis kemiskinan ini dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.9** Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Garis Kemiskinan (Rp)	497.567	520.642	549.496	589.894	599.887	635.861
Jumlah Penduduk Miskin	6.060	6.350	5.650	5.830	5.850	5.300
Persentase Penduduk Miskin	2,98	3,05	2,67	2,70	2,75	2,46
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	97,02	96,95	97,33	97,30	97,25	97,54

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan kondisi cenderung meningkat selama 2020-2022. Semakin besarnya indeks kedalaman kemiskinan, mengindikasikan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari Garis Kemiskinan. Nilai P1 pada tahun 2020 sebesar 0,23 naik menjadi 0,25 pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 kembali naik menjadi sebesar 0,27. Perkembangan yang sama terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Bangka Barat selama 2020-2022. Pada tahun 2020, indeks keparahan kemiskinan mencapai 0,04 dan terus bertahan di angka yang sama pada 2021. Kemudian meningkat menjadi sebesar 0,06 pada tahun 2022. Keadaan ini mencerminkan bahwa ketimpangan pengeluaran per kapita antar penduduk miskin semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran penduduk antar penduduk miskin semakin berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.14** Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022

**g. Tingkat Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja baru serta mengukur capaian hasil pembangunan. Tren indikator ini akan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.10** Persentase TPT Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen), 2018 – 2022

Kabupaten/kota	Persentase				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	4,12	3,80	5,42	5,97	5,39
Belitung	2,93	2,90	4,82	3,51	4,30
<b>Bangka Barat</b>	<b>3,05</b>	<b>2,80</b>	<b>4,12</b>	<b>3,83</b>	<b>4,86</b>
Bangka Tengah	3,93	4,39	5,59	4,95	3,99
Bangka Selatan	4,35	3,87	5,42	5,29	5,09
Belitung Timur	1,50	1,71	3,93	3,78	2,50
Pangkalpinang	4,70	5,01	6,93	6,81	5,90
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>3,65</b>	<b>3,39</b>	<b>5,25</b>	<b>5,03</b>	<b>4,77</b>

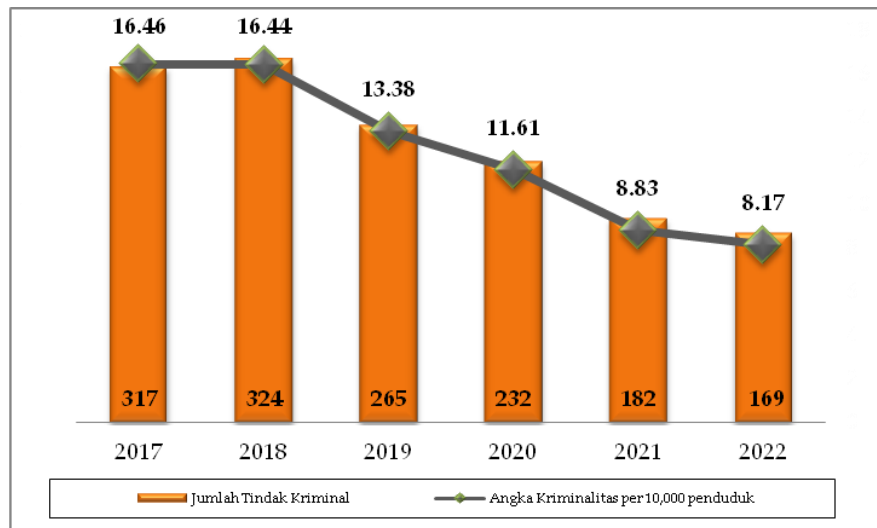
Sumber: BPS Provinsi Kep.Bangka Belitung, 2023.

Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Bangka Barat sebesar 3,83 persen dikarenakan faktor pandemi *Covid-19* sudah melandai, dan di tahun 2022 mengalami peningkatan hingga mencapai 4,86 persen. Tingkat pengangguran di Kabupaten Bangka Barat relatif lebih baik (rendah) dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan tingkat pengangguran provinsi yang mencapai 4,77 persen, Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah provinsi.

**h. Angka Kriminalitas**

Kriminalitas sangat terkait dengan angka kemiskinan, tingkat ekonomi, angka pengangguran dan aspek sosial lainnya sehingga angka kriminalitas menjadi salah satu aspek analisis yang perlu diperhatikan. Angka kriminalitas di Kabupaten Bangka Barat cenderung menurun. Total tindak pidana yang terjadi selama tahun 2022 di Bangka Barat memperlihatkan adanya penurunan 13 perkara jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rata-rata tindak kriminal tertinggi setiap tahun adalah kejahatan transnasional dengan jenis kasus narkoba diikuti dengan kejahatan konvensional pada kasus pencurian dengan pemberatan.





Sumber : Polres Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.15** Perkembangan Jumlah dan Angka Kriminalitas per 10.000 Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

#### I. Pendidikan

##### a. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca serta menulis kalimat sederhana. AMH digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena kemampuan baca tulis merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. Persentase AMH pada Tahun 2020 - 2022 di Kabupaten Bangka Barat mencapai 100 persen.

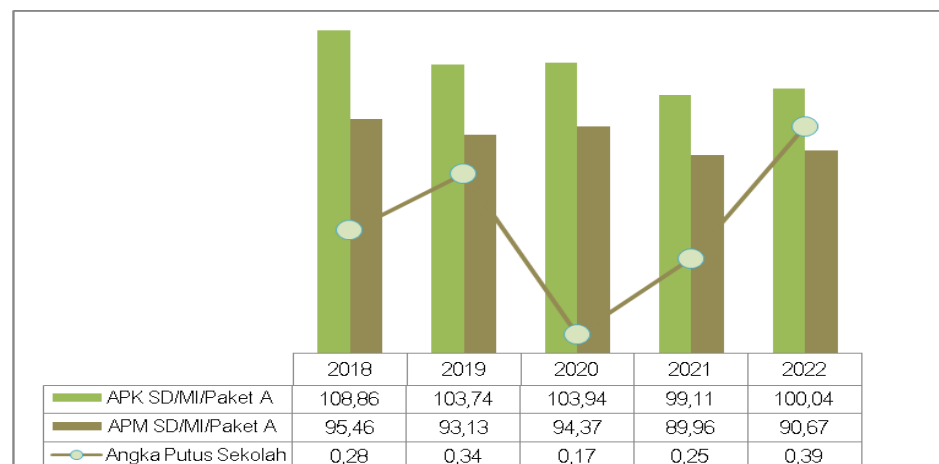
##### b. Angka Partisipasi Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase

penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Sementara APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai nilai 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

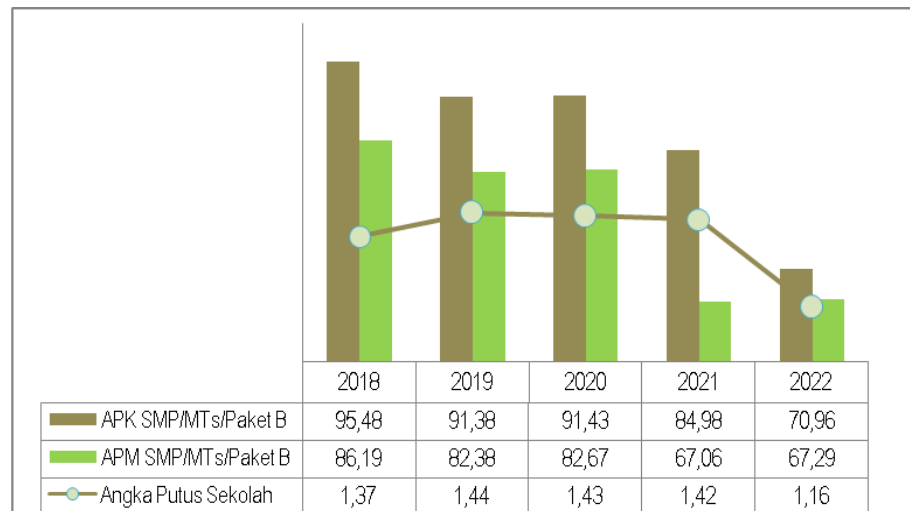


Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.16** APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SD/MI Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

Capaian APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan menjadi 100,04 persen sehingga angka putus sekolah meningkat menjadi 0,39 persen. Jika dilihat kedudukan APK SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat di tingkat provinsi tahun 2022, APK

SD/MI/Paket A Kabupaten Bangka Barat masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 107,26 persen.



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.17** APK, APM, dan Angka Putus Sekolah SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Pada tahun 2022, angka putus sekolah menunjukkan penurunan menjadi 1,16 persen dari tahun 2021 sebesar 1,42 persen. Selain itu APK SMP/MTs/Paket B Kabupaten Bangka Barat menurun sebesar 71 persen. Capaian di tahun 2022 masih berada di bawah capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 87,85 persen. Naik turunnya APK dipengaruhi oleh angka putus sekolah yang tidak stabil. Angka putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran orang tua tentang pendidikan, akses jalan dan transportasi kurang mendukung, faktor budaya (pernikahan dini), dan perceraian orang tua.

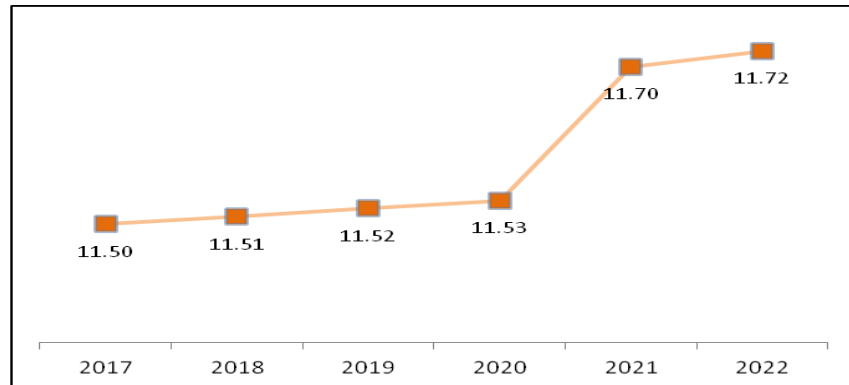
Kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Selain itu, putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat.

### c. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Angka HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka HLS dihitung untuk usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar yang dimulai dari usia 7 (tujuh) tahun.

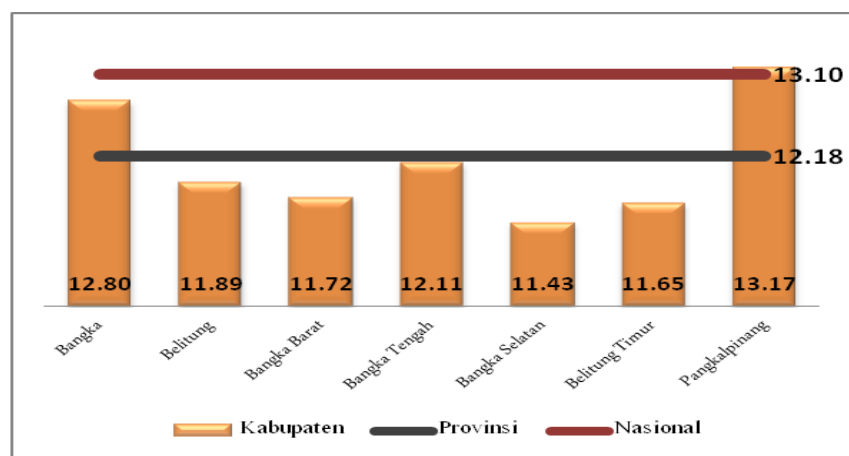
Indikator Angka HLS di Kabupaten Bangka Barat merupakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Angka HLS di tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

**Gambar 2.18** Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022

Jika dibandingkan dengan capaian kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022, Kabupaten Bangka Barat berada pada posisi ke-5 setelah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Belitung Timur. Capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 12,18 tahun dan dibawah capaian Nasional yang mencapai 13,10 tahun.



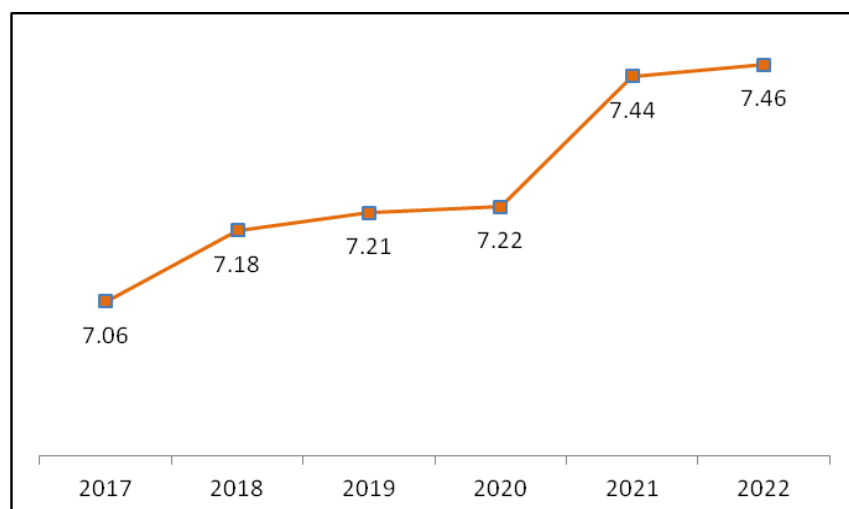
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023.

**Gambar 2.19** Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

#### d. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam penghitungan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya sektor pendidikan. RLS didefinisikan sebagai rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun (standar UNDP) mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka RLS/ *Mean Years of Schooling* (MYS) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/ sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/ tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Dalam meningkatkan IPM di Kabupaten Bangka Barat pemerintah memberikan beberapa program untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.

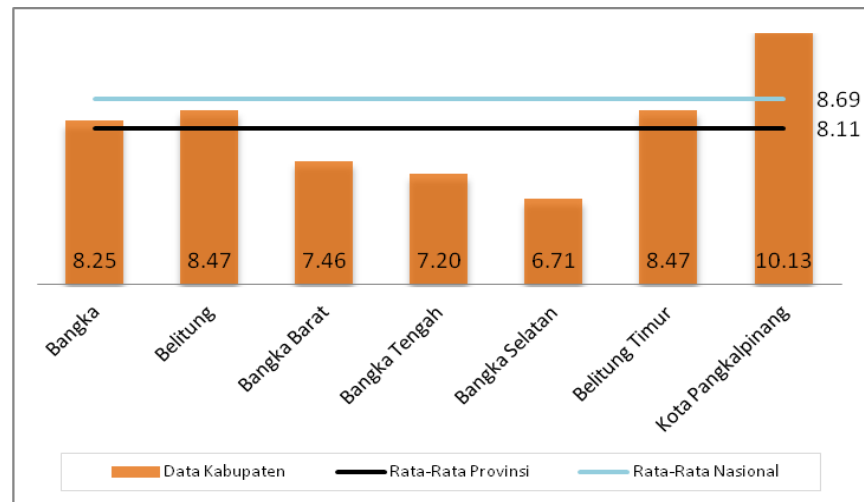
Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2022 mencapai 7,46 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Bangka Barat menempuh pendidikan sampai kelas 1 atau 2 setara SMP/ sederajat. Angka ini tergolong rendah karena belum memenuhi target wajib belajar sembilan tahun. Di era globalisasi seperti sekarang ini, dimana persaingan pada pasar tenaga kerja semakin tinggi, penduduk Kabupaten Bangka Barat harus terus meningkatkan kompetensi pendidikan agar tidak tertinggal dari penduduk di Kabupaten lain.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.20** Rata-Rata Lama Sekolah  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017–2022

Sementara jika dibandingkan dengan Angka RLS dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kep. Bangka Belitung di Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.21** Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

#### e. Kondisi Pendidikan

Kondisi Pendidikan menggambarkan keadaan PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat baik dari aspek kualitas maupun kuantitas, seperti jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, kondisi ruang kelas, dan angka kelulusan. Gambaran kondisi yang mendukung pendidikan di Kabupaten Bangka Barat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.11** Kondisi Pendidikan Dasar Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Satuan Pendidikan	Jumlah		Kondisi ruang kelas			Jumlah Siswa	Guru (orang)		
		Negeri	Swasta	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat		Jumlah	S-1/D-IV	Tersertifikasi
1	PAUD	16	148	119	199	79	6627	724	309	
2	SD	126	10	553	306	243	24.466	1.352	1.232	485
3	MI	2	4	35	2	-	876	54	45	12
4	SMP	27	9	244	72	31	8.349	491	465	221
5	MTs	3	9	81	8	0	1.953	181	161	3

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023.

Sesuai dengan kewenangan kabupaten untuk urusan wajib pelayanan dasar pendidikan bahwa kabupaten memiliki kewenangan untuk PAUD, SD/MI maupun





SMP/MTs. PAUD di Kabupaten Bangka Barat tersebar di 6 (enam) kecamatan yang terdiri dari 16 PAUD Negeri dan 148 PAUD Swasta.

Lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun secara kuantitas telah cukup memadai, hanya saja kondisi ruang kelas baik di SD/MI maupun SMP/MTs masih terdapat kondisi rusak ringan dan rusak berat. Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs yang telah memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tahun 2022 sebanyak 1.277 orang dari 1.406 orang, sedangkan guru yang bersertifikat pendidik adalah 497 orang atau 35,35 persen dari total guru (PNS, guru tetap yayasan, dan GTT SD).

Sementara itu, guru SMP yang telah bersertifikat pendidik profesional sejumlah 224 orang atau 33,33 persen dari total guru PNS, GTY, dan GTT. Banyaknya guru yang telah tersertifikat pendidik profesional menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat.

#### f. Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga melakukan upaya penjaminan kualitas pendidikan di tingkat satuan pendidikan melalui pelaksanaan pemetaan mutu, fasilitasi dan pendampingan, serta bantuan peningkatan kualitas dan dilanjutkan dengan pengukuran kualitas satuan pendidikan melalui akreditasi. Jumlah SD dan SMP di Kabupaten Bangka Barat yang terakreditasi dan belum terakreditasi di tahun 2020 tampak pada tabel berikut.

**Tabel 2.12** Jumlah Sekolah Terakreditasi dan Belum Terakreditasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	<b>Sekolah Dasar/MI</b>					
	Terakreditasi A	31	29	25	24	22
	Terakreditasi B	92	93	95	98	101
	Terakreditasi C	9	14	16	16	14
	Belum Terakreditasi	6	3	3	3	5
2.	<b>SMP/MTs</b>					
	Terakreditasi A	20	19	19	18	17
	Terakreditasi B	18	20	20	20	21
	Terakreditasi C	4	4	4	8	8
	Belum Terakreditasi	4	3	3	0	2

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Bangka Barat telah memiliki banyak SD dan SMP yang terakreditasi. Jumlah SD di Kabupaten Bangka Barat yang telah terakreditasi hingga tahun 2022 sebanyak 96 persen dari 142 sekolah. Akreditasi terbesar di kategori Baik yaitu sebanyak 101 sekolah. Pada jenjang SMP/MTs, di tahun 2022 juga telah terakreditasi A sebanyak 17 sekolah, terakreditasi B sebanyak 21 sekolah, dan terakreditasi C sebanyak 8 sekolah. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa setiap tahun selalu terjadi perubahan status akreditasi baik di tingkat SD maupun SMP. Capaian tersebut antara lain didukung oleh: (1) Penguatan pendampingan satuan pendidikan dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan; (2) Penguatan kapasitas pelaksanaan akreditasi termasuk peningkatan jumlah sasaran satuan pendidikan yang diakreditasi; (3) Peningkatan penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai dan peningkatan kualitas pengajar dan peserta didik.

## II. Kesehatan

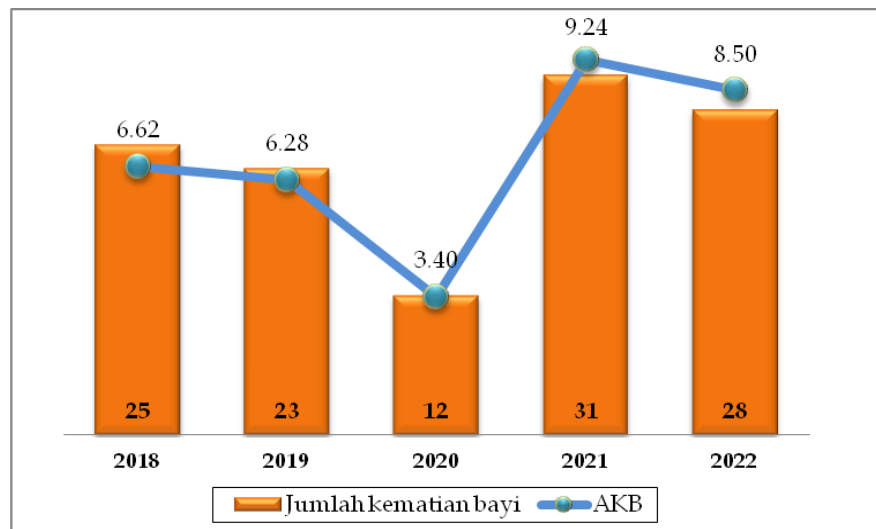
Beberapa indikator bidang kesehatan menunjukkan bahwa kualitas masyarakat Kabupaten Bangka Barat dari sisi kesehatan belum sesuai dengan harapan. Permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada dapat diminimalisir dengan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan yang optimal.

### a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-1 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun. Angka Kematian Bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat hubungannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya bidang kesehatan.

Jumlah Kematian Penduduk usia 0-1 tahun (bayi) di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif. Pada tahun 2018 jumlah bayi mati sebanyak 25 jiwa dan terus membaik dengan penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi sebanyak 12 jiwa

dengan angka kematian bayi sebesar 3,40 persen. Selanjutnya, jumlah bayi mati meningkat di tahun 2022 menjadi sebanyak 28 jiwa dengan angka kematian bayi sebesar 8,50 persen.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

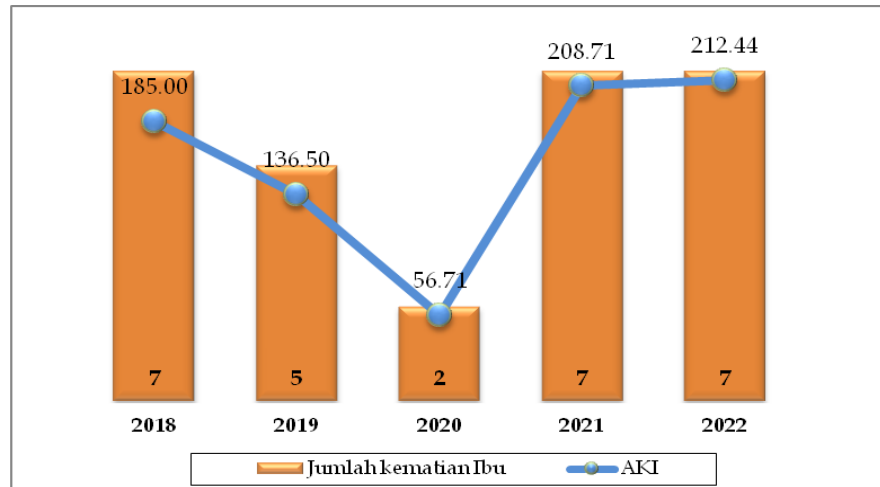
**Gambar 2.22** Jumlah Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat AKB, diantaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan karena AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu, faktor lainnya yaitu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang berkontribusi terhadap perbaikan gizi sehingga berdampak positif pada daya tahan bayi terhadap penyakit. Di lain sisi terdapat faktor negatif yang juga mempengaruhi AKB antara lain rendahnya kualitas perawatan selama masa kehamilan, saat persalinan, masa nifas, rendahnya kualitas sanitasi dasar, kondisi gizi serta penyakit-penyakit infeksi serta sarana prasarana kesehatan yang belum memadai khususnya alat kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).

#### b. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. AKI dihitung dari kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain. AKI merupakan indikator penting untuk melihat derajat kesehatan suatu bangsa

dan menjadi salah satu komponen indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup.



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

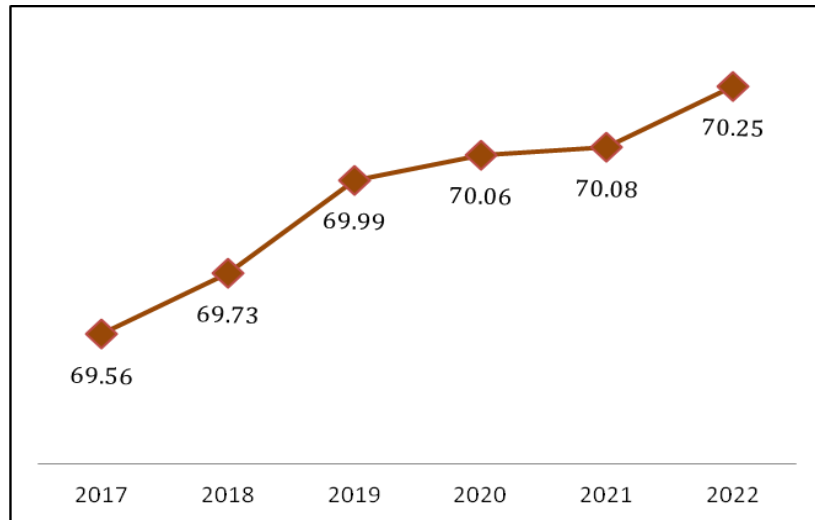
**Gambar 2.23** Jumlah Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Data AKI di Kabupaten Bangka Barat meningkat signifikan di tahun 2022 yaitu 212,44 per 100.000 kelahiran hidup, dimana capaian tersebut masih tinggi jika dibandingkan dengan target nasional 102 per 100.000 kelahiran hidup. Sebaran kasus AKI di Kabupaten Bangka Barat yaitu 2 kasus di Kecamatan Muntok dan 1 kasus di Kecamatan Simpangteritip, Kelapa, Parittiga dan Tempilang. Hal ini disebabkan ibu hamil menderita anemia, kurang gizi, dan mengalami penyakit tekanan darah tinggi saat hamil. Selain itu, kenaikan jumlah kematian ibu dan bayi juga terjadi saat pandemi Covid-19. Selama tahun 2021 tercatat ada 3 ibu meninggal dengan hasil pemeriksaan swab PCR /antigen positif. Upaya dalam menekan rendahnya AKI yaitu memperkuat kapasitas dan kapabilitas fasilitas pelayanan kesehatan agar mampu menangani permasalahan sedini mungkin.

### c. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,25 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2022 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai umur 70 atau 71 tahun. Di Kabupaten Bangka Barat, sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia sudah cukup memadai. Selain itu, kondisi

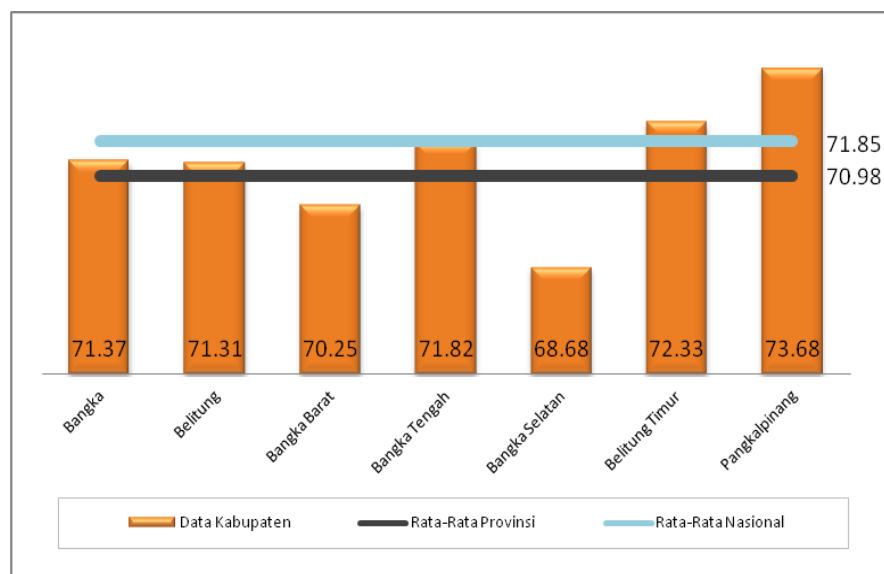
masyarakat yang semakin maju dan semakin peduli dengan kesehatan juga menjadi faktor pendorong meningkatnya AHH di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kab.Bangka Barat, 2022.

**Gambar 2.24** Angka Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022

Walaupun capaian AHH Kabupaten Bangka Barat terus meningkat, namun jika dibandingkan dengan AHH Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022 masih berada pada posisi yang cukup rendah, yaitu posisi ke 6 (enam). Capaian AHH Kabupaten Bangka Barat ini lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (70,98 tahun) dan AHH Nasional (71,85 tahun). AHH Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 ditampilkan pada gambar berikut :

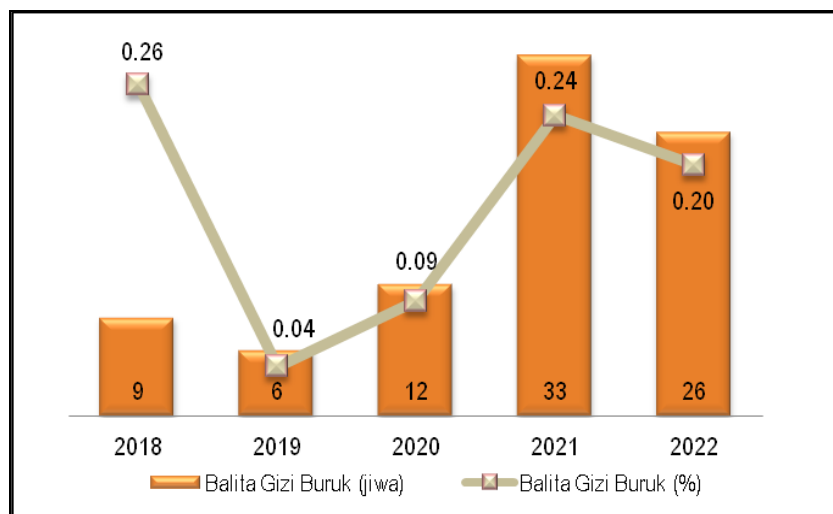


Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022.

**Gambar 2.25** Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022

#### d. Balita Gizi Buruk

Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan  $\leq 3$  standar deviasi dan atau ditemukan tanda-tanda klinis gizi buruk. Jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif. Pada tahun 2022, jumlah kasus gizi buruk di Kabupaten Bangka Barat menurun menjadi 26 (dua puluh enam) kasus dari jumlah kasus di tahun sebelumnya yaitu 33 (tiga puluh tiga) kasus di tahun 2021. Kasus gizi buruk yang ditemukan di Kabupaten Bangka Barat seluruhnya mendapat perawatan dari tenaga kesehatan.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.26** Jumlah dan Persentase Balita Gizi Buruk  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

#### e. Stunting

Pada Tahun 2019, Kabupaten Bangka Barat menjadi salah satu Kabupaten yang masuk ke dalam 100 Kabupaten/Kota prioritas intervensi *stunting* di Indonesia dengan angka *stunting* relatif tinggi yang kemudian ditegaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 440/1959/SJ tentang Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2018. *Stunting* adalah salah satu dari Proyek Prioritas Nasional yang harus mendapat perhatian penuh dan harus segera ditangani oleh pemerintah demi mencapai target penurunan 14 persen pada Tahun 2024.

Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita Tahun 2022 sebesar 9,56 persen (1.262 balita *stunting* dari 13.197 balita), menurun bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,02 persen (1.552 balita *stunting* dari 13.980 balita).



**Tabel 2.13** Prevalensi Balita *Stunting* di Kabupaten Bangka Barat  
Tahun 2021 dan Tahun 2022

Puskesmas	2021			2022		
	Total Balita Diukur	Balita <i>Stunting</i>	%	Total Balita Diukur	Balita <i>Stunting</i>	%
Muntok	2.876	138	4,80	2.774	145	5,23
Simpangteritip	1.505	278	18,47	1.402	261	18,62
Kundi	733	238	32,47	619	141	22,78
Kelapa	2.649	425	16,04	2.504	261	10,42
Jebus	1.673	139	8,31	1.604	137	8,54
Puput	1.535	102	6,64	1.343	101	7,52
Sekar Biru	912	90	9,87	859	81	9,43
Tempilang	2.097	142	6,77	2.092	135	6,45
<b>KABUPATEN</b>	<b>13.980</b>	<b>1.552</b>	<b>11,02</b>	<b>13.197</b>	<b>1.262</b>	<b>9,56</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

Faktor penyebab terjadinya *stunting* di Kabupaten Bangka Barat, yaitu:

1. Pernikahan usia dini ibu, dimana risiko ibu menikah kurang dari 20 tahun terhadap kejadian *stunting* dua kali lebih besar dibandingkan dengan ibu yang menikah diatas 20 tahun;
2. Penyakit infeksi (diare), dimana bayi dengan penyakit ini memiliki faktor risiko 3 (tiga) kali lebih besar dibanding yang tidak diare;
3. Pendidikan orang tua, dimana pendidikan ibu rendah memiliki faktor risiko terhadap kejadian *stunting* sebanyak 1.705 kali dibandingkan dengan pendidikan ibu tinggi;
4. Pendapatan keluarga, dimana pendapatan keluarga yang rendah mempunyai faktor risiko terjadinya kejadian *stunting* sebanyak 2.427 kali dibandingkan dengan pendapatan tinggi;
5. Ketersediaan jamban sehat, dimana hal ini menjadi faktor risiko terjadinya *stunting* 2,4 kali lebih besar dibandingkan yang mempunyai jamban.

**f. AIDs-Tuberkulosis-Malaria (ATM)**

IPM merupakan indikator tujuan dari RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, salah satu komponen dalam IPM adalah angka harapan hidup yang juga merupakan indikator sasaran pada RPJMD. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJMN Bidang kesehatan Tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan

teknologi. Sesuai dengan strategi RPJMN pembangunan bidang kesehatan yaitu meningkatkan pengendalian penyakit yang terfokus pada insidensi HIW (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV); insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk); serta jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) sudah ditargetkan melalui capaian SPM. Data Cakupan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko HIV/AIDS Tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat dari table dibawah ini.

**Tabel 2.14** Cakupan Pelayanan HIV/AIDS Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022

Tahun	Target SPM	Cakupan	Persentase	Kasus Positif
2020	4622	4386	105,38	21
2021	5247	4862	107,92	23
2022	5432	5060	107,35	32

HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah baik pusat, provinsi, maupun daerah. Berdasarkan data diatas kasus HIV/AIDS di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan mulai dari tahun 2020 sebanyak 21 kasus dan meningkat 2 orang pada tahun 2021 sehingga menjadi 23 orang serta peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2022 sebanyak 9 orang sehingga menjadi 32 orang.

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung dan tulang belakang. Namun, infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), TBC berada di peringkat kedua sebagai penyakit menular yang mematikan. Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah pengidap TB terbanyak di Asia Tenggara. Begitu juga di Kabupaten Bangka Barat masih terdapat penderita TBC seperti yang terlihat pada data dibawah ini.

**Tabel 2.15** Cakupan Pelayanan Tuberkulosis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022

TAHUN	TARGET SPM	CAKUPAN	%	Penderita
2020	1.423	1.373	96,46	148
2021	1.755	1.110	63,24	135
2022	1.930	2.272	117,72	221

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang belum terbebas dari malaria. Salah satu kendala dari eliminasi malaria adalah karakteristik geografis. Sebagai wilayah pertambangan sering ditemukan pada lokasi kondisi lingkungan yang tidak sehat, sehingga menyebabkan terjadinya kasus malaria. Adapun data yang dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2.16** Cakupan Pelayanan Malaria Kabupaten Bangka Barat  
Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Kasus positif	179	96	109
API	0.93	0.48	0.55
Kasus indeginous	8	4	3

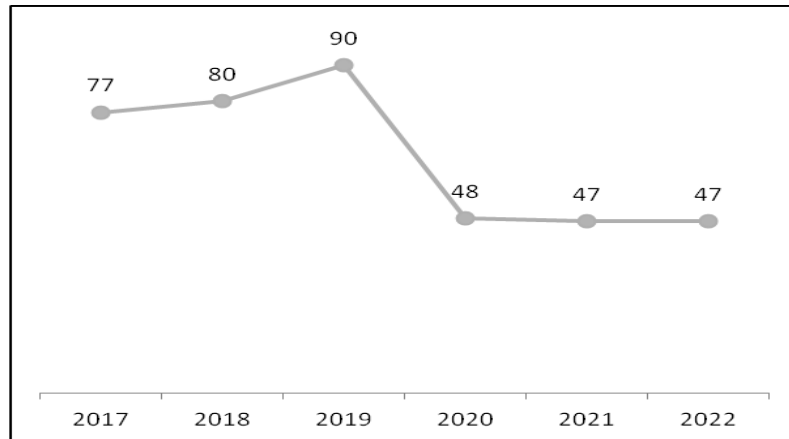
Kasus malaria yang ditemukan terkonsentrasi di wilayah pesisir Kecamatan Parittiga dan Jebus. Angka *Annual Parasite Incidence* Kabupaten Bangka Barat adalah <1, tetapi khusus pada Kecamatan Parit Tiga masih berada >1. Begitu pula halnya dengan kasus indeginous masih ditemukan pada tahun 2020, sehingga Kabupaten Bangka Barat belum bisa dikatakan sebagai wilayah bebas malaria. Dengan masih adanya kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih ada kasus malaria maka provinsi juga dapat dikatakan tidak bebas malaria. Untuk peningkatan percepatan eliminasi malaria perlu peningkatan pendekatan EDAT (*Early Diagnosis and Treatment*), dengan melakukan peningkatan kapasitas SDM, pembentukan kader malaria desa untuk deteksi kasus, penyediaan RDT dan obat, serta peningkatan surveilans.

Sesuai dengan permasalahan epidemi yang ada di daerah diantaranya penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), maka diperlukan upaya – upaya lebih dalam pelaksanaan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Adapun upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat beserta unsurnya antara lain :

1. Skrining ATM (AIDS, Tuberkulosis dan Malaria) pada Populasi tertentu dan orang dengan faktor resiko;
2. Investigasi Kontak pada penderita TB;
3. Surveilans aktif pada *fasyankes Directly Observed Treatment, Short-course* (DOTS);
4. Tersedianya Layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) Odhiv;
5. PE kasus Malaria positif dan penanganan kasus (pembagian kelambu, MBS, IRS dan pengobatan).

### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah tantangan perkembangan budaya global. Berdasarkan data tahun terakhir, perkembangan kebudayaan di Kabupaten Bangka Barat tidak mengalami peningkatan.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.27** Jumlah Sanggar Kesenian  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2022

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum pada hakekatnya merupakan implementasi pelayanan publik, yakni segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk pelayanan barang, pelayanan jasa maupun pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan terhadap urusan pemerintahan daerah yaitu urusan wajib terdiri dari 24 urusan, dan urusan pilihan berjumlah 8 urusan.

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian serta urusan perencanaan pembangunan yang sebelumnya menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sebelum diuraikan mengenai capaian kinerja fokus layanan urusan wajib dan urusan pilihan, berikut beberapa capaian kinerja terkait penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut.

### a. Kepegawaian Daerah

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Peraturan Menpan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebagai acuan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melakukan pengukuran indeks profesionalitas ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Standar Profesionalitas ASN adalah kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.

**Tabel 2.17** Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	50	51,55	64,17	60,16	62,47

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

Perhitungan IP ASN merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 dari Badan Kepegawaian Nasional tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pencapaian IP ASN di Tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 60,16 di tahun 2021.

**Tabel 2.18** Penilaian Indeks Profesionalitas ASN  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

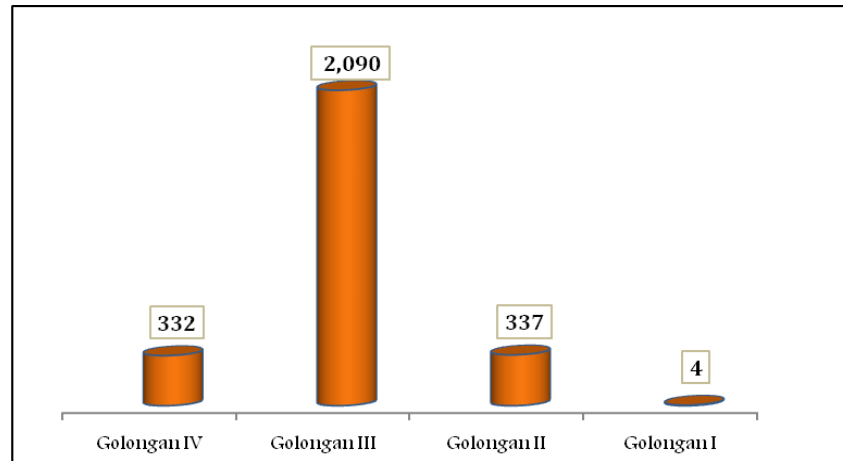
No.	Dimensi Standar Profesionalitas ASN	Standar Bobot Pengukuran	Hasil Pengukuran (%)	Realisasi (%)
1.	Kualifikasi	25	13,25	102,71
2.	Kompetensi	40	19,03	89,34
3.	Kinerja	30	25,2	99,17
4.	Disiplin	5	4,99	100
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>62,47% (rendah)</b>	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

Tabel diatas menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian Indeks Profesional ASN Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mendapatkan nilai yang masih rendah, yaitu dengan total poin 62,47 persen dari target yang telah ditetapkan tahun 2022 yaitu sebesar 64,6 persen.

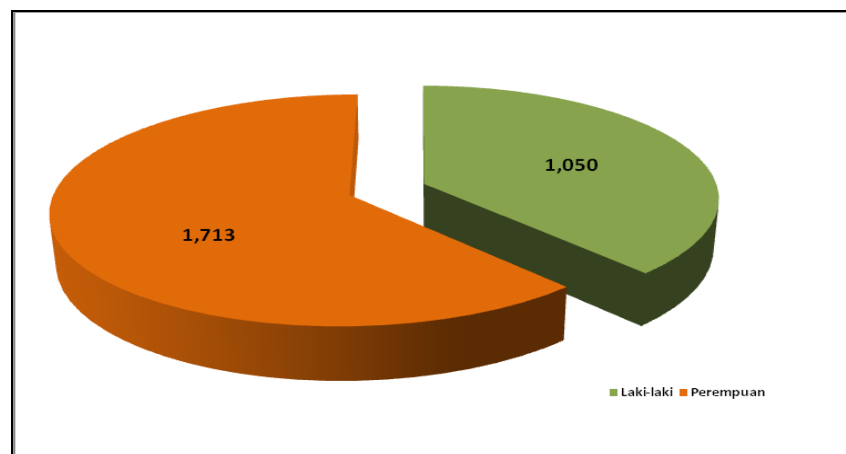
Berdasarkan empat dimensi yang digunakan dalam perhitungan indeks profesional ASN, dimensi kinerja dan dimensi kompetensi yang belum mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan dimensi kualifikasi, Kabupaten Bangka Barat saat ini memiliki Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.763 orang yang terdiri dari 1.050 orang laki-laki dan 1.713 orang perempuan.



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

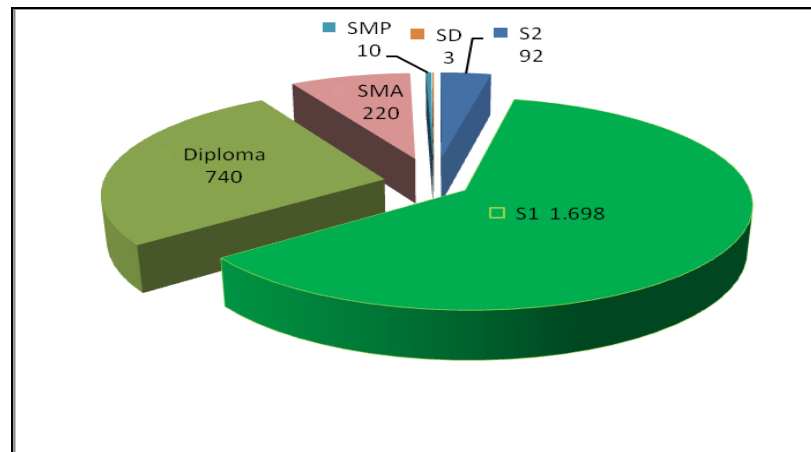
**Gambar 2.28** Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.29** Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022





Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.30** Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

#### b. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

**Tabel 2.19** Hasil Evaluasi SAKIP Berdasarkan Komponen Penilaian Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

KOMPONEN	BOBOT	2022
Perencanaan Kinerja	30	23,27
Pengukuran Kinerja	25	16,07
Pelaporan Kinerja	15	11,02
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,30
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>68,66</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>B</b>

Sumber: Kementerian PAN RB, 2023.

Penilaian terhadap implementasi SAKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria

penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level organisasi perangkat daerah.

Dari keempat aspek tersebut, aspek dengan bobot penilaian terbesar adalah pada perencanaan kinerja yaitu 23,27 persen, yang selanjutnya evaluasi akuntabilitas kinerja internal 18,30 persen, pengukuran kinerja 16,07 persen, dan pelaporan kinerja dengan bobot 11,02 persen. Perbaikan dan peningkatan kinerja terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka menuju tata pemerintahan yang baik.

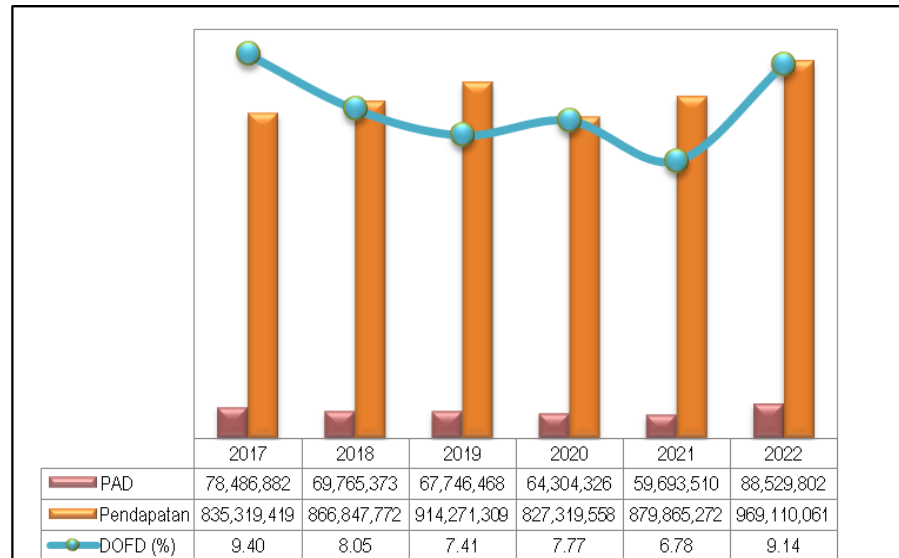
### c. Pengelolaan Keuangan Daerah

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2022 bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 mendapat penilaian yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut opini BPK, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui komposisi pendapatan daerah dalam APBD. Seperti halnya sebagian besar daerah lain di Indonesia, komposisi pendapatan daerah di dalam APBD Kabupaten Bangka Barat masih di dominasi oleh dana transfer dari pusat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat masih sangat terbatas untuk membiayai program-program pembangunan khususnya yang bersifat inisiatif daerah.

Sejalan dengan permasalahan di atas, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Bangka Barat dapat dikategorikan masih tergolong sangat kurang atau rendah dengan rata-rata 8,09 persen (2017-2022). DOFD merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. DOFD Kabupaten Bangka Barat meningkat yaitu dari 6,78 persen di tahun 2021 menjadi 9,14 persen di tahun 2022. Peningkatan PAD di Tahun 2022 terjadi pada semua sektor baik komponen pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.



Sumber : BPPRD dan BPKAD Kab. Bangka Barat, 2023 (diolah)

**Gambar 2.31** Derajat Otonomi Fiskal Daerah  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022

#### d. Produk Hukum Daerah

Secara umum produk hukum yang ditetapkan pada tahun 2011-2022 berfluktuasi yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 2.20** Daftar Penerbitan Peraturan/Kebijakan/Regulasi Daerah  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2011 - 2022

No.	Tahun	Peraturan Daerah	Peraturan Bupati	Keputusan Bupati
1.	2011	17	66	575
2.	2012	26	39	681
3.	2013	17	56	946
4.	2014	14	46	1.059
5.	2015	14	64	968
6.	2016	12	93	834
7.	2017	12	104	825
8.	2018	15	110	860
9.	2019	13	89	863
10.	2020	13	80	791
11.	2021	8	123	590
12.	2022	9	108	590

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

Dalam rangka menyebarluaskan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2014 telah dibangun Website Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bangka Barat. Pembangunan JDIH Kabupaten Bangka Barat bertujuan untuk dapat menyebarluaskan dan memberikan informasi hukum kepada masyarakat maupun penyelenggara pemerintah ataupun pihak swasta secara cepat dan tepat.

#### e. Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Tugas utama dari seluruh unsur penyelenggara pemerintahan adalah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana layanan yang diberikan dapat memuaskan masyarakat sesuai prosedur yang ditetapkan, maka dilakukan survei kepuasan masyarakat di unit-unit pelayanan masyarakat.

Pada tahun 2022 pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, secara umum mencerminkan kualitas dalam kategori "BAIK" dengan nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) rata-rata yaitu 83,06. SKM telah dilakukan di unit-unit pelayanan yaitu sebanyak 22 unit pelayanan.

Pelaksanaan SKM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan dilaksanakan pada 22 OPD/Unit Pelayanan Publik yang terdiri dari 1 (satu) Badan, 6 (enam) Dinas, 6 (enam) Kecamatan, 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah, dan 8 (delapan) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.

**Tabel 2.21** Hasil Survei Kepuasan Masyarakat  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022

No,	Unit Pelayanan	SKM 2020	SKM 2021	SKM 2022	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	77,37	84,47	82,39	Menurun
2	Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan	-	82,16	73,75	Menurun
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81,41	63,17	81,72	Meningkat
4	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	82,1	77,53	88,88	Meningkat
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, P3A	86,62	88,49	86,09	Menurun
6	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	87,41	86,92	87,78	Meningkat
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat	82,1	84,85	83,77	Menurun
8	RSUD Sejiran Setason	76,82	82,73	82,79	Meningkat
9	Kecamatan Muntok	81,9	81,92	81,92	-
10	Kecamatan Simpangteritip	85,48	89,39	90,99	Meningkat
11	Kecamatan Kelapa	80,75	80,80	80,85	Meningkat
12	Kecamatan Jebus	81,49	81,34	83,43	Meningkat



No,	Unit Pelayanan	SKM 2020	SKM 2021	SKM 2022	Keterangan
13	Kecamatan Parittiga	80,05	82,25	82,00	Menurun
14	Kecamatan Tempilang	-	86,37	88,58	Meningkat
15	Puskesmas Muntok	78,42	84,29	79,29	Menurun
16	Puskesmas Simpangteritip	79,9	79,97	80,03	Meningkat
17	Puskesmas Kelapa	82,12	82,40	82,56	Meningkat
18	Puskesmas Sekarbiru	81,87	82,23	82,54	Meningkat
19	Puskesmas Puput	74,89	82,26	82,49	Menurun
20	Puskesmas Tempilang	80,49	81,04	82,28	Meningkat
21	Puskesmas Jebus	83,25	83,87	83,98	Meningkat
22	Puskesmas Kundi	75,07	77,08	79,18	Meningkat
<b>PEMKAB. BANGKA BARAT</b>		<b>80,28</b>	<b>80,98</b>	<b>83,06</b>	<b>Meningkat</b>

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

#### f. Pengawasan Internal

Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pelaksanaan pengawasan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Baiknya kualitas pengawasan di daerah maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja daerah. Kualitas pengawasan internal daerah dapat dilihat dari tingkat maturasi SPIP dan level *Internal Audit Capability Model* (IACM). Berdasarkan laporan hasil penilaian cepat maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Level 2 Berkembang dengan nilai 2,572 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 1,988 serta skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 1,670.

Selain maturitas SPIP, nilai kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Barat berada pada level 2 dengan skor 2,250. Elemen yang digunakan dalam penentuan kapabilitas APIP antara lain peran dan layanan pengawasan internal, pengelolaan SDM, praktik profesional, manajemen dan akuntabilitas kinerja, hubungan dan budaya organisasi, serta struktur tata kelola.

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

##### 1. Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan

diantaranya yaitu Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah, Rasio Guru/ Murid dan Angka Melanjutkan Sekolah.

**a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah**

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah berdasarkan jenjang pendidikan tertentu per jumlah penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk mengakomodir seluruh penduduk usia pendidikan.

**Tabel 2.22** Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SEKOLAH DASAR / MI</b>						
Usia 7 - 12 tahun	Jiwa	22.235	23.472	23.195	23.014	23.003
Jumlah Sekolah	sekolah	138	139	139	140	142
<b>Rasio</b>		<b>1:161</b>	<b>1:169</b>	<b>1:167</b>	<b>1:164</b>	<b>1:162</b>
<b>SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ Mts</b>						
Usia 13 - 15 tahun	Jiwa	7.140	6.916	7.489	7.995	8.181
Jumlah Sekolah	sekolah	46	46	46	47	48
<b>Rasio</b>		<b>1:155</b>	<b>1:150</b>	<b>1:163</b>	<b>1:170</b>	<b>1:170</b>

Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023, diolah.

Untuk ketersediaan sekolah SD, pada tahun 2022 secara rata-rata satu sekolah dasar dapat menampung 162 murid, dimana nilai ini menurun bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yaitu satu sekolah dasar dapat menampung 164 murid. Untuk ketersediaan sekolah menengah pertama pada tahun 2022 satu sekolah dapat menampung 170 murid, dimana kondisi ini masih sama dengan tahun 2021.

Solusi dari permasalahan ketersediaan sekolah terhadap perkembangan jumlah penduduk usia sekolah adalah dengan melakukan strategi penambahan ruang kelas di setiap jenjang pendidikan khususnya pada sekolah-sekolah negeri.

**b. Rasio Guru/Murid**

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan dibandingkan dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar yang juga menunjukkan kondisi ideal proporsi guru dan murid untuk mendukung peningkatan kualitas



pendidikan.

**Tabel 2.23** Rasio Guru/Murid Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

Jenjang Pendidikan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
<b>SEKOLAH DASAR / MI</b>						
Guru	orang	1.314	1.405	1.388	1.411	1.406
Jumlah Siswa	orang	25.798	26.129	25.778	25.356	25.342
Rasio	Rasio	1 : 20	1 : 19	1 : 19	1 : 18	1 : 18
<b>SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ Mts</b>						
Guru	orang	592	620	678	647	672
Jumlah Siswa	orang	9.329	9.215	9.656	10.132	10.302
Rasio	Rasio	1 : 16	1 : 15	1 : 14	1 : 16	1 : 15

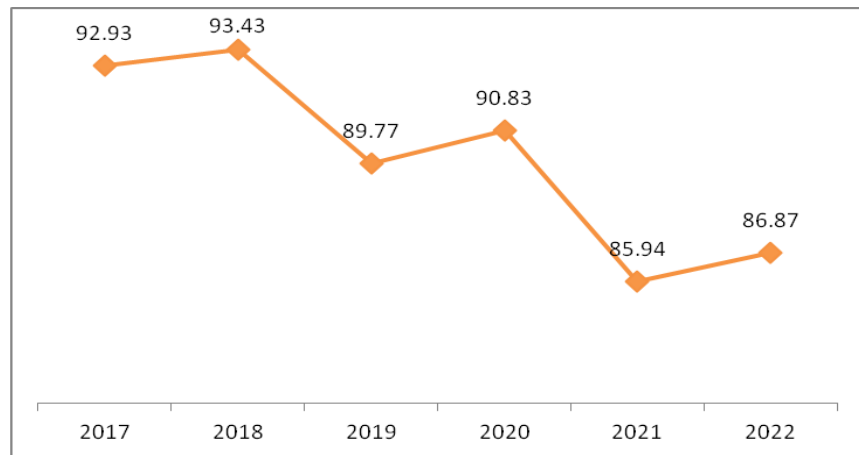
Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023, diolah

Data pada tabel diatas menunjukkan rasio guru terhadap murid pada setiap jenjang pendidikan dari SD dan SMP di tahun 2022 membaik. Jumlah guru SD/MI yang bersertifikasi pendidik adalah 497 orang atau 35,35 persen dari total guru SD/MI (PNS, Guru Tetap Yayasan dan GTT SD) dan Jumlah guru SMP/Mts yang bersertifikasi pendidik profesional adalah 224 orang atau 33,33 persen dari total guru SMP/Mts (PNS, Guru Tetap Yayasan dan GTT SMP). Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas kinerja dan kesejahteraan pendidik di Kabupaten Bangka Barat semakin meningkat.

### c. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah digunakan untuk melihat seberapa besar antusias dan keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah merupakan salah satu penentu dalam kualitas pendidikan yang dihubungkan dengan tingkat partisipasi sekolah.

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, angka melanjutkan sekolah dari SD ke SMP di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 yaitu 86,87 persen meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 85,94 persen.



Sumber : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bangka Barat, 2023.

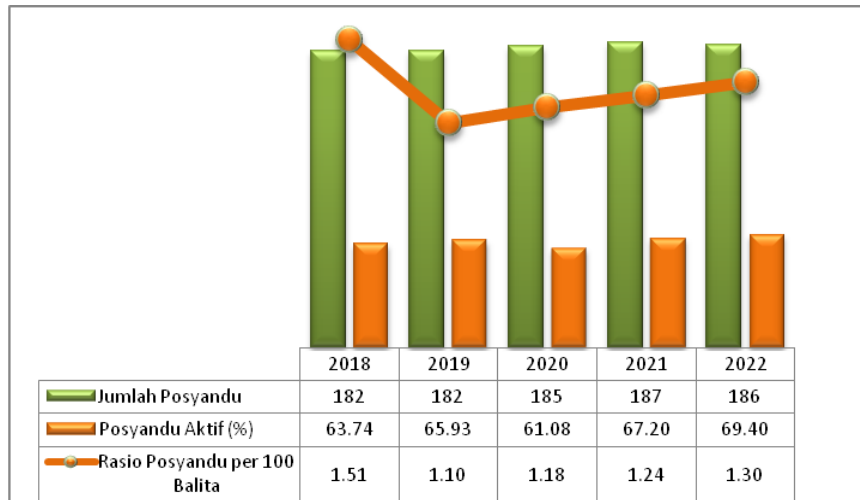
**Gambar 2.32** Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022 (Persentase)

## 2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat adalah mempermudah masyarakat di dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan dengan perlengkapan dan tenaga kesehatan yang tersedia di Kabupaten Bangka Barat terbilang cukup memadai, dan telah tersebar sampai tingkat Dusun/Desa. Untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus memperbanyak jumlah fasilitas kesehatan maupun jumlah tenaga kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat.

### a. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan salah satu sarana pelayanan umum dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sarana kesehatan yang mencakup rumah sakit, puskesmas, poliklinik dan posyandu merupakan sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit bagi masyarakat. Semakin tinggi ketersediaan sarana kesehatan akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dengan catatan adanya dukungan akses pelayanan kesehatan yang baik.



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.33** Jumlah Posyandu, Persentase Posyandu Aktif dan Rasio Posyandu per 100 Balita Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa rasio posyandu per 100 balita di Kabupaten Bangka Barat berfluktuatif namun cenderung meningkat.

Untuk sarana kesehatan, di tahun 2022 jumlah rumah sakit di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 3 unit yaitu RSUD Sejjiran Setason, RSBT Muntok, dan RS Gunung Manik. Jumlah puskesmas sebanyak 8 unit dengan rincian 7 puskesmas perawatan dan 1 puskesmas non perawatan yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Bangka Barat. Sementara jumlah puskesmas keliling sebanyak 6 unit dan puskesmas pembantu sebanyak 20 unit.

Khusus puskesmas, berdasarkan jumlah ketersediaan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 1 : 25.867, sementara rasio ideal ketersediaan puskesmas adalah 1 : 16.000. Untuk puskesmas pembantu jika dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2022 sebesar 1 : 10.347 dengan rasio ideal adalah 1 : 1.500. Jika dilihat dari jumlah dan rasio tersebut, maka sarana kesehatan di Kabupaten Bangka Barat masih belum memadai, mengingat puskesmas adalah ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.24** Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA				
		PEMDA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rumah Sakit					
1.	Rumah Sakit Umum	1			2	3
2.	Rumah Sakit Khusus					-



No.	FASILITAS KESEHATAN	PEMILIKAN/PENGELOLA				
		PEMDA	TNI/POLRI	BUMN	SWASTA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>	<b>Puskesmas dan Jaringannya</b>					
1.	Puskesmas Rawat Inap	7				7
	- Jumlah Tempat Tidur	110				110
2.	Puskesmas Non Rawat Inap	1				1
3.	Puskesmas Keliling	6				6
4.	Puskesmas Pembantu	20				20
<b>III.</b>	<b>Sarana Pelayanan Lain</b>					
1.	Klinik Pratama		1		9	10
2.	Klinik Utama				2	2
3.	Tempat Praktik Mandiri Dokter				16	16
4.	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi				1	1
5.	Tempat Praktik Mandiri Dokter Spesialis				-	-
6.	Tempat Praktik Mandiri Bidan				12	12
7.	Tempat Praktik Mandiri Perawat				1	1
9.	Unit Transfusi Darah	1				1
<b>IV.</b>	<b>Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian</b>					
1.	Industri Farmasi					-
2.	Industri Obat Tradisional					-
3.	Usaha Mikro Obat Tradisional					-
4.	Produksi Alat Kesehatan					-
5.	Pedagang Besar Farmasi					-
6.	Apotek	24				24
7.	Toko Obat	2				2
8.	Toko Alkes					-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

#### b. Tenaga Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan manusia di Indonesia. Selain sarana maupun fasilitas kesehatan, terdapat variabel kesehatan lainnya, seperti tenaga kesehatan. Dengan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang optimal, maka pelayanan kesehatan masyarakat dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, efektif, dan efisien.

Rasio tenaga kesehatan merupakan indikator untuk mengukur ketersediaan tenaga kesehatan di suatu daerah untuk mencapai target pembangunan tertentu. Menurut WHO, Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) memberikan kontribusi hingga 80 persen dalam keberhasilan pembangunan kesehatan.

**Tabel 2.25** Rasio Tenaga Kesehatan dan Indikator Kesehatan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio dokter per satuan penduduk	1 : 2.568	1 : 2.573	1 : 2.467	1 : 3.218	1 : 2.956
2.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1 : 2.293	1 : 2.226	1 : 2.195	1 : 2.060	1 : 1.881
3.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	76,54	86,71	72,51	118,39	137,60
4.	Cakupan Desa/Kelurahan UCI ( <i>Universal Child Immunization</i> ) (%)	100	100	92,19	75,76	66,70

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

Data tersebut diatas menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya memadai. Pada tahun 2022, Rasio Dokter per Satuan Penduduk mencapai 1 : 2.956. WHO menyatakan bahwa kondisi ideal dokter dalam memberikan pelayanan adalah 1 : 2.500 penduduk. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk mencapai 1 : 1.881, dalam arti terjadi peningkatan kecukupan tenaga medis bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1 : 2.060.

Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, beberapa capaian indikator kesehatan yang berkaitan antara lain cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 mencapai 137,60 persen dan Cakupan Desa UCI (*Universal Child Immunization*) pada tahun 2022 sebesar 66,70 persen.

### c. Jaminan Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melaksanakan perluasan cakupan dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) di Kabupaten Bangka Barat dalam rangka pencapaian UHC (*Universal Health Coverage*) dengan harapan masyarakat dapat semakin mudah menjangkau pelayanan kesehatan seutuhnya. Capaian UHC di Tahun 2022 telah mencapai 99,19 persen, dari jumlah penduduk sebanyak 206.937 jiwa.

Tabel 2.26 Cakupan Jaminan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah	Persen
A. PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)			
1	PBI APBN	51.331	24,81
2	PBI APBD	83.673	40,43
<b>SUB JUMLAH PBI</b>		<b>135.004</b>	<b>65,24</b>
B. NON PBI			
1.	Pekerja Penerima Upah (PPU)	34.407	16,63
2.	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/ Mandiri	33.662	16,27
3.	Bukan Pekerja (BP)	2.188	1,06
<b>SUB JUMLAH NON PBI</b>		<b>70.257</b>	<b>33,95</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>205.261</b>	<b>99,19</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bangka Barat, 2023.

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 3.1 Pekerjaan Umum

Indikator pekerjaan umum di Kabupaten Bangka Barat dilihat dari beberapa kondisi terkait urusan pekerjaan umum, yaitu jaringan jalan, jaringan irigasi, dan rasio tempat ibadah.

##### a. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan dapat digambarkan melalui kondisi jalan yang dikategorikan menjadi beberapa kondisi, yaitu baik, sedang, rusak, dan rusak berat. Kondisi jalan dikategorikan baik, apabila permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan  $\leq 6$  persen), sehingga arus lalu-lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan desain dan tidak ada hambatan.

Kondisi jaringan jalan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan suatu daerah. Kondisi jaringan jalan berkaitan dengan konektivitas suatu daerah dengan daerah lain di sekitarnya mengingat jalur perhubungan utama masih dipegang oleh perhubungan darat. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat.

Panjang jalan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022 mencapai 809,77 kilometer. Panjang jalan Kabupaten Bangka Barat cenderung stabil dibandingkan tahun sebelumnya dimana tahun sebelumnya memiliki

panjang jalan yang sama. Sementara proporsi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019-2022 kondisinya berfluktuasi. Pada Tahun 2022 jalan dengan kondisi baik sebesar 63,89 persen dan kondisi sedang sebesar 8,19 persen. Jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 24,19 persen menandakan bahwa kondisi jalan yang rusak parah segera diperbaiki. Kondisi jalan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2019-2022 terlihat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.27** Kondisi Jalan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 – 2022

Kondisi Jalan	2019		2020		2021		2022	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
a. Baik / Good	347,17	49,53	457,23	65,23	532,99	76,04	517,38	63,89
b. Sedang / Moderate	179,67	25,63	106,65	15,22	38,96	5,56	66,314	8,19
c. Rusak / Damage	174,08	24,84	137,04	19,55	125,53	17,91	30,226	3,73
d. Rusak Berat	-	-	-	-	3,44	0,49	195,85	24,19
<b>Jumlah</b>	<b>700,92</b>	<b>100</b>	<b>700,92</b>	<b>100</b>	<b>700,92</b>	<b>100</b>	<b>809,77</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2023.

Walaupun cakupan jalan dengan kriteria baik di Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan, upaya yang kuat untuk penambahan jumlah jaringan jalan baru harus terus dilakukan karena terkait dengan sasaran strategis daerah yaitu “ Indeks Konektivitas Kabupaten”.

#### b. Jaringan Irigasi

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten diutamakan guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangan pengelolaannya dan merupakan faktor penting sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian. Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Pembukaan lahan sawah terus dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan untuk mendukung perkembangan persawahan tersebut telah dibangun irigasi sekunder di beberapa lokasi persawahan oleh Dinas Pekerjaan Umum.



**Tabel 2.28** Luas Areal Pertanian yang Beririgasi Teknis  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2022

No.	Kecamatan	Luas Areal Pertanian (Ha)	Luas Irigasi Sekunder (Ha)		
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Muntok	64	-	-	-
2.	Simpangteritip	579	130	116	116
3.	Kelapa	1.228	562	407	407
4.	Jebus	366	296	308	308
5.	Parittiga	-	-	-	-
6.	Tempilang	305	305	170	170
<b>Total</b>		<b>2.542</b>	<b>1.293</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>
<b>Persentase</b>			<b>50,87</b>	<b>39,38</b>	<b>39,38</b>

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2023.

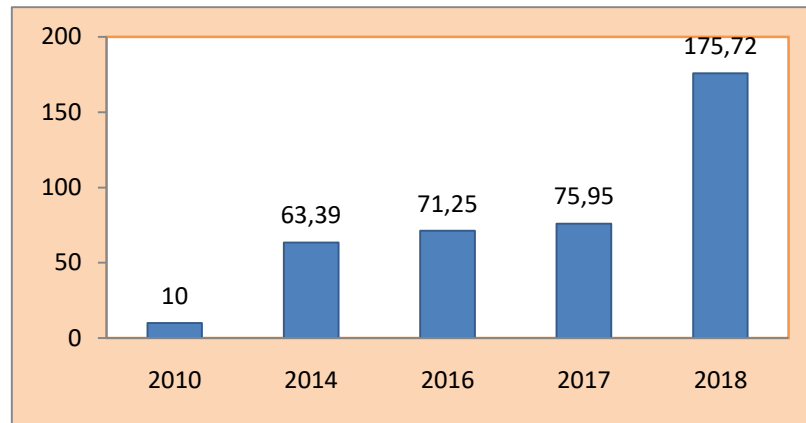
Irigasi teknis yang dimaksud adalah saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap di koneksikan dengan saluran tersier. Sampai dengan Tahun 2021, dari 2.542 ha areal pertanian, yang telah beririgasi teknis adalah seluas 1.001 ha (39,38 persen). Pada Tahun 2022 tidak ada penambahan luasan irigasi dikarenakan tidak ada kegiatan pembangunan irigasi. Sampai saat ini irigasi yang ada belum dapat digunakan sesuai fungsinya dikarenakan belum memiliki sistem jaringan pengairan tersier dan kwarter yang baik dan optimal.

### 3.2 Penataan Ruang

Kondisi Kabupaten Bangka Barat terkait urusan penataan ruang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja antara lain adalah sebagai berikut

#### a. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah yang pada umumnya diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi. RTH ini dimaksudkan untuk mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung seperti fungsi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan suatu wilayah. Proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota, sedangkan proporsi RTH publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota. Perkembangan RTH di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2021.

**Gambar 2.34** Perkembangan Luasan RTH Publik (Ha) di Kabupaten Bangka Barat

Perkembangan luasan RTH terlihat bahwa total Luas RTH publik di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2018 sebesar 175,72 ha. Luasan tersebut masih sangat rendah jika dibandingkan dengan total luasan kawasan areal perkotaan di Kabupaten Bangka Barat yaitu 9.331 ha atau hanya 1,88 persen dari total wilayah perkotaan Kabupaten Bangka Barat, sehingga kedepannya diharapkan terjadi perkembangan luasan RTH, tidak hanya di Kecamatan Muntok namun juga di kecamatan lainnya.

#### b. Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 347 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diberlakukan sejak 2 Agustus 2021. PBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. PBG bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan. Dalam aturan PBG, bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung serta pemanfaatan bangunan gedung.

**Tabel 2.29** Persentase PBG Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

No.	Uraian	2018 (IMB)	2019 (IMB)	2020 (IMB)	2021 (IMB)	2022 (PBG)
1.	Jumlah penetapan bangunan pada tahun n	230	257	269	99	33
2.	Jumlah penetapan bangunan sampai dengan tahun n	2.223	2.480	2.749	2.848	2.881
3.	Jumlah bangunan	44.752	46.862	46.862	46.862	46.862
4.	Persentase penetapan bangunan	4,97	5,29	5,87	6,08	6,15

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bangka Barat, 2023.

Persentase penetapan bangunan gedung per satuan bangunan terus mengalami peningkatan. Dalam meningkatkan persentase bangunan, maka pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang yang didorong oleh rendahnya efektivitas pelayanan, pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

#### c. Dokumen Perencanaan Tata Ruang

Sebagai acuan dalam pembangunan terkait penataan ruang, maka keberadaan dokumen RTRW sangatlah penting, dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014. Dalam penetapan pola ruang pada RTRW Kepulauan Bangka Belitung, baik pada naskah rencana maupun pada gambar peta pola ruang, dapat dikemukakan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) yang ditetapkan di wilayah Kabupaten Bangka Barat, seperti pada tabel berikut.

**Tabel 2.30** Pola Ruang dalam RTRWP Kepulauan Bangka Belitung yang Terletak di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kawasan Lindung	Lokasi Kecamatan
1.	Kawasan Hutan Lindung	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
2.	Kawasan Bergambut	Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jabus
3.	Kawasan Hutan Bakau	Kelapa, Jebus, Tempilang, Simpangteritip
4.	Sempadan Pantai	Kelapa, Parittiga, Simpangteritip.
5.	Sempadan Sungai	Tersebar
6.	Sempadan Kolong	Muntok, Jebus, Tempilang
7.	Suaka Alam/Cagar Alam	Muntok, Simpangteritip, Kelapa.
8.	Cagar Budaya	Muntok.
9.	Taman Hutan Raya	-
10.	Rawan Banjir	Muntok, Parittiga, Jebus,
11.	Rawan Abrasi Pantai	Parittiga, Tempilang, dan Simpangteritip



	Kawasan Budidaya	Lokasi Kecamatan
1.	Produksi	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
2.	Perkebunan	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
3.	Permukiman	Muntok, Simpangteritip, Jebus, Parittiga, Kelapa, Tempilang.
4.	Pertanian (Sawah)	Simpangteritip, Jebus, Kelapa, Muntok

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034.

Peninjauan Kembali (PK) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat telah dilaksanakan pada tahun 2020. Berdasarkan Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014—2034 tersebut diperoleh skor 90,27 sehingga direkomendasikan bahwa RTRW Kabupaten Bangka Barat tidak perlu dilakukan revisi meskipun belum seluruh pola ruang Kabupaten Bangka Barat terealisasi sesuai rencana. Hal ini disebabkan karena sebagian besar realisasi perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangka Barat masih belum terbangun.

Kendala yang dihadapi pada urusan tata ruang diantaranya disebabkan oleh minimnya produk rencana rinci yang harus ditetapkan berdasarkan amanat dari Perda RTRW, sehingga alat untuk pengendalian ruang belum ada. Hal ini karena belum adanya peta yang tersedia di Badan Informasi Geografi (BIG) sesuai dengan persyaratan dalam penyusunan rinci akibat keterbatasan anggaran dan peralatan pendukung. Hingga tahun 2020 produk-produk terkait dengan perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

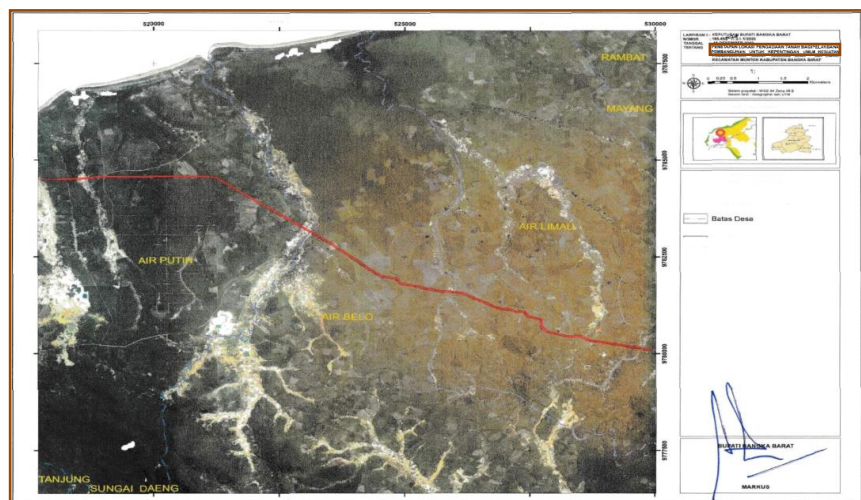
**Tabel 2.31** Produk Perencanaan Tata Ruang  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

No.	Jenis Kebijakan	Tahun
1.	Perbup RTBL Cluster Eropa	2016
2.	Perbup RTBL Cluster Melayu	2017
3.	Perbup RTBL Cluster Cina	2018
4.	Penetapan Lokasi Pelabuhan Sesuai dengan Tata Ruang	2019
5.	Usulan Perubahan Kawasan Hutan	2019
6.	Perbup Tata cara Pemberian Rekomendasi Izin Kesuaian Pemanfaatan Ruang	2020
7.	SOP surat Keterangan Ruang	2020
8.	Keputusan Bupati Terkait Peninjauan Kembali RTRW	2020
9.	Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau	2020

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bangka Barat, 2021.

Selama kurun waktu enam tahun produk perencanaan tata ruang di Kabupaten Bangka Barat sejumlah sembilan kebijakan. Adapun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang telah ditetapkan melalui Peraturan

Bupati Bangka Barat sebanyak tiga kebijakan yakni RTBL Klaster Eropa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Eropa Kota Muntok, RTBL Klaster Melayu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Klaster Melayu Muntok Lama, serta Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau pada Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/503.A/1.3.1.1/2020 tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum kegiatan pembangunan jalan Tanjung Ular-Air Limau Kecamatan Muntok.



**Gambar 2.35** Peta Pengadaan Tanah Untuk Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau

Penetapan Lokasi Jalan Tanjung Ular-Desa Air Limau menjadi hal yang penting mengingat Kawasan Tanjung Ular menjadi Kawasan Strategis Provinsi sebagai Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT). Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat menetapkan rencana struktur jaringan transportasi yang dimaksudkan untuk mengarahkan pemerataan pelayanan transportasi dan perkembangan wilayah Kabupaten Bangka Barat.



**Gambar 2.36** Kondisi Pantai Tanjung Ular

Selain berperan sebagai jalan pembuka ke Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Bangka Barat dipandang penting juga oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai kabupaten yang strategis secara ekonomi sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat didalam RTRW telah menetapkan sistem transportasi darat melalui jaringan jalan khusus Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu, yaitu Ruas jalan Muntok-Air Putih Tanjung Ular-Air Limau sejauh 13,8 km untuk menunjang kawasan tersebut.

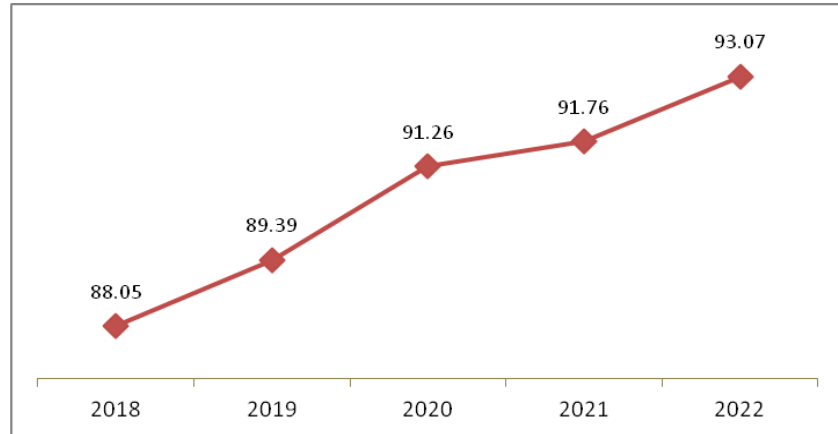
Kabupaten Bangka Barat akan menjadi daerah maju diberbagai bidang terutama industri, industri hilir, perdagangan, perekonomian, perhubungan transportasi darat dan laut ke depan dengan adanya kawasan KIPT Tanjung Ular. Diharapkan adanya Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular dapat menjadi hal positif untuk menarik investor berbagai bidang untuk segera membangun atau menanamkan modalnya di daerah Kabupaten Bangka Barat. Dengan demikian, perekonomian di Bangka Barat dapat bangkit dan *multiflier effect* dari keberadaan kawasan tersebut dapat dirasakan berbagai pihak.

#### **4. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain persentase capaian rumah layak huni, penduduk dengan akses air minum dan sanitasi yang layak.

#### 4.1 Persentase Cakupan Rumah Layak Huni

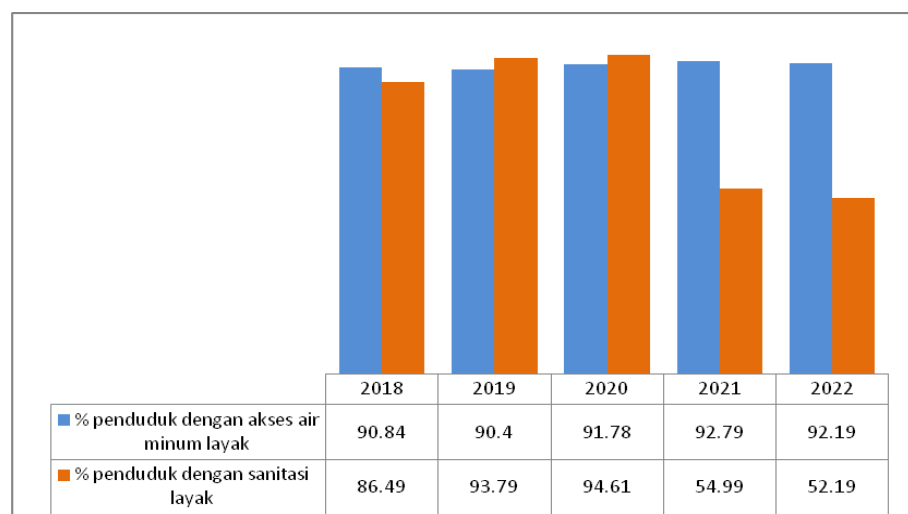
Berdasarkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* ada empat kriteria dalam perhitungan Rumah Layak Huni (RLH) yaitu ketahanan bangunan, luas tempat tinggal, akses sanitasi layak dan akses air minum layak.



**Gambar 2.37** Persentase Cakupan Rumah Layak Huni di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

Cakupan RLH di Kabupaten Bangka Barat terlihat cukup fluktuatif tetapi cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari capaian Tahun 2022 sebesar 93,07 persen dengan capaian jumlah RLH yang ditangani tahun 2022 sebanyak 46.590 RLH dari jumlah 50.058 RLH. Pendanaan penanganan RLH berasal dari berbagai sumber anggaran yaitu APBN, APBD, DAK serta CSR dari PT.Timah.

#### 4.2. Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak



Sumber : Disperkimhub Kab. Bangka Barat, 2023.

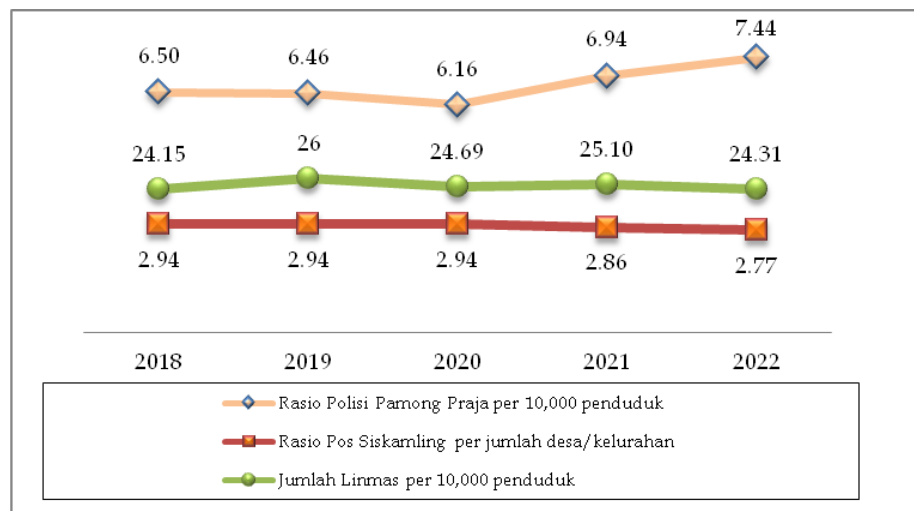
**Gambar 2.38** Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022



Cakupan penduduk dengan akses air minum berkualitas (layak) mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu 90,84 persen menjadi 92,19 persen di tahun 2022. Sementara persentase penduduk bersanitasi layak dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap jamban sehat sebagai sanitasi dasar. Perkembangan jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi layak terlihat pada gambar diatas, dimana pada tahun 2022 penduduk yang memiliki akses sanitasi layak sebesar 52,19 persen.

## 5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan salah satu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Indikator terkait pencapaian urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah dari ketersediaan dan kesesuaian tugas pokok serta kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Pos Siskamling.



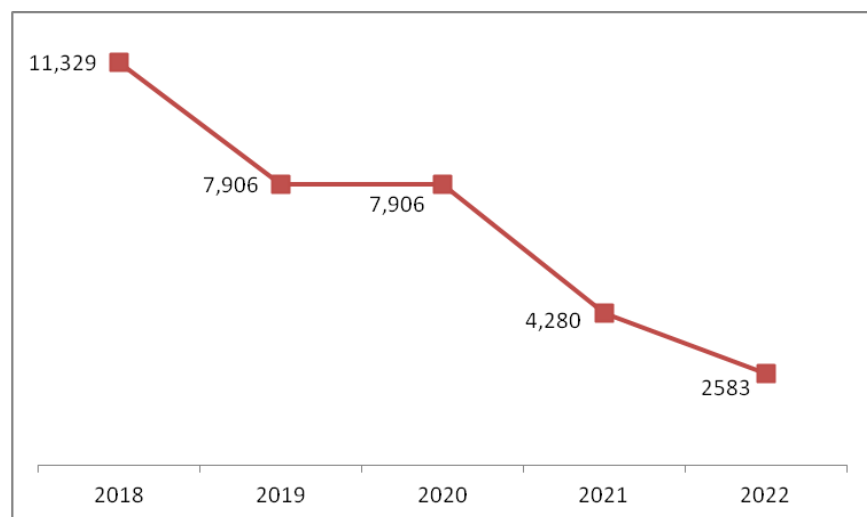
Sumber : Satpol PP dan PB Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.39** Indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan pada rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk dan penurunan pada jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Untuk membangun kesatuan keamanan masyarakat yang baik, tentu jumlah ini perlu ditingkatkan. Kebutuhan ideal untuk jumlah Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja adalah sebanyak 251 sampai dengan 350 PNS dengan perhitungan berdasarkan kriteria umum yang telah ditetapkan di dalam peraturan tersebut.

## 6. Sosial

Terkait pemberdayaan, rehabilitasi, dan perlindungan sosial berbagai program pelayanan sosial telah diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan mendefinisikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Pada tahun 2019, istilah PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). Dalam peraturan tersebut disebutkan terdapat 26 jenis pemerlu pelayanan masalah sosial akibat kemiskinan, keterlantaran, kecacatan dan keterpencilan, termasuk diantaranya fakir miskin, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas, dan komunitas adat terpencil.



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.40** Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Untuk program bantuan perlindungan sosial yang diberikan kepada penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat merupakan komplementaritas Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diantaranya Bantuan Pangan (BPNT/Program Sembako), Kartu Perlindungan Sosial (KPS/Kartu Keluarga Sejahtera), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pemerintah daerah

diwajibkan untuk menerapkan DTKS tersebut, mulai dari pengelolaan DTKS (merupakan rumah tangga atau individu yang memiliki tingkat kemiskinan) yang terdiri dari pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan.

DTKS digunakan sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Penduduk Kabupaten Bangka Barat yang masuk dalam kategori DTKS pada tahun 2022 sebesar 66.789 jiwa, dimana Kecamatan Simpangteritip merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tertinggi dilanjutkan dengan Kecamatan Muntok (versi DTKS). Sementara pada Tahun 2021, jumlah penduduk yang masuk dalam kategori DTKS sebanyak 66.444 jiwa atau meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2022.

**Tabel 2.32** Data Terpadu Kesejahteraan Sosial  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019-2022

KECAMATAN	2019	2020	2021	2022
	JIWA			
Muntok	7.634	8.008	14.230	14.703
Simpangteritip	9.875	9.847	14.636	14.710
Jebus	4.367	4.256	6.891	6.855
Parittiga	4.436	4.214	8.661	8.585
Kelapa	8.892	7.547	13.751	13.668
Tempilang	5.352	5.227	8.271	8.268
<b>TOTAL</b>	<b>40.556</b>	<b>39.099</b>	<b>66.444</b>	<b>66.789</b>

Sumber: Dinas Sosial, PMD Kab. Bangka Barat Kab. Bangka Barat, 2023.

## 7. Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan memiliki aspek multidimensi dan lintra sektoral sehingga perannya menjadi salah satu aspek yang strategis dalam pembangunan manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu TPT.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya

orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Semakin rendah tingkat pengangguran, maka dapat dikatakan tingkat ekonomi disuatu daerah semakin baik/maju, sekaligus merupakan tanda keberhasilan pemerintah dalam pembangunan bidang ketenagakerjaan.

**Tabel 2.33** Indikator Ketenagakerjaan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	106.408	103.518	102.281	104.271	112.728
Bekerja	103.102	100.563	98.071	100.274	107.246
Pengangguran	3.306	2.955	4.210	3.997	5.482
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,83	66,34	65,76	65,98	70,23
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05	2,80	4,12	3,83	4,86

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2023.

TPAK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebesar 70,23 persen artinya sebesar 70 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Persentase penduduk usia kerja mengalami kenaikan sebesar 4,25 dan jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bangka Barat 1,03 poin di Tahun 2022.

Dilihat dari TPT kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022, Kabupaten Bangka Barat menduduki peringkat keempat terendah yaitu sebesar 4,86 persen, urutan TPT tertinggi di Pangkalpinang, yaitu sebesar 5,90 persen sedangkan TPT terendah di Belitung Timur sebesar 2,50 persen.

**Tabel 2.34** Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (persen) Tahun 2018 – 2022

Kabupaten/kota	Persentase				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	4,12	3,80	5,42	5,97	5,39
Belitung	2,93	2,90	4,82	3,51	4,30
<b>Bangka Barat</b>	<b>3,11</b>	<b>2,85</b>	<b>4,12</b>	<b>3,83</b>	<b>4,86</b>
Bangka Tengah	3,93	4,39	5,59	4,95	3,99
Bangka Selatan	4,35	3,87	5,42	5,29	5,09
Belitung Timur	1,50	1,71	3,93	3,78	2,50
Pangkalpinang	4,70	5,01	6,93	6,81	5,90
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	<b>3,65</b>	<b>3,39</b>	<b>5,25</b>	<b>5,03</b>	<b>4,77</b>

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2023.

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada era sekarang ini, peran perempuan telah merambah berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai ibu rumah tangga, namun ikut pula mencari nafkah bagi keluarga. Kemandirian perempuan juga menempatkannya pada posisi tawar yang setara atau bahkan pada beberapa kasus lebih tinggi dari laki-laki. Untuk itu, terkait pembangunan daerah informasi mengenai partisipasi perempuan dalam lingkungan kerja juga perlu ikut dipertimbangkan.

Berdasarkan hasil pemilihan legislatif Kabupaten Bangka Barat tahun 2019, terdapat empat orang perempuan yang menduduki sebagai anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat periode tahun 2019-2024 dari total keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Bangka Barat berjumlah 25 orang. Dari hasil pemilihan legislatif tersebut, maka dapat dilihat proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Bangka Barat saat ini sebesar 16 persen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam proses pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan akses dan partisipasi perempuan. Langkah ini menjadi salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi masyarakat yang dimulai dari pembangunan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan tidak terlihat perbedaan yang berarti antara proporsi perempuan dan laki-laki yang bekerja di lembaga pemerintah. Bahkan, jumlah pegawai perempuan lebih banyak dari pada laki-laki yang bekerja pada lembaga pemerintah di Kabupaten Bangka Barat.

Kualitas hidup anak juga ditentukan dari perlindungan terhadap tindak kekerasan. Pada masa sekarang masyarakat semakin terbuka dan peduli terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta adanya sosialisasi, edukasi, dan advokasi melalui kegiatan sosialisasi pencegahan/perlindungan anak dan remaja dari kekerasan dan kegiatan pengembangan P2TP2A.

**Tabel 2.35** Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Kasus					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Muntok	7	5	3	10	6	5
2.	Kecamatan Simpangteritip	4	-	-	1	3	3
3.	Kecamatan Jebus	1	2	5	2	1	-
4.	Kecamatan Parittiga	3	1	2	5	4	5
5.	Kecamatan Kelapa	4	1	-	3	2	3
6.	Kecamatan Tempilang	-	1	2	3	2	-
Bangka Barat		<b>19</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>16</b>

Sumber : P2TP2A Kabupaten Bangka Barat, 2023.

Dari kasus yang dilaporkan terjadi di tahun 2022 sebanyak 16 kasus di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya ditindaklanjuti dan ditangani oleh masing-masing unit pelayanan terkait penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain oleh RSUD Sejjiran Setason, Dinas Kesehatan, Polres, dan Kejari Kabupaten Bangka Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bangka Barat.

## 9. Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu urusan wajib pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk yaitu pembangunan ketahanan pangan. Pembangunan ketahanan pangan terkait tiga hal, meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, konsumsi pangan dan gizi. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem ketahanan pangan semaksimal mungkin, antara lain melalui jaminan penyediaan pangan. Indikator capaian kinerja dalam urusan pangan meliputi:

### A. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Pada hakikatnya, pemenuhan kebutuhan pangan tidak hanya ditekankan secara kuantitas, namun terpenting adalah kualitas dari pangan tersebut, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 dan Rekomendasi dari Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2012, rata-rata kecukupan energi dan protein bagi penduduk Indonesia yaitu energi sebesar 2.150 kal/kap/hr dan protein sebesar 57 gr/kap/hr pada tingkat konsumsi. Pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 menjadi 2.400 kal/kap/hr. Ketersediaan Energi dan Protein untuk dikonsumsi di Kabupaten Bangka Barat tahun 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36** Ketersediaan Energi dan Protein untuk Dikonsumsi  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2020

No.	Tahun	Energi (Kal/Kap/Hr)	Protein (Gram/Kap/hr)
1.	2017	2.662	69,70
2.	2018	2.728	120,9
3.	2019	2.487,30	69,38
4.	2020	2.779	76

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2021.

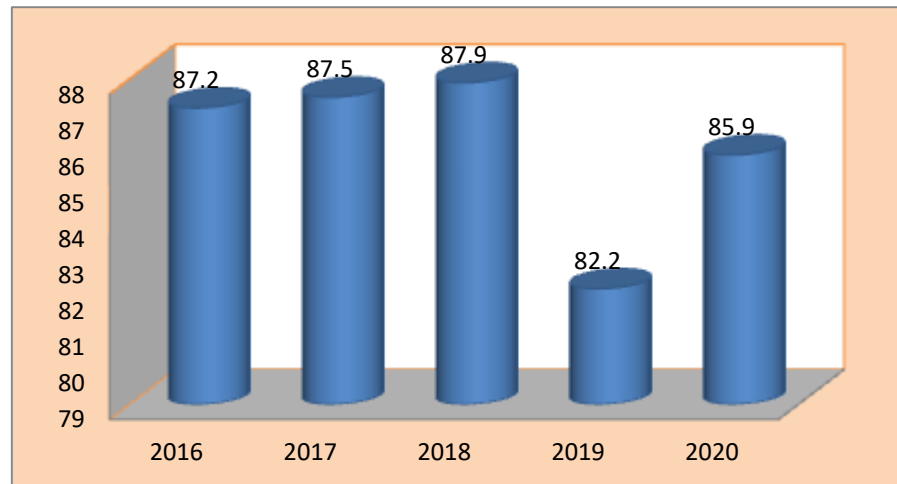
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017- 2020 ketersediaan energi cenderung meningkat, meskipun pada tahun 2019 mengalami penurunan tetapi masih di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Pada tahun 2020 kondisi ketersediaan energi ketersediaan energi mencapai 2.779 kal/kap/hr, atau 15,79% di atas rata-rata kecukupan energi penduduk Indonesia. Adapun ketersediaan protein pada tahun 2017—2020 berfluktuasi, namun demikian selama kurun waktu lima tahun kisaran ketersediaan protein masih di atas kecukupan protein penduduk Indonesia.

## B. Skor Harapan

Penyelenggaraan urusan pangan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2016—2019 terus mengalami perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator terkait ketahanan pangan, yaitu produksi padi yang menunjukkan ketersediaan pangan utama maupun dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang terus meningkat.

PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama, baik secara absolut maupun dari suatu pola ketersediaan atau konsumsi pangan. Acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan adalah PPH dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Skor PPH semakin mendekati angka 100 menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat semakin beragam. Skor PPH merupakan indikator strategis dan penggunaannya menjadi tolak ukur dari gambaran kualitas konsumsi pangan.





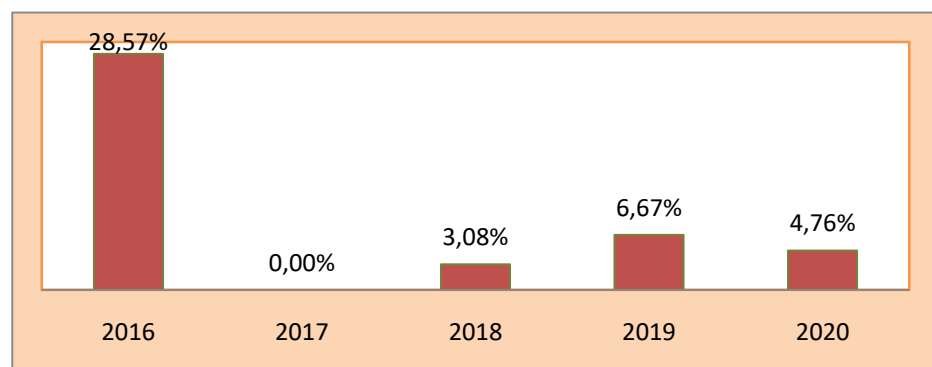
sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2021.

**Gambar 2.41** Skor PPH Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Pada tahun 2020 Skor PPH mulai meningkat mencapai 85,9. Peningkatan ini mengindikasikan kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat semakin baik, semakin beragam, dan berimbang. Skor ideal PPH adalah sebesar 100 yang mengindikasikan kualitas pola konsumsi pangan sudah menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).

### C. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan merupakan persentase antara jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang pengumpul satu tempat sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu, dibagi dengan jumlah total sampel pangan yang diperdagangkan pengumpul di suatu wilayah menurut ukuran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat, 2021.

**Gambar 2.42** Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun mengalami tren penurunan. Pada tahun 2020 pengawasan

dan pembinaan pangan hanya 4,76 persen. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan yang dilakukan masih belum optimal dilaksanakan. Pembinaan dan pengawasan terhadap keamanan pangan perlu ditingkatkan agar keamanan pangan dapat terjamin untuk masyarakat.

## 10. Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Pengelolaan pertanahan diperlukan untuk mendukung keseluruhan elemen pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak atas tanah yang ada.

Indikator pertanahan bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Semakin besar prosentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah yang pada akhirnya berperan mengurangi kasus-kasus tanah negara. Salah satu faktor penghambat dalam pembangunan tidak terlepas dari aspek pertanahan atau lahan.

Persentase luas lahan bersertifikat merupakan hasil bagi antara luas lahan bersertifikat dengan luas wilayah dikali seratus persen. Hingga tahun 2021 Kabupaten Bangka Barat memiliki total 47.663 bidang tanah dengan luas lahan bersertifikat 474.291.407 m<sup>2</sup>. Sementara itu, luas lahan di Kabupaten Bangka Barat adalah 2.848.860.500 m<sup>2</sup>.

**Tabel 2.37** Rekapitulasi Bidang Tanah Bersertifikat  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jenis Sertifikat	Bidang	Luas (m <sup>2</sup> )
Hak Milik	46.395	122.304.975
Hak Guna Usaha	57	347.257.780
Hak Guna Bangunan	781	1.349.855
Hak Pakai	386	3.263.971
Hak Wakaf	44	114.826
<b>Jumlah</b>	<b>47.663</b>	<b>474.291.407</b>

Sumber: BPN Kabupaten Bangka Barat, 2022.

Persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 adalah 16,65 persen. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 16,6 persen dari tahun 2016 hanya sebesar 0,05 persen. Meskipun telah terjadi peningkatan persentase lahan bersertifikat dalam kurun waktu enam tahun, akan tetapi tingkat ketertiban administrasi terkait pertanahan di Kabupaten Bangka Barat masih tergolong minim. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan terkait dengan urusan tanah yakni tidak jelasnya status kepemilikan lahan oleh masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kasus tanah. Pada rentang waktu 2016 hingga 2018, telah terjadi 5 kasus tanah negara. Seperti pada tahun 2016 kasus tanah negara yang terjadi sebanyak 2 kasus dengan status tidak dapat diselesaikan. Sementara pada tahun 2017 dan 2018, terdapat 3 tanah negara yang terjadi dan semuanya dapat diselesaikan.

## 11. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup saat ini sering menjadi sorotan, karena tingkat kesadaran dunia dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan semakin meningkat. Beberapa komponen yang sangat erat dengan lingkungan hidup adalah terkait udara, air dan tutupan lahan/hutan. Dari ketiga komponen tersebut dihitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Perhitungan IKLH diukur dari 3 (tiga) parameter/indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH) dengan bobot untuk masing-masing parameter sebesar 30 persen untuk IKA, 30 persen untuk IKU dan 40 persen untuk ITH.

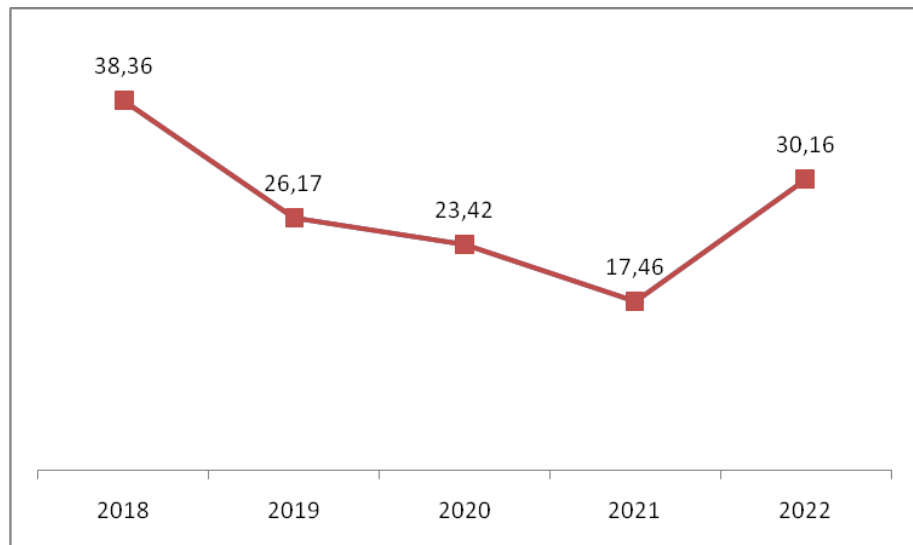
Berdasarkan ketiga parameter tersebut, IKLH Kabupaten Bangka Barat IKLH Tahun 2022 sebesar 69,39 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sebesar 69,21. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD di Tahun 2022 sebesar 70,91 maka IKLH Kabupaten Bangka Barat mencapai 97,85 persen.

**Tabel 2.38** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 – 2022

Parameter	Rata-Rata	Bobot	Nilai	IKLH	Rata-Rata	Bobot	Nilai	IKLH	Rata-Rata	Bobot	Nilai	IKLH
	2020				2021				2022			
Indeks Pencemaran Air	70,00	30	21,00	<b>63,29</b>	65,79	0,376	24,74	<b>69,21</b>	66,67	0,376	25,07	<b>69,39</b>
Indeks Pencemaran Udara	91,52	30	27,46		89,71	0,405	36,33		89,2	0,405	36,13	
Indeks Tutupan Hutan	37,08	40	14,83		37,16	0,219	8,14		37,41	0,219	8,19	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, 2023.

Di sisi lain, pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten berfluktuatif, yaitu dari 38,36 persen pada Tahun 2018, menjadi 30,16 persen pada Tahun 2022. Namun selama tiga tahun terakhir, hal tersebut mengalami penurunan, yaitu sebesar 26,17 persen pada Tahun 2019, di Tahun 2020 sebesar 23,42 persen dan Tahun 2021 turun menjadi 17,46 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH dari izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditangani menurun, atau dengan kata lain bertambahnya penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang dibina serta diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dari yang tidak memiliki izin.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.43** Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Perizinan Lingkungan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

Adapun pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH pada tahun 2018 sebanyak 4 pengaduan, di tahun 2019 sebanyak satu pengaduan, dan pada tahun 2020 sebanyak dua pengaduan. Dari semua pengaduan tersebut, hasilnya dalam tiga tahun terakhir ini dapat terselesaikan.

Indikator penting lainnya dalam urusan lingkungan hidup yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah terkait penanganan persampahan. Penanganan persampahan sampai saat ini masih terfokus pada Kawasan Perkotaan Muntok.

Tabel 2.39 Penanganan Persampahan di Kawasan Perkotaan Muntok Tahun 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi sampah	m <sup>3</sup>	28.771,64	28.771,64	29.058,53	29.058,57	30.765,82
2	Sampah yang ditangani / diangkut	m <sup>3</sup>	5.391,78	5.103,90	5.338,86	5.535,04	6.184,26
3	Tempat Pembuangan Akhir (TPA) aktif	Unit	1	1	1	1	1
4	Tempat Pembuangan Sampah	Unit	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik	Bangunan TPS = 14 titik
5	Pasukan Kuning	Orang	156	160	157	157	157

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bangka Barat, 2022.

Dari data di atas, dapat terlihat bahwa jumlah sampah yang ditangani di kawasan perkotaan Muntok masih sangat kecil, yakni 20,10 persen dari total produksi sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, namun tingkat kebersihan pada fasilitas umum dan publik dapat dikatakan baik. Penanganan persampahan di Kabupaten Bangka Barat sampai saat ini masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota Kabupaten Bangka Barat, sedangkan pengelolaan persampahan di kawasan pedesaan belum dilakukan secara terpadu. Pengelolaan sampah pada fasilitas umum seperti pasar dan terminal di kecamatan selain Kota Muntok, sampai saat ini masih dikelola oleh pihak kecamatan, seperti di Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, dan Kecamatan Parittiga.

Saat ini Kabupaten Bangka Barat hanya memiliki 1 unit TPA aktif yang berada di Kecamatan Mentok dan dengan kondisi yang sudah *over load*. Kabupaten Bangka Barat telah memiliki 2 (dua) Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di Kecamatan Kelapa dan Jebus, namun kedua TPST tersebut tidak berfungsi dengan baik. Disamping itu pula terdapat Tempat Pembuangan Sampah 3R (*Reduce, Recycle dan Reused*) yang berada pada Desa Tempilang, Pelangas, Jebus, Bakit, dan Air Limau. Pengurangan sampah di Desa Air Limau sebanyak 15 ton sampah di Bank Sampah Sepakat Desa Air limau dengan pemilahan atau sebesar 0,24 persen dari sampah yang ditangani.

## 12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu pelayanan wajib yang harus diberikan oleh pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya E-KTP serta pencatatan kependudukan dengan menggunakan sistem (SIAK) pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lebih mudah. Dua hal ini merupakan subbagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Bangka Barat dengan baik kepada masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk kesadaran masyarakat Kabupaten Bangka Barat terhadap identitas diri dan administrasi kependudukan pun memiliki peran penting. Kesadaran ini dibuktikan dengan kepemilikan administrasi kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Akta Kematian. Persentase penduduk Kabupaten Bangka Barat yang memiliki administrasi kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.40** Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Uraian	Persentase Kepemilikan				
	Administrasi Kependudukan				
	2018	2019	2020	2021	2022
Penduduk Memiliki KTP	97,46	98,27	98,56	99,25	96,26
Penduduk Memiliki KIA	7,88	25,92	42,89	45,88	47,31
Penduduk Berakte Kelahiran	39,80	45,55	49,93	50,96	53,05
Pasangan Berakte Nikah	34,27	42,40	47,35	51,32	56,06

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2022.

Persentase penduduk yang memiliki KTP dan Penduduk yang memiliki akte kelahiran belum mencapai 100 persen dikarenakan beberapa penduduk yang berusia lanjut tidak melakukan pengurusan terhadap administrasi kependudukan tersebut. Pada indikator administrasi pasangan yang berakte nikah tidak mencapai 60 persen dikarenakan akta nikah yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat berasal dari penduduk yang non muslim, sedangkan penduduk muslim (beragama Islam) pembuatan akta nikah dilakukan di KUA.

Untuk persentase penduduk berakte kelahiran Tahun 2022 sebesar 53,05 persen, namun untuk persentase penduduk berakte kelahiran 0-18 tahun telah mencapai 95,48 persen.

### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya dapat berhasil apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai “pemberdayaan masyarakat” apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang disertai dengan peraturan pelaksana yang secara tidak langsung menjadikan desa

sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah yang memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Beberapa perubahan yang sangat mendasar terhadap status desa berdasarkan perundangan tersebut meliputi kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, keuangan dan aset desa.

**Tabel 2.41** Rekapitulasi Indeks Desa Membangun  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Status Desa	Tahun	Kecamatan						Total Desa	%
		Muntok	Simpang Teritip	Jebus	Kelapa	Tempilang	Parittiga		
		4 Desa	13 Desa	11 Desa	13 Desa	9 Desa	10 Desa		
Mandiri	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	1	0	0	0	1	2	3,33
	2021	0	1	0	0	0	1	2	3,33
	2022	1	1	1	1	2	2	8	13,33
Maju	2018	0	4	1	0	2	2	9	15,00
	2019	0	4	1	1	3	5	14	23,33
	2020	1	4	1	1	3	4	14	23,33
	2021	3	6	1	1	3	5	19	31,67
	2022	2	8	3	8	4	8	33	55
Berkembang	2018	4	9	9	11	7	8	48	80,00
	2019	4	9	10	12	6	5	46	76,67
	2020	3	8	10	12	6	5	44	73,33
	2021	1	6	10	12	6	4	39	65,00
	2022	1	4	7	4	3	0	19	31,67
Tertinggal	2018	0	0	1	2	0	0	3	5,00
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0
Sangat Tertinggal	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bangka Barat, 2023.

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022, terlihat bahwa terjadi peningkatan status desa di Kabupaten Bangka Barat. Pada Tahun 2018 masih terdapat 5 persen atau sebanyak 3 desa Desa Tertinggal, namun sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 sudah tidak terdapat Desa Tertinggal di Kabupaten Bangka Barat. Sementara pada Tahun 2022



terdapat penurunan status sebanyak 19 Desa dari status berkembang menjadi Desa Maju sehingga persentase Desa berstatus Maju 55 persen atau 33 desa.

Jumlah PKK dari Tahun 2018-2022 tidak terjadi peningkatan, yaitu sebanyak 64 PKK. Sementara untuk jumlah posyandu, pada Tahun 2016 sebanyak 173 dan pada Tahun 2022 menjadi 186 posyandu. Persentase PKK aktif sudah mencapai 100 persen, Posyandu juga memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan balita. Posyandu yang ada di Kabupaten Bangka Barat kecenderungannya terus meningkat.

#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992, Keluarga Berencana (KB) adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui Pendewasaan Usia Perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Oleh sebab itu, banyaknya peserta KB aktif di Kabupaten Bangka Barat dapat memperlihatkan seberapa besar kepedulian masyarakat terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penekanan banyaknya kelahiran. Adanya bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang ditujukan untuk masyarakat yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

**Tabel 2.42** Cakupan Peserta KB Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Peserta KB Aktif	Pasangan Usia Subur	Cakupan Peserta KB Aktif (%)
2018	30.939	38.792	79,76
2019	31.680	39.286	80,64
2020	30.215	38.162	79,18
2021	31.331	38.872	80,60
2022	25.086	33.683	74,48

Sumber: DP2KBP3A Kab. Bangka Barat, 2023.

Cakupan peserta KB menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi diantara Pasangan Usia Subur (PUS). Pada Tahun 2018-2022 cakupan peserta KB di Kabupaten Bangka Barat mengalami fluktuatif. Data peserta cakupan KB aktif pada tahun terbaru, yaitu tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 dengan cakupan peserta KB aktif 80,60 persen menjadi 74,48 persen.

Selain melalui pelaksanaan program dan kegiatan terkait Keluarga Berencana, untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi peserta KB aktif tentunya tidak terlepas dari peran para penyuluh KB. Dari jumlah PLKB/PKB yang ditugaskan di 6 (enam) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat ini belum mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat sesuai dengan SPM yaitu satu petugas di setiap 2 (dua) desa/kelurahan (66 desa/kelurahan).

## 15. Perhubungan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang mempunyai daya dorong dalam pembangunan kepariwisataan serta sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah sehingga terciptanya kenyamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas, diperlukan adanya dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Kebijakan pembangunan sistem transportasi kedepan hendaknya dipadukan dalam sebuah bingkai sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu suatu sistem yang memungkinkan kebutuhan akses yang mendasar dari masyarakat dapat terpenuhi dengan selamat, terjangkau, efisien, memberikan pilihan moda transportasi, dan mendukung perkembangan ekonomi.

Berikut beberapa kondisi daerah Kabupaten Bangka Barat terkait dengan urusan perhubungan antara lain :

### a. Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah penumpang/barang yang diangkut menggambarkan mobilitas masyarakat dalam menggerakkan perekonomian di daerah yang diukur dengan menghitung jumlah penumpang/barang yang datang/berangkat dengan kendaraan umum. Arus penumpang yang secara langsung dari dan ke Kabupaten Bangka Barat yaitu melalui transportasi darat melalui Bis/travel Antar Kota serta melalui transportasi laut berupa kapal angkut penumpang serta kapal angkut barang.

**Tabel 2.43** Jumlah Arus Penumpang dan Angkutan Umum  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2021

No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	%	65	59	59	58
2.	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang	25.197	22.476	20.568	20.300
3.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang	30.341	26.914	19.842	19.700
4.	Pemasangan Rambu- rambu	jumlah	778	778	778	778

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2023.

Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal di Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2018-2021 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi tinggi, pelayanan angkutan umum belum memenuhi standar pelayanan, jumlah angkutan umum berkurang, rute/trayek angkutan umum belum menjangkau wilayah, dan kondisi sarana dan prasarana angkutan umum yang buruk. Selain itu untuk penurunan yang terjadi khususnya di tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Pemasangan rambu-rambu lalu lintas cenderung konstan. Hal ini mengindikasikan kurangnya optimalisasi dalam penyediaan, penataan, dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan serta sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Sebagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dalam berlalu lintas, maka upaya pemeliharaan dan penambahan rambu-rambu perlu dilakukan

b. Jaringan Trayek

Jumlah trayek antar kota dalam provinsi yaitu 9 (sembilan) trayek antara lain dengan trayek terminal Muntok–Pangkalpinang, Pelabuhan Tanjungkalian–Pangkalpinang, Kelapa–Pangkalpinang, Kundi–Pangkalpinang, Parittiga–Pangkalpinang, Jebus–Pangkalpinang, dan Tempilang–Pangkalpinang. Sementara untuk jumlah trayek perkotaan terdiri dari 4 (empat) trayek yaitu terminal Muntok–Pelabuhan Tanjungkalian dan Angkutan Dalam Kota Muntok. Sedangkan untuk trayek pedesaan terdapat 5 (lima) trayek yaitu terminal Muntok-terminal Parittiga, terminal Muntok-terminal Kelapa, dan terminal Muntok-Kecamatan Tempilang, terminal Muntok- Mayang, dan terminal Muntok-Kundi.

**Tabel 2.44** Jaringan Trayek Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Trayek Antar Kota dalam Provinsi	9	9	9	9	9
2.	Jumlah Trayek Perkotaan dalam Kabupaten	4	4	4	4	4
3.	Jumlah Trayek Pedesaan dalam Kabupaten	5	5	5	5	5

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2023.

Dari data diatas jika dibandingkan dengan jumlah desa yaitu sebanyak 60 maka dengan jumlah trayek dalam pedesaan sebanyak 5 (lima) trayek maka masih sangat kecil. Namun hal ini juga bisa diartikan bahwa ada alternatif lain dalam keterhubungan transportasi antar desa yaitu berupa ketersediaan jasa ojek dan kurangnya minat masyarakat untuk mengguna jasa transportasi pedesaan.

## c. Uji KIR Angkutan Umum

Kabupaten Bangka Barat telah memiliki tempat yang representatif sesuai standar untuk pengujian kendaraan bermotor, namun masih terkendala dengan kurangnya SDM yang terlatih serta prasarana pendukung pengujian KIR.

**Tabel 2.45** Uji KIR Angkutan Umum  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No.	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Tempat Uji KIR	1	1	1	1	1
2.	Petugas Uji KIR	2	2	2	2	2
3.	Lama Pengujian KIR (menit)	25	25	25	25	25
4.	Jumlah kendaraan	139.773	143.771	168.204	168.204	168.292
	- Kendaraan Roda Dua	128.184	131.740	155.565	155.565	152.947
	- Kendaraan Roda Empat/lebih	11.589	11.991	12.639	12.639	15.345
5.	Jumlah Kendaraan wajib KIR yang diuji KIR	1.609	1.745	1.604	1.228	1.318
	- Ulang	1.532	1.646	1.546	1.182	1.210
	- Baru	77	99	58	46	108
6.	Biaya Pengujian KIR					
	- Mobil penumpang	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
	- Mobil Bus	42.000	42.000	42.000	60.000	60.000
	- Mobil Barang	52.000	52.000	52.000	70.000	70.000
	- Kereta gandeng	42.000	42.000	42.000	80.000	80.000

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2023.

## d. Jumlah pelabuhan laut/ terminal bis

Saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) pelabuhan Laut, yaitu Pelabuhan Muntok, Pelabuhan Unit Metalurgi dan Pelabuhan Tanjung kalian. Pelabuhan Muntok diperuntukkan sebagai pelabuhan bongkar muat barang dan ikan. Kondisi pelabuhan Muntok semakin kritis dikarenakan terjadinya sedimentasi/pengendapan tanah di daerah pesisir pelabuhan. Hal ini berdampak pada sulitnya kapal untuk mendekat ke daerah pantai. Kapal harus berhenti sekitar 50-100 meter dari pantai. Sedangkan untuk Pelabuhan Unit Metalurgi dikhususkan untuk keperluan bongkar muat PT.Timah Tbk saja. Pelabuhan Tanjungkalian merupakan pelabuhan penumpang sekaligus pelabuhan barang karena sebagian besar barang masuk atau keluar dari Kabupaten Bangka Barat ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan ini dengan menggunakan fasilitas kapal ferry.

Untuk melayani transportasi antarkota dan di dalam kota, Kabupaten Bangka Barat memiliki 3 (tiga) buah terminal, yang terletak di kecamatan Muntok, kecamatan Kelapa dan kecamatan Parittiga. Tipe terminal tertinggi yang dimiliki saat ini adalah tipe C yang terletak di Kecamatan Muntok. Namun, rute bis via terminal yang ada saat ini belum melingkupi hingga ke seluruh pelosok daerah yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 2.46** Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah Rambu - rambu Lalu Lintas (Unit)	778	778	778	778	778
2.	Jumlah <i>Traffic Light</i> ( Lokasi/Unit )	5/29	5/29	5/29	5/29	5/29
3.	Panjang Pagar Pengaman Jalan ( m )	2620	2620	2620	2620	2620
4.	Jumlah Deliniator ( Unit )	542	542	542	542	542
5.	Panjang Marka Jalan ( m )	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6.	Jumlah <i>Warning Light</i> ( m )	24	24	24	24	24
7.	Jumlah <i>Traffic Cone</i> ( unit )	156	156	156	156	156
8.	Panjang Median Jalan	155,83	155,83	155,83	155,83	155,83

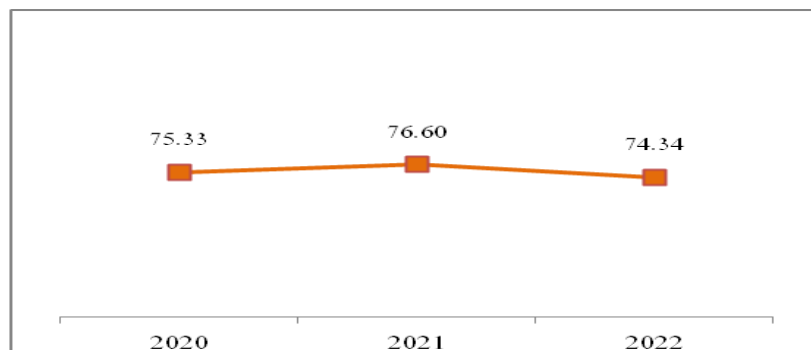
Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab. Bangka Barat, 2023.

Guna meningkatkan upaya keselamatan, keamanan, ketertiban dan mencegah serta mengurangi kecelakaan lalu lintas, telah dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan. Fasilitas perlengkapan jalan hingga tahun 2022 tidak mengalami penambahan jika dibandingkan dengan tahun 2017 kecuali untuk Jumlah *Traffic Light* (lokasi/unit) bertambah dari 4 (empat) lokasi sebanyak 2 (dua) unit bertambah menjadi 5 (lima) lokasi sebanyak 29 unit yang merupakan hibah dari provinsi.

## 16. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi sudah menjadi kebutuhan masyarakat suatu daerah agar dapat bersaing secara global. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi yang mendukung pertukaran informasi dan terjadinya komunikasi. Semakin baik akses masyarakat terhadap teknologi, maka semakin baik pula pemahaman terhadap informasi.

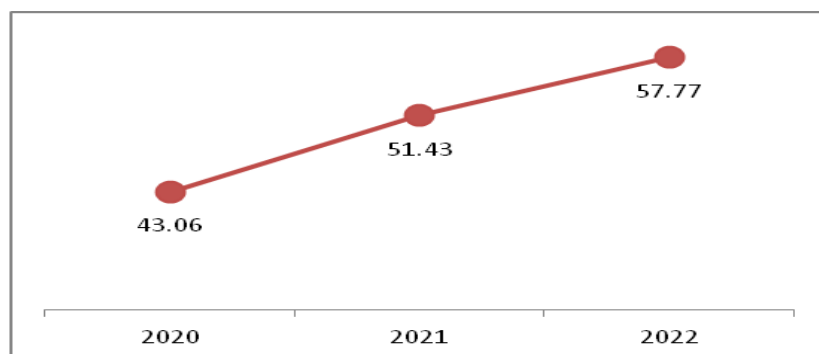
Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah yang perkembangannya tidak bisa terlepas dari interaksi dengan wilayah sekitarnya. Pada bagian-bagian sebelumnya, telah diutarakan bahwa terdapat banyak potensi-potensi internal daerah Bangka Barat, yang bisa berkembang dengan adanya suntikan investasi ataupun kerjasama dengan investor dari luar daerah. Oleh karena itu, akses terhadap informasi dan komunikasi merupakan salah satu poin krusial dalam menunjang perkembangan dan pembangunan wilayah. Apalagi dengan kondisi fisik geografisnya yang berada pada wilayah kepulauan, perlu adanya infrastruktur penunjang yang bisa mengatasi kendala (*barrier*) fisik ini. Teknologi nirkabel (*wireless*) merupakan salah satu tumpuan dalam sistem informasi dan komunikasi di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022.

**Gambar 2.44** Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler/Nirkabel dalam 3 Bulan terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022

Dampak dari berkembangnya teknologi dengan pesat adalah keterbukaan komunikasi dan informasi bagi seluruh masyarakat, dengan berkembangnya teknologi masyarakat dapat berkomunikasi dan mendapatkan informasi secara cepat sesuai kepentingannya dan mengetahui kepentingan publik lainnya.



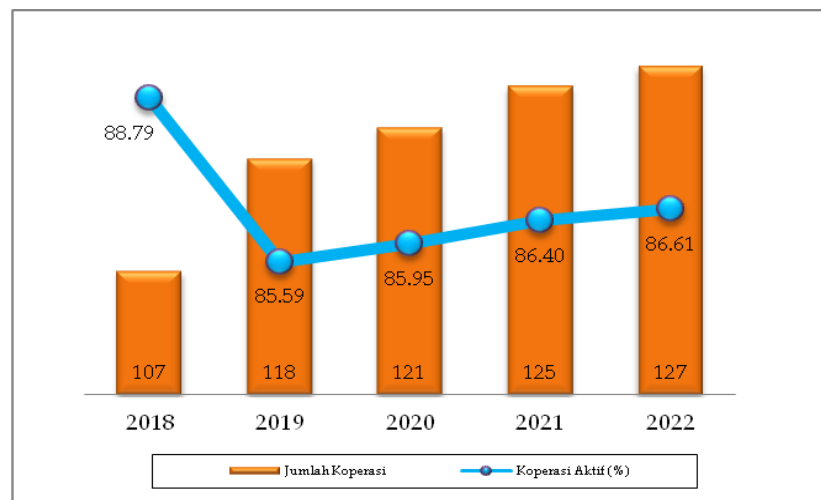
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2022.

**Gambar 2.45** Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun Ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022

## 17. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam era desentralisasi daerah, koperasi berperan besar sebagai lembaga keuangan yang kokoh guna menjangkau lapisan bawah dari ekonomi kerakyatan, khususnya di wilayah perdesaan. Keberadaan koperasi juga berperan dalam menahan arus keluar sumber keuangan daerah karena beragam studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berbasis daerah akan lebih efektif dalam menahan arus kapital keluar.

Dengan berkembangnya koperasi diharapkan turut membantu perputaran perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang bergelut pada usaha mikro dan kecil. Ketidadaan jaminan yang sering kali menjadi penghambat untuk melakukan pinjaman pada perbankan, menjadikan koperasi sebagai pilihan utama bagi masyarakat. Secara kuantitas, perkembangan koperasi di Kabupaten Bangka Barat dapat dikatakan stabil.

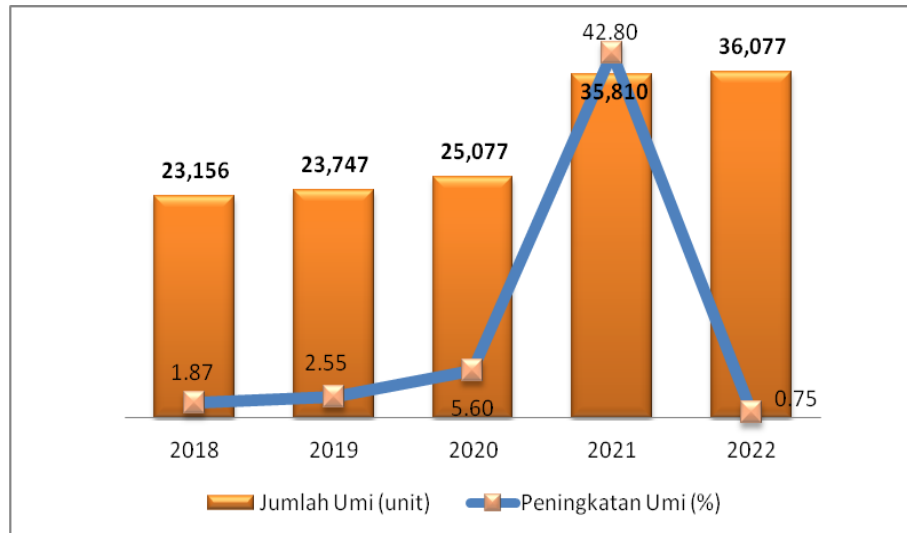


Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.46** Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Dilihat dari jumlah usaha mikro di Kabupaten Bangka Barat dari Tahun 2018 sampai dengan 2022, menunjukkan perkembangan yang positif atau terus meningkat, begitu pula dengan persentase peningkatan/pertumbuhan usaha mikro menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada Tahun 2018 jumlah usaha mikro sebanyak 23.156 unit meningkat menjadi 36.077 unit di tahun 2022.





Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.47** Jumlah dan Persentase Peningkatan Usaha Mikro di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

**Tabel 2.47** Jumlah UMi per Sektor Usaha di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

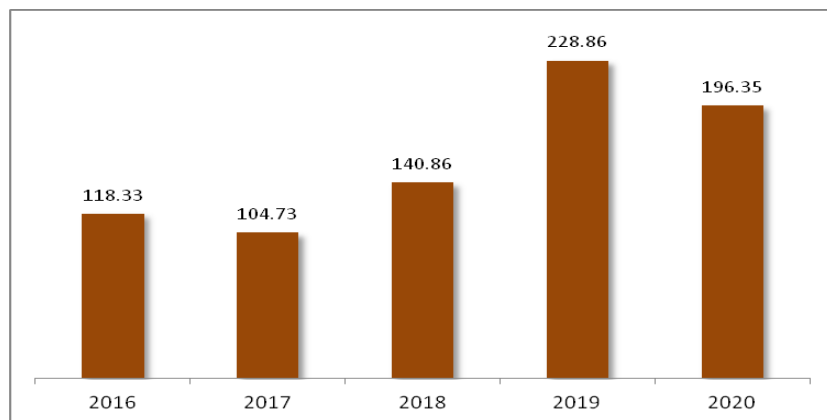
NO	SEKTOR USAHA	JUMLAH UMi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian	15.529	16.208	16.659	20.482	20.531
2	Kehutanan	-	-	-	-	-
3	Perikanan	1.009	1.011	1.012	1.349	1.349
4	Peternakan	27	27	28	122	122
5	Pertambangan dan Penggalian	663	663	670	767	767
6	Industri Pengolahan	990	1.293	1.711	3.404	3.404
7	Pengadaan Listrik, Gas	-	-	-	-	185
8	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30	91	92	148	148
9	Konstruksi	142	180	182	387	387
10	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	3,404	3,401	3,846	7,494	7,494
11	Transportasi dan Pergudangan	15	15	19	97	97
12	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	410	275	275	552	552
13	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	7	7
14	Jasa Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-
15	Real Estat	-	-	-	-	-
16	Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-
17	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-
18	Jasa Pendidikan	-	-	-	1	2
19	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	1	33
20	Jasa Lainnya	512	583	583	999	999
<b>JUMLAH</b>		<b>23.156</b>	<b>23.747</b>	<b>25.077</b>	<b>35.810</b>	<b>36.077</b>

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Bangka Barat, 2023.

Berdasarkan jumlah UMi per sektor usaha di Kabupaten Bangka Barat, jumlah sektor UMi terbanyak di tahun 2022 terdapat pada sektor pertanian sebanyak 20.531 unit UMi atau 56,91 persen dari total seluruh sektor UMi yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

## 18. Penanaman Modal

Penetapan fokus pengembangan penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat disesuaikan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki sehingga dapat mendukung sektor unggulan atau prioritas daerah. Potensi dan peluang penanaman modal di Kabupaten Bangka Barat perlu dijaga karena meningkatnya penanaman modal akan memberikan pengaruh positif bagi pembangunan daerah. Kegiatan pengembangan penanaman modal (investasi), sangat terkait dengan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah, seperti menciptakan lapangan kerja, mencapai stabilitas ekonomi daerah, dan mengembangkan basis ekonomi yang beragam. Kebijakan dari pemerintah daerah dibutuhkan demi terciptanya iklim yang kondusif untuk investasi. Berdasarkan data pada tahun 2016-2020, diketahui bahwa rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bangka Barat fluktuatif.

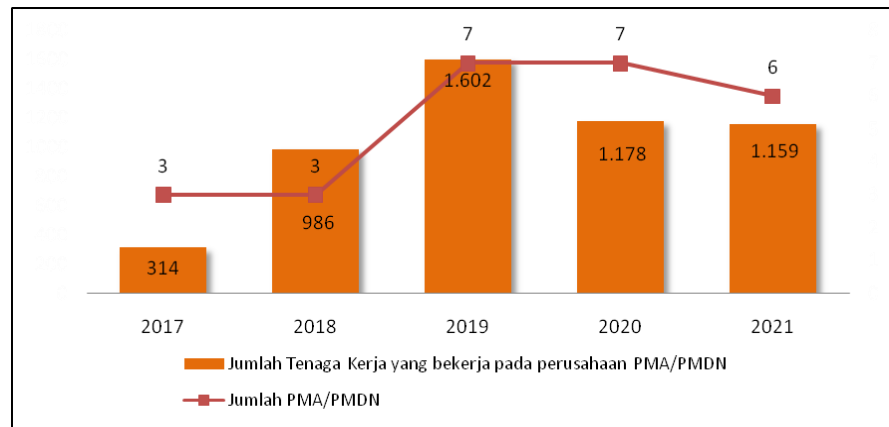


Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.48** Rasio Daya Serap Tenaga Kerja  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Rasio ini menggambarkan daya tampung proyek investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja, maka semakin besar pula daya tampung proyek investasi PMA/PMDN. Adapun di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2020, rasio daya serap tenaganya mencapai 196,35. Rasio daya serap tenaga kerja tersebut mengalami penurunan sebesar 32,51 dari tahun sebelumnya. Rasio daya serap tenaga kerja merupakan perbandingan antara jumlah

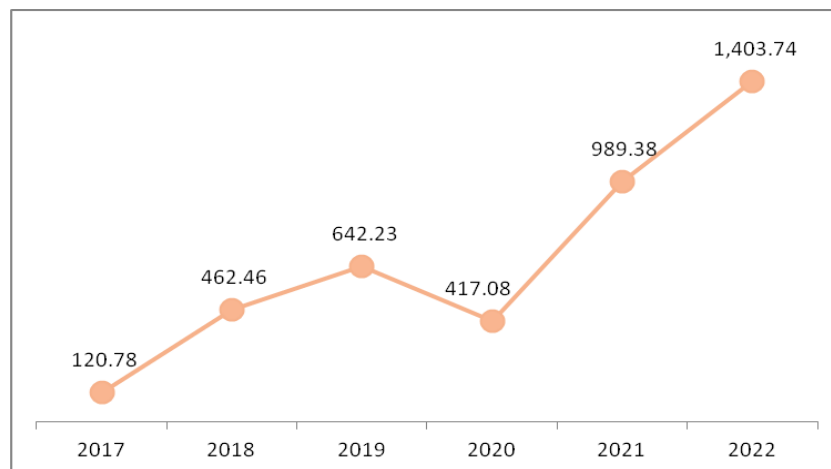
tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2021.

**Gambar 2.49** Jumlah Tenaga Kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Besarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat khususnya di sektor perkebunan dan perindustrian membuka peluang untuk pengembangan investasi kedepan.



Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.50** Pertambahan Nilai Investasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022 (miliar rupiah)

Dilihat dari gambar di atas terjadi peningkatan pertambahan nilai investasi sebesar Rp414,36 milyar atau 30 persen di Tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian nilai investasi Tahun 2021.

**Tabel 2.48** Investasi PMA dan PMDN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2022

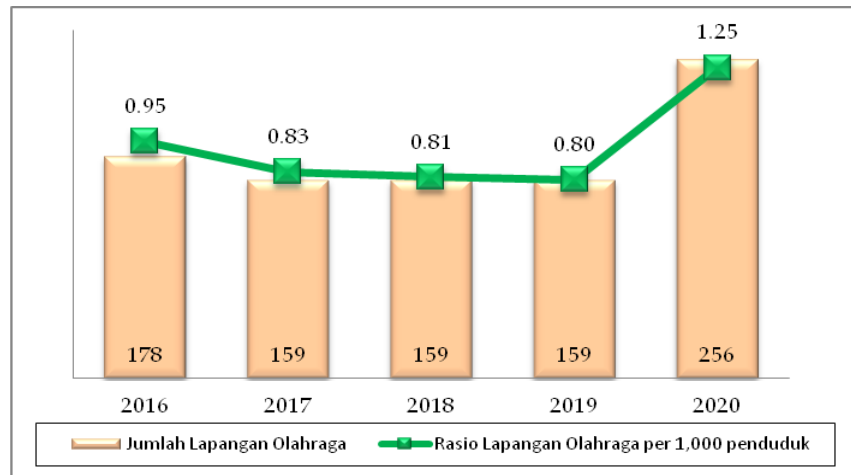
Jenis Investasi	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Sektor Primer PMDN	34.271.285.738	235.499.464.594	33.671.212.228	866.209.541.750
Sektor Primer PMA	28.709.356.884	115.529.098.837	3.908.610.662	1.926.508.102
Sektor Sekunder PMDN	132.694.366.567	-	634.000.021.000	512.628.616.554
Sektor Sekunder PMA	605.923.093	5.346.126.767	271.160.691.272	6.577.189.981
Sektor Tersier PMDN	445.957.122.091	60.707.309.802	46.638.578.098	16.397.344.000
Sektor Tersier PMA	-	-	-	-
<b>Total Investasi</b>	<b>642.238.054.373</b>	<b>417.082.000.000</b>	<b>989.379.113.260</b>	<b>1.403.739.200.387</b>

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Nakertrans Kab. Bangka Barat, 2023.

PMA dan PMDN yang telah terealisasi di Kabupaten Bangka Barat sampai tahun 2022 sebesar Rp1.403.739.200.387,- mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp989.379.113.260,-. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) online, investor sektor primer penyumbang terbesar bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit senilai Rp753.503.711.033,00. Pada investasi sektor sekunder di Kabupaten Bangka, yaitu Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*), Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri, Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi dan Aktivitas Rumah Sakit Swasta. Sebaliknya, pada investasi sektor tersier, hanya terdapat PMDN, yaitu pada jenis investasi Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara serta Konstruksi Sentral Telekomunikasi.

## 19. Kepemudaan dan Olahraga

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menunjang bidang olahraga dengan menyediakan sarana dan prasarana. Fasilitas keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah fasilitasi pembentukan organisasi olahraga, pembangunan lapangan olahraga dan gelanggang olahraga. Sebaran jumlah lapangan olahraga dan rasio jumlah lapangan olahraga per 1000 penduduk di Kabupaten Bangka Barat hingga tahun 2020 sebanyak 256 lapangan dengan rasio 1,25 dalam rangka meningkatkan kualitas keolahragaan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.51** Jumlah Lapangan Olahraga dan Rasio Lapangan Olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 - 2020

Jenis lapangan olahraga tersebut yaitu lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, kolam renang, Atletik, lapangan futsal, lapangan tenis, gedung olahraga, lapangan menembak, panahan, sasana tinju, dan tempat biliar. Ketersediaan fasilitas olahraga terlengkap berada di Kecamatan Muntok yaitu mempunyai 12 jenis lapangan olahraga, di Kecamatan Tempilang dan Kecamatan Jebus hanya mempunyai 4 jenis lapangan olahraga.

**Tabel 2.49** Jumlah dan Jenis Lapangan Olahraga Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

Jenis Lapangan	Jebus	Kelapa	Muntok	Parittiga	Simpang Teritip	Tempilang
Lapangan Bola voli	13	11	15	23	19	23
Lapangan Bola Basket	1	1	7	10	1	1
lapangan Tenis			4			
Futsal	2	1	6	4	6	6
Atletik			1		1	
Bulutangkis	14	7	10	18	23	13
GOR			2			
Kolam renang		1	2	1		
Lapangan Tembak			3			
Panahan			1			
Sasana Tinju/beladiri			3			
Biliar			1	1		
Jumlah per Kecamatan	30	21	55	57	50	43

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2022

Jika dilihat dari prestasi olahraga melalui Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Daerah, dan Kejuaraan Daerah, Kabupaten Bangka Barat selalu masuk dalam peringkat ke-6 atau ke-7 besar. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga pelajar maupun olahraga prestasi di Kabupaten Bangka Barat belum dapat bersaing dengan

Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan prestasi pada kejuaraan POPDA dengan menduduki peringkat 3 dari 7 kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2.50** Peringkat Lomba PORPROV, POPDA, dan Kejurda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2020

Kabupaten/Kota	PERINGKAT					
	Popda 2016	Kejurda 2017	Popda 2018	Porprov 2018	Kejurda 2019	Popda 2020
Bangka	4	5	3	1	4	2
Pangkalpinang	3	3	1	2	1	1
Bangka Tengah	2	4	6	3	5	5
Belitung	5	1	4	4	3	6
Belitung Timur	6	2	5	5	2	-
Bangka Selatan	1	7	2	6	7	4
Bangka Barat	7	6	7	7	6	3

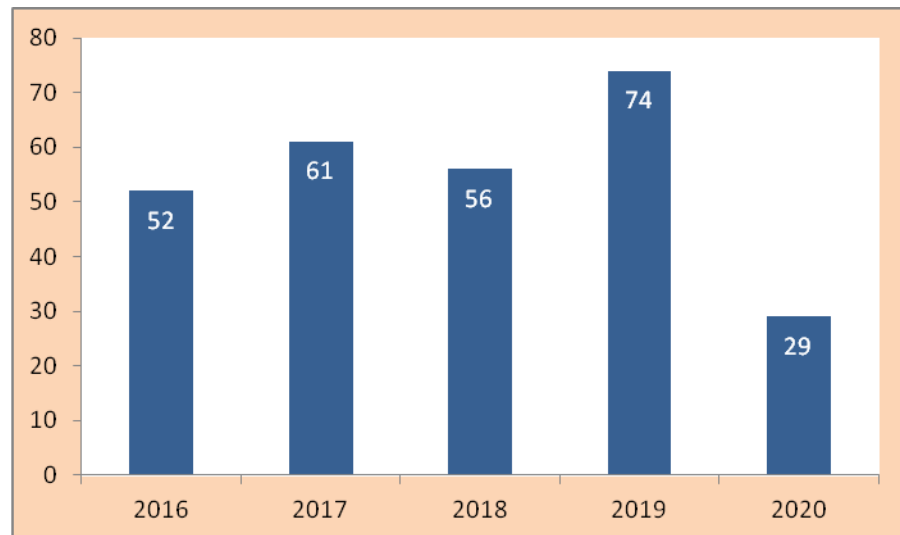
Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2021.

Dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di Kabupaten Bangka Barat yaitu mempunyai SDM pelatih yang bersertifikasi. Sertifikasi pelatih mempunyai beberapa level kategori yaitu kategori Kabupaten Daerah, Nasional maupun Internasional. Jenis kategori level pelatih disesuaikan dengan aturan masing-masing pengurus besar cabang olahraga. Tahun 2020 sebanyak 47 pelatih yang bersertifikasi yaitu level kabupaten/cabang sebanyak 12 pelatih terdiri dari cabang olahraga pencak silat, level provinsi/daerah sebanyak 17 pelatih terdiri dari cabang olahraga pencak silat, sepak takraw, bola voli, bola basket, atletik, karate dan taekwondo dan level Nasional sebanyak 18 pelatih terdiri dari cabang olahraga catur, sepakbola, bola voli dan karate.

**Tabel 2.51** Pelatih yang bersertifikasi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020

Level	Jumlah	Cabang Olahraga
Nasional	18	Catur, Sepak bola, Bola voli, dan Karate
Provinsi	17	Pencak silat, Sepak takraw, Bola voli, Atletik, Basket, Karate, dan Taekwondo
Kabupaten	12	Pencak Silat
<b>Total</b>	<b>47</b>	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2021



Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab.Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.52** Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Atlet berprestasi di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya berfluktuatif. Atlet terbanyak di tahun 2019 sejumlah 74 atlet berprestasi, menurun di tahun 2020 hanya memiliki 29 atlet berprestasi.

Rendahnya prestasi olahraga baik olahraga pendidikan maupun olahraga prestasi Kabupaten Bangka Barat secara umum disebabkan oleh masih minimnya sarana dan prasarana olahraga, kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi para atlet baik pembinaan rutin maupun ketika persiapan menghadapi perlombaan, serta pendanaan yang belum memadai. Selain itu, pandemi Covid-19 menjadi penyebab menurunnya pembinaan olahraga yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan keikutsertaan atlet yang mengikuti kompetisi. Namun di setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat selalu memberikan Hibah untuk kemajuan dunia olahraga melalui lembaga KONI Kabupaten Bangka Barat.

## 20. Statistik

Ketersediaan data statistik sektoral bagi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan dalam rangka menyajikan potensi serta sebagai bahan analisis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah melakukan pengelolaan data informasi pembangunan sebagai optimalisasi pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah. Namun demikian, untuk ketersediaan beberapa data statistik sektoral dari Perangkat Daerah di Kabupaten





Bangka Barat masih belum dapat disajikan secara maksimal dikarenakan belum tervalidasi dan terkelola dengan baik sehingga ke depan masih perlu dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan data statistik sektoral daerah.

## 21. Persandian

Urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi urusan pemerintah daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kinerja Urusan Persandian diukur melalui persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah.

## 22. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan kebudayaan ditinjau dari tingkat pemanfaatan seni dan budaya dalam penyelenggaraan event, baik di daerah maupun luar daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejauh ini, seni dan budaya daerah umumnya ditampilkan pada upacara adat, seperti perang ketupat, tujuh likur, dan acara-acara resmi kedaerahan. Sementara sarana penunjang seperti gedung kesenian belum tersedia di Kabupaten Bangka Barat. Kabupaten Bangka Barat banyak memiliki benda, situs bersejarah. Sebagian besar merupakan peninggalan kolonial Belanda. Dari hasil survey Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jambi terdapat 52 benda, situs dan kawasan bersejarah di Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 210/M/2015 tentang Penetapan Cagar Budaya Peringkat Nasional bahwa Pesanggerahan Menumbing dan Pesanggerahan Muntok termasuk ke dalam 35 cagar budaya yang masuk dalam peringkat nasional. Kemudian berdasarkan SK Bupati Bangka Barat Nomor 188.45/426/2.16.1.1/2018 bahwa bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yaitu Eks. Kantor Pusat PN. Timah Belanda, Menumbing Berghotel, Rumah Residen Mayor Cina, Hollandsche Chinesche School, Gereja Katolik Pelindung Para Pelaut, Gereja Bethesda (GPIB), Menara Suar Tanjung Kalian, Makam Pangeran Hario Pakuningprang, Kelenteng Kong Fuk Miao, dan Masjid Jamik. Sedangkan pada Tahun 2019 dikeluarkan SK Bupati Bangka Barat :

1. Nomor 188.45/269/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Rumah Temenggung Sebagai Bangunan Cagar Budaya;
2. Nomor 188.45/270/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Eks European School Sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
3. Nomor 188.45/272/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Meriam Lantaka Sebagai



Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

4. Nomor 188.45/276.A/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Makam Wan Abdul Jabar, Makam Wan Akub, Makam Wan Serin, Makam Abang Pahang, Makam Isteri Abang Pahang, Makam Abang Muhammad Toyib, Makam Abang Arifin, dan Makam Isteri Abang Arifin Sebagai Struktur Cagar Budaya;
5. Nomor 188.45/282.A/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Benteng Sungai Buluh Sebagai Struktur Cagar Budaya Peringkat Kabupaten Bangka Barat; dan
6. Nomor 188.45/284.B/2.16.1.1/2019 tentang Penetapan Eks Kantor Sahbandar Muntok Sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Pada Tahun 2020 dikeluarkan SK Bupati Bangka Barat tentang Bangunan Cagar Budaya:

1. Nomor 188.45/396/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Bangunan Gudang Kuning sebagai Bangunan Cagar Budaya
2. Nomor 188.45/397/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Benda Mobil Sedan BN 10 Menumbing sebagai Bangunan Cagar Budaya
3. Nomor 188.45/398/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Rumah Residen sebagai Bangunan Cagar Budaya
4. Nomor 188.45/399/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Benteng Tempilang sebagai Bangunan Cagar Budaya
5. Nomor 188.45/400/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Struktur Benteng Kute Seribu sebagai Bangunan Cagar Budaya
6. Nomor 188.45/401/2.16.1.1/2020 Tentang Penetapan Struktur Limbung sebagai Bangunan Cagar Budaya

Balai Purbakala Jambi sudah menginventaris beberapa bangunan diantara lain Benteng Kota Seribu, Makam Kanjeng Pangeran Hario Pakuningprang, Makam Bangsawan di Kecamatan Muntok, Benteng Sungai Buluh di Kecamatan Jebus serta Benteng Kota di Kecamatan Tempilang. Bangunan yang sudah diinventaris telah dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah daerah.

**Tabel 2.52** Realisasi Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya, Seni dan Kebudayaan Daerah yang Dilestarikan dan Terintegrasi dengan Program Pariwisata Tahun 2017 – 2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Benda Warisan Budaya	0	0	0	1	0
2.	Warisan Tak Benda	0	0	0	0	0
3.	Bangunan Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya	2	6	13	17	17
4.	Even Budaya/Even Tradisi	31	34	35	20	14

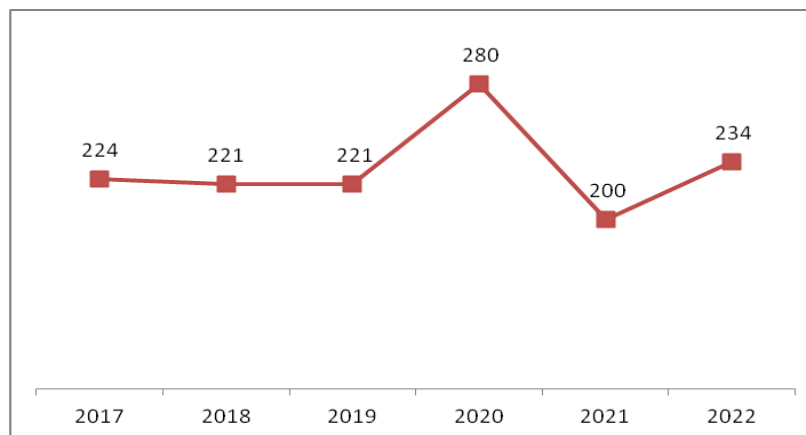
No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
5.	Kesenian Budaya yang diselenggarakan	4	5	3	3	0
6.	Pelestarian nilai sejarah	-	1	1	0	0
<b>Total</b>		<b>37</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>69</b>	<b>31</b>

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.

Dari tabel diatas realisasi pada tahun 2021 target Bangunan Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya terealisasi sebanyak 17 bangunan, event budaya dapat terlaksana sebanyak 14 kali, kesenian/budaya diselenggarakan tidak dapat terlaksana dikarenakan pandemi *Covid-19*.

### 23. Perpustakaan

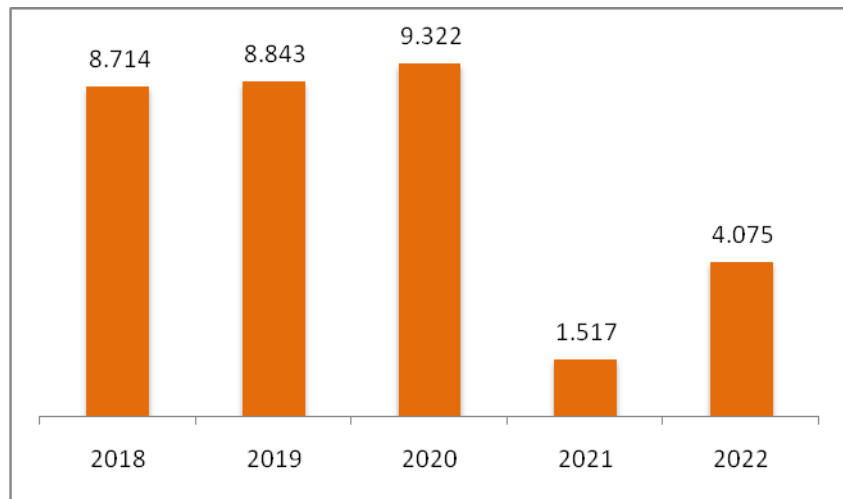
Budaya membaca merupakan kebiasaan yang perlu terus diasah dan dipupuk sejak dini. Membaca membuka wawasan terhadap berbagai macam hal yang bermanfaat. Perpustakaan sebagai gudang buku sangat berperan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kabupaten Bangka Barat memiliki 234 perpustakaan hingga Tahun 2022 yang terdiri dari 1 perpustakaan daerah, 138 perpustakaan di SD/MI, 45 perpustakaan di SMP/MTs, 50 perpustakaan desa/kelurahan. Selain perpustakaan, Kabupaten Bangka Barat memiliki taman bacaan masyarakat yang tersebar di beberapa desa/kelurahan yaitu sebanyak 12 taman bacaan.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2022.

**Gambar 2.53** Jumlah Perpustakaan  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2022

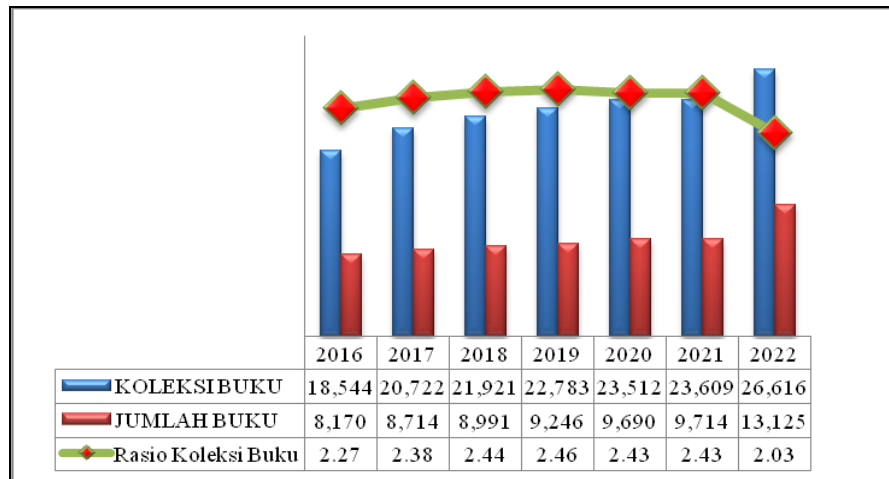
Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan dari 1.517 orang di tahun 2021 menjadi 4.075 orang di tahun 2022. Hal ini dikarenakan telah diresmikannya gedung perpustakaan daerah milik Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.54** Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Untuk meningkatkan kunjungan di perpustakaan, maka ketersediaan dan keragaman buku bacaan sangat menentukan. Sampai dengan tahun 2022 koleksi dan judul buku perpustakaan terus meningkat baik yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sendiri maupun bantuan dari provinsi dan pusat.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.55** Jumlah Judul Buku, Jumlah Koleksi Buku dan Rasio Koleksi Buku Perpustakaan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2022

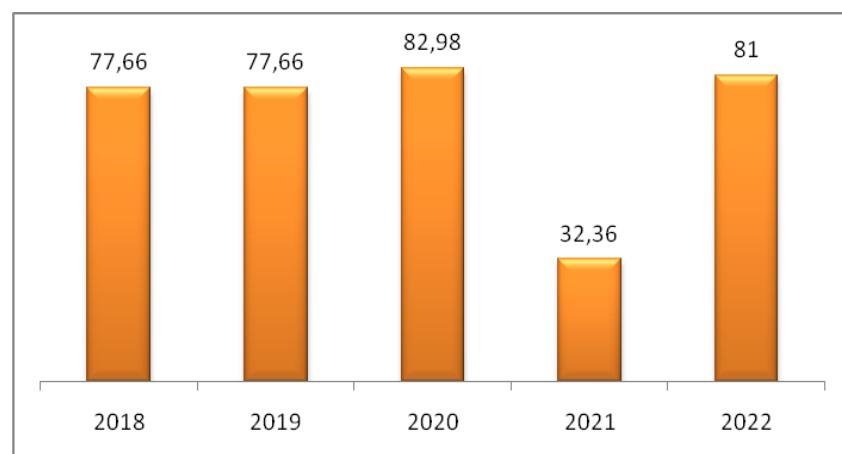
Dari koleksi buku perpustakaan daerah Kabupaten Bangka Barat baik dari jumlah judul maupun jumlah buku terjadi peningkatan disetiap tahunnya. Pada Tahun 2016, jumlah judul buku Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 8.170 judul buku dengan jumlah koleksi buku sebanyak 18.544 buku dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 13.125 judul buku dengan jumlah koleksi buku sebanyak 26.616

buku. Dilihat dari ketersediaan buku tersebut, diharapkan dapat memenuhi ketersediaan dan keberagaman jumlah dan koleksi buku bagi masyarakat.

Jika dilihat dari perkembangan teknologi di masyarakat, maka kebutuhan akan bahan baca dalam bentuk digital menjadi suatu keharusan. Dilihat ketersediaan koleksi bahan pustaka digital di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat, sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 177 koleksi *e-book*. Minimnya koleksi bahan pustaka digital tersebut disebabkan masih sulitnya pengadaan bahan pustaka digital serta minimnya sarana dan prasarana untuk alih media. Melihat kondisi tersebut, maka masih perlu dilakukan peningkatan pada koleksi bahan pustaka digital serta sarana dan prasarana untuk alih media.

#### 24. Kearsipan

Dalam rangka pengelolaan kearsipan di Kabupaten Bangka Barat, pada tahun 2012 telah dibangun gedung *record center*/depot arsip untuk menyimpan/menyelamatkan dokumen arsip Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Untuk pencapaian pengelolaan arsip secara baku telah dilakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Kelurahan dalam rangka peningkatan aparatur pengelola kearsipan. Persentase Perangkat Daerah, Perangkat Desa dan Kelurahan yang telah mengelola arsip secara baku. Pada Tahun 2022 Perangkat Daerah yang telah mengelola arsip sebanyak 25 perangkat daerah dari 31 perangkat daerah atau sebesar 81 persen.



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.56** Persentase Perangkat Daerah yang Telah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### 1. Kelautan dan Perikanan

Produksi subsektor perikanan khususnya perikanan laut sangat dominan di Kabupaten Bangka Barat mengingat Pulau Bangka dikelilingi oleh lautan dengan sumberdaya laut yang relatif besar untuk dikembangkan. Diantara komoditi yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi antara lain adalah ikan kerapu, kakap merah, udang, cumi-cumi, sirip ikan, dan lain-lain. Selain potensi tangkapan di laut, potensi yang tak kalah besarnya adalah perikanan budidaya di sekitar pesisir, namun saat ini belum maksimal dikembangkan oleh masyarakat.

Peningkatan jumlah masyarakat nelayan dalam beberapa tahun terakhir cukup menjelaskan bahwa subsektor perikanan termasuk yang diminati masyarakat sebagai ladang usaha. Adanya sumber daya alam subsektor perikanan dan sumber daya manusia yang bergerak di subsektor tersebut selanjutnya masih memerlukan keterlibatan pemerintah daerah guna meningkatkan nilai tambah bagi perbaikan kehidupan nelayan dan perbaikan ekonomi daerah secara keseluruhan.

**Tabel 2.53** Jumlah Nelayan di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No.	Kecamatan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Muntok	1.264	1.321	1.321	1.442	1.442
2.	Simpangteritip	899	859	859	936	936
3.	Kelapa	380	335	335	558	558
4.	Tempilang	419	624	624	292	292
5.	Jebus	317	406	406	332	332
6.	Parittiga	751	899	899	920	920
	<b>Jumlah</b>	<b>4.030</b>	<b>4.444</b>	<b>4.444</b>	<b>4.480</b>	<b>4.480</b>

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2023.

Jumlah nelayan di Kabupaten Bangka Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2022 terus meningkat, yaitu dari 4.030 orang di tahun 2018 menjadi 4.480 orang di tahun 2022 yang tersebar di setiap wilayah kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat. Kecamatan Muntok merupakan kecamatan dengan jumlah nelayan paling banyak, dan diikuti oleh Kecamatan Simpangteritip serta Kecamatan Parittiga.

**Tabel 2.54** Jumlah Produksi Perikanan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 (ton)

No.	Jumlah Produksi Perikanan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Perikanan Tangkap	14.979	16.916,32	19.341,90	28.204,33	33.016,58
2.	Budidaya Air Tawar	65,25	90,33	105,81	95,09	113,94
3.	Budidaya Air Laut	286,24	460,98	823,31	1.206,18	1.115,34

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2022.

Dilihat perkembangannya selama 5 (lima) tahun terakhir, produksi perikanan di Kabupaten Bangka Barat masih sangat didominasi oleh perikanan tangkap. Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya air tawar mengalami peningkatan, sementara jumlah budidaya air laut (air laut dan payau) menurun di tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah produksi perikanan tangkap sebesar 33.016,58 ton, budidaya air tawar sebesar 113,94 ton dan budidaya air laut sebesar 1.115,34 ton. Penurunan produksi perikanan budidaya air laut dan payau dikarenakan cuaca dan pemasukan bibit sulit serta aktifitas pertambangan laut.

**Tabel 2.55** Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Bangka Barat  
Tahun 2016 - 2021 (ribu rupiah)

No	Nilai Produksi	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Nilai Produksi Perikanan Tangkap	547.851.080	591.662.000	632.902.236	961.499.853	1.502.982.540
2.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar	1.696.699	2.291.137	2.747.875	2.492.565	3.142.740
3.	Nilai Produksi Perikanan Budidaya Air Laut	2.284.200	3.690.000	30.534.700	66.411.710	57.728.400

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2023.

Sejalan dengan produksi perikanan, nilai produksi perikanan selama beberapa tahun terakhir juga turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp1.502.982.540.000,00, budidaya air tawar sebesar Rp3.142.740.000,00 dan budidaya air laut sebesar Rp57.728.400.000,00.

**Tabel 2.56** Jumlah Kapal Penangkapan Ikan  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No.	Jenis	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kapal Tanpa Motor	133	584	584	359	359
2.	Perahu Motor Tempel	1.650	1.960	1.960	682	682
3.	Kapal Motor	697	964	1.018	583	583

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Bangka Barat, 2023.

Sarana penangkapan ikan berupa kapal motor pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu dari 1.018 unit di tahun 2020 menjadi 583 unit di tahun 2022. Penurunan ini disebabkan banyaknya jumlah kapal yang dijual ke luar Kabupaten Bangka Barat.

## 2. Pariwisata

Berdasarkan data kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa potensi pariwisata dapat berkembang kedepannya jika dikelola dengan baik dan didukung penuh oleh sektor lainnya. Pengelolaan yang dilakukan dengan baik dan pemasaran yang dilakukan secara luas dan terbuka dengan melibatkan para *stakeholder* pariwisata dapat memberikan peluang yang menjanjikan bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat. Potensi daya tarik wisata yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat cukup beragam seperti wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu menyiapkan sejumlah kebijakan atau regulasi yang mendukung sektor pariwisata agar dapat mempertahankan jati diri /karakter lokal dengan melestarikan nilai-nilai sejarah dan tradisi khas Kabupaten Bangka Barat.

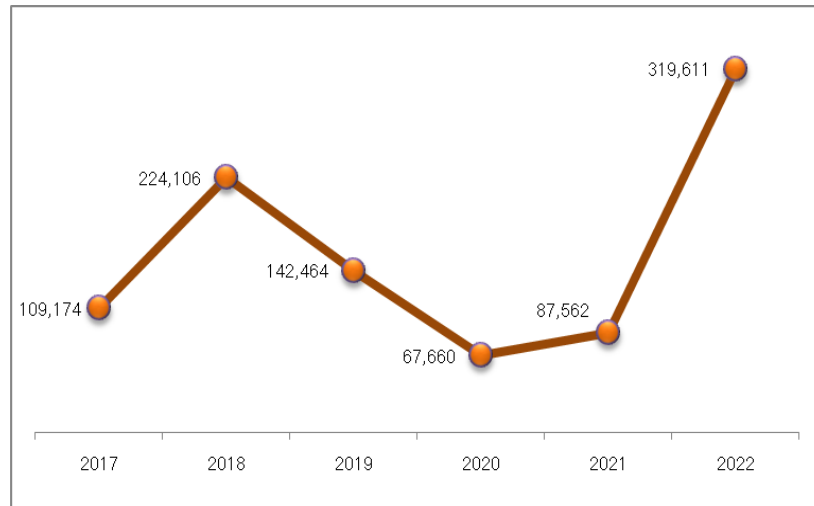
**Tabel 2.57** Daya Tarik Wisata Kabupaten Bangka Barat

Kecamatan	Alam, Pantai, dan Sungai	Alam/Pegunungan	Hutan dan Taman Wisata
Muntok	Pantai Baturakit Pantai Asmara Pantai Tanjung Kalian Pantai Tanjung Ular Pantai Tanah Merah Pantai Menggris	Batu Balai	Hutan Konservasi Menumbing Kapal Ashinagara Kapal SS Vyner Brooke Perkebunan Durian dan cempedak Karang Aji Karang Berang-Berang
Simpang Teritip	Pantai Aikemas Pantai Tungau		Perkebunan Durian Simpangteritip Hutan Cempedak Rakyat Simpangtiga
Jebus	Pantai Bembang Pantai Mentiba	Sumur Dewa Danau Sekar Biru Pulau Nenas	Perkebunan Durian Jebus
Kelapa		Air Panas Dendang	Perkebunan Kelapa Sawit Dendang
Tempilang	Pantai Pasir Kuning Pantai Kedacak		Perkebunan Kelapa Sawit Tempilang
Parittiga	Pantai Siangau Pantai Jebu Darat Pantai Jebu Laut Pantai Cupat Pantai Pala Pantai Bakit		Karang Malang Guntur Teluk Limau Karang Malang Doyang Teluk Limau Karang Malang Iyu eluk Limau

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2022.



Kontribusi dalam PDRB Kabupaten Bangka Barat untuk subsektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih sangat rendah, dimana tahun 2022 kontribusi subsektor ini sebesar 1,36 persen sedikit meningkat dari tahun 2021 sebesar 1,32 dalam PDRB.



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bangka Barat, 2023.

**Gambar 2.57** Jumlah Kunjungan Wisata  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2022

Dalam rangka mengakomodasi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka Barat, maka ketersediaan hotel dan penginapan sangat penting. Sampai dengan tahun 2020, jenis hotel yang ada hanya hotel melati dengan jumlah 10 unit, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sejumlah 12 unit. Sementara jumlah penginapan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebanyak 24 unit, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 dengan jumlah 26 unit.

**Tabel 2.58** Jumlah Hotel dan Penginapan  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

No	Jenis Hotel dan Penginapan	2017	2018	2019	2020
1.	*Hotel				
	Hotel Melati	12	12	12	10
2.	** Penginapan Lainnya				
	a. Motel	12	0	0	0
	b. Bungalow	4	4	4	4
	c. Mess	13	13	13	13
	d. Home Stay	27	7	7	6
	e. Guest House	14	2	2	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2021

Meskipun daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Bangka Barat sangat beragam serta memiliki potensi untuk dikembangkan, namun sampai saat ini belum dikelola

secara profesional dan belum memiliki infrastruktur yang memadai. Sebanyak 11 desa menjadi desa wisata berbasis potensi sumber daya alam dan budaya lokal yang dimiliki oleh desa masing-masing serta telah terbentuknya kelompok sadar wisata (pokdarwis), karang taruna atau badan usaha milik desa (BUMDes). Desa wisata tersebut antara lain Desa Air Putih dengan potensi Pantai Tanjung Ular, Desa Air Belo dengan potensi Bukit Kukus, Desa Belo Laut dan Desa Bakit memiliki wisata andalan kuliner, Desa Tanjung Punai, Desa Kapit dan Desa Teluk Limau dengan potensi pantai dan mangrove, Desa Air Limau memiliki wisata edukasi berbasis lingkungan dan budaya, Desa Kelabat memiliki objek batu utama batu granit Belimbing, Desa Jebu Laut dan Desa Penganak dengan objek kawasan pantai. Kedepan perlu dilakukan pengembangan yang disinergikan dengan aspek pembangunan lainnya seperti aspek perekonomian dan sosial budaya serta aspek infrastruktur sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas umum guna menunjang kepariwisataan.

**Tabel 2.59** Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya pada Objek Wisata Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2020

No.	Sarana dan Prasarana Seni dan Budaya	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Objek Wisata Budaya	34	35	41
2.	Objek Wisata Bahari	16	16	19
3.	Objek Wisata Cagar Alam	0	0	0
4.	Objek Wisata Pertanian	0	3	7
5.	Objek Wisata Buru	0	0	0
6.	Objek Wisata Alam	6	8	13
7.	Objek Wisata Sejarah	10	10	12
8.	Objek Wisata Religi	1	2	3
9.	Objek Wisata Pendidikan	0	0	0
10.	Objek Wisata Kuliner	0	0	0
11.	Objek Wisata Belanja	0	0	0
12.	Objek Wisata Buatan	0	2	5

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2021.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bangka Barat, maka diperlukan pemasaran yang tepat serta promosi wisata yang luas. Pada tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki Biro Wisata namun hanya memiliki agen perjalanan wisata sebanyak 7 agen. Untuk ketersediaan pemandu wisata, sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat memiliki 10 orang pemandu wisata yang seluruhnya telah bersertifikat. Untuk mendukung kepariwisataan, pada tahun 2020 di Kabupaten Bangka Barat terdapat 2 toko cenderamata dan 7 pedagang cenderamata non toko.

**Tabel 2.60** Usaha Jasa Makanan/Minuman  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2020

No.	Jenis	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Restoran	7	2	4	4
2.	Jumlah Cafeteria/Cafe	12	13	12	12
3.	Jumlah Kantin	1	1	1	1
4.	Jumlah Coffee Shop	4	4	4	4
5.	Jumlah Pub/Bar	1	1	1	1
6.	Jumlah Warung/Kedai Makan	49	53	50	50

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2021

Untuk usaha jasa makanan/minuman di Kabupaten Bangka Barat, selama 2 (dua) tahun terakhir cenderung tidak ada perubahan.

**Tabel 2.61** Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2022

Tahun	Pajak Hotel (Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesangrahan/Hotel)	Pajak Restoran (Rumah Makan)	Pajak Hiburan (Pajak Pertandingan Olahraga)	Retribusi wisata dan rekreasi (Retribusi Izin tertentu)	Jumlah
2016	107.003.033,00	1.225.012.102,00	12.879.750,00	37.804.000,00	1.382.698.885,00
2017	108.295.589,00	1.908.482.123,70	34.286.000,00	120.018.000,00	2.171.081.712,70
2018	94.254.117,00	2.422.680.765,00	38.846.000,00	158.042.000,00	2.713.822.882,00
2019	96.795.137,00	2.114.418.273,00	22.235.100,00	160.100.000,00	2.393.548.510,00
2020	63.051.026,00	2.351.093.848,00	6.434.000,00	187.038.000,00	2.607.616.874,00
2021	58.074.135,00	2.499.623.400,00	2.036.000,00	170.628.400,00	2.715.251.535,00
2022	100.750.000,00	2.820.000.000,00	35.700.000,00	670.733.300,00	3.627.183.300,00

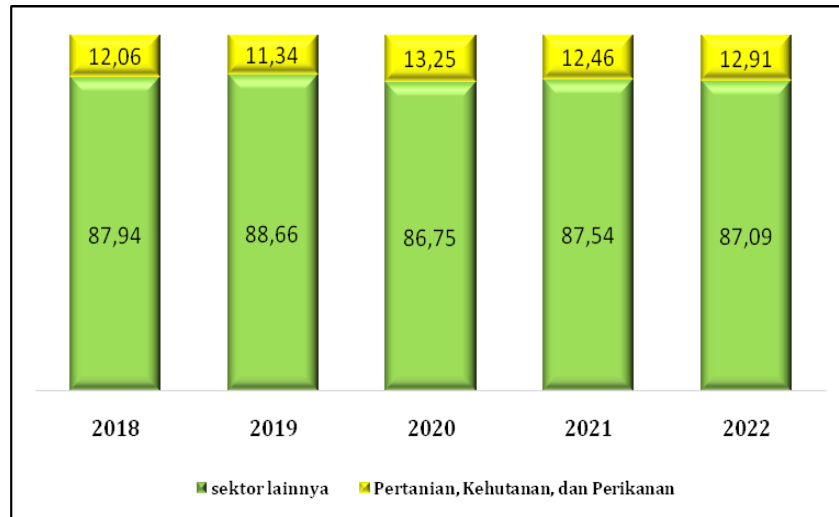
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab.Bangka Barat, 2023.

Penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Barat selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2019 terjadi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp911.931.765,00, yang semula Rp2.715.251.535,00 menjadi Rp3.627.183.300,00. Peningkatan PAD sektor pariwisata pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh pajak restoran (rumah makan) yang semula tahun 2021 sebesar Rp2.499.623.400,00 dan di tahun 2022 menjadi Rp2.820.000.000,00.

### 3. Pertanian

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu sektor unggulan dalam pembangunan perekonomian. Berdasarkan distribusi

PDRB menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat, selama 5 (lima) tahun terakhir sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan telah bergeser menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan kedepan jika dikelola dengan tepat dan optimal akan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat.

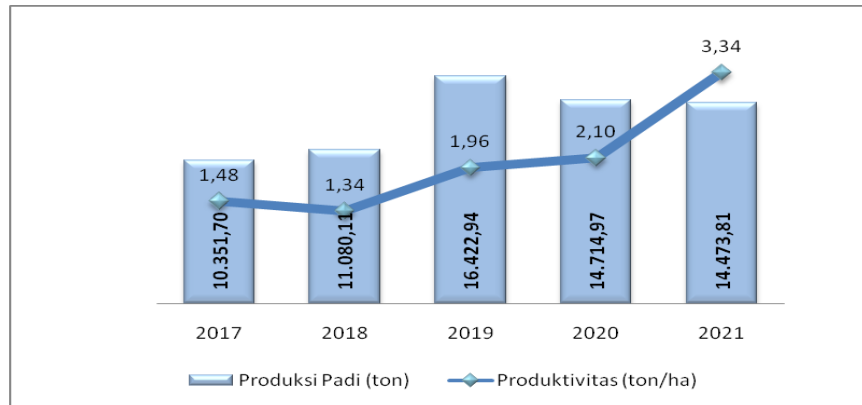


Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

**Gambar 2.58** Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan yaitu dari 12,46 persen di tahun 2021 menjadi 12,91 persen di tahun 2022. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perekonomian pada beberapa sub sektor pertanian, diantaranya perkebunan tahunan, tanaman pangan, dan perikanan.

Sementara jika dilihat dari sisi produksi dan produktivitas, perkembangan statistik tanaman pangan di Kabupaten Bangka Barat khususnya padi selama 5 (lima) tahun berfluktuatif. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten bagi petani untuk peningkatan produksi tanaman pangan khususnya padi serta meningkatnya pengetahuan petani tentang budidaya padi misalnya pengetahuan tentang aplikasi teknologi pertanian.



Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2022.

**Gambar 2.59** Jumlah Produksi (ton) dan Produktivitas (ton/ha) Padi Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021

Produktivitas beberapa tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Bangka Barat secara umum telah menunjukkan perkembangan yang positif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2021, produktivitas padi sebesar 3,34 ton/ha dengan jumlah produksi padi sebesar 14.473,81 ton.

Sementara jika dilihat dari infrastruktur pertanian, untuk irigasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat masih belum dapat difungsikan secara maksimal karena belum terbangun sistem pengairan persawahan masyarakat. Irigasi teknis sebagai saluran sekunder baik permanen maupun non permanen yang secara fungsional sudah siap di koneksikan dengan saluran tersier untuk pengairan, dari total areal pertanian seluas 4.939 ha yang telah beririgasi teknis seluas 561 ha (11,36 persen).

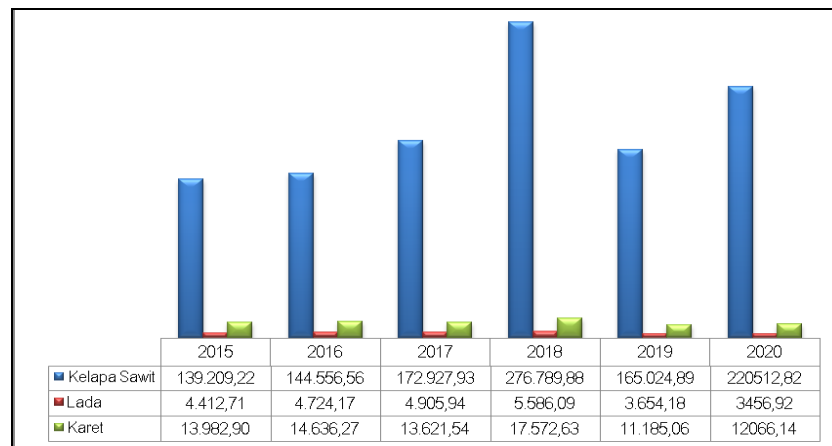
**Tabel 2.62** Luas, Jumlah Produksi dan Nilai Produksi Hortikultura Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

No.	Hortikultura	2018	2019	2020	2021	2022
<b>A.</b>	<b>Luas Areal Hortikultura (Ha)</b>	<b>953,11</b>	<b>966,17</b>	<b>1.285,67</b>	<b>1.286,44</b>	<b>1.478,15</b>
1.	Luas Areal Buah-Buahan	735,01	759,35	1.020,09	1.097,41	1.187,57
2.	Luas Areal Sayuran	215,33	202,98	254,54	168,14	265,47
3.	Luas Areal Bahan Obat Nabati	2,77	3,85	11,04	20,88	25,11
<b>B.</b>	<b>Jumlah Produksi Hortikultura (Ton)</b>	<b>8.686,24</b>	<b>8.021,72</b>	<b>3.662,25</b>	<b>10.504,55</b>	<b>5.864,75</b>
1.	Jumlah Produksi Buah-Buahan	7.281,45	6.981,93	2.618,07	9.305,79	4.063,77
2.	Jumlah Produksi Sayuran	1.366,05	1.024,02	1.030,63	1.044,35	1.670,82
3.	Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati	38,74	15,77	13,65	154,41	130,16
<b>C.</b>	<b>Nilai Produksi Hortikultura</b>	<b>86.405.845.250</b>	<b>86.650.183.350</b>	<b>38.256.728.500</b>	<b>99.237.578.750</b>	<b>58.356.427.325</b>
1.	Nilai Produksi Buah-Buahan	69.790.472.500	74.266.117.500	25.818.660.000	85.817.551.500	37.558.172.500
2.	Nilai Produksi Sayuran	16.392.612.000	12.288.207.600	12.367.608.000	12.532.164.000	20.049.840.000
3.	Nilai Produksi Bahan Obat Nabati	222.760.750	95.858.250	70.460.500	887.863.250	748.414.825

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2023.

Untuk lahan perkebunan rakyat, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, peruntukan perkebunan rakyat dicadangkan seluas  $\pm 14.331$  ha dan untuk perkebunan besar seluas  $\pm 41.860$  ha. Jika dilihat dari eksisting perkebunan besar sampai saat ini seluas 37.111,66 ha yang telah digunakan oleh perusahaan besar sawit, maka sisa untuk perkebunan besar dari cadangan dalam RTRW adalah hanya seluas 4.748,34 ha sehingga tidak banyak lagi potensi lahan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan besar kecuali ada peralihan rencana/fungsi lahan dari RT/RW.

Komoditas perkebunan rakyat yang menjadi unggulan di Kabupaten Bangka Barat serta memiliki potensi antara lain adalah sawit, karet dan lada. Untuk potensi lada, meskipun Kabupaten Bangka Barat memiliki brand yang cukup terkenal yaitu “Muntok White Pepper”, namun sampai saat ini belum dapat meningkatkan minat masyarakat untuk bertanam lada sehingga produksi lada masyarakat masih terbilang rendah.



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.60** Produksi Tiga Komoditi Tanaman Perkebunan Rakyat Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2020 (ton)

Persoalan fluktuasi harga komoditas perkebunan menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020. Rendahnya harga komoditi perkebunan ini menjadi salah satu penyebab rendahnya produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020. Kondisi harga komoditi lada, karet dan kelapa sawit yang terus menurun ini mengakibatkan menurunnya semangat para petani. Produksi komoditi yang rata-rata masih rendah disebabkan produktivitas akibat kualitas benih tidak baik, pengelolaan sistem usaha tani yang belum maksimal baik karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan petani maupun karena terbatasnya akses modal, kondisi tanaman yang sebagian besar baru memasuki fase mutasi ke Tanaman Menghasilkan, umur tanaman sudah tua, dan pengaruh perubahan iklim yang terjadi dimana musim panas

cukup panjang. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut lah yang menjadi faktor penyebab nilai produksi pada komoditi perkebunan di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 tidak dapat mencapai angka target yang telah ditetapkan.

Terkait peternakan, secara umum peternak di Kabupaten Bangka Barat adalah peternak sapi dan peternak kambing. Fokus dari perangkat daerah adalah pengembangan peternakan sapi guna memenuhi kebutuhan lokal yang sampai saat ini masih sangat tergantung dari wilayah sekitar. Secara umum peternak sapi di Kabupaten Bangka Barat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu peternak yang mulai dari pembibitan serta peternak yang fokus pada penggemukan daging.

Sebagian besar peternak yang ada di Kabupaten Bangka Barat merupakan peternak pemula, dimana terkadang pekerjaan sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan. Beberapa strategi telah dilakukan seperti meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peternak dalam melaksanakan budidaya dan pemanfaatan teknologi serta memfasilitasi akses dukungan modal usaha dengan melakukan program SIKOMANDAN (Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri), Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dibidang Peternakan dengan tingkat suku bunga yang cukup rendah yaitu 6 persen pertahun dan Asuransi Usaha Ternak Sapi yang berguna untuk mengurangi tingkat resiko dalam pemeliharaan sapi peningkatan kelahiran ternak.

**Tabel 2.63** Populasi dan Produksi Ternak Ruminansia  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

No	Jenis Ternak	2018		2019		2020		2021		2022	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)
1	Sapi	1.630	251.104	1.757	303.389	1.375	246.167	1.650	300.696	1.711	323.136
2	Kambing	392	12.536	367	10.563	517	12.384	556	17.078	496	18.595
3	Kerbau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Domba	20	115	89	383	79	-	13	-	16	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.042</b>	<b>263.755</b>	<b>2.213</b>	<b>314.335</b>	<b>1.971</b>	<b>258.551</b>	<b>2.219</b>	<b>317.774</b>	<b>2.177</b>	<b>341.731</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2023.

Pada tahun 2022, produksi daging sapi dan daging kambing mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu produksi daging sapi sebesar 7,46 persen dibanding tahun 2021 dan produksi daging kambing sebesar 8,89 persen. Secara umum, peningkatan produksi daging ruminansia sebesar 7,54 persen di tahun 2022. Peningkatan produksi daging ruminansia disebabkan meningkatnya daya beli masyarakat dan perbaikan kondisi ekonomi daerah.

**Tabel 2.64** Populasi dan Produksi Ternak Unggas  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 - 2022

No	Jenis Ternak	2019		2020		2021		2022	
		Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)	Populasi (ekor)	Produksi (Kg)
1	Ayam Petelur	11.361	32.757	4.3	34.276	59.844	18.259	34.808	39.052
2	Ayam Pedaging	0	766.669	0	1.155.163	0	1.024.569	1.000	1.097.764
3	Ayam Buras	145.974	55.771	120.029	71.22	122.949	64.827	116.970	73.416
4	Itik	6.333	3.722	7.112	3.742	8.708	5.122	10.375	5.822
5	Puyuh	125	82	1.495	59	2.066	155,98	1.984	146
<b>TOTAL (Kg)</b>		<b>193.579</b>	<b>915.883</b>	<b>163.793</b>	<b>1.264.460</b>	<b>193.567</b>	<b>1.112.933</b>	<b>165.137</b>	<b>1.216.201</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab.Bangka Barat, 2023.

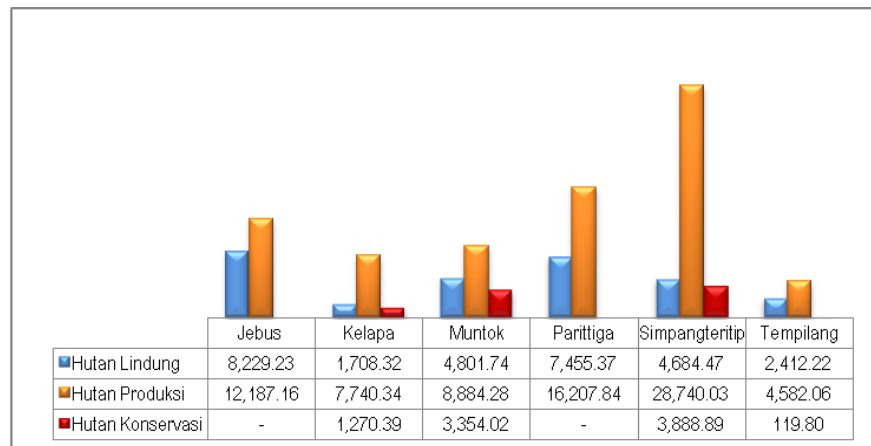
Produksi ternak unggas di Kabupaten Bangka Barat didukung oleh beberapa jenis ternak yaitu ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Ternak unggas (non ruminansia) di Kabupaten Bangka Barat lebih didominasi oleh ayam pedaging. Total produksi daging ternak unggas mengalami peningkatan sebesar 9,28 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021. Kegiatan yang mendukung produksi ternak unggas adalah Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan (keswan) terhadap ancaman penyakit hewan menular dengan penyediaan obat-obatan dan vaksin.

#### 4. Kehutanan

Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan terkait pengelolaan kawasan hutan, namun dengan potensi kehutanan yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat.

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, pelaksanaan urusan kehutanan hanya difokuskan pada pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Menumbing seluas 3.333,19 ha. Namun demikian, Kabupaten Bangka Barat memiliki potensi kehutanan yang dapat memberikan peran relatif besar dalam pembangunan, sehingga memberikan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat.





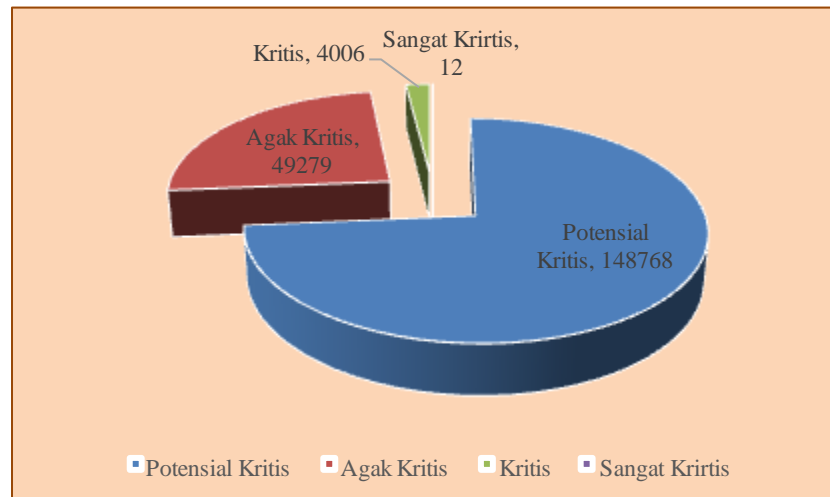
sumber: BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang, 2020.

**Gambar 2.61** Luas Kawasan Hutan per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

Luas keseluruhan kawasan hutan di Kabupaten Bangka Barat sekitar 116.245,33 ha. Kawasan ini terdiri dari hutan lindung seluas 29.291,35 ha, hutan produksi seluas 78.341,71 ha, dan hutan konservasi seluas 8.612,28 ha. Dari ketiga fungsi hutan yang ada di Kabupaten Bangka Barat tersebut, terdapat potensi kehutanan yang cukup besar dengan luasan hutan produksi seluas 78.341,71 ha.

Selain itu, guna mendukung fungsi ekologi dan pengawetan keanekaragaman hayati untuk menjaga lingkungan hidup, wilayah Kabupaten Bangka Barat juga didukung dengan keberadaan Hutan Konservasi yang di dalamnya terdiri dari Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Jering Menduyung, seluas 3.747,4 ha, Kawasan Hutan Tahura Menumbing seluas 3.333,20 ha, dan Taman Nasional Bukit Maras seluas 1.270,39 ha. Namun, tingginya potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bangka Barat tersebut juga dibarengi tingginya laju deforestasi. Berdasarkan data dari BPKH tahun 2020, Kabupaten Bangka Barat memiliki laju deforestasi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Deforestasi di kawasan hutan lindung mencapai luasan 164,90 ha dan di Hutan Produksi mencapai luasan 659,90 ha.

Disisi lain, berdasarkan data dari BPDAS HL Baturusa Cerucuk, kondisi lahan kritis secara keseluruhan di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2018 mencapai luasan 202.065 ha. Lahan pada kategori kritis seluas 4.006 ha dan pada kategori sangat kritis seluas 12 ha. Adapun lahan yang potensial kritis seluas 148.768 ha dan agak kritis seluas 49.279 ha. Kondisi ini terjadi karena tidak sesuai penggunaan lahan dengan kemampuan lahan, sehingga menyebabkan kerusakan fisik, kimia maupun biologi. Meskipun demikian, faktor yang dominan penyebab lahan kritis di Kabupaten Bangka Barat sebagian besar berasal dari aktivitas pertambangan.



sumber: BPDAS HL Baturusa Cerucuk, 2020

**Gambar 2.62** Kondisi Lahan Kritis di Kabupaten Bangka Barat

Adapun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya di Kabupaten Bangka Barat, maka dibentuklah sistem perhutanan sosial. Sistem perhutanan sosial ini merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kabupaten Bangka Barat terdapat 9 Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terdiri dari 282 KK dengan 40 izin perhutanan sosial dan luas areal 930 ha.

## 5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor pertambangan dan penggalan pada PDRB Kabupaten Bangka Barat merupakan sektor yang cukup dominan, yaitu menempati urutan kedua setelah industri pengolahan. Bahan galian yang terdapat di wilayah Kabupaten Bangka Barat dan paling banyak dieksploitasi selama ini serta telah banyak diusahakan secara besar-besaran adalah timah yang pengelolaannya selain oleh pemerintah juga dilakukan oleh penduduk setempat dan swasta.

Sesuai dengan kewenangan daerah yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral yang dimiliki oleh daerah kabupaten/kota hanya sebatas energi baru terbarukan yaitu penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sampai saat ini di Kabupaten Bangka Barat tidak memiliki sumber energi dari panas bumi yang dikelola/dimanfaatkan. Meskipun demikian, persoalan energi dan sumber daya mineral termasuk salah satu urusan yang juga harus diperhatikan dalam rangka pembangunan daerah berkelanjutan termasuk didalamnya adalah terkait penggunaan dan ketersediaan daya listrik.

Jaringan listrik di Kabupaten Bangka Barat sudah menjangkau 100 persen pedesaan di Kabupaten Bangka Barat. PLN Muntok di Kabupaten Bangka Barat melayani penyediaan kebutuhan listrik untuk para pelanggan PLN. Pelanggan PLN terdiri dari beberapa kategori besar, seperti rumah tangga, industri, dinas, instansi badan sosial, penerangan jalan, bisnis, dan layanan khusus.

**Tabel 2.65** Jumlah Pelanggan PLN Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2022

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022
a.	Rumah Tangga	Pelanggan	60.880	63.483	65.770
b.	Industri	Pelanggan	59	78	109
c.	Dinas/Instansi/Gedung	Pelanggan	456	470	489
d.	Badan Sosial	Pelanggan	1.503	1.587	1.651
e.	Penerangan Jalan	Pelanggan	96	99	120
f.	Bisnis	Pelanggan	2.637	2.936	3.339
g.	Layanan Khusus	Pelanggan	95	91	90
<b>Jumlah Pelanggan Listrik</b>			<b>65.726</b>	<b>68.744</b>	<b>71.568</b>

Sumber: Kabupaten Bangka Barat dalam Angka, 2023.

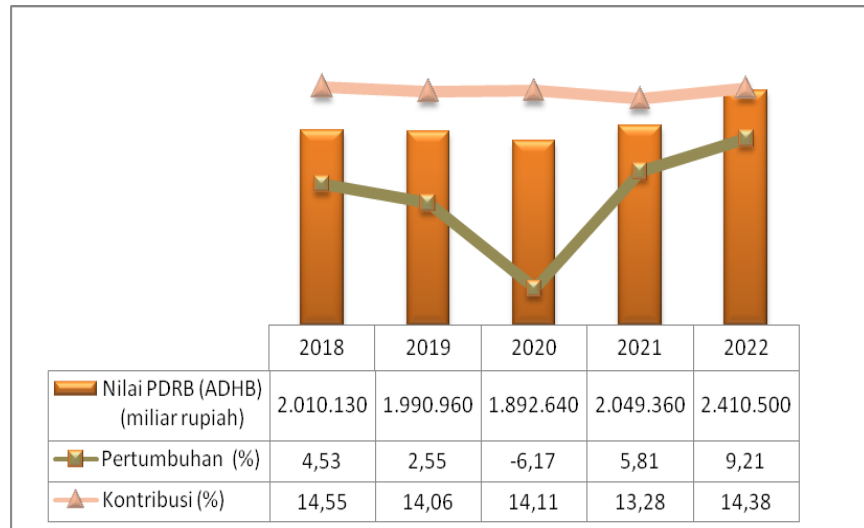
PT. PLN Persero di Kota Muntok menyajikan listrik kepada pelanggan hanya satu generator. Daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah 119.651.150 kWh selama tahun 2022. Begitu pula dengan banyaknya produksi PLN oleh PLN Muntok sebesar 175.924.828 kWh. Persentase rumah tangga pengguna listrik yang merupakan persentase dari jumlah rumah tangga pengguna listrik dibandingkan dengan seluruh rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat mencapai 91,90 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa hampir semua rumah tangga di Kabupaten Bangka Barat menggunakan listrik. Jumlah yang berlangganan layanan penyediaan listrik terbesar persentasinya adalah untuk rumah tangga yaitu 65.770 pelanggan, sedangkan proporsi yang paling kecil adalah untuk layanan khusus yaitu 90 pelanggan.

## 6. Perdagangan

Sektor perdagangan mempunyai peran yang strategis dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Kabupaten Bangka Barat merupakan daerah yang sangat potensi terhadap hasil alam seperti komoditi timah, lada dan kaya dengan hasil laut dan hutannya. Pembangunan perdagangan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan andil yang cukup besar terhadap peningkatan pendapatan dan perluasan

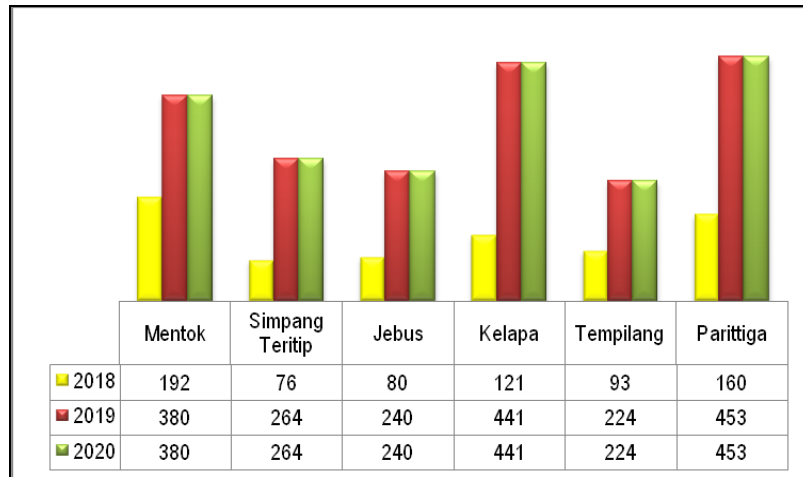
kesempatan kerja. Selain itu, pembangunan perdagangan memberikan kontribusi pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Selama 5 (lima) tahun terakhir, di dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

**Gambar 2.63** Nilai, Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB (ADHB) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

Pasar memiliki peranan utama sebagai tempat transaksi perdagangan masyarakat. Pada tahun 2020, jumlah bangunan pasar tradisional sebanyak 19 bangunan, yang berada pada 9 (sembilan) lokasi pasar. Sebanyak 7 (tujuh) pasar berstatus aktif dikelola oleh Pemerintah Daerah yaitu Pasar Muntok, Pasar Simpang Teritip, Pasar Kelapa, Pasar Parittiga, Pasar Jebus, dan Pasar Tempilang. Sementara 1 (satu) pasar aktif dikelola oleh pemerintah desa yaitu Pasar Benteng Kota. Sedangkan pasar yang tidak aktif sebanyak 1 (satu) pasar yaitu Pasar Cupat. Sementara jumlah toko di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 sebanyak 2.002 toko.



Sumber: Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.64** Jumlah Pertokoan di Kabupaten Bangka Barat per kecamatan Tahun 2018 – 2020

## 7. Perindustrian

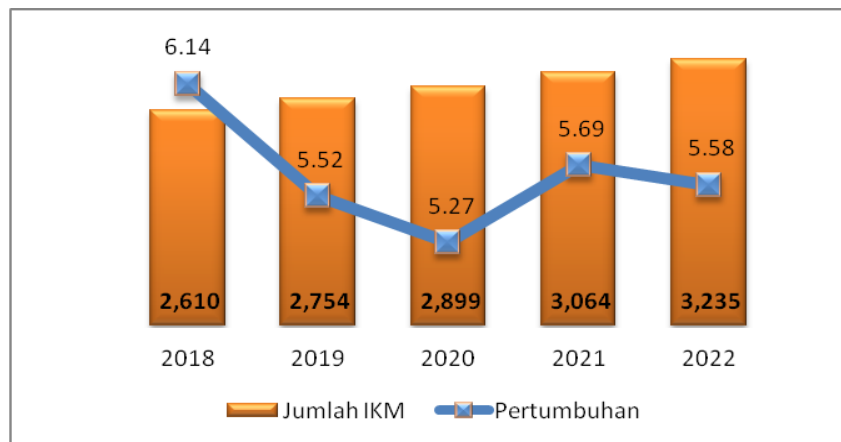
Dari dulu, sektor industri pengolahan merupakan sektor utama pembentuk PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu dengan adanya keberadaan Pusat Metalurgi milik PT. Timah. Adapun sektor perdagangan, juga termasuk penyumbang peringkat keempat pada pembentukan PDRB daerah setelah sektor pertambangan dan galian serta sektor pertanian. Kondisi tersebut menegaskan bahwa perindustrian dan perdagangan merupakan motor penggerak ekonomi wilayah yang sangat vital di Kabupaten Bangka Barat. Saat ini industri dan perdagangan memberi kontribusi yang dominan dibandingkan sektor lain dengan pertumbuhan yang terlihat cukup stabil.

Sektor industri pengolahan perlu dikelola dengan optimal sehingga menjadi motor ekonomi yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang kukuh, dapat memproduksi barang-barang bermutu, bernilai tambah tinggi, dan padat karya dengan tingkat keterampilan tinggi. Industri yang dapat dikembangkan antara lain: *home industry* seperti pembuatan terasi, akar bahar, songket cual, industri pengolahan lanjutan CPO, pasir kuarsa (*glass ware industry*), keramik (kaolin), serta *tin chemical* (industri hilir timah).

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat juga terus melakukan pembinaan dan pengembangan khususnya terhadap industri berskala kecil yang merupakan kewenangan bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Selama lima (lima) tahun terakhir, jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat. Pada tahun 2018 jumlah IKM di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.610 unit, dan sampai dengan tahun 2022

bertambah menjadi 3.235 unit IKM. Meskipun demikian, jika dilihat dari pertumbuhan IKM selama 5 (lima) tahun terakhir terjadi pelambatan. Persentase pertumbuhan industri kecil di Tahun 2018 sebesar 6,14 persen menjadi 5,58 persen di Tahun 2022.



Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2021

**Gambar 2.65** Jumlah dan Pertumbuhan IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020

Dilihat dari sebaran IKM di Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2022, jumlah IKM terbanyak terdapat di Kecamatan Kelapa yaitu sebanyak 760 unit IKM dan yang terendah terdapat di Kecamatan Simpang Teritip dengan jumlah IKM sebanyak 420 unit.

**Tabel 2.66** Jumlah IKM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO	DAFTAR DIREKTORI	JUMLAH						TOTAL
		MUNTOK	SP.TERITIP	JEBUS	PARITTIGA	KELAPA	TEMPILANG	
1	Kerajinan Sandang	66	62	26	27	59	48	288
2	Pengolahan Makan	530	230	295	327	384	269	2,035
3	Pengolahan Makanan dari kedelai (Tempe/Tahu)	18	3	19	34	7	13	94
4	Pengrajin Genteng & Batako	14	4	9	6	13	10	56
5	Pertukangan Kayu	21	45	20	11	44	38	179
6	Air Minum Isi Ulang	36	13	8	16	18	16	107
7	Kerajinan	50	63	55	22	235	51	476
<b>TOTAL</b>		<b>735</b>	<b>420</b>	<b>432</b>	<b>443</b>	<b>760</b>	<b>445</b>	<b>3,235</b>

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2023.

Untuk jumlah Industri sedang dan besar di Kabupaten Bangka Barat sampai dengan tahun 2022 sebanyak 4 unit, yaitu 4 unit industri besar. Jenis industri yang ada adalah industri pengolahan pangan berupa minyak kelapa sawit dan air mineral serta industri galian bukan logam berupa batu bata merah dan Industri Baja/Pengolahan Logam berupa balok timah.

**Tabel 2.67** Jumlah Industri Sedang dan Besar  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 - 2022

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
<b>Industri Sedang</b>				
1.	Industri Pengolahan Pangan			
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1	0	0
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	80	0	0
	- Jumlah Produksi (Ton)	1.169	0	0
2.	Industri Galian Bukan Logam			
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1	0	0
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	40	0	0
	- Jumlah Produksi (Ton)	3	0	0
<b>Industri Besar</b>				
1.	Industri Pengolahan Pangan			
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	4	4	4
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	539	539	539
	- Jumlah Produksi (Ton)	182.449,80	842.076	842.076
2.	Industri Baja/Pengolahan Logam			
	- Jumlah Unit Industri (Unit)	1	2	2
	- Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	710	710	710
	- Jumlah Produksi (Ton)	30.000	31.539	31.539

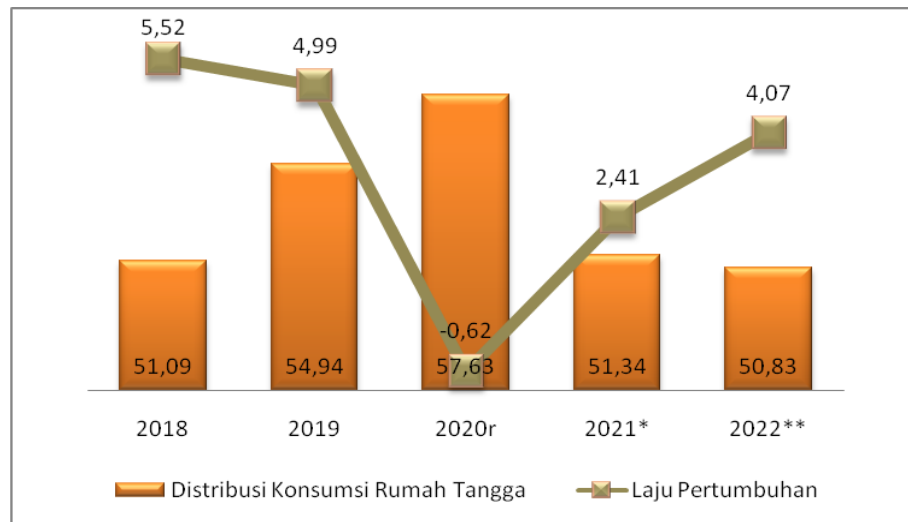
Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab.Bangka Barat, 2023.

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

#### 1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam pembentukan PDRB menurut pengeluaran. Sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Selama tahun 2018-2022, perkembangan konsumsi akhir rumah tangga berfluktuatif setiap tahunnya baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong terjadinya peningkatan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

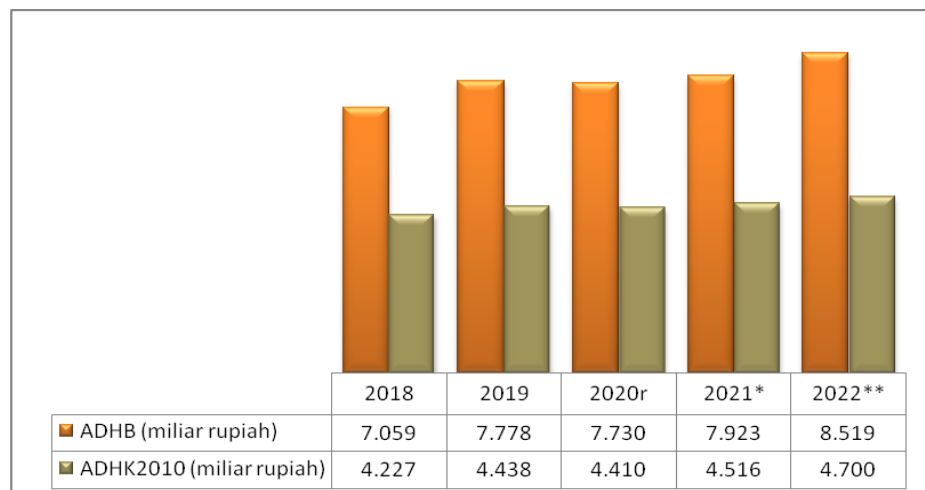


Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Keterangan: r) Angka revisi \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

**Gambar 2.66** Laju Pertumbuhan dan Peranan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB Pengeluaran Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022 (persen)

Pada tahun 2018, proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 51,09 persen menurun hingga sebesar 50,83 persen pada tahun 2022. Meskipun peranan konsumsi rumah tangga cukup besar kontribusinya pada total PDRB. Namun, secara total pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan selama tahun 2018-2022 cenderung menurun dari 5,52 persen pada tahun 2018 menjadi 4,07 persen pada tahun 2022.



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Keterangan: r) Angka revisi \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

**Gambar 2.67** Pengeluaran Konsumsi RT ADHB dan ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022



Pengeluaran konsumsi per kapita baik atas dasar harga berlaku mau pun dasar harga konstan menunjukkan kecenderungan yang meningkat searah dengan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Secara nominal pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku pada tahun 2022 sebesar 8,51 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 7,92 triliun rupiah.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

**Tabel 2.68** Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan  
Menurut Jenis Pengeluaran (Rupiah) Kabupaten Bangka Barat, 2020-2022

Jenis Pengeluaran		2020	2021	2022
Makanan	Rp	671.107	733.257	783.431
	%	53,43	52,81	53,17
Bukan Makanan	Rp	585.056	655.327	690.058
	%	46,57	47,19	46,83
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.256.163</b>	<b>1.388.584</b>	<b>1.473.489</b>
	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2023.

Keterangan: r) Angka revisi \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara.

Secara umum tingkat konsumsi yang tergambar dalam pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 mengalami peningkatan baik untuk konsumsi makanan dan bukan makanan dibandingkan dengan Tahun 2021. Pengeluaran per kapita di Tahun 2022 mencapai 1,47 juta rupiah, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2021 tercatat sebesar 1,38 juta rupiah. Peningkatan pengeluaran mengindikasikan adanya peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 2.69** Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)

No.	KELOMPOK KONSUMSI	2016	2017	2018 <sub>r</sub>	2019*	2020**
1	Makanan, Minuman, dan Rokok	48,78	55,99	61,00	67,88	69,09
2	Pakaian dan Alas Kaki	3,21	3,43	3,67	3,83	3,78
3	Perumahan, Perkakas, perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	17,37	19,70	21,86	24,04	24,90
4	Kesehatan dan Pendidikan	4,84	5,61	6,11	6,63	6,78
5	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	15,75	17,17	18,58	20,07	17,97
6	Hotel dan Restoran	8,23	9,45	10,57	12,00	11,38
7	Lainnya	1,84	2,00	2,03	2,01	1,89
<b>Konsumsi Rumah Tangga</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

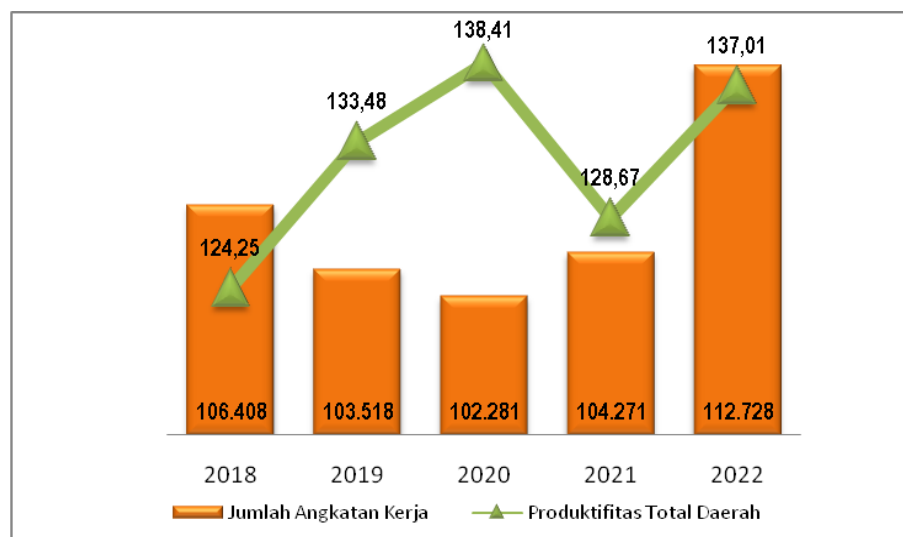
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Keterangan: r) Angka revisi \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara.

## 2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas sektor PDRB per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah.

Produktivitas total daerah Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan data yang berfluktuatif namun dengan kecenderungan atau trend yang meningkat. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya nilai PDRB di setiap tahunnya dan meningkatnya jumlah angkatan kerja hampir di setiap tahunnya.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

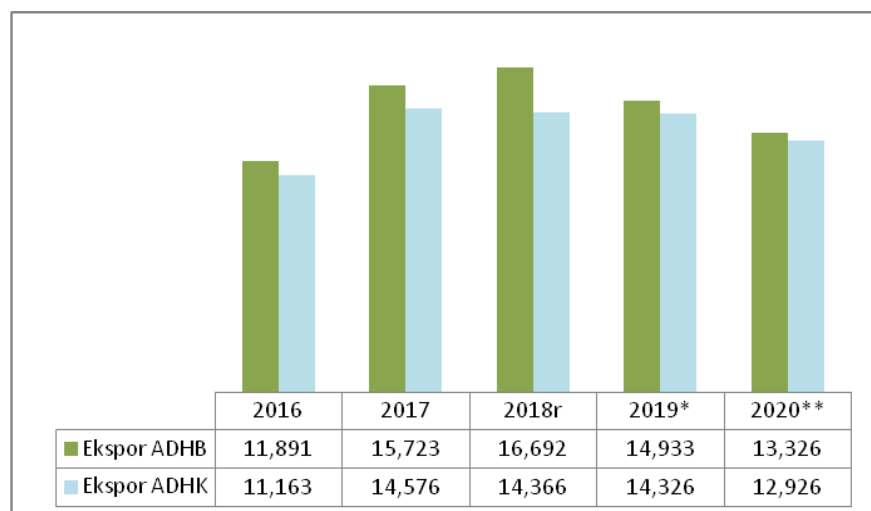
**Gambar 2.68** Produktifitas Total Daerah dan Jumlah Angkatan Kerja  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

### 3. Ekspor dan Impor

Aktifitas jual beli barang antar wilayah telah ada sejak dahulu. Jenis produksi barang dan jasa yang saling melengkapi dan disparitas harga menjadi faktor utama munculnya kegiatan transaksi ekspor impor.

Peranan ekspor terhadap pembentukan PDRB selama kurun waktu 2016-2020 pertumbuhan menunjukkan nilai positif. Hal ini disebabkan karena permintaan komoditi ekspor ke luar wilayah Kabupaten Bangka Barat cukup tinggi sehingga mendorong peningkatan ekspor. Peningkatan dan penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan *volume* maupun harga.

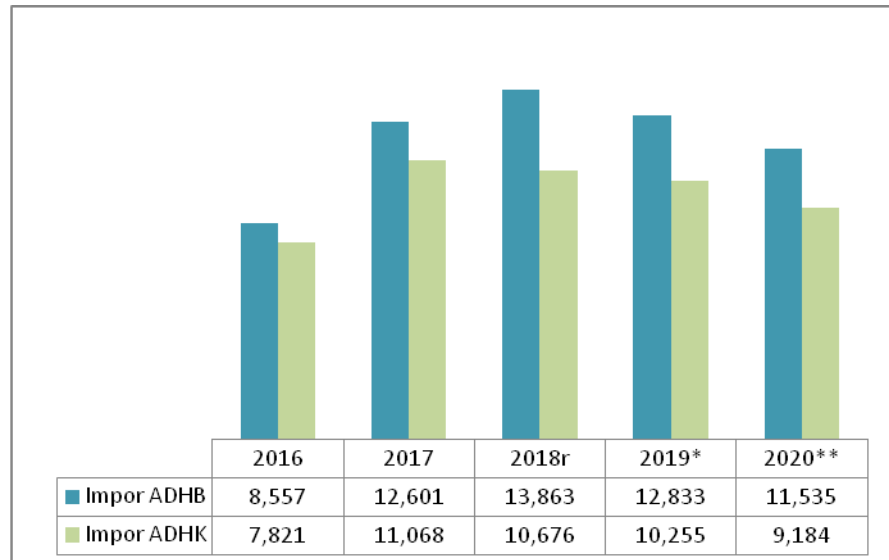
Mengingat produk Kabupaten Bangka Barat tersebut tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka untuk memenuhinya didatangkan berbagai produk barang dan jasa yang berasal dari impor luar negeri, provinsi lain maupun kabupaten/kota lain yaitu sebesar 8.557 miliar rupiah pada tahun 2016, 12.601 miliar rupiah pada tahun 2017, 13.863 miliar rupiah pada tahun 2018, 12.883 pada tahun 2019 dan 11.535 pada tahun 2020.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Keterangan: r) Angka revisi \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

**Gambar 2.69** Nilai Ekspor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2021.

Keterangan: r) Angka revisi \*) Angka sementara \*\*) Angka sangat sementara

**Gambar 2.70** Nilai Impor menurut ADHB dan ADHK (miliar rupiah) Terhadap PDRB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020

#### 2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### 1. Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas merupakan faktor utama guna menunjang pembangunan, baik dari sisi perekonomian maupun non perekonomian. Jarak tempuh yang jauh terkadang tidak menjadi persoalan yang utama, jika infrastruktur terpenuhi dengan kualitas yang baik. Jalan merupakan salah satu infrastruktur dasar dan wajib yang harus dimiliki pada setiap wilayah dengan tipe jalan yang disesuaikan dengan fungsi jalan, antara lain jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa.

**Tabel 2.70** Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Panjang Jalan Total	898	898	898	898	898
2	Jumlah Motor*	128.184	131.740	155.565	144.423	144.423
3	Jumlah Mobil*	11.589	11.991	12.639	14.498	14.498
4	Jumlah Kendaraan*	139.773	143.731	168.204	158.291	158.291
Rasio Keseluruhan		1:156	1:160	1:187	1:176	1:176

Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

\*) Data yang membayar pajak



Jika dilihat dari nilai rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan masih terlihat normal. Secara rata-rata dari 5 (lima) tahun terakhir, setiap kilometer panjang jalan berbanding dengan 176 kendaraan. Masih belum terlihat kemacetan, walau di daerah perkotaan baik pada jam sibuk. Apalagi dari data jumlah kendaraan yang ada, masih didominasi oleh kendaraan roda dua yaitu di atas 90 persen.

Pelengkap aksesibilitas daerah yang penting dimiliki oleh daerah lainnya yaitu adanya sarana dan prasarana untuk angkutan umum, menjadikan sektor transportasi di Kabupaten Bangka Barat termasuk dalam sektor strategis. Sampai dengan saat ini, Kabupaten Bangka Barat memiliki satu pelabuhan penumpang, serta dua pelabuhan non penumpang, dan tiga buah terminal dengan sembilan jumlah trayek antar kota dalam provinsi.

Melalui sarana angkutan umum tersebut, mobilitas penumpang dan barang terjadi yang merupakan bagian dari perputaran ekonomi di Kabupaten Bangka Barat. Perbaikan serta penambahan sarana dan prasarana pada sektor transportasi dilakukan untuk memperlancar mobilitas antar kecamatan, antar kota dalam provinsi maupun antar pulau seperti Bangka-Palembang.

Pergerakan penumpang lewat jalur bus mengalami peningkatan baik yang keluar maupun masuk ke Kabupaten Bangka Barat. Peningkatan penumpang yang datang ke Kabupaten Bangka Barat terlihat lebih stabil dan signifikan. Akan tetapi berbeda dengan pergerakan penumpang lewat jalur laut, dimana terjadi penurunan pada penumpang yang datang, sedangkan untuk penumpang yang berangkat mengalami kenaikan.

## 2. Penataan Wilayah

Di dalam RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, dari Rencana Peruntukan seluas 285.100,90 ha, telah ditetapkan kawasan budidaya seluas 248.660,05 ha sebagai potensi pengembangan wilayah.

Kawasan peruntukan terkait potensi pengembangan wilayah antara lain :

- a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas  $\pm 77.742$  ha;
- b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangka Barat dengan luas  $\pm 2.050$  ha;
- c. Kawasan Peruntukan Pertanian, yang terdiri atas :
  - 1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, disetiap kecamatan dengan total luas  $\pm 15.812$  ha, dari luas total tersebut  $\pm 11.099$  ha berada di kawasan hutan;



- 2) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura, disetiap kecamatan dengan total luas  $\pm 1.598$  ha;
  - Kawasan peruntukan perkebunan, terdiri atas Kawasan peruntukan perkebunan besar, seluas  $\pm 41.860$  ha, dengan rincian:
    - a) Kecamatan Muntok seluas  $\pm 5.903$  ha;
    - b) Kecamatan Simpangteritip seluas  $\pm 10.493$  ha;
    - c) Kecamatan Jebus seluas  $\pm 712$  ha;
    - d) Kecamatan Kelapa seluas  $\pm 10.421$  ha;
    - e) Kecamatan Tempilang seluas  $\pm 14.331$  ha.
  - Kawasan peruntukan perkebunan rakyat, seluas  $\pm 14.331$  ha, dan dari luas total tersebut  $\pm 166$  ha berada di kawasan hutan produksi.
- 3) Kawasan peruntukan peternakan, terdapat di Kecamatan Kelapa, Muntok dan Kecamatan Jebus seluas  $\pm 72$  ha.

### 3. Sarana dan Prasarana Pendukung

#### a) Fasilitas Bank

Peranan bank sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara dan daerah dalam hal mendukung pembangunan, karena pembangunan sangat bergantung pada dinamika perkembangan dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Fakta menunjukkan bahwa dewasa ini hampir semua sektor yang berkaitan dengan kegiatan keuangan membutuhkan jasa bank.

**Tabel 2.71** Jumlah Bank dan ATM Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Kecamatan	BANK	ATM
1.	Muntok	10	22
2.	Simpang Teritip	2	3
3.	Jebus	2	2
4.	Kelapa	4	5
5.	Tempilang	2	2
6.	Parittiga	6	11
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>45</b>

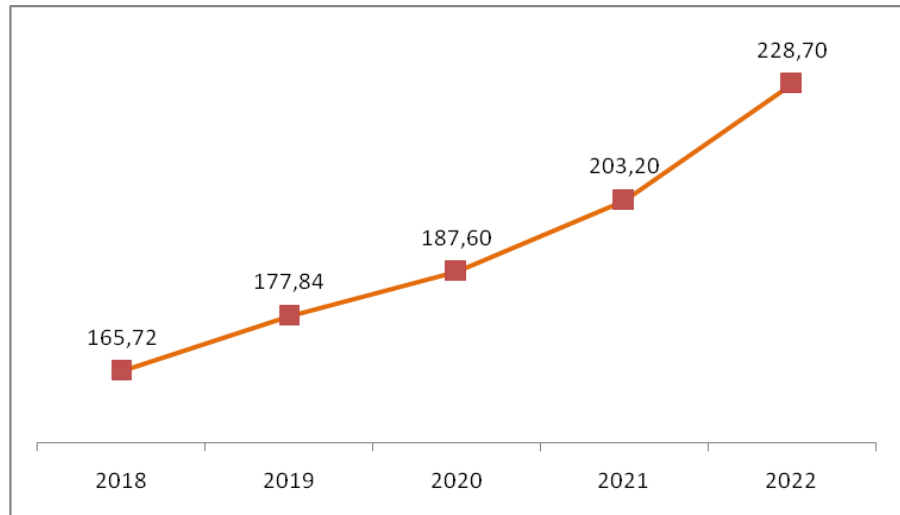
Sumber : BP4D Kab.Bangka Barat, 2021

Banyaknya jumlah bank pada suatu daerah menunjukkan perputaran uang yang ada di daerah tersebut, sehingga dengan pengertian semakin banyak jumlah bank yang ada, maka semakin banyak perputaran uang yang ada di daerah tersebut.

### b) Ketersediaan Restoran dan Rumah Makan

Perkembangan usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Bangka Barat dari sisi jumlah dapat dikatakan perkembangannya stagnan. Tidak ada penambahan jumlah restoran dan rumah makan dalam beberapa tahun terakhir.

Akan tetapi jika dilihat dari perkembangan penyediaan makan minum dalam PDRB, rata-rata kenaikannya dalam 5 (lima) tahun terakhir cukup signifikan.



Sumber: Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

**Gambar 2.71** Nilai Subsektor Makan Minum  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

### c) Ketersediaan Penginapan

Perkembangan usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi peningkatan, walau belum optimal. Dari sisi sebaran, usaha penginapan dan hotel di Kabupaten Bangka Barat masih terfokus pada Kecamatan Muntok sebagai ibukota kabupaten.

Dalam rangka mengakomodasi wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka Barat, maka ketersediaan hotel dan penginapan sangat penting. Sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Bangka Barat tidak ada penambahan sarana akomodasi, tersedia hotel non bintang dengan jumlah 14 unit dan penginapan sebanyak 24 unit.

#### 4. Komunikasi dan Informatika

##### a) Fasilitas Listrik

Listrik memegang peranan yang penting sekali dalam pembangunan, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga. Sebagai faktor produksi tersedianya tenaga listrik cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industri, pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Pembangunan sektor-sektor ini sangat vital bagi tercapainya tujuan pembangunan seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, mengubah struktur ekonomi dan lain-lain. Disamping itu tersedianya listrik dikalangan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.72** Jumlah Produksi Listrik dan Daya Terpasang pada PLN di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Produksi Listrik (KWh)	Daya Terpasang (Kw)
2018	100.593.926	77.448.100
2019	108.474.685	82.827.300
2020	129.508.990	92.614.700
2021	148.597.618	103.528.150
2022	175.924.828	119.651.150

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2023.

Pada Tahun 2022 PLN Muntok di Kabupaten Bangka Barat melayani penyediaan kebutuhan listrik untuk para pelanggan PLN. Pelanggan PLN sendiri terdiri dari beberapa kategori besar seperti rumah tangga, industri, dinas, instansi badan sosial, penerangan jalan, bisnis, dan layanan khusus. Daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka Barat adalah 119.651.150 KW selama tahun 2022. Begitu pula dengan banyaknya produksi PLN oleh PLN Mentok sebesar 175.924.828 KWh. Produksi listrik dan daya terpasang pada wilayah Kabupaten Bangka Barat setiap tahun terus bertambah guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

##### b) Fasilitas Komunikasi

Fasilitas komunikasi yang ada di Kabupaten Bangka Barat cukup baik, dimana hampir di keseluruhan wilayah memiliki jaringan telekomunikasi. Walaupun tingkat



kualitas jaringan komunikasi di setiap wilayah berbeda, akan tetapi sudah menjangkau sampai pada level perdesaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2022 persentase penduduk berumur 5 (lima) tahun ke atas yang menggunakan Telepon Seluler (HP)/ Nirkabel atau Komputer (PC/ Desktop, Laptop/ Notebook, Tablet) di Kabupaten Bangka Barat sebesar 74,34 persen (Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bangka Barat, 2022).

### 2.1.4.3 Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan meningkatkan perekonomian daerah serta sekaligus dapat mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Selain dari perhitungan secara bisnis, masuknya investor asing ke suatu wilayah juga sangat tergantung dari kondisi keamanan dan ketertiban serta politik dalam wilayah tersebut, khususnya terkait ketenagakerjaan. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investor di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja : Keamanan dan Ketertiban, Perizinan, Insentif, dan Retribusi.

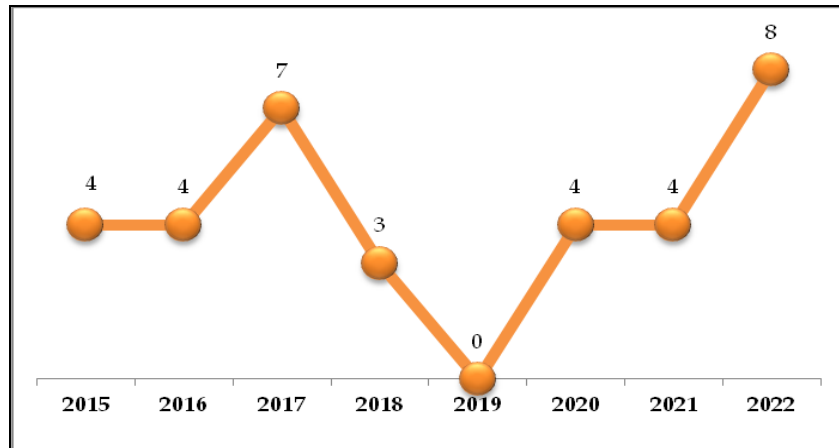
Kekurangan yang terjadi dalam iklim investasi di Kabupaten Bangka Barat adalah masih minimnya data yang berhubungan dengan potensi daerah serta belum disusunnya dokumen khusus terkait perencanaan terkait investasi sehingga daya tawar kepada para investor dirasa masih sangat minim.

#### 1. Keamanan dan Ketertiban

Angka Kriminalitas mempengaruhi investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah. Semakin rendah angka kriminalitas pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula ketertarikan investor untuk menanam investasi di daerah tersebut. Hal tersebut terkait investasi jangka panjang yang memerlukan modal yang cukup besar, sehingga kepastian akan keamanan sangatlah penting.

Semakin rendah jumlah demonstrasi pada suatu daerah, maka ketertarikan investor untuk menanam investasi di suatu daerah semakin tinggi, khususnya terkait persoalan ketenagakerjaan. Tingkat keamanan di suatu wilayah menjadi sangat penting bagi para investor, karena modal yang dikeluarkan untuk membangun aset dan menjalankan roda usaha sangat besar khususnya pada usaha yang berbasis padat

modal. Data lengkap tentang jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kabupaten Bangka Barat di sajikan pada gambar di bawah ni.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bangka Barat, 2021.

**Gambar 2.72** Jumlah Demonstrasi  
di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015-2022

## 2. Perizinan

Masalah perizinan juga merupakan faktor penentu dalam peningkatan daya saing investasi daerah khususnya terkait kemudahan dalam proses administrasi perizinan.

Lama pengurusan, jumlah persyaratan dan biaya yang bervariasi sesuai dengan peraturan dan SOP masing-masing yang diharapkan menciptakan kemudahan dalam investasi di Kabupaten Bangka Barat.

### 2.1.4.4 Sumber Daya Manusia

#### 1. Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas SDM berhubungan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada (permintaan pasar tenaga kerja). Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya.

**Tabel 2.73** Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Tingkat Pendidikan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tidak/belum sekolah	49.476	50.882	54.028	54.028	37.704
Persentase Tidak/belum sekolah	25,11	25,68	26,42	26,42	17,97
Belum/tidak tamat SD	25.000	25.060	26.030	26.030	30.807
Persentase Belum/tidak tamat SD	12,69	12,69	12,73	12,73	14,68
Tamat SD	60.938	60.512	61.254	61.254	66.399
Persentase Tamat SD	30,92	30,54	29,95	29,95	31,65
Tamat SMP	24.366	24.565	25.030	25.030	32.363
Persentase Tamat SMP	12,36	12,40	12,24	12,24	15,43
Tamat SMA	30.496	30.223	30.957	30.957	34.627
Persentase Tamat SMA	15,48	15,25	15,14	15,14	16,51
Diploma I/II/III	2.824	2.808	2.814	2.814	2.855
Persentase Diploma I/II/III	1,43	1,41	1,38	1,38	1,36
S1/DIV	3.875	3.945	4.306	4.306	4.909
S2	88	90	103	103	123
S3	3	3	5	5	4
Persentase minimal S1	2,01	2,03	2,11	2,11	2,40
<b>Total</b>	<b>197.066</b>	<b>198.088</b>	<b>204.527</b>	<b>204.527</b>	<b>209.791</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Barat, 2023.

Dari data diatas, pada tahun 2022 rata-rata jumlah penduduk berdasarkan pendidikan tiga terbesar adalah penduduk tamatan SD (31,65 persen), tidak/belum sekolah (17,97 persen) dan tamat SMA (14,68 persen). Terlihat sangat jelas bahwa tingkat pendidikan sebagian besar penduduk di Kabupaten Bangka Barat masih sangat minim. Dilihat dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat di sisi tenaga kerja masih didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dibawah Diploma.

Dengan kondisi pendidikan penduduk tersebut, sering kali peluang kerja yang ada di Kabupaten Bangka Barat yang membutuhkan pendidikan yang cukup tinggi, kesempatan tersebut banyak diambil oleh penduduk luar Kabupaten Bangka Barat. Melihat kondisi tersebut pemerintah daerah harus segera mengambil strategi yang tepat untuk memperkuat daya saing penduduk, baik peningkatan keahlian dengan pelaksanaan pendidikan non formal yang saat ini sering dibutuhkan maupun membuka sekolah kejuruan yang berpotensi untuk mengelola kekayaan lokal yang ada di Kabupaten Bangka Barat.

## 2. Tingkat Ketergantungan

Rata-rata rasio ketergantungan Kabupaten Bangka Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir sebesar 48,07 persen yang menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (umur 15–64 tahun) menanggung  $\pm$  50 penduduk yang tidak produktif (umur 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas). Untuk lebih detail terkait data rasio ketergantungan di Kabupaten Bangka Barat setiap tahunnya ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.74** Rasio Ketergantungan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 – 2022

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022
0 – 14 Tahun	56.245	57.665	57.074	56.552	52.118
65 Tahun keatas	8.641	9.048	9.536	10.279	12.274
Penduduk Usia Tidak Produktif	64.886	66.713	66.610	66.831	64.392
Penduduk Usia produktif	132.180	131.375	137.917	139.415	145.399
<b>Rasio Ketergantungan</b>	<b>49,09</b>	<b>50,78</b>	<b>48,30</b>	<b>47,94</b>	<b>44,29</b>
< 15 Tahun	42,55	43,89	41,38	40,56	35,84
> 65 Tahun	6,54	6,89	6,91	7,37	8,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bangka Barat, 2023.

Dari data diatas, terlihat bahwa rasio ketergantungan di tiap tahunnya selalu mengalami perubahan walaupun tidak terlalu signifikan. Rata-rata rasio ketergantungan dalam lima tahun terakhir yaitu 50, yang secara umum disimpulkan bahwa 2 (dua) orang produktif menanggung 1 (satu) orang yang tidak produktif.

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2021

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 46 Tahun 2020 tertanggal 7 Juli 2020. RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang merupakan tahun keenam atau tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2019 yang selanjutnya diubah melalui Perubahan



APBD Tahun 2020 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2020. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2021 serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, dengan jumlah anggaran sebesar Rp947.015.149.144,25,00 yang terdiri dari 173 program, 399 kegiatan, dan 1.151 subkegiatan termasuk program dan kegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program dan kegiatan dilaksanakan oleh 31 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 2.75** Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan APBD Tahun 2021

No.	Uraian	Perubahan RKPD	Perubahan APBD	Selisih RKPD dengan APBD
1.	Jumlah Anggaran Belanja	941.302.441.604,77	947.015.149.144,24	5.712.707.539,47
2.	Jumlah Program	163	173	10
3.	Jumlah Kegiatan	387	399	12
4.	Jumlah Subkegiatan	1.118	1.151	33

Jika dibandingkan dengan RKPD Tahun 2021, setelah ditetapkan menjadi APBD terjadi perubahan pada total anggaran belanja dengan selisih sebesar Rp5.712.707.539,47. Selisih pada total belanja tersebut karena adanya pembahasan pada saat penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2021 baik ditingkat eksekutif maupun ditingkat legislatif.

Pada jumlah program terdapat selisih antara Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan Perubahan APBD Tahun 2021 sebanyak 10 program, pada jumlah kegiatan terdapat selisih sebanyak 12 kegiatan, sementara pada subkegiatan terdapat selisih sebanyak 33 subkegiatan yang secara umum merupakan program, kegiatan dan subkegiatan yang bertambah setelah dilakukan pembahasan KUPA Tahun 2021.

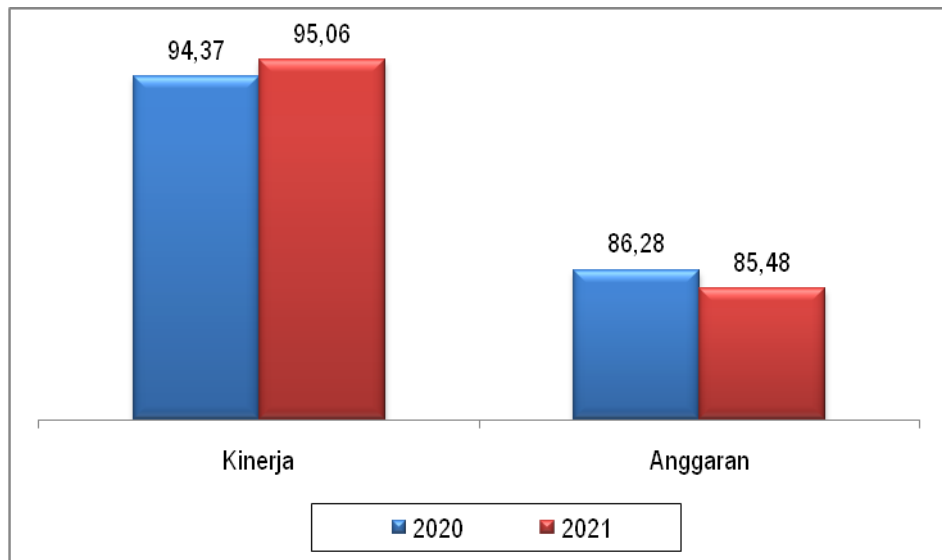
Dengan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi BP4D selaku perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah yang



membidangi penganggaran untuk mengevaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya.

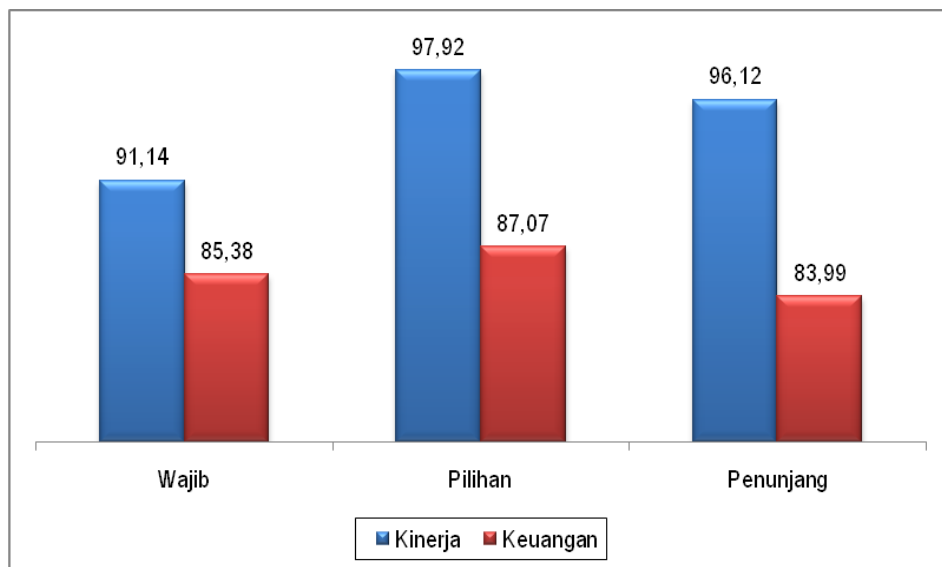
Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah :

- a. Untuk penyusunan laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 hanya dilakukan terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2021, tidak dibandingkan dengan target RPJMD/Renstra karena terjadinya perubahan nomenklatur program dan kegiatan;
- b. Total anggaran belanja Tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV adalah Rp947.015.149.144,24 dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan IV sebesar Rp814.298.456.353,03 atau 85,99 persen dengan kriteria Tinggi;
- c. Total rata-rata capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 95,06 persen dengan kriteria Sangat Tinggi;
- d. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2021 sebesar 85,48 persen dengan kriteria Tinggi;
- e. Dikarenakan tidak bisa membandingkan capaian Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD, maka untuk melihat capaian kinerja RPJMD digunakan evaluasi hasil RKPD sampai dengan Tahun 2020;
- f. Total rata-rata capaian kinerja RPJMD s.d. Tahun 2020 sebesar 67,40 persen dengan kriteria Sedang;
- g. Total rata-rata capaian realisasi anggaran RPJMD Tahun 2020 sebesar 56,89 persen dengan kriteria Rendah;
- h. Pada laporan evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan Tahun 2020 masih terdapat program, kegiatan serta satuan target Renstra yang belum selaras dengan program, kegiatan serta satuan target Renja dan APBD Tahun 2020, sehingga capaian kinerja RKPD dan RPJMD belum dapat dihitung dengan tepat;
- i. Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2020, maka rata-rata capaian di tahun 2021 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih tinggi, sementara untuk rata-rata realisasi anggaran lebih rendah. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2021 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 95,06 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 85,48 persen.



**Gambar 2.73** Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran  
Tahun 2020 dan 2021

- j. Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, untuk urusan wajib rata-rata realisasi kinerja sebesar 91,14 persen dan keuangan sebesar 85,38 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,92 persen dan keuangan sebesar 87,07 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 96,12 persen dan keuangan sebesar 83,99 persen. Pada triwulan IV, capaian kinerja tertinggi adalah pada fungsi pilihan dan capaian anggaran tertinggi pada urusan pilihan.



**Gambar 2.74** Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD  
Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Tahun 2021

- k. Secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 terdapat kendala dan permasalahan antara lain:
- Masih terbatasnya sumber daya aparatur baik dari sisi kuantitas maupun kualitas;



- Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan belum digunakan secara maksimal dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
- Terjadinya Pandemi Covid-19 sehingga dilakukan pergeseran dan pengurangan anggaran untuk pembiayaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Kejadian Pandemi Covid-19 juga secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun yang melibatkan perkumpulan orang.

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2021 per urusan pemerintahan dijelaskan dalam tabel di bawah ini.





Tabel 2.76 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPd Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPd SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Urusan Wajib</b>												
1.	Pendidikan	2	10	51	93,47	92,45	ST	ST	60,72	60,44	R	R	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	5	18	65	76,71	61,62	T	R	81,44	134,23	T	ST	Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	16	44	96,55	94,36	ST	ST	79,92	39,7	T	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	9	25	84,42	78,99	T	T	57,36	50,95	R	R	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5.	Ketenraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	9	23	59	97,78	94,67	ST	ST	61,66	62,84	R	R	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Sosial	4	10	28	99,41	79,47	ST	T	58,75	66,76	R	S	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
7.	Tenaga Kerja	4	8	26	95,28	88,28	ST	T	80,24	21,76	T	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5	5	90,00	85,00	ST	T	51,6	33,33	R	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	4	10	28	100,00	89,13	ST	T	63,08	40,34	R	SR	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Pertanahan	1	1	1	0,00	0,00	SR	SR	36,5	31,34	SR	SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Lingkungan Hidup	7	12	29	100,21	94,13	ST	ST	42,91	43,87	SR	SR	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	15	35	82,67	91,03	T	ST	61,3	67,66	R	S	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	4	10	100,00	97,27	ST	ST	52,91	44,78	R	SR	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	12	43	98,24	93,53	ST	ST	59,86	45,2	R	SR	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Perhubungan	1	2	2	100,00	99,14	ST	ST	59,43	45,79	R	SR	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	3	8	30	97,33	90,62	ST	ST	57,61	42,41	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	5	10	27	86,34	85,11	T	T	36,49	36,01	SR	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
18.	Penanaman Modal	3	3	6	91,00	78,26	ST	T	71,21	60,38	S	R	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepemudaan dan Olahraga	3	3	3	99,97	87,85	ST	T	61,52	29,02	R	SR	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	1	1	2	100,00	97,44	ST	ST	56,76	12,6	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	2	2	100,00	99,53	ST	ST	59,28	6,79	R	SR	Dinas Komunikasi dan Informatika



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
22.	Kebudayaan	5	13	27	97,99	91,47	ST	ST	57,04	31,68	R	SR	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	2	8	26	100,00	82,62	ST	T	58,89	61,73	R	R	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	2	3	4	100,00	97,06	ST	ST	79,11	64,12	T	R	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Urusan Pilihan</b>													
1.	Kelautan dan Perikanan	3	8	28	95,83	91,48	ST	ST	40,12	38,24	SR	SR	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	3	4	11	96,67	87,83	ST	T	85,31	56,97	T	R	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pertanian	5	6	9	95,00	92,01	ST	ST	49,31	33,66	SR	SR	Dinas Petanian dan Pangan
4.	Kehutanan	1	1	1	100,00	74,65	ST	S	60	34,22	R	SR	Dinas Lingkungan Hidup
5.	ESDM												
6.	Perdagangan	2	2	3	100,00	76,80	ST	T	47,71	63,33	SR	R	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
7.	Perindustrian								54,14	31,02	R	SR	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
8.	Transmigrasi	2	2	2	100,00	99,67	ST	ST	47,85	44,28	SR	SR	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Fungsi Penunjang</b>													



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Kesekretariatan)	5	31	98	92,49	73,49	ST	S	91,95	72,23	ST	S	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2.	Pengawasan	3	8	31	84,72	68,86	T	S	77,74	64,5	T	R	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan Pembangunan	3	11	38	100,00	83,11	ST	T	54,11	46,59	R	SR	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	3	3	100,00	81,08	ST	T	87,25	30,89	T	SR	
5.	Kepegawaian	3	12	40	94,21	83,00	ST	T	79,75	64,76	T	R	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6.	Keuangan	5	16	76	98,39	91,00	ST	ST	92,18	66,68	ST	S	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2021	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2021	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2021 (%)				TINGKAT CAPAIAN RPJMD SAMPAI DENGAN TAHUN 2020 (%)				PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	PREDIKAT KINERJA	PREDIKAT ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	5	7	8	9	10	11	12	13
7.	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	36	71	187	99,16	91,39	ST	ST	102,71	112,83	ST	ST	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang
8.	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)	11	18	46	100,00	100,00	ST	ST	77,57	54,82	T	R	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2020



## 2.2.2. Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2022

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2021 tertanggal 05 Juli 2021. Sejalan dengan perubahan perkembangan pembangunan di tahun 2021, dilakukan perubahan terhadap RKPD Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2022 tertanggal 26 Juli 2022.

Berdasarkan RKPD tersebut kemudian ditetapkan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang memuat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 yang selanjutnya diubah melalui Perubahan APBD Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022. Pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD selanjutnya dievaluasi dengan membandingkan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan melalui realisasi kinerja dan anggaran dengan harapan akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 dilakukan hanya terhadap pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang berasal dari belanja langsung APBD Tahun Anggaran 2022 serta perubahan penjabaran APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, dengan jumlah anggaran sebesar Rp945.504.695.023,00 yang terdiri dari 198 program, 489 Kegiatan, dan 1.555 Subkegiatan termasuk program,kegiatan, dan subkegiatan rutin di masing-masing perangkat daerah. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dilaksanakan oleh 31 perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**Tabel 2.77** Ringkasan Hasil Perbandingan Jumlah Anggaran Belanja Langsung, Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

No.	Uraian	Perubahan RKPD	Perubahan APBD
1.	Jumlah Anggaran Belanja	988.325.036.365,00	945.504.695.023,00
2.	Jumlah Program	152	150
3.	Jumlah Kegiatan	398	392
4.	Jumlah Subkegiatan	1.232	1.197

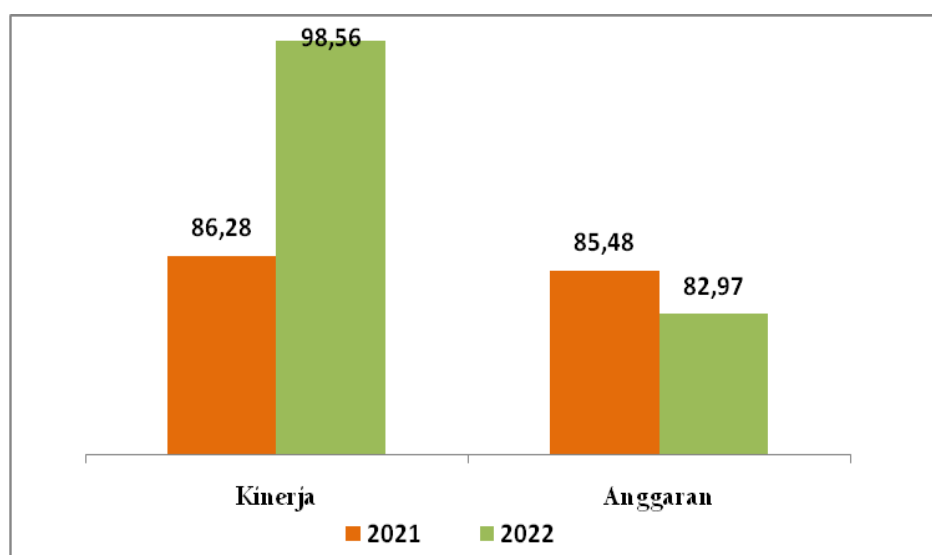
Pada jumlah program terdapat perbedaan antara RKPD Perubahan Tahun 2022 dengan Perubahan APBD Tahun 2022 sebanyak 2 program, pada jumlah kegiatan terdapat selisih sebanyak 6 kegiatan, sementara pada subkegiatan terdapat selisih sebanyak 35.

Untuk penyajian laporan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 menggunakan pembagian urusan pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari keseluruhan 32 urusan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu 24 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, yang dilaksanakan dan dijabarkan melalui kegiatan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu sebanyak 24 urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan ditambah dengan 8 (delapan) fungsi penunjang. Pada penganggaran tahun 2022, urusan pilihan yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bidang Transmigrasi.

Dengan dilakukannya evaluasi terhadap hasil RKPD diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi BP4D selaku perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku perangkat daerah yang membidangi penganggaran untuk mengevaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan perangkat daerah dalam merumuskan perencanaan dan penganggaran untuk periode berikutnya.

Rangkuman evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 adalah :

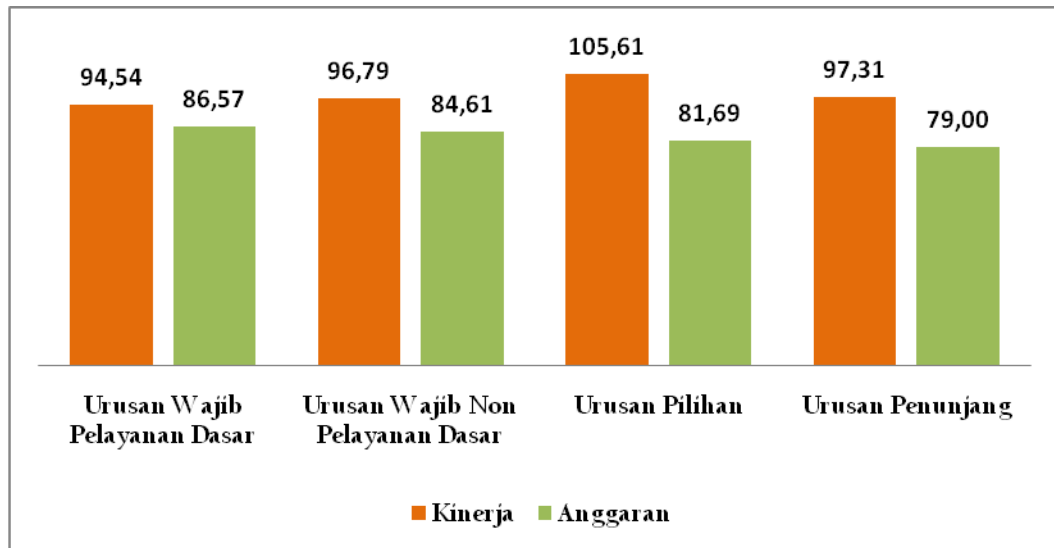
- Total anggaran belanja Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV adalah Rp945.504.695.023,00 dengan total realisasi anggaran s.d Triwulan IV sebesar Rp.836.017.730.746,19 atau **88,42 persen** dengan kriteria **Tinggi**;
- Total rata-rata capaian kinerja RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2022 sebesar **98,56 persen** dengan kriteria **Sangat Tinggi**;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD s.d. Triwulan IV Tahun 2022 sebesar **82,97 persen** dengan kriteria **Tinggi**;
- Jika dibandingkan dengan capaian sampai dengan Triwulan IV di tahun 2021, maka rata-rata capaian di tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV untuk rata-rata realisasi kinerja lebih tinggi, sementara untuk rata-rata realisasi anggaran lebih rendah. Capaian pada Triwulan IV di tahun 2022 untuk rata-rata realisasi kinerja sebesar 98,56 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 82,97 persen.



**Gambar 2.75** Perbandingan Realisasi Kinerja dan Anggaran  
Triwulan IV Tahun 2021 dan 2022

- Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022, untuk urusan wajib pelayanan dasar rata-rata realisasi kinerja sebesar 94,54 persen dan keuangan sebesar 86,57 persen, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata kinerja sebesar 96,79 persen dan keuangan sebesar 84,61 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 105,61 persen dan keuangan sebesar 81,69 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang di Triwulan IV, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,31 persen dan keuangan sebesar 79,00 persen





**Gambar 2.76** Rata Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD

Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Tahun 2022

Rekapitulasi evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 per urusan pemerintahan sebagaimana tabel di bawah ini.



Tabel 2.78 Rekapitulasi Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2022	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2022	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Urusan Wajib</b>						
1.	Pendidikan	4	12	65	92,77	78,47	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2.	Kesehatan	23	43	232	81,19	77,53	Dinas Kesehatan dan RSUD Sejiran Setason
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9	20	59	96,47	84,36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	12	30	98,93	90,06	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	5	21	69	95,12	86,65	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Bencana
6.	Sosial	5	12	38	100	92,05	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Tenaga Kerja	4	10	32	62,60	61,43	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	14	33	98,5	68,43	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.	Pangan	4	12	34	97,99	81,5	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Pertanahan	2	2	2	100	70,49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Lingkungan Hidup	6	14	34	91,67	82,7	Dinas Lingkungan Hidup



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2022	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2022	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	15	43	104,66	95,75	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3	3	12	100	92,32	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	20	93,65	87,11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15.	Perhubungan	2	6	8	100	59,89	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
16.	Komunikasi dan Informatika	3	11	39	98,48	86,45	Dinas Komunikasi dan Informatika
17.	Koperasi dan UKM	6	12	29	99,02	91,7	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
18.	Penanaman Modal	3	3	4	105,84	61,26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19.	Kepemudaan dan Olahraga	3	4	4	100	97,23	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
20.	Statistik	1	1	5	97,14	99,17	Dinas Komunikasi dan Informatika
21.	Persandian	1	2	2	100	97,84	Dinas Komunikasi dan Informatika
22.	Kebudayaan	6	15	33	100	99,62	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
23.	Perpustakaan	3	9	28	98,32	94,04	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24.	Kearsipan	2	3	4	100	87,43	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
<b>Urusan Pilihan</b>							
1.	Kelautan dan Perikanan	4	8	24	99,06	93,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
2.	Pariwisata	4	6	12	92,21	62,01	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3.	Pertanian	6	10	15	100	87,32	Dinas Pertanian dan Pangan
4.	Kehutanan	1	1	2	100	94,29	Dinas Lingkungan Hidup
5.	Perdagangan	4	4	8	88,04	74,77	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
6.	Perindustrian	3	3	5	154,33	78,71	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian



NO.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM TAHUN 2022	JUMLAH KEGIATAN TAHUN 2022	JUMLAH SUBKEGIATAN TAHUN 2022	TINGKAT CAPAIAN RKPD TAHUN 2022 (%)		PERANGKAT DAERAH
					REALISASI KINERJA	REALISASI ANGGARAN	
	<b>Fungsi Penunjang</b>						
1.	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Kesekretariatan)	5	34	107	91,36	78,8	Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
2.	Pengawasan	3	9	25	94,35	77,54	Inspektorat Daerah
3.	Perencanaan Pembangunan	3	14	61	100	84,7	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
4.	Penelitian dan Pengembangan	1	4	4	100	55,52	
5.	Kepegawaian	3	13	58	98,73	66,22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiain Daerah
6.	Keuangan	5	19	96	98,58	90,41	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
7.	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	36	90	239	97,32	88,95	Dilaksanakan oleh 6 Kecamatan, yaitu : Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parittiga, dan Kecamatan Tempilang
8.	Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)	6	12	40	98,81	89,59	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Sumber : Laporan Evaluasi Hasil RKPD Kab. Bangka Barat Tahun 2022.



### 2.2.3 Realisasi RPJMD 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

Berdasarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan tahun 2022, dilakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Evaluasi terhadap indikator pembangunan daerah tersebut adalah dengan membandingkan capaian/realisasi dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui dokumen perencanaan tahunan daerah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Visi Kabupaten Bangka Barat pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”**, yang terdiri dari 3 Misi yaitu :

1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat, yang terdiri dari 2 (dua) tujuan, dan 6 (enam) sasaran;
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia, yang terdiri dari 1 (satu) tujuan, dan 4 (empat) sasaran; serta
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, yang terdiri dari 2 (dua) tujuan, dan 3 (tiga) sasaran.

Untuk capaian sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.79** Capaian Sasaran RPJMD  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 sampai dengan Tahun 2022

No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	KET
1.1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	0,21	4,91	2,01	40,94	Tidak Tercapai
a	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Persentase	8,16	5,5	12,5	227,27	Tercapai
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	Persentase	20,87	5,7	7,57	132,81	Tercapai
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,22	2,38	2,32	97,48	Tidak Tercapai



No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	KET
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	16,97	27,03	25,01	92,53	Tidak Tercapai
b	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	989,38	805	1403	174,29	Tercapai
c	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0,68	0,7	0,72	102,86	Tercapai
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	100	Tercapai
d	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	63,29	70,91	69,39	97,86	Tidak Tercapai
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Persentase	41,18	41,18	52,94	128,56	Tercapai
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	-	Tinggi	Tinggi	100	Tercapai
1.2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	12.269	12.605	12.790	101,47	Tercapai
a	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	Persentase	2,75	2,85	2,46	113,68	Tercapai
b	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	Persentase	3,83	3,64	4,86	66,48	Tidak Tercapai
2.1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,6	69,62	70,12	100,72	Tercapai
a	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,44	7,59	7,46	98,29	Tidak Tercapai
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,7	11,72	11,72	100	Tercapai
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Persentase	22,46	24,32	20,53	84,42	Tidak Tercapai
b	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,08	70,41	70,25	99,77	Tidak Tercapai
		Prevalensi Stunting	Persentase	11,1	8,75	9,56	90,74	Tidak Tercapai
c	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,04	90,67	90,04	99,58	Tidak Tercapai
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama	Pratama	100	Tercapai
d	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	n/a	Cukup	Baik	133,33	Tercapai
3.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	Buruk	Kurang	Cukup	150	Tercapai
a	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	69,06	70	68,66	98,09	Tidak Tercapai
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang	Berkembang	100	Tercapai
		Indeks SPBE	Kategori	Cukup	Cukup	Cukup	100	Tercapai
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	60,16	64,6	62,47	96,70	Tidak Tercapai



No.	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2021	TARGET TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2022	KET
b	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,07	81,52	83,06	101,89	Tercapai
3.2	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	0,58	0,58	1,733	298,79	Tercapai
a	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persentase	6,79	8,87	9,14	103,04	Tercapai

Dari 5 (lima) tujuan dengan kategori “Tercapai” sebanyak 4 (empat) tujuan yaitu :

- “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat” dengan satu indikator tujuan “Pengeluaran Perkapita”;
- “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia” dengan satu indikator tujuan “Indeks Pembangunan Manusia”; dan
- “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik” dengan satu indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”;
- “Meningkatkan kemampuan keuangan daerah” dengan satu indikator tujuan “Indeks Kapasitas Fiskal Daerah”.

Sedangkan yang “tidak tercapai” yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” dan “Laju Pertumbuhan Ekonomi”.

Sasaran dengan kategori “Tercapai” sebanyak 8 (delapan) sasaran yaitu :

- Sasaran “Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah” dengan 4 (empat) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah” dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah” dengan 2 (dua) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup” dengan 3 (tiga) indikator sasaran;
- Sasaran “Menurunnya angka kemiskinan”, dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat”, dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah” dengan 1 (satu) indikator sasaran, dan;
- Sasaran “Meningkatnya kemandirian keuangan daerah” dengan 1 (satu) indikator sasaran.



Sasaran dengan kategori “Tidak Tercapai” sebanyak 5 (lima) sasaran yaitu :

- Sasaran “Menurunnya angka pengangguran” dengan 1 (satu) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan” dengan 3 (tiga) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat” dengan 2 (dua) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” dengan 2 (dua) indikator sasaran;
- Sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel” dengan 5 (lima) indikator sasaran.

### 2.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa urusan yang diamanahkan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat adalah urusan wajib yang terkait pelayanan dasar yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Urusan Sosial, serta Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa standar teknis terkait mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar akan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Aturan turunan yang menjelaskan tentang SPM antara lain :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;





6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut dilakukan oleh OPD pengampuh yang memiliki urusan yang berkaitan dengan pemerintahan wajib dan pelayanan dasar. Di Kabupaten/ Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, OPD pelaksana penerapan SPM memiliki perbedaan nomenklatur jika dibandingkan antar Kabupaten/ Kota lainnya. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kebijakan dalam penataan organisasi di masing-masing pemerintah Kabupaten/ kota yang disesuaikan kebutuhan daerah masing-masing. Namun walaupun demikian, tidak menjadi permasalahan sejauh ini terkait dengan perbedaan nomenklatur tersebut yang paling utama asalkan penerapan SPM dapat terlaksana dengan optimal.

Di Kabupaten Bangka Barat sendiri untuk OPD pengampuh SPM yang ada saat ini berjumlah 7 OPD dari 6 urusan SPM tersebut, yaitu :

- a. Pendidikan dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Kesehatan dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
- d. Perumahan Rakyat dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan;
- e. Trantibumlinmas dengan 2 (dua) OPD teknisnya yang terbagi menjadi sub urusan trantibumlinas dan sub urusan pemadam kebakaran oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Sub urusan bencana oleh BPBD;
- f. Sosial dengan OPD teknisnya yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa.



**Tabel 2.80** Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2022

No.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1.	Urusan Pendidikan	65,95%	100%
2.	Urusan Kesehatan	92,01%	93,10%
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,74%	63,37%
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	50%	50%
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	62,46%	58,38%
6.	Urusan Sosial	100%	100%
<b>CAPAIAN SPM KABUPATEN BANGKA BARAT</b>		<b>87,57%</b>	<b>84,70%</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

Dari 6 (enam) bidang urusan wajib pelayanan dasar terdapat 2 (dua) urusan yang capaiannya mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu yaitu urusan pendidikan dan urusan kesehatan. Kemudian terdapat 2 (dua) urusan yang capaiannya tidak mengalami perubahan dari capaian tahun yang lalu yaitu pada urusan sosial dan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sedangkan 2 (dua) urusan capaiannya mengalami penurunan dari tahun yang lalu yaitu urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Sosial.

Dari kondisi di atas menyebutkan bahwa untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bangka Barat memang belum dapat terlaksana dengan optimal. Tentunya ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya yaitu kondisi yang bersifat situasional yang dalam hal ini bencana yang sangat berdampak dalam pelaksanaan pelayanan SPM di masyarakat. Hal ini tentunya perlu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyingkapi permasalahan SPM yang ada di daerah. terlebih dengan adanya kebijakan bahwa capaian kinerja pemerintah daerah yang salah satu muatannya adalah capaian penerapan SPM di daerah menjadi parameter dari penghitungan besaran dana transfer Pemerintah Pusat ke daerah. Untuk itu, penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah harus dijadikan sebagai komitmen dari pemangku kebijakan serta perhatian bersama melalui integrasi SPM dalam proses pembangunan daerah sehingga penerapan SPM dapat terlaksana secara optimal. Untuk capaian dari masing-masing urusan pengampuhan SPM tahun 2022 jika dibandingkan dengan target nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 2.81** Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dibandingkan dengan Target Nasional

No.	INDIKATOR	REALISASI 2022	TARGET NASIONAL	KET
<b>I</b>	<b>URUSAN KESEHATAN</b>			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94,45%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95,41%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	95,04%	100%	Tidak Tercapai
4	Pelayanan Kesehatan Balita	95,58%	100%	Tidak Tercapai
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	97,35%	100%	Tidak Tercapai
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	76,10%	100%	Tidak Tercapai
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	86,97%	100%	Tidak Tercapai
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	89,76%	100%	Tidak Tercapai
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	100%	Tercapai
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	100%	Tercapai
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	100%	Tercapai
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	100%	100%	Tercapai
<b>CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN</b>		<b>93,10%</b>	<b>100%</b>	<b>Tidak Tercapai</b>
<b>II</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN</b>			
1	Pendidikan Usia Dini	100%	100%	Tercapai
2	Pendidikan Dasar	100%	100%	Tercapai
3	Pendidikan Kesetaraan	100%	100%	Tercapai
<b>CAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Tercapai</b>
<b>III</b>	<b>URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>			
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	93,62%	100%	Tidak Tercapai
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air Limbah Domestik	33,12%	100%	Tidak Tercapai
<b>CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>		<b>63,37%</b>	<b>100%</b>	<b>Tidak Tercapai</b>
<b>IV</b>	<b>URUSAN PERUMAHAN RAKYAT</b>			
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0%	100%	Tidak Tercapai
<b>CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT</b>		<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>Tidak Tercapai</b>
<b>V</b>	<b>URUSAN SOSIAL</b>			
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di	100%	100%	Tercapai



No.	INDIKATOR	REALISASI 2022	TARGET NASIONAL	KET
	Luar Panti			
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandang dan Pengemis di Luar Panti	100%	100%	Tercapai
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	Tercapai
<b>CAPAIAN SPM BIDANG SOSIAL</b>		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>Tercapai</b>
<b>VI</b>	<b>URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
<b>SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	Tercapai
<b>SUB URUSAN BENCANA DAERAH</b>				
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	5,53%	100%	Tidak Tercapai
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8,61%	100%	Tidak Tercapai
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	Tercapai
<b>SUB URUSAN KEBAKARAN DAERAH</b>				
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	77,78%	100%	Tidak Tercapai
<b>CAPAIAN SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>		<b>58,38%</b>	<b>100%</b>	<b>Tidak Tercapai</b>

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Bangka Barat, 2023.

## 1. SPM Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2022, SPM Urusan Kesehatan yang mencapai target nasional ada 4 (empat) indikator yaitu indikator Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dan Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Rata-rata capaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah 93,10 persen, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan dimana pada tahun 2021 capaian sebesar 92,01 persen. Adapun untuk permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Masih terbatas tenaga medis khususnya dokter dalam melakukan pelayanan penjangkaran di masyarakat serta belum sesuai ketersediaan tenaga medis pada Puskesmas dengan intensitas pelayanan kepada masyarakat yang akan dilakukan;
- Masih terbatasnya program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan di masyarakat berkaitan dengan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang melibatkan lintas sektor



dalam mendorong masyarakat untuk mengunjungi fasilitas Kesehatan/ posbindu/ posyandu yang ada di desa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- c. Masih ditemukan belum keseragaman dalam pengalokasian kebutuhan besaran biaya transport kader yang ada di desa;
- d. Masih adanya kesenjangan antara luas wilayah dengan kapasitas pegawai dalam melakukan pelayanan kesehatan.

## 2. SPM Urusan Pendidikan

Untuk rata-rata capaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 adalah 100 persen, dimana dari 3 (tiga) indikator semuanya mendapatkan capaian 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat signifikan dimana pada tahun 2021 capaian SPM Urusan Pendidikan sebesar 65,95 persen. Dalam pelaksanaan penerapan tentunya memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya data jumlah anak yang putus sekolah secara keseluruhan yang mana data yang tersedia saat ini hanya berupa data anak putus sekolah di masing-masing sekolah sehingga membuat Dinas teknis kesulitan dalam melakukan penghitungan kebutuhan SPM untuk anak putus sekolah;
- b. Masih rendahnya cakupan pendidikan kesetaraan di Kabupaten Bangka Barat sehingga diperlukan sebuah inovasi dan intervensi khusus untuk indikator ini agar dapat meningkatkan masyarakat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan kesetaraan;
- c. Lokasi PKBM yang terbatas jauh dari tempat tinggal serta minimnya dukungan keluarga menjadi salah satu faktor pendorong masih rendahnya angka kesetaraan;
- d. Terbatasnya penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian SPM di Kabupaten;
- e. Belum maksimalnya penyediaan tenaga kependidikan yang dianggap belum memenuhi standar kualifikasi walaupun jika dilihat dari segi kompetensi sudah memenuhi kriteria.

## 3. SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rata-rata capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 adalah 63,37 persen. Capaian rata-rata tersebut merupakan capaian dari indikator "Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari" sebesar 93,62 persen serta capaian dari indikator "Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik" sebesar 33,12 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan dimana pada tahun 2021 capaian SPM urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 73,74 persen.



#### 4. SPM Urusan Perumahan dan Permukiman

Rata-rata capaian SPM urusan perumahan dan permukiman Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 adalah 50 persen, dimana dari 2 (dua) indikator ada 1 (satu) yang mendapatkan capaian 100 persen sedangkan indikator lainnya 0 persen.

#### 5. SPM Urusan Sosial

Rata-rata capaian SPM urusan sosial Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 adalah 100 persen, dimana dari 5 (lima) indikator semuanya mendapatkan capaian 100 persen. Layanan standar rehabilitasi sosial dasar yang harus diterima oleh penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial berupa pelayanan data dan pengaduan, kedaruratan, serta pemenuhan kebutuhan dasar.

#### 6. SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Rata-rata capaian SPM urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2022 adalah 58,38 persen, dimana dari 5 (lima) indikator terdapat 2 (dua) indikator yang mendapatkan capaian 100 persen.

### 2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah dapat disimpulkan dengan melihat data dan hasil evaluasi pada setiap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan dan permasalahan yang terkait gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan juga bisa dilihat dari perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah yang masih belum mencapai ideal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### 2.4.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Berikut permasalahan pembangunan daerah secara umum yang dianggap memiliki nilai strategis jika dihubungkan dengan capaian tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2022, permasalahan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat, yaitu :

##### a. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

Misi pertama RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 adalah “Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” terdiri dari 4 (empat) Permasalahan utama, antara lain :

- i. Laju pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah;
- ii. Kualitas Lingkungan Hidup yang belum baik;
- iii. Resiko Bencana yang masih kategori tinggi; serta



iv. Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami peningkatan.

**b. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi kedua pembangunan adalah “Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia” yang terdiri dari 3 (tiga) Permasalahan utama, antara lain :

- i. Partisipasi Usia Sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan masih rendah;
- ii. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat masih lebih rendah dari Angka rata-rata Provinsi dan Nasional; serta
- iii. Kasus *Stunting* masih tinggi.

**c. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi ketiga pembangunan adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik” yang terdiri dari 4 (empat) Permasalahan utama, antara lain :

- i. Penerapan reformasi birokrasi masih belum optimal;
- ii. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal;
- iii. Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan; serta
- iv. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah .

**2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran umum pembangunan Kabupaten Bangka Barat, secara terperinci akan diuraikan permasalahan berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

**A. Urusan Pemerintahan Wajib**

a. Pendidikan

1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional;
2. Kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal;
3. Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik;
4. Menurunnya APK SMP/MTs/Paket B;
5. Meningkatnya Angka Putus Sekolah SD/MI.



- b. Kesehatan
  1. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional;
  2. Masih tingginya prevalensi balita gizi buruk dan *stunting*;
  3. Meningkatnya angka kematian ibu;
  4. Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal;
  5. Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
  
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  1. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi;
  2. Masih terdapat jalan yang berkondisi tidak mantap dan belum sesuai standar;
  3. RTRW Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
  4. Belum ditetapkannya Dokumen RDTR yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat;
  5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum;
  6. Belum optimalnya pelayanan pengolahan air limbah domestik.
  
- d. Perumahan dan Kawasan Permukiman
  1. Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Masih terdapat kawasan kumuh;
  3. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan.
  
- e. Ketentraman, Ketertiban umum, serta Perlindungan Masyarakat
  1. Masih ditemukannya pelanggaran terhadap perda dan perkara;
  2. Layanan pemadam kebakaran masih terfokus pada perkotaan di Kecamatan Muntok;
  3. Resiko bencana masih kategori tinggi.
  
- f. Ketenagakerjaan
  1. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka;
  2. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja;
  3. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja.





- g. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan.
  
- h. Pangan
  - 1. Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai target Nasional;
  - 2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan masih sangat rendah.
  
- i. Lingkungan Hidup
  - 1. Kualitas lingkungan hidup masih belum baik;
  - 2. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, khususnya pada wilayah perkotaan masih belum optimal;
  - 3. Masih rendahnya penanganan terhadap lahan kritis.
  
- j. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 1. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan;
  - 2. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan dan pencatatan sipil.
  
- k. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Belum mencukupinya pemenuhan petugas PLKB/PKB di tingkat kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.
  
- l. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  - 1. Kelembagaan dan peran koperasi belum optimal;
  - 2. Tingkat pemasaran produk UMKM masih terbatas.
  
- m. Penanaman Modal  
Belum patuhnya pengusahaan dalam menyampaikan laporan berkala sesuai peraturan perundangan pada aplikasi *Online Single Submission (OSS)*.
  
- n. Kepemudaan dan Olahraga
  - 1. Rendahnya Prestasi Olahraga dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet serta minimnya SDM olahraga berlesensi;
  - 2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan olahraga dan kepemudaan.



- o. Statistik
  1. Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Barat;
  2. Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik.
  
- p. Persandian

Belum optimalnya penerapan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
  
- q. Perpustakaan
  1. Belum terakreditasinya perpustakaan daerah;
  2. Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media/ Koleksi *e-book* belum optimal.
  
- r. Kearsipan

Turunnya jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.

## **B. Urusan Pemerintahan Pilihan**

- a. Kelautan dan Perikanan

Belum optimalnya produksi perikanan budidaya air tawar.
  
- b. Pariwisata

Minimnya usaha dan pelaku ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata.
  
- c. Pertanian
  1. Turunnya produksi ternak unggas khususnya pada komoditas ayam petelur, ayam pedaging dan ayam buras;
  2. Tidak stabilnya harga jual produk perkebunan khususnya pada tiga komoditi unggulan masyarakat (karet, lada, dan kelapa sawit)
  
- d. Perindustrian

Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor yang belum optimal.
  
- e. Perdagangan
  1. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan;
  2. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar.



f. Kehutanan

Belum optimalnya pengelolaan kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Menumbing.

**C. Urusan Penunjang**

- a. Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi;
- b. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal;
- c. Tingkat maturasi SPIP masih pada kategori berkembang;
- d. Masih rendahnya Indeks Profesional ASN;
- e. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah.

**2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan**

Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau secara internasional disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. TPB berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan secara global dapat dicapai pada tahun 2030.

TPB terdiri atas 17 Tujuan yang menjadi kesepakatan global untuk mencapainya pada tahun 2030. Ketujuh belas tujuan tersebut adalah:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;



13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan tujuh belas TPB tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar, yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan, pilar hukum dan tata kelola. Selanjutnya dari masing-masing TPB diukur melalui indikator yang akan dievaluasi capaiannya setiap tahun oleh pemerintah sesuai dengan urusan dan kewenangannya. Adapun indikator tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan kewenangannya terbagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Indikator kewenangan Pusat berjumlah 308 indikator;
2. Indikator kewenangan Provinsi 235 indikator;
3. Indikator kewenangan Kabupaten 220 indikator;
4. Indikator kewenangan Kota 222 indikator.

Dari 220 indikator TPB, pilar sosial terdiri dari 96 indikator, pilar ekonomi terdiri dari 61 indikator, pilar lingkungan terdiri dari 42 indikator dan pilar hukum dan tata kelola terdiri dari 21 indikator. Setiap indikator dalam tujuan TPB, memiliki capaian yang berbeda-beda terhadap target capaian TPB yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Capaian indikator TPB dapat diklasifikasikan menjadi 6 (enam) kriteria, yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST).
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT).
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC).
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC).
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD).
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD).

Rekapitulasi jumlah indikator pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat berdasarkan klasifikasi kriteria pencapaian TPB sebagai berikut:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SST) sejumlah 53 indikator.



2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SBT) sejumlah 41 indikator.
3. Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai (TTC) sejumlah 38 indikator.
4. Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai (TBC) sejumlah 31 indikator.
5. Indikator TPB yang tidak/belum ada data (TAD) sejumlah 31 indikator.
6. Indikator TPB yang tidak sesuai dengan karakteristik daerah (TKD) sejumlah 19 indikator.

Realisasi Capaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 2.82 Pencapaian TPB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018 - 2022

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	3.05%	2.67%	2.70%	2.75%	2.46%	BPS
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	100%	100%	100%	304.90%	99.12%	DINSOSPEMDES & DINKES
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	72.97%	73.90%	76.55%	99.80%	77.42%	DPMPPTSPNAKER TRANS
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	23.48%	39.85%	42.89%	79.53%	46.94%	DINSOSPEMDES
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	3147	3152	3239	4529	4555	DINSOSPEMDES
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	91.71%	95.48%	96.47%	95.01%	95.41%	DINKES
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	67.90%	88.03%	50.09%	49.60%	55.32%	DINKES
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	79.76%	80.64%	79.18%	80.60%	74.48%	DP2KBP3A
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	90.84%	90.40%	91.78%	92.48%	92.19%	DISPERKIMHUB
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	86.94%	93.79%	94.61%	54.99%	52.19%	DISPERKIMHUB
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	67.88%	74.17%	79.14%	89.96%	90.67%	DIKPORA
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	86.19%	82.38%	82.67%	67.06%	67.29%	DIKPORA
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	86.90%	91.86%	93.50%	95.48%	97.17%	DISDUKCAPIL
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	95%	96%	97%	NA	NA	DP2KBP3A
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1524	128	176	1,417	1,417	BPBD
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	0	0	0	0	0	BPBD
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	11 jiwa	34 jiwa	12 jiwa	45 jiwa	502 jiwa	DINSOSPEMDES
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	17 jiwa	23 jiwa	13 jiwa	13 jiwa	NA	DINSOSPEMDES
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	0	0	0	0	0	BPBD
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	0	0	0	0	NA	BPBD
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rp 5.600.000.000	0	0	0	NA	BPBD
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0	0	0	BPBD
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	5.23%	3.31%	8.61%	21.93%	6,81%	BP4D

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 14,97%, Pendidikan : 23,49%, Sosial : 0,62%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 13,20%, Pendidikan : 25,30% Sosial : 0,64%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 18,48%, Pendidikan : 25,61% Sosial : 20,05%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 22,44%, Pendidikan : 27,37% Sosial : 1,23%	Belanja Langsung dan Tidak Langsung kesehatan : 22,39%, Pendidikan : 27,34% Sosial : 1,24%	BP4D
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	10.39	8.41	11.7	12.63	16.42	DISTANGAN
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	22.94	15.12	12.26	10.90	10.44	DINKES
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	NA	11.46	NA	13.02	NA	DISTANGAN
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	8,23% angka provinsi, angka utk tk. Angka kabupaten tidak tersedia	6,22% angka provinsi, angka tk. Kabupaten tidak tersedia	NA	NA	NA	BPS
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	33.3	16.96	12.38	11.10	9.56	DINKES
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	25.54	13.34	9.7	8.5	8.1	DINKES
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	9.44	5.69	3.56	2.42	2.27	DINKES
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	6.2	9.54	6.21	8.4	6.87	DINKES
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	46.8	45.53	49.64	54.11	52.88	DINKES
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Skor PPH : 87,9 Tingkat Konsumsi Ikan : 91,76 kg/kap/hr	Skor PPH : 82,2 Tingkat Konsumsi Ikan : 32,01 kg/kap/hr	Skor PPH : 85,9 Tingkat Konsumsi Ikan : 39,06 kg/kap/hr	Skor PPH : 84,29 Tingkat Konsumsi Ikan : 34,28 kg/kap/thn	Skor PPH : 84,34 Tingkat Konsumsi Ikan : 35,45 kg/kap/thn	DISTANGAN
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	60.444.035,43 RUPIAH	63192367,98 RUPIAH	NA	NA	NA	BPS
		angka provinsi, angka utk tk. Kabupaten tidak tersedia	angka provinsi, angka utk tk. kabupaten tidak tersedia				
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	185.23	136.95	56.71	208.71	212.44	DINKES
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	91.87	95.54	96.61	95.40	95.84	DINKES

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	91.87	95.54	96.61	95.01	95.41	DINKES
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	6.62	6.28	6.28	9.24	10.32	DINKES
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3.7	5.19	3.97	5.66	7.89	DINKES
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	4.76	6.01	3.4	8.94	8.50	DINKES
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	100%	100%	100%	100%	77.29	DINKES
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0.497	0.55	0.478	0.003	0.021	DINKES
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	85.65	101.97	76.57	62.62	108.73	DINKES
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	0.75	0.7	0.65	0.47	0.53	DINKES
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/ Kota	DINKES
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	29 DAN 3	22 DAN 3	22 DAN 5	22 DAN 6	21 DAN 2	DINKES
3.3.5.(a)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta.	6	6	6	6	6	DINKES
3.3.5.(b)	Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	6	6	6	6	6	DINKES
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	6.06%	6.23%	6.15%	6.17%	7.60%	DINKES
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	29.30%	27.23%	27.33%	32.16%	28.87%	DINKES
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	13.30%	14.97%	16%	19.31%	32.17%	DINKES
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	2 KASUS	3 KASUS	1 KASUS	NIHIL	NIHIL	POLRES
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	6	6	6	6	6	DINKES
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	0.02%	0.02%	0.01%	0.01%	0.02	POLRES
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	NA	NA	NA	NA	NA	BPBD
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	16.58%	17.80%	18.27%	18.85%	73,77%	DP2KBP3A
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	79.76%	80.64%	79.18%	80.60%	74,48%	DP2KBP3A
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	16.58%	17.80%	18.27%	18.85%	8.34%	DP2KBP3A
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	69	NA	NA	3.24	3,8	DP2KBP3A



No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2.45	NA	NA	2.38	2.45	DP2KBP3A
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	0	0	0	0	NA	DINKES
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	678.77	741.67	794.15	987.59	991.9	DINKES
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	67.88%	74.17%	79.42%	97.89%	99.12%	DINSOSPEMDES & DINKES
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	0	DINKES
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	37.20%	41.43%	45.11%	41.41%	43.84%	DINKES
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	100%	100%	100%	100%	100%	DINKES
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	473.98	463.43	472.42	495.62	5.36	DINKES
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	100%	100%	100%	100%	100%	DIKPORA
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	80.13%	87.76%	88.48%	86.52%	86.62%	DIKPORA
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	82.60%	84.78%	84.78%	84.80%	79.17%	DIKPORA
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	108.86%	103.74%	103.94%	99.11%	100.04%	DIKPORA
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	95.84%	91.38%	91.43%	84.98%	70.96%	DIKPORA
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	7.18	7.21	7.22	7.44	7.46	DIKPORA
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	62.17%	79.16%	79.97%	85.10%	85.75%	DIKPORA
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	34.18%	35.81%	47.07%	53.83%	54.07%	DISKOMINFO
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	SD:87,69% SMP:89,93%	SD:89,77% SMP:90,15%	SD:90,79% SMP:90,42%	SD:94,70% SMP:68,50%	SD:90,67% SMP:67,29%	DIKPORA
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	98.02%	99.81%	NA	NA	NA	DIKPORA
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	96.94%	97.79%	NA	NA	NA	DIKPORA
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	67.03%	69.19%	70.27%	71.66%	71.66%	DIKPORA
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	35.23%	37.51%	39.71%	41.82%	26.03%	DIKPORA
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	1	1	2	0	2	DP2KBP3A
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0.003	0.006	0.015	0.012	0.009	DP2KBP3A
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	0.03%	0.09%	0.11%	0.013%	0.017%	DP2KBP3A
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0 kasus	0.007	0.016	0.012	0.009	DP2KBP3A

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	100% 9 kasus	100% 10 kasus	100% 20 kasus	100% 18 kasus	100% 3 kasus	DP2KBP3A
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	NA	NA	NA	NA	NA	DP2KBP3A
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	21	21	21	NA	25	DP2KBP3A
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	69	NA	NA	3.24	3,8	DP2KBP3A
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	8%	16%	16%	16%	16%	SETWAN
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	6.90%	6.90%	6.67%	6.45%	3,23%	BKPSDM
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	NA	NA	NA	NA	NA	DP2KBP3A
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	10.34%	10.04%	8.65%	7.63%	17.63%	DP2KBP3A
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	NA	NA	NA	NA	NA	DP2KBP3A
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	90.84%	90.40%	91.78%	92.48%	92,19%	DISPERKIMHUB
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	67,5 Liter/det	67,5 Liter/det	67,5 Liter/det	134 Liter/det	146 Liter/det	DISPERKIMHUB
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	12.85%	15.35%	NA	14.17%	8,42%	DISPERKIMHUB
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	NA	NA	86.99	97.96	90.49%	DINKES
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	91.12%	93.71%	95.10%	92.05%	97.70%	DINKES
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	64	64	64	64	66	DINKES
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	15	19	21	21	23	DINKES
6.2.1.(e)	Jumlah wilayah yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPERKIMHUB
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	1.78%	2.05%	2.04%	2.04%	2,06%	DISPERKIMHUB
6.3.1.(a)	Jumlah wilayah yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	0	0	0	0	1	DISPERKIMHUB
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	NA	NA	NA	NA	164	DISPERKIMHUB
6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	20.00%	20.00%	100%	100%	100%	DLH
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	DISPERKIMHUB
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	17	17	17	NA	NA	DPUPR
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	0	0	1 kegiatan	NA	NA	DPUPR
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	ESDM
7.3.1*	Intensitas energi primer.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	ESDM
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	2.39	3.00	-3.48	13.65	7.15	BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	66.108 JUTA RUPIAH	68.088 JUTA RUPIAH	65.720,94 JUTA RUPIAH	74.688,01 JUTA RUPIAH	80.031,70 JUTA RUPIAH	BPS
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	6.68%	0.17%	NA	NA	NA	BPS
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	63.40%	68.40%	65.50%	84.51%	0 % (data Pekerja Sektor Non Pertanian belum dirilis BPS)	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	48.70%	43.20%	50.70%	53.40%	43.29%	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	36.60%	31.60%	34.50%	84.40%	0%(data Pekerja Informal Pertanian belum dirilis BPS)	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	13.82%	15.34%	50.10%	3,51	2,6%	DKUKMP
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	16,000.00	16,500	17,000	19,434.00	Rp27,765	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	4.20%	3.10%	2.85%	3.98%	4.86%	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	NA	NA	NA	NA	NA	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	NA	NA	18.70%	51.80%	32.47	DPMPPTSPNAKER TRANS
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB.	1.20%	1.26%	1%	2.22%	2.32%	DISPARBUD
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	509	184	183	0	109	DISPARBUD
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	223,597	142,280	67,465	87,562	319,502	DISPARBUD
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPARBUD
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	NA	NA	NA	NA	0.11	DISPARBUD

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	17	21	24	24	24	BPS
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	11,09 km	11,09 km	11,09 km	11,09 km	11,09 km	BPKAD
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	27.59%	65.35%	84.34%	NA	NA	DKUKMP
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPERKIMHUB
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPERKIMHUB
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	DISPERKIMHUB
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	DISPERKIMHUB
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan per kapita.	43,79% dan 28,961,088	44,95% dan 29,878,276	NA	NA	NA	BPS
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	6.86%	11.97%	NA	NA	NA	BPS
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	NA	NA	NA	NA	NA	BPS
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	5.91%	1.88%	1.80%	4,02	4,26%	DKUKMP
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	NA	NA	NA	NA	NA	DKUKMP
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	0.01%	0.01%	NA	NA	NA	BPKAD
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	19.89%	23.25%	25.54%	26.07%	26.75%	DISKOMINFO
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	64.03%	64.81%	65.12%	68.82%	69.79%	DISKOMINFO
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	47.52%	55.92%	57.79%	61.55%	63.59%	DISKOMINFO
10.1.1*	Koefisien Gini.	0.26	0.25	0.234	0.248	0.211	BP4D
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	3.05%	2.67%	2.70%	2.75%	2.46%	BP4D
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	57	60	60	0	0	BP4D
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	3	0	0	0	0	BP4D
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	0	0	2	2	8	BP4D
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	-	-	-	-	-	BP4D
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	-	-	-	-	-	BP4D
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	NA	NA	NA	NA	NA	BPS
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	80.95	84.12	NA	NA	NA	BPS
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0 (Tidak ada Kebijakan)	0	0	KESBANGPOL
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	88.05%	89.39%	91.26%	91.76%	93%	DISPERKIMHUB

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPERKIMHUB
11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DPUPR
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	BPKAD
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISPARBUD
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	1524	128	176	621	2.552	BPBD
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	180,40 tinggi	180 tinggi	180 tinggi	180 tinggi	180 tinggi	BPBD
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	0	0	0	0	NA	BPBD
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	40.40%	36.40%	37.72%	40%	52.94%	DLH
11.6.1.(b)	Jumlah kecamatan yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan	16.67%	16.67%	16.67%	16.67%	30%	DLH
11.7.1.(a)	Jumlah ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	99,180 m <sup>2</sup>	99,180 m <sup>2</sup>	99,180 m <sup>2</sup>	99,180 m <sup>2</sup>	99,180 m <sup>2</sup>	DISPERKIMHUB
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	0	0	0	0	NA	BPBD
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	54,137 Ton	92,668 Ton	34,358 Ton	91,608 Ton	69,43 Ton	DLH
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	5,69 ton/tahun	12,78 ton/tahun	9,86 ton/tahun (januari-Juni)	8,94 ton/tahun	9,8 ton/tahun	DLH
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	NA	NA	NA	NA	NA	DPMPPTSPNAKER TRANS
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	NA	NA	NA	NA	NA	DLH
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	NA	81.11%	85.38%	81.44%	81.00%	SETDA
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	13.01%	18.78%	18.79%	18.79%	18.79%	DLH
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	70	177	127.42	97	97	DLH
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	0	0	0	0	0	SETDA
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	0	2	2	0	1	DLH
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	0	0	0	4	2	POLRES
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	0	0	0	0	0	POLRES
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	9,64	6,06	1,20	8,74	7,63	POLRES
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	100%	100%	100%	98%	98%	KESBANGPOL
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	NA	NA	NA	NA	NA	DP2KBP3A

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0% dan anak perempuan 0,034%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0% dan anak perempuan 0,090%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,032% dan anak perempuan 0,112%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0% dan anak perempuan 0,13%	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki 0,01% dan anak perempuan 0,02%	DP2KBP3A
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	NA	NA	NA	NA	NA	DP2KBP3A
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	NA	NA	NA	NA	NA	BPS
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	91.12%	91.60%	85.69%	92.58%	92.30%	BPKAD
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	4.92%	0.84%	0.83	-1.10	-0.58	BP4D
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	82%	97.85%	100%	100%	100%	DISKOMINFO
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota).	74.87%	45.24%	NA	49,60	53,48	INSPEKTORAT
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	74.87%	38.08%	NA	NA	NA	INSPEKTORAT
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	8%	16%	16%	16%	16%	SETWAN
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	6.90%	6.90%	6.67%	6.45%	3,23%	BKPSDM
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	96.60%	98.25%	98.85%	99.32%	99.31%	DISDUKCAPIL
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	32.73%	39.17%	42.77%	NA	NA	DISDUKCAPIL
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	85.63%	90.66%	92.35%	95.48%	97,17%	DISDUKCAPIL
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan.	0	0	0	0	Diskominfo tidak mempunyai data ini	DISKOMINFO
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	0	0	0	0	0	KESBANGPOL
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	0.51%	0.48%	0.45%	0.39%	0.57%	BP2RD
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	0.20%	0.15%	0.15%	0.13%	0.14%	BP2RD
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	7.75%	6.93%	2.67%	2.94%	3.19%	BPKAD
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	9.38%	12.50%	15,03%	17,05%	20,01%	DISKOMINFO
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bukan Kewenangan Kabupaten/Kota	DISKOMINFO

No. Indikator	Indikator	Ketercapaian					Sumber Data
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0	SETDA
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	0	0	0	0	0	SETDA
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	100%	100%	93.18%	100.00%	97%	BPS
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	86.67%	77.42%	90%	90%	96.67%	BPS
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	7	8	10	16	15	BPS
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	92.27%	91.36%	82.72%	71.36%	74%	BP4D
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	DISDUKCAPIL
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	35%	44.79%	29,995	245,023	419,972	DISKOMINFO
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	100%	100%	91.17%	100.00%	96.67%	BPS



## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan penyempurnaan proses desentralisasi, menghendaki pemisahan wewenang dan kekuasaan terdistribusi hingga ke lapisan bawah di masyarakat. Perwujudan atas desentralisasi tersebut ialah dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mendapat hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemunculan otonomi daerah ini mengakibatkan banyak terjadi perubahan-perubahan di daerah berupa perubahan positif maupun negatif. Apalagi di era globalisasi ini, pemerintah daerah tentu akan semakin banyak menghadapi masalah dan kendala. Tantangan global di masa depan menjadi isu hangat di Indonesia. Sejauh mana peran dan upaya pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai masalah yang akan timbul nantinya. Pemerintah daerah harus dapat mandiri serta terbuka dalam membangun dan mengelola dengan baik wilayahnya agar tidak tertinggal daerah lain. Namun, pemerintah daerah harus tetap bijak agar tidak kehilangan jati diri dan kearifan lokal setempat di tengah derasnya arus globalisasi.

Seiring dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin pesat, hal tersebut akan sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu bangsa. Perekonomian merupakan salah satu unsur penting yang berkorelasi langsung terhadap tingkat perkembangan dan peningkatan kesejahteraan penduduk. Pertumbuhan ekonomi baik berskala kecil ataupun besar, akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan penghasilan dan peningkatan daya beli guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Artinya bila ekonomi semakin berkembang maka terbuka peluang bagi masyarakat untuk memperoleh peningkatan penghasilan melalui peran sertanya dalam aktifitas ekonomi di daerah. Hal tersebut akan tergambarkan melalui proses percepatan pembangunan dan perputaran produk di masyarakat dimana dengan semakin tinggi peredaran suatu produk maka dapat menunjukkan stabilitas dan peningkatan ekonomi suatu daerah.

Secara garis besar perekonomian regional memiliki kaitan sangat erat serta berpengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan ekonomi nasional. Perubahan iklim ekonomi dan stabilitas politik serta stabilitas keamanan yang terjadi di negara tertentu akan berdampak pada ekonomi khususnya di negara sekitar serta kawasan regional. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pendapatan masyarakat di tingkat regional dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi dan stabilitas politik dan keamanan nasional atau negara lainnya.





Dalam melihat perkembangan perekonomian suatu daerah, maka secara umum kondisi ekonomi daerah dapat digambarkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai *output* akhir yang dihasilkan melalui produksi barang dan jasa oleh unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Perkembangan kondisi umum ekonomi Kabupaten Bangka Barat yang merupakan gambaran kinerja makro dari pelaksanaan pembangunan menunjukkan perkembangan yang positif meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi.

### 3.1.1. Kondisi Ekonomi

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Terdapat faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, pelaksanaan perdagangan antar negara (ekspor dan impor) dan lainnya.

Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi dunia dengan munculnya pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Kebijakan pencegahan yang diambil guna mengurangi penyebaran Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa wilayah sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Kebijakan *Lockdown* di beberapa negara juga sangat mempengaruhi kebijakan ekspor produk dari Indonesia yang juga sangat berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 yang berkontraksi sebesar -2,07 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2020 sebesar -2,19 persen (year on year). Realisasi tersebut sangat mendekati proyeksi Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi 2020 berada di angka -2,0 persen, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2021. Produk Domestik Bruto per kapita Indonesia pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 56,94 juta dari sebelumnya Rp 59,06 juta di 2019 atau turun dari USD 4.174 per kapita menjadi USD 3.912 per kapita. Status Indonesia dari Upper Middle Income yang tercermin dari Gross National Income (GNI) per capita sebesar USD 4.047,6 di 2019, diperkirakan akan turun menjadi Lower Middle Income dengan GNI per capita sebesar USD 3.806,4 di 2020.



Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen di 2021, dibutuhkan total investasi dalam perekonomian sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun. Sementara itu, realisasi investasi di 2020 hanya sebesar Rp 4.897,78 triliun karena ekonomi terkontraksi. Dengan demikian, pada 2021, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp 919,52—1.014,32 triliun dari 2020 agar ekonomi dapat tumbuh di kisaran 4,5—5,5 persen.

Deselerasi pertumbuhan ekonomi dipastikan terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2020, dampak dari merebaknya pandemi Covid-19. Sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu pertambangan, pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan dipastikan terkena dampak langsung akibat pandemi Covid-19 ini. Penurunan kinerja sektor unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memberikan berdampak pada penurunan kinerja sektor perdagangan akibat penurunan pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata juga merupakan sektor ekonomi unggulan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga terkena dampak cukup besarnya melalui kebijakan penutupan tempat wisata dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan diwajibkannya masyarakat untuk melakukan *social distancing*. Penurunan ekspor beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti logam timah, karet, serta lada juga turut memperburuk kondisi perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2020 dengan adanya krisis pandemi Covid-19 ini terkontraksi sebesar -2,30 persen.

Begitu pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020, yang pertumbuhan ekonominya negatif (resesi) sebesar 5,37 persen. hal tersebut terjadi karena sektor utama penggerak ekonomi di Kabupaten Bangka Barat adalah sektor industri pengolahan yaitu logam timah serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan khususnya sub sektor perkebunan tahunan sebagai bahan baku pada sektor industri pengolahan yang memiliki dampak sangat besar oleh lingkungan eksternal akibat pandemi Covid-19 ini.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 hanya mampu mencapai 10,306 triliun rupiah, turun dibandingkan tahun 2019 yang mampu mencapai 10,897 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -5,37 persen, dimana capaian pertumbuhan ekonomi di Tahun 2020 ini merupakan yang terburuk semenjak Kabupaten Bangka Barat terbentuk. Hal ini menandakan masih tingginya ketergantungan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat terhadap Industri Pengolahan khususnya Logam Dasar.

b. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021



Tahun 2021 merupakan tahun kedua dengan munculnya pandemi Covid-19. Tema pembangunan yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam APBN Tahun 2021 sebagai *survival and recovery kit* untuk memastikan penanganan pandemi lebih efektif. Kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program lain untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi.

Pelaksanaan reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan sinyal positif bagi investor sesuai dengan tujuannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi, mendorong kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan investasi.

Badan Pusat Statistik merilis realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,69 persen. Perbaikan ekonomi Indonesia telah terlihat dari pertumbuhan positif sejak Triwulan II hingga Triwulan IV 2021, meskipun sedikit mengalami koreksi di Triwulan III karena kemunculan varian Delta Covid-19. Setelah terkendalinya varian Delta dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, ekonomi Indonesia berhasil melanjutkan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021 sebesar 5,02 persen (yoy).

Apabila dilihat dari sisi produksi, lima sektor kontributor utama yaitu industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan, kembali melanjutkan pertumbuhan positif dan mampu menopang ekonomi Indonesia. Selain itu, sektor transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makanan-minuman, yang sempat berkontraksi di Triwulan III-2021 telah berhasil *rebound* dengan pertumbuhan positif di Triwulan IV-2021. Dengan angka pertumbuhan tersebut, PDB per kapita Indonesia meningkat menjadi 62,2 juta rupiah (atau setara dengan US\$4.349,5), lebih tinggi dari PDB per kapita sebelum pandemi yang sebesar 59,3 juta rupiah di 2019.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen kembali bertumbuh positif. Perdagangan internasional pun terus mencatatkan kinerja impresif, ditopang pemulihan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas. Pada Triwulan IV-2021, kinerja ekspor meningkat sebesar 29,83 persen (yoy), dan impor tumbuh sebesar 29,60 persen (yoy).

Bangkitnya kepercayaan masyarakat untuk mengonsumsi barang ataupun jasa, telah mendorong pemulihan permintaan domestik serta menyebabkan peningkatan produksi sebagai respon dari dunia usaha. Sepanjang 2021, PMTB (investasi) yang tumbuh sebesar 3,80 persen (yoy) telah menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran. Sedangkan industri pengolahan yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi, berhasil tumbuh sebesar 3,39 persen (yoy).



Pencapaian tersebut juga akan membawa Indonesia masuk kembali dalam klasifikasi negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle-income country*). Posisi ini merupakan fondasi awal yang sangat baik untuk mendorong pemulihan ekonomi dan reformasi struktural agar mampu keluar dari jebakan *middle-income trap*.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (ADHB) mencapai 85,94 triliun rupiah dan PDRB (ADHK) 2010 mencapai 55,36 triliun rupiah. Berdasarkan capaian tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 5,05 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 2,30 persen. Dengan capaian tersebut, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi tertinggi pertumbuhan ekonomi pada Pulau Sumatera.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2021 (yoy) tumbuh sebesar 6,32 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, Penyediaan akomodasi dan makan minum serta pengadaan listrik dan gas. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Ekspor Luar Negeri.

Perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDRB (ADHB) mencapai Rp15,44 triliun dan PDRB (ADHK) 2010 mencapai Rp10,33 triliun. Berdasarkan capaian tersebut, perekonomian Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 mampu tumbuh sebesar 0,21 persen, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi cukup dalam sebesar negatif 5,37 persen.

Melihat dari laju pertumbuhan, hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali satu lapangan usaha yang tumbuh negatif yaitu pada lapangan usaha industri pengolahan (-4,51). Hal tersebut yang menjadi faktor utama masih rendahnya pertumbuhan ekonomi ditahun 2021, mengingat masih tingginya distribusi pada lapangan usaha industri pengolahan dalam membentuk PDRB Kabupaten Bangka Barat yaitu di angka 45,13 persen.

c. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022

Meski sempat mencatat pertumbuhan negatif saat diterpa badai pandemi Covid-19 pada tahun 2020, perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi dan beranjak pulih lebih cepat. Sementara itu, situasi ekonomi dunia ke depan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Diiringi pengetatan kebijakan suku bunga yang mulai ditahan, berbagai lembaga internasional telah mengoreksi ke atas prediksi ekonomi tahun 2023 sehingga probabilitas resesi terus menurun.



Harga komoditas utama global juga ternormalisasi pasca meredanya rantai pasok serta suhu iklim yang lebih bersahabat. Optimisme juga muncul dari Tiongkok yang kembali membuka perbatasan dan aktivitas ekonomi dari yang sebelumnya menerapkan kebijakan *zero covid*. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi stimulus di tengah berbagai risiko yang terus muncul.

Didukung fundamental ekonomi nasional yang kuat, aktivitas ekonomi domestik tetap bergeliat meski kondisi global masih mengalami perkembangan yang pasang surut. Bauran berbagai kebijakan dan strategi konstruktif yang diambil Pemerintah, salah satunya melalui Program PC-PEN, berhasil menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong laju ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh solid sebesar 5,01 persen (yoy). Secara *full year*, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 juga mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31 persen (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2 persen (ctc), dan kembali mencapai level 5 persen seperti sebelum pandemi. “Artinya dibandingkan dengan Desember tahun lalu, kuartal IV tahun lalu, tumbuh 5,01 persen (yoy). Dan secara kumulatif di tahun 2022, ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre-covid yang rata-rata sebesar 5 persen.

Dari sisi *demand*, mayoritas komponen pengeluaran pada Triwulan IV-2022 tumbuh kuat. Didukung *windfall* komoditas unggulan, ekspor mampu tumbuh *double digit* mencapai 14,93 persen (yoy). Sementara itu, impor tumbuh 6,25 persen (yoy) dengan didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Lebih lanjut, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48 persen (yoy) seiring dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33 persen (yoy) dan Konsumsi LNPRT sebesar 5,70 persen (yoy). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77 persen (yoy).

Dari sisi *supply*, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif di Triwulan IV-2022. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99 persen (yoy) diikuti oleh Sektor Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 13,81 persen (yoy) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64 persen (yoy).

“Beberapa *leading indicators* menunjukkan prospek cerah yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah perlambatan kinerja ekonomi global. Indikator sektor eksternal Indonesia juga menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali,



tercermin dari surplus transaksi berjalan, cadangan devisa yang terus meningkat, ekspor impor yang masih positif meski melambat, yield obligasi Pemerintah yang melandai, nilai tukar rupiah dan IHSG yang menguat, dan rasio Utang Luar Negeri Indonesia terhadap PDB dalam level aman.

Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia terus mengalami penguatan. Pulau Jawa sebagai kontributor perekonomian nasional mampu tumbuh tinggi 56,48 persen (yoy) dan diikuti oleh Pulau Sumatera 22,04 persen (yoy) dan Kalimantan 9,23 persen (yoy). Lebih lanjut, Pulau Sulawesi 7,03 persen (yoy) serta Maluku dan Papua juga tumbuh 2,50 persen (yoy) beriringan dengan tingginya ekspor yang terjadi terutama akibat tingginya permintaan produk-produk komoditas unggulan di luar negeri.

Total PDRB ADHB Pulau Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp4.220,20 triliun atau sekitar 22,04 persen dari total PDRB 34 provinsi di Indonesia. Sementara Total PDRB ADHK Pulau Sumatera pada tahun 2022 mencapai Rp2.487,26 triliun. PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 hanya memberikan kontribusi sebesar 2,26 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera dan 0,50 persen terhadap total PDRB 34 provinsi di Indonesia.

Perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp95,29 triliun dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp57,80 triliun. Sementara itu PDRB per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 mencapai Rp63,75 juta.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 tumbuh sebesar 4,40 persen, melambat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 5,05 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

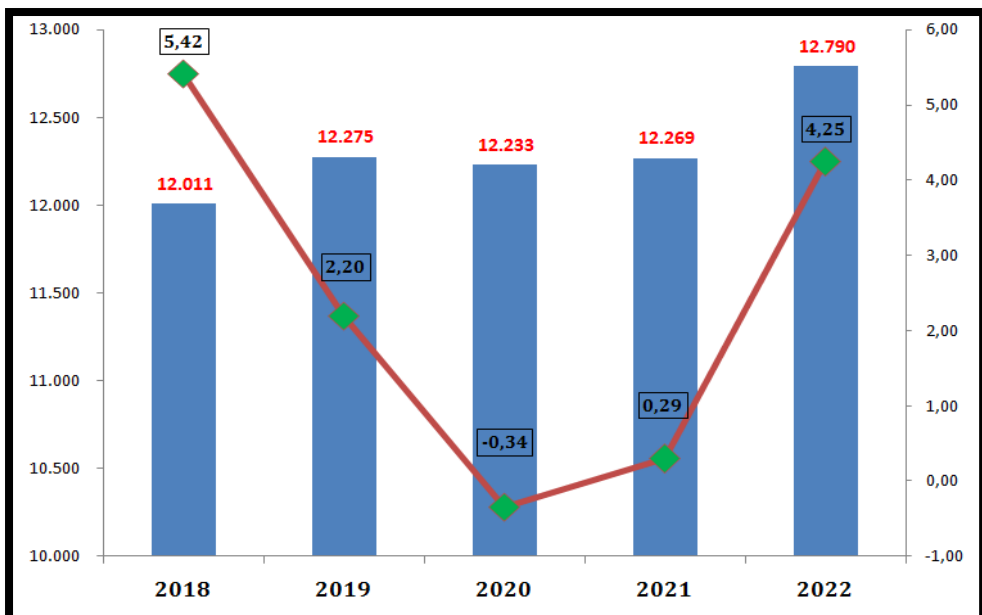
Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2022 bila dibandingkan triwulan IV-2021 (y-on-y) tumbuh sebesar 4,44 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan yang tumbuh sebesar 14,71 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 8,64 persen.

Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung triwulan IV-2022 bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,64 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 18,38 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 19,09 persen.

Untuk perekonomian Kabupaten Bangka Barat di tahun 2022 tumbuh sebesar 2,01 persen, mengalami meningkat dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 0,20 persen. Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan terbesar berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

d. Pengeluaran perkapita

Untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu wilayah, salah satu indikator yang sering digunakan adalah pengeluaran perkapita. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Merujuk data 5 Tahun terakhir, pengeluaran perkapita di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan trend yang positif, kecuali di Tahun 2020 yaitu efek negatif dari pandemi Covid-19.



Sumber : BPS Kabupaten Bangka Barat, 2022 (diolah)

**Gambar 3.1**

Capaian Pengeluaran Perkapita (dalam ribu rupiah) dan Laju Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita (%) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2018-2022

Di Tahun 2022, pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bangka Barat sebesar 12.790 ribu rupiah, dimana capaian ini masih dibawah rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu di angka 13.359 ribu rupiah. Kota





Pangkalpinang merupakan wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang pengeluaran perkapita penduduknya paling tinggi di Tahun 2022 yaitu 16.307 ribu rupiah.

### 3.1.2. Kebijakan Ekonomi Nasional

Berkaca dari pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2020 yang mengalami kontraksi 2,07 persen akibat pandemi Covid-19, dan dengan berbagai kebijakan percepatan ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung membuat perekonomian Indonesia di Tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen.

Dengan telah pulihnya perekonomian nasional di tahun 2021, diharapkan berlanjut terus membaik pada Produk Domestik Bruto Indonesia di Tahun 2022 dan 2023. Dengan dukungan kebijakan yang kuat, khususnya penanganan pandemi Covid-19 yaitu rencana pelaksanaan vaksinasi tahap ke 3 (*booster*) pada seluruh masyarakat secara bertahap yang diharapkan mampu mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sedia kala serta kondisi perekonomian dan keuangan global yang turut membaik.

Program vaksinasi merupakan salah satu kunci dari keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Terlaksananya program vaksinasi secara masif dan terstruktur akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, dan hal ini memicu aktivitas perekonomian untuk mulai berjalan kembali. Pelonggaran mobilitas ini membuat kegiatan usaha mulai kembali bergerak. Sehingga daya beli masyarakat mengalami peningkatan hingga akhir 2021 dan berlanjut pada 2022.

Di sisi lain, berbagai langkah pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, serta penguatan program perlindungan sosial untuk memitigasi dampak penyesuaian harga energi, cukup efektif dalam menjaga kesinambungan pemulihan daya beli masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang relatif terkendali dan tidak setinggi yang diperkirakan sebelumnya.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan positif seluruh sektor. Hal ini menunjukkan roda perekonomian kembali bergerak hampir merata di semua sektor ekonomi. Pulihnya perekonomian Indonesia beriring dengan kenaikan ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga yang sampai saat ini masih menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, Pemerintah terus melakukan strategi dan kebijakan utama dalam penanganan pandemi, yakni dengan koordinasi kebijakan fiskal sebagai *shock absorber* termasuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar 455,6 triliun rupiah yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Pemerintah akan terus waspada dan antisipatif dengan kondisi pelambatan ekonomi global yang akan menurunkan tingkat permintaan. Dengan demikian, penguatan *core* ekonomi





dalam negeri melalui konsumsi dan investasi akan menjadi faktor utama untuk meningkatkan resiliensi ekonomi Indonesia di tahun 2023, karena kinerja ekspor yang sebelumnya tumbuh tinggi diperkirakan akan melambat. Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah strategi dan kebijakan utama, antara lain :

1. Menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi dengan program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif), serta optimalisasi program perlindungan sosial yang akan melindungi masyarakat rentan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Sembako (BPNT), dan sejenisnya;
2. Memperkuat pasar domestik dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dan mendukung pengembangan UMKM. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperkuat rantai pasok perusahaan nasional dalam menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai motor pengembangan UMKM, termasuk di sektor produksi (KUR Alsintan);
3. Meningkatkan diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang masih kuat. Untuk itu, perjanjian kerja sama perdagangan internasional akan terus diperkuat, salah satunya melalui optimalisasi mandat *Chairmanship* ASEAN 2023, serta peningkatan kerja sama bilateral maupun multilateral;
4. Transformasi ekonomi terus dilanjutkan untuk meningkatkan investasi, mendorong produktivitas SDM, dan menyerap tenaga kerja melalui implementasi UU Cipta Kerja. Presiden telah menetapkan Perpu Cipta Kerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 UUD 1945. Ini diharapkan akan memberikan kepastian dan keberlanjutan investasi yang umumnya bersifat jangka panjang;
5. Pemerintah juga melakukan reformasi dan pendalaman sektor keuangan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ini akan memperkuat basis sumber pembiayaan untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, akan dilakukan pengaturan kembali Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 dengan perluasan komoditi ekspor wajib DHE selain SDA yaitu komoditi manufaktur hasil hilirisasi;
6. Pemerintah terus membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Selain itu, untuk mendukung ekonomi hijau dan penurunan emisi karbon, Pemerintah juga terus mendorong pengembangan *Electric Vehicle* sebagai tren kendaraan masa depan;



7. Dalam meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan SDM, Pemerintah memberikan dukungan diantaranya melalui program padat karya, pelatihan (*reskilling & upskilling*), dan program Kartu Pra Kerja. Pemerintah juga terus melakukan pembangunan infrastruktur, termasuk relokasi IKN untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia;
8. Selain itu, Pemerintah juga mendorong penguatan sektor pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi, diantaranya melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Ini diharapkan mampu meningkatkan minat turis asing untuk datang ke destinasi wisata dalam negeri.

### 3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Tahun 2023 dan 2024

Gambaran secara umum dalam melihat kondisi ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023 dan 2024 akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan internal yang melingkupinya. Dengan melihat perkembangan yang terjadi pada Tahun 2020 khususnya terkait permasalahan keterpurukan ekonomi dampak dari situasi pandemi Covid-19 dan perkembangan perekonomian di tahun 2021 dan 2022 pasca pandemi Covid-19, menjadi suatu gambaran dalam menentukan dan menetapkan arah kebijakan ekonomi daerah, khususnya dalam pemulihan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berkaca pada data pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun terakhir yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi (4,40 persen di Tahun 2022 dan 5,05 persen di Tahun 2021).

Tantangan di Tahun 2023 dan 2024 pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu adalah melakukan transformasi ekonomi, yaitu dari komoditas timah beralih ke sektor pariwisata, pertanian serta perikanan.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2023 akan mengangkat tema pembangunan “Penguatan Perekonomian, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Pemanfaatan Sumber Daya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan”, dengan fokus pembangunan diarahkan pada penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, pengembangan digitalisasi ekonomi, penguatan kapasitas dan kualitas SDM serta Birokrasi yang mampu meningkatkan daya saing daerah.

Untuk tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Tahun 2024 yaitu “Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Stabilitas Demokrasi”, dengan 4 (empat) prioritas pembangunan utama yaitu Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, Pembangunan Sumber Daya Manusia dan



Pembangunan Demokrasi serta ditambahkan dengan 3 (tiga) prioritas pembangunan pendukung yaitu Pembangunan Wilayah, Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Pembangunan Pemerintahan.

### 3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Tahun 2023 dan 2024

Kondisi perekonomian di Kabupaten Bangka Barat pada masa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh secara negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 mengalami kontraksi atau tumbuh negatif besaran 5,37 persen. Kontraksinya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2020 didapat dari kontraksinya lapangan usaha industri pengolahan yang selama ini menopang perekonomian Kabupaten Bangka Barat lebih dari 40 persen dan kontraksi pada jenis lapangan usaha lainnya yang berdampak secara langsung dengan pandemi Covid-19 ini.

Di tahun 2021 perekonomian di Kabupaten Bangka Barat mampu tumbuh walau hanya sebesar 0,21 persen. Faktor utama rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2021 di Kabupaten Bangka Barat karena masih kontraksinya pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,52 persen, dimana lapangan usaha industri pengolahan merupakan sektor utama dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebesar 45,13 persen.

Di tahun 2022 perekonomian di Kabupaten Bangka Barat mampu tumbuh sebesar 2,01 persen. Pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangka Barat tahun 2022 masih pada posisi terendah pada kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor utama rendahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 di Kabupaten Bangka Barat yaitu masih kontraksinya pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1,03 persen, dimana lapangan usaha industri pengolahan merupakan sektor utama dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Bangka Barat, yaitu sebesar 44,65 persen.

Target perekonomian di Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 diharapkan mampu tumbuh sebesar 4,68 persen dengan tema pembangunan yaitu "Peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien".

Isu Strategis yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Tahun 2023 dan 2024 yaitu kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrim, penguatan infrastruktur daerah, beropeasinya pelabuhan barang tanjung ular yang dibarengi dengan pengembangan kawasan industri serta pelaksanaan pemilihan umum secara serempak di Tahun 2024 (Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah).



Gambaran ekonomi Kabupaten Bangka Barat diatas sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan nasional dan daerah. Oleh karena itu untuk Tahun 2023 dan Tahun 2024 mendatang, lingkungan eksternal dan internal akan tetap berpengaruh bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat. Pada lingkungan eksternal adalah keberpihakan ekonomi daerah terhadap kebijakan nasional, sedangkan pada lingkungan internal bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menjadi pemantik jalannya pembangunan baik melalui kebijakan tingkat daerah yang dikeluarkan serta melalui kelengkapan sarana prasarana pendukung perekonomian yang dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Besar harapan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, agar pelabuhan tanjung ular dapat segera beroperasi serta pembangunan Kawasan Industri Tanjung Ular dapat berjalan dengan lancar dan memiliki *multyplier effect* yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bangka Barat secara khusus. Berikut gambaran nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat (ADKH) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 dan Tahun 2024.

**Tabel 3.1** Proyeksi PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 - Tahun 2024

KATEGORI	URAIAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI	
		2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.563.542	1.563.542
B	Pertambangan dan Penggalian	1.173.336	1.173.336
C	Industri Pengolahan	6.031.652	6.031.652
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6.916	6.916
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	822	822
F	Konstruksi	752.846	752.846
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.471.661	1.471.661
H	Transportasi dan Pergudangan	98.032	98.032
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	130.782	130.782
J	Informasi dan Komunikasi	60.659	60.659
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	46.962	46.962
L	Real Estate	246.741	246.741
M,N	Jasa Perusahaan	14.175	14.175
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	499.283	499.283
P	Jasa Pendidikan	200.639	200.639
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101.387	101.387
R,S,T,U	Jasa lainnya	34.298	34.298
<b>PDRB KABUPATEN BANGKA BARAT</b>		<b>11.901.823</b>	<b>12.433.732</b>

Sumber : BP4D Kabupaten Bangka Barat, 2023 (diolah)



Upaya Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk periode Tahun 2024 diarahkan melalui kebijakan umum kerangka ekonomi daerah, diantaranya adalah:

- Mendorong perekonomian daerah dengan fokus mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan khususnya dalam penanganan kebijakan penghapusan kemiskinan ekstrem,
- Berupaya meningkatkan laju investasi daerah khususnya pada kawasan industri tanjung ular yang diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bangka Barat yang saat ini mengalami peningkatan;
- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat khususnya terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk urusan wajib yang bersifat dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Pengalokasian pengeluaran diprioritaskan kepada belanja infrastruktur untuk penunjang perekonomian secara berkelanjutan;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bangka Barat merupakan prasyarat di dalam mewujudkan pembangunan masyarakat.

Melalui sinergisitas pembangunan, baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi pemerintah desa serta dengan pihak swasta sebagai pelaku pembangunan diharapkan mampu memulihkan perkonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bangka Barat dan umumnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam Rancangan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yang merupakan tahun ketiga agenda pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan antara lain pendapatan asli daerah, transfer dari pemerintah pusat dan transfer pemerintah provinsi serta pendapatan daerah lainnya yang sah maupun kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama,



yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat serta pendapatan transfer antar daerah; serta
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Adanya situasi keterbatasan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan PAD dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Komponen PAD yang menjadi sorotan utama dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui pajak daerah serta retribusi daerah.

Selanjutnya untuk pembiayaan daerah diperoleh dari total penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi SiLPA Tahun sebelumnya, pengembalian pinjaman daerah, serta penerimaan pinjaman daerah dikurangi dengan total pengeluaran pembiayaan yang diperuntukkan untuk rencana penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

### 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat yang dituangkan dalam Rancangan RKPD pada Tahun 2024 diproyeksi sebesar Rp822.502.247.000,00 (delapan ratus dua puluh dua milyar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

- a. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp81.317.000.000,00 (delapan puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah); serta
- b. Proyeksi Pendapatan Transfer sebesar Rp741.185.247.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Proyeksi pendapatan Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2024 diasumsikan mengalami penurunan dibanding proyeksi pendapatan pada tahun 2023, dikarenakan dalam penentuan proyeksi pendapatan di tahun 2024, belum memasukkan komponen sumber Dana Alokasi Khusus Fisik serta Dana bantuan keuangan dari pihak pemerintah provinsi. Pendapatan daerah secara umum masih bergantung pada pendapatan transfer terutama pada pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu sebesar 90,11 persen.



**Tabel 3.2** Realisasi dan Proyeksi Pendapatan  
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 s.d. Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>67.746.468.419,01</b>	<b>64,304,326,355.09</b>	<b>59,693,509,555.86</b>	<b>75,145,324,565.98</b>	<b>70,265,927,500.00</b>	<b>85,047,000,000.00</b>
1.1.1	Pajak Daerah	21.936.235.354,47	20,610,403,491.8	20,041,982,581.75	21,709,679,122.50	29,156,787,500.00	30,000,000,000.00
1.1.2	Retribusi Daerah	4.385.901.940,00	5,346,696,788.00	4,430,974,655.25	7,307,263,839.00	7,709,140,000.00	8,417,000,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.760.378.244,79	3,994,903,753.00	4,856,440,070.26	5,306,960,199.78	3,900,000,000.00	5,000,000,000.00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	37.663.952.879,75	34,352,322,322. 51	30,364,112,248.60	40,821,421,404.70	29,500,000,000.00	41,630,000,000.00
<b>1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>846,524,840,935.98</b>	<b>733,204,031,479.00</b>	<b>790,652,328,838.20</b>	<b>834,612,172,107.00</b>	<b>808,384,418,000.00</b>	<b>741,185,247,000.00</b>
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	758,555,538,567.00	680,964,564,108.00	738,276,085,176.00		766,384,418,000.00	696,185,247,000.00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	702,774,160,567.00	599,326,297,108.00	647,121,161,176.00	716,357,214,392.00	692,644,695,000	635,185,247,000.00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	110,783,510,577.00	64,239,176,268.00	98,719,155,107.00	210,667,868,245	103,917,963,000	107,000,000,000.00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum	466,440,075,000.00	425,158,892,000.00	419,681,643,719.00	419,082,296,005	411,074,717,000	445,000,000,000.00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus	125,550,574,990.00	109,928,228,840.00	128,720,362,350.00	86.607.050.142	153,440,701,000	83,185,247,000.00
1.2.1.2	Dana Desa dan DID	55,781,378,000.00	81,638,267,000.00	91,154,924,000.00	58,720,679,000	73,739,723,000	61,000,000,000.00
1.2.2	Transfer Antar Daerah	87,969,302,368.98	52,239,467,371.37	52,376,243,662.20	59,534,278,715.00	42,000,000,000.00	45,000,000,000.00



No.	Uraian	Jumlah					
		Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
1.2.2.1	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	52,419,427,528.98	36,879,667,371.37	37,901,443,662.20	54,567,478,715	42,000,000,000.00	45,000,000,000.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya**)	35,549,874,840.00	15,359,800,000.00	14,474,800,000.00	4,966,800,000	-	-
1.3	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	-	<b>29,811,200,000.00</b>	<b>29,519,434,000.00</b>	<b>9,109,079,372.00</b>	<b>11,500,000,000.00</b>	-
1.3.1	Hibah	-	29,811,200,000.00	29,519,434,000.00	-	500.000.000.000	-
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	9,109,079,372.00	11,000,000,000.00	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>914,271,309,354.99</b>	<b>827,319,557,834.46</b>	<b>879,865,272,394.06</b>	<b>918,866,576,044.98</b>	<b>890,150,345.500,00</b>	<b>826,232,247.000,00</b>

Sumber : BPKAD dan BP2RD Kabupaten Bangka Barat, 2023.(diolah)





Untuk hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan diperkirakan akan stabil, baik itu yang bersumber dari PT BPD Sumsel Babel maupun BPR Syariah Babel. Terkait dana BLUD diprediksi stabil, dimana pada Tahun 2024 diasumsikan seluruh masyarakat di Kabupaten Bangka Barat telah menggunakan fasilitas BPJS dalam pelayanan kesehatan karena kebijakan terkait urusan kesehatan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Namun perlu dicermati bahwa pendapatan yang ada pada lain-lain PAD yang sah seperti BLUD pihak Rumah Sakit Umum Daerah harus dialokasikan dan dituangkan dalam belanja dengan sumber pendanaan tersebut.

Untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, masih dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang berkembang terkait dengan keuangan negara dan provinsi. Hal ini disebabkan besaran DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sangat tergantung dari pembagian pusat. Jumlah pendapatan ini merupakan perkiraan yang diharapkan tidak jauh bergeser dari proyeksi.

Daya serap belanja APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 diperkirakan mencapai 90 persen, begitu juga dengan pelampauan target pendapatan, diperkirakan tidak lebih dari 10 persen dari prediksi, sehingga asumsi inilah yang dipakai dalam penentuan SiLPA Tahun 2023. Tabel realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Tabel 3.2.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Ada beberapa kebijakan yang masih harus ditempuh pada Tahun 2024 berkaitan dengan perencanaan peningkatan pendapatan, yaitu :

1. Terus melakukan intensifikasi/ektensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Penetapan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan penerimaan dari sektor Pajak dan Retribusi yang mempunyai potensi;
3. Penerapan tarif baru berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bangka Barat terutama untuk pendapatan-pendapatan yang mempunyai potensi seperti Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan dan PBB;
4. Mengoptimalkan belanja daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus baik yang bersifat fisik maupun non fisik dan sumber sumber lainnya;
5. Merubah konsep operasionalisasi seluruh Puskesmas di Kabupaten Bangka Barat menjadi BLUD; serta
6. Mengoptimalkan penerimaan dari kekayaan daerah dan aset daerah.



Perhitungan target pendapatan daerah dengan asumsi tingkat elastisitas pendapatan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 1,65 artinya setiap kenaikan PDRB 1 persen akan menaikkan pendapatan daerah dari pajak sebesar 1,65 persen. Untuk PAD lainnya diasumsikan tingkat elastisitasnya 1,33, dimana setiap kenaikan PDRB 1 persen akan menaikkan pendapatan daerah dan retribusi dan PAD lainnya sebesar 1,33 persen.

Target pendapatan daerah meliputi PAD, dana perimbangan, dan lain-lain PAD yang sah secara rinci dijabarkan sebagai berikut:

A. PAD meliputi :

- Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Retribusi, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp8.417.000.000,00 (delapan milyar empat ratus tujuh belas juta rupiah);
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Lain-lain PAD yang sah, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp41.630.000.000,00 (empat puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Rincian PAD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.3** Target Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024

No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	
1	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel	110.000.000,00
2	Pajak Restoran	1.560.000.000,00
3	Pajak Hiburan	70.000.000,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	500.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	18.000.000.000,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00
7	Pajak Parkir	10.000.000,00
8	Pajak Air Tanah	250.000.000,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan P2	6.000.000.000,00



No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
11	Pajak BPHTB	1.500.000.000,00
<b>JUMLAH PAJAK DAERAH</b>		<b>30.000.000.000,00</b>
<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.152.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	100.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Parkir Khusus	1.500.000.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	80.000.000,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	300.000.000,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	322.000.000,00
8	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	200.000.000,00
9	Retribusi Terminal-Tempat Parkir Kendaraan Penumpang dan Bus	60.000.000,00
10	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	170.000.000,00
11	Retribusi Penjualan Hasil Perikanan BBI	7.000.000,00
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	250.000.000,00
13	Retribusi Izin Trayek	3.000.000,00
14	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.000.000,00
15	Retribusi Kios	40.000.000,00
16	Retribusi Pelayanan Tempat penginapan/Pesanggrahan/Vila	100.000.000,00
17	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	500.000.000,00
18	Retribusi Tera / Tera Ulang	10.000.000,00
19	Izin IMTA (Izin Menetap Tenaga Kerja Asing)	1.000.000.000,00
20	Pelayanan dan Penyedotan Kakus	120.000.000,00
21	Retribusi Tempat Pelelangan	-
22	Izin pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	-
<b>JUMLAH RETRIBUSI DAERAH</b>		<b>8.417.000.000,00</b>
<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN BAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL :</b>		
<b>JUMLAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>		<b>5.000.000.000,00</b>
<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH :</b>		
1	Jasa Giro (pada bank pemerintah/swasta)	1.500.000.000,00
2	Deposito	3.250.000.000,00
3	Pendapatan Denda	500.000.000,00
4	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00
5	Penjualan Aset Daerah	250.000.000,00



No.	JENIS PENERIMAAN	Target Tahun 2024 (Rp)
(1)	(2)	(3)
6	BLUD RSUD	22.500.000.000,00
7	BLUD PUSKESMAS	8.400.000.000,00
<b>JUMLAH LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>		<b>41.630.000.000,00</b>
<b>JUMLAH PAD</b>		<b>85.047.000.000,00</b>

Sumber : BPKAD dan BP2RD Kabupaten Bangka Barat, 2023.(diolah)

B. Pendapatan Transfer meliputi :

- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi :
  - Dana Perimbangan sebesar Rp635.185.247.000 (enam ratus tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), antara lain :
    - Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, dengan jumlah target pendapatan untuk Tahun 2024 sebesar Rp107.000.000.000 (seratus tujuh milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
      - Bagi Hasil Pajak, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp32.000.000.000 (tiga puluh dua milyar rupiah);
      - Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dengan jumlah target pendapatan sebesar Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar rupiah).
    - DAU Tahun 2024, ditargetkan sebesar Rp445.000.000.000 (empat ratus empat puluh lima milyar rupiah);
    - DAK Non Fisik Tahun 2024, ditargetkan sementara sebesar Rp83.185.247.000 (delapan puluh tiga milyar seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - Dana Desa sebesar Rp55.000.000.000 (lima puluh lima milyar rupiah);
  - Dana Insentif Daerah sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah).
- Pendapatan Transfer Antar Daerah, meliputi :
  - Pendapatan Transfer dari dana bagi hasil pajak provinsi ditargetkan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima milyar rupiah) seiring dengan baiknya perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga akan meningkatkan bagi hasil pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor; bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.



Total keseluruhan target pendapatan daerah Tahun 2024 adalah Rp826.232.247.000,00 (delapan ratus dua puluh enam milyar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Upaya – upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kinerja aparatur di bidang pendapatan;
- b. Pelaksanaan monitoring dan koordinasi kegiatan pendapatan secara berkelanjutan;
- c. Memberikan motivasi kepada aparatur dalam pencapaian target pendapatan daerah;
- d. Peningkatan sosialisasi kepada penerima wajib pajak;
- e. Efektifitas dan efisiensi dalam peningkatan pelayanan pajak dan retribusi daerah.

**Tabel 3.4. Target Pendapatan Daerah**  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024

NO.	PENDAPATAN DAERAH	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>85.047.000.000,00</b>
1.1	Hasil Pajak Daerah	30.000.000.000,00
1.2	Hasil Retribusi Daerah	8.417.000.000,00
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.000.000.000,00
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	41.630.000.000,00
<b>2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>741.185.247.000,00</b>
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	696.185.247.000,00
2.1.1	Dana perimbangan	635.185.247.000,00
2.1.1.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	107.000.000.000,00
2.1.1.1.1	<i>Bagi Hasil Pajak</i>	<i>32.000.000.000,00</i>
2.1.1.1.2	<i>Bagi Hasil Bukan Pajak</i>	<i>75.000.000.000,00</i>
2.1.1.2	DAU	445.000.000.000,00
2.1.1.3	DAK	83.185.247.000,00
2.1.2	Dana Desa	55.000.000.000,00



NO.	PENDAPATAN DAERAH	TARGET ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
2.1.3	Dana Insentif Daerah	6.000.000.000,00
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	45.000.000.000,00
2.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	45.000.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>826.232.247.000,00</b>

Sumber : BPKAD dan BP2RD Kabupaten Bangka Barat, 2023.(diolah)

### 3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja yang ditempuh pada tahun anggaran 2024 adalah mengimplementasikan tahun ketiga dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2021-2026. Selain dengan mempedomani dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Periode Tahun 2021-2026 khususnya terkait pencapaian kinerja tujuan serta sasaran pembangunan, penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 juga memperhatikan:

- Tema dan Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024; dan
- Arahan Presiden untuk pembangunan Periode 2020-2024 serta memperhatikan Prioritas Nasional serta Program Prioritas pada RPJMN.

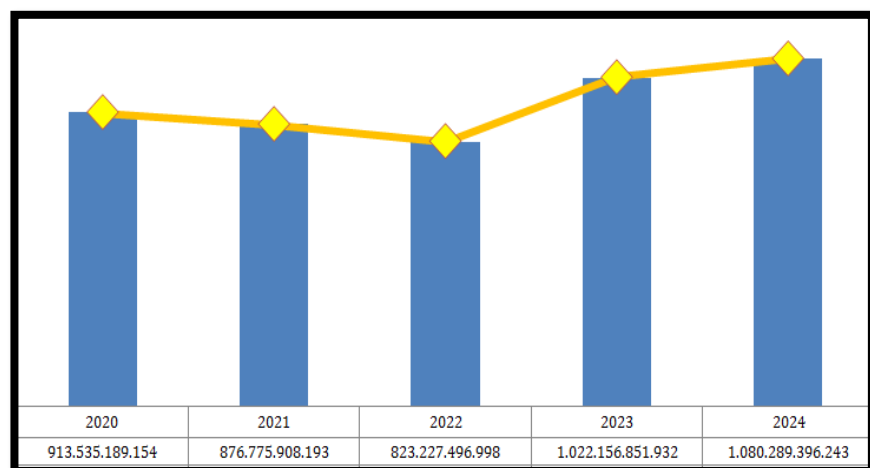
Uraian umum kebijakan belanja yang dituangkan dalam perencanaan Tahun 2024 adalah :

- Memperhatikan belanja pegawai yang disesuaikan dengan jumlah pegawai serta kebijakan terkait tunjangan kinerja;
- Menyiapkan Dana Desa, Alokasi Dana Desa serta Bagi Hasil (Pajak dan Retribusi Daerah) Kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Menyiapkan pagu anggaran untuk kegiatan yang bersifat *multy years*;
- Meyiapkan alokasi dana untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024;
- Memprioritaskan alokasi dana hibah, khususnya kepada lembaga lembaga yang secara langsung mampu memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- f. Memprioritaskan pada belanja untuk pemenuhan tema dan prioritas pembangunan, antara lain;
- Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat;
  - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan standar pelayanan minimal pada urusan wajib yang bersifat dasar;
  - Memprioritaskan pada belanja pelaksanaan pelayanan publik;
  - Memprioritaskan pada belanja terkait pengentasan kemiskinan ekstrem dan kasus *stunting*; serta
  - Memprioritaskan pada belanja untuk perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

Berikut disajikan data realisasi belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 sampai dengan 2022 serta proyeksi belanja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 serta 2024.



Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2023 (diolah)

**Gambar 3.2**

Data Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020-2024

Terkait rincian rencana belanja daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5** Rincian Rencana Belanja Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2024



NO.	URAIAN	RENCANA BELANJA
1	2	3
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Rp630.424.392.675,00
2	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	Rp105.184.285.268,00
3	Urusan Pilihan	Rp13.097.436.530,00
4	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Rp152.723.072.166,00
5	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Rp98.397.229.953,68
6	Unsur Pengawasan	Rp6.834.509.000,00
7	Unsur Pemerintahan Umum	Rp42.635.909.850,00
8	Unsur Kewilayahan	Rp30.992.560.800,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>Rp1.080.289.396.242,68</b>

Struktur belanja dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut uraian sebagai berikut :

**Tabel 3.6** Rincian Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020 – 2024

NO.	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>BELANJA</b>	<b>913.535.189.154</b>	<b>876.775.908.193,4</b>	<b>823.227.496.997,92</b>	<b>1.022.156.851.932</b>	<b>1.080.289.396.242,68</b>
1.1.	BELANJA OPERASI	771.662.555.934,5	642.749.615.980	645.669.326.997,92	745.288.747.873	799.499.998.502
1.1.1	Belanja Pegawai	434.641.692.140	331.320.839.429	355.655.017.337,00	377.058.624.544	397.135.921.276
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	190.337.018.413,5	296.081.262.712	291.043.091.764,92	333.135.959.851	353.787.038.125,68
1.1.3	Belanja Hibah	36.264.574.617	12.966.036.565	10.767.262.375,00	30.722.321.478	43.360.959.100
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	117.368.000	2.381.477.274	8.003.955.521,00	4.371.842.000	5.539.080.000
1.2	BELANJA MODAL	141.863.938.997,5	119.623.646.585,4	63.542.699.989,62	160.546.735.909	163.424.697.741
1.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	8.694.222	-	-	4.105.000.000	3.000.000.000
1.4	BELANJA TRANSFER	2.632.212.275	114.402.645.628	114.015.469.015,00	112.216.368.150	114.041.700.000
1.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.632.212.275	2.595.710.028	4.033.725.515	3.686.592.750	3.841.700.000
1.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	111.806.935.600	109.981.743.500	108.529.775.400	110.200.000.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2023.(diolah)

### 3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah





Arah kebijakan pembiayaan daerah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu terkait penerimaan pembiayaan daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah yang diarahkan untuk penyertaan modal pada Badan Usaha Milik daerah dalam rangka peningkatan perekonomian daerah.

Terkait penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 diprediksi sebesar Rp261.057.149.242,68 (dua ratus enam puluh satu milyar lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen). Untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2023 diprediksi sebesar Rp260.057.149.242,68 (dua ratus enam puluh milyar lima puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh dua rupiah enam puluh delapan sen), serta pada pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah). Secara keseluruhan rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.7** Rincian Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah  
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2020–2024

NO.	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>103.171.046.157</b>	<b>11.257.324.180</b>	<b>14.377.320.880,61</b>	<b>132.006.506.432</b>	<b>261.057.149.242,68</b>
1.1.	SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya	102.879.501.075	11.086.295.160	14.346.688.380,61	131.906.506.432	260.057.149.242,68
1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
1.5	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	291.545.082	171.029.020	30.632.500,00	100.000.000	100.000.000
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-



NO.	URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	PROYEKSI 2023	PROYEKSI 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>3.000.000.000</b>	-	-	-	<b>7.000.000.000</b>
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3.000.000.000	-	-	-	7.000.000.000
2.3	Pembayaran Pokok Hutang	-	-	-	-	-
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
<b>NETTO PEMBIAYAAN DAERAH</b>		<b>100.171.046.157</b>	<b>11.257.324.180</b>	<b>14.377.320.880,61</b>	<b>132.006.506.432</b>	<b>254.057.149.242,68</b>

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2023.(diolah)



## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

#### 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat RKPD Tahun 2024 mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Keterkaitan antara visi serta misi pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 ditampilkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1.** Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

VISI : Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
		2. Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
		3. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
		4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Menurunnya Angka Kemiskinan
		2. Menurunnya Angka Pengangguran
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
		2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
		3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	2. Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	2. Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
		1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah



Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, Visi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat diwujudkan melalui 3 (tiga) misi, yang diharapkan dapat mencapai melalui 5 (lima) tujuan pembangunan dan 13 sasaran pembangunan. Indikasi keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat dilihat dari pencapaian beberapa target indikator makro yang telah ditetapkan pada tahun perencanaan. Target indikator makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 ditampilkan pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2.** Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat  
Disandingkan dengan Target Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2024

No.	INDIKATOR MAKRO	TARGET 2024		
		Bangka Barat	Provinsi	Nasional
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,47	4,8	5,3 - 5,7
2.	Pengeluaran Perkapita (Rp)	12.977.000	-	-
3.	Indeks Pembangunan Manusia	70,96	72,94	73,99 - 74,02
4.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,43	4,14	6,5 - 7,5
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,77	4,37	5,0 - 5,7

#### 4.1.2 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2024

Perumusan tema pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

##### 1. RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan pentahapan arahan tema pembangunan tahunan. Pentahapan arahan tema pembangunan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan tema dalam setiap tahunnya selama periode RPJMD berkesinambungan dalam setiap tahun dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tema pembangunan Tahun 2024 yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Memantapkan kesejahteraan masyarakat Bangka Barat yang bermartabat melalui peningkatan pelayanan dasar, perekonomian berbasis keunggulan daerah, peningkatan olah raga prestasi, perbaikan kualitas infrastruktur yang didukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien”**. Tema tersebut selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan dan perubahan kondisi/isu strategis yang berkembang ke dalam tema pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD.



## 2. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah merupakan salah satu faktor yang mendasari penentuan tema pembangunan daerah. Upaya untuk memasukan faktor dinamika dan realita kondisi umum daerah dilakukan melalui analisa terhadap evaluasi kinerja tahun lalu dengan mereview RPJMD dan RKPD sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, juga memperhatikan dokumen RKPD tahun berjalan (Tahun 2023).

## 3. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024

Kedudukan RKP Tahun 2024 sebagai penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Tema pembangunan nasional pada RKP Tahun 2024 adalah **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024. Tujuh PN merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020–2024 dan tetap dipertahankan pada RKP Tahun 2024 sebagai pelaksanaan kerangka tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Ketujuh PN RKP Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Melalui RKP Tahun 2024 ini juga menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong



terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029.

Pengembangan wilayah tahun 2024 ditujukan untuk mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing-masing wilayah, meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah, serta mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa-Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali.

Strategi pengembangan wilayah yang dibentuk juga memperhatikan beberapa sasaran pembangunan kewilayahan yang berfokus pada (1) rata-rata pertumbuhan ekonomi 2020- 2024 untuk setiap wilayah, (2) peningkatan kontribusi (share) ekonomi masing-masing wilayah, dan (3) peningkatan kesempatan kerja. Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan data terbaru pertumbuhan ekonomi wilayah dan perkembangan kondisi perekonomian global dan nasional saat ini. Pada Tahun 2024, target pengembangan Wilayah Sumatera untuk Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,15 – 3,29 persen, Kontribusi (*Share*) Ekonomi Regional sebesar 21,8 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,16 – 4,87 persen.

#### 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024

Tema RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yaitu “**Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan SDM dan Stabilitas Demokrasi**”. Adapun Prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024 yaitu terdiri dari Prioritas Utama yaitu Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Lingkungan, Pembangunan SDM, dan Pembangunan Demokrasi, serta Prioritas Pendukung yaitu Pembangunan Pemerintahan, Pembangunan Wilayah, dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.

Perumusan kebijakan kewilayahan didasarkan pada faktor sosial dan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Kabupaten Bangka Barat diarahkan untuk Pengembangan Industri Pengolahan Logam Timah; Pertambangan dan Penggalian, serta Pertanian (sawit, hortikultura). Pembangunan Kabupaten Bangka Barat difokuskan pada empat sasaran utama yaitu: (1) Meningkatnya



pembangunan Manusia melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan Akses pelayanan dan Mutu Pendidikan serta meningkatkan relevansi dan daya saing; Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dengan memperkuat pelayanan dan sistem kesehatan. (2) meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertanian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan Produktifitas, Kualitas dan Daya Saing Produk Pertanian serta dan sarana dan prasarana produksi , Nilai Tambah Produk serta Peningkatan Fungsi Kelembagaan Pertanian. (3) Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan melalui strategi dan arah kebijakan Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Serta Pembinaan Hubungan Industri dan Kesehatan Kerja; Peningkatan tata kelola industri dan nilai tambah produk. (4) Meningkatnya PDRB Sub Sektor Pertambangan Dan Penggalian melalui strategi dan arah kebijakan Meningkatkan tata kelola sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan.

#### 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Dengan melihat dari berbagai aspek tersebut, maka tema pembangunan Kabupaten Bangka Barat di Tahun 2024 yaitu **“Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan”**.

Keselarasn tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat disajikan pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3.** Keselarasan Tema Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Nasional	Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kabupaten Bangka Barat
Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan SDM Dan Stabilitas Demokrasi	Peningkatan Perekonomian Berbasis Keunggulan Daerah dan Menghilangkan Kemiskinan Ekstrim Yang Didukung Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

#### 6. Analisis hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan RPJMD Tahun 2022

Evaluasi hasil RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disajikan dalam bentuk kinerja kegiatan (*output*) dan keuangan. Adapun capaian kinerja kegiatan maupun keuangan dengan kategori sangat tinggi yaitu:

- Total anggaran belanja Tahun 2022 adalah Rp945.504.695.023,00 dengan total realisasi anggaran sebesar Rp836.017.730.746,19 atau 88,42 persen dengan kriteria tinggi;



- Total rata-rata capaian kinerja RKPD Tahun 2022 sebesar 98,56 persen dengan kriteria sangat tinggi;
- Total rata-rata capaian realisasi anggaran RKPD Tahun 2022 sebesar 82,97 persen dengan kriteria tinggi.

Capaian urusan pemerintahan tahun 2022, untuk urusan wajib pelayanan dasar rata-rata realisasi kinerja sebesar 94,54 persen dan keuangan sebesar 86,57 persen, dan untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar rata-rata kinerja sebesar 96,79 persen dan keuangan sebesar 84,61 persen. Untuk Urusan Pilihan, rata-rata realisasi kinerja sebesar 105,61 persen dan keuangan sebesar 81,69 persen. Sementara untuk Fungsi Penunjang, rata-rata realisasi kinerja sebesar 97,31 persen dan keuangan sebesar 79,00 persen.

Sedangkan untuk hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, di Tahun 2022 secara keseluruhan capaian kinerja pembangunan di Kabupaten Bangka Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari 6 indikator tujuan pembangunan daerah, 5 indikator tujuan dapat dicapai dan dari 27 indikator sasaran pembangunan daerah 16 indikator dapat dicapai sesuai target bahkan melampaui target dan 11 indikator belum dapat dicapai sesuai dengan target. Jika dilakukan perhitungan skala peringkat kinerja, dari 13 sasaran pembangunan daerah, dihitung dengan rata-rata realisasi indikator pada masing-masing sasaran, dari 13 sasaran pembangunan daerah sebanyak 12 sasaran dengan kriteria "sangat tinggi" dan 1 sasaran dengan kriteria "sedang".

#### **7. Permasalahan di tingkat daerah**

Permasalahan pembangunan daerah dapat disimpulkan dengan melihat data dan hasil evaluasi pada setiap pelaksanaan perencanaan yang dilakukan dan permasalahan yang terkait gambaran umum kondisi daerah. Permasalahan pembangunan juga bisa dilihat dari perkembangan maupun tren pencapaian pembangunan daerah yang masih belum mencapai ideal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berdasarkan hasil inventarisir permasalahan untuk Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan, dan Urusan Penunjang dapat dilihat secara detail pada Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah. Permasalahan utama yang perlu segera untuk ditangani oleh pemerintah daerah yaitu layanan dasar bagi masyarakat (pelaksanaan SPM) belum mencapai 100 persen, prevalensi *stunting* di Kabupaten Bangka Barat masih tinggi, serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum maksimal.

#### **8. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah**





Berikut permasalahan pembangunan daerah secara umum yang dianggap memiliki nilai strategis jika dihubungkan dengan capaian sasaran pembangunan pada RKPD di tahun 2024. Berdasarkan hasil pencapaian sasaran pembangunan RPJMD di Tahun 2022, permasalahan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai misi pembangunan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, yaitu :

**a. Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

Misi pertama RPJMD Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 adalah “Memajukan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat” yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 6 (enam) sasaran pembangunan daerah.

Jika dilihat dari capaian dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada Tahun 2022, maka yang menjadi permasalahan utama antara lain :

- i. Laju pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah;
- ii. Kualitas Lingkungan Hidup yang belum baik;
- iii. Resiko Bencana yang masih kategori tinggi; serta
- iv. Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami peningkatan.

**b. Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi kedua pembangunan adalah “Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berahlak Mulia” yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran pembangunan daerah.

Berdasarkan capaian pembangunan dari indikator tujuan dan sasaran di Tahun 2022, ditentukan 3 (tiga) permasalahan utama, antara lain:

- i. Partisipasi Usia Sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan masih rendah;
- ii. Capaian Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat masih lebih rendah dari Angka rata-rata Provinsi dan Nasional; serta
- iii. Kasus *Stunting* masih tinggi.

**c. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik**

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 misi ketiga pembangunan adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik” yang terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 7 (tujuh) sasaran pembangunan daerah. Dari capaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, ditetapkan 4 (empat) permasalahan utama, antara lain :



- i. Penerapan reformasi birokrasi masih belum optimal;
- ii. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal;
- iii. Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan; serta
- iv. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah.

## 9. Identifikasi permasalahan /isu strategis di tingkat provinsi dan nasional

Permasalahan dan isu strategis di tingkat provinsi dan nasional merupakan salah satu masukan (sebagai bahan analisa) dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2024.

**Tabel 4.4.**Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Tingkat Nasional

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan (ET)</li> <li>- Peningkatan ketahanan dan ketersediaan air baik secara kuantitas maupun Kualitas</li> <li>- Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan</li> <li>- Pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan</li> <li>- Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi</li> <li>- Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi</li> <li>- Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)</li> <li>- Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi</li> <li>- Percepatan transformasi sosial dan ekonomi</li> <li>- Penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah</li> <li>- Memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar</li> <li>- Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah</li> <li>- Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata</li> <li>- Percepatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas</li> <li>- Reformasi sistem perlindungan sosial menjadi lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif berdasarkan tingkat kerentanan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem serta isu jaminan sosial</li> <li>- Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah 3T, serta pengembangan statistik hayati</li> <li>- Perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan pemberdayaan ekonomi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan</li> <li>- Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih cenderung tidak merata</li> <li>- Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing masih rendah</li> <li>- Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> <li>- Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi</li> <li>- Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tatakelola sumber daya alam</li> <li>- Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian</li> <li>- Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan</li> <li>- Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian</li> <li>- Belum Optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan</li> <li>- Belum Optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan</li> <li>- Belum Optimalnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik</li> <li>- Belum Optimalnya Pertumbuhan ekspor</li> <li>- Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah</li> <li>- Belum Maksimalnya pembangunan manusia</li> <li>- Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi</li> </ul>



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
<ul style="list-style-type: none"><li>- Pewujudan lingkungan ramah anak, peningkatan kesetaraan gender, serta peningkatan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, serta penguatan layanan kepemudaan dalam rangka peningkatan partisipasi aktif pemuda</li><li>- Penguatan peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai isu permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan iptek dan inovasi</li><li>- Perbaikan tata kelola pemasyarakatan dan pembinaan olahraga di pusat dan daerah</li><li>- Penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila</li><li>- Pemajuan dan pelestarian kebudayaan</li><li>- Penguatan moderasi beragama</li><li>- Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas</li><li>- Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, air minum dan sanitasi yang layak dan aman, sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi</li><li>- Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food estate), industri, pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi</li><li>- Pembangunan infrastruktur perkotaan</li><li>- Pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT)</li><li>- Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</li><li>- Pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup</li><li>- Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan</li><li>- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan</li><li>- Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan</li><li>- Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak</li><li>- Tingginya biaya politik dan maraknya korupsi</li><li>- Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu pilar demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial masih menghadapi masalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta belum adanya pendanaan berkelanjutan</li><li>- Optimalisasi kebijakan luar negeri dan rasa aman bagi seluruh masyarakat</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rendahnya tata kelola pemerintahan</li><li>- Kurangnya ketersediaan infrastruktur</li><li>- Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang</li><li>- Tingginya resiko bencana</li><li>- Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan</li><li>- Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk</li><li>- Lambatnya penurunan kemiskinan</li><li>- Rendahnya kesempatan kerja</li><li>- Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup</li></ul>



PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN	
TINGKAT NASIONAL	TINGKAT PROVINSI
<ul style="list-style-type: none"><li>- Supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan</li><li>- Penerapan platform tunggal manajemen ASN</li><li>- Penerapan manajemen penghargaan berbasis kinerja</li><li>- Pelanggaran netralitas ASN dan sistem merit dalam manajemen ASN berpotensi meningkat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak</li><li>- Penegakan disiplin ASN</li><li>- Belum terintegrasinya layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional</li><li>- Penguatan pengawasan masyarakat atas pelayanan publik</li><li>- Percepatan integrasi SPBE</li><li>- Penyusunan rencana induk SPBE</li><li>- Reformasi birokrasi yang belum berdampak pada pembangunan nasional</li><li>- Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi eksisting di K/L/D</li><li>- Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan</li></ul>	

#### 4.1.3 Perumusan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan dalam RPJMD, permasalahan pembangunan dalam RKPD Tahun 2024, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan dalam RKPD Tahun 2024 serta memperhatikan kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Perumusan isu strategis daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel 4.5.

Dari hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, Identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan isu strategis daerah, permasalahan dan isu strategis ditingkat nasional dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel 4.6.



Tabel 4.5. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	Permasalahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Permasalahan Daerah dalam RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2024	Isu Strategis Daerah Tahun 2024
1.	Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Angka Kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai target Nasional.</li><li>2. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan masih sangat rendah.</li></ol>	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan	Penghapusan Kemiskinan Ektrim
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional.</li><li>2. Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik.</li><li>3. Menurunnya APK SMP/MTs/Paket B.</li><li>4. Meningkatnya Angka Putus Sekolah SD/MI.</li><li>5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional.</li><li>6. Masih tingginya prevalensi balita gizi buruk dan stunting.</li><li>7. Meningkatnya angka kematian ibu.</li><li>8. Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal.</li><li>9. Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.</li></ol>	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <i>Universal Health Coverage (UHC)</i></li><li>2. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan</li><li>3. Prevalensi Stunting</li></ol>



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	Permasalahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Permasalahan Daerah dalam RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2024	Isu Strategis Daerah Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none"><li>10. Belum mencukupinya pemenuhan petugas PLKB/PKB di tingkat kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.</li><li>11. Rendahnya Prestasi Olahraga dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet serta minimnya SDM olahraga berlesensi.</li><li>12. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan olahraga dan kepemudaan.</li><li>13. Belum terakreditasinya perpustakaan daerah.</li><li>14. Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media/ Koleksi <i>e-book</i> belum optimal.</li></ol>		
			Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial sosial masyarakat	Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. 4.	Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Penguatan Daya Saing Usaha	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pertumbuhan Ekonomi</li><li>2. Tingkat Pengangguran Terbuka</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laju pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah</li><li>2. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja.</li><li>3. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.</li><li>4. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja.</li><li>5. Kelembagaan dan peran koperasi belum optimal.</li><li>6. Tingkat pemasaran produk UMKM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi</li><li>2. Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata &amp;</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan nilai tambah usaha pertanian dalam arti luas</li><li>2. Pengaruh global terhadap harga komoditas strategis Bangka Barat</li><li>3. Peningkatan daya saing usaha mikro, industri kecil dan menengah di semua</li></ol>



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	Permasalahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Permasalahan Daerah dalam RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2024	Isu Strategis Daerah Tahun 2024
			<p>masih terbatas.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>7. Belum patuhnya pengusahan dalam menyampaikan laporan berkala sesuai peraturan perundangan pada aplikasi <i>Online Single Submission</i> (OSS).</li><li>8. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya air tawar.</li><li>9. Minimnya usaha dan pelaku ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata.</li><li>10. Turunnya produksi ternak unggas khususnya pada komoditas ayam petelur, ayam pedaging dan ayam buras.</li><li>11. Tidak stabilnya harga jual produk perkebunan khususnya pada tiga komoditi unggulan masyarakat (karet, lada, dan kelapa sawit).</li><li>12. Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor yang belum optimal.</li><li>13. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan.</li><li>14. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar</li></ol>	kebudayaan daerah	sektor <ol style="list-style-type: none"><li>4. Peningkatan Nilai Investasi Daerah</li><li>5. Peningkatan Kualitas SDM tenaga kerja</li><li>6. Peningkatan jumlah investasi di daerah untuk menambah lapangan kerja</li></ol>



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	Permasalahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Permasalahan Daerah dalam RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2024	Isu Strategis Daerah Tahun 2024
5.	Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kualitas lingkungan hidup masih belum baik.</li><li>2. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, khususnya pada wilayah perkotaan masih belum optimal.</li><li>3. Masih rendahnya penanganan terhadap lahan kritis.</li><li>4. Layanan pemadam kebakaran masih terfokus pada perkotaan di Kecamatan Muntok.</li><li>5. Resiko bencana masih kategori tinggi.</li><li>6. Belum optimalnya pengelolaan kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Menumbing</li></ol>	Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li><li>2. Peningkatan infrastruktur Daerah</li><li>3. Peningkatan pengelolaan persampaha</li><li>4. Pemulihan lahan kritis</li></ol>
6.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas	Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya fungsi jaringan irigasi yang dibangun di daerah irigasi.</li><li>2. Masih terdapat jalan yang berkondisi tidak mantap dan belum sesuai standar.</li><li>3. RTRW Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</li><li>4. Belum ditetapkannya Dokumen RDTR yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat.</li><li>5. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum.</li></ol>	Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan Kawasan Industri Tanjung Ular.</li><li>2. Pemantapan kualitas sarana dan prasarana wilayah dalam menopang pembangunan yang berkelanjutan.</li></ol>





No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	Permasalahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Permasalahan Daerah dalam RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2024	Isu Strategis Daerah Tahun 2024
			<ol style="list-style-type: none"><li>6. Belum optimalnya pelayanan pengolahan air limbah domestik.</li><li>7. Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.</li><li>8. Masih terdapat kawasan kumuh.</li><li>9. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan</li></ol>		
7.	Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara	Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Pemilukada Serempak Tahun 2024</li><li>2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik dan General</li><li>3. Penerapan SPM untuk urusan wajib pelayanan dasar</li><li>4. Peningkatan Sistem pengawasan internal</li><li>5. Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</li><li>6. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah</li><li>7. Peningkatan kapasitas aparatur</li><li>8. Penerapan IT dalam penyelenggaraan pemerintahan</li></ol>
8.	Pelaksanaan Pemilu 2024	Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi.</li><li>2. Masih ditemukannya pelanggaran terhadap perda dan perkara.</li><li>3. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan.</li><li>4. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan dan pencatatan sipil.</li><li>5. Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Barat.</li><li>6. Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik.</li><li>7. Belum optimalnya penerapan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.</li><li>8. Turunnya jumlah perangkat daerah</li></ol>	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien	



No.	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024	Permasalahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2021-2026	Permasalahan Daerah dalam RKPD Tahun 2024	Arah Kebijakan Daerah dalam RPJMD untuk Tahun 2024	Isu Strategis Daerah Tahun 2024
			<p>yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.</p> <p>9. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.</p> <p>10. Tingkat maturasi SPIP masih pada kategori berkembang.</p> <p>11. Masih rendahnya Indeks Profesional ASN.</p> <p>12. Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.</p>		



Tabel 4.6. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
<b>Menurunnya angka kemiskinan :</b> 1 Angka kemiskinan	2,46%	113,68	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1. Percepatan transformasi sosial dan ekonomi 2. Penguatan rantai produksi dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah 3. Memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar 4. Percepatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas 5. Reformasi sistem perlindungan sosial menjadi lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif berdasarkan tingkat kerentanan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem serta isu jaminan sosial 6. Percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah 3T, serta pengembangan statistik hayati 7. Perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif dan pemberdayaan ekonomi 8. Penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila 9. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan 10. Penguatan moderasi beragama 11. Peningkatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas 12. Penguatan peran perguruan tinggi dalam menjawab berbagai isu permasalahan terkait	Optimalisasi Pelayanan Dasar
<b>Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat:</b> 1 Indeks Kesalehan Sosial	Baik	100,00	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		
<b>Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan:</b> 1 Rata-rata Lama Sekolah 2 Harapan Lama Sekolah 3 Persentase Sekolah terakreditasi A	7,46 Tahun 11,72Tahun 20,53%	98,29 100,00 84,42	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
				<p>pertumbuhan ekonomi daerah dan pembangunan iptek dan inovasi</p> <p>13. Disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat masih cenderung tidak merata</p> <p>14. Kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Daya Saing masih rendah</p> <p>15. Belum Maksimalnya pembangunan manusia</p> <p>16. Belum optimalnya pembangunan kawasan pedesaan</p> <p>17. Lambatnya penurunan kemiskinan</p> <p>18. Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai target Nasional</p> <p>19. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan masih sangat rendah</p> <p>20. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional</p> <p>21. Belum optimalnya kompetensi dan sertifikasi pendidik</p> <p>22. Menurunnya APK SMP/MTs/Paket B</p> <p>23. Meningkatnya Angka Putus Sekolah SD/MI</p> <p>24. Belum terakreditasinya perpustakaan daerah</p> <p>25. Koleksi Bahan Pustaka Digital serta Sarana Prasarana untuk Alih Media/ Koleksi <i>e-book</i> belum optimal</p>	
<p><b>Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat :</b></p> <p>1 Angka Harapan Hidup</p> <p>2 Prevalensi Stunting</p>	<p>70,25 Tahun</p> <p>9,56%</p>	<p>99,77</p> <p>90,74</p>	<p>Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>1. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata</p> <p>2. Pewujudan lingkungan ramah anak, peningkatan kesetaraan gender, serta peningkatan akses,</p>	<p>Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i></p>



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
<b>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak :</b> 1 Indeks Pembangunan Gender 2 Status Kabupaten Layak Anak	90,29 Pratama	99,58 100,00	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	peran, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, serta penguatan layanan kepemudaan dalam rangka peningkatan partisipasi aktif pemuda 3. Perbaiki tata kelola pemasyarakatan dan pembinaan olahraga di pusat dan daerah 4. Lambatnya penurunan laju pertumbuhan penduduk 5. Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat lebih rendah dari Angka Provinsi dan Nasional 6. Masih tingginya prevalensi balita gizi buruk dan stunting 7. Meningkatnya angka kematian ibu 8. Ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan belum optimal 9. Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan, baik pada pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan 10. Belum mencukupinya pemenuhan petugas PLKB/PKB di tingkat kecamatan dalam melayani kebutuhan masyarakat 11. Rendahnya Prestasi Olahraga dikarenakan kurangnya pembinaan ke atlet serta minimnya SDM olahraga berlesensi 12. Terbatasnya Sarana dan Prasarana pendukung pengembangan olahraga dan kepemudaan 13. Masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap perempuan	
<b>Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah :</b>			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	1. Percepatan transisi energi dari energi fosil ke	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPDP Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
1. Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	12,5%	227,27		<ul style="list-style-type: none"> <li>energi terbarukan (ET)</li> <li>2. Peningkatan ketahanan dan ketersediaan air baik secara kuantitas maupun Kualitas</li> <li>3. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan</li> <li>4. Pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan</li> <li>5. Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi</li> <li>6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi</li> <li>7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)</li> <li>8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi</li> <li>9. Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah</li> <li>10. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, air minum dan sanitasi yang layak dan aman, sistem pengelolaan persampahan yang terpadu, pengelolaan sumber daya air, serta keselamatan transportasi</li> <li>11. Pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian (food estate), industri, pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	
2. Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	7,57%	132,81			
3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	2,32%	97,48			
4. Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	25,01%	92,53			
<b>Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah:</b>			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		
1. Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.403 Milyar Rupiah	174,29			
<b>Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah:</b>			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		
1. Indeks konektivitas	0,72	102,86			
2. Indeks Bangunan Gedung	Sedang	100,00			
<b>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup :</b>			Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas		
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,39	97,86			
2. Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	52,94%	128,56			



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
3	Indeks Resiko Bencana	Tinggi	100,00		
	<b>Menurunnya angka pengangguran:</b>				
1	Tingkat pengangguran Terbuka	4,86%	66,48	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	12. Pembangunan infrastruktur perkotaan 13. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) 14. Pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 15. Pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan 16. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan 17. Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan 18. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan 19. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup dan tatakelola sumber daya alam 20. Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian 21. Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan 22. Belum Optimalnya Pertumbuhan PDRB sub sektor pertambangan dan penggalian 23. Belum Optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor industri pengolahan 24. Belum Optimalnya pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
				<ol style="list-style-type: none"><li>25. Belum Optimalnya laju pertumbuhan kunjungan wisatawan asing dan domestik</li><li>26. Belum Optimalnya Pertumbuhan ekspor</li><li>27. Belum maksimalnya nilai investasi (PMA/PMDN) daerah</li><li>28. Kurangnya ketersediaan infrastruktur</li><li>29. Rendahnya kualitas dan pemenuhan rencana tata ruang serta perwujudan tertib tata ruang</li><li>30. Tingginya resiko bencana</li><li>31. Rendahnya kesempatan kerja</li><li>32. Belum optimalnya pengendalian lingkungan hidup</li><li>33. Laju pertumbuhan ekonomi yang masih sangat rendah</li><li>34. Minimnya investasi yang melibatkan banyak tenaga kerja.</li><li>35. Meningkatnya tingkat pengangguran terbuka.</li><li>36. Minimnya daya tampung sektor formal dalam menampung pencari kerja.</li><li>37. Kelembagaan dan peran koperasi belum optimal.</li><li>38. Tingkat pemasaran produk UMKM masih terbatas.</li><li>39. Belum patuhnya pengusahan dalam menyampaikan laporan berkala sesuai peraturan perundangan pada aplikasi Online Single Submission (OSS).</li><li>40. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya air tawar.</li></ol>	





Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
				<ol style="list-style-type: none"><li>41. Minimnya usaha dan pelaku ekonomi kreatif yang mendukung sektor pariwisata.</li><li>42. Turunnya produksi ternak unggas khususnya pada komoditas ayam petelur, ayam pedaging dan ayam buras.</li><li>43. Tidak stabilnya harga jual produk perkebunan khususnya pada tiga komoditi unggulan masyarakat (karet, lada, dan kelapa sawit).</li><li>44. Pengembangan produk IKM yang berkualitas, inovatif, berdaya saing tinggi, dan berorientasi ekspor yang belum optimal.</li><li>45. Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan.</li><li>46. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan potensi pasar</li><li>47. Kualitas lingkungan hidup masih belum baik.</li><li>48. Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu, khususnya pada wilayah perkotaan masih belum optimal.</li><li>49. Masih rendahnya penanganan terhadap lahan kritis.</li><li>50. Layanan pemadam kebakaran masih terfokus pada perkotaan di Kecamatan Muntok.</li><li>51. Resiko bencana masih kategori tinggi.</li><li>52. Belum optimalnya pengelolaan kawasan Taman Hutan Rakyat Bukit Menumbing</li><li>53. irigasi yang dibangun di daerah irigasi.</li><li>54. Masih terdapat jalan yang berkondisi tidak</li></ol>	



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
				<p>mantap dan belum sesuai standar.</p> <p>55. RTRW Kabupaten Bangka Barat belum sepenuhnya diimplementasikan dalam pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>56. Belum ditetapkannya Dokumen RDTR yang merupakan dokumen turunan dari RTRW Kabupaten Bangka Barat.</p> <p>57. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pokok air minum.</p> <p>58. Belum optimalnya pelayanan pengolahan air limbah domestik.</p> <p>59. Belum terpenuhinya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p> <p>60. Masih terdapat kawasan kumuh.</p> <p>61. Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan</p>	
<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel :</b>			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak</li><li>2. Tingginya biaya politik dan maraknya korupsi</li><li>3. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai salah satu pilar demokrasi dan berfungsi sebagai kontrol sosial masih menghadapi masalah kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan, serta belum adanya pendanaan berkelanjutan</li></ol>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
1 Nilai SAKIP	68,66	98,09			
2 Opini BPK	WTP	100,00			
3 Maturitas SPIP	Berkembang	100,00			
4 Indeks SPBE	Cukup	100,00			
5 Indeks Profesionalitas ASN	62,47	96,70			



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
<p><b>Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah:</b></p> <p>1 Indeks Kepuasan Masyarakat</p>	83,06	101,89	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	<p>4. Optimalisasi kebijakan luar negeri dan rasa aman bagi seluruh masyarakat</p> <p>5. Supremasi hukum dan peningkatan akses terhadap keadilan</p> <p>6. Penerapan platform tunggal manajemen ASN</p> <p>7. Penerapan manajemen penghargaan berbasis kinerja</p> <p>8. Pelanggaran netralitas ASN dan sistem merit dalam manajemen ASN berpotensi meningkat pada Pemilu dan Pemilihan Serentak</p> <p>9. Penegakan disiplin ASN</p> <p>10. Belum terintegrasinya layanan publik prioritas pada portal pelayanan publik nasional</p> <p>11. Penguatan pengawasan masyarakat atas pelayanan publik</p> <p>12. Percepatan integrasi SPBE</p> <p>13. Penyusunan rencana induk SPBE</p> <p>14. Pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p> <p>15. Reformasi birokrasi yang belum berdampak pada pembangunan nasional</p> <p>16. Sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) belum dapat diintegrasikan dengan aplikasi eksisting di K/L/D</p> <p>17. Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan</p> <p>18. Menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>19. Masih Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi</p>	
<p><b>Meningkatnya kemandirian keuangan daerah:</b></p> <p>1 Derajat Otonomi Fiskal Daerah</p>	8,18%	92,22	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah		



Capaian RPJMD			Tujuan dalam RPJMD 2021-2026	Permasalahan / Isu strategis (Daerah dan Nasional)	Prioritas dalam RKPD Tahun 2024
Sasaran	Realisasi 2022	Capaian s.d. 2022 (%)			
				<ol style="list-style-type: none"><li>20. Menurunnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga dalam demokrasi</li><li>21. Rendahnya tata kelola pemerintahan</li><li>22. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah masih rendah</li><li>23. Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi.</li><li>24. Masih ditemukannya pelanggaran terhadap perda dan perkada.</li><li>25. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di tingkat kecamatan.</li><li>26. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki identitas kependudukan dan pencatatan sipil.</li><li>27. Belum optimalnya pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bangka Barat.</li><li>28. Data Statistik Sektoral belum terkelola dan tervalidasi dengan baik.</li><li>29. Belum optimalnya penerapan urusan persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.</li><li>30. Turunnya jumlah perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku.</li><li>31. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal.</li><li>32. Tingkat maturasi SPIP masih pada kategori berkembang.</li><li>33. Masih rendahnya Indeks Profesional ASN.</li><li>34. Sumber Daya Manusia pada pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan.</li></ol>	



#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah disampaikan di atas serta memperhatikan tema pembangunan yang diusung di Tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;
2. Optimalisasi Penanganan *Stunting*;
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Dari prioritas yang telah ditetapkan, maka dilakukan sinkronisasi dengan sasaran pembangunan tahun 2024 agar implementasi dapat lebih fokus dan terarah serta dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7. Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan dan Sasaran Daerah**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	SASARAN DAERAH
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat
2. Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i> ;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	Menurunnya Angka Pengangguran
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah tahun 2024 sesuai dengan tahapan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 tahun ketiga sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut.



Tabel 4.8. Sasaran, Indikator serta Target Indikator Daerah Tahun 2024

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
		SATUAN	NILAI
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6,5
	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,41
	Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,86
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1.029
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Konektivitas	Nilai	0,71
	Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94
	Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	52,94
	Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,43
Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77
Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,74
	Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,51
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,70
	Prevalensi <i>Stunting</i>	%	6,40
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72,14
	Opini BPK	Opini	WTP
	Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
	Indeks SPBE	kategori	Baik
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,07
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,06
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39



#### 4.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Selanjutnya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan tersebut disusun strategi dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung layanan masyarakat dapat terlaksana dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah diuraikan pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.9.**Keterkaitan antara Sasaran, Strategi  
dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan produksi peternakan) dan perikanan	Meningkatkan perekonomian dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan daya saing hasil pertanian dan perikanan, industri pengolahan, usaha mikro dan koperasi, pengembangan pariwisata & kebudayaan daerah
	Mengoptimalkan dan menyinergikan fungsi jaringan irigasi	
	Meningkatkan kualitas SDM di bidang pertanian	
	Pengembangan kawasan industri pengolahan berbasis potensi daerah	
	Peningkatan kualitas produk, pemasaran, dan kemitraan, serta literasi digital usaha mikro	
	Penguatan kelembagaan dan peran koperasi	
	Meningkatkan infrastruktur destinasi pariwisata terpadu	
	Meningkatkan promosi pariwisata yang inovatif berbasis teknologi informasi melalui pendekatan penta helix	
	Mengembangkan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif	
	Meningkatkan pelestarian kekayaan sejarah, adat istiadat, seni dan budaya lokal	



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Mengoptimalkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	
	Mengoptimalkan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura)	
	Mengoptimalkan pembangunan, pemeliharaan, distribusi perdagangan serta pengembangan potensi pasar	
	Meningkatkan perlindungan konsumen	
Meningkatnya peran penanaman modal pada perekonomian daerah	Penguatan ketersediaan data yang berkualitas serta penyusunan regulasi investasi untuk fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	Meningkatkan peran penanaman modal melalui perbaikan iklim dan layanan investasi
	Peningkatan iklim investasi daerah	
	Peningkatan kualitas perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Meningkatkan ketersediaan jaringan dan perlengkapan jalan	Meningkatkan pemerataan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi
	Percepatan penatagunaan dan pengelolaan tanah untuk pembangunan	
	Meningkatkan penyelenggaraan bangunan gedung Negara	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengendalian kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah
	Peningkatan pengelolaan persampahan secara terpadu	
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur penanggulangan bencana daerah	
Menurunnya angka kemiskinan	Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dan jaminan perlindungan sosial	Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dengan meningkatkan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat miskin, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan lapangan pekerjaan
	Mengembangkan dan meningkatkan pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan miskin	
	Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh desa dan kelurahan	
	Peningkatan akses dan ketersediaan pangan dengan harga terjangkau	
	Menyediakan akses perumahan dan pemukiman yang layak, serta meningkatkan pembangunan dan infrastruktur perumahan	





Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya angka pengangguran	Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan kompetensi, kewirausahaan, dan kemitraan	
	Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial	
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu infrastruktur dan memberikan jaminan bebas biaya pendidikan	Meningkatkan jaminan pendidikan dan kesehatan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan dan kesehatan
	Memperluas dan memperkuat implementasi sistem penjaminan mutu	
	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sekolah/perpustakaan daerah	
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat serta penguatan ketersediaan jaminan kesehatan bagi seluruh Masyarakat	
	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan	
	Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat	
	Meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan	
	Meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan pemberdayaan kualitas keluarga sejahtera	
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan, pembinaan keluarga, keikutsertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk, perlindungan anak	Penguatan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesalehan sosial masyarakat
	Melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak	
Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Meningkatkan kepedulian terhadap sesama (kepedulian sosial)	
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelestarian Lingkungan hidup	
	Meningkatkan masyarakat sadar hukum	
	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kemajemukan (kebhinekaan)	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan perencanaan daerah	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan



Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Penguatan penerapan kebijakan satu data	kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien
	Menguatkan tata kelola administrasi keuangan dan aset daerah	
	Menguatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	
	Peningkatan implementasi pengamanan informasi	
	Optimalisasi penerapan SPBE	
	Meningkatkan tertib kearsipan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan	
	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	
	Menguatkan implementasi manajemen ASN	
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas	
	Meningkatkan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis digital	
Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah	Meningkatkan kemandirian keuangan daerah berbasis peningkatan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan peran BUMD Dan BUMDes	

Strategi dan arah kebijakan tersebut merupakan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 yang merupakan upaya dalam pencapaian Visi Misi Kepala Daerah untuk masa Tahun 2021-2026 yang disesuaikan dengan memperhatikan permasalahan, isu strategis serta pencapaian pembangunan yang telah dicapai.

#### 4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Untuk menjamin keselarasan dan ketercapaian hasil-hasil pembangunan dari level Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan penyesuaian prioritas antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat sehingga ada dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Prioritas Nasional. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangka Barat dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi ditampilkan pada tabel di bawah ini.



**Tabel 4.10.**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Prioritas Daerah Kab. Bangka Barat
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PN 1	Pembangunan Ekonomi	3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	PN 5	Pembangunan Wilayah	
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	PN 6	Pembangunan Lingkungan	
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	PN 2	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	1. Optimalisasi Pelayanan Dasar 2. Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i>
Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	PN 3	Pembangunan SDM	
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PN 4		
Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PN 7	Pembangunan Demokrasi	4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
		Pembangunan Pemerintahan	

#### 4.2.3. Program Pendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Prioritas yang sudah ditetapkan diterjemahkan ke dalam sasaran pembangunan dengan indikator dan target sebagai bahan untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan. Selanjutnya dalam rangka menjabarkan program pembangunan daerah yang dikaitkan dengan prioritas pembangunan daerah dijelaskan dalam tabel 4.11.

Pencapaian prioritas nasional dan provinsi sangat ditentukan dukungan prioritas Kabupaten yang dituangkan melalui program/kegiatan/subkegiatan. Dalam RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, dukungan program terhadap prioritas nasional dan provinsi disajikan sebagaimana tabel 4.12. dan 4.13.

#### 4.3 Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar tersebut ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu



pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Selanjutnya sesuai Pasal 298 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Dalam rangka pemenuhan kewajiban tersebut, maka prioritas pembangunan daerah diarahkan untuk pemenuhan SPM. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah : Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; serta Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bangka Barat ditetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan penerapan SPM. Penyelarasan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan SPM sebagaimana tergambar pada tabel 4.14.



**Tabel 4.14.** Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Standar Pelayanan Minimum

STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
BIDANG PENDIDIKAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,48 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	96,15%
			Harapan Lama Sekolah	11,74 tahun		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95,32%
			Persentase Sekolah Terakreditasi A	25,51%		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	95,20%
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	71,25%
BIDANG KESEHATAN	Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,70 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%
			Prevalensi <i>Stunting</i>	6,40%		Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	81
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79
						Persentase baduta <i>stunting</i>	8,5%
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	85%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	50%			



STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%
						Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	70%
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i>	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,70 tahun	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	23,70%
			Prevalensi <i>Stunting</i>	6,40%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkategori layak	4,72%
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	83,28%
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,43%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100%
BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori Baik	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimda, tomas dan toga.	100%
	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Resiko Bencana	Kategori Tinggi	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%



STANDAR PELAYANAN MINIMAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100%
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	48%
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	50%
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	100%
BIDANG SOSIAL	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,43%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	100%
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	100%



#### 4.4. Penyelerasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB terdiri dari 17 tujuan yang secara singkat yaitu : (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; serta (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan TPB ditingkat daerah disesuaikan dengan kewenangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dalam rangka pencapaian TPB, maka perlu adanya penyelarasian dengan dokumen perencanaan pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan TPB tersebut, dilakukan penyelarasian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dengan TPB yang disajikan pada tabel 4.15. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah khususnya di tingkat kabupaten, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat 2 TPB yang tidak dipetakan dalam penyelarasian yaitu TPB Nomor 7 yaitu Energi Bersih dan Terjangkau dan TPB Nomor 14 yaitu Ekosistem Lautan.





**Tabel 4.15.** Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

<b>PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024</b>	<b>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar	Nomor 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun
	Nomor 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
	Nomor 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
	Nomor 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
	Nomor 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
2. Optimalisasi Penanganan <i>Stunting</i>	Nomor 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
	Nomor 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
	Nomor 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Nomor 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
	Nomor 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
	Nomor 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
	Nomor 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
	Nomor 15. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nomor 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
	Nomor 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan

**Tabel 4.11. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024**

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.43	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2,100	Dinas Pertanian dan Pangan
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57	
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1,307	
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	60	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3.33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	16.7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan					
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.48	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96.15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan tahun	Nilai			Satuan	Nilai	
		Harapan Lama Sekolah		11.74		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.32	
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25.51		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95.2	
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71.25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	46.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	B	
						Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	%	15.38	
						Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10.43	
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga.	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH		
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai			
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan		
2. Optimalisasi Penanganan Stunting ;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	70.70		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	95	Dinas Kesehatan		
		Prevalensi Stunting	%	6.40	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81			
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	79			
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8.5			
							Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	85	Dinas Kesehatan
							Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.38	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
							Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	50	Dinas Kesehatan
							Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan
								Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	70	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	23.70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	4.72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH				
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai					
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		Indeks	91.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	83.28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga				
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79.40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.06	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
						Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6.5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Pertanian dan Pangan				
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	2	Dinas Pertanian dan Pangan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.41	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27.86	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	25	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	56.43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	48,128.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	263.29	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	90	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	7.27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19.23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	51.64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	60.58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	20	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HakI	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	15.13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46.43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	4	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	66.67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1,029	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7.59	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	72	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42.85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0.71	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95.82	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	30.19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	37.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	18.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.94	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	73	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52.94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	53	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	16	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	50	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,260.95	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	42.86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100	
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	48	Satuan Polisi Pamong Praja
						Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	50	
						Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100	
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.77	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
					Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72.14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah
		Opini BPK	Opini	WTP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
		Indeks SPBE	Kategori	Baik		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.07		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	90	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	3	
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1.8	Inspektorat Daerah
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.2	
					Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	1	
						Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5.26	
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	6.67	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100	
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100	
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	960	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	80.17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	450	
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	1,942	
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja $\geq 76$	%	95.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	35	
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	78	Sekretariat Daerah
						Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.12	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	87.10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	68.95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	Sekretariat Daerah
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.39	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3.67	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
						Persentase peningkatan retribusi daerah	%	3.02	
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 4.12. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Nasional

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar,	Menurunkan Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.43	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kka/kap/ hr	2,100	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57		
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kka/kap/ hr	1,307		
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	60		
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3.33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan					
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	16.7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan					
	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.48	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96.15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya sains
		Harapan Lama Sekolah	tahun	11.74		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.32		
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25.51		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95.2		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71.25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	46.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
				Akreditasi perpustakaan daerah		Nilai	B			
				Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B		%	15.38			
					Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	10.43			
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toba	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai			
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
2. Optimalisasi Penanganan Stunting ;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	70.70							
		Prevalensi Stunting	%	6.4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	95	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
						Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81			
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	79			
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8.5			
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	85	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
						Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
						Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.38	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	50	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	70				
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	23.70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	%	4.72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	83.28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	%	79.40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
					persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	83				



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.06	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHR)	%	6.5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	2	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.41	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktani/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27.86	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	25	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	56.43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	48,128.00	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	263.29	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	90	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	7.27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19.23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	51.64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	60.58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	15.13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46.43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tahura	Jumlah	4	Dinas Lingkungan Hidup	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	66.67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1,029	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7.59	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	72	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42.85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0.71	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95.82		
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	%	30.19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	37.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	18.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.94	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	73	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52.94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	53	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL				
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai						
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	16	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
					Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	50	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
					Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,260.95	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	42.86	Dinas Lingkungan Hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
					Rogram Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100						
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100						
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	48	Satuan Polisi Pamong Praja	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim									
					Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan	%	50							
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)	%	100							
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim				
					Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.77	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
									Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi					Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan					

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72.14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Opini BPK	Opini	WTP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Indeks SPBE	Kategori	Baik		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.07		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	90	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi.	%	75		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah				Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
		Program Penyelenggaraan Pengawasan				Indeks manajemen resiko	Indeks	1.8	Inspektorat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
				Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.2				
Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi				Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi				Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip				Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	1		
						Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5.26		
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	6.67		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	960	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
						Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	80.17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	Orang	450		
						Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	Orang	1,942		
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja $\geq 76$	%	95.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
						Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat	Orang	35		
						Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II	Orang	78		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL				
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai						
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
						Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	%	100						
					Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.12	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	87.10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
									Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	68.95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	Sekretariat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik				
					Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.39	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3.67	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
										Persentase peningkatan retribusi daerah	%	3.02		
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					
				Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik					



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		

Tabel 4.13. Keterkaitan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024 Mendukung Prioritas Provinsi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI				
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai						
1. Optimalisasi Pelayanan Dasar;	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2.43	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Penanganan Bencana	persentase korban bencana yang tertangani	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	Kecamatan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	50	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/ hr	2,100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
						Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/ hr	57						
						Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/ hr	1,307						
						Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/ hr	60						
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	%	40	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	90	Dinas Pertanian dan Pangan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	%	15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	%	3.33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	%	16.7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pemerataan Pendapatan Masyarakat				
					Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7.48	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	96.15	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia
						Harapan Lama Sekolah	tahun	11.74		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	95.32		
						Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25.51		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	95.2		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	71.25	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	%	46.84	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
				Akreditasi perpustakaan daerah		Nilai	B			
				Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B		%	15.38			
				Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat		%	10.43			
	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Fasilitas Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	45	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	komunitas	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada Terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Ditegakkan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, tomas dan toga	%	100	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	persentase ormas yang aktif	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	persentase potensi konflik sosial yang ditangani	%	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembangunan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	%	100	Kecamatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Optimalisasi Penanganan Stunting ;	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	70.7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	%	95	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia
		Prevalensi Stunting	%	6.4		Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	Nilai	81		
						Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	79		
						Persentase baduta <i>stunting</i>	%	8.5		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	%	85	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Pengendalian Penduduk	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80.38	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	%	50	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas Kesehatan	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
			Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	%	70					
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	%	23.70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik <i>berkondisi layak</i>	%	4.72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	%	83.28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pencab Aktif	Jumlah	29	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Sumber Daya Manusia			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan <i>keluarga yang aktif</i>	%	79.40	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia					
	persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HPK	%	83							
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.06	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	%	50	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	%	70	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	%	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	%	80	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur;	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6.5	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	%	5	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	%	2	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2.41	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27.86	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	%	25	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	%	100	Dinas Pertanian dan Pangan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pemenuhan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder	%	56.43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Ekonomi
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton/tahun	48.128.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	ton/tahun	263.29	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi	
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	%	90	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi	
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	7.27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitas kredit	%	4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengembangan UMKM	persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	%	3.45	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	19.23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	%	51.64	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	%	60.58	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Sentra IKM	sentra	1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	%	50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	%	20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	%	100	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pembangunan Ekonomi
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	%	15.13	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	jumlah	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pembinaan Sejarah	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang kelola dan atau dipublikasi	jumlah	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	46.43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI		
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai				
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase museum dalam kondisi baik	%	100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembangunan Ekonomi		
					Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpunas	Jumlah	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	Pembangunan Ekonomi		
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholders dalam pemanfaatan Tabura	Jumlah	4	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Ekonomi		
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	%	66.67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	3.9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
					Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
					Program Pengembangan Ekspor	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan bertaku	%	20	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
					Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase penggunaan produk dalam negeri (9 bahan pokok)	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
					Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	%	100	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian	Pembangunan Ekonomi		
	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	1,029	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	%	7.59	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi		
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi		
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	%	24	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi		
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	%	72	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi		
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase kebijakan penyelenggaraan penataan ruang	%	42.85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Ekonomi		
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	Nilai	0.71	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	82.57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah		
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang		Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	95.82				
							Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana LLAJ	%	30.19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Pembangunan Wilayah
							Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	%	15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
					Program Penatagunaan Tanah	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	%	40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang tertangani	%	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	%	37.50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	%	18.12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Wilayah
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71.94	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	%	73	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
		Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	%	52.94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	53	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	%	16	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	%	50	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Program Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5,260.95	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	%	42.86	Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan
					Rogram Penanggulangan Bencana	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Lingkungan
						Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100		



PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
						Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100		
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Instansi terkait	%	48	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembangunan Lingkungan
				Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan		%	50			
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non Kebakaran)		%	100			
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase titik banjir yang dimitigasi	%	58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Lingkungan
	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3.77	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	%	36	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi
					Program Hubungan Industrial	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	%	100	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, Transmigrasi	Pembangunan Ekonomi
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	72.14	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100	Seluruh Perangkat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
		Opini BPK	Opini	WTP	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Pembangunan Pemerintahan
		Maturitas SPIP	Tingkat Maturitas	Berkembang	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Pembangunan Pemerintahan
		Indeks SPBE	Kategori	Baik		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100		
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65.07		Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100		
					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	%	90	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	Pembangunan Pemerintahan
						Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	3		

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	%	75	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam penyajian laporan keuangan daerah	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	%	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	indeks manajemen resiko	Indeks	1.8	Inspektorat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
						Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1.2		
					Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	level	2+	Inspektorat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Terintegrasinya Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	Ada/tidak	Ada	Sekretariat DPRD	Pembangunan Pemerintahan
					Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan
					Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Pemerintahan
						Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	1		
						Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	%	5.26		
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	%	70	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Pemerintahan
						Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	6.67		
						Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	100		
						Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	%	100		
					Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	%	60	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	960	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembangunan Pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/ fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	%	80.17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pembangunan Pemerintahan
				Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya		Orang	450			
				Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir		Orang	1,942			
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja $\geq 76$	%	95.42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Pembangunan Pemerintahan
				Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan, sedang dan berat		Orang	35			
				Jumlah PNS yang memperoleh/ memiliki pendidikan Minimal Strata II		Orang	78			
					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
				Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah		%	100			
	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82.12	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	%	87.10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	68.95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan data kependudukan	%	80	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan	%	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembangunan Pemerintahan
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	%	100	Seluruh Kecamatan	Pembangunan Pemerintahan
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang Aktif	%	80	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	Target		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	Target		PERANGKAT DAERAH	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI
			Satuan	Nilai			Satuan	Nilai		
					Program Penataan Desa	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	%	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	Sekretariat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9.39	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	3.67	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pembangunan Pemerintahan
						Persentase peningkatan retribusi daerah	%	3.02		
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	%	100	Sekretariat Daerah	Pembangunan Pemerintahan
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase kerja sama yang diimplementasi	%	35	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembangunan Pemerintahan



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 5.1 Rencana Program Prioritas Pembangunan

RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya serta isu strategis pembangunan yang ada. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan untuk kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan.

Setiap program, kegiatan, dan subkegiatan diharapkan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Tentu saja rencana pembangunan yang telah disusun tidak akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di Kabupaten Bangka Barat, mengingat keterbatasan potensi anggaran. Namun demikian, melalui program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan secara langsung dapat menyelesaikan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Pada tahapan Penetapan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 telah dilakukan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) dan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga Pemerintah Daerah wajib memutakhirkan data pembangunan dan keuangan daerah untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Pelaksanaan perumusan program/kegiatan/subkegiatan diklasifikasikan atas program penunjang urusan pemerintahan daerah, urusan wajib, urusan pilihan, unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur pemerintahan umum serta unsur kewilayahan.

##### 5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah, yang merupakan program untuk pelaksanaan kegiatan rutin pada setiap perangkat daerah. Program ini terdiri dari beberapa kegiatan rutin perangkat daerah antara lain kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi



barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah (digunakan bagi perangkat daerah yang memiliki penerimaan daerah) administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah serta peningkatan pelayanan BLUD (digunakan bagi perangkat daerah yang menggunakan sistem BLUD).

Namun ada beberapa kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah yang diperuntukkan khusus untuk pelaksanaan rutin pada unsur pendukung urusan pemerintahan (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) antara lain kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah, penataan organisasi, pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan, layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD, layanan administrasi DPRD penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

#### 5.1.2. Program Urusan Wajib

##### 1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan;
- 2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- 3) Program Pengembangan Kurikulum.

##### 2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan sub unit organisasi yaitu sebagai berikut :

###### a. Dinas Kesehatan dengan 4 (empat) program strategis yaitu:

- 1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- 3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
- 4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

###### b. Sub Unit Organisasi dalam hal ini RSUD Sejian Setason dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat".

###### c. Sub Unit Organisasi dalam hal ini Puskesmas Muntok, Puskesmas Simpangteritip, Puskesmas Kundi, Puskesmas Jebus, Puskesmas Puput, Puskesmas Sekar Biru,



Puskesmas Kelapa, serta Puskesmas Tempilang memiliki 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat".

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 10 program strategis yaitu :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
- 3) Program Penyelenggaraan Jalan;
- 4) Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- 5) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 6) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 8) Program Penataan Bangunan Gedung;
- 9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; dan
- 10) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Perumahan;
- 2) Program Kawasan Permukiman;
- 3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- 4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki 1 (satu) program strategis yaitu Program Penanggulangan Bencana;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan 2 (dua) program strategis yaitu :



- 1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
  - 2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pemberdayaan Sosial;
  - 2) Program Rehabilitasi Sosial;
  - 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
  - 4) Program Penanganan Bencana.
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  - 2) Program Penempatan Tenaga Kerja; dan
  - 3) Program Hubungan Industrial.
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - 2) Program Perlindungan Perempuan;
  - 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
  - 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
  - 6) Program Perlindungan Khusus Anak.
9. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
- Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :





- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan; dan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan 4 (empat) program strategis yaitu:

- 1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- 2) Program Pengelolaan Tanah Kosong;
- 3) Program Penatagunaan Tanah; dan
- 4) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 9 (sembilan) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- 4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 8) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat; dan
- 9) Program Pengelolaan Persampahan.

12. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Pendaftaran Penduduk;



- 2) Program Pencatatan Sipil;
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penataan Desa;
- 2) Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- 3) Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan
- 4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

14. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengendalian Penduduk;
- 2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
- 3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

15. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dengan dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan
- 2) Program Pengelolaan Pelayaran.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- 2) Program Aplikasi Informatika.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah



Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 7 (tujuh) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- 2) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- 4) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 5) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM);  
dan
- 7) Program Pengembangan UMKM.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal Daerah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 2) Program Promosi Penanaman Modal;
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal; dan
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

19. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- 2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan
- 3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

20. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral".

21. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi".



22. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengembangan Kebudayaan;
- 2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- 3) Program Pembinaan Sejarah;
- 4) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
- 5) Program Pengelolaan Permuseuman.

23. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 2 (dua) program strategis yaitu:

- 1) Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- 2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

24. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Arsip;
- 2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip; dan
- 3) Program Perizinan Penggunaan Arsip.

5.1.3. **Program Urusan Pilihan**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- 4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan 4 (empat) program strategis sebagai berikut :



- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
  - 2) Program Pemasaran Pariwisata;
  - 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
- Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dengan 6 (enam) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
  - 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
  - 3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
  - 5) Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
  - 6) Program Penyuluhan Pertanian.
4. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
- Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya".
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
  - 2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - 3) Program Pengembangan Ekspor;
  - 4) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
  - 5) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.
6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
- Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dengan 3 (tiga) program strategis sebagai berikut :
- 1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
  - 2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
  - 3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.



#### 5.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 1. Bidang Perencanaan

Bidang Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- 2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

##### 2. Bidang Penelitian

Bidang Penelitian dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Penelitian dan Pengembangan Daerah".

##### 3. Bidang Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

###### a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

###### b. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pengelolaan Pendapatan Daerah".

##### 4. Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Kepegawaian Daerah".

##### 5. Bidang Pendidikan Dan Pelatihan



Bidang Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Pengembangan Sumber Daya Manusia".

#### 5.1.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung urusan pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

##### 1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- 2) Program Perekonomian dan Pembangunan.

##### 2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah melaksanakan 1 (satu) program strategis yaitu "Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD".

#### 5.1.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Unsur Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan 2 (dua) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan; dan
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

#### 5.1.7. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- 2) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
- 5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

#### 5.1.8. Unsur Kewilayahan



Unsur Kewilayahan dilaksanakan oleh 6 (enam) perangkat daerah yaitu Kecamatan Muntok, Kecamatan Simpangteritip, Kecamatan Kelapa, Kecamatan Jebus, Kecamatan Parititga serta Kecamatan Tempilang.

1. Kecamatan Muntok

Kecamatan Muntok melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Kecamatan Simpangteritip

Kecamatan Simpangteritip melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Kecamatan Jebus

Kecamatan Jebus melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

4. Kecamatan Kelapa

Kecamatan Kelapa melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

5. Kecamatan Tempilang





Kecamatan Tempilang melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

6. Kecamatan Parititga

Kecamatan Parititga melaksanakan 5 (lima) program strategis sebagai berikut :

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

## 5.2 Pendanaan Rencana Program Prioritas Pembangunan

Program prioritas yang ditetapkan sudah memiliki pagu indikatif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2024. Pagu indikatif pada penetapan RKPD ini sudah mencantumkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah RKPD Tingkat Kecamatan, Pokok-pokok Pikiran DPRD, hasil musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten serta program-program prioritas pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat. Rincian pagu indikatif berdasarkan urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 5.3 Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2024.

**Tabel 5.1** Pagu Indikatif Berdasarkan Urusan Tahun 2024

No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
<b>A</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		<b>630.424.392.675,00</b>
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	262.472.153.250,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	191.322.250.425,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.641.294.000,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan	14.188.020.000,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.991.630.000,00



No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.461.400.000,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.347.645.000,00
<b>B</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>		<b>105.184.285.268,00</b>
1	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.029.110.000,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.177.500.000,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan	15.167.242.000,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.850.000.000,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	15.146.476.280,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.624.544.400,00
7	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	1.228.560.000,00
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	890.876.000,00
9	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	11.182.796.500,00
10	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.780.700.000,00
11	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	6.084.907.300,00
12	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	919.545.000,00
13	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	3.068.000.000,00
14	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.000.000,00
15	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00
16	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.842.579.288,00
17	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.509.548.500,00
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.900.000,00



No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
<b>C</b>	<b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>		<b>13.097.436.530,00</b>
1	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.762.997.000,00
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.841.200.000,00
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan	2.443.281.000,00
4	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup	228.674.580,00
5	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	1.133.338.950,00
6	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian	687.945.000,00
<b>D</b>	<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>		<b>98.397.229.953,68</b>
1	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	37.347.303.110,00
		Sekretariat DPRD	61.049.926.843,68
<b>E</b>	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		<b>152.723.072.166,00</b>
1	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.364.193.500,00
2	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	351.201.805,00
3	Keuangan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	125.776.992.661,00
		Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.855.665.000,00
4	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	10.207.819.200,00
5	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	1.167.200.000,00
<b>F</b>	<b>Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan</b>		<b>6.834.509.000,00</b>
1	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	Inspektorat Daerah	6.834.509.000,00
<b>G</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>		<b>30.992.560.800,00</b>
1	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Muntok	11.554.570.000,00
		Kecamatan Simpangteritip	2.930.465.000,00
		Kecamatan Jebus	4.147.520.800,00
		Kecamatan Parittiga	3.418.855.000,00
		Kecamatan Kelapa	5.560.095.000,00
		Kecamatan Tempilang	3.381.055.000,00
<b>H</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>		<b>42.635.909.850,00</b>



No	Urusan	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Unsur Pemerintahan Umum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.635.909.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.080.289.396.242,68</b>



**Tabel 5.2** Pagu Indikatif Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	265.540.153.250,00
2	Dinas Kesehatan	191.322.250.425,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	149.491.294.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	25.370.816.500,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.991.630.000,00
6	Kesatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	11.461.400.000,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.576.205.000,00
8	Dinas Penanaman Modal, PPTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.948.655.000,00
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.068.376.000,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	17.610.523.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	15.375.150.860,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.624.544.400,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.380.700.000,00
14	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.683.779.288,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.591.448.500,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.762.997.000,00
17	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	7.906.191.250,00
18	Sekretariat Daerah	37.347.303.110,00
19	Sekretariat DPRD	61.049.926.843,68
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah	6.715.395.305,00
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	125.776.992.661,00
22	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.855.665.000,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah	11.375.019.200,00
24	Inspektorat Daerah	6.834.509.000,00
25	Kecamatan Muntok	11.554.570.000,00
26	Kecamatan Simpangteritip	2.930.465.000,00
27	Kecamatan Jebus	4.147.520.800,00
28	Kecamatan Parittiga	3.418.855.000,00
29	Kecamatan Kelapa	5.560.095.000,00
30	Kecamatan Tempilang	3.381.055.000,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.635.909.850,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.080.289.396.242,68</b>

TABEL 5.3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024  
KABUPATEN BANGKA BARAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target						
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									630,424,392,675.00	630,424,392,675.00	559,002,204,913.00				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									262,472,153,250.00	262,472,153,250.00	251,781,138,000.00				
1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA	1	DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA									262,472,153,250.00	262,472,153,250.00	251,781,138,000.00				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAMP Opot BPR Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	194,481,351,050.00	194,481,351,050.00	177,425,275,000.00	Mempertukar stabilitas Polihukam dan transformasi pelayanan publik	
1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
1	1.2.01	1	1.2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.01	2	1.2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.01	3	1.2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.01	6	1.2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.01	7	1.2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	192,132,891,050.00	192,132,891,050.00	175,000,900,000.00			
1	1.2.02	1	1.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,553 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,553 Orang/bulan	192,131,991,050.00	192,131,991,050.00	175,000,000,000.00		APBD	
1	1.2.02	5	1.2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.02	8	1.2.02	0008	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.02	8	1.2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
1	1.2.03	1	1.2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	54,300,000.00	54,300,000.00	13,400,000.00			
1	1.2.05	02	1.2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	12,500,000.00		APBD	
1	1.2.05	03	1.2.05	0003	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.05	10	1.2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	18,000,000.00	18,000,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.05	11	1.2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	72 orang	36,000,000.00	36,000,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	499,300,000.00	499,300,000.00	631,305,000.00			
1	1.2.06	1	1.2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,000,000.00	9,000,000.00	5,040,000.00		APBD	
1	1.2.06	3	1.2.06	0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11,000,000.00	11,000,000.00	8,000,000.00		APBD	
1	1.2.06	4	1.2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67,000,000.00	67,000,000.00	99,165,000.00		APBD	
1	1.2.06	5	1.2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	47,000,000.00	47,000,000.00	30,000,000.00		APBD	
1	1.2.06	6	1.2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	13,800,000.00		APBD	
1	1.2.06	7	1.2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	74,000,000.00	74,000,000.00	100,000,000.00		APBD	
1	1.2.06	9	1.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	288,000,000.00	288,000,000.00	375,000,000.00		APBD	
1	1.2.09	10	1.2.09	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
1	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
1	1.2.07	10	1.2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
1	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	1,695,870,000.00	1,695,870,000.00	1,732,870,000.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1	1	12.08	1	1	12.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1	1	12.08	2	1	12.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	158,250,000.00	158,250,000.00	158,250,000.00		APBD
1	1	12.08	3	1	12.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	13,000,000.00	13,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1	1	12.08	4	1	12.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,522,620,000.00	1,522,620,000.00	1,522,620,000.00		APBD
1	1	12.09	1	1	12.09	0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	77,190,000.00	77,190,000.00	25,000,000.00		APBD
1	1	12.09	2	1	12.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	50 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	50 unit	15,600,000.00	15,600,000.00	8,000,000.00		APBD
4	02	01	2.09	06	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit			2,000,000.00		APBD
1	1	12.09	9	1	12.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	10 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	10 unit	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1	1	12.09	10	1	12.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	19 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi	19 unit	11,590,000.00	11,590,000.00	5,000,000.00		APBD
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,48 tahun	Rata-rata Lama Sekolah	11,74 tahun					Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
									Harapan Lama Sekolah	25,51 %	Perentase Sekolah Terakreditasi A	25,51 %					
1	1	2.01	3	1	2.01	0003	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	96.15%	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	95.32%	96,958,652,200.00	67,958,652,200.00	74,310,863,000.00		
1	1	2.01	2	1	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kecamatan Kelapa dan Desa Simpang Yul Kecamatan Tempelano, SD 16 Dusun Kajek Desa Berang Kecamatan Simpang Tertip, Kab. Bangka Barat	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan menengah	95.20%	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan menengah	95.20%	37,907,400,000.00	37,907,400,000.00	41,063,721,000.00		
									Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.75%	Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94.75%	800,000,000.00	800,000,000.00			Reses
									Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 unit	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 unit	200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
									SD 10 templiang kecamatan templiang, Kab. Bangka Barat	1 unit	SDN 03 simpang tertip Desa Kundi kecamatan simpang tertip, Kab. Bangka Barat	1 unit	200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
									SDN 15 kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat, Simpang Tempelano	1 unit	SDN 2 Kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat	1 Ruang	200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
1	1	2.01	3	1	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200,000,000.00	200,000,000.00			
1	1	2.01	1	1	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	2,474,600,000.00	2,474,600,000.00			
									Pembuatan Sanitasi sekolah SD (SD N 2 Jebus ) RT 007 Dusun Ketap Desa Ketap, Kab. Bangka Barat	100,000,000.00	Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SD 16 Jebus Jalan Kampak RT 03 RW 03 Dusun Kampak Desa Jebus, Kab. Bangka Barat	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00			Musren
									Pembangunan sumbu bor SDN 8 Jebus Dusun Uhar Desa Pebaru RT 03/RW 01, Kab. Bangka Barat	50,000,000.00	Pembangunan sumbu bor SDN 8 Jebus Dusun Uhar Desa Pebaru RT 03/RW 01, Kab. Bangka Barat	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD 4 Kelapa (Desa Pusuk Rt. 09, Kab. Bangka Barat)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD 4 Kelapa (Desa Pusuk Rt. 09, Kab. Bangka Barat)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 7 Kelapa (Desa Kayu Arang, Kab. Bangka Barat)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 7 Kelapa (Desa Kayu Arang, Kab. Bangka Barat)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 11 Kelapa (Desa Kacung Kec. Kelapa)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 11 Kelapa (Desa Kacung Kec. Kelapa)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah (SDN 19 Tanjung Ular, Kecamatan. Mentok)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah (SDN 19 Tanjung Ular, Kecamatan. Mentok)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 18 Mentok (Dusun Jungku), Kab. Bangka Barat	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 18 Mentok (Dusun Jungku), Kab. Bangka Barat	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD 11 Muntok (Desa Air Limau Kec. Mentok)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD 11 Muntok (Desa Air Limau Kec. Mentok)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD 10 Muntok (Dsn Daya Baru Kec. Mentok)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD 10 Muntok (Dsn Daya Baru Kec. Mentok)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD 7 Paritiga (RT 05 Desa Kapit, Kec. Paritiga)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD 7 Paritiga (RT 05 Desa Kapit, Kec. Paritiga)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD 16 Paritiga	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD 16 Paritiga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD 10 Paritiga	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD 10 Paritiga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SD (Desa Air Menduyung Dusun Anyai RT 001, Kab. Bangka Barat)	200,000,000.00	Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SD (Desa Air Menduyung Dusun Anyai RT 001, Kab. Bangka Barat)	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SD Negeri 11 Simpang Tertip (RT 07 Dusun 02 Desa Pangek, Kab. Bangka Barat)	50,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SD Negeri 11 Simpang Tertip (RT 07 Dusun 02 Desa Pangek, Kab. Bangka Barat)	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
									Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 7 Tempelano, Kab. Bangka Barat	40,000,000.00	Pembuatan sumbu bor sekolah SDN 7 Tempelano, Kab. Bangka Barat	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00			Musren
									Pembangunan Sanitasi (Toilet) SD 18 Simpangteritiga	100,000,000.00	Pembangunan Sanitasi (Toilet) SD 18 Simpangteritiga	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00			Renja
									Pembangunan parkir sekolah ± 12 M lebar 4 Meter Panjang 12 Meter.	25,000,000.00	Pembangunan parkir sekolah ± 12 M lebar 4 Meter Panjang 12 Meter.	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00			Reses
									Pembangunan pagar SD 12 desa sangu kecamatan templiang 52.5 x 27.30 meter kivi 25 m	160,000,000.00	Pembangunan pagar SD 12 desa sangu kecamatan templiang 52.5 x 27.30 meter kivi 25 m	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00			Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokol Ukur dan Target Lama		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target						
	Pembangunan pagar sekolah SD 15 Desa Cupat		Pembangunan pagar sekolah SD 15 Desa Cupat					Desa Cupat Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat				100,000,000.00	100,000,000.00				Reses	
	Pembangunan Pagar SD 12 Kecamatan Tempilang panjang 52,5 M lebar 27,3 M Kiri, 25 M		Pembangunan Pagar SD 12 Kecamatan Tempilang panjang 52,5 M lebar 27,3 M Kiri, 25 M					SD 12 Kecamatan Tempilang, Kab. Bangka Barat				209,600,000.00	209,600,000.00				Reses	
	Pembangunan pagar		Pembangunan pagar					SD 9 Desa Rambat Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat				400,000,000.00	400,000,000.00				Reses	
	Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SD sebanyak 6 unit		Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SD sebanyak 6 unit					SDN 03 simpang teritip desa kundi kecamatan jampang teritip, Kab. Bangka Barat				108,000,000.00	108,000,000.00				Reses	
	Pembangunan pagar		Pembangunan pagar					SDN 03 desa kundi kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat				80,000,000.00	80,000,000.00				Reses	
	Pembangunan Mushola		Pembangunan Mushola					SDN 7 Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang				200,000,000.00	200,000,000.00				Renja	
1	2.2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1	2.2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Desa Pangkal Beras	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang	1,425,000,000.00	1,425,000,000.00				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD 12 Kelapa (RT 04 Dusun Pangkal Beras, Kab. Bangka Barat)				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD 12 Kelapa (RT 04 Dusun Pangkal Beras, Kab. Bangka Barat)	Desa Mancung					200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
			Rehabilitasi ruang kelas SD 6 Kelapa ( Desa Mancung, Kab. Bangka Barat )				Rehabilitasi ruang kelas SD 6 Kelapa ( Desa Mancung, Kab. Bangka Barat )	Desa Air Gantang					100,000,000.00	100,000,000.00				Musren
			Rehabilitasi ruang kelas SD N 10 Paritiga, Kab. Bangka Barat				Rehabilitasi ruang kelas SD N 10 Paritiga, Kab. Bangka Barat	Desa Peradong					100,000,000.00	100,000,000.00				Renja
			Rehabilitasi ruang kelas SD 18 Simpangteritip				Rehabilitasi ruang kelas SD 18 Simpangteritip	SD 8 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat		1 ruang			100,000,000.00	100,000,000.00				Reses
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SD Negeri 19 Desa Air Nyatoh Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat		1 ruang			100,000,000.00	100,000,000.00				Reses
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SD 11 Desa Air Limau Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		2 ruang			250,000,000.00	250,000,000.00				Reses
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SD 15 Desa Cupat Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat		1 Ruang			50,000,000.00	50,000,000.00				Reses
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	SDN 5 Desa Tanjung Niur, Kecamatan Terrelasa		3 ruang			400,000,000.00	400,000,000.00				Renja
1	2.2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1	2.2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Desa Pebar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	9 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	59,000,000.00	59,000,000.00				
			Rehabilitasi Sanitasi sekolah (Toilet) SDN 8 Jebus Dusun Unar Desa Pebar RT 03/BW 01, Kab. Bangka Barat				Rehabilitasi Sanitasi sekolah (Toilet) SDN 8 Jebus Dusun Unar Desa Pebar RT 03/BW 01, Kab. Bangka Barat	Desa Air Putih					19,000,000.00	19,000,000.00				Musren
1	2.2.01	11	Pengadaan Mebel Sekolah	1	2.2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	9 Paket	708,500,000.00	708,500,000.00				
			Pengadaan Mebelair siswa (SDN 24 Air Jibu Dusun I, Kab. Bangka Barat )				Pengadaan Mebelair siswa (SDN 24 Air Jibu Dusun I, Kab. Bangka Barat )	Desa Bul					75,000,000.00	75,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair guru SDN 18 SDN 17 SDN 13 DAN SDN 19 Paritiga , Kab. Bangka Barat				Pengadaan Mebelair guru SDN 18 SDN 17 SDN 13 DAN SDN 19 Paritiga , Kab. Bangka Barat	Desa Teluk Limau					200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa SD SD N 11 Paritiga, Kab. Bangka Barat				Pengadaan Mebelair siswa SD SD N 11 Paritiga, Kab. Bangka Barat	Desa Air Gantang					45,000,000.00	45,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa SD Dusun Jebu Darat SDN 12 (40 SET) , Kab. Bangka Barat				Pengadaan Mebelair siswa SD Dusun Jebu Darat SDN 12 (40 SET) , Kab. Bangka Barat	Desa Kelabat					60,000,000.00	60,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa SD 14 Paritiga Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kab. Bangka Barat				Pengadaan Mebelair siswa SD 14 Paritiga Dusun Jebu Laut, Desa Kelabat, Kab. Bangka Barat	Desa Kelabat					60,000,000.00	60,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa SD 10 Sp. ( RT 03 Dusun I Simpanggong, Kab. Bangka Barat )				Pengadaan Mebelair siswa SD 10 Sp. ( RT 03 Dusun I Simpanggong, Kab. Bangka Barat )	Desa simpanggong					75,000,000.00	75,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa SD 2 Sp. Teritip ( Dusun II Desa Pelangas, Kab. Bangka Barat )				Pengadaan Mebelair siswa SD 2 Sp. Teritip ( Dusun II Desa Pelangas, Kab. Bangka Barat )	Desa Pelangas					84,000,000.00	84,000,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa SD 17 SIMPANG TERITIP (Dusun Rumpis Desa Berana, Kab. Bangka Barat)				Pengadaan Mebelair siswa SD 17 SIMPANG TERITIP (Dusun Rumpis Desa Berana, Kab. Bangka Barat)	Desa Berang					49,500,000.00	49,500,000.00				Musren
			Pengadaan Mebelair siswa Dusun Bubung Tujuh dan Dusun Sangku SDN 12 Tempilang (20 set), SDN 15 Tempilang (20 set), Kab. Bangka Barat				Pengadaan Mebelair siswa Dusun Bubung Tujuh dan Dusun Sangku SDN 12 Tempilang (20 set), SDN 15 Tempilang (20 set), Kab. Bangka Barat	Desa Sangku					60,000,000.00	60,000,000.00				Musren
1	2.2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	1	2.2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11.415 Unit	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	11.415 Paket	399,770,000.00	399,770,000.00	406,050,000.00			APBD
1	2.2.01	21	Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	1	2.2.01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	350 Peserta Didik	141,000,000.00	141,000,000.00	100,000,000.00			APBD
1	2.2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1	2.2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	136 Satuan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	136 Satuan Pendidikan	1,800,000.00	1,800,000.00	50,000,000.00			APBD
1	2.2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1	2.2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	255 Peserta Didik	253,500,000.00	253,500,000.00	265,000,000.00			APBD
1	2.2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	2.2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Dasar	594 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Dasar	594 Orang	7,428,740,000.00	7,428,740,000.00	15,125,740,000.00			APBD
1	2.2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1	2.2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakatan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	60 orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenakatan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi	60 orang	81,550,000.00	81,550,000.00	292,500,000.00			APBD
1	2.2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1	2.2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	136 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	136 Satuan Pendidikan	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00			APBD
1	2.2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	2.2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	136 Satuan Pendidikan	23,852,940,000.00	23,852,940,000.00	24,684,431,000.00			APBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur						Target
1	1	2.2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Orang	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	136 Orang	16,000,000.00	16,000,000.00	75,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	1	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>		<b>Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>80.85%</b>	<b>Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 13-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>80.85%</b>	<b>14,017,932,200.00</b>	<b>14,017,932,200.00</b>	<b>16,386,242,000.00</b>					
1	1	2.2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan, Desa Beto Laut	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4 Unit	210,400,000.00	210,400,000.00	-			Musren		
				Pembuatan sumur bor sekolah SMP 6 Dusun I Tanjung Punal, Kab. Bangka Barat		Pembuatan sumur bor sekolah SMP 6 Dusun I Tanjung Punal, Kab. Bangka Barat									Musren		
				Pembuatan sumur bor sekolah SMP 3 Sp. Teritip		Pembuatan sumur bor sekolah SMP 3 Sp. Teritip									Musren		
				Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SMP 5 Sp. Teritip Dusun Rajek Desa Berano, Kab. Bangka Barat		Pembangunan Sanitasi sekolah (Toilet) SMP 5 Sp. Teritip Dusun Rajek Desa Berano, Kab. Bangka Barat									Musren		
				Pembuatan sumur bor sekolah SMP 2 Tempilang (Dusun Dam III, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat)		Pembuatan sumur bor sekolah SMP 2 Tempilang (Dusun Dam III, Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat)									Musren		
1	1	2.2.02	14	Rahabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah		Rahabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	SMP 4 Simpangteritip	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dirahabilitasi Sedang/berat	3 Ruang	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Dirahabilitasi Sedang/berat	3 Ruang	300,000,000.00	300,000,000.00			Renja	
1	1	2.2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah		Pengadaan Mebel Sekolah	Desa Mancung	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	2 Paket	226,950,000.00	226,950,000.00			Musren	
				Pengadaan Mebelair siswa SMP NEGERI 4 KELAPA (Desa Mancung, Kelapa, Kab. Bangka Barat)		Pengadaan Mebelair siswa SMP NEGERI 4 KELAPA (Desa Mancung, Kelapa, Kab. Bangka Barat)	Desa Air Putih		56 set		56 set	84,000,000.00	84,000,000.00			Musren	
				Pengadaan Mebelair siswa SMP 5 Mantok, (Desa Air Putih Kab. Bangka Barat)		Pengadaan Mebelair siswa SMP 5 Mantok, (Desa Air Putih Kab. Bangka Barat)	Desa Air Putih		50 set		50 set	75,000,000.00	75,000,000.00			Musren	
				Pengadaan meja dan kursi sekolah di SMP Negeri 4 sebanyak 60 set		Pengadaan meja dan kursi sekolah di SMP Negeri 4 sebanyak 60 set	SMP Negeri 4 desa bait, Kab. Bangka Barat		60 set		60 set	60,000,000.00	60,000,000.00			Reses	
1	1	2.2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2.800 Paket	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	2.800 Paket	135,410,000.00	135,410,000.00	137,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	30	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 unit	55,792,200.00	55,792,200.00	37,110,000.00		APBD	
1	1	2.2.02	32	Penyelesaian Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	300 Peserta Didik	151,000,000.00	151,000,000.00	180,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.257 Paket	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.257 Paket	62,850,000.00	62,850,000.00	62,850,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.640 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1.640 Peserta Didik	1,800,000.00	1,800,000.00	15,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	193 Peserta Didik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik	193 Peserta Didik	253,500,000.00	253,500,000.00	265,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	204 Orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	204 Orang	2,418,280,000.00	2,418,280,000.00	5,395,080,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	39,300,000.00	39,300,000.00	127,500,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	34 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	34 Satuan Pendidikan	59,000,000.00	59,000,000.00	35,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	10,094,000,000.00	10,094,000,000.00	10,081,702,000.00			APBD		
1	1	2.2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	34 Orang	9,650,000.00	9,650,000.00	50,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.03	1	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		<b>Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>	<b>90.25%</b>	<b>Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>	<b>90.25%</b>	<b>9,020,820,000.00</b>	<b>9,020,820,000.00</b>	<b>10,038,560,000.00</b>			
1	1	2.2.03	0003	Rahabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Rahabilitasi Sedang/berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	TK Negeri Pembina di Paritjiga, Kab. Bangka Barat	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dirahabilitasi Sedang/berat	1 Unit	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dirahabilitasi Sedang/berat	1 Unit	40,000,000.00	40,000,000.00	-			
1	1	2.2.03	0004	Rahabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Rahabilitasi Sedang/berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	TK Negeri Pembina di Kelapa, Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dirahabilitasi Sedang/berat	1 unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dirahabilitasi Sedang/berat	1 unit	100,000,000.00	100,000,000.00	-			
1	1	2.2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD		Pengadaan Mebel PAUD	Desa Kacung	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9 Paket	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	9 Paket	9,500,000.00	9,500,000.00	-		Musren	
				Pengadaan Mebelair siswa PAUD (TK SATAP SDN 11 KELAPA, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa)		Pengadaan Mebelair siswa PAUD (TK SATAP SDN 11 KELAPA, Desa Kacung, Kecamatan Kelapa)	Desa Kacung		600 Paket		600 Paket	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00		APBD	
1	1	2.2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0 Peserta Didik			145,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	319 orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	319 orang	4,516,700,000.00	4,516,700,000.00	5,488,300,000.00			APBD		
1	1	2.2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 orang	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	167 Satuan Pendidikan	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00			APBD		
1	1	2.2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	167 Satuan Pendidikan	4,057,620,000.00	4,057,620,000.00	4,108,260,000.00			APBD		
1	1	2.2.04	1	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>		<b>Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan nonformal</b>	<b>4.95%</b>	<b>Tingkat Partisipasi Warganegara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan nonformal</b>	<b>4.95%</b>	<b>7,012,500,000.00</b>	<b>7,012,500,000.00</b>	<b>6,822,340,000.00</b>			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	447,300,000.00	447,300,000.00	969,500,000.00		
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	55,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00	12,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55,000,000.00	55,000,000.00	70,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian							Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	35,000,000.00	35,000,000.00	60,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	65,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,000,000.00	270,000,000.00	550,000,000.00		APBD
1 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		APBD
1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 02 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	3,513,820,000.00	3,513,820,000.00	3,728,020,000.00		
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	139,800,000.00	139,800,000.00	155,000,000.00		APBD
1 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	60,000,000.00		APBD
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3,365,020,000.00	3,365,020,000.00	3,511,020,000.00		APBD
1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	67,480,000.00	67,480,000.00	347,500,000.00		
1 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak	5 unit	11,250,000.00	11,250,000.00	97,500,000.00		APBD
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	30,000,000.00	30,000,000.00	250,000,000.00		APBD
1 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 unit	26,230,000.00	26,230,000.00			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Optimalisasi Penanaman Sumbu	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7			Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95.00%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95.00%	41,007,080,000.00	41,007,080,000.00	60,359,012,390.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
						Prevalensi Stunting	6,4 %			Tingkat Kepuasan layanan kesehatan	81	Tingkat Kepuasan layanan kesehatan	81					
										Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79					
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							Persentase baduta zjutring	8.50%	Persentase baduta zjutring	8.50%	6,275,925,000.00	6,289,915,000.00	13,785,000,000.00		
										Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%					
										Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%					
										Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan berdasarkan sesuai standar	74%	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan berdasarkan sesuai standar	74%					
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya					Kecamatan Kelapa		Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 unit	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00		
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 02 02 2.01 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas							Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	0 Unit	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit	0 Unit			400,000,000.00		APBD
1 02 02 2.01 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 02 02 2.01 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					Desa Semulut dan Desa Peradong		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Unit	397,000,000.00	397,000,000.00			Musren dan Renja
1 02 02 2.01 11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	1 02 02 2.01 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan							Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0 Unit			400,000,000.00		APBD
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 01 2.07 0003	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya							Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	7 Unit	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	7 Unit	723,925,000.00	723,925,000.00	500,000,000.00		Musren
	- Pagar pustu Desa Pusuk		- Pagar pustu Desa Pusuk					Desa Pusuk										
	- Conblok pustu Desa Pusuk		- Conblok pustu Desa Pusuk					Desa Pusuk										
	- Sumur Bor Pustu Desa Air Bulin		- Sumur Bor Pustu Desa Air Bulin					Desa Air Bulin										
	- Conblok pustu Desa Karang		- Conblok pustu Desa Karang					Desa Karang										
	- Conblok pustu Desa Sinar Sari		- Conblok pustu Desa Sinar Sari					Desa Sinar Sari										
	- Sumur Bor Pustu Desa Belo Laut		- Sumur Bor Pustu Desa Belo Laut					Desa Belo Laut										
	- Sumur Bor Poskesdes Desa Air Belo		- Sumur Bor Poskesdes Desa Air Belo					Desa Air Belo										
	- Pagar puskesmas Kundil		- Pagar puskesmas Kundil					Desa Kundil										
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	0 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	0 Unit			2,000,000,000.00		DAK
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan							Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket			3,000,000,000.00		DAK
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai									Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	1 Paket					2,000,000,000.00		DAK
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan							Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	250 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	250 Unit	120,000,000.00	120,000,000.00	200,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 02 02 2.01 21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 02 02 2.01 0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan	1 Paket	1 Paket	35,000,000.00	35,000,000.00	250,000,000.00		DAK	
		1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12,410 Keluarga	12,410 Keluarga		13,990,000.00	35,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	34,719,955,000.00	34,705,965,000.00	46,541,012,390.00			
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%						
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	100%						
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%						
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian zoonosis	62.5%	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	62.5%						
									Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	108340	108340						
									Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100%	100%						
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	100%						
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,641 Orang	3,641 Orang	9,192,000.00	9,192,000.00	485,000,000.00	SPM-Lokus AKI AKB	APBD	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,463 Orang	3,463 Orang	11,925,000.00	11,925,000.00	520,000,000.00	SPM-Lokus AKI AKB	APBD	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,425 Orang	3,425 Orang	11,925,000.00	11,925,000.00	490,000,000.00	SPM-Lokus AKI AKB	APBD	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11,541 Orang	11,541 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	360,000,000.00	SPM-Lokus AKI AKB	APBD	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	40,418 Orang	40,418 Orang	14,260,000.00	14,260,000.00	380,000,000.00	SPM	APBD	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133,754 Orang	133,754 Orang	300,000.00	300,000.00	97,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	22,420 Orang	22,420 Orang	32,600,000.00	32,600,000.00	120,000,000.00	SPM	APBD	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	48,523 Orang	48,523 Orang	310,000.00	310,000.00	70,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus						Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3,968 Orang	3,968 Orang	300,000.00	300,000.00	20,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	487 Orang	487 Orang	6,500,000.00	6,500,000.00	18,012,390.00		APBD	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	1,980 Orang	1,980 Orang	35,500,000.00	35,500,000.00	165,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	4,862 Orang	4,862 Orang	60,000,000.00	60,000,000.00	250,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	1 02 02 2.02 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1 Dokumen	1 Dokumen	520,000.00	520,000.00	20,000,000.00		APBD	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	110,600,000.00	110,600,000.00	500,000,000.00	Optimalisasi Penanganan Stunting	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target					
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	2 Dokumen	12,000,000.00	12,000,000.00	40,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	2 Dokumen	95,000,000.00	95,000,000.00	150,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	45,000,000.00	45,000,000.00	10,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional/Akupunktur/Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional/Akupunktur/Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupunktur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	1 Dokumen	12,000,000.00	12,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	201,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1 Dokumen	348,000,000.00	348,000,000.00	450,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	2 Dokumen	128,000,000.00	128,000,000.00	580,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	33,064,000,000.00	33,064,000,000.00	40,000,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 Dokumen	34,200,000.00	34,200,000.00	80,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	8 Unit	Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota	8 Unit	183,900,000.00	183,900,000.00	450,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 38	Penyiapan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 02 02 2.02 0038	Penyiapan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						Jumlah public safety center (psc 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu	1 Unit	Jumlah public safety center (psc 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu	1 Unit	365,900,000.00	365,900,000.00	1,000,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	1 02 02 2.01 0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12.410 Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	12.410 Keluarga	13,990,000.00		35,000,000.00		APBD
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	839 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	839 Orang	11,000,000.00	11,000,000.00			
1 02 02 2.02 41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHV)	1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHV)						Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32 Orang	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	32 Orang	5,000,000.00	5,000,000.00			
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	109 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	109 Orang	5,000,000.00	5,000,000.00			
1 02 02 2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1 02 02 2.03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi						Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas	92%	Persentase Puskesmas yang mampu menyediakan laporan melalui Sistem Informasi Puskesmas	92%	600,000.00	600,000.00	11,000,000.00		
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	2 Dokumen	300,000.00		8,000,000.00		APBD
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kesehatan		300,000.00	600,000.00	3,000,000.00		APBD
1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengurusan mutu pelayanan kesehatan	100%	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pengurusan mutu pelayanan kesehatan	100%	10,600,000.00	10,600,000.00	22,000,000.00		
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	1 Unit	3,600,000.00	3,600,000.00	15,000,000.00		APBD
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (nm)	8 Unit	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (nm) pelayanan kesehatan	8 Unit	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00		
1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1 02 03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7		Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	6,994,395,600.00	6,994,395,600.00	7,144,395,600.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
						Prevalensi Stunting	6.4 %		Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	70%	Persentase pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	70%					
1 02 03 2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1 02 03 2.02 0002	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan	1	6,844,395,600.00	6,844,395,600.00	6,844,395,600.00		
1 02 03 2.02 02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	195 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memenuhi standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	195 Orang	6,844,395,600.00	6,844,395,600.00	6,844,395,600.00		APBD
1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 03 2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	92%	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi	92%	150,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00		
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	110 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	110 Orang	150,000,000.00	150,000,000.00	300,000,000.00		APBD
1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1 02 04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7		Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	85%	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	85%	13,000,000.00	13,000,000.00	355,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
						Prevalensi Stunting	6.4 %		Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, USMOT berizin	80%	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, USMOT berizin	80%	3,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00		
1 02 04 2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 02 04 2.01 0001	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	15,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kejadian/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur						Target
1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri	1 02 04 2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri						Persentase Industri rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan izin produksi	80%	Persentase Industri rumah tangga yang memiliki sertifikat produksi pangan dan izin produksi	80%	2.500.000,00	2.500.000,00	150.000.000,00		
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	6 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	150.000.000,00	APBD	
1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 02 04 2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki sertifikat laik higien sanitasi	169	Jumlah Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memiliki sertifikat laik higien sanitasi	169	5.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00		
1 02 04 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 02 04 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higien Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	40.000.000,00	APBD	
1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1 02 04 2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						Persentase hasil permintaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100	Persentase hasil permintaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT yang diperiksa dan ditindaklanjuti	100	2.500.000,00	2.500.000,00	150.000.000,00		
1 02 04 2.06 01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Unit	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	2 Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	150.000.000,00	APBD	
1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70,7 6,4		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	44.000.000,00	44.000.000,00	195.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS	5361	Jumlah rumah tangga yang ber-PHBS	5361	19.000.000,00	19.000.000,00	110.000.000,00		
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	19.000.000,00	19.000.000,00	110.000.000,00	APBD	
1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promoti Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promoti Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Rata-rata capaian indikator PHBS	43	Rata-rata capaian indikator PHBS	43	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00		
1 02 05 2.02 01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 02 05 2.02 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	60.000.000,00	APBN, APBD	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	67%	Persentase Posyandu Aktif	67%	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	APBN, APBD	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJARAN SEKASONG		Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD SEJARAN SEKASONG										37.500.000,00	37.500.000,00	79.250.000,00		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Mutuas SPiP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72,14 WTP Berkembang Baik 65,07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	22.500.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polihukham dan transformasi pelayanan publik	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	22.500.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	BLUD	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	22.500.000,00	22.500.000,00	23.000.000,00	BLUD	
1 02 02	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 02 02	PROGRAM PENUHUNAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70,7 6,4		Indeks kepuasan layanan Puskesmas	81	Indeks kepuasan layanan Puskesmas	81	15.000.000,00	15.000.000,00	56.250.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
									Indeks kepuasan layanan rumah sakit	79	Indeks kepuasan layanan rumah sakit	79					
									Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%					
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase RS milik Pemerintah Daerah yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%			37.000.000,00		
1 02 02 2.01 01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya						Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000		Jumlah Rumah Sakit Baru yang memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				3.000.000,00	APBD	
1 02 02 2.01 14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan				28.000.000,00	APBN	
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan				6.000.000,00	APBD	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100%	Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	19.250.000,00		
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 02 02 2.02 0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	19.000.000,00	APBD	
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota		Jumlah fasilitas kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/kota				250.000,00	APBD	
	Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muatuk		Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Muatuk										3.484.874.742,00	3.484.874.742,00	3.652.895.000,00		
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Mutuas SPiP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72,14 WTP Berkembang Baik 65,07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2.193.500.000,00	2.193.500.000,00	2.190.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polihukham dan transformasi pelayanan publik	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target						
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3,500,000.00	3,500,000.00				
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,500,000.00	3,500,000.00			APBD	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,190,000,000.00	2,190,000,000.00	2,190,000,000.00		BLUD	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	2,190,000,000.00	2,190,000,000.00	2,190,000,000.00			
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						Optimalisasi Penanganan Stunting	Peningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Prevalensi Stunting	70.7	6.4 %				Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
									Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	1,291,374,742.00	1,291,374,742.00	3,610,150,000.00			
									Tingkat Kepuasan Layanan Puskesmas	81	Tingkat Kepuasan Layanan Puskesmas	81						
									Tingkat Kepuasan Layanan rumah sakit	79	Tingkat Kepuasan Layanan rumah sakit	79						
									Persentase budesa stunting	9%	Persentase budesa stunting	9%						
									Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	30,560,000.00	30,560,000.00	30,560,000.00			
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	59 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	59 Unit	30,560,000.00	30,560,000.00	30,560,000.00		APBD	
1 02 02 2.01 20	Perembarasan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Perembarasan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	1,260,814,742.00	1,260,814,742.00	3,579,590,000.00			
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%						
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%						
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%						
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%						
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%						
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%						
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%						
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%						
									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%						
									Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%						
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan masyarakat	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan masyarakat	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%						
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%						
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	971 Orang	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	971 Orang	62,940,000.00	62,940,000.00	61,370,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,609 Orang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,609 Orang	146,220,000.00	146,220,000.00	20,040,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9,888 Orang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9,888 Orang	50,040,000.00	50,040,000.00	60,120,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,311 Orang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	34,311 Orang	17,820,000.00	17,820,000.00	136,140,000.00			
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,186 Orang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5,186 Orang	8,520,000.00	8,520,000.00	8,520,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	120 Orang	7,200,000.00	7,200,000.00	12,000,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	535 Orang	Jumlah orang terduga penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	535 Orang	49,260,000.00	49,260,000.00	50,160,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga penderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,606 Orang	Jumlah orang terduga penderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,606 Orang	2,700,000.00	2,700,000.00	5,400,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	289,648,125.00	289,648,125.00	254,670,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gigi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gigi masyarakat	1 Dokumen	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00		DAK Non Fisik/ APBN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Target Lama		Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	23,640,000.00	23,640,000.00	23,640,000.00		DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen		6,480,000.00			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	37,800,000.00	37,800,000.00	24,000,000.00		DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	219,360,000.00	219,360,000.00	176,520,000.00		DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional						Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di akreditasi	10 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di akreditasi	10 Paket	5,500,000.00	5,500,000.00			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	286,669,617.00	286,669,617.00	2,700,000,000.00		BOK
1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 02 02 2.02 0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)						Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 Laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 Laporan	6,017,000.00	6,017,000.00			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	217 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	217 Orang	39,600,000.00	39,600,000.00			
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	5,000,000.00	5,000,000.00			
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	-	-	42,745,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	6.4 %		Persentase Posyandu Aktif	67%	Persentase Posyandu Aktif	67 %	-	-	42,745,000.00		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	1 Dokumen		42,745,000.00			APBN
	<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.00.0.00.01.0003 Puskesmas Jebus</b>										2,788,057,355.00	2,788,057,355.00	4,045,010,000.00		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	72.14		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	1,620,000,000.00	1,620,000,000.00	1,380,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Opini BPK	WTP		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	15,000,000.00	15,000,000.00			
2 02 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 02 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Maturitas SPIP	Berkembang		Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	5,000,000.00	5,000,000.00			
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>			Indeks SPBE	Baik		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,380,000,000.00		BLUD
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			Indeks Profesionalitas ASN	65.07		Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,600,000,000.00	1,600,000,000.00	1,380,000,000.00		
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	1,132,057,355.00	1,132,057,355.00	2,610,130,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	
						Prevalensi Stunting	6.4 %		Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	81	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	81					
									Persentase baduta stunting	79	Persentase baduta stunting	79					
									Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	23,360,000.00	23,360,000.00	23,360,000.00		
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	40 Unit		Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	40 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	40 Unit	23,360,000.00	23,360,000.00	23,360,000.00		APBD
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	1,108,697,355.00	1,108,697,355.00	2,586,770,000.00		
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%					
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%					
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%					
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%					
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%					
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%					
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%					
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%					
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%					
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	460 Orang	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	460 Orang	83,160,000.00	83,160,000.00	59,040,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				8,090,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,891 Orang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,891 Orang	93,000,000.00	93,000,000.00	24,870,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4,268 Orang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4,268 Orang	22,680,000.00	22,680,000.00	33,660,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,938 Orang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,938 Orang	7,740,000.00	7,740,000.00	96,180,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,806 Orang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1,806 Orang	3,120,000.00	3,120,000.00	2,640,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	7,200,000.00	7,200,000.00	6,120,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	225 Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	225 Orang	24,840,000.00	24,840,000.00	20,280,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	543 Orang	Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	543 Orang	1,560,000.00	1,560,000.00	2,640,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				19,100,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	440,748,125.00	440,748,125.00	244,950,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	7,560,000.00	7,560,000.00	8,400,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	11,880,000.00	11,880,000.00	14,040,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan					Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	14,640,000.00	14,640,000.00	1,320,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	133,500,000.00	133,500,000.00	145,440,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional					Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional yang di distribusikan	8 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan nasional yang di distribusikan	8 Paket	2,200,000.00	2,200,000.00			DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	230,089,230.00	230,089,230.00	1,900,000,000.00		APBD,JKN,BO K	
1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 02 02 2.02 0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)					Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 Laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 Laporan	1,560,000.00	1,560,000.00			DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	92 Orang	17,280,000.00	17,280,000.00				
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	20 Orang	3,600,000.00	3,600,000.00				
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimalisasi Penangan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	36,000,000.00	36,000,000.00	54,880,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	6.4 %		Persentase Posyandu Aktif	67%	Persentase Posyandu Aktif	67%	36,000,000.00	36,000,000.00	54,880,000.00		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	36,000,000.00	36,000,000.00	54,880,000.00		APBN	
	Sub Unit Organisasi - 1.02.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput		Sub Unit Organisasi - 1.02.00.0.00.01.0004 Puskesmas Puput									1,593,595,136.00	1,593,595,136.00	2,184,775,000.00			
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPIE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	860,000,000.00	860,000,000.00	840,000,000.00	Mempertukar stabilitas Polihukankam dan transformasi pelayanan publik	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20,000,000.00	20,000,000.00				
1 02 01 2.06 02	Persediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Persediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00			APBD	
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	840,000,000.00	840,000,000.00	840,000,000.00		BLUD	
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Penangan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.7		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	714,305,136.00	714,305,136.00	1,317,820,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	
						Prevalensi Stunting	6.4 %		Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81	Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81					
									Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP <b>Kawasan Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP <b>Kawasan Daerah Kabupaten/Kota</b>						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	74%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	74%	13,490,000.00	13,490,000.00	13,490,000.00		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	23 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	23 Unit	13,490,000.00	13,490,000.00	13,490,000.00		APBN
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	700,815,136.00	700,815,136.00	1,304,330,000.00		
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%					
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%					
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%					
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%					
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%					
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%					
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian zoonosis	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian zoonosis	62.5%					
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%					
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%					
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	430 Orang	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	430 Orang	35,740,000.00	35,740,000.00	37,890,000.00		APBN
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1287 Orang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1287 Orang	54,420,000.00	54,420,000.00	9,960,000.00		APBN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4516 Orang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4516 Orang	17,640,000.00	17,640,000.00	19,080,000.00		APBN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14562 Orang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14562 Orang	4,860,000.00	4,860,000.00	95,700,000.00		APBN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1806 Orang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1806 Orang	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		APBN
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang	3,600,000.00	3,600,000.00	6,360,000.00		APBN
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	260 Orang	Jumlah orang terduga menderit tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	260 Orang	23,280,000.00	23,280,000.00	36,480,000.00		APBN
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga menderit hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	555 Orang	Jumlah orang terduga menderit hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	555 Orang	1,800,000.00	1,800,000.00			
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen			13,100,000.00		APBN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	191,008,125.00	191,008,125.00	109,340,000.00		APBN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	2,160,000.00	2,160,000.00	1,620,000.00		APBN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	15,960,000.00	15,960,000.00	13,440,000.00		APBN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	3,600,000.00	3,600,000.00			APBN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	12,720,000.00	12,720,000.00	10,200,000.00		APBN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	140,760,000.00	140,760,000.00	96,360,000.00		APBN
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional						Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di forwardkan	6 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di forwardkan	6 Paket	3,300,000.00	3,300,000.00			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	169,567,011.00	169,567,011.00	850,000,000.00		BOK
1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masa)	1 02 02 2.02 0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masa)						Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masa)	1 Laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masa)	1 Laporan	600,000.00	600,000.00			DAK Non Fisik/ APBN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejadian/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	94 Orang	94 Orang	14,400,000.00	14,400,000.00				
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	38 Orang	38 Orang	7,800,000.00	7,800,000.00				
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	50%	19,290,000.00	19,290,000.00	26,955,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas		
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	67 %	67 %	19,290,000.00	19,290,000.00	26,955,000.00			
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	19,290,000.00	19,290,000.00	26,955,000.00		APBN	
												3,848,000,628.00	3,848,000,628.00	5,155,220,000.00			
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	100 persen	2,420,000,000.00	2,420,000,000.00	2,040,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik		
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	-	-	-		APBD	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	-			
1 02 01 2.07 5	Pengadaan Mebel	1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 unit	3 unit	15,000,000.00	15,000,000.00	-			
2 02 01 2.07 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 unit	1 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	-			
1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	2,400,000,000.00	2,400,000,000.00	2,040,000,000.00		BLUD	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	95%	1,348,540,628.00	1,348,540,628.00	3,081,410,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan kesehatan		
									Tingkat Kepuasan Layanan Puskesmas	81	81						
									Tingkat Kepuasan Layanan rumah sakit	79	79						
									Persentase baduta stunting	9%	9%						
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	74%	22,060,000.00	22,060,000.00	22,060,000.00			
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	38 Unit	38 Unit	22,060,000.00	22,060,000.00	22,060,000.00		APBD	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	1,326,480,628.00	1,326,480,628.00	3,059,350,000.00			
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%						
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	100%						
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%						
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%						
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian zoonosis	62.5%	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	62.5%						
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	100%						
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	633 Orang	633 Orang	107,200,000.00	107,200,000.00	123,240,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					20,160,000.00		APBN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejadian/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			20,520,000,000		APBN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2876 Orang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2876 Orang	181,710,000,000	181,710,000,000	78,600,000,000		APBN
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6158 Orang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6158 Orang	30,240,000,000	30,240,000,000	44,280,000,000		APBN
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23997 Orang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	23997 Orang	13,140,000,000	13,140,000,000	68,640,000,000		APBN
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2565 Orang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2565 Orang	10,800,000,000	10,800,000,000	46,560,000,000		APBN
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang	11,520,000,000	11,520,000,000	8,040,000,000		APBN
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	336 Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	336 Orang	8,160,000,000	8,160,000,000	24,300,000,000		APBN
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	794 Orang	Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	794 Orang	6,000,000,000	6,000,000,000	17,880,000,000		APBN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	420,588,125,000	420,588,125,000	76,320,000,000		APBN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	2,040,000,000	2,040,000,000	2,880,000,000		APBN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	16,320,000,000	16,320,000,000	65,520,000,000		APBN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	6,580,000,000	6,580,000,000	46,130,000,000		APBN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolan surveilans kesehatan	1 Dokumen	13,200,000,000	13,200,000,000	3,360,000,000		APBN
1 02 02 2.02 23	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0023	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	176,400,000,000	176,400,000,000	162,920,000,000		APBN
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional						Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di foto/bekukan	8 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di foto/bekukan	8 Paket	4,400,000,000	4,400,000,000			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	316,502,503,000	316,502,503,000	2,250,000,000,000		BOK
1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 02 02 2.02 0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)						Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 Laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 Laporan	1,680,000,000	1,680,000,000			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	79,540,000,000	79,540,000,000	33,810,000,000	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	67%	Persentase Posyandu Aktif	67%	79,540,000,000	79,540,000,000	33,810,000,000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	79,540,000,000	79,540,000,000	33,810,000,000		APBN
	<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.05.00.01.0006 Puskesmas Tembolono</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.05.00.01.0006 Puskesmas Tembolono</b>										3,116,105,997,000	3,116,105,997,000	4,649,270,000,000		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Otim BPA Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	1,920,000,000,000	1,920,000,000,000	1,500,000,000,000	Memperkuat stabilitas Poltikam dan transformasi pelayanan publik	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15,000,000,000	15,000,000,000			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000			APBD
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,000,000,000	5,000,000,000			
1 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 unit	5,000,000,000	5,000,000,000			
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>										1,900,000,000,000	1,900,000,000,000	1,500,000,000,000		
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,900,000,000,000	1,900,000,000,000	1,500,000,000,000		BLUD
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	1,159,565,997,000	1,159,565,997,000	3,149,270,000,000	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berkualitas	
									Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81	Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81					
									Tingkat Kepuasan Layanan rumah sakit	79	Tingkat Kepuasan Layanan rumah sakit	79					
									Persentase baduta stunting	9%	Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	19,790,000,000	19,790,000,000	19,790,000,000		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	31 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	31 Unit	19,790,000,000	19,790,000,000	19,790,000,000		APBD
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	1,139,775,997,000	1,139,775,997,000	3,129,480,000,000		
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%					
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%					
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%					
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran													
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran																			
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target																		
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%																		
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%																		
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%																		
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%																		
									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%																		
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%																		
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%																		
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%																		
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%																		
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%																		
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%																		
1	02	2.02	01						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	02	2.02	0001	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	507 Orang	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	507 Orang	69,300,000.00	69,300,000.00	66,480,000.00	APBN				
1	02	2.02	02						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1	02	2.02	0002	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		5,580,000.00			APBN				
1	02	2.02	03						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1	02	2.02	0003	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		6,240,000.00			APBN				
1	02	2.02	04						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1	02	2.02	0004	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1777 Orang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1777 Orang	114,060,000.00	114,060,000.00	20,880,000.00	APBN				
1	02	2.02	05						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1	02	2.02	0005	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5443 Orang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5443 Orang	25,560,000.00	25,560,000.00	29,520,000.00	APBN				
1	02	2.02	06						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1	02	2.02	0006	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18647 orang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18647 orang	9,180,000.00	9,180,000.00	21,360,000.00	APBN				
1	02	2.02	07						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1	02	2.02	0007	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2838 Orang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2838 Orang	2,160,000.00	2,160,000.00	54,000,000.00	APBN				
1	02	2.02	10						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1	02	2.02	0010	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6745 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	6745 Orang	6,480,000.00	6,480,000.00	4,800,000.00	APBN				
1	02	2.02	11						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1	02	2.02	0011	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	565 Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	565 Orang	29,220,000.00	29,220,000.00	45,600,000.00	APBN				
1	02	2.02	12						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1	02	2.02	0012	Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 Orang	Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 Orang	2,160,000.00	2,160,000.00	6,600,000.00	APBN				
1	02	2.02	13						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	02	2.02	0013	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	2,200,000.00			APBN				
1	02	2.02	15						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	02	2.02	0015	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	412,858,125.00	412,858,125.00	6,960,000.00	APBN				
1	02	2.02	16						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	02	2.02	0016	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	1,680,000.00	1,680,000.00	1,260,000.00	APBN				
1	02	2.02	17						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	02	2.02	0017	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	20,760,000.00	20,760,000.00	35,880,000.00	APBN				
1	02	2.02	18						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	02	2.02	0018	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	6,480,000.00	6,480,000.00	15,660,000.00	APBN				
1	02	2.02	20						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	02	2.02	0020	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	14,640,000.00	14,640,000.00	15,480,000.00	APBN				
1	02	2.02	25						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1	02	2.02	0025	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	150,140,000.00	150,140,000.00	190,980,000.00	APBN				
1	02	2.02	28						Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1	02	2.02	0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1	02	2.02	0028	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di distribusikan	6 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di distribusikan	6 Paket	3,300,000.00	3,300,000.00		DAK Non Fisik/ APBN				
1	02	2.02	33						Operasional Pelayanan Puskesmas	1	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	1	02	2.02	0033	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	263,277,872.00	263,277,872.00	2,600,000,000.00	BOK				
1	02	2.02	36						Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1	02	2.02	0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1	02	2.02	0036	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 Laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 Laporan	1,080,000.00	1,080,000.00		DAK Non Fisik/ APBN				
1	02	2.02	40						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1	02	2.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1	02	2.02	0040	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	116 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	116 Orang	7,200,000.00	7,200,000.00						
1	02	2.02	42						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1	02	2.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1	02	2.02	0042	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	240,000.00	240,000.00						
1	02	05							<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1	02	05		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1	02	05													
1	02	05	2.03						<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	02	05	2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	02	05	2.03	<b>Persentase desa/keurahan yang ber-PHRS</b>	50%	<b>Persentase Posyandu Aktif</b>	67 %	<b>36,540,000.00</b>	<b>36,540,000.00</b>	-					
1	02	05	2.03	01					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	02	05	2.03	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	02	05	2.03	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	36,540,000.00	36,540,000.00						
									<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.00.01.0007 Puskesmas Singaperbangsa</b>					<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.00.01.0007 Puskesmas Singaperbangsa</b>								<b>2,519,444,907.00</b>	<b>2,519,444,907.00</b>	<b>4,281,296,125.00</b>						
1	02	01							<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	1	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	1	02	01		Meningkatkan	Meningkatkannya tata kelola	Nilai SAKIP	72.14	Terpenuhinya kebutuhan	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan	100 persen	1,320,000,000.00	1,320,000,000.00	1,260,000,000.00	Memperkuat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokol Ukur	Target					
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	WTP Berkembang Baik 65.07		penunjang Pemerintahan Daerah	100%	100%	11,000,000.00	11,000,000.00		stabilitas Polihukankam dan transformasi pelayanan publik		
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	11,000,000.00	11,000,000.00					
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	11,000,000.00	11,000,000.00				APBD	
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	0%	9,000,000.00	9,000,000.00					
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	9,000,000.00	9,000,000.00					
1 02 01 2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1 02 01 2.10	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,260,000,000.00			BLUD	
1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	95%	1,163,444,907.00	1,163,444,907.00	2,974,228,125.00		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
								Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81	81							
								Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79	79							
								Persentase baduta stunting	9%	9%	20,560,000.00	20,560,000.00	4,836,000.00				
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan/ Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kecamatan/ Daerah Kabupaten/Kota					Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	74%	20,560,000.00	20,560,000.00	4,836,000.00			APBN	
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	36 Unit	36 Unit	20,560,000.00	20,560,000.00	4,836,000.00			APBN	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	1,142,884,907.00	1,142,884,907.00	2,974,228,125.00				
								Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%							
								Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%							
								Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	100%							
								Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%							
								Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%							
								Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%							
								Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%							
								Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%							
								Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%							
								Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%							
								Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%							
								Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	62.5%							
								Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%	62.5%							
								Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	62.5%							
								Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	100%							
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	445 Orang	445 Orang	83,160,000.00	83,160,000.00	81,490,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					6,240,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1546 Orang	1546 Orang	93,000,000.00	93,000,000.00	11,810,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4190 Orang	4190 Orang	22,680,000.00	22,680,000.00	22,680,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15000 orang	15000 orang	7,740,000.00	7,740,000.00	18,120,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1779 Orang	1779 Orang	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang	60 Orang	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					Jumlah orang terduga penderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	225 Orang	225 Orang	24,840,000.00	24,840,000.00	31,680,000.00			APBN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					Jumlah orang terduga penderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	543 Orang	543 Orang	1,560,000.00	1,560,000.00					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	440,748,125.000	440,748,125.000	440,948,125.000		APBN
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	7,560,000.000	7,560,000.000	8,460,000.000		APBN
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	11,880,000.000	11,880,000.000	9,360,000.000		APBN
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	2,340,000.000	2,340,000.000	12,840,000.000		APBN
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	14,640,000.000	14,640,000.000	207,180,000.000		APBN
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	133,500,000.000	133,500,000.000	207,180,000.000		APBN
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	2,200,000.000	2,200,000.000			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional						Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di alihbiayakan	4 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di alihbiayakan	4 Paket	2,200,000.000	2,200,000.000			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	264,276,782.000	264,276,782.000	2,100,000.000		BOK
1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal	1 02 02 2.02 0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal						Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal	1 Laporan	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal	1 Laporan	1,560,000.000	1,560,000.000			DAK Non Fisik/ APBN
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91 Orang	17,280,000.000	17,280,000.000			
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1 Orang	3,600,000.000	3,600,000.000			
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%		Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	36,000,000.000	36,000,000.000	47,068,000.000	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Posyandu Aktif	67%	Persentase Posyandu Aktif	67%	36,000,000.000	36,000,000.000	47,068,000.000		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	36,000,000.000	36,000,000.000	47,068,000.000		APBN
	<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.05.01.00.01.0008 Puskesmas Sekeloa</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.05.01.00.01.0008 Puskesmas Sekeloa</b>										2,061,470,416.000	2,061,470,416.000	2,725,267,879.000		
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opin BPJ Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	1,320,000,000.000	1,320,000,000.000	840,000,000.000	Memperkuat kualitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 02 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20,000,000.000	20,000,000.000			
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,000,000.000	20,000,000.000			APBD
1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	1 02 01 2.10	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>						Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1,300,000,000.000	1,300,000,000.000	840,000,000.000		BLUD
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%		Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	725,450,416.000	725,450,416.000	1,852,597,879.000	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan budaya kerja	
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	81	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	81	21,360,000.000	21,360,000.000	19,737,879.000		
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	36 Unit	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	36 Unit	21,360,000.000	21,360,000.000	19,737,879.000		APBN
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	704,090,416.000	704,090,416.000	1,832,860,000.000		
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%					
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%					
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%					
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%					
									Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Persentase ODG berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%					
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%					
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%					

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian penyakit	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	62.5%						
									Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sesuai standar	100%						
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	285 Orang	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	285 Orang	34,540,000.00	34,540,000.00	406,100,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	956 Orang	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	956 Orang	42,480,000.00	42,480,000.00	5,640,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2683 Orang	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2683 Orang	8,280,000.00	8,280,000.00	9,720,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1008 orang	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1008 orang	5,760,000.00	5,760,000.00	32,760,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1006 Orang	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1006 Orang	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	26 Orang	3,600,000.00	3,600,000.00	3,000,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	132 Orang	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	132 Orang	20,160,000.00	20,160,000.00	29,760,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	302 Orang	Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	302 Orang	1,800,000.00	1,800,000.00	3,000,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	12,543,125.00	12,543,125.00	75,510,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	5,760,000.00	5,760,000.00	8,640,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	12,240,000.00	12,240,000.00	12,240,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	12,720,000.00	12,720,000.00	8,520,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	67,980,000.00	67,980,000.00	85,560,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	6 Paket	Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di akreditasi	6 Paket	3,300,000.00	3,300,000.00			DAK Non Fisik/ APBN	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	47 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	47 Orang	9,000,000.00	9,000,000.00				
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	51 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang	10,800,000.00	10,800,000.00				
1 02 02 2.02 36	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	1 02 02 2.02 0036	Investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian kutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)						Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	47 Orang	9,000,000.00	9,000,000.00				
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis						Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	Persentase desa/keurahan yang ber-PHBS	50%	16,020,000.00	16,020,000.00	32,760,000.00		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
1 02 02 2.02 42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria						Persentase Posyandu Aktif	67 %	Persentase Posyandu Aktif	67 %	16,020,000.00	16,020,000.00	32,760,000.00			
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70											
1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 05 2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)															
	<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.001.0009 Puskesmas Kundu</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.001.0009 Puskesmas Kundu</b>										<b>1,429,342,294.00</b>	<b>1,429,342,294.00</b>	<b>1,826,343,419.00</b>			
1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Odn SPB Maturitas SPI Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 persen	620,000,000.00	620,000,000.00	540,000,000.00		Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 02 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		20,000,000.00	20,000,000.00			
1 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 02 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	20,000,000.00	20,000,000.00			
1 02 01 2.10	<b>Minimalkan Pelayanan BLUD</b>	1 02 01 2.10	<b>Minimalkan Pelayanan BLUD</b>							Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	600,000,000.00	600,000,000.00	540,000,000.00		BLUD
1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	1 02 02	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70			Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	Persentase capaian SPM bidang kesehatan	95%	795,582,294.00	795,582,294.00	1,274,103,419.00		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
										Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81	Tingkat Kepuasan layanan Puskesmas	81					
										Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	79					
										Persentase baduta stunting	9%	Persentase baduta stunting	9%					
1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota							Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	Persentase FKTP yang memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai standar	74%	23,820,000.00	23,820,000.00	19,737,879.00		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejadian/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
1 02 02 2.01 20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medikal Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Perungjung Medikal Fasilitas Pelayanan Kesehatan						Jumlah alat kesehatan/obat perungjung medikal fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	43 Unit	43 Unit	23,820,000.00	23,820,000.00	19,737,879.00		APBN	
1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 02 02 2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	771,762,294.00	771,762,294.00	1,254,365,540.00			
									Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%						
									Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%	100%						
									Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%						
									Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%						
									Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan	62.5%	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pencegahan dan pengendalian zoonosis	62.5%	62.5%						
									Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan primer dan rujukan	100%	100%						
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	133 Orang	133 Orang	25,760,000.00	25,760,000.00	25,600,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	602 Orang	602 Orang	43,680,000.00	43,680,000.00	6,720,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1520 Orang	1520 Orang	8,640,000.00	8,640,000.00	15,840,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	6754 orang	6754 orang	5,040,000.00	5,040,000.00	49,200,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	689 Orang	689 Orang	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	31 Orang	31 Orang	2,880,000.00	2,880,000.00	3,480,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	71 Orang	71 Orang	6,000,000.00	6,000,000.00	9,120,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	244 Orang	244 Orang	480,000.00	480,000.00	960,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						Jumlah orang terduga menderita hiv yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	31 Orang	31 Orang	2,880,000.00	2,880,000.00	3,480,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1 02 02 2.02 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	1 Dokumen	302,858,125.00	302,858,125.00	241,805,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1,560,000.00	1,560,000.00	2,340,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	5,220,000.00	5,220,000.00	5,220,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,280,000.00	3,280,000.00	10,870,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3,240,000.00	3,240,000.00				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	71,940,000.00	71,940,000.00	75,730,000.00		APBN	
1 02 02 2.02 25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular						Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	6 Paket	6 Paket	3,300,000.00	3,300,000.00			DAK Non Fiskal/ APBN	
1 02 02 2.02 28	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional	1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional						Jumlah spesimen penyakit potensial KLB ke laboratorium rujukan/nasional yang di akreditasi	1 Dokumen	1 Dokumen	281,544,169.00	281,544,169.00	798,840,540.00		BOK	
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak diharapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat masal)	1 Laporan	1 Laporan	480,000.00	480,000.00			DAK Non Fiskal/ APBN	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur dan Target Lama	Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokoh Ukur	Target					
1 02 02 2.02 40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35 Orang	3,600,000.00	3,600,000.00			
1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	1 02 05	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	Optimalisasi Penanganan <i>Situasi</i>	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70		Presentase desa/kecamatan yang ber-PHBS	50%	Presentase desa/kecamatan yang ber-PHBS	50%	13,760,000.00	13,760,000.00	12,240,000.00	Meningkatnya sumber daya manusia berkualitas	
1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 02 05 2.03	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			Presentase Posyandu Aktif	6.40%		Presentase Posyandu Aktif	67 %	Presentase Posyandu Aktif	67 %	13,760,000.00	13,760,000.00	12,240,000.00		
1 02 05 2.03 01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	13,760,000.00	13,760,000.00	12,240,000.00		APBN
1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	1 03	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										136,641,294,000.00	136,641,294,000.00	10,990,480,000.00		
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										136,641,294,000.00	136,641,294,000.00	10,990,480,000.00		
1 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 03 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Ombi DPM Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	7,506,440,000.00	7,506,440,000.00	7,590,480,000.00	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik	
1 03 01 2	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1 03 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	28,000,000.00		
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		
1 03 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		
1 03 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 03 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 03 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 03 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
1 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1 03 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	4,290,900,000.00	4,290,900,000.00	4,510,000,000.00		
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 03 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	4,290,000,000.00	4,290,000,000.00	4,500,000,000.00		
1 03 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 03 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		
1 03 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 03 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		
1 03 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 03 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		
1 03 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1 03 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
1 03 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 03 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
1 03 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	1 03 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		
1 03 01 2.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 03 01 2.04 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		
1 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1 03 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	31,800,000.00	31,800,000.00	96,500,000.00		
1 03 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian	1 03 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kepegawaian	0 Paket	-	-	12,500,000.00		
1 03 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 03 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		
1 03 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 03 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang	10,500,000.00	10,500,000.00	20,000,000.00		
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 03 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42 orang	21,000,000.00	21,000,000.00	60,000,000.00		
1 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1 03 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	587,300,000.00	587,300,000.00	764,500,000.00		
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	10,000,000.00		
1 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00	150,000,000.00		APBD
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 03 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00		
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	60,000,000.00	60,000,000.00	45,000,000.00		
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00		
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00		
1 03 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1 03 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	130,000,000.00	130,000,000.00	110,000,000.00		
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	320,000,000.00	320,000,000.00	400,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
1 03 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 03 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		
1 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 03 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2,036,080,000.00</b>	<b>2,036,080,000.00</b>	<b>1,904,980,000.00</b>		
1 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 03 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
1 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	215,000,000.00	215,000,000.00	200,000,000.00		
1 03 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8,000,000.00	8,000,000.00	40,000,000.00		
1 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,811,080,000.00	1,811,080,000.00	1,662,980,000.00		
1 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 03 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>558,260,000.00</b>	<b>558,260,000.00</b>	<b>278,000,000.00</b>		
1 03 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional	1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	287,710,000.00	287,710,000.00	7,000,000.00		
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan	1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Pemeliharaan					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 unit	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 unit	185,550,000.00	185,550,000.00	21,000,000.00		
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 03 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Belo Laut	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	85,000,000.00	85,000,000.00	250,000,000.00		
1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	1 03 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		<b>Peningkatan Pemeliharaan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder</b>	<b>46%</b>	<b>Peningkatan Pemeliharaan kebutuhan jaringan irigasi teknis primer dan sekunder</b>	<b>46%</b>	<b>2,735,500,000.00</b>	<b>2,735,500,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Perentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan	52.94%		<b>Persentase titik banjir yang dimitigasi</b>	<b>58%</b>	<b>Persentase titik banjir yang dimitigasi</b>	<b>58%</b>					
1 03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 03 02 2.01	<b>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi</b>	<b>8 Titik</b>	<b>Jumlah titik banjir akibat sedimentasi dan gelombang air laut yang di mitigasi</b>	<b>8 Titik</b>	<b>2,235,500,000.00</b>	<b>2,235,500,000.00</b>	<b>1,500,000,000.00</b>		
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing					Sungai Culong Kecamatan Mentok	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,025 Km	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,025 Km	162,500,000.00	162,500,000.00	162,500,000.00		
1 03 02 2.01 18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1 03 02 2.01 0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					Pantai Batu Berant, Kecamatan Mentok	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,080 Km	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	0,080 Km	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00		
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,39 Km	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0,39 Km	523,000,000.00	523,000,000.00	118,750,000.00		
	- Normalisasi Sungai Culong		- Normalisasi Sungai Culong					Sungai Culong Kecamatan Mentok		0,250 Km			160,000,000.00	160,000,000.00			Renja
	- Pembangunan Talud		- Pembangunan Talud					Belakang Kraut RT.13 Dusun Surtai, Kab. Bangka Barat		0,100 Km			313,000,000.00	313,000,000.00			Reses
	- Pembangunan talud (karena air meluap kerumah masyarakat saat hujan)		- Pembangunan talud (karena air meluap kerumah masyarakat saat hujan)					Ipsenang hati, sungai dang, samping rumah may. uyan, Kab. Bangka Barat		0,040 Km			50,000,000.00	50,000,000.00			Reses
1 03 02 2.01 58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	1 03 02 2.01 0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam						Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	118,750,000.00		
1 03 02 2.01 59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	1 03 02 2.01 0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya					Kab. Bangka Barat, Pattilaga, Kelabat	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km			100,000,000.00		
1 03 02 2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 03 02 2.02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</b>	<b>56,43%</b>	<b>Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik</b>	<b>56,43%</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>		
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 03 02 2.02 0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00			
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							Km		Km	-	-	100,000,000.00		
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 0014	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan							Km		Km	-	-	250,000,000.00		
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					Di Sumpang yul, Di Buay Kelumbi, Di Tebing Bulo	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	2 Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	2 Km	400,000,000.00	400,000,000.00			
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1 03 02 2.02 002	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	-	-	150,000,000.00		
1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	1 03 06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	Optimalisasi Penanganan Stuntan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%		<b>Persentase sistem drainase dalam kondisi baik</b>	<b>83.28%</b>	<b>Persentase sistem drainase dalam kondisi baik</b>	<b>83.28%</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
1 03 06 02	<b>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 03 06 02	<b>Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>panjang drainase kondisi baik</b>	<b>444,44 M</b>	<b>panjang drainase kondisi baik</b>	<b>444,44 M</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>		
1 03 06 02 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	1 03 06 02 0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	1 Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00			
1 03 10	<b>PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN</b>	1 03 10	<b>PROGRAM PENYELenggaraAN JALAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketahanan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		<b>Persentase panjang jalan dalam kondisi mantan</b>	<b>82.57%</b>	<b>Persentase panjang jalan dalam kondisi mantan</b>	<b>82.57%</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan	
1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	1 03 10 2.01	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>			Indeks Bangunan Gedung	Sedang		<b>Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>95.82%</b>	<b>Persentase jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>95.82%</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	<b>89,107,800,000.00</b>		
									<b>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</b>	<b>79.52%</b>	<b>Persentase panjang jalan dalam kondisi baik</b>	<b>79.52%</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	<b>89,107,800,000.00</b>	<b>89,107,800,000.00</b>		
									<b>Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>95.28%</b>	<b>Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik</b>	<b>95.28%</b>					
1 03 10 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1 03 10 2.01 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan	3 Dokumen	700,000,000.00	700,000,000.00			
	- Penyusunan DED Jalan Pendukung Kawasan Strategis		- Penyusunan DED Jalan Pendukung Kawasan Strategis							1 Dokumen			100,000,000.00	100,000,000.00			
	- Perencanaan Preservasi Jembatan		- Perencanaan Preservasi Jembatan							1 Dokumen			100,000,000.00	100,000,000.00			
	- DED jembatan kawasan strategis		- DED jembatan kawasan strategis							1 Dokumen			500,000,000.00	500,000,000.00			
1 03 10 2.01 04	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	1 03 10 2.01 0043	Survei Kondisi Jalan/Jembatan					Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	809,035 KM	300,000,000.00	300,000,000.00			
	- Survey Kondisi Jalan		- Survey Kondisi Jalan							1 Dokumen							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejutan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Took Ukur dan Target Lama		Took Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Took Ukur	Target	Took Ukur	Target					
1 03 10 2.01 05	- Survey Kondisi Jembatan Pembangunan Jalan	1 03 10 2.01 0032	Pembangunan Jalan					Dari Jl SLB sampai ke Jl Pat. Kab. Bangka Barat	Panjang Jalan yang Dibangun	3,7 Km	Panjang Jalan yang Dibangun	3,7 Km	3,467,000,000.00	3,467,000,000.00			
	- Pembangunan Lanjutan Jalan Tanjung Ujar Air Limau		- Pembangunan Lanjutan Jalan Tanjung Ujar Air Limau							3,2 Km							
	- Pembangunan dan Peningkatan jalan serta pembuatan siring dari Jl SLB sampai ke Jl Pat - 500m		- Pembangunan dan Peningkatan jalan serta pembuatan siring dari Jl SLB sampai ke Jl Pat - 500m							0,5 Km							Reses
1 03 10 2.01 06	Rekonstruksi Jalan (Pembangunan dari Subkegiatan Rekonstruksi Jalan Strategis Bangk)	1 03 10 2.01 0033	Rekonstruksi Jalan					Panjang jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	18,59 Km	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	25,415 Km	39,996,000,000.00	51,028,000,000.00				
	Peningkatan Jalan Tavu - Jerangkat		Peningkatan Jalan Tavu - Jerangkat							0,9 Km		2,250,000,000.00	2,250,000,000.00				
	Peningkatan Jalan Tanjung Sianjau		Peningkatan Jalan Tanjung Sianjau							0,8 Km		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				Renja
	Peningkatan Jalan Ibul - Perabung		Peningkatan Jalan Ibul - Perabung							0,8 Km		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				Renja
	Peningkatan Jalan Rebak - Air Ibul		Peningkatan Jalan Rebak - Air Ibul							0,8 Km		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				Renja
	Peningkatan Jalan Jompono		Peningkatan Jalan Jompono							0,8 Km		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				Renja
	Rekonstruksi Jalan Dusun I & II Desa Rambat		Rekonstruksi Jalan Dusun I & II Desa Rambat							0,6 Km		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				Renja
	Peningkatan jalan Desa Telak, Kecamatan Paritma, Kab. Bangka Barat		Peningkatan jalan Desa Telak, Kecamatan Paritma, Kab. Bangka Barat					Desa Telak		130 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
	Peningkatan jalan Dusun Tugang Dusun Tuano, Kab. Bangka Barat		Peningkatan jalan Dusun Tugang Dusun Tuano, Kab. Bangka Barat					Desa Tugang		130 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
	Peningkatan jalan Jalan Lingkar Barat, Jalan Lingkar Timur, Jalan Langgeng, Kecamatan Templang, Kab. Bangka Barat		Peningkatan jalan Jalan Lingkar Barat, Jalan Lingkar Timur, Jalan Langgeng, Kecamatan Templang, Kab. Bangka Barat					Desa Penyampak		130 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
	Peningkatan jalan Desa Beraus, Kecamatan Kelapa, kabupaten Bangka Barat		Peningkatan jalan Desa Beraus, Kecamatan Kelapa, kabupaten Bangka Barat					Desa Beraus		130 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
	Peningkatan jalan Desa Simpang Tiga, Kab. Bangka Barat		Peningkatan jalan Desa Simpang Tiga, Kab. Bangka Barat					Desa Simpang Tiga		130 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
	Peningkatan jalan Jln. Gang Tower, Desa Sekar Biru, Kec. Paritiga, Kab. Bangka Barat		Peningkatan jalan Jln. Gang Tower, Desa Sekar Biru, Kec. Paritiga, Kab. Bangka Barat					Desa Sekar Biru		130 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Musren
	Peningkatan jalan gang selia RL02 Rw.01 Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		Peningkatan jalan gang selia RL02 Rw.01 Kelurahan Menjelang, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat					Kelurahan Tanjung		65 m		100,000,000.00	100,000,000.00				Musren
	Jalan gang timor dan jalan SD 19 di Hotmik dengan panjang ± 1 km Lanjutan peningkatan Jln		Jalan gang timor dan jalan SD 19 di Hotmik dengan panjang ± 1 km Lanjutan peningkatan Jln					Jalan gang timor dan jalan SD 19 Desa Air Nyatoh Kecamatan Sumpang Teritip, Kab. Bangka Barat		500 m		750,000,000.00	750,000,000.00				Reses
	Pengaspalan jalan dimulai Pengaspalan jalan dimulai dari depan rumah Cik Gung ke arah Kapit		Pengaspalan jalan dimulai Pengaspalan jalan dimulai dari depan rumah Cik Gung ke arah Kapit					dimulai dari depan rumah Cik Gung ke arah Kapit sepanjang 1 KM., Kab. Bangka Barat		1 km		1,740,000,000.00	1,740,000,000.00				Reses
	Pengaspalan jalan Gang Masjid dan jalan Lingkar		Pengaspalan jalan Gang Masjid dan jalan Lingkar					Jalan Gang Masjid kelurahan sungai daeng, Kab. Bangka Barat		300 m		492,000,000.00	492,000,000.00				Reses
	Pengaspalan jalan samping rumah Bapak Naim		Pengaspalan jalan samping rumah Bapak Naim					Jalan samping rumah Bapak Naim Kelurahan Sungai Daeng, Kab. Bangka Barat		130 m		207,000,000.00	207,000,000.00				Reses
	Perbaikan jalan (di scrub + puru) dari Dusun Buyan ke Dusun Kelumbi		Perbaikan jalan (di scrub + puru) dari Dusun Buyan ke Dusun Kelumbi					Dusun Buyan ke Dusun Kelumbi, Kab. Bangka Barat		3,4 Km		8,572,000,000.00	8,572,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan		Peningkatan jalan					Jalan Air nangka desa penyampak, Kab. Bangka Barat		100 m		159,000,000.00	159,000,000.00				Reses
	Jalan sudah rusak		Jalan sudah rusak					RT. 14 ke Dusun Langgem, Kab. Bangka Barat		400 m		1,015,000,000.00	1,015,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan lingkaran lapangan bola Dusun Tambang 25 desa Cupat antara RT.03 dan RT.04		Peningkatan jalan lingkaran lapangan bola Dusun Tambang 25 desa Cupat antara RT.03 dan RT.04					Jalan lingkaran lapangan bola Dusun Tambang 25 desa Cupat antara RT.03 dan RT.04, Kab. Bangka Barat		2,3 Km		3,583,000,000.00	3,583,000,000.00				Reses
	perbaikan jalan Raffesia		perbaikan jalan Raffesia					Jalan perintis Kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat		140 m		215,000,000.00	215,000,000.00				Reses
	peningkatan jalan lingkaran desa air menduyung		peningkatan jalan lingkaran desa air menduyung					desa air menduyung, Kab. Bangka Barat		500 m		878,000,000.00	878,000,000.00				Reses
	pemeliharaan jalan tanah puru		pemeliharaan jalan tanah puru					Jalan Kelekek Muda Desa Sinar Sari Kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		1,7 Km		4,295,000,000.00	4,295,000,000.00				Reses
	Pengaspalan gang raffesia		Pengaspalan gang raffesia					Gang raffesia Perumas Kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat		230 m		350,000,000.00	350,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan lingkaran desa timur air nyatoh		Peningkatan jalan lingkaran desa timur air nyatoh					Desa timur air nyatoh kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat		0,75 Km		1,900,000,000.00	1,900,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan kebun kelompok masyarakat desa kelapa		Peningkatan jalan kebun kelompok masyarakat desa kelapa					Desa kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		125 m		310,000,000.00	310,000,000.00				Reses
	Pembangunan jalan baru dari rumah bapak sainal sampai ke rumah bapak erik		Pembangunan jalan baru dari rumah bapak sainal sampai ke rumah bapak erik					rumah bapak sainal sampai rumah bapak erik kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		100 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Reses
	Pembangunan jalan pemukiman menuju rumah pak basoni		Pembangunan jalan pemukiman menuju rumah pak basoni					rumah pak basoni kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		100 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Reses
	Pembangunan jalan Gang yang ada di RT 13		Pembangunan jalan Gang yang ada di RT 13					Jalan gang RT 13 Kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		100 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Reses
	Pembuatan jalan baru gang pelana RT.03/RW.02 kp.menjelang baru		Pembuatan jalan baru gang pelana RT.03/RW.02 kp.menjelang baru					Gang pelana RT.03/RW.02 kp.menjelang baru, Kab. Bangka Barat		100 m		397,000,000.00	397,000,000.00				Reses
	Cor beton jalan gg kelapa		Cor beton jalan gg kelapa					RT 01 Rw 02 kampung Tegalejo Kelurahan sungai baru, Kab. Bangka Barat		120 m		216,000,000.00	216,000,000.00				Reses
	peningkatan jalan MIN Kelapa yang ada di RT. 14		peningkatan jalan MIN Kelapa yang ada di RT. 14					kecamatan kelapan, Kab. Bangka Barat		100 m		200,000,000.00	200,000,000.00				Reses
	perbaikan jalan gang Saku ke Cafe Orange Rv 01 Rt 02		perbaikan jalan gang Saku ke Cafe Orange Rv 01 Rt 02					Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat		350 m		600,000,000.00	600,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan pendam kuburan cina RT03/RW 02 Kampung Menjelang Kelurahan Menjelang		Peningkatan jalan pendam kuburan cina RT03/RW 02 Kampung Menjelang Kelurahan Menjelang					RT03/RW 02 Kampung Menjelang Kelurahan Menjelang, Kab. Bangka Barat		500 m		967,000,000.00	967,000,000.00				Reses
	Rekonstruksi Jalan PAUD Melati Dusun Ralek Desa Berang		Rekonstruksi Jalan PAUD Melati Dusun Ralek Desa Berang					Desa Berang		250 m			400,000,000.00				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejelasan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
	Peningkatan jalan gang bola		Peningkatan jalan gang bola					Jalan gang bola RT 09 Dusun Perumnas Desa Sekar Biru, Kab. Bangka Barat		200 m				516.000.000,00		Reses	
	Pengaspalan jalan di gang Macan		Pengaspalan jalan di gang Macan					Jalan gang macan RT. 03 Dusun Suntal, Kab. Bangka Barat		200 m				302.000.000,00		Reses	
	Peningkatan jalan Kelinci Desa Tempilang dari depan gereja GPIB, siring kiri kanan dan gorong-gorong		Peningkatan jalan Kelinci Desa Tempilang dari depan gereja GPIB, siring kiri kanan dan gorong-gorong					Jalan kelinci Desa Tempilang dari depan gereja GPIB masuk kedalam, Kab. Bangka Barat		400 m				777.000.000,00		Reses	
	Pengaspalan jalan lingkur		Pengaspalan jalan lingkur					Jalan lingkur perkuburan yayasan abadi dusun suntal, Kab. Bangka Barat		300 m				444.000.000,00		Reses	
	Peningkatan jalan Siliwangi RT.17 Desa Cupat.		Peningkatan jalan Siliwangi RT.17 Desa Cupat.					Jalan Siliwangi RT. 17 Desa Cupat, Kab. Bangka Barat		225 m				361.000.000,00		Reses	
	Pengaspalan jalan yang masih tanah merah		Pengaspalan jalan yang masih tanah merah					RT 08 + 1 KM Bukit manik Desa Puput, Kab. Bangka Barat		300 m				500.000.000,00		Reses	
	pengaspalan jalan		pengaspalan jalan					Jalan sebelum Mts ke Mts Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat		100 m				159.000.000,00		Reses	
	Peningkatan jalan		Peningkatan jalan					RT. 14 Dusun Nyikep Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat		100 m				159.000.000,00		Reses	
	peningkatan jalan gang desa tumbak petar		peningkatan jalan gang desa tumbak petar					Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat		125 m				200.000.000,00		Reses	
	Peningkatan jalan Aspal Jalan Gang Desa Tumbak Petar		Peningkatan jalan Aspal Jalan Gang Desa Tumbak Petar					Desa tumbak petar kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat		400 m				610.000.000,00		Reses	
	Perlu nya pembangunan Plat Duker di Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Buyan Kelumbi untuk mempermudah akses		Perlu nya pembangunan Plat Duker di Jalan Usaha Tani (JUT) di Desa Buyan Kelumbi untuk mempermudah akses					Desa Bayan Kelumbi, Kecamatan Tempilang, Kab. Bangka Barat		1 unit (3 m)				130.000.000,00		Reses	
	perbaikan jalan TPA Hidayatul Islamiyah dekat lapangan bola		perbaikan jalan TPA Hidayatul Islamiyah dekat lapangan bola					Desa Kenang Masam Kecamatan Mertok, Kab. Bangka Barat		100 m				150.000.000,00		Reses	
	Peningkatan jalan lingkungan masjid		Peningkatan jalan lingkungan masjid					Desa unar desa pebaru kecamatan jebus, Kab. Bangka Barat		130 m				200.000.000,00		Reses	
	Pembangunan jalan lingkur RT.08 kiri kanan dusun perumnas		Pembangunan jalan lingkur RT.08 kiri kanan dusun perumnas					Dusun perumnas desa Sekar biru, Kab. Bangka Barat		325 m				516.000.000,00		Reses	
	Kondisi jalan lingkur Desa Berang yang rusak dan berukbang. Lokasi dari SDN Desa Berang tembus ke Musholla		Kondisi jalan lingkur Desa Berang yang rusak dan berukbang. Lokasi dari SDN Desa Berang tembus ke Musholla					Jalan Lingkur Desa, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat		125 m				200.000.000,00		Reses	
	Pengaspalan jalan gang PAUD dusun rajek		Pengaspalan jalan gang PAUD dusun rajek					Dusun rajek desa berang kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat		225 m				350.000.000,00		Reses	
	Pemeliharaan berkala jalan lingkur jalan Gang Cik Dris-Jalan Gang Paud-Jalan Gann Gannon Dusun Desa Air Belo		Pemeliharaan berkala jalan lingkur jalan Gang Cik Dris-Jalan Gang Paud-Jalan Gann Gannon Dusun Desa Air Belo					Desa Air Belo kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		2 km				3.200.000.000,00		Reses	
	Peningkatan jalan lingkur Mak Bunge Desa Air Belo		Peningkatan jalan lingkur Mak Bunge Desa Air Belo					Desa Air Belo kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		0,8 km				1.300.000.000,00		Reses	
	Pengaspalan jalan rumah Memet ke rumah Pak Tahul Desa Cupat		Pengaspalan jalan rumah Memet ke rumah Pak Tahul Desa Cupat					Jalan rumah Memet ke rumah Pak Tahul Desa Cupat, Kab. Bangka Barat		90 m				138.000.000,00		Reses	
	peningkatan jalan dari tempat bapak achong sampai dengan ke lobak dan pembuatan polisi idur		peningkatan jalan dari tempat bapak achong sampai dengan ke lobak dan pembuatan polisi idur					tempat bapak achong sampai dengan ke lobak desa bait, Kab. Bangka Barat		400 m				620.000.000,00		Reses	
1 03 10 2 01 09	Rehabilitasi Jalan	1 03 10 2 01	Rehabilitasi Jalan	0034				Panjang Jalan yang Direhabilitasi		0 KM							
1 03 10 2 01 10	Pemeliharaan Berkala Jalan	1 03 10 2 01	Pemeliharaan Berkala Jalan					Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala		20,09 KM			20,09 KM	20.027.800.000,00		Renja	
	Pemeliharaan Berkala jalan Kacung - Pakkal Besar		Pemeliharaan Berkala jalan Kacung - Pakkal Besar							0,6 Km			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		Renja	
	Pemeliharaan Berkala Pelanqas - Kundi		Pemeliharaan Berkala Pelanqas - Kundi							1 km			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		Renja	
	Pemeliharaan Berkala Smpang Bulin - Betar		Pemeliharaan Berkala Smpang Bulin - Betar							1 km			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		Renja	
	Pemeliharaan Berkala Jalan Paritiga - Palawan		Pemeliharaan Berkala Jalan Paritiga - Palawan							0,6 Km			1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		Renja	
	Pemeliharaan Berkala Jalan Smpang Pait - Pali Laut		Pemeliharaan Berkala Jalan Smpang Pait - Pali Laut							300 m			500.000.000,00	500.000.000,00		Renja	
	Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Pala		Pemeliharaan Berkala Jalan Pelawan - Pala							1 km			1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		Renja	
	Pembangunan siring jalan Dusun Tempilang I RT 001 Desa Tempilang,Kecamatan Tempilang, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring jalan Dusun Tempilang I RT 001 Desa Tempilang,Kecamatan Tempilang, Kab. Bangka Barat.					Desa Tempilang	Panjang Siring terbangun	250 m			160.000.000,00	160.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Desa Air Bulin,Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring Desa Air Bulin,Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat.					Desa Air Bulin	Panjang Siring terbangun	200 m			123.000.000,00	123.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Desa Semulut jalan pantai barat rt 07,Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring Desa Semulut jalan pantai barat rt 07,Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat.					Desa Semulut	Panjang Siring terbangun	150 m			100.000.000,00	100.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Dusun Kedondong Rt 03 sampai dusun Tumbak Rt 04, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Dusun Kedondong Rt 03 sampai dusun Tumbak Rt 04, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat					Desa Tumbak Petar	Panjang Siring terbangun	250 m			170.000.000,00	170.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Dusun II Air Dalam,Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring Dusun II Air Dalam,Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat.					Desa Bukit Terak	Panjang Siring terbangun	250 m			155.000.000,00	155.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring dsn bangun jaya desa air kuang, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring dsn bangun jaya desa air kuang, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat.					Desa Air Kuang	Panjang Siring terbangun	300 m			200.000.000,00	200.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Desa Tuik Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Desa Tuik Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat					Desa Tuik	Panjang Siring terbangun	300 m			200.000.000,00	200.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Dusun Sinar Kelabat Rt 16 Desa cupat, Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring Dusun Sinar Kelabat Rt 16 Desa cupat, Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat.					Desa Cupat	Panjang Siring terbangun	250 m			150.000.000,00	150.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Sepanjang Jalan Veteran Desa Air Lintang, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring Sepanjang Jalan Veteran Desa Air Lintang, Kab. Bangka Barat.					Desa Air Lintang	Panjang Siring terbangun	300 m			200.000.000,00	200.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Jln bandes, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat.		Pembangunan siring Jln bandes, Desa Sinar Manik, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat.					Desa Sinar Manik	Panjang Siring terbangun	250 m			170.000.000,00	170.000.000,00		Musren	
	Pembangunan siring Dusun I rt 04 dan 03 gang pustu, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Dusun I rt 04 dan 03 gang pustu, Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat					Desa Air Nyatoh	Panjang Siring terbangun	300 m			200.000.000,00	200.000.000,00		Musren	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejelasan/Subkegiatan		Tokolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokolok Ukur dan Target Lama	Target	Tokolok Ukur	Target					
	Pembangunan siring Jalan Raya Bakit rt.001 s.d rt.002 Desa Bakit, Kecamatan Paritlita, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Jalan Raya Bakit rt.001 s.d rt.002 Desa Bakit, Kecamatan Paritlita, Kab. Bangka Barat					Desa Bakit	Panjang Siring terbangun	300 m			200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring Don Dendang RT01 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Don Dendang RT01 Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat					Desa Dendang	Panjang Siring terbangun	300 m			200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring Jl. Kantor Pos Dusun Puput Bawah Desa Puput, Kecamatan Paritlita, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Jl. Kantor Pos Dusun Puput Bawah Desa Puput, Kecamatan Paritlita, Kab. Bangka Barat					Desa Puput	Panjang Siring terbangun	300 m			200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring Jalan Perumnas (Depan Rumah Ibu Risnawati) Rt. 001 Rv. 01 Kelurahan Menjulang, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Jalan Perumnas (Depan Rumah Ibu Risnawati) Rt. 001 Rv. 01 Kelurahan Menjulang, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat					Kelurahan Tanjung	Panjang Siring terbangun	150 m			100,000,000.00	100,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring Kp. Sidorejo RT. 003 RW. 001, Kel. Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Kp. Sidorejo RT. 003 RW. 001, Kel. Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat					Kelurahan Sungaidieng	Panjang Siring terbangun	130 m			80,000,000.00	80,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring Gang Durian RT 003 RW 002 Kp. Jawa Baru, Kel. Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Gang Durian RT 003 RW 002 Kp. Jawa Baru, Kel. Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat					Kelurahan Sungaibaru	Panjang Siring terbangun	250 m			150,000,000.00	150,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring RT 001 RW 003 Kp. Tegalejo, Kel. Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring RT 001 RW 003 Kp. Tegalejo, Kel. Sungai Baru, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat					Kelurahan Sungaibaru	Panjang Siring terbangun	50 m			50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
	Pembangunan siring Dusun petaling jaya rt 02 Desa Sempang Yul, Kecamatan Temponia, Kab. Bangka Barat		Pembangunan siring Dusun petaling jaya rt 02 Desa Sempang Yul, Kecamatan Temponia, Kab. Bangka Barat					Desa Sempang Yul	Panjang Siring terbangun	150 m			100,000,000.00	100,000,000.00			Musren
	Pemeliharaan Berkala Jalan desa tebing, Kab. Bangka Barat		Pemeliharaan Berkala Jalan desa tebing, Kab. Bangka Barat					Desa Tebing	Panjang Jalan Yang di perihara	130 m			200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
	Pemeliharaan Berkala Jalan RT 01 dan RT 08 Desa Tanjung Niur, Kecamatan Pemanggilan, Kabupaten Bangka Barat		Pemeliharaan Berkala Jalan RT 01 dan RT 08 Desa Tanjung Niur, Kecamatan Pemanggilan, Kabupaten Bangka Barat					Desa Tanjung Niur	Panjang Jalan Yang di perihara	130 m			200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
	Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat		Pemeliharaan Berkala Jalan Desa Sinar Sari, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat					Desa Sinar Sari	Panjang Jalan Yang di perihara	100 m			175,000,000.00	175,000,000.00			Musren
	Pemeliharaan Berkala Jalan Dusun I dan II Desa Rambat, Kec. Sp. Tentiip, Kab. Bangka Barat		Pemeliharaan Berkala Jalan Dusun I dan II Desa Rambat, Kec. Sp. Tentiip, Kab. Bangka Barat					Desa Rambat	Panjang Jalan Yang di perihara	130 m			200,000,000.00	200,000,000.00			Musren
	Pembangunan Talud Jalan Kp. Senang Hati RT.02 dan RT.03 RW. 001 Kel. Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat		Pembangunan Talud Jalan Kp. Senang Hati RT.02 dan RT.03 RW. 001 Kel. Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kab. Bangka Barat					Kelurahan Sungaidieng	Panjang Talud Jalan yang dibangun	80 m			80,000,000.00	80,000,000.00			Musren
	Renovasi siring kiri-kanan dari jembatan sukun ke Gang LDI		Renovasi siring kiri-kanan dari jembatan sukun ke Gang LDI					Jembatan sukun ke Gang LDI, Kab. Bangka Barat		1 km			600,000,000.00	600,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring jalan		Pembangunan siring jalan					RT 2 depan rumah Waniarti,Sumas jalan		100 m			60,000,000.00	60,000,000.00			Reses
	pembangunan dan pelebaran siring sepanjang jalan kantor pos		pembangunan dan pelebaran siring sepanjang jalan kantor pos					Jalan Kantor pos Desa puput Kecamatan paritlita, Kab. Bangka Barat		450 m			279,000,000.00	279,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring jalan kabupaten Depan Bank Mandiri sampai di Ferdi		Pembangunan siring jalan kabupaten Depan Bank Mandiri sampai di Ferdi					Depan Bank Mandiri sampai di Ferdi Desa puput Kecamatan Paritlita, Kab. Bangka Barat		100 m			66,000,000.00	66,000,000.00			Reses
	Pembuatan siring jalan lingkaran desa dendang		Pembuatan siring jalan lingkaran desa dendang					Desa Dendang Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat		250 m			150,000,000.00	150,000,000.00			Reses
	pembuatan siring		pembuatan siring					Depan gang keramat sampai gang buktit maya Desa cupat kecamatan paritlita, Kab. Bangka Barat		180 m			112,500,000.00	112,500,000.00			Reses
	pembangunan siring gang Rafflesia		pembangunan siring gang Rafflesia					Gang Rafflesia Kelurahan kerangan, Kab. Bangka Barat		450 m			279,000,000.00	279,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring RT.08 sampai RT.10 (Air Duren)		Pembangunan siring RT.08 sampai RT.10 (Air Duren)					RT.08 sampai RT.10 (Air Duren) Desa Penyampak Kecamatan Templang, Kab. Bangka Barat		270 m			167,000,000.00	167,000,000.00			Reses
	Pembuatan siring baru Gg. Nadaria I		Pembuatan siring baru Gg. Nadaria I					Gg. Nadaria I Kelurahan Sungai Daeng, Kab. Bangka Barat		190 m			116,000,000.00	116,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring Jl. Culong RT.002 RW.003		Pembangunan siring Jl. Culong RT.002 RW.003					Jl. Culong RT.002 RW.003 Kelurahan Sungai Daeng, Kab. Bangka Barat		425 m			262,000,000.00	262,000,000.00			Reses
	perbaikan siring dan meninggikan di Jalan Koklong atau jalan Peleburan Perumnas		perbaikan siring dan meninggikan di Jalan Koklong atau jalan Peleburan Perumnas					Jalan Koklong Perumnas Kelurahan Kerangan, Kab. Bangka Barat		50 m			30,000,000.00	30,000,000.00			Reses
	Pembatan dan perbaikan DAM untuk jalan belakang tangsi		Pembatan dan perbaikan DAM untuk jalan belakang tangsi					jalan belakang tangsi, Kab. Bangka Barat		30 m			168,000,000.00	168,000,000.00			Reses
	pembuatan siring jalan tembus tikungan tiga		pembuatan siring jalan tembus tikungan tiga					Dusun VII Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat		450 m			270,000,000.00	270,000,000.00			Reses
	perbaikan jalan dusun air ibul yang sudah rusak		perbaikan jalan dusun air ibul yang sudah rusak					dusun air ibul desa belo laut kecamatan mentok, Kab. Bangka Barat		300 m			500,000,000.00	500,000,000.00			Reses
	belum adanya siring jalan		belum adanya siring jalan					dusun lembu kecamatan simpang teritig, Kab. Bangka Barat		100 m			70,000,000.00	70,000,000.00			Reses
	bantuan siring didekat lapangan bola		bantuan siring didekat lapangan bola					dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat		150 m			100,000,000.00	100,000,000.00			Reses
	bantuan siring di ujung dusun tayu		bantuan siring di ujung dusun tayu					Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat		150 m			90,000,000.00	90,000,000.00			Reses
	Bantuan siring di RT 10 disamping rumah Bapak Afuk daerah jembatan ke dua		Bantuan siring di RT 10 disamping rumah Bapak Afuk daerah jembatan ke dua					RT 10 Dusun Tayu Desa Ketap Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat		100 m			63,000,000.00	63,000,000.00			Reses
	perbaikan siring jalan gang sadar rt 02 rw 02 kelurahan tanjung		perbaikan siring jalan gang sadar rt 02 rw 02 kelurahan tanjung					kelurahan tanjung kecamatan muntok, Kab. Bangka Barat		45 m			27,000,000.00	27,000,000.00			Reses
	perbaikan siring jalan dan talud rt 01 dan rt 02 rw 14		perbaikan siring jalan dan talud rt 01 dan rt 02 rw 14					rt 01 dan rt 02 rw 14 kelurahan tanjung, Kab. Bangka Barat		75 m			59,000,000.00	59,000,000.00			Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kelembagaan/Subkelembagaan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokol Ukur dan Target Lama		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
	perbaikan siring jalan kp tarjung sawah sampai jalan keramat rt 03 rw 04		perbaikan siring jalan kp tarjung sawah sampai jalan keramat rt 03 rw 04					kp tarjung sawah sampai jalan keramat rt 03 rw 04 kelurahan tarjung kecamatan mentok, Kab. Bangka	600 m				359,000,000.00	359,000,000.00			Reses
	pembangunan siring desa air menduyung		pembangunan siring desa air menduyung					desa air menduyung, Kab. Bangka Barat	400 m				263,000,000.00	263,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring di dusun II gang tengah		Pembangunan siring di dusun II gang tengah					Desa Beto Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	350 m				224,000,000.00	224,000,000.00			Reses
	pembersihan dan pemeliharaan serta pembangunan siring gang timur		pembersihan dan pemeliharaan serta pembangunan siring gang timur					Desa Beto Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	180 m				112,000,000.00	112,000,000.00			Reses
	pembangunan siring di jalan tembus sampai ke jalan raya pelim Rw 07 Rt 06		pembangunan siring di jalan tembus sampai ke jalan raya pelim Rw 07 Rt 06					Desa Beto Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	180 m				112,000,000.00	112,000,000.00			Reses
	Perbaikan jalan tembus gang siswa ke patit gang makrya Rw 07 Rt 01-02		Perbaikan jalan tembus gang siswa ke patit gang makrya Rw 07 Rt 01-02					Desa Beto Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	200 m				350,000,000.00	350,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring gang plamboyan sampai ke cafe orange Rw 01 Rt 02		Pembangunan siring gang plamboyan sampai ke cafe orange Rw 01 Rt 02					Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	370 m				224,000,000.00	224,000,000.00			Reses
	pemeliharaan jalan dusun II keranj		pemeliharaan jalan dusun II keranj					Desa Kamlat Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat	200 m				350,000,000.00	350,000,000.00			Reses
	Perbaikan jalan Rimbak Kendong tembus Ibul		Perbaikan jalan Rimbak Kendong tembus Ibul					Desa Peradong Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat	140 m				350,000,000.00	350,000,000.00			Reses
	Pembangunan siring jalan dekat rumah Bapak Rafiq		Pembangunan siring jalan dekat rumah Bapak Rafiq					Desa Rukam Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	150 m				90,000,000.00	90,000,000.00			Reses
	pembangunan siring untuk desa sungai buluh		pembangunan siring untuk desa sungai buluh					Desa Sungai Buluh Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	180 m				112,500,000.00	112,500,000.00			Reses
	Perbaikan jalan		Perbaikan jalan					J. Nursobah Kampung Karanggen, Kab. Bangka Barat	65 m				100,000,000.00	100,000,000.00			Reses
	Perbaikan siring jalan lingkari		Perbaikan siring jalan lingkari					Tangsi Mentok, Kab. Bangka Barat	360 m				216,000,000.00	216,000,000.00			Reses
	Peningkatan jalan		Peningkatan jalan					Jalan Kantor pos Desa Puput Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat	120 m				302,000,000.00	302,000,000.00			Reses
	pembangunan siring		pembangunan siring					Desa Air Lintang, Kab. Bangka Barat	550 m				334,800,000.00	334,800,000.00			Reses
	Peningkatan dan pemeliharaan jalan dari Sinar Kelabat ke Pelawan dan Pelawan ke Parit tiga		Peningkatan dan pemeliharaan jalan dari Sinar Kelabat ke Pelawan dan Pelawan ke Parit tiga					jalan dari Sinar Kelabat ke Pelawan dan Pelawan ke Parit tiga, Kab. Bangka Barat	650 m				1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			Reses
	Perbaikan siring dan peningkatan jalan di dusun suntai		Perbaikan siring dan peningkatan jalan di dusun suntai					Dusun Suntai Desa Air Gantang, Kab. Bangka Barat	80 m				208,000,000.00	208,000,000.00			Reses
	Perbaikan siring jalan		Perbaikan siring jalan					kelurahan kelapa, Kab. Bangka Barat	150 m				100,000,000.00	100,000,000.00			Reses
	pembangunan siring dusun belit		pembangunan siring dusun belit					Dusun Belit Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat	200 m				135,000,000.00	135,000,000.00			Reses
	Peningkatan Jalan Desa Pangkal Beras		Peningkatan Jalan Desa Pangkal Beras					Desa Pangkal Beras, Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat	250 m				630,000,000.00	630,000,000.00			Reses
	Rehab siring desa belo laut		Rehab siring desa belo laut					Rw 07 Rt 01-02 desa belo laut kecamatan mentok, Kab. Bangka Barat	350 m				224,000,000.00	224,000,000.00			Reses
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	1 03 10 2.01	0046 Pemeliharaan Rutin Jalan					Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30 Km	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	31 km		6,000,000,000.00	7,000,000,000.00			
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	1 03 10 2.01	0040 Pembangunan Jembatan					Panjang Jembatan yang Dibangun	20 m	Jumlah Jembatan yang Dibangun	2 jembatan		6,250,000,000.00	6,250,000,000.00			
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	1 03 10 2.01	0039 Rehabilitasi Jembatan					Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	8 m	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	1 jembatan		100,000,000.00	100,000,000.00			
1 03 10 2.01 19	Rehabilitasi Jembatan Air Belanak 2	1 03 10 2.01	0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan					Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	47 m	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3 jembatan		235,000,000.00	235,000,000.00			
1 03 10 2.01 21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	1 03 10 2.01						Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana	1 Km				1,000,000,000.00				
1 03 10 2.02 25	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa	1 03 10 2.02						Panjang Jalan Strategis Desa yang Direkonstruksi	6,825 Km				11,032,000,000.00				
	Rekonstruksi Jalan PAUD Melalui Dusun Rajek Desa Berang							Desa Berang	250 m				400,000,000.00				
	Peningkatan jalan gang bola							Jalan gang bola RT.09 Dusun Perumnas Desa Sekar Biru, Kab. Bangka Barat	200 m				316,000,000.00				Reses
	Pengaspalan jalan di gang Macan							Jalan gang macan RT. 03 Dusun Suntai, Kab. Bangka Barat	200 m				302,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan Kelinci Desa Templang dari depan gereja GPIB, siring kiri kanan dan gorong-gorong							Jalan kelinci Desa Templang dari depan gereja GPIB masuk kedalam, Kab. Bangka Barat	400 m				777,000,000.00				Reses
	Pengaspalan jalan lingkari							Jalan lingkari perkebunan yayasan abadi dusun suntai, Kab. Bangka Barat	300 m				444,000,000.00				Reses
	Peningkatan Jalan Siliwangi RT.17 Desa Cupat.							Jalan Siliwangi RT. 17 Desa Cupat, Kab. Bangka Barat	225 m				361,000,000.00				Reses
	Pengaspalan jalan yang masih tanah merah							RT.08 ± 1 KM Bukit manik Desa Puput, Kab. Bangka Barat	300 m				500,000,000.00				Reses
	pengaspalan jalan							Jalan sebelum Mts ke Mts Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat	100 m				159,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan							RT. 14 Dusun Nyikep Desa Penyampak, Kab. Bangka Barat	100 m				159,000,000.00				Reses
	peningkatan jalan gang desa tumbak petar							Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	125 m				200,000,000.00				Reses
	Peningkatan jalan Aspal Jalan Gang Desa Tumbak Petar							Desa Tumbak petar kecamatan jebus, Kab. Bangka Barat	400 m				610,000,000.00				Reses
	Perlu nya pembangunan Plat Duker di Jalan Usaha Tani (UT) di Desa Buyan Kelumbi untuk mempermudah akses							Desa Buyan Kelumbi, Kecamatan Templang, Kab. Bangka Barat	1 unit (3 m)				130,000,000.00				Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokol Ukur dan Target Lama	Target	Tokol Ukur	Target						
	perbaikan jalan TPA Hidayatul Isamiyah dekat lapangan bola							Desa Kemang Masam Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat				150,000,000.00					Reses	
	Peningkatan jalan lingkungan masjid							Dusun unar desa pebuar kecamatan jebus, Kab. Bangka Barat				200,000,000.00					Reses	
	Pembangunan jalan lingkaran RT.08 kiri kanan dusun perumnas							Dusun perumnas desa Sekar biru, Kab. Bangka Barat				516,000,000.00					Reses	
	Kondisi jalan Lingkaran Desa Berang yang rusak dan berubung. Lokasi dan SDN Desa Berang tembus ke Musholla							Jalan Lingkaran Desa, Desa Berang, Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat				200,000,000.00					Reses	
	Pengaspalan jalan gang PAUD dusun rajek							Dusun rajek desa berang kecamatan simpang teritip, Kab. Bangka Barat				350,000,000.00					Reses	
	Pemeliharaan berkala jalan lingkaran jalan Gang Cik Dri-Jalan Gang Paud-Jalan Gang Geronzo desa Air Belo							Desa Air Belo kecamatan Mumtok, Kab. Bangka Barat				3,200,000,000.00					Reses	
	Peningkatan Jalan Lingkaran Mak Bunge Desa Air Belo							Desa Air Belo kecamatan Mumtok, Kab. Bangka Barat				1,300,000,000.00					Reses	
	Pengaspalan jalan rumah Memet ke rumah Pak Tahlul Desa Cupat							jalan rumah Memet ke rumah Pak Tahlul Desa Cupat, Kab. Bangka Barat				138,000,000.00					Reses	
	peningkatan jalan dari tempat bakop achong sampai dengan ke lobak dan pembuatan polist tidur							tempat bakop achong sampai dengan ke lobak desa bait, Kab. Bangka Barat				620,000,000.00					Reses	
1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	1 03 11	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71			Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	18.12%	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	18.12%	74,000,000.00	74,000,000.00		Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan	
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Indeks Bangunan Gedung	Sedang			Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n	50 orang	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang disertifikasi pada tahun n	50 orang	62,000,000.00	62,000,000.00			
1 03 11 2.01 04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis							Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 orang	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	50 orang	62,000,000.00	62,000,000.00			
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 sistem informasi	Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan	1 sistem informasi	12,000,000.00	12,000,000.00			
1 03 11 2.01 06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 03 11 2.01 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota							Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Diupdate	1 Dokumen	12,000,000.00	12,000,000.00			
1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	1 03 12	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1.029 Milyar rupiah			persentase kebijakan penataan ruang	42.85%	persentase kebijakan penataan ruang	42.85%	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	500,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota	1 03 12 2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTU) Kabupaten/Kota							Jumlah RTRW dan RRTU yang sudah ditetapkan	1 Peraturan	Jumlah RTRW dan RRTU yang sudah ditetapkan	1 Peraturan	400,000,000.00	400,000,000.00	200,000,000.00		
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Penyusunan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 03 12 2.01 0010	Penetapan RTR Kabupaten/Kota					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Peretujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Perkada RTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00			
1 03 12 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 03 12 2.01 0012	Sosialisasi Peraturan Penundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang					Kecamatan Jebus	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	50 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00			
1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun	1 Rancangan kebijakan	Jumlah Rancangan Kebijakan Perencanaan Tata Ruang yang disusun	1 Rancangan kebijakan	450,000,000.00	450,000,000.00	190,000,000.00		
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kab	1 03 12 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota					Kecamatan Parititiga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTU Kabupaten/Kota	1 dokumen	450,000,000.00	450,000,000.00	190,000,000.00			
1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							Jumlah Jenis data base pemanfaatan ruang	1 Jenis	Jumlah Jenis data base pemanfaatan ruang	1 Jenis	30,000,000.00	230,000,000.00	50,000,000.00		
1 03 12 2.03 02	Sistem Informasi Penataan Ruang	1 03 12 2.03 0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	50,000,000.00			
		1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang							Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000.00				
1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 03 12 2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota							Persentase objek ruang yang dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	Persentase objek ruang yang dilakukan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100%	250,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00		
1 03 12 2.04 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum bidang Penataan Ruang	1 03 12 2.04 0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00			
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang di lingkungan pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota	1 03 12 2.03 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen	200,000,000.00		50,000,000.00			
1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	1 03 03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70			Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringn perpipaan	23.70%	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringn perpipaan (SPAM)	23.70%	5,330,000,000.00	5,330,000,000.00		Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			Prevalensi Stunting	6.40%			Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100%	Persentase SPAM dalam Kondisi Baik dan Berfungsi	100%	5,330,000,000.00	5,330,000,000.00			
1 03 03 2.01 03	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 03 03 2.01 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Tanjung Ular	Kapasitas SPAM IK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang dibangun	10 Liter/Desk	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	10 Liter/Desk	4,000,000,000.00	4,450,000,000.00				
1 03 03 2.01 04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1 03 03 2.01						Desa Sinar Surya	Jumlah bangunan rumah yang berdaya melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	60 SR			450,000,000.00					
1 03 03 2.01 05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1 03 03 2.01 0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					Pelabuhan Tanjung Kalian	Peningkatan Kapasitas SPAM IK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	4 Liter/Desk	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	4 Liter/Desk	750,000,000.00	750,000,000.00				
1 03 03 2.01 14	Pembangunan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	1 03 03 2.01 0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						Jumlah Kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	50 Penyelenggara a	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	50 Orang	15,000,000.00	15,000,000.00				



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemeliharaan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
1 03 03 2.01 16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	1 03 03 2.01 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	10 Unit	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Diambilnya	10 Unit	115,000,000.00	115,000,000.00			
1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	1 03 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70.70		Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	4.72%	Persentase Sarana Prasarana Sistem Air Limbah Domestik Berkondisi Layak	4.72%	2,800,554,000.00	2,800,554,000.00	-	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.	
1 03 05 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 03 05 2.01	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>			Prevalensi Stunting	6.40%		Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100%	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Sarana Air Limbah Domestik Layak dalam Kondisi Baik	100%	2,800,554,000.00	2,800,554,000.00	-		
1 03 05 2.01 06	Pembangunan/penyediaan Sub Sistem Pengolahan setempat	1 03 05 2.01 0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat					Desa Sanguku	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	168 Rumah tangga	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar	168 Rumah tangga	2,230,500,000.00	2,230,500,000.00			
	- Pembangunan WC Dusun Sanguku dan Dusun Bubung Tujuh Desa Sanguku Kecamatan Tempiang, Kab. Bangka Barat		- Pembangunan WC Dusun Sanguku dan Dusun Bubung Tujuh Desa Sanguku Kecamatan Tempiang, Kab. Bangka Barat					Desa Sanguku	7 Rumah Tangga				80,000,000.00	80,000,000.00			Musren
	- Pembangunan WC Desa semulut RT 01-10, Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat		- Pembangunan WC Desa semulut RT 01-10, Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat					Desa Semulut	4 Rumah Tangga				50,000,000.00	50,000,000.00			Musren
	Pembangunan WC untuk warga		Pembangunan WC untuk warga					Desa Penyampak Kecamatan Tempiang	70 Rumah Tangga				840,000,000.00	840,000,000.00			Reses
	Pembangunan WC di Keleak Kabung RT.06		Pembangunan WC di Keleak Kabung RT.06					Kab. Bangka Barat	6 Rumah Tangga				72,000,000.00	72,000,000.00			Reses
	Pembangunan WC di Desa Tempiang		Pembangunan WC di Desa Tempiang					Desa Tempiang, Kab. Bangka Barat	5 Rumah Tangga				60,000,000.00	60,000,000.00			Reses
	Pembangunan WC		Pembangunan WC					Desa Berteng kota Kecamatan Tempiang	9 Rumah Tangga				108,000,000.00	108,000,000.00			Reses
	Bantuan pembangunan WC rumah penduduk di Ciulong		Bantuan pembangunan WC rumah penduduk di Ciulong					Kab. Bangka Barat	2 Rumah Tangga				24,000,000.00	24,000,000.00			Reses
	fasilitas kurang memadai kecamatan tempiang		fasilitas kurang memadai kecamatan tempiang					Ciulong Kelurahan Sungai Daeng, Kab. Bangka Barat	10 Rumah Tangga				120,000,000.00	120,000,000.00			Reses
	fasilitas kurang memadai		fasilitas kurang memadai					Kecamatan Tempiang, Kab. Bangka Barat	2 Rumah Tangga				30,500,000.00	30,500,000.00			Reses
	pembuatan wc di bozem kp. teluk rubiah		pembuatan wc di bozem kp. teluk rubiah					Desa bozem kp. teluk rubiah, Kab. Bangka Barat	2 Rumah Tangga				36,000,000.00	36,000,000.00			Reses
	pembangunan wc untuk masyarakat agar lingkungan masyarakat bersih dan sehat		pembangunan wc untuk masyarakat agar lingkungan masyarakat bersih dan sehat					Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	30 Rumah Tangga				540,000,000.00	540,000,000.00			Reses
	pembangunan wc (jamban) kelurahan kelapa		pembangunan wc (jamban) kelurahan kelapa					Kelurahan Kelapa, Kab. Bangka Barat	20 Rumah Tangga				200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
	Pembangunan MCK dan Sumur bor di Kelenteng Nan Fuk Chi Desa Jebus		Pembangunan MCK dan Sumur bor di Kelenteng Nan Fuk Chi Desa Jebus					Kelenteng Nan Fuk Chi Desa Jebus, Kab. Bangka Barat	1 Rumah Tangga				70,000,000.00	70,000,000.00			Reses
1 03 05 2.01 10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik	1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD)						Jumlah Unit Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Diambilnya	23 unit	Jumlah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Diperasikan dan Diambilnya	23 unit	200,000,000.00	200,000,000.00			
1 03 05 2.01 14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja						Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	200 Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	200 Rumah Tangga	212,054,000.00	212,054,000.00			
1 03 05 2.01 15	Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana (IPIT)	1 03 05 2.01 0036	Pembangunan/penyediaan Sarana dan Prasarana (IPIT)					TPA Pal 9	Kapasitas IPIT Terbangun	1 M3/Hari	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPIT) Terbangun	1 M3/Hari	158,000,000.00	158,000,000.00			
1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	1 03 08	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tertangani	87%	Persentase Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang tertangani	87%	19,907,000,000.00	19,907,000,000.00	-	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan pembangunan.	
1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>	1 03 08 2.01	<b>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</b>			Indeks Bangunan Gedung	Sedang		Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani	100%	Jumlah Sarana dan Prasarana bangunan Gedung yang tertangani	100%	19,907,000,000.00	19,907,000,000.00	-		
1 03 08 2.01 1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendaftaran Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 03 08 2.01 0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung melalui SIMBG						Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung	200 Dokumen	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendaftaran Bangunan Gedung	200 Dokumen	86,000,000.00	86,000,000.00			
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 03 08 2.01 0021	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19,000,000,000.00	19,000,000,000.00			
1 03 08 2.01 4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 03 08 2.01 0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	21,000,000.00	21,000,000.00			
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1 03 08 2.01 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	4 unit	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara	4 unit	800,000,000.00	800,000,000.00			
1 03 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	1 03 04	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		Persentase Sarana Prasarana Persampahan (TPA & TPST )	42.86%	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan ( TPA & TPST )	42.86%	100,000,000.00	100,000,000.00	-	Membang lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
						Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	52.94 %										
						Indeks Risiko Bencana	Tinggi										
1 03 04 2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota</b>	1 03 04 2.01	<b>Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota</b>						Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi	3 unit	Jumlah Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang beroperasi	3 unit	100,000,000.00	100,000,000.00	-		
1 03 04 2.01 01	Penyusunan Rencana, kebijakan, strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten / Kota	1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00			
1 03 04 2.01 04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/ TPS-3R/TPS	1 03 04 2.01 0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS					Air Limau	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Diambilnya	1 unit	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Diambilnya	1 unit	50,000,000.00	50,000,000.00			
1 03 09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	1 03 09	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	37.50%	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	37.50%	7,550,000,000.00	7,550,000,000.00	-	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan pembangunan.	
						Indeks Bangunan Gedung	Sedang										

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target						
1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1 03 09 2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani kabupate	100%	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota yang tertangani kabupate	100%	7.550.000,000.00	7.550.000,000.00	-			
1 03 09 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 03 09 2.01 010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	400,000,000.00	400,000,000.00	-			
1 03 09 2.01 2	Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 03 09 2.01 0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya						Jumlah Supervisi Penataan/ Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Mendapatkan Supervisi dalam Penataan	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	-			
1 03 09 2.01 03	Penataan bangunan dan lingkungan	1 03 09 2.01 0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya					spot center dan cluster cina muntok	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	2 Kawasan	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00	-			
1 03 09 2.01 04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	1 03 09 2.01 0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan						Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1 Kawasan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	-			
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										14,188,020,000.00	14,188,020,000.00	7,997,690,000.00			
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN										14,188,020,000.00	14,188,020,000.00	7,997,690,000.00			
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Matutras SPIP Indeks SPBE Baik	72.14 WTP Berkembang Baik		Tergemulainya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Tergemulainya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	6,156,020,000.00	6,156,020,000.00	6,497,690,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik		
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00			
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 04 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 04 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 04 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 04 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 04 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	3,700,900,000.00	3,700,900,000.00	3,710,000,000.00			
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 04 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 04 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	1 04 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 04 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	300,000.00	300,000.00	8,500,000.00			
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 04 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,500,000.00		APBD	
1 04 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 04 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	Persentase Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	238,000,000.00	238,000,000.00	2,500,000.00			
1 04 01 2.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1 04 01 2.04 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	238,000,000.00	238,000,000.00	2,500,000.00		APBD	
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	Persentase Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100 Persen	22,800,000.00	22,800,000.00	48,000,000.00			
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	1 04 01 2.05 0002	Pengadaan Pakalan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakalan Dinas berserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Jumlah Paket Pakalan Dinas berserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	-	-	20,000,000.00		APBD	
1 04 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 04 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 04 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	7,500,000.00	7,500,000.00	4,000,000.00		APBD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 04 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 orang	15,000,000.00	15,000,000.00	14,000,000.00		APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur						Target
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Persentase Penyelesaian Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terselesaikan	100 Persen	100 Persen	379.300.000,00	379.300.000,00	602.908.500,00			
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 04 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 04 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 04 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 04 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	28.660.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 04 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	30.000.000,00	164.948.500,00		APBD		
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 04 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	4.800.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1 04 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	62.500.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 04 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	220.000.000,00	220.000.000,00	300.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.06 10	Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 04 01 2.06 0010	Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	300.000,00	300.000,00	5.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100 Persen			172.391.500,00				
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 04 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	Unit			10.000.000,00				
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 04 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Unit			60.000.000,00				
1 04 01 2.07 03	Pengadaan Mebel	1 04 01 2.07 0003	Pengadaan Mebel yang Disediakan					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	Paket			15.000.000,00				
1 04 01 2.07 04	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 04 01 2.07 0004	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit			47.391.500,00				
1 04 01 2.07 05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 04 01 2.07 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit			20.000.000,00				
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 04 01 2.07 0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Unit			20.000.000,00				
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	1.752.290.000,00	1.752.290.000,00	1.595.390.000,00				
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 04 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 04 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	117.000.000,00	500.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 04 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	10.500.000,00		APBD		
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 04 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.627.290.000,00	1.627.290.000,00	1.082.890.000,00		APBD		
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	60.930.000,00	60.930.000,00	332.900.000,00				
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 04 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea/Biaya				Kab. Bangka Barat, Mentok, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea/Biaya	6 Unit	6 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	257.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.09 02	Pemeliharaan Mebel	1 04 01 2.09 0002	Pemeliharaan Mebel yang Dipeelihara					Jumlah Mebel yang Dipeelihara	Unit	Unit			10.000.000,00				
1 04 01 2.09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 04 01 2.09 0003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeelihara					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeelihara	13 unit	13 unit	7.930.000,00	7.930.000,00	5.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.09 04	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 04 01 2.09 0004	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Rehabilitasi					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	50.000.000,00		APBD		
1 04 01 2.09 05	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 04 01 2.09 0005	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Rehabilitasi					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Rehabilitasi	Unit	Unit			10.000.000,00		APBD		
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunny Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	100%	100%	357.000.000,00	357.000.000,00	200.000.000,00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjatso		
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					Persentase Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang terdata	4 Dokumen	4 Dokumen	12.000.000,00	12.000.000,00	45.000.000,00				
1 04 02 2.01 1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01 0001	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang berpotensi terkena relokasi Program Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00		APBD		
1 04 02 2.01 2	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01 0002	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	5.000.000,00	2.500.000,00	10.000.000,00		APBD		
1 04 02 2.01 3	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 04 02 2.01 0003	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00		APBD		
1 04 02 2.01 4	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 04 02 2.01 0004	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 dokumen	1 dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	15.000.000,00		APBD		
1 04 02 2.01 5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Kabupaten/Kota	1 04 02 2.01 0005	Pendataan dan verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi					Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Teridentifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	500.000,00	10.000.000,00		APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
		1 04 02 2.01	0010							Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terdaftar	1 Dokumen		500,000,000				
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	04 02 2.03							Jumlah rumah yang dibangun dan direhabilitasi bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	15 Unit Rumah	15 Unit Rumah	335,000,000.00	335,000,000.00	130,000,000.00			
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03	0001						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terdaftar	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	135,000,000.00	135,000,000.00	60,000,000.00			
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	1 04 02 2.03	0004						Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Terdaftar	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	200,000,000.00	200,000,000.00	70,000,000.00			
	Penerbitan Izin pembangunan dan pengembangan perumahan	1 04 02 2.06							Persentase Izin pembangunan dan pengembangan perumahan	100 persen	100 persen	10,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00			
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 04 02 2.06	0003						Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	1 laporan	1 laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00		APBD	
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1 04 03		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunny Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	3.33%	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	3.33%	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	400,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 04 03 2.01							Persentase Izn pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100%	Persentase Izn pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman yang diterbitkan	100%	110,000,000.00	-	50,000,000.00		
1 04 03 2.01 2	Penyusunan dan/atau Review serta legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.01							Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Terlegalisasi	1 Dokumen		100,000,000.00		20,000,000.00		APBD	
1 04 03 2.01 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.01							Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan		10,000,000.00		30,000,000.00		APBD	
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha	1 04 03 2.02							Jumlah dokumen Perencanaan, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	560,000,000.00	50,000,000.00			
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.02	0014						Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	25,000,000.00			
	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	1 04 03 2.02	0008						Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Terlegalisasi	1 Dokumen	3 Dokumen	550,000,000.00		25,000,000.00		APBD	
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 04 03 2.03							Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha yang tertangani	20.00%	Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha yang tertangani	20.00%	1,010,000,000.00	570,000,000.00	300,000,000.00		
1 04 03 2.03 1	Penyusunan Rencana Tapak ( Site Plan ) dan Detail Engineering Design ( DED ) Peremajaan/Perumahan Permukiman Kumuh	1 04 03 2.03						kampung Palembang	Jumlah Rencana Tapak ( Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh	2 Dokumen		450,000,000.00		25,000,000.00		APBD	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1 04 03 2.03	0002					Kawasan Kumuh Kabupaten	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit rumah	60,000,000.00	60,000,000.00	90,000,000.00		APBD
	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	1 04 03 2.03							Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen				85,000,000.00			
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Perumahan/ Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	1 04 03 2.03	0013					kampung Palembang	Luas Permukiman Kumuh yang Diselenggarakan/Disiasi	0.5 ha	Luas Permukiman Kumuh yang Diselenggarakan/ Disiasi	0.5 ha	300,000,000.00	300,000,000.00	50,000,000.00		APBD
1 04 03 2.03	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha	1 04 03 2.03	0012						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun	5 Unit	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang dibangun untuk peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha	5 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	50,000,000.00		
		1 04 03 2.03	0004						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Perumahan / Perumahan Permukiman Kumuh (Penataan dan Sinkronisasi koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh)	1 Laporan		10,000,000.00					
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1 04 04		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunny Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	15.34%	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	15.34%	3,865,000,000.00	3,865,000,000.00	400,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 04 04 2.01							Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun / direhabilitasi pada Daerah Kabupaten / Kota	500 unit	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun / direhabilitasi pada Daerah Kabupaten / Kota	500 unit	3,865,000,000.00	3,865,000,000.00	400,000,000.00		
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1 04 04 2.01	0001					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	86 Unit rumah	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	498 Unit Rumah	2,615,000,000.00	3,865,000,000.00	300,000,000.00		APBD & Musren Kec
								Banka Barat (Renai)		2 Unit			60,000,000.00			Reses	
								Desa Bukam		3 Unit			90,000,000.00			Musren	
								Desa Kelumbi		6 Unit			180,000,000.00			Musren	
								Desa Benteng Kota		6 Unit			180,000,000.00			Musren	
								Desa Sandau		4 Unit			120,000,000.00			Musren	
								Tempilang		10 unit			300,000,000.00			Reses	
								Desa Bakri		2 unit			60,000,000.00			Reses	
								RT. 111 Kampung Dusun Bukit Bawah		1 unit			30,000,000.00			Reses	
								Dusun Belit Desa Dendang		2 unit			75,000,000.00			Reses	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan		Subkegiatan						
									Target	Uraian	Target	Uraian					
								Desa Cupat				180.000.000,00					Reses
								Desa Sanku				90.000.000,00					Reses
								Desa Tempilang				150.000.000,00					Reses
								Desa Belo Laut				900.000.000,00					Reses
								Kecamatan Kelapa				200.000.000,00					Reses
1 04 04 2.01 02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU diluar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha							Kab. Bangka Barat, Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Berserta PSU di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	Jumlah Dokumen Kesepakatan	1 Dokumen	0 Dokumen	1.250.000.000,00		100.000.000,00			APBD
1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	1 04 05	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Memurahnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	16.7%	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	16.7%	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00	500.000.000,00		Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU	1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU						Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik	100%	Persentase PSU Perumahan dalam kondisi baik	100%	2.680.000.000,00	2.680.000.000,00	500.000.000,00		
1 04 05 2.01 1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 04 05 2.01 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00			
1 04 05 2.01 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1 04 05 2.01 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 Lokasi	17 Lokasi	2.580.000.000,00	2.580.000.000,00	360.000.000,00			
	- Rehabilitasi Jalan		- Rehabilitasi Jalan					Kerangkaan	2 Lokasi	2 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00					Rendia Musren
	- Pembangunan Talud		- Pembangunan Talud					Kp. Senang Hati, RT.2 dan RT. 3 RW. 1	1 Lokasi	1 Lokasi							Musren
	- Pembangunan Jalan Setapak		- Pembangunan Jalan Setapak					RT. 2 RW. 6, Jalan pinggir pantai teluk rubah/ Ti Pak Dan	150 m	150 m	200.000.000,00	200.000.000,00					Musren
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Dusun Tayu desa ketap kecamatan jebus, Kab. Bangka Barat	125 M	125 M	100.000.000,00	100.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Desa benteng kota, Kab. Bangka Barat	P. 270 m, L. 2 m	P. 270 m, L. 2 m	216.000.000,00	216.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Desa benteng kota, Kab. Bangka Barat	P. 76 m, L. 2 m	P. 76 m, L. 2 m	61.000.000,00	61.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Desa Tempilang, Kab. Bangka Barat	236 m	236 m	260.000.000,00	260.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Paud Generasi Emas, Jalan Tj. Kallan RT 04 RW 10, Kab. Bangka Barat	L 3m, P. 20m	L 3m, P. 20m	30.000.000,00	30.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Desa Tembak Petar, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	182 m	182 m	200.000.000,00	200.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Desa Midak, Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	182 m	182 m	200.000.000,00	200.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					rt 01 rw 08 keturahan tanjung, Kab. Bangka Barat	114 m	114 m	126.000.000,00	126.000.000,00					Reses
	- Pembangunan Jalan Baru (setapak)		- Pembangunan Jalan Baru (setapak)					Kelurahan Sungai Baru, Kab. Bangka Barat	20 m	20 m	50.000.000,00	50.000.000,00					Reses
	-Pembangunan Pagar Kuburan		-Pembangunan Pagar Kuburan					Pagar Pemukiman non Muslim Desa Sinar sari kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat	92 m	92 m	120.000.000,00	120.000.000,00					Reses
	-Pembangunan Pagar Kuburan		-Pembangunan Pagar Kuburan					Desa Sinar Sari Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat	92 m	92 m	120.000.000,00	120.000.000,00					Reses
	-Pembangunan Pagar Kuburan		-Pembangunan Pagar Kuburan					Desa Peradong, Kecamatan Simpang Teritip, Kab. Bangka Barat	38 m	38 m	50.000.000,00	50.000.000,00					Reses
	-Pembangunan Pagar Kuburan		-Pembangunan Pagar Kuburan					Dusun Tayu desa ketap kecamatan jebus, Kab. Bangka Barat	267 m	267 m	347.000.000,00	347.000.000,00					Reses
	-Pembangunan Pagar Kuburan		-Pembangunan Pagar Kuburan					Desa Mayang, Kab. Bangka Barat	154 m	154 m	200.000.000,00	200.000.000,00					Reses
	-Pembangunan Pagar Kuburan		-Pembangunan Pagar Kuburan					Desa belo laut kecamatan mentok, Kab. Bangka Barat	154 m	154 m	200.000.000,00	200.000.000,00					Reses
1 04 05 2.01 05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	1 04 05 2.01							Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen				80.000.000,00			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>	1 05	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>									16.453.030.000,00	16.453.030.000,00	18.133.641.500,00			
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>									4.991.630.000,00	4.991.630.000,00	6.327.100.000,00			
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1 05 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Odn BPR Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72,14 WTP Baik 65,07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3.570.490.000,00	3.570.490.000,00	3.908.500.000,00		Pemperkuat Kualitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik
X XX 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 05 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00		
X XX 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
X XX 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
X XX 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
X XX 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
X XX 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
X XX 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Tertaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Tertaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2.300.900.000,00	2.300.900.000,00	2.300.900.000,00		
X XX 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	15 Orang/Bulan	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
X IX 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000			
X IX 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000			
X IX 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 05 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000			
X IX 01 2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1 05 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>11,550,000,000</b>	<b>11,550,000,000</b>	<b>42,800,000,000</b>			
X IX 01 2.05 02	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelemahannya	1 05 01 2.05 0002	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelemahannya					Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelemahannya	0 paket	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelemahannya	0 paket	-	-	12,500,000,000			
X IX 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 05 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000			
X IX 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 05 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	3,750,000,000	3,750,000,000	15,000,000,000			
X IX 02 2.03 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 05 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	7,500,000,000	7,500,000,000	15,000,000,000			
X IX 01 2.05	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1 05 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>			
X IX 01 2.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 05 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000			
X IX 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1 05 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>601,300,000,000</b>	<b>601,300,000,000</b>	<b>670,300,000,000</b>			
X IX 01 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6,000,000,000	6,000,000,000	10,000,000,000			
X IX 01 2.06 02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1 05 01 2.06 0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket	174,000,000,000	174,000,000,000	20,000,000,000			
X IX 01 2.06 03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8,000,000,000	8,000,000,000	10,000,000,000			
X IX 01 2.06 04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	55,000,000,000	55,000,000,000	45,000,000,000			
X IX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian					Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 paket	35,000,000,000	35,000,000,000	35,000,000,000			
X IX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	5,000,000,000			
X IX 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1 05 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	50,000,000,000	50,000,000,000	45,000,000,000			
X IX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	270,000,000,000	270,000,000,000	500,000,000,000			
X IX 01 2.06 10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 05 01 2.06 0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000			
X IX 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 05 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah</b>					<b>Tertepuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertepuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>117,600,000,000</b>	<b>117,600,000,000</b>	<b>300,000,000,000</b>			
X IX 02 2.07 05	Pengadaan Mebel	1 05 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 unit	57,000,000,000	57,000,000,000	150,000,000,000			
X IX 02 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 05 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	-	-			
X IX 02 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 05 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	60,600,000,000	60,600,000,000	150,000,000,000			
X IX 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 05 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>473,680,000,000</b>	<b>473,680,000,000</b>	<b>474,680,000,000</b>			
X IX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			
X IX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000			
X IX 02 2.08 03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	1 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,000,000,000	7,000,000,000	10,000,000,000			
X IX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	413,680,000,000	413,680,000,000	411,680,000,000			
X IX 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1 05 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>Tertepuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tertepuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>63,660,000,000</b>	<b>63,660,000,000</b>	<b>118,320,000,000</b>			
X IX 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 05 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	0 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	0 unit	-	-	35,580,000,000			
X IX 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 unit	10,000,000,000	10,000,000,000	64,080,000,000			
X IX 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	50,000,000,000	50,000,000,000	15,000,000,000			
X IX 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 05 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 unit	3,660,000,000	3,660,000,000	3,660,000,000			
	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		<b>Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>1,421,140,000,000</b>	<b>1,421,140,000,000</b>	<b>2,418,600,000,000</b>	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
							Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Bencana dan Indeks Risiko Bencana	52.94 %		<b>Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>100 %</b>				
							Tinggi			<b>Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase Penduduk Di Daerah Rawan bencana Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan bencana</b>	<b>100 %</b>				
	<b>A. Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota</b>	1 05 03 2.01	<b>Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota</b>							<b>Ketersediaan data/informasi rawan bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>Ketersediaan data/informasi rawan bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>212,850,000,000</b>	<b>212,850,000,000</b>	<b>100,000,000,000</b>	
5 3 2.01 1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	1 05 03 2.01 0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KR) sampai dengan Rencana 5 tahunan	1 Dokumen	200,000,000,000	200,000,000,000	50,000,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran										
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target									
5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota ( Per Jenis Bencana)	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	300 Orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	300 Orang		12,850,000.00	12,850,000.00	50,000,000.00					
			<b>B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>			<b>Tertaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaksananya pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>100%</b>		<b>1,056,050,000.00</b>	<b>1,046,650,000.00</b>	<b>1,623,600,000.00</b>					
									<b>Tertaksananya pelayanan pasca bencana</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaksananya pelayanan pasca bencana</b>	<b>100%</b>									
5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.02	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dibahas	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dibahas	1 Dokumen	-	-	50,000,000.00						
5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan	6 kawasan	8,100,000.00	8,100,000.00	50,000,000.00				
5	3	2.02	3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	5	3	2.02		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0 Dokumen					50,000,000.00						
5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan rawan bencana	10 unit	15,000,000.00	15,000,000.00	100,000,000.00				
5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5	3	2.02		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	0 Dokumen					100,000,000.00						
5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	5	3	2.02		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	0 Kawasan					50,000,000.00						
5	3	2.02	7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah dokumen pelaksanaan penanganan pasca bencana kabupaten/kota	2 Dokumen		0	10,000,000.00								
5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Ditembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	Jumlah Personil TRC yang Ditembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 orang	1,007,200,000.00	1,007,200,000.00	923,600,000.00				
5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	5	3	2.02		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Ditembaklasi	0 Dokumen					100,000,000.00						
5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	05	03	2.02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 orang	15,750,000.00	15,750,000.00	50,000,000.00				
5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	5	3	2.02		Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dibahas	0 Dokumen					50,000,000.00						
5	3	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5	3	2.02		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0 Keluarga					100,000,000.00						
			<b>C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>Tertaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaksananya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>	<b>100%</b>		<b>138,400,000.00</b>	<b>138,400,000.00</b>	<b>450,000,000.00</b>					
5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00				
5	3	2.03	2	Respon Cepat Danurat Bencana Kabupaten/Kota	5	3	2.03		SK Penetapan Status Danurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen	0 Dokumen					50,000,000.00						
5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2000 Orang	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	2000 orang	86,000,000.00	86,000,000.00	150,000,000.00				
5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	130 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	130 orang	42,400,000.00	42,400,000.00	100,000,000.00				
5	3	2.03	5	Aktivas Sistem Komando Penangana Darurat Bencana	5	3	2.03		Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivas Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0 Laporan					50,000,000.00						
5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidem/Wabah Penyakit	5	3	2.03		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan	0 Dokumen					50,000,000.00						
			<b>D. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			<b>Tertaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana</b>	<b>100%</b>		<b>13,840,000.00</b>	<b>23,840,000.00</b>	<b>245,000,000.00</b>					
5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.04		Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen				50,000,000.00						
5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	05	03	2.04	0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 dokumen	13,840,000.00	13,840,000.00	50,000,000.00				
5	3	2.04	3	Kerja Sama Antar Lembaga dan Mitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	1	5	3	2.04		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar lembaga dan Mitraan dalam Penanggulangan Bencana	0 Dokumen				25,000,000.00						
5	3	2.04	4	Pengelolaan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1	5	3	2.04		Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	0 Dokumen				35,000,000.00						
5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1	5	3	2.04		Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan				35,000,000.00						
5	3	2.04	6	Peringatan Pasca Bencana Kabupaten/kota	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota (Penataan Subkegiatan) Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengajian Kebuthaan Pasca Bencana (JTU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca - Bencana	1 Dokumen	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang diadagalkan	2 kegiatan	10,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00				
			<b>KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>			<b>KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>								<b>11,461,400,000.00</b>	<b>11,461,400,000.00</b>	<b>11,806,541,500.00</b>					
1	05	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	1	05	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07	Terperuhnya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terperuhnya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,803,850,000.00	4,803,850,000.00	5,731,541,000.00	Memperkuat stabilitas Pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan transformasi pelayanan publik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
1 05 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	1 05 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>41,500,000.00</b>		
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 05 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	15,000,000.00		
1 05 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 05 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		
1 05 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 05 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		
1 05 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 05 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 dokumen	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 05 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	300,000.00	8,500,000.00		
1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	1 05 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3,870,900,000.00</b>	<b>3,870,900,000.00</b>	<b>4,012,500,000.00</b>		
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 05 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	3,870,000,000.00	3,870,000,000.00	4,000,000,000.00		
1 05 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 05 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		
1 05 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 05 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		
1 05 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 05 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		
1 05 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1 05 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>		
1 05 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 05 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,500,000.00		
1 05 2.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1 05 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>23,550,000.00</b>	<b>23,550,000.00</b>	<b>49,000,000.00</b>		
1 05 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 05 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	11,000,000.00		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 05 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	7,750,000.00	7,750,000.00	9,500,000.00		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 05 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 orang	15,500,000.00	15,500,000.00	28,500,000.00		
1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1 05 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>359,300,000.00</b>	<b>359,300,000.00</b>	<b>617,800,000.00</b>		
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 05 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00		
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 05 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7,000,000.00	7,000,000.00	3,300,000.00		
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 05 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	44,000,000.00		
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	1 05 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	30,000,000.00	30,000,000.00	60,000,000.00		
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Basan dan Peraturan Perundang-undangan	1 05 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Basan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Basan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Basan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00		
1 05 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1 05 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	45,000,000.00	45,000,000.00	55,000,000.00		
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 05 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220,000,000.00	220,000,000.00	440,000,000.00		
1 05 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 05 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		
1 05 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 05 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>515,400,000.00</b>	<b>515,400,000.00</b>	<b>706,099,000.00</b>		
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 05 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 05 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	55,000,000.00	55,000,000.00	46,200,000.00		
1 05 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 05 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Laporan	6,000,000.00	6,000,000.00	11,869,000.00		
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 05 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	452,400,000.00	452,400,000.00	646,030,000.00		
1 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1 05 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>32,900,000.00</b>	<b>32,900,000.00</b>	<b>296,142,000.00</b>		
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	1 05 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	9 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	9 unit	13,750,000.00	13,750,000.00	236,445,000.00		
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 05 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	55,000,000.00		
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 05 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	8 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	8 unit	4,880,000.00	4,880,000.00	4,697,000.00		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 05 01 2 09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	4,270,000.00	4,270,000.00			
1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERAMERAN DAN KETERTIBAN UHUM</b>	1 05 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERAMERAN DAN KETERERTIBAN UHUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya keslelahan sosial masyarakat	Indeks Keslelahan Sosial	Baik		<b>Persentase Perda dan Perkada Terkait Keteramern dan Keterertiban Umum yang Ditawakkan</b>	100%	<b>Persentase Perda dan Perkada Terkait Keteramern dan Keterertiban Umum yang Ditawakkan</b>	100%	5,404,670,000.00	5,404,670,000.00	5,128,040,500.00	Revolusi mental dan pengembangan kebudayaan	
1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah, Kabupaten/Kota</b>	1 05 02 2.01	<b>Penanganan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah, Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	100%	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	100%	5,212,405,000.00	5,212,405,000.00	4,807,506,000.00		
1 05 02 2.01 01	Pencegahan gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1 05 02 2.01 01	Pencegahan gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum melalui Deteksi Dini, dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28 Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Diri, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	28 Laporan	1,102,200,000.00	1,102,200,000.00	88,000,000.00		
1 05 02 2.01 02	Penindakan atas Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1 05 02 2.01 02	Penindakan Atas Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	65 Kasus	Jumlah Laporan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan	65 Laporan	163,065,000.00	163,065,000.00	33,000,000.00		
1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Keteramern dan Keterertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 05 02 2.01 03	Koordinasi Penyelenggaraan Keteramern dan Keterertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keteramern, Keterertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Keteramern, Keterertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	12,100,000.00	12,100,000.00	82,500,000.00		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Keteramern dan Keterertiban Umum		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteramern dan Keterertiban Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteramern dan Keterertiban Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Keteramern dan Keterertiban Umum	1 Dokumen	70,000,000.00	70,000,000.00			
1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Temasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	1 05 02 2.01 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Temasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1404 Orang/Bulan	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1404 Orang	3,834,680,000.00	3,834,680,000.00	4,422,506,000.00		
1 05 02 2.01 07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum	1 05 02 2.01 07	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keteramern dan Keterertiban Umum	1 Dokumen	30,360,000.00	30,360,000.00	181,500,000.00		
1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walil Kota</b>	1 05 02 2.02	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walil Kota</b>						<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100%	<b>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</b>	100%	192,265,000.00	192,265,000.00	320,534,500.00		
1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walil Kota	1 05 02 2.02 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	6 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	45,000,000.00	45,000,000.00			
1 05 02 2.02 02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walil Kota	1 05 02 2.02 02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walil Kota	80 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walil Kota	80 Laporan	2,900,000.00	2,900,000.00	212,734,500.00		
1 05 02 2.02 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walil Kota	1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walil Kota	35 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walil Kota	35 Laporan	144,365,000.00	144,365,000.00	107,800,000.00		
1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	1 05 04	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		<b>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh instansi terkait</b>	48 %	<b>Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh instansi terkait</b>	48 %	1,252,880,000.00	1,252,880,000.00	946,960,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
						<b>Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Bencana</b>	52.94 %		<b>Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan</b>	50 %	<b>Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh kelompok relawan</b>	50 %					
						<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non kebakaran)</b>	100 %		<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non kebakaran)</b>	100 %	<b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Operasi non kebakaran)</b>	100 %					
1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>	1 05 04 2.01	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>						<b>Tertelaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>	100%	<b>Tertelaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun</b>	100%	1,189,980,000.00	1,189,980,000.00	891,960,000.00		
1 05 04 2.01 0001	Pencegahan kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 05 04 2.01 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	49,300,000.00	49,300,000.00	50,000,000.00		
1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 05 04 2.01 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pliet dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pliet dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	222,700,000.00	222,700,000.00	120,000,000.00		
1 05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran	1 05 04 2.01 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran dan Non Kebakaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pliet dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Pliet dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penangulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1 Dokumen	643,180,000.00	643,180,000.00	613,560,000.00		
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 05 04 2.01 0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00			
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 05 04 2.01 0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (Setiap Tahun, Sah, dan Legal)	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala (Setiap Tahun, Sah, dan Legal)	1 Dokumen	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1 05 04 2.01 0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal	38 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penangulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal sesuai Standar	38 unit	163,900,000.00	163,900,000.00	8,400,000.00		
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kabakaran	1 05 04 2.01 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kabakaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aparatur Pemadam Kabakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	20 Orang	Jumlah Aparatur Pemadam Kabakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanganan Kebakaran	20 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	1 05 04 2.01 0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaruan atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh	3 Desa/Kelurahan	3	Desa/Kelurahan	300,000,000	300,000,000						
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1 05 04 2.01 0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non	1 Dokumen	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000						
	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>1 05 04 2.02</b>	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>			<b>Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>600,000,000</b>	<b>600,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>					
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 05 04 2.02 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Standar Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000	10,000,000,000					
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 05 04 2.02 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelelahan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000						
	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>1 05 04 2.03</b>	<b>Investigasi Kejadian Kebakaran</b>			<b>Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	<b>100 persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>18,900,000,000</b>					
	Investigasi Kejadian Kebakaran meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1 05 04 2.03 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000	18,900,000,000					
1 05 04 2.04	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>1 05 04 2.04</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>100%</b>	<b>60,800,000,000</b>	<b>60,800,000,000</b>	<b>55,000,000,000</b>					
1 05 04 2.04 01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	1 05 04 2.04 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan	60 Orang	60	Orang	60,200,000,000	60,200,000,000	55,000,000,000					
	Pembinaan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1 05 04 2.04 0002	Pembinaan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Desa / Kelurahan	1	Desa / Kelurahan	300,000,000	300,000,000						
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	1 05 04 2.04 0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sprinkler	1 Dokumen	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000						
	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>1 05 04 2.05</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>			<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>100%</b>	<b>1,200,000,000</b>	<b>1,200,000,000</b>						
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan atau Menancam Keselamatan Manusia	1 05 04 2.05 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan atau Menancam Keselamatan Manusia		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	1	Laporan	300,000,000	300,000,000						
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 05 04 2.05 0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Dokumen	1	Dokumen	300,000,000	300,000,000						
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 05 04 2.05 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar	7 Unit	7	Unit	300,000,000	300,000,000						
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 05 04 2.05 0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	1 Laporan	1	Laporan	300,000,000	300,000,000						
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>							<b>9,347,645,000,000</b>	<b>9,347,645,000,000</b>	<b>10,000,250,000,000</b>					
1 06	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>1 06</b>	<b>DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>							<b>9,347,645,000,000</b>	<b>9,347,645,000,000</b>	<b>10,000,250,000,000</b>					
1 06 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1 06 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Garis BPA Maturitas SPI Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	5,702,415,000,000	5,702,415,000,000	5,703,000,000,000	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik			
1 06 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1 06 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>41,500,000,000</b>			
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 06 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4	Dokumen	300,000,000	300,000,000	15,000,000,000			APBD		
1 06 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 06 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	2 Dokumen	2	Dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000			APBD		
1 06 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 06 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2 Dokumen	2	Dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000			APBD		
1 06 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 06 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	5	Laporan	300,000,000	300,000,000	10,000,000,000			APBD		
1 06 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 06 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3	Laporan	300,000,000	300,000,000	8,500,000,000			APBD		
1 06 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1 06 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>4,258,900,000,000</b>	<b>4,258,900,000,000</b>	<b>3,312,500,000,000</b>			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran			
									Program/Kejadian/Subkegiatan		Target Pemutakhiran									
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 06 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	4,258,000,000.00	4,258,000,000.00	3,300,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 06 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		APBD			
1 06 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 06 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	3	Laporan	3	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 06 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	2	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	1 06 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>					
1 06 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 06 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	Laporan	3	300,000.00	300,000.00	8,500,000.00		APBD			
1 06 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	1 06 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>18,300,000.00</b>	<b>18,300,000.00</b>	<b>69,300,000.00</b>					
1 06 01 2.05 02	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 06 01 2.05 0002	Pengadaan Pakai Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	Paket	0	-	-	59,300,000.00		APBD			
1 06 01 2.05 03	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 06 01 2.05 0003	Pendidikan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen	12	300,000.00	300,000.00	7,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 06 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24	Orang	24	6,000,000.00	6,000,000.00	1,500,000.00		APBD			
1 06 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 06 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24	Orang	24	12,000,000.00	12,000,000.00	1,500,000.00		APBD			
1 06 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	1 06 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>437,300,000.00</b>	<b>437,300,000.00</b>	<b>979,200,000.00</b>					
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 06 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket	4	6,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00		APBD			
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	Paket	2	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00					
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 06 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	2	Paket	2	8,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 06 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket	12	55,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian	1 06 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengabdian					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengabdian yang disediakan	12	Paket	12	35,000,000.00	35,000,000.00	50,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 06 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12	Dokumen	12	3,000,000.00	3,000,000.00	6,200,000.00		APBD			
1 06 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	1 06 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12	Paket	12	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 06 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	12	270,000,000.00	270,000,000.00	800,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 06 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD			
6 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>	6 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>						<b>Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>100 Persen</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	-		APBD			
6 1 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 1 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	2	10,000,000.00	10,000,000.00	-		APBD			
1 06 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	1 06 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>941,235,000.00</b>	<b>941,235,000.00</b>	<b>1,017,900,000.00</b>					
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 06 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	1	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 06 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	12	45,675,000.00	45,675,000.00	60,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 06 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	7,000,000.00	7,000,000.00	15,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 06 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	12	886,560,000.00	886,560,000.00	941,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	1 06 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terperuhannya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Terperuhannya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>34,880,000.00</b>	<b>34,880,000.00</b>	<b>275,000,000.00</b>					
1 06 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan	1 06 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kendaraan yang Dipelihara dan Dibersihkan/Diukus/Dibersihkan	13	Unit	13	15,000,000.00	15,000,000.00	250,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 06 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	3	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD			
1 06 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 06 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	Unit	8	4,880,000.00	4,880,000.00	5,000,000.00		APBD			
1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	1 06 02	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>						<b>Optimalisasi Pelayanan Dasar</b>	<b>Menurunnya Angka Kemiskinan</b>	<b>Angka kemiskinan</b>	<b>2.43%</b>	<b>Persentase PSKS yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase PSKS yang aktif</b>	<b>100 %</b>	<b>504,250,000.00</b>	<b>504,250,000.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin</b>
1 06 02 2.02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 06 02 2.02	<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase Lembaga/organisasi/ perusahaan yang memperoleh layanan Izin UGB dan</b>	<b>100 %</b>	<b>Persentase Lembaga/organisasi/ perusahaan yang memperoleh layanan Izin UGB dan</b>	<b>100 %</b>	<b>16,450,000.00</b>	<b>16,450,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>					
1 06 02 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undang Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 06 02 2.02 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undang Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undang Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	6	Dokumen	6	16,450,000.00	16,450,000.00	10,000,000.00		APBD			
1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	1 06 02 2.03	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi</b>	<b>100 %</b>	<b>Jumlah pendamping yang menerima bimbingan sosial dan peningkatan kemampuan potensi</b>	<b>100 %</b>	<b>487,800,000.00</b>	<b>487,800,000.00</b>	<b>790,000,000.00</b>					
1 06 02 2.02 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 06 02 2.03 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75	Orang	75	450,000,000.00	450,000,000.00	685,000,000.00		APBD			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Took Ukur dan Target Lama		Took Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Took Ukur	Target	Took Ukur	Target					
1 06 02 2.02 02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 06 02 2.03 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	6 Orang	6 Orang	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	6 Orang	36,000,000.00	36,000,000.00	74,800,000.00		APBD		
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1 06 02 2.03 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	15 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Lembaga	300,000.00	300,000.00	12,000,000.00		APBD		
1 06 02 2.03 05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 06 02 2.03 0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10 Sertifikat	10 Sertifikat	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10 Sertifikat	1,500,000.00	1,500,000.00	18,200,000.00		APBD		
1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	1 06 04	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi	100 %	2,348,830,000.00	2,348,830,000.00	2,800,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin			
1 06 04 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	1 06 04 2.01	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						Terselenggaranya layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan	100 %	2,278,130,000.00	2,278,130,000.00	2,710,000,000.00				
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakaman	1 06 04 2.01 0001	Penyediaan Permakaman		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakaman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	1090 Orang	1090 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakaman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan	1090 Orang	1,962,000,000.00	1,962,000,000.00	2,124,800,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 02	Penyediaan Sandang	1 06 04 2.01 0002	Penyediaan Sandang		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Menenerima Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	68 Orang	68 Orang	Jumlah Orang yang Menenerima Paksaan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun	68 Orang	19,680,000.00	19,680,000.00	22,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	1 06 04 2.01 0003	Penyediaan Alat Bantu		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan	10 Orang	10 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan	10 Orang	71,050,000.00	71,050,000.00	70,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1 06 04 2.01 0004	Reunifikasi Keluarga		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1 06 04 2.01 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	4 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	57,050,000.00	57,050,000.00	378,200,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1 06 04 2.01 0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	5 Orang	5 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	5 Orang	39,050,000.00	39,050,000.00	10,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 07	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1 06 04 2.01 0007	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	20 Orang	20 Orang	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan	20 Orang	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1 06 04 2.01 0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1 06 04 2.01 0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1 06 04 2.01 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	23 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	23 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1 06 04 2.01 0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	1 06 04 2.01 0012	Pemberian Layanan Rujukan		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	73,700,000.00	73,700,000.00	30,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	1 06 04 2.02	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>						Terselenggaranya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	100 %	70,700,000.00	70,700,000.00	90,000,000.00				
1 06 04 2.02 01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1 06 04 2.02 0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	5 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang	300,000.00	300,000.00	20,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.02 07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1 06 04 2.02 0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang	11,900,000.00	11,900,000.00	50,000,000.00		APBD		
1 06 04 2.02 08	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1 06 04 2.02 0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00			APBD		
1 06 04 2.02 14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 06 04 2.02 0014	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18,500,000.00	18,500,000.00	20,000,000.00		APBD		
1 06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	1 06 05	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	366,700,000.00	366,700,000.00	400,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin			
1 06 05 2.01	<b>Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar</b>	1 06 05 2.01	<b>Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar</b>						Persentase anak - anak terlantar yang disabilitas	100 %	7,600,000.00	7,600,000.00	30,000,000.00				
1 06 05 2.01 01	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar	1 06 05 2.01 0001	Penjangkauan Anak - Anak Terlantar		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Anak - Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	Jumlah Anak - Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	-	10,000,000.00		APBD		
1 06 05 2.01 02	Rujukan Anak - Anak Terlantar	1 06 05 2.01 0002	Rujukan Anak - Anak Terlantar		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Anak - Anak Terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	0 Orang	Jumlah Anak - Anak Terlantar yang mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	-	-	10,000,000.00		APBD		
1 06 05 2.01 03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1 06 05 2.01 0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar		Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	2 Orang	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	7,600,000.00	7,600,000.00	10,000,000.00		APBD		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Tolok Ukur					
1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 06 05 2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Tertindakannya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan pangsi	100 %	Tertindakannya updating verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan pangsi	100 %	359,100,000.00	359,100,000.00	370,000,000.00		
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 06 05 2.02 0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang didata	66.506 Orang	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	66.506 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 06 05 2.02 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantunan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23.122 Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengantunan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	23.122 Keluarga	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 05 2.02 03	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1 06 05 2.02 0003	Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	286 Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	286 Keluarga	239,100,000.00	239,100,000.00	310,000,000.00		APBD	
06 05 2.02 04	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	06 05 2.02 0004	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	100,000,000.00	100,000,000.00	40,000,000.00		APBD	
1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1 06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						Optimalisasi Pelayanan Dasar	Memenuhinya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%					
1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1 06 06 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						Optimalisasi Pelayanan Dasar	Memenuhinya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%					
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	1 06 06 2.01 0001	Penyediaan Makanan				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaian 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punggisian)	150 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemakaian 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Punggisian)	150 Orang	47,250,000.00	47,250,000.00	47,250,000.00		APBD	
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	1 06 06 2.01 0002	Penyediaan Sandang				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punggisian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Punggisian) dan Pasca Kabupaten/Kota	100 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1 06 06 2.01 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1 06 06 2.01 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	1 06 06 2.01 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	9,900,000.00	9,900,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1 06 06 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						Optimalisasi Pelayanan Dasar	Memenuhinya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%					
1 06 06 2.02 01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	1 06 06 2.02 0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kampung	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1 06 06 2.02 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	47 Orang	333,300,000.00	333,300,000.00	200,000,000.00		APBD	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														
	DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		DINAS PENANAMAN MODAL, PPTSP, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI														
2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 07 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 07 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
2 07 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 07 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 07 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 07 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 07 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 07 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 07 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 07 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/Bulan	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 07 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD	
2 07 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 07 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 07 01 2.02 06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 07 01 2.02 0006	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
2 07 01 2.04	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	2 07 01 2.04	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>8,500,000,000</b>		
2 07 01 2.04 04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 07 01 2.04 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	8,500,000,000		APBD
2 09 01 2.03	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.03	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>2,500,000,000</b>		
2 09 01 2.03 06	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	2 09 01 2.03 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,500,000,000		APBD
2 07 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2 07 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100 Persen</b>	<b>13,400,000,000</b>	<b>13,400,000,000</b>	<b>18,500,000,000</b>		
2 07 01 2.05 02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 07 01 2.05 0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25 Paket	12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000		APBD
2 07 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 07 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
2 07 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 07 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
2 07 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 07 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
2 07 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2 07 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.</b>	<b>100 Persen</b>	<b>501,160,000,000</b>	<b>501,160,000,000</b>	<b>453,900,000,000</b>		
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 07 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000,000	6,000,000,000	5,000,000,000		APBD
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 07 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20,000,000,000	20,000,000,000			
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 07 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000,000	8,000,000,000	2,500,000,000		APBD
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 07 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	50,000,000,000	50,000,000,000	35,000,000,000		APBD
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	2 07 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	30,000,000,000	30,000,000,000	30,000,000,000		APBD
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 07 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	5,040,000,000		APBD
2 07 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2 07 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50,000,000,000	50,000,000,000	40,000,000,000		APBD
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 07 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	333,860,000,000	333,860,000,000	333,860,000,000		APBD
2 07 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 07 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,500,000,000		APBD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 07 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Persen</b>	<b>Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35,000,000,000</b>		
	Pengadaan Mebel	2 07 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit			35,000,000,000		
2 07 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 07 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>771,510,000,000</b>	<b>771,510,000,000</b>	<b>834,350,000,000</b>		
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 07 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		APBD
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 07 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	78,600,000,000	78,600,000,000	90,000,000,000		APBD
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 07 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,000,000,000	5,000,000,000	2,000,000,000		APBD
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 07 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	685,910,000,000	685,910,000,000	740,350,000,000		APBD
2 07 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 07 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terperuhnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.</b>	<b>12 bulan</b>	<b>6,750,000,000</b>	<b>6,750,000,000</b>	<b>77,000,000,000</b>		
2 07 01 2.09 02	Proses Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Non-Operasional	2 07 01 2.09 0002	Proses Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Non-Operasional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai	7 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai	7 unit	1,750,000,000	1,750,000,000	66,000,000,000		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana/Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana/Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	5,000,000,000	5,000,000,000	11,000,000,000		APBD
2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	2 07 03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Menurunny Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,77 %		<b>Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>45%</b>	<b>Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi</b>	<b>45%</b>	<b>650,000,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	<b>1,150,000,000,000</b>	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
2 07 03 2.01	<b>Palaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	2 07 03 2.01	<b>Palaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>						<b>Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>4 Jenis pelatihan</b>	<b>Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>4 jenis pelatihan</b>	<b>650,000,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	<b>1,150,000,000,000</b>		
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	2 07 03 2.01 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	60 orang	650,000,000,000	650,000,000,000	650,000,000,000		APBD
2 07 03 2.01 03	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota	2 07 03 2.01	Pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	0 Unit	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				500,000,000,000		APBD
2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	2 07 04	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Menurunny Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,77 %		<b>Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan</b>	<b>36%</b>	<b>Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan</b>	<b>36%</b>	<b>19,790,000,000</b>	<b>19,790,000,000</b>	<b>20,000,000,000</b>	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	2 07 04 2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>						<b>Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>5 jenis/ 20 perusahaan</b>	<b>Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>5 jenis/ 20 perusahaan</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>2,300,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>		
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	2 07 04 2.03 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	50 Orang	2,300,000,000	2,300,000,000	5,000,000,000		APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan		Subkegiatan						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Kegiatan Penerbitan perjanjian Perusahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota		Kegiatan Penerbitan perjanjian Perusahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota						Persentase tenaga kerja asing yang memiliki IMTA	0.0375	Persentase tenaga kerja asing yang memiliki IMTA	0.0375	17,490,000.00	17,490,000.00	15,000,000.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perjanjian IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 07 04 2.01 0002							Jumlah TKA yang melakukan perjanjian IMTA	20 orang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditampilkan Melalui Layanan AKAD perkerja	20 orang	17,490,000.00	17,490,000.00	15,000,000.00		APBD
2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	2 07 05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3.77 %		Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100%	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	100%	63,500,000.00	63,500,000.00	104,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
2 07 05 2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	2 07 05 2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota						persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	100%	persentase jumlah perusahaan yang mengikuti jaminan sosial tenaga kerja	100%	2,600,000.00	2,600,000.00	30,000,000.00		
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan								Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di Kabupaten/Kota	perusahaan					10,000,000.00		
	Pendaftaran Perjanjian Kerja sama bagi Perusahaan	2 07 05 2.01 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 Perusahaan	2,300,000.00	2,300,000.00	10,000,000.00		
2 07 05 2.01 3	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2 07 05 2.01 0003	Penyenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PIRB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PIRB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 07 05 2.02	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>						persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang terselesaikan	100%	persentase kasus perselisihan hubungan industrial mogok kerja dan penutupan perusahaan yang terselesaikan	100%	60,900,000.00	60,900,000.00	74,000,000.00		
2 07 05 2.02 02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 07 05 2.02 0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perkar Perselesihan yang Terseslesaikan	5 Perkar	Jumlah Perkar Perselesihan yang Terseslesaikan	5 Perkar	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02 03	Penyenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Aktiva	2 07 05 2.02 0003	Penyenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Aktiva					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	3 Asosiasi dan Serikat Pekerja	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	2 07 05 2.02 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		APBD
2 07 05 2.02 05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2 07 05 2.02 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2882 org	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2882 org	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN BERILMUNGKAN ANAK</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN BERILMUNGKAN ANAK</b>										5,177,500,000.00	5,177,500,000.00	5,980,050,000.00		
2 8	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN BERILMUNGKAN ANAK</b>		<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PERBERDAYAAN PEREMPUAN DAN BERILMUNGKAN ANAK</b>										5,177,500,000.00	5,177,500,000.00	5,980,050,000.00		
2 14 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2 14 1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WIP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,342,500,000.00	4,342,500,000.00	5,050,050,000.00	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik	
2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 14 1 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1,500,000.00	1,500,000.00	36,000,000.00		
2 14 1 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 14 1 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					DP2KBPA	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	12,000,000.00		
2 14 1 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 14 1 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					DP2KBPA	jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		
2 14 1 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 14 1 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					DP2KBPA	jumlah dokumen RKA-SKPD, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	jumlah dokumen RKA-SKPD, SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		
2 14 1 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 14 1 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					DP2KBPA	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 laporan	jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5 laporan	300,000.00	300,000.00	9,000,000.00		
2 14 1 2.01 05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 14 1 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					DP2KBPA	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	300,000.00	300,000.00	9,000,000.00		
2 14 1 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2 14 1 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2,800,900,000.00	2,800,900,000.00	3,082,000,000.00		
2 14 1 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 14 1 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					DP2KBPA	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	23 Orang	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	3,070,000,000.00		
2 14 1 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 14 1 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					DP2KBPA	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan	2 laporan	jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan keuangan	2 laporan	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		
2 14 1 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 14 1 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					DP2KBPA	jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 laporan	jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 laporan	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		
2 14 1 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 14 1 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					DP2KBPA	jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
2 14 1 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	2 14 1 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	300,000.00	300,000.00	9,000,000.00		
2 14 1 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 14 1 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					DP2KBPA	jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Jenis Dokumen	jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Jenis Dokumen	300,000.00	300,000.00	9,000,000.00		
2 14 1 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2 14 1 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100 persen	17,550,000.00	17,550,000.00	23,000,000.00		
2 14 1 2.05 02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 14 1 2.05 0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					DP2KBPA	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	0 paket	-	-	1,000,000.00		
2 14 1 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 14 1 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					DP2KBPA	jumlah dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	jumlah dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	300,000.00	300,000.00	1,000,000.00		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 14 1 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 14 1 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					DP2KBP3A	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	5,750,000.00	5,750,000.00	10,500,000.00		
2 14 1 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 14 1 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					DP2KBP3A	Jumlah orang yang mengikuti/Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	Jumlah orang yang mengikuti/Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23 orang	11,500,000.00	11,500,000.00	10,500,000.00		
2 14 1 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2 14 1 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>451,300,000.00</b>	<b>451,300,000.00</b>	<b>607,000,000.00</b>		
2 14 1 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 14 1 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					DP2KBP3A	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	7,000,000.00	7,000,000.00	15,000,000.00		
2 14 1 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 14 1 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					DP2KBP3A	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	2 paket	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00		
2 14 1 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 14 1 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					DP2KBP3A	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	2 paket	10,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00		
2 14 1 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 14 1 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					DP2KBP3A	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	62,000,000.00	62,000,000.00	50,000,000.00		
2 14 1 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengapungan	2 14 1 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengapungan					DP2KBP3A	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengapungan yang disediakan	12 paket	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengapungan yang disediakan	12 paket	42,000,000.00	42,000,000.00	50,000,000.00		
2 14 1 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 14 1 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					DP2KBP3A	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00		
2 14 1 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2 14 1 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					DP2KBP3A	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	69,000,000.00	69,000,000.00	50,000,000.00		
2 14 1 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 14 1 2.06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					DP2KBP3A	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	238,000,000.00	238,000,000.00	400,000,000.00		
2 14 1 2.06 10	Penatausahaan Ansis Dinamis pada SKPD	2 14 1 2.06 0010	Penatausahaan Ansis Dinamis pada SKPD					DP2KBP3A	Jumlah dokumen Penatausahaan Ansis Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen Penatausahaan Ansis Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		
2 14 1 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 14 1 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tertepuhanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertepuhanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>		
2 14 1 2.07 05	Pengadaan Mebel	2 14 1 2.07 0005	Pengadaan Mebel					DP2KBP3A	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 paket	Jumlah paket mebel yang disediakan	0 paket	10,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00		
2 14 1 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2 14 1 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					DP2KBP3A	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	1 unit	Jumlah unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	1 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
2 14 1 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 14 1 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					DP2KBP3A	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	0 unit	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		
2 14 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 14 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,019,820,000.00</b>	<b>1,019,820,000.00</b>	<b>1,009,770,000.00</b>		
2 14 1 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 14 1 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					DP2KBP3A	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00		
2 14 1 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 14 1 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					DP2KBP3A	Jumlah laporan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	Jumlah laporan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	82,200,000.00	82,200,000.00	70,000,000.00		
2 14 1 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	2 14 1 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor					DP2KBP3A	Jumlah laporan jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 laporan	Jumlah laporan jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 laporan	12,000,000.00	12,000,000.00	9,050,000.00		
2 14 1 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 14 1 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					DP2KBP3A	Jumlah laporan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	Jumlah laporan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	923,620,000.00	923,620,000.00	926,720,000.00		
2 14 1 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 14 1 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tertepuhanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tertepuhanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>41,130,000.00</b>	<b>41,130,000.00</b>	<b>203,280,000.00</b>		
2 14 1 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Janjanaan	2 14 1 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Janjanaan					DP2KBP3A	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	50 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diperlihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	50 unit	15,400,000.00	15,400,000.00	180,000,000.00		
2 14 1 2.09 005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 14 1 2.09 0005	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					DP2KBP3A	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diselihara	2 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diselihara	2 unit	7,190,000.00	7,190,000.00	10,000,000.00		
2 14 1 2.09 009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 14 1 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					DP2KBP3A	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi/dibebaskan	2 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang direhabilitasi/dibebaskan	2 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	8,280,000.00		
2 14 1 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 14 1 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					DP2KBP3A	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	14 unit	8,540,000.00	8,540,000.00	5,000,000.00		
2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	2 08 02	<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Optimalisasi Penanganan Stunting</b>	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Status Kabupaten Lavak Anak	91.06		Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	50%	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	50%	262,500,000.00	262,500,000.00	150,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 08 02 2.01	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	2 08 02 2.01	<b>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				Madya		Penerapan PUG di Lembaga Pemerintah Daerah	50 Persen	Penerapan PUG di Lembaga Pemerintah Daerah	50 Persen	15,000,000.00	15,000,000.00	55,000,000.00		
2 08 02 2.01 03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2 08 02 2.01 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					DP2KBP3A	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	31 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	31 Perangkat Daerah	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	2 08 02 2.01 0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG					DP2KBP3A	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	-	-	-	40,000,000.00		
2 08 02 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	2 08 02 2.03	<b>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>50 Persen</b>	<b>Persentase Lembaga Layanan Pemberdayaan Perempuan</b>	<b>50 Persen</b>	<b>247,500,000.00</b>	<b>247,500,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>		
2 08 02 2.03 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 02 2.03 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat Pelatihan	50 Orang	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Pelatihan	50 Orang	12,500,000.00	12,500,000.00	45,000,000.00		
2 08 02 2.03 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 02 2.03 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	235,000,000.00	235,000,000.00	50,000,000.00		
2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	2 08 03	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Optimalisasi Penanganan Perempuan</b>	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Status Kabupaten Lavak Anak	91.06		Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	100%	30,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 08 03 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 08 03 2.01	<b>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>						Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi	40 Persen	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dari total kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terjadi	40 Persen	10,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
2 08 03 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 08 03 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00		
2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 03 2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	persentase jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti	100 Persen	persentase jumlah laporan pengaduan yang dilayani/ditindaklanjuti	100 Persen	20,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00		
2 08 03 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 03 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan	3 Layanan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan	3 Layanan	20,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00		
2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	2 08 04	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	Optimalisasi Penanganan Stuntina	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Status Kabupaten Layak Anak	91.06		persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	80 Persen	persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	80 Persen	250,000,000.00	250,000,000.00	350,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 08 04 2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase layanan kualitas keluarga yang aktif	75 Persen	Persentase layanan kualitas keluarga yang aktif	75 Persen	165,000,000.00	165,000,000.00	130,000,000.00		
2 08 04 2.01 02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 04 2.01 0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 dokumen	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 dokumen	165,000,000.00	165,000,000.00	130,000,000.00		
2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 08 04 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	persentase penguatan lembaga penyedia layanan	75 Persen	persentase penguatan lembaga penyedia layanan	75 Persen	20,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00		
2 08 04 2.02 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 08 04 2.02 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80 orang	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga	80 orang	20,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00		
2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 08 04 2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah unit layanan bagi keluarga	2 unit layanan	Jumlah unit layanan bagi keluarga	2 unit layanan	65,000,000.00	65,000,000.00	180,000,000.00		
2 08 04 2.03 01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 08 04 2.03 0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Layanan	65,000,000.00	65,000,000.00	180,000,000.00		
2 08 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	2 08 05	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	Optimalisasi Penanganan Stuntina	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Status Kabupaten Layak Anak	91.06		Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	70%	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	70%	2,000,000.00	2,000,000.00	50,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data	2 08 05 2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data					DP2KBP3A	cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100 Persen	cakupan proses pelaksanaan data gender dan anak	100 Persen	2,000,000.00	2,000,000.00	50,000,000.00		
2 08 05 2.01 01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 05 2.01 0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	2,000,000.00	2,000,000.00	50,000,000.00		
2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	2 08 06	<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	Optimalisasi Penanganan Stuntina	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Status Kabupaten Layak Anak	91.06		Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	80%	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	80%	128,000,000.00	128,000,000.00	100,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 08 06 2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.01	Pelaksanaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	Jumlah Lembaga PHA	2 Lembaga PHA	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00		
2 08 06 2.01 01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.01 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10 Organisasi	15,000,000.00	15,000,000.00	25,000,000.00		
2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	persentase penguatan kualitas hidup anak	80 Persen	persentase penguatan kualitas hidup anak	80 Persen	113,000,000.00	113,000,000.00	75,000,000.00		
2 08 06 2.02 01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 06 2.02 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten /kota	100 orang	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	80,000,000.00	80,000,000.00	45,000,000.00		
2 08 06 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2 08 06 2.02 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 dokumen	33,000,000.00	33,000,000.00	30,000,000.00		
2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	2 08 07	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	Optimalisasi Penanganan Stuntina	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender Status Kabupaten Layak Anak	91.06		Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	100%	162,500,000.00	162,500,000.00	150,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2 08 07 2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak	80 Persen	persentase keterlibatan pihak lingkup daerah dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak	80 Persen	92,500,000.00	132,500,000.00	30,000,000.00		
2 08 07 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 07 2.01 0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota					DP2KBP3A	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	2 dokumen	92,500,000.00	132,500,000.00	30,000,000.00		
2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 08 07 2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak	40 persen	Persentase jumlah layanan perlindungan khusus bagi anak	40 persen	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00		
2 08 07 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 08 07 2.02 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					DP2KBP3A	jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	20 layanan	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	20 orang	30,000,000.00	30,000,000.00	25,000,000.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 08 07 2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 08 07 2.03	Pengujian dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase pengujian dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	80 persen	Persentase pengujian dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak	80 persen	40,000,000.00	-	20,000,000.00		
2 08 07 2.03 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 08 07 2.03					DP2KBPA	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen				40,000,000.00	-	20,000,000.00		
2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>	2 09	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>										15,167,242,000.00	15,167,242,000.00	16,172,670,000.00		
	<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>		<b>DINAS PERTANIAN DAN PANGAN</b>										15,167,242,000.00	15,167,242,000.00	16,172,670,000.00		
2 09 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2 09 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel						14,897,242,000.00	14,897,242,000.00	15,902,670,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukam dan transformasi pelayanan publik	
2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 09 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	30,000,000.00		
2 09 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 09 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 09 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 09 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 09 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	2,000,000.00				
2 09 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2 09 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2,000,000.00				
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 09 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
2 09 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 09 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
2 09 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	12,039,820,000.00	12,039,820,000.00	12,514,000,000.00		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 09 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	111 Orang/bulan	12,038,920,000.00	12,038,920,000.00	12,500,000,000.00		APBD
									Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	2,000,000.00				
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 09 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
									Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 dokumen	2,000,000.00				
2 09 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	2 09 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
2 09 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 09 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
2 09 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	20,000,000.00		
									Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	2,000,000.00				
									Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 dokumen	2,000,000.00				
									Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0 Laporan	2,000,000.00				
									Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	2,000,000.00				
									Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0 Laporan	6,000,000.00				
2 09 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 09 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
2 09 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	900,000.00	900,000.00	126,500,000.00		
2 09 01 2.05 02	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	2 09 01 2.05 0002	Pengadaan Pakan Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya						Jumlah Paket Pakan Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	Jumlah Paket Pakan Dinas berserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	12,500,000.00				APBD
2 09 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 09 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
2 09 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 09 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	300,000.00	300,000.00	35,000,000.00		APBD
2 09 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 09 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	300,000.00	300,000.00	75,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	502,300,000.00	502,300,000.00	839,000,000.00		
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 09 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 09 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20,000,000.00	20,000,000.00			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	2 09 01 2.06 0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	9,000,000.00	9,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 09 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00	85,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2 09 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 09 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2 09 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	70,000,000.00	70,000,000.00	75,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 09 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	270,000,000.00	270,000,000.00	600,000,000.00		APBD
2 09 01 2.06 10	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	2 09 01 2.06 0010	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 09 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>persentase pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	-		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 09 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	300,000.00	300,000.00			
2 09 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 09 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2,270,442,000.00</b>	<b>2,270,442,000.00</b>	<b>2,277,170,000.00</b>		
2 09 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 09 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2 09 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 09 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	98,502,000.00	98,502,000.00	98,000,000.00		APBD
2 09 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	2 09 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 09 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2,164,940,000.00	2,164,940,000.00	2,162,170,000.00		APBD
2 09 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 09 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>81,680,000.00</b>	<b>81,680,000.00</b>	<b>96,000,000.00</b>		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2 09 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	71 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	71 Unit	36,680,000.00	36,680,000.00	23,500,000.00		APBD
2 09 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	2 09 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	0 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	0 Unit			25,000,000.00		APBD
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 09 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelebara/Direhabilitasi	8 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelebara/Direhabilitasi	8 Unit	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 09 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 09 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direnovasi	18 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direnovasi	18 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00		APBD
2 09 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	<b>2 09 02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunny Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		<b>persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan</b>	<b>40%</b>	<b>persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan</b>	<b>40%</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>		Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
2 09 02 2.01	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2 09 02 2.01</b>	<b>Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40%</b>	<b>persentase penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40%</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>		APBD
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	2 09 02 2.01 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
2 09 02 2.01 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2 09 02 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	2 09 02 2.01 0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 dokumen	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
2 09 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>2 09 03</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunny Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		<b>Tingkat konsumsi pangan AKE</b>	<b>210 kkal/kap/hr</b>	<b>Tingkat konsumsi pangan AKE</b>	<b>210 kkal/kap/hr</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>		Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan						<b>Tingkat ketersediaan pangan AKP</b>	<b>57 gr/kap/hr</b>	<b>Tingkat ketersediaan pangan AKP</b>	<b>57 gr/kap/hr</b>					
2 09 03 2.01 01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	2 09 03 2.01 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						<b>Tingkat ketersediaan pangan AKP</b>	<b>1372 kkal/kap/hr</b>	<b>Tingkat ketersediaan pangan AKP</b>	<b>1372 kkal/kap/hr</b>					
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 09 03 2.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						<b>Tingkat ketersediaan pangan AKP</b>	<b>61 gr/kap/hr</b>	<b>Tingkat ketersediaan pangan AKP</b>	<b>61 gr/kap/hr</b>					
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 09 03 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	3 dokumen	Dokumen Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	3 dokumen	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00		
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2 09 03 2.01 0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota						Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 03 2.01 02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 09 03 2.01 0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 03 2.01 04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	2 09 03 2.01 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 09 03 2.01 05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	2 09 03 2.01 0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota						Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	1 unit	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 09 03 2.04	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>2 09 03 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>						<b>Dokumen pencapaian target konsumsi pangan perkapita</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>Dokumen pencapaian target konsumsi pangan perkapita</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>		
									<b>perubahan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)</b>		<b>perubahan sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG)</b>						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
									Capaian target konsumsi kelompok pangan perkapita per tahun sesuai AKG (beras, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan dan pangan hewani)	Beras: 85 kg/kap/th Umbi2an : 38,33 kg/kap/th Sayur dan buah : 96,63 kg/kap/th Kacang2an : 13,51 kg/kap/th Pangan hewani : 57,31 kg/kap/th	Capaian target konsumsi kelompok pangan perkapita per tahun sesuai AKG (beras, umbi-umbian, sayur dan buah, kacang-kacangan dan pangan hewani)	Beras : 85 kg/kap/th Umbi2an : 38,33 kg/kap/th Sayur dan buah : 96,63 kg/kap/th Kacang2an : 13,51 kg/kap/th Pangan hewani : 57,31 kg/kap/th					
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita Per Tahun	2 09 03 2.04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 09 03 2.04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakannya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2 Laporan	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 09 04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	2 09 04	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase penanganan daerah rawan pangan	50%	Persentase penanganan daerah rawan pangan	50%	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 dokumen	dokumen informasi kerentanan dan ketahanan pangan	1 dokumen	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		APBD
2 09 04 2.01 01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Kerentanan Pangan	2 09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan dan Kerentanan Pangan						Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Ditataletak	1 Dokumen	Peta dan Analisis Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang Ditataletak	1 Dokumen	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		APBD
2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota	2 09 04 2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kawasan Kabupaten/Kota						Dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten	1 dokumen	Dokumen informasi situasi pangan dan gizi kabupaten	1 dokumen	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00		APBD
2 09 04 2.02 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	2 09 04 2.02 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	3 dokumen	Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	3 dokumen					
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
2 09 04 2.02 03	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	90%	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	4 kali	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah	4 kali	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
2 09 05 2.01 01	Pengujian Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 09 05 2.01 0009	Pengujian kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						Kelengkapan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	Kelengkapan keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	1 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 09 05 2.01 0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>	2 10	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>										12,850,000,000.00	12,850,000,000.00	3,300,000,000.00		
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>										12,850,000,000.00	12,850,000,000.00	3,300,000,000.00		
2 10 05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	2 10 05	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100%	12,250,000,000.00	12,250,000,000.00	2,600,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan	
2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 10 05 2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Bangunan Gedung	Sedang		Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	12,250,000,000.00	12,250,000,000.00	2,600,000,000.00		
2 10 05 2.01 01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 10 05 2.01 0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	2 Dokumen	11,750,000,000.00	11,750,000,000.00	2,500,000,000.00		
	- Pembebasan Lahan untuk Kawasan Industri, TI, Ular		- Pembebasan Lahan untuk Kawasan Industri, TI, Ular					Desa Air Limau					2,500,000,000.00	2,500,000,000.00			
	- Pembebasan Lahan untuk perluasan kolam perikanan		- Pembebasan Lahan untuk perluasan kolam perikanan					Kecamatan Muntok					3,200,000,000.00	3,200,000,000.00			
	- Pembebasan lahan untuk TPST		- Pembebasan lahan untuk TPST					Desa Rangai Asam, Kelapa dan Paritiga Simpangtertip					1,050,000,000.00	1,050,000,000.00			Musren
	- Pembebasan lahan untuk TPA		- Pembebasan lahan untuk TPA										5,000,000,000.00	5,000,000,000.00			Renja
	- Pembebasan lahan pasar lama muntok		- Pembebasan lahan pasar lama muntok										500,000,000.00	500,000,000.00	100,000,000.00		
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 10 05 2.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	500,000,000.00	500,000,000.00	100,000,000.00		
	- dokumen pendukung KPT Tanjung Ular		- dokumen pendukung KPT Tanjung Ular										100,000,000.00	100,000,000.00			
	- dokumen pendukung rencana pembangunan TPA		- dokumen pendukung rencana pembangunan TPA										400,000,000.00	400,000,000.00			Renja
2 10 08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	2 10 08	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	67%	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	67%	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan	
2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2 10 08 2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			Indeks Bangunan Gedung	Sedang		Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong	20 persil	Persentase kecamatan yang tersedia data pemanfaatan tanah kosong	20 persil	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
2 10 08 2.02 01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	2 10 08 2.02 0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1 Laporan	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1 Laporan	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		
2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	2 10 10	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	49%	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	49%	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur	Tokol Ukur	Target					
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Bangunan Gedung	Sedang		Ketersediaan Data Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten.	150 persil	Ketersediaan Data Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten.	150 persil	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	2 10 10 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten	2 10 10 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	350,000,000.00	350,000,000.00	350,000,000.00		
2 10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	2 10 04	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas	0.71		Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi.	
2 10 04 2.04	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten	2 10 04 2.04	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten			Indeks Bangunan Gedung	Sedang		Persentase konflik lahan tanah garapan yang di selesaikan	100%	Persentase konflik lahan tanah garapan yang di selesaikan	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00		
2 10 04 2.04 01	Inventarisasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 daerah Kabupaten	2 10 04 2.04 0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	1 Dokumen	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	100,000,000.00		
2 10 04 2.04 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 Daerah Kabupaten	2 10 04 2.04 0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.	1 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten.	1 Berita Acara	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00		
2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>	2 11	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>										15,146,476,280.00	15,146,476,280.00	14,757,551,915.00		
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>										15,146,476,280.00	15,146,476,280.00	14,757,551,915.00		
2 11 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2 11 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPIE	72.14 WTP Berkembang Baik		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,121,491,280.00	5,121,491,280.00	5,012,200,000.00	Memperkuat stabilitas Poltuhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 11 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN	65.07		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00		
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 11 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 11 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 11 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 11 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 laporan	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	4 laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
2 11 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 11 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2 11 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3,135,900,000.00	3,135,900,000.00	2,910,000,000.00		
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 11 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 orang/ bulan	3,135,000,000.00	3,135,000,000.00	2,900,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 11 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	2 11 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
2 11 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 11 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
2 11 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	2 11 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
2 11 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 11 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
2 11 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	2 11 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	14,141,280.00	14,141,280.00	2,500,000.00		
2 11 01 2.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	2 11 01 2.04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 dokumen	14,141,280.00	14,141,280.00	2,500,000.00		APBD
2 11 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2 11 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	16,050,000.00	16,050,000.00	13,400,000.00		
2 11 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 11 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 paket	-	-	12,500,000.00		APBD
2 11 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 11 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD
2 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 11 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	5,250,000.00	5,250,000.00	300,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejutan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 11 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21 Orang	10,500,000.00	10,500,000.00	300,000.00		APBD
2 11 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2 11 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Terkalangnya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terkalangnya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>492,300,000.00</b>	<b>492,300,000.00</b>	<b>673,056,000.00</b>		
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 11 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	7,815,000.00		APBD
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 11 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65,000,000.00	65,000,000.00			APBD
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 11 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00	2,450,000.00		APBD
2 11 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 11 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55,000,000.00	55,000,000.00	30,086,000.00		APBD
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 11 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 11 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,205,000.00		APBD
2 11 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2 11 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 11 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,000,000.00	270,000,000.00	550,000,000.00		APBD
2 11 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 11 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		APBD
2 11 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 11 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,389,700,000.00</b>	<b>1,389,700,000.00</b>	<b>1,317,844,000.00</b>		
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 11 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	5,620,000.00		APBD
2 11 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 11 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	216,000,000.00	216,000,000.00	211,187,740.00		APBD
2 11 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 11 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	13,196,260.00		APBD
2 11 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 11 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,164,700,000.00	1,164,700,000.00	1,087,840,000.00		APBD
2 11 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 11 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>71,600,000.00</b>	<b>71,600,000.00</b>	<b>63,400,000.00</b>		
2 11 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Saranannya	2 11 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Saranannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	65 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	65 Unit	42,450,000.00	42,450,000.00	35,900,000.00		APBD
2 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	20,000,000.00	20,000,000.00	22,500,000.00		APBD
2 11 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 11 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	9,150,000.00	9,150,000.00	5,000,000.00		APBD
2 11 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	2 11 02	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup</b>	<b>73 persen</b>	<b>Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup</b>	<b>73 persen</b>	<b>725,000,000.00</b>	<b>725,000,000.00</b>	<b>254,191,750.00</b>	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 02 2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota</b>	2 11 02 2.01	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota</b>			Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Risiko Bencana	52.94 %		<b>Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota yang Disusun</b>	<b>0 persen</b>	<b>Persentase Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLPH) Kabupaten/Kota yang Disusun</b>	<b>0 persen</b>	-	-	54,191,750.00		
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPLPH Kabupaten/Kota	2 11 02 2.01 0006	Penyusunan RPLPH Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPLPH Kabupaten/Kota yang Disusun	0 dokumen	Jumlah dokumen RPLPH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPLPH kabupaten/kota dan mengkomodir arahan	0 dokumen			54,191,750.00		APBD
2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2 11 02 2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota						<b>Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang Disusun</b>	<b>17 persen</b>	<b>Persentase Dokumen Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota yang Disusun</b>	<b>17 persen</b>	<b>725,000,000.00</b>	<b>725,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>		
2 11 02 2.02 01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	2 11 02 2.02 0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang					Kecamatan Jebus dan Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	450,000,000.00	450,000,000.00	200,000,000.00		APBD
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPMD/RPMD	2 11 02 2.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPMD/RPMD					Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen KLHS RPMD/RPMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen KLHS RPMD/RPMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	275,000,000.00	275,000,000.00			
2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	2 11 03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		<b>Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>902,484,000.00</b>	<b>902,484,000.00</b>	<b>868,785,165.00</b>	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 03 2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	2 11 03 2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>			Persentase Wilayah Perkotaan Yang Terlayani Pengelolaan Risiko Bencana	52.94 %		<b>Persentase terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Bangka Barat</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Bangka Barat</b>	<b>100%</b>	<b>882,484,000.00</b>	<b>882,484,000.00</b>	<b>813,801,720.00</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur						Target
2 11 03 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 11 03 2.01 0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	Data dan informasi, indeks kualitas lingkungan hidup (indeks Kualitas Air, indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks	7 Lokasi	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		APBD
2 11 03 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2 11 03 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 11 03 2.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengambilan Contoh Uj. Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	777,484,000.00	777,484,000.00	708,801,720.00		APBD
2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2 11 03 2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	100 persen	Persentase terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	100 persen	20,000,000.00	20,000,000.00	54,983,445.00		
2 11 03 2.02 01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2 11 03 2.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	1 Laporan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	54,983,445.00		APBD
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	50 persen	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang terkelola	50 persen	21,200,000.00	21,200,000.00	21,200,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
							52.94 %										
							Tinggi										
2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2 11 04 2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	100 Persen	Persentase Pembinaan Kelembagaan dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	100 Persen	21,200,000.00	21,200,000.00	21,200,000.00		
2 11 04 2.01 04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2 11 04 2.01 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kecamatan Kabupaten/Kota	9,92 Ha	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kecamatan Kabupaten/Kota	9,92 Ha	21,200,000.00	21,200,000.00	21,200,000.00		APBD
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	53%	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	53%	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
							52.94 %										
							Tinggi										
2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	2 11 05 2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3						Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha	100 persen	Persentase Penyimpanan sementara Limbah B3 oleh Perusahaan/Badan Usaha	100 persen	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00		
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	2 11 05 2.01 0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3						Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Sampel B3	1 Laporan	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Sampel B3	1 Laporan	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00		APBD
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UP)	100 persen	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UP)	100 persen	10,700,000.00	10,700,000.00	117,324,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
							52.94 %										
							Tinggi										
2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 11 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	10,700,000.00	10,700,000.00	117,324,000.00		
2 11 06 2.01 01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	2 11 06 2.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	3 Dokumen	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan	3 Dokumen	7,500,000.00	7,500,000.00	17,324,000.00		APBD
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 11 06 2.01 0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	50 Badan Usaha	3,200,000.00	3,200,000.00	100,000,000.00		APBD
									Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	100 persen	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	100 persen	5,200,000.00	5,200,000.00	16,500,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
							52.94 %										
							Tinggi										
2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2 11 10 2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						Persentase terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 persen	Persentase terselesainya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100 persen	5,200,000.00	5,200,000.00	16,500,000.00		
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	2 11 10 2.01 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 pengaduan	5,200,000.00	5,200,000.00	16,500,000.00		APBD
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94		Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	16 persen	Persentase masyarakat/Lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi yang memperoleh penghargaan lingkungan	16 persen	50,000,000.00	50,000,000.00	223,000,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
							52.94 %										
							Tinggi										
2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 11 09 2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Persentase pelaksanaan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	50,000,000.00	50,000,000.00	223,000,000.00		
2 11 09 2.01 01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2 11 09 2.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka	19 Entitas	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	19 Entitas	50,000,000.00	50,000,000.00	223,000,000.00		APBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target						
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94			Jumlah sampah yang dikelola	5260.95 Ton/Thn	Jumlah sampah yang dikelola	5260.95 Ton/Thn	8,301,151,000.00	8,301,151,000.00	8,231,151,000.00	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	
2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah	2 11 11 2.01	Pengelolaan Sampah							Persentase sampah yang dikelola	63.54%	Persentase sampah yang dikelola	63.54%	8,301,151,000.00	8,301,151,000.00	8,231,151,000.00		
2 11 11 2.01 02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pengurangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 11 11 2.01 0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbul sampah					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pengurangan Ulang dan Pemanfaatan Kembali	2 Laporan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbul sampah	2 Laporan	7,065,535,000.00	7,065,535,000.00	7,030,535,000.00		APBD	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	2 11 11 2.01 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5258.95 ton	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	5258.95 ton	1,235,616,000.00	1,235,616,000.00	1,200,616,000.00		APBD	
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Jumlah komunitas pencinta lingkungan	1 komunitas	Jumlah komunitas pencinta lingkungan	1 komunitas	6,050,000.00	6,050,000.00	10,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berkeadilan.		
2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 11 08 2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	6,050,000.00	6,050,000.00	10,000,000.00			
2 11 08 2.01 02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	2 11 08 2.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	6,050,000.00	6,050,000.00	10,000,000.00		APBD	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										5,624,544,400.00	5,624,544,400.00	5,925,000,000.00			
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										5,624,544,400.00	5,624,544,400.00	5,925,000,000.00			
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	pemerintahnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SKAP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,952,750,000.00	4,952,750,000.00	5,145,000,000.00	Memperkuat stabilitas politik/namun dan transformasi pelayanan publik		
2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 12 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1,500,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 12 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 12 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 12 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 12 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi	5 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 12 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 12 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2,605,900,000.00	2,605,900,000.00	2,306,900,000.00		APBD	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 12 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,605,000,000.00	2,605,000,000.00	2,300,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 12 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 12 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 12 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 12 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 12 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	15,300,000.00	15,300,000.00	19,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelerokannya	2 12 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelerokannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelerokannya	0 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelerokannya	0 Paket	-	-	11,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 12 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,300,000.00		APBD	
2 12 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 12 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 12 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00		APBD	
2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 12 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	629,800,000.00	629,800,000.00	634,640,000.00		APBD	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 12 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5,500,000.00	5,500,000.00	5,200,000.00		APBD	
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 12 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200,000,000.00	200,000,000.00	105,240,000.00		APBD	
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 12 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	10,000,000.00	10,000,000.00	4,800,000.00		APBD	
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 12 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	62,000,000.00	62,000,000.00	19,500,000.00		APBD	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	42,000,000.00	42,000,000.00	43,950,000.00		APBD
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	1,450,000.00		APBD
2.12.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	69,000,000.00	69,000,000.00	153,900,000.00		APBD
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	238,000,000.00	238,000,000.00	300,000,000.00		APBD
2.12.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	600,000.00		APBD
2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2.12.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>421,050,000.00</b>		APBD
2.12.01.2.07.01	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	-	351,050,000.00		APBD
2.12.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	15,000,000.00	15,000,000.00	70,000,000.00		APBD
2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.12.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,636,570,000.00</b>	<b>1,636,570,000.00</b>	<b>1,641,310,000.00</b>		APBD
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130,000,000.00	130,000,000.00	80,000,000.00		APBD
2.12.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,464,570,000.00	1,464,570,000.00	1,519,101,000.00		APBD
2.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2.12.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>48,380,000.00</b>	<b>48,380,000.00</b>	<b>108,000,000.00</b>		APBD
2.12.01.2.09.01	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana	2.12.01.2.09.0002	Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai	11 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Bea cukai	11 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	27,000,000.00		APBD
2.12.01.2.09.02	Pemeliharaan Mebel	2.12.01.2.09.0003	Pemeliharaan Mebel						Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	17 unit	4,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2.12.01.2.09.03	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 unit	14,380,000.00	14,380,000.00	68,000,000.00		APBD
2.12.01.2.09.05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 unit	25,000,000.00	25,000,000.00	8,000,000.00		APBD
2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUUK</b>	2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUUK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan</b>	<b>87.1%</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan</b>	<b>87.1%</b>	<b>525,814,400.00</b>	<b>525,814,400.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	APBD
2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	2.12.02.2.01	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 persen</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 persen</b>	<b>38,503,000.00</b>	<b>38,503,000.00</b>	<b>445,500,000.00</b>		APBD
2.12.02.2.01.01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2.12.02.2.01.0001	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan						Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1000 Dokumen	6,684,000.00	6,684,000.00	20,000,000.00		APBD
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	318,919,000.00	318,919,000.00	425,500,000.00		APBD
2.12.02.2.02	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	2.12.02.2.02	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 persen</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 persen</b>	<b>468,000,000.00</b>	<b>468,000,000.00</b>	<b>27,500,000.00</b>		APBD
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	25000 Dokumen	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	25000 Dokumen	468,000,000.00	468,000,000.00	27,500,000.00		APBD
2.12.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	2.12.02.2.03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan aturan yang berlaku (SDM, Kemandirian)</b>	<b>100 persen</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan aturan yang berlaku (SDM, Kemandirian)</b>	<b>100 persen</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>20,000,000.00</b>		APBD
2.12.02.2.03.05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk						Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	18,000,000.00	18,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2.12.02.2.04	<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>	2.12.02.2.04	<b>Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk</b>						<b>Persentase pembinaan pendaftaran penduduk yang selesai</b>	<b>100 persen</b>	<b>Persentase pembinaan pendaftaran penduduk yang selesai</b>	<b>100 persen</b>	<b>1,311,400.00</b>	<b>1,311,400.00</b>	<b>7,000,000.00</b>		APBD
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk						Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1,311,400.00	1,311,400.00	7,000,000.00		APBD
2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	2.12.03	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil</b>	<b>68.95%</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil</b>	<b>68.95%</b>	<b>83,820,000.00</b>	<b>83,820,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	APBD
2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	2.12.03.2.01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>						<b>Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>100 persen</b>	<b>Persentase pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil</b>	<b>100 persen</b>	<b>30,700,000.00</b>	<b>30,700,000.00</b>	<b>46,000,000.00</b>		APBD
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7000 Dokumen	13,700,000.00	13,700,000.00	11,000,000.00		APBD
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang diturunkan	3 Layanan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang diturunkan	3 Layanan	2,000,000.00	2,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan kebutuhan yang Tersedia	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2.12.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	2.12.03.2.02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>						<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku</b>	<b>100 persen</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan aturan yang berlaku</b>	<b>100 persen</b>	<b>34,370,000.00</b>	<b>34,370,000.00</b>	<b>44,000,000.00</b>		APBD
2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang	2 Laporan	11,854,000.00	11,854,000.00	11,000,000.00		APBD
2.12.03.2.02.03	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Laporan	5,531,000.00	5,531,000.00	11,000,000.00		APBD
2.12.03.2.02.08	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil						Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	16,985,000.00	16,985,000.00	10,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target										
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target									
2	12	03	2.02	09	Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	2	12	03	2.02												
										Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	1	Dokumen			12,000,000,000		APBD	
2	12	03	2.03	03	Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2	12	03	2.03												
										Persentase Pembiinan Pencatatan Sipil terhadap pihak terkait yang terselenggara	100	Persen	Persentase Pembiinan Pencatatan Sipil terhadap pihak terkait yang terselenggara	100	Persen	18,750,000,000	18,750,000,000	10,000,000,000		APBD	
2	12	03	2.03	04	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	2	12	03	2.03	0004											
										Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan	18,750,000,000	18,750,000,000	10,000,000,000		APBD	
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2	12	04													
										Persentase ketersediaan data kependudukan	80%		Persentase ketersediaan data kependudukan	80%		39,400,000,000	39,400,000,000	80,000,000,000	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	APBD	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2	12	04	2.01												
										Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat	100	Persen	Persentase Data yang terkumpul dan tersaji dengan akurat	100	Persen	3,900,000,000	3,900,000,000	23,000,000,000		APBD	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2	12	04	2.01	0001											
										Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Nisalkan	12	Dokumen	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Nisalkan	12	Dokumen	1,600,000,000	1,600,000,000	18,000,000,000		APBD	
2	12	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2	12	04	2.01	0002											
										Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	20	Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,700,000,000		APBD	
2	12	04	2.01	03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2	12	04	2.01	0003											
										Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1	Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,300,000,000		APBD	
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	12	04	2.03												
										Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara dengan baik	100	Persen	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terselenggara dengan baik	100	Persen	1,900,000,000	1,900,000,000	36,000,000,000		APBD	
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	2	12	04	2.03	0004											
										Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,200,000,000		APBD	
2	12	04	2.03	07	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	12	04	2.03												
										Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	Laporan	-	-	5,000,000,000		APBD	
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	2	12	04	2.03	0008											
										Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	1	Dokumen	1,600,000,000	1,600,000,000	28,800,000,000		APBD	
2	12	04	2.04		Pembiinan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	12	04	2.04												
										Persentase Pembiinan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terhadap	100	Persen	Persentase Pembiinan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terhadap	100	Persen	33,600,000,000	33,600,000,000	21,000,000,000		APBD	
2	12	04	2.04	01	Pembiinan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2	12	04	2.04	0001											
										Jumlah Laporan Hasil Pembiinan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembiinan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	Laporan	33,600,000,000	33,600,000,000	6,000,000,000		APBD	
2	12	04	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	2	12	04	2.04												
										Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	Laporan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	Laporan	-	-	15,000,000,000		APBD	
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	2	12	05													
										Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06								
										Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%		Persentase ketersediaan profil kependudukan	100%		22,760,000,000	22,760,000,000	100,000,000,000	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	APBD	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	2	12	05	2.01												
										Persentase Penyusunan profil kependudukan	100 %		Persentase Penyusunan profil kependudukan	100 %		22,760,000,000	22,760,000,000	100,000,000,000		APBD	
2	12	05	2.01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	2	12	05	2.01	0001											
										Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	0	Dokumen	-	-	8,000,000,000		APBD	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	2	12	05	2.01	0002											
										Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1	Dokumen	22,760,000,000	22,760,000,000	92,000,000,000		APBD	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1	06														
2	13				DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2	13														
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA	2	13	02													
										Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06								
										Persentase kebijakan penataan desa yang ditetapkan di desa	100 %		Persentase kebijakan penataan desa yang ditetapkan di desa	100 %		19,000,000,000	19,000,000,000	100,000,000,000	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	APBD	
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa	2	13	02	2.01												
										Tertaksananya penyelenggaraan penataan desa	60 Desa		Tertaksananya penyelenggaraan penataan desa	60 Desa		19,000,000,000	19,000,000,000	100,000,000,000		APBD	
2	13	02	2.01	02	Fasilitas Tata Wilayah Desa	2	13	02	2.01	0002											
										Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	60	Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	60	Desa	13,000,000,000	13,000,000,000	50,000,000,000		APBD	
2	13	02	2.01	03	Fasilitas Penataan Kewenangan Desa	2	13	02	2.01	0003											
										Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60	Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	60	Desa	6,000,000,000	6,000,000,000	50,000,000,000		APBD	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2	13	04													
										Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06								
										Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	100 %		Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	100 %		286,000,000,000	286,000,000,000	450,000,000,000	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	APBD	
2	13	04	2.01		Pembiinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	13	04	2.01												
										Tertaksananya pembiinan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60 Desa		Tertaksananya pembiinan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	60 Desa		286,000,000,000	286,000,000,000	450,000,000,000		APBD	
2	13	04	2.01	01	Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2	13	04	2.01	0001											
										Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	Dokumen	8,000,000,000	8,000,000,000	30,000,000,000		APBD	
2	13	04	2.01	02	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	2	13	04	2.01	0002											
										Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	9,000,000,000	9,000,000,000	30,000,000,000		APBD	
2	13	04	2.01	03	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	2	13	04	2.01	0003											
										Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	60	Dokumen	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		APBD	
2	13	04	2.01	04	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	2	13	04	2.01	0004											
										Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1	Dokumen	6,000,000,000	6,000,000,000	30,000,000,000		APBD	
2	13	04	2.01	05	Pembiinan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	2	13	04	2.01	0005											
										Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembiinan Peningkatan Kapasitas	60	Orang	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembiinan Peningkatan Kapasitas	60	Orang	22,500,000,000	22,500,000,000	25,000,000,000		APBD	
2	13	04	2.01	06	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	2	13	04	2.01	0006											
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	0	Laporan	20,000,000,000	20,000,000,000			APBD	
2	13	04	2.01	07	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	2	13	04	2.01	0007											
										Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1	Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	1	Dokumen	8					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Target		Target						
									Tolok Ukur	Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur						Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran
2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2 14 02 2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang	100 persen	Jumlah dokumen pengendalian penduduk yang dimanfaatkan terhadap total dokumen pengendalian penduduk yang	100 persen	32.500.000,00	32.500.000,00	20.000.000,00		
2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga, Berencana dan Pembangunan Keluarga	2 14 02 2.02 03	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Berencana dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	-		
2 14 02 2.02	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					DP2KBP3A	Jumlah laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	14.500.000,00	14.500.000,00	20.000.000,00		
2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KBE)	2 14 03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KBE)	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,70		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (m/CBR)	80,38	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (m/CBR)	80,38	679.376.000,00	679.376.000,00	500.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2 14 03 2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal						persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 Persen	persentase Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00		
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					DP2KBP3A	Jumlah dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	3 dokumen	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media	3 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00		
2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 14 03 2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						Jumlah PKKB yang aktif terhadap PLKB yang ada	100 Persen	Jumlah PKKB yang aktif terhadap PLKB yang ada	100 Persen	423.376.000,00	423.376.000,00	400.000.000,00		
2 14 03 2.02 02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	2 14 03 2.02 0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB					DP2KBP3A	Jumlah sarana pendukung Operasional PKB/PLKB yang tersedia	6 unit	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	6 unit	30.000.000,00	30.000.000,00	6.624.000,00		
2 14 03 2.02 03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	2 14 03 2.02 0006	Facilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					DP2KBP3A	Jumlah laporan hasil penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	13 laporan	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	13 laporan	393.376.000,00	393.376.000,00	393.376.000,00		
2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2 14 03 2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						persentase pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di	100 Persen	persentase pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di	100 Persen	195.000.000,00	195.000.000,00	100.000.000,00		
2 14 03 2.03 01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					DP2KBP3A	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 laporan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	6 laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	60.000.000,00		
2 14 03 2.03 02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 14 03 2.03 0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB					DP2KBP3A	Jumlah akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 orang	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	10 orang	3.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00		
2 14 03 2.03 06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 14 03 2.03 0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB					DP2KBP3A	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	10 Unit	Jumlah Unit Sarana Penunjang pelayanan KB	10 Unit	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DAK	
2 14 03 2.03 03	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	2 14 03 2.03 0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan					DP2KBP3A	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan	100 orang	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	100 orang	25.000.000,00	25.000.000,00	18.000.000,00		
2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah	2 14 03 2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah						Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah	100 Persen	Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah	100 Persen	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00		
2 14 03 2.04 03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	2 14 03 2.04 0004	Pembiayaan Terpadu Kampung KB					DP2KBP3A	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	29 Kampung	Jumlah laporan Hasil Pembiayaan Terpadu Kampung KB	29 laporan	1.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00	DAK	
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Optimalisasi Penanganan Stunting	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	70,70		Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HKP	79,40%	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif persentase keluarga stunting yang mengikuti KIE 1000 HKP	79,40%	164.000.000,00	164.000.000,00	390.000.000,00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 14 04 2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						terpenuhinya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	terpenuhinya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 Persen	125.000.000,00	125.000.000,00	320.000.000,00		
2 14 04 2.01 04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2 14 04 2.01 0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					DP2KBP3A	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108 orang	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	108 orang	24.000.000,00	24.000.000,00	60.000.000,00		
2 14 04 2.01 06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	2 14 04 2.01 0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)					DP2KBP3A	tersedianya Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	198 kelompok	Jumlah kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (KBK, BKR, BK, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya	198 kelompok	1.000.000,00	1.000.000,00	165.000.000,00		
2 14 04 2.01 08	Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi Berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan keluarga)	2 14 04 2.01 0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)					DP2KBP3A	Terlaksananya Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi Berencana, kelanjutan serta pengelolaan keuangan	3 laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan	3 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	95.000.000,00		
2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2 14 04 2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembiayaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	39.000.000,00	39.000.000,00	70.000.000,00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
2 14 04 2.02 04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 14 04 2.02 0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja					DP2KB3A	Jumlah Laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 laporan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	2 laporan	39,000,000.00	39,000,000.00	70,000,000.00		
2 15	<b>URUSAN PERHATIHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	2 15	<b>URUSAN PERHATIHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>										11,182,796,500.00	11,182,796,500.00	1,950,000,000.00		
	<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN</b>		<b>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN</b>										11,182,796,500.00	11,182,796,500.00	1,950,000,000.00		
2 15 02	<b>PROGRAM PENYLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	2 15 02	<b>PROGRAM PENYLENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>										10,876,796,500.00	10,876,796,500.00	1,800,000,000.00	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan	
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>										330,000,000.00	330,000,000.00	30,000,000.00		
02 15 02 02 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	02 15 02 02 0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks konektivitas Indeks Bangunan Gedung	0.71		Jumlah Rancangan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00		
02 15 02 02 03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	02 15 02 02 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota							Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Laporan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
2 15 02 2.02	<b>Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>	2 15 02 2.02	<b>Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>							<b>Persentase Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>8,752,950,000.00</b>	<b>8,752,950,000.00</b>	<b>650,000,000.00</b>	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	2 15 02 2.02 0002	Penyediaan Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota							Air Belo, Kec Muntok serta Midak dan Sinar Manik Kec Jebus, Kab. Bangka Barat	718 unit	Jumlah Perlongkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	718 unit	7,200,000,000.00	7,200,000,000.00	500,000,000.00	
	- Konsultansi Database APL		- Konsultansi Database APL							Babar	1 Paket			50,000,000.00	50,000,000.00		
	- Pengadaan Karoseri Mobil SkyLife		- Pengadaan Karoseri Mobil SkyLife							Babar	1 Paket			500,000,000.00	500,000,000.00		
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Mentok	80 unit			800,000,000.00	800,000,000.00		
	- Pengadaan RPPJ		- Pengadaan RPPJ							Mentok	3 unit			60,000,000.00	60,000,000.00		
	- Pengadaan Deliniator		- Pengadaan Deliniator							Mentok	30 unit			60,000,000.00	60,000,000.00		
	- Pengadaan Rambu - Rambu		- Pengadaan Rambu - Rambu							Mentok	40 Unit			80,000,000.00	80,000,000.00		
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Mistak	14 Unit			140,000,000.00	140,000,000.00		Musren
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Kapti	15 Unit			150,000,000.00	150,000,000.00		Musren
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Jelabat	7 Unit			70,000,000.00	70,000,000.00		Musren
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Simpanggong	7 Unit			70,000,000.00	70,000,000.00		Musren
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Tumbak Petar Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Gang Tembus ke jembatan perummas kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat	3 unit			30,000,000.00	30,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							jalan perummas kelurahan keranggan, Kab. Bangka Barat	10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa pupur Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat	10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Dusun Uhar dan Desa Pebaru Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	27 unit			270,000,000.00	270,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Rukam Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	25 unit			250,000,000.00	250,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Kacung Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat	25 unit			250,000,000.00	250,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa cupat kecamatan paritiga, Kab. Bangka Barat	6 unit			60,000,000.00	60,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Air Lintang Kecamatan Templiang, Kab. Bangka Barat	5 unit			50,000,000.00	50,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Benteng Kota Kecamatan Templiang, Kab. Bangka Barat	30 unit			300,000,000.00	300,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Templiang, Kab. Bangka Barat	20 unit			200,000,000.00	200,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Tanggap Kelurahan Sungai Baru, Kab. Bangka Barat	20 unit			200,000,000.00	200,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							RTM Kelurahan Sungai Daeng, Kab. Bangka Barat	30 unit			300,000,000.00	300,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Cilong Kelurahan sungai daeng, Kab. Bangka Barat	12 unit			120,000,000.00	120,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Dusun Tayu Kecamatan Jebus, Kab. Bangka Barat	10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							tikungan dekat rumah bapak marsudi dan ibungan sekat rumah bapak yono dusun VII desa Belo Laut Kecamatan Mentok,	2 unit			20,000,000.00	20,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							kecamatan templiang, Kab. Bangka Barat	30 unit			300,000,000.00	300,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Sekar Biru Kecamatan Paritiga, Kab. Bangka Barat	15 unit			150,000,000.00	150,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							jalan kapten ali zein sampai jembatan air samak, Kab. Bangka Barat	10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							jalan gang ababil kp. menjulang baru, Kab. Bangka Barat	10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							kelurahan tanjung kecamatan muntok, Kab. Bangka Barat	30 unit			300,000,000.00	300,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Desa Belo Laut Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	30 unit			300,000,000.00	300,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Kelurahan Suangi Baru Kecamatan Mentok, Kab. Bangka Barat	5 unit			50,000,000.00	50,000,000.00		Reses
	- Pengadaan LPJU		- Pengadaan LPJU							Dusun Beler Desa Ibu, Kab. Bangka Barat	20 unit			200,000,000.00	200,000,000.00		Reses

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur	Tokol Ukur	Target					
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Dusun Jelu laut Kab. Bangka Barat		10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Desa Air Bulin sampai Dusun Rayak, Kab. Bangka Barat		2 unit			20,000,000.00	20,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					di daerah dekat pemukiman dusun perumnas desa sekar biru kecamatan parit		15 unit			150,000,000.00	150,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					desa air bulin kecamatan dusun tayu, Kab. Bangka Barat		10 unit			100,000,000.00	100,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Kelurahan kelapa, Kab. Bangka Barat		20 unit			200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Jalan desa air bulin kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		20 unit			200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Desa kelapa kecamatan kelapa, Kab. Bangka Barat		20 unit			200,000,000.00	200,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Kelurahan Sungai Daeng, Kab. Bangka Barat		15 unit			150,000,000.00	150,000,000.00			Reses
	- Pengadaan LPUJ		- Pengadaan LPUJ					Desa Terentang Kecamatan Kelapa, Kab. Bangka Barat		15 unit			150,000,000.00	150,000,000.00			Reses
2 15 02 2.02 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan	2 15 02 2.02 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlempangan Jalan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		935 Unit			1,552,950,000.00	1,552,950,000.00	150,000,000.00		Rengas dan Reses
2 15 02 2.03	<b>Pengelolaan Terminal Tipe C</b>	2 15 02 2.03	<b>Pengelolaan Terminal Tipe C</b>						<b>Persentase Terminal Tipe C dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>			
2 15 02 2.03 04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)	2 15 02 2.03 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas utama dan pendukung)						Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Diperbaiki	3 Unit			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	400,000,000.00		
2 15 02 2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	2 15 02 2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>						<b>Persentase Jumlah Kendaraan yang Melakukan uji KIR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>400,000,000.00</b>	<b>350,000,000.00</b>			
2 15 02 2.05 03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 15 02 2.05 0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		11 unit			50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 15 02 2.05 01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 15 02 2.05 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 unit			250,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 15 02 2.05 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Dokumen			25,000,000.00	25,000,000.00	50,000,000.00		APBD
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 15 02 2.05 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10 unit			75,000,000.00	75,000,000.00	200,000,000.00		APBD
2 15 02 2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	2 15 02 2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tahun n</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>98,846,500.00</b>	<b>98,846,500.00</b>	<b>130,000,000.00</b>			
2 15 02 2.06 01	Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	2 15 02 2.06 0017	Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota						Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan			70,000,000.00	70,000,000.00	20,000,000.00		
2 15 02 2.06 03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 15 02 2.06						Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Peserta					10,000,000.00		APBD
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2 15 02 2.06 0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10 Laporan			25,000,000.00	25,000,000.00	60,000,000.00		APBD
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 15 02 2.06 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan			3,846,500.00	3,846,500.00	40,000,000.00		APBD
2 15 02 2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	2 15 02 2.08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>						<b>Persentase Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>295,000,000.00</b>	<b>295,000,000.00</b>	<b>240,000,000.00</b>			
2 15 02 2.08 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	2 15 02 2.08 0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ						Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Orang			45,000,000.00	45,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2 15 02 2.08 03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2 15 02 2.08 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	3 Laporan			250,000,000.00	250,000,000.00	200,000,000.00		APBD
	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota								Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor	Laporan					20,000,000.00		
2 15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	2 15	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>						<b>Persentase pelabuhan pempung lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>306,000,000.00</b>	<b>306,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>			Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
				Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan	6.50%										
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	5.11%										
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADPHB)	2.41%										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADPHB)	27.86%										
2 15 03 2.12	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pempungan Lokal</b>	2 15 03 2.12	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pempungan Lokal</b>						<b>Persentase Pelabuhan Pempungan Lokal dalam Kondisi Baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>306,000,000.00</b>	<b>306,000,000.00</b>	<b>150,000,000.00</b>			
2 15 03 2.12 03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pempungan Lokal	2 15 03 2.12							Jumlah Pelabuhan Pempungan Lokal yang Beroperasi dan Terselenggara	unit					15,000,000.00		
2 15 03 2.12 04	Pengawasan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pempungan Lokal	2 15 03 2.12 0004	Pengawasan dan Pemeliharaan Pelabuhan Pempungan Lokal						Jumlah Pelabuhan Pempungan Lokal yang Beroperasi dan Terselenggara	Unit					105,000,000.00		APBD
2 15 03 2.12 04	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pempungan Lokal	2 15 03 2.12 0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pempungan Lokal						Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pempungan Lokal	1 Laporan			6,000,000.00	6,000,000.00	20,000,000.00		APBD
15 03 2.12 05	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pempungan Lokal	15 03 2.12 0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pempungan Lokal						Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pempungan Lokal yang Tersedia	1 Unit			300,000,000.00	300,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	2 16	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>										<b>8,780,700,000.00</b>	<b>8,780,700,000.00</b>	<b>8,038,500,000.00</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target						
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>									8.780.700.000,00	8.780.700.000,00	8.038.500.000,00				
2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2 16 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SKAP Opini BPK MutuTas SPIP Indeks SPIE Bak Indeks Profesionalitas ASN	72,14 72,14 Berkembang 65,07			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4.080.700.000,00	4.080.700.000,00	4.338.500.000,00	Mempekuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 16 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2 16 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.500.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00		
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 16 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 16 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 16 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 16 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi	5 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi	5 laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 16 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2 16 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.725.900.000,00	2.725.900.000,00	2.856.000.000,00		
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 16 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.725.000.000,00	2.725.000.000,00	2.850.000.000,00		APBD
2 16 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 16 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester I/II SKPD	2 16 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester I/II SKPD							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester I/II SKPD dan Laporan Koordinasi	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester I/II SKPD dan Laporan Koordinasi	3 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 16 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	2 16 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 16 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2 16 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	900.000,00	900.000,00	42.000.000,00		
2 16 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 16 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 16 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	300.000,00	300.000,00	20.000.000,00		APBD
2 16 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 16 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	300.000,00	300.000,00	20.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2 16 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	479.300.000,00	479.300.000,00	530.720.000,00		
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 16 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 16 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20.000.000,00	20.000.000,00			APBD
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 16 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.000.000,00	7.000.000,00	10.720.000,00		APBD
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 16 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	30.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengolahan	2 16 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengolahan							Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengolahan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengolahan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 16 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2 16 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	45.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 16 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	410.000.000,00		APBD
2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 16 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
2 16 01 2.07 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 16 01 2.07	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00			
2 16 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 16 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	852.300.000,00	852.300.000,00	827.780.000,00		
2 16 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 16 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00			APBD
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 16 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000,00	90.000.000,00	94.500.000,00		APBD
2 16 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 16 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00		APBD
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 16 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	755.300.000,00	755.300.000,00	723.280.000,00		APBD
2 16 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2 16 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	20.500.000,00	20.500.000,00	70.000.000,00		
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pegawai	2 07 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pegawai					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 unit	5.500.000,00	5.500.000,00	45.000.000,00		APBD
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Subkegiatan						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target					
2 16 01 2.01 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 16 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	20 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Pemeliharaan/Rehabilitasi	20 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00		APBD
2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	2 16 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	960	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	960	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 16 02 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 16 02 2.01	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	650 Informasi	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	650 Informasi	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00		
2 16 02 2.01 02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	2 16 02 2.01 0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	2 16 02 2.01 0004	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan media komunikasi publik	2 16 02 2.01 0005	Pengelolaan media komunikasi publik						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	2 16 02 2.01 0006	Pelayanan Informasi Publik						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	5 Dokumen	640,000,000.00	640,000,000.00	640,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	2 16 02 2.01 0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik						Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	216 Orang	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	216 Orang	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		APBD
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemiraan Komunitas	2 16 02 2.01 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemiraan Komunitas						Jumlah Dokumen Kemiraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendemokratisasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kemiraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendemokratisasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	950,000,000.00	950,000,000.00	1,150,000,000.00		APBD
2 16 03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	2 16 03	<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	60%	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	60%	2,700,000,000.00	2,700,000,000.00	1,500,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 16 03 2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 16 03 2.01	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						Persentase Jumlah OPD dan Desa/Kelurahan yang memiliki domain dan sub domain yang telah ditetapkan	75%	Persentase Jumlah OPD dan Desa/Kelurahan yang memiliki domain dan sub domain yang telah ditetapkan	75%	305,000,000.00	305,000,000.00	305,000,000.00		
2 16 03 2.01 02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 2.01 0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	2 16 03 2.01 0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah						Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	7 Unit	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	7 Unit	275,000,000.00	275,000,000.00	275,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	2 16 03 2.02	<b>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						Jumlah layanan e-government yang dikelola	48 Layanan e-government	Jumlah layanan e-government yang dikelola	48 Layanan e-government	2,395,000,000.00	2,395,000,000.00	1,195,000,000.00		
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2 16 03 2.02 0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		APBD
	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 16 03 2.02 0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik						Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	2 16 03 2.02 0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	845,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	2 16 03 2.02 0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	300,000,000.00	300,000,000.00	55,000,000.00		APBD
2 16 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	2 16 03 2.02 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00		APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	2 16 03 2.02 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik						Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	5 Perangkat Daerah	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	2 16 03 2.02 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	5 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	2 16 03 2.02 0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah						Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2 16 03 2.02 0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		APBD
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 16 03 2.02 0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah						Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	2 16 03 2.02 0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00		APBD
2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>	2 17	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>										6,084,907,300.00	6,084,907,300.00	7,399,486,300.00		
	<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>		<b>DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN</b>										6,084,907,300.00	6,084,907,300.00	7,399,486,300.00		
2 17 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2 17 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Porsen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Porsen	5,633,621,300.00	5,633,621,300.00	6,850,267,300.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 17 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	2 17 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Porsen	1,500,000.00	1,500,000.00	28,000,000.00		
2 17 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 17 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
2 09 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 09 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000	APBD	
2 09 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 09 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000	APBD	
2 17 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 17 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000,000	300,000,000	8,000,000,000	APBD	
2 17 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 17 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000	APBD	
2 17 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2 17 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3,240,900,000,000</b>	<b>3,240,900,000,000</b>	<b>3,832,000,000,000</b>		
2 17 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 17 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	3,240,000,000,000	3,240,000,000,000	3,822,000,000,000	APBD	
2 17 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 17 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000	APBD	
2 17 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	2 17 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000	APBD	
2 17 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 17 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000	APBD	
2 09 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>6,000,000,000</b>		
2 09 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 09 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000	APBD	
2 09 01 2.03	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.03	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>	<b>54,626,000,000</b>		
2 09 01 2.03 06	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	2 09 01 2.03 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 dokumen	25,000,000,000	25,000,000,000	54,626,000,000	APBD	
2 09 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	2 09 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>25,000,000,000</b>		
2 09 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 09 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000	APBD	
2 09 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 09 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	300,000,000	300,000,000	5,250,000,000	APBD	
2 09 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 09 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	300,000,000	300,000,000	15,750,000,000	APBD	
2 17 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	2 17 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindaknya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>393,395,300,000</b>	<b>393,395,300,000</b>	<b>832,333,700,000</b>		
2 17 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 17 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	4,000,000,000	4,000,000,000	9,515,000,000	APBD	
2 17 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 17 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,000,000,000	20,000,000,000	193,325,000,000	APBD	
2 17 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2 17 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	30,750,300,000	30,750,300,000	118,360,000,000	APBD	
2 17 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 17 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	45,000,000,000	45,000,000,000	84,944,200,000	APBD	
2 17 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	2 17 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	25,000,000,000	25,000,000,000	44,550,000,000	APBD	
2 17 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 17 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	5,346,000,000	APBD	
2 17 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	2 17 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	45,000,000,000	45,000,000,000	77,467,500,000	APBD	
2 17 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 17 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220,000,000,000	220,000,000,000	402,600,000,000	APBD	
2 17 01 2.06 09	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 17 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	645,000,000	645,000,000	2,750,000,000	APBD	
2 17 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemeliharaan Daerah</b>	2 17 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemeliharaan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Usahan Pemeliharaan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Usahan Pemeliharaan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,935,376,000,000</b>	<b>1,935,376,000,000</b>	<b>2,080,073,600,000</b>		
2 17 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 17 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,200,000,000	APBD	
2 17 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 17 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	218,256,000,000	218,256,000,000	240,081,600,000	APBD	
2 17 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 17 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32,400,000,000	32,400,000,000		APBD	
2 17 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 17 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,682,720,000,000	1,682,720,000,000	1,837,792,000,000	APBD	
2 17 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	2 17 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>36,250,000,000</b>	<b>36,250,000,000</b>	<b>46,860,000,000</b>		
2 17 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya	2 17 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 unit	3,250,000,000	3,250,000,000	2,860,000,000	APBD	
2 17 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 17 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	28,000,000,000	28,000,000,000	44,000,000,000	APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Perbaikan/Perbaikan	1 unit	1 unit	5,000,000,000	5,000,000,000	110,000,000,000		APBD	
2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	2 17 03	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMB) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5.11 % 2.41 % 27.86 %		Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	60.58%	60.58%	4,757,000,000	4,757,000,000	43,400,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 03 2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	4 Person	4 Person	4,757,000,000	4,757,000,000	43,400,000,000			
2 17 03 2.01 02	Pemeriksaan Kegiatan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 17 03 2.01 0004	Melaksanakan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	5 unit usaha	5 unit usaha	4,757,000,000	4,757,000,000	43,400,000,000		APBD	
2 17 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	2 17 06	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMB) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5.11 % 2.41 % 27.86 %		Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	51.64%	51.64%	35,610,000,000	69,910,000,000	130,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 06 2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Koperasi yang di bdayakan dan memperoleh Perlindungan yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.64%	51.64%	35,610,000,000	69,910,000,000	130,000,000,000			
2 17 06 2.01 01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	2 17 06 2.01 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	60 orang	Jumlah Unit Usaha yang Telah Penerima Pembiayaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	35,610,000,000	69,910,000,000	130,000,000,000		APBD	
2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	2 17 05	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMB) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5.11 % 2.41 % 27.86 %		Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	19.23%	19.23%	19,400,000,000	19,400,000,000	83,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 05 2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Latihan yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.23%	19.23%	19,400,000,000	19,400,000,000	83,000,000,000			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2 17 05 2.01 0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50 Orang	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	19,400,000,000	19,400,000,000	83,000,000,000		APBD	
	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	2 17 02	<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMB) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5.11 % 2.41 % 27.86 %		Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	7.27%	7.27%	660,000,000	660,000,000	15,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	0.81%	0.81%	660,000,000	660,000,000	15,000,000,000			
	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.01 0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	1 Unit Usaha	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	660,000,000	660,000,000	5,000,000,000		APBD	
	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 17 02 2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah	0.81%	0.81%	-	-	5,000,000,000			



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur						Target
2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2 18 03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Milyar rupiah		Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	72%	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	72%	495,300,000.00	495,300,000.00	500,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 kali	495,300,000.00	495,300,000.00	500,000,000.00		
18 03 2.01 01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	18 03 2.01 0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						Jumlah Perencanaan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2 18 03 2.01 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	3 Dokumen	495,000,000.00	495,000,000.00	495,000,000.00		APBD
2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2 18 04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Milyar rupiah		Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	82	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal	82	134,245,000.00	174,245,000.00	220,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2 18 04 2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						Jumlah perizinan berusaha besesiko yang dikeluarkan	1000 Lzin	Jumlah perizinan berusaha besesiko yang dikeluarkan	1000 lzin	134,245,000.00	174,245,000.00	220,000,000.00		
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik	2 18 04 2.01 0006	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	800 Pelaku Usaha	67,745,000.00	67,745,000.00	80,000,000.00		APBD
2 18 04 2.01 02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan	2 18 04 2.01 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	45 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	45 Kegiatan Usaha	66,500,000.00	66,500,000.00	70,000,000.00		APBD
		2 18 04 2.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	40,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00		
2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2 18 05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	1029 Milyar rupiah		Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	24%	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	24%	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan	
2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2 18 05 2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1 laporan	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan	1 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00		
2 18 05 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 18 05 2.01 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	115 Kegiatan Usaha	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	115 Kegiatan Usaha	5,000,000.00	5,000,000.00	11,500,000.00		APBD
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 18 05 2.01 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	225 Pelaku Usaha	Jumlah Bimbingan Teknis/ Sosialisasi/Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha	225 Pelaku Usaha	10,000,000.00	10,000,000.00	27,000,000.00		APBD
2 18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	2 18 05 2.01	Pengawasan Penanaman Modal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	115 Kegiatan Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan	115 Kegiatan Usaha	5,000,000.00	5,000,000.00	11,500,000.00		APBD
2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										3,068,000,000.00	3,068,000,000.00	3,646,470,000.00		
	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										3,068,000,000.00	3,068,000,000.00	3,646,470,000.00		
2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	45%	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	45%	118,000,000.00	118,000,000.00	746,470,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	
2 19 2 2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader	2 19 2 2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirasaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader						Jumlah keikutsertaan pemuda dalam pasikbraka tingkat provinsi	3 orang	Jumlah keikutsertaan pemuda dalam pasikbraka tingkat provinsi	3 orang	118,000,000.00	118,000,000.00	746,470,000.00		
2 19 2 2.01 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	2 19 2 2.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas saingnya	-	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas saingnya	-	-	-	746,470,000.00		APBD
19 02 2.01 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirasaha Pemuda	19 02 2.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirasaha Pemuda					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Wirasaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas saingnya	80	Jumlah Wirasaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Saingnya	80	100,000,000.00	100,000,000.00	-		
19 02 2.01 06	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	19 02 2.01 0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemuda yang berjasad/ atau Berprestasi Penerima Pencab Aktif	2	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Pencab Aktif	2 orang	18,000,000.00	18,000,000.00	-		
2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEDAHRIAGAN	2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEDAHRIAGAN	Optimalisasi Penanganan Stuntium	Meningkatnya kualitas kesehatan masvarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi Stunting	70.70 6.40%		Pencab Aktif	29	Pencab Aktif	29	2,650,000,000.00	2,650,000,000.00	2,900,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas	
2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	2 event	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00	900,000,000.00		
2 19 3 2.02 01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	2 19 3 2.02 0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	800,000,000.00	800,000,000.00	900,000,000.00		APBD
2 19 3 2.02 02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	2 19 3 2.02 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300,000,000.00	300,000,000.00	-		APBD
2 19 03 2	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 19 03 2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	Jumlah Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2 Cabor	-	-	2,750,000,000.00		
2 19 03 2.03 04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	2 19 03 2.03	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota						Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	orang	-	-	2,750,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target					
2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga	2 19 3 2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olah Raga						Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat nasional	50%	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat nasional	50%	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00		
2 19 3 2.04	Pengembangan organisasi keolahragaan	2 19 3 2.04 0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan						Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Organisasi	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00		APSD
2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 cabang	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3 cabang	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
2 19 3 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 19 3 2.05 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemaksimalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APSD
2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Fasilitas Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	8	Fasilitas Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	8	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan bakti sosial	
2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						Jumlah gugus depan pramuka yang aktif	80 gugus	Jumlah gugus depan pramuka yang aktif	80 gugus	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		
2 19 4 2.01 01	Partisipasi dan keikutsertaan Dalam Kegiatan Kepramukaan	2 19 4 2.01 0008	Partisipasi dan keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 Organisasi	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	1 organisasi	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00		APSD
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	75%	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	75%	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	80%	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	80%	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 20 02 2.01 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral						Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	5 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		APSD
2 20 02 2.01 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	2 20 02 2.01 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral						Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dibangun	1 Dokumen	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dibangun	1 Dokumen	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		APSD
2 20 02 2.01 04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	2 20 02 2.01 0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	97 Orang	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	97 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APSD
2 20 02 2.01 05	Pengembangan Infrastruktur	2 20 02 2.01 0005	Pengembangan Infrastruktur						Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	Jumlah Infrastruktur Statistik	1 Unit	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APSD
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	60%	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	60%	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang mempunyai keamanan informasi	13.79%	Jumlah OPD yang mempunyai keamanan informasi	13.79%	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 21 02 2.01 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 21 02 2.01 0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 Perangkat Daerah	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APSD
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah OPD yang mempunyai akun Government Secured	4 OPD	Jumlah OPD yang mempunyai akun Government Secured	4 OPD	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 21 02 2.02 0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00		APSD
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										6,842,579,288.00	6,842,579,288.00	7,805,420,000.00		
2 22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2 22	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					Parbud					6,842,579,288.00	6,842,579,288.00	7,805,420,000.00		Parbud
2 22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 22	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,747,329,288.00	4,747,329,288.00	4,905,420,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Parbud
2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 22 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Parbud	Tertaskannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Tertaskannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
2 22 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 22 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Parbud	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Parbud
2 22 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 22 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Parbud	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Parbud
2 22 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 22 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Parbud	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Parbud
2 22 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 22 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Parbud	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Parbud
2 22 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 22 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Parbud	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		Parbud
2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 22 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Parbud	Tertaskannya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Tertaskannya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3,511,189,288.00	3,511,189,288.00	3,600,900,000.00		
2 22 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2 22 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Parbud	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/Bulan	3,510,289,288.00	3,510,289,288.00	3,600,000,000.00		Parbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran								
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Parbud	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Parbud				
2	22	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Parbud	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Parbud				
2	22	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Parbud	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Parbud				
2	22	01	2.03		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Parbud	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>						
2	22	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Parbud	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Parbud				
2	22	01	2.04		<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	Parbud	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>55,120,000,000</b>	<b>55,120,000,000</b>	<b>25,120,000,000</b>						
2	22	01	2.04	04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Parbud	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	55,120,000,000	55,120,000,000	25,120,000,000		Parbud				
2	22	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Parbud	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>25,050,000,000</b>	<b>25,050,000,000</b>	<b>42,300,000,000</b>						
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Parbud	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapanannya	0 Paket	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapanannya	0 Paket	300,000,000	300,000,000	15,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.05	03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Parbud	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Parbud				
2	22	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Parbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	8,250,000,000	8,250,000,000	6,750,000,000		Parbud				
2	22	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Parbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang	16,500,000,000	16,500,000,000	20,250,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Parbud	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaskannya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>422,800,000,000</b>	<b>422,800,000,000</b>	<b>401,300,000,000</b>						
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Parbud	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4,000,000,000	4,000,000,000	7,500,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Parbud	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000,000	20,000,000,000	-		Parbud				
2	22	01	2.06	03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Parbud	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Parbud	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	93,500,000,000	93,500,000,000	93,500,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Parbud	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	30,000,000,000	30,000,000,000	25,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Parbud	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Parbud	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	45,000,000,000	45,000,000,000	45,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Parbud	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	220,000,000,000	220,000,000,000	220,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Parbud	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Parbud				
2	22	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Parbud	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>692,420,000,000</b>	<b>692,420,000,000</b>	<b>871,420,000,000</b>						
2	22	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Parbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Parbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70,800,000,000	70,800,000,000	250,800,000,000		Parbud				
2	22	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Parbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6,000,000,000	6,000,000,000	5,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Parbud	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	613,620,000,000	613,620,000,000	613,620,000,000		Parbud				
2	22	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Parbud	<b>Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>38,950,000,000</b>	<b>38,950,000,000</b>	<b>30,000,000,000</b>						
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Operasional	Parbud	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 Unit	9,800,000,000	9,800,000,000	6,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Parbud	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Parbud	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	9,150,000,000	9,150,000,000	5,000,000,000		Parbud				
2	22	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Parbud	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5,000,000,000	5,000,000,000	4,000,000,000		Parbud				
2	22	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	Parbud	<b>Meningkatkan Kualitas Infrastruktur</b>	<b>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah</b>	<b>Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan/ADMB</b>	<b>6,5 %</b>	<b>Cakupan Objek Kebudayaan yang Dikembangkan</b>	<b>16,45</b>	<b>Cakupan Objek Kebudayaan yang Dikembangkan</b>	<b>16,45</b>	<b>727,000,000,000</b>	<b>727,000,000,000</b>	<b>1,200,000,000,000</b>	<b>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan</b>	Parbud
									<b>Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri/manufaktur/ADMB</b>	<b>5,11 %</b>									
									<b>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)</b>	<b>2,41 %</b>									
									<b>Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)</b>	<b>27,86 %</b>									
2	22	02	2.01		<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Parbud	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25 Objek Budaya</b>	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>25 Objek Budaya</b>	<b>535,000,000,000</b>	<b>535,000,000,000</b>	<b>950,000,000,000</b>		Parbud				
2	22	02	2.01	01	Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Parbud	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Peindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	24 Objek	515,000,000,000	515,000,000,000	930,000,000,000		Renja dan Musren				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur dan Target Lama	Target	Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran	Target					
2 22 02 2.01 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	2 22 02 2.01 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					Parbud	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1 Orang	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		Parbud
2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 22 02 2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Parbud	Fasilitas Atas Pelaku Seni Berprestasi	20 Ceremoni	Fasilitas Atas Pelaku Seni Berprestasi	20 Ceremoni	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000		Parbud
2 22 02 2.02 03	Pembinaan Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2 22 02 2.02 0003	Pembinaan Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan					Parbud	Jumlah Orang/ Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	1 Sertifikat	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000		Parbud
2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengutunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 22 02 2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengutunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Lembaga Adat yang	1	Jumlah Lembaga Adat yang	1	92,000,000,000	92,000,000,000	150,000,000,000		Parbud
2 22 02 2.03 03	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	2 22 02 2.03 0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					Parbud	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang	34 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang	34 Orang	92,000,000,000	92,000,000,000	150,000,000,000		Parbud
2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2 22 03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan	6,5 %	Parbud	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang Dilaksanakan Sebagai Ajang Promosi Daerah	1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya yang Dilaksanakan Sebagai Ajang Promosi Daerah	1	167,500,000,000	167,500,000,000	350,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Parbud
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86 %										
2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 22 03 2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Fasilitas Kesenian Kepada Masyarakat pada Tahun n	1	Jumlah Fasilitas Kesenian Kepada Masyarakat pada Tahun n	1	167,500,000,000	167,500,000,000	350,000,000,000		Parbud
2 22 03 2.01 02	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	2 22 03 2.01 0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					Parbud	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	40 Orang	67,500,000,000	67,500,000,000	235,000,000,000		Musren
2 22 03 2.01 03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2 22 03 2.01 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					Parbud	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	100,000,000,000	100,000,000,000	115,000,000,000		Parbud
2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2 22 04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan	6,5 %	Parbud	Jumlah Kebudayaan Sejarah Lokal yang Dikelola dan atau Dipublikasi	3	Jumlah Kebudayaan Sejarah Lokal yang Dikelola dan atau Dipublikasi	3	139,000,000,000	139,000,000,000	250,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Parbud
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86 %										
2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 22 04 2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang Dilakukan	2	Jumlah Pembinaan Sejarah Lokal yang Dilakukan	2	139,000,000,000	139,000,000,000	250,000,000,000		Parbud
2 22 04 2.01 02	Pembudayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	2 22 04 2.01 0001	Pembudayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota yang Diberdayakan	300 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	300 Orang	87,000,000,000	87,000,000,000	187,325,000,000		Parbud
2 22 04 2.01 03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	2 22 04 2.01 0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					Parbud	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	1 Dokumen	52,000,000,000	52,000,000,000	62,675,000,000		Parbud
2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2 22 05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan	6,5 %	Parbud	Persentase Cagar Budaya yang Diasterikan	46.43%	Persentase Cagar Budaya yang Diasterikan	46.43%	803,000,000,000	803,000,000,000	1,000,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Parbud
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86 %										
2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2 22 05 2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Penetapan	Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Penetapan	103,000,000,000	103,000,000,000	150,000,000,000		Parbud
2 22 05 2.01 01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	2 22 05 2.01 0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					Parbud	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	4 Objek	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000		Parbud
2 22 05 2.01 02	Penetapan Cagar Budaya	2 22 05 2.01 0002	Penetapan Cagar Budaya					Parbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	4 Objek	91,000,000,000	91,000,000,000	138,000,000,000		Parbud
2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2 22 05 2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	13 CB	Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi	13 CB	700,000,000,000	700,000,000,000	850,000,000,000		Parbud
2 22 05 2.02 01	Perlindungan Cagar Budaya	2 22 05 2.02 0001	Perlindungan Cagar Budaya					Parbud	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 CB	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	13 CB	700,000,000,000	700,000,000,000	850,000,000,000		Parbud
2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2 22 06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan	6,5 %	Parbud	Persentase Museum dalam Kondisi Baik	100%	Persentase Museum dalam Kondisi Baik	100%	258,750,000,000	258,750,000,000	100,000,000,000	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Parbud
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Industri	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86 %										
2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2 22 06 2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Museum yang Dikelola	100%	Jumlah Museum yang Dikelola	100%	258,750,000,000	258,750,000,000	100,000,000,000		Parbud
2 22 06 2.01 01	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	2 22 06 2.01 0001	Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu					Parbud	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	3 Unit	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	3 Unit	35,000,000,000	35,000,000,000	20,000,000,000		Parbud

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2	22	06	2.01	02	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Berkeseluruhan				Jumlah Sumber Daya Manusia Pemuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	7 Orang	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	7 Orang	210.190.000,00	210.190.000,00	58.400.000,00		Parbud
2	22	06	2.01	03	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum			Parbud	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	11.600.000,00		Parbud
2	22	06	2.01	04	Penyiediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Parbud	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	12 Unit	7.560.000,00	7.560.000,00	10.000.000,00		Parbud
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>																	
<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>																	
23													5.509.548.500,00	5.509.548.500,00	6.178.140.000,00		
23													5.509.548.500,00	5.509.548.500,00	6.178.140.000,00		
2	23	01															
2	23	01															
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.01														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														
2	23	01	2.02														



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran				
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran										
									Target	Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur									
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	23	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00		APBD
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	2	23	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00		APBD
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,302,170,000.00	1,302,170,000.00	1,321,640,000.00		APBD
2	23	01	2.09		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	2	23	01	2.09		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	-	-	<b>210,000,000.00</b>			
					Pengadaan Mebel	2	23	01	2.09	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	5 Unit	Jumlah Laporan Pengadaan Mebel	5 Unit			150,000,000.00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	23	01	2.09	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit			40,000,000.00		
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	23	01	2.09	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit			20,000,000.00		
2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	2	23	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>12 bulan</b>	<b>120,690,000.00</b>	<b>120,690,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>			
2	23	01	2.09	02	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sewaan	2	23	01	2.09	0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sewaan	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sewaan	4 Unit	Jumlah Laporan Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sewaan	4 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	23	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	3 Unit	95,000,000.00	95,000,000.00	150,000,000.00		APBD
2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	23	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	29 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	29 Unit	17,690,000.00	17,690,000.00	30,000,000.00		
2	23	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	23	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00		APBD
2	23	02			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	2	23	02			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>		<b>46.84%</b>	<b>46.84%</b>	<b>46.84%</b>	<b>436,318,500.00</b>	<b>436,318,500.00</b>	<b>460,000,000.00</b>	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing		
					Optimalisasi Pelayanan Dasar						Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	7,48 tahun								
											Harapan Lama Sekolah	11,74 tahun									
											Persentase Sekolah Terakreditasi A	25,51 %									
2	23	02	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	23	02	2.01		<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>Sangat Baik</b>	<b>191,987,500.00</b>	<b>191,987,500.00</b>	<b>160,000,000.00</b>			
											Jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi minimal B	16 SD 15 SMP									
											Jumlah perpustakaan Desa yang terakreditasi minimal B	11 Desa									
2	23	02	2.01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	2	23	02	2.01		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TK berbasis ISO 20000 (ITSM: information technology service)	0 Layanan	Jumlah layanan perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen layanan TK berbasis ISO 20000 (ITSM: information technology service)	0 Layanan			10,000,000.00		
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	68 Orang	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan	68 Orang	36,000,000.00	36,000,000.00	30,000,000.00		Musren
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	2	23	02	2.01	0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan Tertarik yang Dicitak dan Didistribusikan	500 Eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan Tertarik yang Dicitak dan Didistribusikan	500 Eksemplar	40,300,000.00	40,300,000.00	70,000,000.00		APBD
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	2	23	02	2.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500 Eksemplar	111,450,000.00	111,450,000.00	30,000,000.00		APBD
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	1 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai	1 Perpustakaan	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	31 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	31 Perpustakaan	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.01	0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	3,637,500.00	3,637,500.00	10,000,000.00		APBD
2	23	02	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	2	23	02	2.02		<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>4.23 Persen</b>	<b>4.23 Persen</b>	<b>4.23 Persen</b>	<b>244,331,000.00</b>	<b>244,331,000.00</b>	<b>300,000,000.00</b>			
											persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan umum dan sekolah	1400 Orang									
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal serta Masyarakat	2	23	02	2.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal serta Masyarakat	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	6 Lokus	171,231,000.00	171,231,000.00	150,000,000.00		APBD
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	9,850,000.00	9,850,000.00	10,000,000.00		APBD
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	2	23	02	2.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Perpustakaan	23,250,000.00	23,250,000.00	40,000,000.00		APBD
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Budaya Membaca	2	23	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Gemar Budaya Membaca	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	6 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00		APBD
2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	23	02	2.02	0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejeniusannya	1 Orang	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kejeniusannya	1 Orang	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		APBD
2	23	03			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>	2	23	03			<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>23,820,000.00</b>	<b>23,820,000.00</b>	<b>100,000,000.00</b>	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
											Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Industri	6,5 %								
											jumlah naskah kuno yang terdftar di Perpustakaan	1									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur	Tokol Ukur	Target						
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMB)	5,11 %											
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADBS)	2,41 %											
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADBS)	27,86 %											
2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		2	23	03	2.01							
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		2	23	03	2.01	0001						
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
2	23	03	2.01			Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		2	23	03	2.01	0001						
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
						Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota												
2	23	03	2.02			Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2	23	03	2.02							
						Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengembangan Koleksi Budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												
2	23	03	2.02			Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		2	23	03	2.02	0001						
						Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												
						Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara												
23						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		23										
24						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		24										
24						DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		24										
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		2	24	02								
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
2	24	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		2	24	02								
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
						PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01							
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0002						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003						
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
						Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota												
2	24	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		2	24	02	2.01	0003			</			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 25 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	560,072,000.00	560,072,000.00	696,700,000.00		
3 25 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 25 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 25 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipelembatkan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Dipelembatkan	12 Laporan	83,652,000.00	83,652,000.00	111,400,000.00		APBD
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelembatkan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dipelembatkan	12 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		APBD
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 25 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipelembatkan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Dipelembatkan	12 Laporan	469,420,000.00	469,420,000.00	578,300,000.00		APBD
3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 25 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	27,000,000.00	27,000,000.00	36,970,000.00		
3 25 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajanan	3 25 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajanan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	9,000,000.00	9,000,000.00	4,150,000.00		APBD
3 25 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	3 25 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel						Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00		APBD
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 25 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	7,000,000.00		APBD
3 25 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 25 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	7,320,000.00		APBD
3 25 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 25 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00		APBD
3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3 25 03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Budidaya Perikanan	6.50%		Produksi Perikanan Tangkap	48,128 Ton/Tahun	Produksi Perikanan Tangkap	48,128 Ton/Tahun	1,319,350,000.00	1,319,350,000.00	727,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMI)	5,11%										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADPH)	2,41%										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86%										
3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 25 03 2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	9 Persen	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	9 Persen	1,274,350,000.00	1,274,350,000.00	550,000,000.00		
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3 25 03 2.01 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen			150,000,000.00		APBD
3 25 03 2.01 02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	3 25 03 2.01 0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1,898 Unit	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1,898 Unit	197,850,000.00	197,850,000.00	200,000,000.00		Musren
3 25 03 2.01 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Kapal dan Alat Bermanfaat Ikan)	3 25 03 2.01 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap (Kapal dan Alat Bermanfaat Ikan)						Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	61 Unit	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	61 Unit	1,076,500,000.00	1,076,500,000.00	200,000,000.00		Musren dan Reses
						Peralatan perahu nelayan			Desa Air Bulin	2 Unit			215,000,000.00	215,000,000.00			Reses
						Bantuan Mesin Boat 9,5 PK			Desa Air Bulin	4 Unit			215,000,000.00	215,000,000.00			Reses
						Bantuan mesin boat untuk masyarakat desa manungsa sebangkok			Desa Mancung	5 unit			60,000,000.00	60,000,000.00			Reses
						Mesin Perahu 3,5 PK (kelompok tunas riangan)			Dusun Bekt Desa Dendang	1 Unit			10,000,000.00	10,000,000.00			Reses
						Mesin Perahu 5 PK (kelompok belay team) Bo.50 Jula			Dusun Bekt Desa Dendang	3 Unit			50,000,000.00	50,000,000.00			Reses
						Bantuan Perahu dan Mesin Boat 15 PK perahu piber 1.75jula Kelompok Payak Sasarab			Desa Air Bulin	1 Unit			75,000,000.00	75,000,000.00			Reses
						Bantuan perahuuntuk kelompok nelayan			Desa Mancung	5 unit			150,000,000.00	150,000,000.00			Reses
						Bantuan mesin			Kp. Senanglahi Ket. Surodindang	1 Unit			50,000,000.00	50,000,000.00			Reses
3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 25 03 2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Kelompok Nelayan Nelayan yang dibina	KUB	Jumlah Kelompok Nelayan Nelayan yang dibina	KUB	-	-	132,000,000.00		
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	3 25 03 2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang			32,000,000.00		APBD
3 25 03 2.02 02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	3 25 03 2.02 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	Jumlah kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok			50,000,000.00		APBD
3 25 03 2.02 03	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	3 25 03 2.02 0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha			50,000,000.00		APBD
3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)	3 25 03 2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)						Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)	100%	Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)	100%	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00		
						Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)	1 layanan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelatangan Ikan (TPI)	1 layanan	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00		APBD
3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3 25 04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Budidaya Perikanan	6.50%		Produksi Perikanan Budidaya	219,41 Ton/Tahun	Produksi Perikanan Budidaya	219,41 Ton/Tahun	1,123,975,000.00	1,123,975,000.00	493,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMI)	5,11%										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADPH)	2,41%										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86%										
3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3 25 04 2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan zonasi budidaya	100%	Persentase peningkatan kepatuhan terhadap peraturan zonasi budidaya	100%	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran		
									Target		Target							
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran							
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 25 04 2.02 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 kelompok	Jumlah kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3 kelompok	100,000,000.00	100,000,000.00	200,000,000.00		APBD	
3 25 04 2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	3 25 04 2.04	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>						<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)</b>	<b>10 Persen</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)</b>	<b>10 Persen</b>	<b>1,023,975,000.00</b>	<b>1,023,975,000.00</b>	<b>293,000,000.00</b>			
3 25 04 2.04 01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 25 04 2.04 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	1,000,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00		APBD	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 25 04 2.04 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 unit	93,000,000.00	93,000,000.00	93,000,000.00		APBD	
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 25 04 2.04 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	929,975,000.00	929,975,000.00			Musren	
	- Bantuan bibit ikan		- Bantuan bibit ikan					Desa Air Limau		1 unit			7,000,000.00	7,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan lele untuk masyarakat desa belo laut		- Bantuan bibit ikan lele untuk masyarakat desa belo laut					Desa Belo Laut		1 unit			40,000,000.00	40,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan gurame untuk masyarakat desa belo laut		- Bantuan bibit ikan gurame untuk masyarakat desa belo laut					Desa Belo Laut		1 unit			60,000,000.00	60,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan nila untuk masyarakat desa belo laut		- Bantuan bibit ikan nila untuk masyarakat desa belo laut					Desa Belo Laut		1 unit			40,000,000.00	40,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan nila dan pakan untuk masyarakat desa kelapa 1 paket		- Bantuan bibit ikan nila dan pakan untuk masyarakat desa kelapa 1 paket					Desa Kelapa		1 unit			40,000,000.00	40,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan lele dan pakan untuk masyarakat desa kelapa 1 paket		- Bantuan bibit ikan lele dan pakan untuk masyarakat desa kelapa 1 paket					Desa Kelapa		1 unit			40,000,000.00	40,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan gurame dan pakan untuk masyarakat desa kelapa 1 paket		- Bantuan bibit ikan gurame dan pakan untuk masyarakat desa kelapa 1 paket					Desa Kelapa		1 unit			60,000,000.00	60,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan nila dan pakan untuk masyarakat desa mancung 1 paket		- Bantuan bibit ikan nila dan pakan untuk masyarakat desa mancung 1 paket					Desa Mancung		1 unit			40,000,000.00	40,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan lele dan pakan untuk masyarakat desa mancung 1 paket		- Bantuan bibit ikan lele dan pakan untuk masyarakat desa mancung 1 paket					Desa Mancung		1 unit			40,000,000.00	40,000,000.00			Reses	
	- Bantuan bibit ikan gurame dan pakan untuk masyarakat desa mancung 1 paket		- Bantuan bibit ikan gurame dan pakan untuk masyarakat desa mancung 1 paket					Desa Mancung		1 unit			60,000,000.00	60,000,000.00			Reses	
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemertanian Pembudidayaan Ikan di Darat	3 25 04 2.04							Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemertanian Pembudidayaan Ikan di Darat	0 orang					30,000,000.00		APBD	
3 25 04 2.04 06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	3 25 04 2.04							Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi						150,000,000.00		APBD	
3 25 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	3 25 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB)	6.50%				90%	Persentase ketetapan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	90%	50,000,000.00	50,000,000.00	140,750,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADMB)	5,11 %											
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)	2,41 %											
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86 %											
3 25 05 2.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	3 25 05 2.01	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum</b>	<b>70 Persen</b>	<b>Persentase Kepatuhan Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya terhadap hukum</b>	<b>70 Persen</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>140,750,000.00</b>			
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 25 05 2.01							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	0 dokumen			50,000,000.00		APBD	
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	3 25 05 2.01 0002							Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	1 dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	90,750,000.00		APBD	
3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	3 25 06	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB)	6.50%				20%	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20%	170,000,000.00	170,000,000.00	85,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADMB)	5,11 %											
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADMB)	2,41 %											
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADMB)	27,86 %											
3 25 06 2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>	3 25 06 2.01	<b>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil</b>						<b>Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)</b>	<b>18 Persen</b>	<b>Persentase Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan (%)</b>	<b>18 Persen</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>65,000,000.00</b>			
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 25 06 2.01 0001							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha	2 dokumen	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha	2 dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	65,000,000.00		APBD	
3 25 06 2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	3 25 06 2.02	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>						<b>Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>0 Persen</b>	<b>Persentase Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>0 Persen</b>	-	-	20,000,000.00			
3 25 06 2.02 01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3 25 06 2.02							Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 unit usaha	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	0 unit usaha			20,000,000.00			
3 25 06 2.03	<b>Penyediaan Dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	3 25 06 2.03	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>Persentase peningkatan ketersediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan</b>	<b>0%</b>	<b>Persentase peningkatan ketersediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan</b>	<b>0%</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>84,000,000.00</b>			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0002			Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	95,000,000.00	95,000,000.00	84,000,000.00			Musren	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>								<b>2,841,200,000.00</b>	<b>2,841,200,000.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>				
3 26	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>	3 26	<b>DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN</b>					Parbud			<b>2,841,200,000.00</b>	<b>2,841,200,000.00</b>	<b>3,500,000,000.00</b>				
3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	3 26 02	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>					Parbud			<b>2,216,200,000.00</b>	<b>2,216,200,000.00</b>	<b>2,000,000,000.00</b>			Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
				Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri penunjang (ADHBI) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5,11% 2,41% 27,86%		Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	8 DTW	Peningkatan Jumlah Daya Tarik Wisata (DTW)	8 DTW	2,216,200,000.00	2,216,200,000.00	2,000,000,000.00		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	10 DTW	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikembangkan	10 DTW	340,000,000.00	340,000,000.00	300,000,000.00		
3 26 02 2.01 01	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3 26 02 2.01 009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis, Berkembang, Pematangan, dan Berkembang)	10 Lokasi	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	290,000,000.00	290,000,000.00	250,000,000.00		
3 26 02 2.01 04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.01 007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Dokumen Rekomendasi peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	5 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Destinasi yang Dikelola	1 Destinasi	Jumlah Destinasi yang Dikelola	1 Destinasi	1,826,200,000.00	1,826,200,000.00	1,650,000,000.00		
3 26 02 2.03 04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03 004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	190 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	190 Unit	751,240,000.00	751,240,000.00	755,040,000.00		
3 26 02 2.03 07	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 02 2.03 007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Lokasi	1,074,960,000.00	1,074,960,000.00	894,960,000.00		
3 26 02 2.04	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	3 26 02 2.04	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota					Parbud	Pengelolaan Data Pelaku Usaha Pariwisata Daerah	21.43%	Pengelolaan Data Pelaku Usaha Pariwisata Daerah	21.43%	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
3 26 02 2 01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	3 26 02 2 0011	Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
3 26 02	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	3 26 02	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>					Parbud					<b>470,000,000.00</b>	<b>470,000,000.00</b>	<b>500,000,000.00</b>		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri penunjang (ADHBI) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5,11% 2,41% 27,86%		Peningkatan Kunjungan Wisatawan	100,000	Peningkatan Kunjungan Wisatawan	100,000	470,000,000.00	470,000,000.00	500,000,000.00		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 03 2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Paket Wisata yang Dipasarkan	12	Jumlah Paket Wisata yang Dipasarkan	12	470,000,000.00	470,000,000.00	500,000,000.00		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	3 26 03 2.01 007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri					Parbud	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	65,000,000.00	65,000,000.00	105,000,000.00		
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3 26 03 2.01 006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota					Parbud	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	2 Laporan	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan	377,500,000.00	377,500,000.00	367,500,000.00		Renja dan Musren
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri	3 26 03 2.01 003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri					Parbud	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00		
3 26 03 2.01 04	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata dalam dan Luar Negeri	3 26 03 2.01 004	Peningkatan Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata dalam dan Luar Negeri					Parbud	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kerjasama Pariwisata dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
3 26 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	3 26 03	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>					Parbud					<b>50,000,000.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>700,000,000.00</b>		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
				Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB) Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri penunjang (ADHBI) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI) Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBI)	6.50% 5,11% 2,41% 27,86%		Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan HaKI	100%	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan HaKI	100%	50,000,000.00	50,000,000.00	700,000,000.00		Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
3 26 03 2.01	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	3 26 03 2.01	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif					Parbud	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif	40	Jumlah Pengembangan Ekonomi Kreatif	40	50,000,000.00	50,000,000.00	700,000,000.00		
3 26 03 2.01 01	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	3 26 03 2.01 0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual					Parbud	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi	10 Dokumen	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi	10 Produk	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokol Ukur	Target					
3 26 03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3 26 03	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%	Parbud	Persentase Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100%	Persentase Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100%	105,000,000.00	105,000,000.00	300,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 26 03 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 26 03 2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADPH)	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADPH)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADPH)	27,86 %										
3 26 03 2.01 02	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	3 26 03 2.01 0010	Facilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata					Parbud	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	40 Orang	45,000,000.00	45,000,000.00	140,000,000.00		
3 26 03 2.01 03	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3 26 03 2.01 0005	Facilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif					Parbud	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
3 26 03 2.01 04	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3 26 03 2.01 0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif					Parbud	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dibekal dengan Kompetensi	40 Orang	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	80 Orang	25,000,000.00	50,000,000.00	75,000,000.00		
3 26 03 2.01 04	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif							Parbud	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	40 Orang			25,000,000.00		75,000,000.00		
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										2,443,281,000.00	2,443,281,000.00	2,273,000,000.00		
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN										2,443,281,000.00	2,443,281,000.00	2,273,000,000.00		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatkan Pembangunan Secara Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%		Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	5%	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	5%	496,516,000.00	496,516,000.00	500,000,000.00		
3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3 27 02 2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						berkembangnya sarpras pertanian	6 Kecamatan	berkembangnya sarpras pertanian		171,200,000.00	171,200,000.00	177,000,000.00		
27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	27 02 2.01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	16,200,000.00	16,200,000.00	22,000,000.00		
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	155,000,000.00	155,000,000.00	155,000,000.00		
3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3 27 02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100%	persentase pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	100%	177,604,000.00	177,604,000.00	178,000,000.00		
3 27 02 2.02 01	Penjaminan Keamanan dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	3 27 02 2.02 0004	Penjaminan Keamanan dan Kelestarian SDG Tanaman						Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	5 VUB	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	5 VUB	85,000,000.00	85,000,000.00	85,000,000.00		
3 27 02 2.02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	3 27 02 2.02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	19,604,000.00	19,604,000.00	20,000,000.00		
3 27 02 2.02 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3 27 02 2.02 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 dokumen	73,000,000.00	73,000,000.00	73,000,000.00		
3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 27 02 2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						persentase peningkatan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	100 Persen	persentase peningkatan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	100 Persen	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	3 27 02 2.03 0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 laporan	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		
	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak	3 27 02 2.03 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak						Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak sesuai Beredar	1 laporan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijaun Pakan Ternak sesuai Beredar	1 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00		
3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	3 27 02 2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain						pelaksanaan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	12 bin	pelaksanaan penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	12 bin	107,712,000.00	107,712,000.00	105,000,000.00		
									pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	2 ha	pelaksanaan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijaun Pakan Ternak	2 ha					
3 27 02 2.06 02	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	3 27 02 2.06 0002	Pengadaan Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0.5 ton	Jumlah Hijaun Pakan Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	0.5 ton	107,712,000.00	107,712,000.00	105,000,000.00		
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%		Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	2%	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	2%	1,380,300,000.00	1,380,300,000.00	1,200,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	3 27 03 2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						Optimalisasi prasarana Pertanian	100%	Optimalisasi prasarana Pertanian	100%	238,000,000.00	238,000,000.00	538,000,000.00		
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	3 27 03 2.01 0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B						Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	0 Dokumen	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	0 Dokumen			200,000,000.00		
	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B								Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	0 Dokumen			100,000,000.00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	3 27 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5 Laporan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	5 Laporan	55,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejutan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Target		Target						
									Target	Target	Target						Target
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	3 27 03 2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian					1 Dokumen	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan	1 Dokumen	183,000,000.00	183,000,000.00	183,000,000.00			
3 27 03 2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	3 27 03 2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian					100%	persentase pembangunan prasarana pertanian	100%	1,130,300,000.00	1,130,300,000.00	650,000,000.00			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								0 unit	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	0 unit	-	-	250,000,000.00			
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3 27 03 2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				Desa Kacung	2 unit	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit	1,130,300,000.00	1,130,300,000.00	400,000,000.00		Musren	
								Kel. Knapa RT. 04	3 km							Musren	
								Desa Air Bulin	2 unit							Reses	
								RT 3 Desa Tumbak Petar	100 meter							Reses	
								Desa Dendana								Reses	
3 27 03 2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3 27 03 2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota					1 dokumen	Jumlah Dokumen pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00			
3 27 03 2.03	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3 27 03 2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak					1 laporan	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 laporan	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00			
3 27 04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3 27 04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB)	6.50%		100%	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	100%	203,000,000.00	203,000,000.00	203,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	5,11 %									
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	2,41 %									
							Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	27,86 %									
3 27 04 2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 27 04 2.01	0005	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota					1 dokumen	dokumen pemetaan penyakit hewan menular dan zoonosis di wilayah Kabupaten Bangka Barat	1 dokumen	165,000,000.00	165,000,000.00	165,000,000.00			
3 27 04 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	3 27 04 2.01	0005	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis					1 laporan	Jumlah Wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan dan Zoonosis	1 wilayah	115,000,000.00	115,000,000.00	115,000,000.00			
3 27 04 2.01	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	3 27 04 2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular					1 laporan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terselesaikan	1 laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00			
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 27 04 2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota					1 Laporan	Jumlah data pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Kab. Babar	1 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	3 27 04 2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner					1 laporan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00			
3 27 04 2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	3 27 04 2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan					1 Kegiatan	Jumlah Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	1 Kegiatan	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00			
3 27 04 2.05	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	3 27 04 2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha					1 laporan	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	1 unit	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00			
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	3 27 05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB)	6.50%		25%	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	25%	257,605,000.00	257,605,000.00	300,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	5,11 %									
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	2,41 %									
							Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	27,86 %									
3 27 05 2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3 27 05 2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota					100%	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	100%	257,605,000.00	257,605,000.00	300,000,000.00			
3 27 05 2.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 27 05 2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					350 Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	350 Ha	257,605,000.00	257,605,000.00	300,000,000.00			
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3 27 06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB)	6.50%		100%	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	5,11 %									
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	2,41 %									
							Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	27,86 %									
3 27 06 2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 27 06 2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					100%	Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten	100%	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
3 27 06 2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	3 27 06 2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian					1 laporan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	1 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3 27 07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADMB)	6.50%		100%	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	100%	85,860,000.00	85,860,000.00	50,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	5,11 %									
							Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri	2,41 %									
							Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)										



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBR)	27,86 %										
3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3 27 07 2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian					jumlah pelaksanaan penyuluhan	1 kelembagaan	jumlah pelaksanaan penyuluhan	1 kelembagaan	85,860,000.00	85,860,000.00	50,000,000.00			
3 27 07 2.01 01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	3 27 07 2.01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa					Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3 27 07 2.01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00			
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	3 27 07 2.01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian					Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 unit	45,860,000.00	45,860,000.00	10,000,000.00			
3 27 07 2.01 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	3 27 07 2.01 0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani					Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 unit	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Dibentuk	1 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00			Musren
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	3 27 07 2.01						Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 unit					5,000,000.00			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN									228,674,580.00	228,674,580.00	461,817,660.00			
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		DINAS LINGKUNGAN HIDUP									228,674,580.00	228,674,580.00	461,817,660.00			
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHBR)	6.50%	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholder dalam pemanfaatan Tahura	6	Peningkatan jumlah kerjasama stakeholder dalam pemanfaatan Tahura	6	228,674,580.00	228,674,580.00	461,817,660.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADHBR)	5.11%										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBR)	2.41%										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBR)	27.86%										
3 28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	3 28 04 2.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 persen	Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 persen	Persentase Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	100 persen	228,674,580.00	228,674,580.00	461,817,660.00			
3 28 04 2.01 02	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	3 28 04 2.01 0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	12 operasi	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	12 operasi	Jumlah Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	12 operasi	60,000,300.00	60,000,300.00	150,000,300.00			APBD
3 28 04 2.01 11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	3 28 04 2.01 0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditinjau dan Dibahas	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditinjau dan Dibahas	1 dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditinjau dan Dibahas	1 dokumen	168,674,280.00	168,674,280.00	311,817,360.00			APBD
3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3 30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									1,133,338,950.00	1,133,338,950.00	837,237,845.00			
3 30	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	3 30	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN									1,133,338,950.00	1,133,338,950.00	837,237,845.00			
3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3 30 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHBR)	6.50%	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	66.67%	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	66.67%	743,396,950.00	743,396,950.00	322,736,645.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADHBR)	5.11%										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBR)	2.41%										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBR)	27.86%										
3 30 3 2.02	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 30 3 2.02	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	2 unit	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	2 unit	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola	2 unit	743,396,950.00	743,396,950.00	322,736,645.00			
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 30 3 2.02 0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	743,396,950.00	743,396,950.00	322,736,645.00			Renja dan Beses
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHBR)	6.50%	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.90%	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.90%	102,400,000.00	102,400,000.00	146,000,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan		
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADHBR)	5.11%										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBR)	2.41%										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHBR)	27.86%										
3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 kegiatan	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 kegiatan	Jumlah Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3 kegiatan	102,100,000.00	102,100,000.00	128,000,000.00			
3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 30 04 2.02 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	3,900,000.00	3,900,000.00	18,000,000.00			APBD
3 30 04 2.02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3 30 04 2.02 0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00			APBD
3 30 04 2.02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 30 04 2.02 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	73,200,000.00	73,200,000.00	85,000,000.00			APBD

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejutan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejutan/Subkegiatan		Program/Kejutan/Subkegiatan						
									Tokol Ukur dan Target Lama		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						Terlaksananya Pengawasan pupuk dan pestisida di Kab.Bangka Barat	6 kecamatan	Terlaksananya Pengawasan pupuk dan pestisida di Kab.Bangka Barat	6 kecamatan	300,000.00	300,000.00	18,000,000.00		
3 30 04 2.03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	3 30 04 2.03 0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 laporan	300,000.00	300,000.00	18,000,000.00		APBD
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	20 persen	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	20 persen	123,500,000.00	123,500,000.00	183,300,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMI)	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHJ)	27,86 %										
3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 30 05 2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Pameran yang Dilikuti	2 kegiatan	Jumlah Pameran yang Dilikuti	2 kegiatan	123,500,000.00	123,500,000.00	183,300,000.00		
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	3 30 05 2.01 0002	Pameran Dagang Nasional					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 pelaku usaha	78,500,000.00	78,500,000.00	120,050,000.00		APBD
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	3 30 05 2.01 0003	Pameran Dagang Lokal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 pelaku usaha	45,000,000.00	45,000,000.00	65,250,000.00		APBD
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%		Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	100%	Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang	100%	163,592,000.00	163,592,000.00	179,951,200.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMI)	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHJ)	27,86 %										
3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang, dan Pengawasan	3 30 06 2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Ulang, dan Pengawasan						Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2 kegiatan	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2 kegiatan	163,592,000.00	163,592,000.00	179,951,200.00		
3 30 06 2.01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	3 30 06 2.01 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Meters Ilmiah	520 unit	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlangkapan Meters Ilmiah	520 unit	101,832,000.00	101,832,000.00	112,015,200.00		APBD
3 30 06 2.01 02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3 30 06 2.01 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 orang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	60 orang	61,760,000.00	61,760,000.00	67,936,000.00		APBD
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%		Persentase rekomendasi yang diterbitkan	100%	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	100%	450,000.00	450,000.00	3,250,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMI)	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHJ)	27,86 %										
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Penerbitan Tanda Daftar Gudang						Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25%	Persentase Penerbitan Tanda Daftar Gudang	25%	450,000.00	450,000.00	3,250,000.00		
	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang						Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang terfasilitasi	1 Dokumen	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang yang terfasilitasi	1 Dokumen	450,000.00	450,000.00	3,250,000.00		APBD
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										687,945,000.00	687,945,000.00	756,739,500.00		
	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN										687,945,000.00	687,945,000.00	756,739,500.00		
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADPH)	6.50%		Jumlah Sentra IKM	1 Sentra	Jumlah Sentra IKM	1 Sentra	556,150,000.00	556,150,000.00	611,765,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
						Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADMI)	5,11 %										
						Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHBI)	2,41 %										
						Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHJ)	27,86 %										
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dok	Jumlah Dokumen yang disusun	1 Dok	556,150,000.00	556,150,000.00	611,765,000.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 31 02 2.01 0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 dokumen	84,710,000.00	84,710,000.00	93,181,000.00		
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 31 02 2.01 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						meningkatkan penguatan kemampuan Industri berbasis Teknologi	1 dokumen	meningkatkan penguatan kemampuan Industri berbasis Teknologi	1 dokumen	290,165,000.00	290,165,000.00	319,181,500.00		
3 31 02 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 31 02 2.01 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 dokumen	181,275,000.00	181,275,000.00	199,402,500.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokol Ukur dan Target Lama		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Target	100%	Target						100%
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan/ Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADHIB). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHIB). Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHIB).	6.50% 5,11 % 2,41 % 27,86 %		Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	100%	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	100%	84,895,000.00	84,895,000.00	93,384,500.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)					Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	2 Kegiatan	Pendampingan dan Pengawasan Legalitas Usaha Industri	2 Kegiatan	84,895,000.00	84,895,000.00	93,384,500.00			
3 31 03 2.01 01	Kelembagaan Kabupaten/Kota. Fasilitas Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3 31 03 2.01 0001	Kelembagaan Kabupaten/Kota. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)					Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah/Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	100 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	100 dokumen	45,795,000.00	45,795,000.00	50,374,500.00		APBD
3 31 03 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	3 31 03 2.01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	50 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha industri kecil dan industri menengah yang berisiko di satu kabupaten/sepanjang merupakan penanaman modal dalam negeri dan selain dengan bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah	50 dokumen	39,100,000.00	39,100,000.00	43,010,000.00		APBD
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Pertambangan/ Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri manufaktur (ADHIB). Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHIB). Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHIB).	6.50% 5,11 % 2,41 % 27,86 %		Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50%	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	50%	46,900,000.00	46,900,000.00	51,590,000.00	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	
3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3 31 04 2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						Ketersediaan Sistem Informasi industri	1 Kegiatan	Ketersediaan Sistem Informasi industri	1 Kegiatan	46,900,000.00	46,900,000.00	51,590,000.00		
3 31 04 2.01 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	3 31 04 2.01 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 dokumen	46,900,000.00	46,900,000.00	51,590,000.00		APBD
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									98,397,229,953.68	98,397,229,953.68	79,201,553,193.00			
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									98,397,229,953.68	98,397,229,953.68	79,201,553,193.00			
SEKRETARIAT DAERAH			SEKRETARIAT DAERAH									37,347,303,110.00	37,347,303,110.00	28,923,760,853.00			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP GSIH BPR Maturitas SPI Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	29,472,275,400.00	29,472,275,400.00	24,564,305,901.00	Memperkuat stabilitas Pertukarkan dan transformasi pelayanan publik	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 01 01 02.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1,500,000.00	1,500,000.00	27,000,000.00		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 01 01 02.1 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	9,000,000.00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 01 01 02.1 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 01 01 02.1 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 01 01 02.1 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 01 01 02.1 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 01 01 02.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	9,740,900,000.00	9,740,900,000.00	10,010,000,000.00		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4 01 01 02.2 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 orang/Bulan	9,740,000,000.00	9,740,000,000.00	10,000,000,000.00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 01 01 02.2 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target						
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	01	01	02.2	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	01	01	02.2	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		
C	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	4	01	01	02.3		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>6,000,001,000</b>			
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	01	01	02.3	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,001,000		
D	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	4	01	01	02.5		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>74,000,000,000</b>			
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	01	01	02.5	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	02.5	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	300,000,000	300,000,000	17,500,000,000		
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	01	01	02.5	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	70 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 orang	300,000,000	300,000,000	52,500,000,000		
E	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	4	01	01	02.6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,723,796,000,000</b>	<b>3,723,796,000,000</b>	<b>3,400,236,000,000</b>			
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	01	01	02.6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	01	01	02.6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	180,000,000,000	180,000,000,000			
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	01	01	02.6	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	118,000,000,000	118,000,000,000	120,000,000,000		
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	01	01	02.6	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	830,000,000,000	830,000,000,000	1,200,000,000,000		
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4	01	01	02.6	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	150,000,000,000	150,000,000,000	175,000,000,000		
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	01	01	02.6	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	65,496,000,000	65,496,000,000	107,736,000,000		
6	Penyediaan Bahan/Material	4	01	01	02.6	0007	Penyediaan Bahan/Material	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	310,000,000,000	310,000,000,000	225,000,000,000		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	01	01	02.6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2,000,000,000,000	2,000,000,000,000	1,500,000,000,000		
8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	01	01	02.6	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	2,500,000,000		
F	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4	01	01	02.8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>5,720,780,000,000</b>	<b>5,720,780,000,000</b>	<b>6,508,700,000,000</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	01	01	02.8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	01	01	02.8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	900,000,000,000	900,000,000,000	900,000,000,000		
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	01	01	02.8	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	150,000,000,000	150,000,000,000	320,000,000,000		
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	01	01	02.8	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	4,668,780,000,000	4,668,780,000,000	5,286,700,000,000		
G	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4	01	01	02.9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>5,961,690,000,000</b>	<b>5,961,690,000,000</b>	<b>912,117,000,000</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	01	01	02.9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Destinasi	5 unit	5 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Destinasi	5 unit	235,850,000,000	235,850,000,000	196,650,000,000		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	4	01	01	02.9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Destinasi	40 unit	40 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Destinasi	40 unit	280,870,000,000	280,870,000,000	280,870,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	01	01	02.9	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	35,950,000,000	35,950,000,000	10,000,000,000		
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	01	01	02.9	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	5,300,000,000,000	5,300,000,000,000	300,000,000,000		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	01	01	02.9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirarehabilitasi	193 unit	193 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirarehabilitasi	193 unit	109,020,000,000	109,020,000,000	124,597,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	4 01 01	02.11			<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>				100%	100%	100%	809.660.000,00	809.660.000,00	809.660.000,00		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01	02.11 0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02.11 0001	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00			
2	Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01	02.11 0002			Penyediaan Pakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02.11 0002	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakan Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	20 paket	20 paket	77.660.000,00	77.660.000,00	77.660.000,00			
3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01	02.11 0003			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02.11 0003	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 orang	8 orang	132.000.000,00	132.000.000,00	132.000.000,00			
4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 01 01	02.11 0004			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	02.11 0004	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 orang/bulan	2 orang/bulan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			
1	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	4 01 01	02.12			<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>			<b>Terfasilitasinya Kerumahtanggaan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah</b>	100%	100%	100%	1.384.540.000,00	1.384.540.000,00	244.510.000,00		
1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4 01 01	02.12 0001			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	02.12 0001	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	7 paket	7 paket	710.000.000,00	710.000.000,00	89.670.000,00			
2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4 01 01	02.12 0002			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	02.12 0002	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	6 paket	6 paket	500.620.000,00	500.620.000,00	92.170.000,00			
3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4 01 01	02.12 0003			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	02.12 0003	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	6 paket	6 paket	173.920.000,00	173.920.000,00	62.670.000,00			
J	<b>Penataan Organisasi</b>	4 01 01	02.13			<b>Penataan Organisasi</b>			<b>Jumlah kebijakan daerah terkait Penataan Organisasi yang dilaksanakan</b>	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	288.809.400,00	288.809.400,00	711.532.900,00		
1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 01 01	02.13 0001			Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	02.13 0001	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dokumen	1 dokumen	127.426.250,00	127.426.250,00	267.145.000,00			
2	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 01 01	02.13 0002			Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	02.13 0002	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 laporan	1 laporan	59.694.250,00	59.694.250,00	137.197.000,00			
3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4 01 01	02.13 0003			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	02.13 0003	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dokumen	1 dokumen	57.023.400,00	57.023.400,00	159.950.900,00			
4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 01 01	02.13 0004			Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	02.13 0004	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 dokumen	1 dokumen	18.204.000,00	18.204.000,00	88.168.000,00			
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 01 01	02.13 0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	02.13 0005	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	26.461.500,00	26.461.500,00	59.072.000,00			
K	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	4 01 01	02.14			<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>			<b>Terselenggaranya protokol dan komunikasi pimpinan</b>	100%	100%	100%	1.839.400.000,00	1.839.400.000,00	1.860.550.000,00		
	Fasilitas Keprotokol	4 01 01	02.14 0001			Fasilitas Keprotokol	02.14 0001	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokol	12 laporan	12 laporan	-	-	95.550.000,00			
1	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	4 01 01	02.14 0002			Fasilitas Komunikasi Pimpinan	02.14 0002	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	12 laporan	12 laporan	1.832.100.000,00	1.832.100.000,00	1.730.000.000,00			
2	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 01 01	02.14 0003			Pendokumentasian Tugas Pimpinan	02.14 0003	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 laporan	12 laporan	7.300.000,00	7.300.000,00	35.000.000,00			
II	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	4 01 02				<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>			<b>Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah</b>	100%	100%	100%	7.461.729.710,00	7.461.729.710,00	3.738.142.952,00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
					Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	72.14									
							Opini BPK	WTP									
							Maturitas SPIP	Berkembang									
							Indeks SPBE	Baik									
							Indeks Profesionalitas ASN	65.07									
					Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori Baik									
A	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	4 01 02	02.01			<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>			<b>Jumlah kebijakan tata pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	169.801.460,00	169.801.460,00	331.093.952,00		
01	Penataan Administrasi Pemerintahan	4 01 02	02.01 0001			Penataan Administrasi Pemerintahan	02.01 0001	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 dokumen	1 dokumen	102.660.660,00	102.660.660,00	172.585.920,00			
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 01 02	02.01 0002			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	02.01 0002	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 dokumen	4 dokumen	20.009.800,00	20.009.800,00	75.083.032,00			
3	Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 01 02	02.01 0003			Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	02.01 0003	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 dokumen	4 dokumen	47.131.000,00	47.131.000,00	83.425.000,00			
B	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	4 01 02	2.02			<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>Jumlah kebijakan Daerah terkait Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan</b>	3 kebijakan	3 kebijakan	3 kebijakan	7.036.639.850,00	7.036.639.850,00	2.492.200.000,00		
1	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 01 02	2.02 0001			Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.02 0001	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 dokumen	6 dokumen	2.131.835.000,00	2.131.835.000,00	2.392.500.000,00			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kejadian/Subkegiatan		Program/Kejadian/Subkegiatan						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Tolok Ukur					
02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4 01 02 2.02 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2 dokumen	4.903.030.000,00	4.903.030.000,00	82.700.000,00		Renja + Reses
3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	4 01 02 2.02 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpostakom, Kearsipan, Trantumb Linmas	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpostakom, Kearsipan, Trantumb Linmas	1 dokumen	1.774.850,00	1.774.850,00	17.000.000,00		
C	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	4 01 02 2.03	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>						<b>Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum</b>	<b>3 Kebijakan</b>	<b>Jumlah kebijakan Daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum</b>	<b>3 Kebijakan</b>	<b>238.222.900,00</b>	<b>238.222.900,00</b>	<b>807.179.000,00</b>		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4 01 02 2.03 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	85 dokumen	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	85 dokumen	72.922.900,00	72.922.900,00	203.704.000,00		
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	4 01 02 2.03 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	3 Kasus	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	3 Kasus	60.000.000,00	60.000.000,00	40.000.000,00		
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4 01 02 2.03 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 dokumen	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 dokumen	105.300.000,00	105.300.000,00	563.475.000,00		
D	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>	4 01 02 2.04	<b>Fasilitasi Kerjasama Daerah</b>						<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang kerjasama daerah yang dikeluarkan</b>	<b>1 kebijakan</b>	<b>17.065.500,00</b>	<b>17.065.500,00</b>	<b>107.670.000,00</b>		
01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 01 02 2.04 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	10 dokumen	17.065.500,00	17.065.500,00	58.900.000,00		
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4 01 02 2.04	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	laporan	-	-	48.770.000,00		
III	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	4 01 03	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	9,39%		<b>Tingkat kematangan UKPBJ</b>	<b>level 3</b>	<b>Tingkat kematangan UKPBJ</b>	<b>level 3</b>	<b>413.298.000,00</b>	<b>413.298.000,00</b>	<b>621.312.000,00</b>	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	
A	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	4 01 03 2.01	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>						<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan</b>	<b>2 kebijakan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan</b>	<b>2 kebijakan</b>	<b>292.848.000,00</b>	<b>292.848.000,00</b>	<b>211.937.000,00</b>		
01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 01 03 2.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	263.500.000,00	263.500.000,00	79.307.000,00		
2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 01 03 2.01 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 laporan	23.148.000,00	23.148.000,00	80.615.000,00		
3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	4 01 03 2.01 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	1 dokumen	6.200.000,00	6.200.000,00	52.015.000,00		
B	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	4 01 03 2.02	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>						<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan</b>	<b>2 kebijakan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang Perekonomian dan Pembangunan yang dikeluarkan</b>	<b>2 kebijakan</b>	<b>22.450.000,00</b>	<b>22.450.000,00</b>	<b>177.445.000,00</b>		
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 01 03 2.02 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 laporan	6.200.000,00	6.200.000,00	47.600.000,00		
2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 01 03 2.02 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	16.250.000,00	16.250.000,00	129.845.000,00		
C	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	4 01 03 2.03	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>						<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan</b>	<b>3 kebijakan</b>	<b>Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang dikeluarkan</b>	<b>3 kebijakan</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>98.000.000,00</b>	<b>231.930.000,00</b>		
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 01 03 2.03 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	50 dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	86.000.000,00		
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	4 01 03 2.03 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	50 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan secara Elektronik	50 dokumen	34.000.000,00	34.000.000,00	83.340.000,00		
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 01 03 2.03 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	120 orang	30.000.000,00	30.000.000,00	62.500.000,00		
	<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>										<b>61.049.926.843,68</b>	<b>61.049.926.843,68</b>	<b>50.277.792.340,00</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	4 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Optim BPS Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72,14 WTP Baik Baik 65,07		<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>31.974.472.555,68</b>	<b>31.974.472.555,68</b>	<b>22.643.115.500,00</b>	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	4 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00		SEK, DPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	300.000,00	300.000,00	300.000,00		SEK, DPRD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	02	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan <b>per capro</b>	1 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan <b>per capro</b>	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja <b>per capro</b>	4 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja <b>per capro</b>	4 laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	02	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>	<b>0000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>2,619,776,884.00</b>	<b>2,619,776,884.00</b>	<b>2,560,900,000.00</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SEK, DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang/bulan	2,618,876,884.00	2,618,876,884.00	2,560,000,000.00		SEK, DPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	02	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	02	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>	<b>0000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>		
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	02	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Paket Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Paket Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>	<b>0000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>13,400,000.00</b>		
	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	SEK, DPRD	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	-	-	12,500,000.00		SEK, DPRD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4	02	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	SEK, DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	5,000,000.00	5,000,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4	02	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	SEK, DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	10,000,000.00	10,000,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>	<b>0000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>1,945,128,503.59</b>	<b>1,945,128,503.59</b>	<b>1,163,700,000.00</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	SEK, DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEK, DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	359,139,999.16	359,139,999.16	150,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SEK, DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket	139,328,909.43	139,328,909.43	30,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SEK, DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	320,000,000.00	320,000,000.00	320,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	SEK, DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	2 paket	590,384,595.00	590,384,595.00	150,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	75,975,000.00	75,975,000.00	53,400,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Bahan/Material	4	02	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	SEK, DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	170,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00		SEK, DPRD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		SEK, DPRD
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>	<b>0000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>2,286,502,000.00</b>	<b>2,286,502,000.00</b>	<b>2,259,538,000.00</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	438,364,000.00	438,364,000.00	415,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	02	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00		SEK, DPRD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SEK, DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1,811,138,000.00	1,811,138,000.00	1,807,538,000.00		SEK, DPRD
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>	<b>0000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah</b>		<b>Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Terpenuhiya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>3,751,127,000.87</b>	<b>3,751,127,000.87</b>	<b>110,000,000.00</b>		
	Pengadaan Mebel	4	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	SEK, DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 unit	304,800,001.56	304,800,001.56	20,000,000.00		SEK, DPRD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEK, DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	2 unit	9,495,000.00	9,495,000.00	20,000,000.00		SEK, DPRD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SEK, DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan	1 unit	1,744,299,999.51	1,744,299,999.51	20,000,000.00		SEK, DPRD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SEK, DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	108 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	108 unit	1,692,531,999.80	1,692,531,999.80	50,000,000.00		SEK, DPRD
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4</b>	<b>02</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>	<b>0000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>763,918,000.10</b>	<b>763,918,000.10</b>	<b>237,840,000.00</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana	4	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana	SEK, DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	2 unit	64,272,000.00	64,272,000.00	4,500,000.00		SEK, DPRD
	Pemeliharaan Mebel	4	02	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	SEK, DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 unit	27,750,000.00	27,750,000.00	25,000,000.00		SEK, DPRD
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SEK, DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	28,952,000.00	28,952,000.00	8,000,000.00		SEK, DPRD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					SEK, DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Diperbaiki	7 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Direhabilitasi/Diperbaiki	7 unit	585.604.000,00	585.604.000,00	123.000.000,00		SEK, DPRD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK, DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	102 unit	57.340.000,00	57.340.000,00	57.340.000,00		SEK, DPRD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					SEK, DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 unit	-	-	20.000.000,00		SEK, DPRD
	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>4 02 01 2.15</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>						<b>Tertelaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tertelaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>12 bulan</b>	<b>18.618.622.845,00</b>	<b>18.618.622.845,00</b>	<b>14.806.607.500,00</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 orang/bulan	17.482.299.250,00	17.482.299.250,00	14.000.000.000,00		SEK, DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	190 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	190 paket	578.244.374,00	578.244.374,00	333.973.500,00		SEK, DPRD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	4 02 01 2.15 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 orang	558.079.221,00	558.079.221,00	472.634.000,00		SEK, DPRD
	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>4 02 01 2.16</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>						<b>Tertelaksananya Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertelaksananya Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>1.972.297.322,12</b>	<b>1.972.297.322,12</b>	<b>1.489.330.000,00</b>		
	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 02 01 2.16 0003	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 laporan	1.209.517.972,00	1.209.517.972,00	700.000.000,00		SEK, DPRD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	4 02 01 2.16 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 paket	762.779.350,12	762.779.350,12	789.330.000,00		SEK, DPRD
	<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>		<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 65,07	72,14 WTP Berkembang Baik 65,07		<b>Tertegrasi Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran</b>	<b>Ada</b>	<b>Tertegrasi Program – Program DPRD Dalam Melaksanakan Fungsinya ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran</b>	<b>Ada</b>	<b>29.075.454.288,00</b>	<b>29.075.454.288,00</b>	<b>27.634.676.840,00</b>	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik	
	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>		<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>						<b>Tertelaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertelaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah</b>	<b>100 %</b>	<b>717.716.163,00</b>	<b>717.716.163,00</b>	<b>571.479.330,00</b>		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	4 02 02 02.1 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 dokumen	648.431.673,00	648.431.673,00	502.194.840,00		SEK, DPRD
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4 02 02 02.1 0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	12 dokumen	69.284.490,00	69.284.490,00	69.284.490,00		SEK, DPRD
	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>4 02 02 02.2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>						<b>Tertelaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertelaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>100 %</b>	<b>180.834.720,00</b>	<b>180.834.720,00</b>	<b>180.834.720,00</b>		
	Pembahasan APBD	4 02 02 02.2 0003	Pembahasan APBD					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 dokumen	180.834.720,00	180.834.720,00	180.834.720,00		SEK, DPRD
	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>4 02 02 02.4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>						<b>Tertelaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertelaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>5.826.904.000,00</b>	<b>5.826.904.000,00</b>	<b>5.766.904.000,00</b>		
	Pendalaman Tugas DPRD	4 02 02 02.4 0002	Pendalaman Tugas DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 dokumen	4.590.634.000,00	4.590.634.000,00	4.590.634.000,00		SEK, DPRD
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 02 02 02.4 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 dokumen	441.000.000,00	441.000.000,00	441.000.000,00		SEK, DPRD
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	4 02 02 02.4 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					SEK, DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 orang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	9 orang	381.270.000,00	381.270.000,00	321.270.000,00		SEK, DPRD
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	4 02 02 02.4 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					SEK, DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 orang	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00		SEK, DPRD
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	4 02 02 02.4 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 dokumen	144.000.000,00	144.000.000,00	144.000.000,00		SEK, DPRD
	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>4 02 02 02.5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>						<b>Tertelaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertelaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>100 %</b>	<b>1.882.695.615,00</b>	<b>1.882.695.615,00</b>	<b>648.155.000,00</b>		
	Pelaksanaan Reses	4 02 02 02.5 0003	Pelaksanaan Reses					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1.882.695.615,00	1.882.695.615,00	648.155.000,00		SEK, DPRD
	<b>Facilitasi Tugas DPRD</b>	<b>4 02 02 02.8</b>	<b>Facilitasi Tugas DPRD</b>						<b>Tertelaksananya Pelaksanaan Tugas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>Tertelaksananya Pelaksanaan Tugas DPRD</b>	<b>100 %</b>	<b>20.467.303.790,00</b>	<b>20.467.303.790,00</b>	<b>20.467.303.790,00</b>		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 02 02 02.8 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					SEK, DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	84 dokumen	20.467.303.790,00	20.467.303.790,00	20.467.303.790,00		SEK, DPRD
	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>		<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>										<b>152.723.072.166,00</b>	<b>152.723.072.166,00</b>	<b>155.644.910.918,00</b>		
5 01	<b>PERENCANAAN</b>	5 01	<b>PERENCANAAN</b>										<b>6.364.193.500,00</b>	<b>6.364.193.500,00</b>	<b>9.747.776.900,00</b>		
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>										<b>6.364.193.500,00</b>	<b>6.364.193.500,00</b>	<b>9.747.776.900,00</b>		
5 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Baik Indeks Profesionalitas ASN 65,07	72,14 WTP Berkembang Baik 65,07		<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>5.349.172.000,00</b>	<b>5.349.172.000,00</b>	<b>6.284.470.000,00</b>	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik	
5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						<b>Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>		
5 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300.000,00	300.000,00	10.000.000,00		APBD
5 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Semua Kabupaten/kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		APBD
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Semua Kabupaten/kota Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kinerja	5 Laporan	300.000,00	300.000,00	8.000.000,00		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target					
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		APBD
5 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>3,695,900,000.000</b>	<b>3,695,900,000.000</b>	<b>4,010,000,000.000</b>		
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/ Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/ Bulan	3,695,000,000,000	3,695,000,000,000	4,000,000,000,000		APBD
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
5 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	5 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>300,000.000</b>	<b>300,000.000</b>	<b>6,000,000.000</b>		
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		APBD
5 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	5 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>19,050,000.000</b>	<b>19,050,000.000</b>	<b>42,500,000.000</b>		
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0 paket	-	-	12,500,000,000		APBD
5 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	10,000,000,000		APBD
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	6,250,000,000	6,250,000,000	5,000,000,000		APBD
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	12,500,000,000	12,500,000,000	15,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>648,300,000.000</b>	<b>648,300,000.000</b>	<b>891,998,000.000</b>		
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	6,000,000,000	6,000,000,000	10,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	76,000,000,000	76,000,000,000	50,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8,000,000,000	8,000,000,000	30,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	60,000,000,000	60,000,000,000	42,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	4,998,000,000		APBD
5 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	5 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	55,000,000,000	55,000,000,000	10,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	400,000,000,000	400,000,000,000	700,000,000,000		APBD
5 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	5,000,000,000		APBD
5 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	5 01 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Terperolehnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Terperolehnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 persen</b>	-	-	<b>235,000,000.000</b>		APBD
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	-	-	50,000,000,000		APBD
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 01 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	-	5,000,000,000		APBD
5 01 01 2.07 07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5 01 01 2.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	-	5,000,000,000		APBD
5 01 01 2.07 08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	5 01 01 2.07 0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	0 unit	-	-	5,000,000,000		APBD
5 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 01 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	-	100,000,000,000		APBD
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	-	50,000,000,000		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur dan Target Lama	Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokoh Ukur	Target					
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	20,000,000.00			APBD	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	899,292,000.00	899,292,000.00	975,672,000.00		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	105,000,000.00	105,000,000.00	110,000,000.00		APBD
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	65,360,000.00		APBD
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	772,292,000.00	772,292,000.00	798,312,000.00		APBD
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	84,830,000.00	84,830,000.00	95,300,000.00		
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana	5 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15 unit	3,000,000.00	3,000,000.00	3,300,000.00		APBD
5 01 01 2.09 03	Pemeliharaan Mebel	5 01 01 2.09 0005	Pemeliharaan Mebel					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	7,190,000.00	7,190,000.00	16,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5 01 01 2.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	50,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 unit	14,640,000.00	14,640,000.00	5,000,000.00		APBD
5 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	50,000,000.00	50,000,000.00	10,000,000.00		APBD
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	100%	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	100%	830,279,000.00	830,279,000.00	963,306,900.00	Memperkuat stabilitas Poltuhkankam dan transformasi pelayanan publik	
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%	Cakupan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan	100%	730,265,600.00	730,265,600.00	853,292,160.00		
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	5 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	0 Berita Acara	-	-	21,000,000.00		APBD
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	5 01 02 2.01 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	2 Berita Acara	174,189,200.00	174,189,200.00	191,608,120.00		APBD
5 01 02 2.01 06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	5 01 02 2.01 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0 usulan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	0 usulan	-	-	29,000,000.00		APBD
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	5 01 02 2.01 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	4 Dokumen	556,076,400.00	556,076,400.00	611,684,040.00		APBD
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	Persentase Analisis Data dan Informasi yang diterapkan dalam penyusunan dokumen perencanaan	100	54,728,400.00	54,728,400.00	60,201,240.00		
5 01 02 2.02 02	Pembinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	5 01 02 2.02 0002	Pembinan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 orang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	31 orang	54,728,400.00	54,728,400.00	60,201,240.00		APBD
05 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	05 01 02 2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun menggunakan aplikasi	100 Persen	Persentase dokumen perencanaan daerah yang disusun menggunakan aplikasi	100 Persen	6,415,000.00	6,415,000.00	7,056,500.00		
05 01 02 02.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	05 01 02 02.04 0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	6,415,000.00	6,415,000.00	7,056,500.00		APBD
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100	Persentase pengendalian dan evaluasi yang dilakukan terhadap dokumen perencanaan daerah	100	38,870,000.00	38,870,000.00	42,757,000.00		
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	5 01 02 2.03 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	19,045,000.00	19,045,000.00	20,949,500.00		APBD
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5 01 02 2.03 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 laporan	19,825,000.00	19,825,000.00	21,807,500.00		APBD
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE	72.14 WTP Berkembang Baik	Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100%	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100%	184,742,500.00	184,742,500.00	2,500,000,000.00	Memperkuat stabilitas Poltuhkankam dan transformasi pelayanan publik	
									Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%					
									Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan	100%	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan	100%					



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokolok dan Target Pemutakhiran						
									Tokolok dan Target Lama	Target	Tokolok dan Target Pemutakhiran	Target					
5 05	<b>RESEARCH AND DEVELOPMENT</b>	5 05	<b>RESEARCH AND DEVELOPMENT</b>									351,201,805.00	351,201,805.00	400,000,000.00			
	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									351,201,805.00	351,201,805.00	400,000,000.00			
5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	5 05 02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>									351,201,805.00	351,201,805.00	400,000,000.00			
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>		<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>									8,100,000.00	8,100,000.00	90,000,000.00			
5 05 02 2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	5 05 02 2.01	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>									8,100,000.00	8,100,000.00	90,000,000.00			
5 05 02 2.01 11	Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	5 05 02 2.01 0011	Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa	0 Laporan	-	-	45,000,000.00		APBD
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	5 05 02 2.01 0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	5 Laporan	8,100,000.00	8,100,000.00	90,000,000.00		APBD
5 05 02 2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>	5 05 02 2.02	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</b>									178,776,805.00	178,776,805.00	50,000,000.00			
5 05 02 2.02 01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial	5 05 02 2.02 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - aspek Sosial					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	48,813,400.00	48,813,400.00	48,813,400.00		APBD
5 05 02 2.02 02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5 05 02 2.02 0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0 Dokumen	-	-	50,000,000.00		
5 05 02 2.02 03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5 05 02 2.02 0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	43,413,405.00	43,413,405.00	50,000,000.00		APBD
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5 05 02 2.02 0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan kesehatan	5 05 02 2.02 0006	Penelitian dan Pengembangan kesehatan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	-	-	50,000,000.00		
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5 05 02 2.02 0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	2 Dokumen	36,550,000.00	36,550,000.00	75,000,000.00		APBD
5 05 02 2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	5 05 02 2.03	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>									114,325,000.00	114,325,000.00	110,000,000.00			
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5 05 02 2.03 0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0 Dokumen	-	-	20,000,000.00		
5 05 02 2.03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5 05 02 2.03 0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2 Dokumen	114,325,000.00	114,325,000.00	40,000,000.00		APBD
5 05 02 2.03 06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	5 05 02 2.03 0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	0 Dokumen	-	-	50,000,000.00		APBD
5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>	5 05 02 2.04	<b>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</b>									50,000,000.00	50,000,000.00	150,000,000.00			
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	5 05 02 2.04 0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Reproduksi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	-	-	150,000,000.00		APBD
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	5 05 02 2.04 0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5 05 02 2.04 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	0 Laporan	-	-	50,000,000.00		APBD
5 05 02 2.04 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 05 02 2.04 0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	0 Laporan	-	-	50,000,000.00		
	<b>KEUANGAN</b>		<b>KEUANGAN</b>									134,632,657,661.00	134,632,657,661.00	137,791,784,818.00			
	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>									125,776,992,661.00	125,776,992,661.00	128,006,784,818.00			
5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5 02 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									5,182,280,000.00	5,182,280,000.00	5,502,760,000.00			
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00			
5 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00			
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD	
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
5 02 01 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		APBD
5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>3,700,900,000.00</b>	<b>3,700,900,000.00</b>	<b>3,710,000,000.00</b>		APBD
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 orang/Bulan	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00		APBD
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	5 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 02 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
5 02 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>6,000,000,000</b>		APBD
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		APBD
5 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>21,300,000,000</b>	<b>21,300,000,000</b>	<b>60,000,000,000</b>		APBD
5 02 01 2.05 02	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	5 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	12 dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawain	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	10,000,000,000		APBD
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	7,000,000,000	7,000,000,000	25,000,000,000		APBD
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 orang	14,000,000,000	14,000,000,000	25,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>462,300,000,000</b>	<b>462,300,000,000</b>	<b>650,750,000,000</b>		APBD
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6,000,000,000	6,000,000,000	9,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	8,000,000,000	8,000,000,000	3,750,000,000		APBD
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	75,000,000,000	75,000,000,000	75,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Percetakan	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Percetakan						Jumlah Paket Barang Cetak dan Percetakan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Percetakan yang Disediakan	12 Paket	35,000,000,000	35,000,000,000	40,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	5 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50,000,000,000	50,000,000,000	60,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,000,000,000	270,000,000,000	425,000,000,000		APBD
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Anasir Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	15,000,000,000		APBD
5 02 01 2.1	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	5 02 01 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhi</b>					<b>Terpenuhi</b>	<b>100 persen</b>	<b>Terpenuhi</b>	<b>100 persen</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>5,000,000,000</b>	<b>-</b>		APBD
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	5 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	5,000,000,000	5,000,000,000	-		APBD
5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terwujudnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>943,540,000,000</b>	<b>943,540,000,000</b>	<b>984,760,000,000</b>		APBD
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		APBD
5 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	110,000,000,000	110,000,000,000	110,000,000,000		APBD
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	7,000,000,000	7,000,000,000	15,000,000,000		APBD
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	824,540,000,000	824,540,000,000	857,760,000,000		APBD
5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5 02 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>47,440,000,000</b>	<b>47,440,000,000</b>	<b>65,250,000,000</b>		APBD
5 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Sarana						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatan	13 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perawatan	13 unit	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000		APBD
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 unit	7,190,000,000	7,190,000,000	10,000,000,000		APBD
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10,000,000,000	10,000,000,000	25,000,000,000		APBD
5 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	15,250,000,000	15,250,000,000	15,250,000,000		APBD
5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	5 02 02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP Opini BPK Maturnias SPIP Indeks SPIE Baik Professionalitas ASN</b>	<b>72.14 WTP Berkembang Baik 65.07</b>		<b>Perentase ketepatan dan keakuratan dalam penjaminan laoran keuanan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Perentase ketepatan dan keakuratan dalam penjaminan laoran keuanan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>120,286,643,511.00</b>	<b>120,286,643,511.00</b>	<b>121,547,018,143.00</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik</b>	
5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	5 02 02 2.01	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>						<b>Perentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>Perentase dokumen penganggaran yang disusun dengan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>825,694,500.00</b>	<b>825,694,500.00</b>	<b>1,270,207,500.00</b>		APBD
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	5 02 02 2.01 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	124,450,000,000	124,450,000,000	146,950,000,000		APBD
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	5 02 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	127,475,000,000	127,475,000,000	148,550,000,000		APBD
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	5 02 02 2.01 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	300,000,000	300,000,000	30,750,000,000		APBD
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	5 02 02 2.01 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	300,000,000	300,000,000	29,550,000,000		APBD
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	5 02 02 2.01 0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	31 Dokumen	32,550,000,000	32,550,000,000	68,632,500,000		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Target	Tokoh Ukur	Target						Tokoh Ukur
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 02 03 2.01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2.015.300,00	2.015.300,00	46.515,825,00	APBD	
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 02 03 2.01 0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	20.900.000,00	20.900.000,00	181.755.300,00	APBD	
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	5 02 03 2.01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	67.657.650,00	67.657.650,00	277.485.450,00	APBD	
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	5 02 03 2.01 0008	Penilaian Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	43.517.000,00	43.517.000,00	99.559.000,00	APBD	
5 02 03 2.01 10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5 02 03 2.01 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 dokumen	142.080.000,00	142.080.000,00	268.977.500,00	APBD	
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 02 03 2.01 0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	494.200,00	494.200,00	5.258.600,00	APBD	
5 02 03 2.01 13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	5 02 03 2.01 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60 orang	25.100.000,00	25.100.000,00	23.050.000,00	APBD	
5 02	<b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	5 02	<b>BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>										<b>8.855.665.000,00</b>	<b>8.855.665.000,00</b>	<b>9.785.000.000,00</b>		
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SKAP Opini BPK Mutu KSP Indeks SSB Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berembang Baik 65.07		Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhiya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	7.614.230.000,00	7.614.230.000,00	8.485.000.000,00	Memperkuat stabilitas Polihukam dan transformasi pelayanan publik	
	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.01	<b>Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>10.000.000,00</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Presentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Presentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.485.900.000,00</b>	<b>5.485.900.000,00</b>	<b>6.106.500.000,00</b>		
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang menerima Gaji	31 Orang/ bulan	Jumlah Orang yang menerima Gaji	31 Orang/ bulan	5.485.000.000,00	5.485.000.000,00	6.100.000.000,00		
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 02 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.500.000,00		
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 02 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300.000,00	300.000,00	2.000.000,00		
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>						<b>Presentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Presentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>300.000,000</b>	<b>300.000,000</b>	<b>2.000.000,000</b>		
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300.000,000	300.000,000	2.000.000,000		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>23.550.000,000</b>	<b>23.550.000,000</b>	<b>63.000.000,000</b>		
11	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	5 02 01 2.05 0003	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya						Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	0 Paket	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelembagaannya	0 Paket	-	-	12.500.000,00		
12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 02 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300.000,000	300.000,000	2.000.000,000		
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	5 02 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	31 orang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	31 orang	7.750.000,00	7.750.000,00	20.000.000,00		
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	31 orang	Penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	31 orang	15.500.000,00	15.500.000,00	28.500.000,00		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	5 02 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Presentase terpenuhinya Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>Presentase terpenuhinya Administrasi Umum</b>	<b>100%</b>	<b>516.800.000,000</b>	<b>516.800.000,000</b>	<b>600.600.000,000</b>		
14	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.500.000,00	6.500.000,00	9.100.000,00		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11.000.000,00	11.000.000,00	5.000.000,00		
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 02 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.000.000,00	67.000.000,00	60.000.000,00		
17	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	5 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	12 Paket	47.000.000,00	47.000.000,00	50.000.000,00		
18	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5 02 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	25 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
19	Penyediaan Bahan/ Material	5 02 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/ Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	74.000.000,00	74.000.000,00	125.500.000,00		
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	288.000.000,00	288.000.000,00	325.000.000,00		
21	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 02 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300.000,000	300.000,000	3.000.000,000		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	5 02 01 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Presentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.556.180.000,000</b>	<b>1.556.180.000,000</b>	<b>1.474.160.000,000</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
22	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	5 02 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	386,000,000.00	386,000,000.00	326,000,000.00		
24	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	5 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	16,000,000.00	16,000,000.00	20,000,000.00		
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,152,180,000.00	1,152,180,000.00	1,126,160,000.00		
	<b>Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5 02 01 2.09</b>	<b>Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Persentase terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>174,840,000.00</b>		
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bona Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajanan	5 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bona Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajanan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan restorisasinya	20 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan restorisasinya	20 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	111,840,000.00		
27	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	3 unit	15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00		
28	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	14 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	14 unit	5,000,000.00	5,000,000.00	15,500,000.00		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 02 01 2.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Rehabilitasi	unit	-	-	40,000,000.00		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5 02 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Persentase Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,900,000.00</b>		
	Pengadaan Mebel	5 02 01 2.07	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	-	-	33,900,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 02 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	10,000,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 02 01 2.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	10,000,000.00		
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5 02 04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya kemandirian keuangan daerah</b>	<b>Derajat Otonomi Fiskal Daerah</b>	<b>9.39 %</b>		<b>Persentase peningkatan pajak daerah</b>	<b>3.67%</b>	<b>Persentase peningkatan pajak daerah</b>	<b>3.67%</b>	<b>1,241,435,000.00</b>	<b>1,241,435,000.00</b>	<b>1,300,000,000.00</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi</b>	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5 02 04 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						<b>Persentase peningkatan retribusi daerah</b>	<b>3.02%</b>	<b>Persentase peningkatan retribusi daerah</b>	<b>3.02%</b>	<b>462,024,800.00</b>	<b>462,024,800.00</b>	<b>454,000,000.00</b>		
	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	17 Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah						<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah</b>	<b>20 Laporan/ Dokumen</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Pengolahan dan Evaluasi Data Pajak Daerah</b>	<b>20 Laporan/ Dokumen</b>	<b>561,165,200.00</b>	<b>561,165,200.00</b>	<b>392,000,000.00</b>		
	Jumlah Dokumen/Laporan Penghasilan Pajak daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak daerah dan Pemeriksaan serta	6 Laporan/ Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan Penghasilan Pajak daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak daerah dan Pemeriksaan serta						<b>Jumlah Dokumen/Laporan Penghasilan Pajak daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak daerah dan Pemeriksaan serta</b>	<b>6 Laporan/ Dokumen</b>	<b>Jumlah Dokumen/Laporan Penghasilan Pajak daerah, Penyelesaian Keberatan Pajak daerah dan Pemeriksaan serta</b>	<b>6 Laporan/ Dokumen</b>	<b>218,245,000.00</b>	<b>218,245,000.00</b>	<b>454,000,000.00</b>		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	197,200,200.00	197,200,200.00	19,000,000.00		
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	59,020,000.00	59,020,000.00	94,700,700.00		
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	46,820,000.00	46,820,000.00	54,055,700.00		
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	12 Unit	60,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00		
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	115,653,500.00	115,653,500.00	124,802,000.00		
5	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						Jumlah Laporan Penatausahaan Data Pajak Daerah (Laporan PBB, BPHTB dan Laporan 9 Pajak Daerah)	12 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Data Pajak Daerah (Laporan PBB, BPHTB dan Laporan 9 Pajak Daerah)	12 Laporan	72,771,100.00	72,771,100.00	184,498,000.00		
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5 02 04 2.01 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NUOPnya	4970 OP	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NUOPnya	4970 OP	6,200,000.00	6,200,000.00	55,140,000.00		
7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen	10,200,000.00	10,200,000.00	50,560,000.00		
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	5 02 04 2.01	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0 Layanan	-	-	10,000,000.00		
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Laporan	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Laporan	135,945,800.00	135,945,800.00	187,798,100.00		
9	Penagihan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0011	Penagihan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	2 Dokumen	184,511,000.00	184,511,000.00	246,837,000.00		
10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2 Dokumen	11,500,000.00	11,500,000.00	97,163,000.00		
11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	5 02 04 2.01 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2 Dokumen	22,234,000.00	22,234,000.00	110,000,000.00		
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 02 04 2.01 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	319,379,400.00	319,379,400.00	55,445,500.00		
	<b>KEPEGAWAIAN</b>		<b>KEPEGAWAIAN</b>										<b>10,207,819,200.00</b>	<b>10,207,819,200.00</b>	<b>6,678,149,200.00</b>		
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH</b>		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH</b>										<b>10,207,819,200.00</b>	<b>10,207,819,200.00</b>	<b>6,678,149,200.00</b>		
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5 03 01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP</b>	<b>72.14</b>		<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>8,744,960,000.00</b>	<b>8,744,960,000.00</b>	<b>5,401,490,000.00</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik</b>	
						<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>										
						<b>Maturitas SPI</b>	<b>Ekembang</b>										
						<b>Indeks SPBE</b>	<b>Baik</b>										
						<b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>65.07</b>										
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5 03 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 03 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 03 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Target						
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran	Tolok Ukur	Target					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan <b>nya tetap</b>	2 Dokumen	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan <b>nya tetap</b>	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3,605,900,000,000</b>	<b>3,605,900,000,000</b>	<b>3,699,700,000,000</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 orang/ Bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	31 org/bln	3,605,000,000,000	3,605,000,000,000	3,698,800,000,000		APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	Jumlah laporan penatausahaan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2 laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD	5	03	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semes teran SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	03	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33,550,000,000</b>	<b>33,550,000,000</b>	<b>37,300,000,000</b>		
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kab. Bangka Barat	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000		APBD
2	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5	03	01	2.05	0002	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengadaan pakalan dinas dan/atau pakalan khusus hari tertentu lainnya beserta atribut aksesori/aksesoris	0 Setel	-	-	-	-	12,500,000,000		APBD
3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	03	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	7,750,000,000	7,750,000,000	7,250,000,000		APBD
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Bangka Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31 Orang	15,500,000,000	15,500,000,000	7,250,000,000		APBD
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Terkelolanya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>951,300,000,000</b>	<b>951,300,000,000</b>	<b>571,500,000,000</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	3 paket	500,000,000,000	500,000,000,000	15,000,000,000		APBD
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5	03	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	4 paket	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		APBD
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	55,000,000,000	55,000,000,000	45,000,000,000		APBD
5	Penyediaan Barang Cetak dan Reproduksi	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Reproduksi	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Reproduksi yang Disediakan	12 Paket	Jumlah paket barang cetak dan reproduksi yang disediakan	12 paket	35,000,000,000	35,000,000,000	25,000,000,000		APBD
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000		APBD
7	Penyediaan Bahan/Material	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	60,000,000,000	60,000,000,000	60,000,000,000		APBD
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	270,000,000,000	270,000,000,000	395,200,000,000		APBD
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	03	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>10,000,000,000</b>	<b>-</b>		
1	Pengadaan Mebel	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Kab. Bangka Barat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	10,000,000,000	10,000,000,000	-		APBD
<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Tersedianya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1,046,190,000,000</b>	<b>1,046,190,000,000</b>	<b>1,046,190,000,000</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		APBD
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	300,400,000,000	300,400,000,000	300,400,000,000		APBD
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	25,000,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000		APBD
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	718,790,000,000	718,790,000,000	718,790,000,000		APBD
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>3,096,220,000,000</b>	<b>3,096,220,000,000</b>	<b>45,000,000,000</b>		
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan	Kab. Bangka Barat	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan	14 Unit	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jawatan	14 Unit	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000		APBD
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangka Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	14,380,000,000	14,380,000,000	5,000,000,000		APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	7 Unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 Unit	3,035,000,000,000	3,035,000,000,000	15,000,000,000		APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bangka Barat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/direhabilitasi	44 Unit	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	44 Unit	26,840,000,000	26,840,000,000	5,000,000,000		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur	Target	Tokol Ukur	Target					
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 03 01 2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kab. Bangka Barat	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
II	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	5 03 02		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja >76 Jumlah PNS yang diuji/teliti hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	95.42% 35 orang 78 orang	Persentase PNS yang memiliki nilai kinerja >76 Jumlah PNS yang diuji/teliti hukuman disiplin tingkat ringan, sedang, dan berat Jumlah PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan Minimal Strata II	95.42% 35 orang 78 orang	1,462,859,200.00 1,462,859,200.00	1,276,659,200.00	Memperkuat stabilitas Polihukankam dan transformasi pelayanan publik	
A	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN</b>	5 03 02 2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawain ASN</b>					Persentase pemenuhan pegawai ASN yang sesuai dengan kebutuhan dan format	100%	100%	547,485,000.00	547,485,000.00	533,085,000.00			
1	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	5 03 02 2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	3,250,000.00	3,250,000.00	3,250,000.00		APBD	
2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	5 03 02 2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00		APBD	
3	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK	5 03 02 2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPK	1 Dokumen	1 Dokumen	330,000,000.00	330,000,000.00	330,000,000.00		APBD	
4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	5 03 02 2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	1 Laporan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
5	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	5 03 02 2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	7,875,000.00	7,875,000.00	7,875,000.00		APBD	
6	Evaluasi Pemberhentian ASN	5 03 02 2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
7	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	5 03 02 2.01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	5 03 02 2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawain	1 Dokumen	1 Dokumen	13,375,000.00	13,375,000.00	13,375,000.00		APBD	
9	Pengelolaan Data Kepegawain	5 03 02 2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawain				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawain	1 Dokumen	1 Dokumen	140,610,000.00	140,610,000.00	126,210,000.00		APBD	
B	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	5 03 02 2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>					Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	92%	92%	256,635,000.00	256,635,000.00	126,635,000.00			
1	Pengelolaan Mutasi ASN	5 03 02 2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar instansi	1 Dokumen	1 Dokumen	1,775,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00		APBD	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	5 03 02 2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	117,150,000.00	117,150,000.00	11,150,000.00		APBD	
3	Pengelolaan Promosi ASN	5 03 02 2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	137,710,000.00	137,710,000.00	112,710,000.00		APBD	
C	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	5 03 02 2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>					Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	100%	100%	602,529,200.00	602,529,200.00	576,129,200.00			
1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	5 03 02 2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitas	100 Orang	100 Orang	58,300,000.00	58,300,000.00	58,300,000.00		APBD	
2	Pengelolaan Assessment Center	5 03 02 2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	1 Dokumen	357,300,000.00	357,300,000.00	357,300,000.00		APBD	
3	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	5 03 02 2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	36 Orang	36 Orang	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00		APBD	
4	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	5 03 02 2.03	0002	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	54,029,200.00	54,029,200.00	39,629,200.00		APBD	
5	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	5 03 02 2.03	0003	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	500 Orang	500 Orang	12,300,000.00	12,300,000.00	300,000.00		APBD	
6	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5 03 02 2.03	0004	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional				Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	14 Orang	14 Orang	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
7	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	5 03 02 2.03	0005	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	1 Laporan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
D	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	5 03 02 2.04		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>					Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	84%	84%	56,210,000.00	56,210,000.00	41,810,000.00			
1	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 03 02 2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	49,960,000.00	49,960,000.00	35,560,000.00		APBD	
3	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	5 03 02 2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai				Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	50 Orang	50 Orang	5,050,000.00	5,050,000.00	5,050,000.00		APBD	
4	Pembinaan Disiplin ASN	5 03 02 2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	80 Orang	80 Orang	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
5	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 03 02 2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
6	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	5 03 02 2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai				Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
7	Evaluasi Disiplin ASN	5 03 02 2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN				Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	300,000.00		APBD	
	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>								1,167,200,000.00	1,167,200,000.00	1,027,200,000.00			
	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH</b>			<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH</b>								1,167,200,000.00	1,167,200,000.00	1,027,200,000.00			
III	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	5 04 02		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	80.17%	Persentase PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan/fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki	80.17%	1,167,200,000.00 1,167,200,000.00	1,027,200,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukankam dan transformasi pelayanan publik	
	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	5 04 02 2.01		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>					Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	450 Orang	Jumlah PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya	450 Orang					
									Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenjarnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	1.942 Orang	Jumlah PNS yang telah mengikuti seminar/ workshop / kursus / magang / sejenjarnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir	1.942 Orang	240,600,000.00	240,600,000.00	100,600,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5	04 02 2.01 0001					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5	04 02 2.01 0003					Kab. Bangka Barat	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	360 Orang	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	360 Orang	240,000,000,000	240,000,000,000	100,000,000,000		APBD
3	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	5	04 02 2.01 0004					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pendoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pendoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
<b>B</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>5</b>	<b>04 02 2.02</b>						<b>Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>100%</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>100%</b>	<b>926,600,000,000</b>	<b>926,600,000,000</b>	<b>926,600,000,000</b>		
1	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	5	04 02 2.02 0001					Kab. Bangka Barat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
2	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	04 02 2.02 0007					Kab. Bangka Barat	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	926,000,000,000	926,000,000,000	926,000,000,000		APBD
3	Pembinaan, Pendoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	04 02 2.02 0008					Kab. Bangka Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000		APBD
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>										<b>6,834,509,000,000</b>	<b>6,834,509,000,000</b>	<b>8,206,700,000,000</b>		
<b>A</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>	<b>A</b>	<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>										<b>6,834,509,000,000</b>	<b>6,834,509,000,000</b>	<b>8,206,700,000,000</b>		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Berkembang Baik Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terperuhnya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terperuhnya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5,232,620,000,000	5,232,620,000,000	5,042,426,000,000	Memperkuat stabilitas Politik dalam dan transformasi pelayanan publik	
<b>6 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>6 01 01 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>1,500,000,000</b>	<b>41,500,000,000</b>		
6 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	300,000,000	300,000,000	15,000,000,000		
6 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		
6 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah laporan capaian kinerja dan hitkar realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan hitkar realisasi kinerja SKPD	4 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Hitkar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Hitkar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	300,000,000	300,000,000	10,000,000,000		
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	300,000,000	300,000,000	8,500,000,000		
<b>6 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6 01 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>4,185,900,000,000</b>	<b>4,185,900,000,000</b>	<b>3,712,500,000,000</b>		
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	29 org/bln	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 org/bln	4,185,000,000,000	4,185,000,000,000	3,700,000,000,000		
6 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	300,000,000	300,000,000	2,500,000,000		
6 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 laporan	300,000,000	300,000,000	5,000,000,000		
6 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	2 dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 dokumen	300,000,000	300,000,000	5,000,000,000		
<b>6 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6 01 01 2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>8,500,000,000</b>		
6 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah laporan penatausahaan barang milik Daerah pada SKPD	3 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 laporan	300,000,000	300,000,000	8,500,000,000		
<b>6 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>6 01 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>22,050,000,000</b>	<b>22,050,000,000</b>	<b>37,500,000,000</b>		
6 01 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6 01 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah dokumen pendaftaran dan pengolahan administrasi kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000,000	300,000,000	12,500,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
6 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan perundang-Undangan	6 11 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	29 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	7,250,000.00	7,250,000.00	12,500,000.00		
6 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 11 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29 Orang	14,500,000.00	14,500,000.00	12,500,000.00		
<b>6 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>6 01 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>437,300,000.00</b>	<b>437,300,000.00</b>	<b>675,506,000.00</b>		
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 01 01 2.06 0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah paket komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	6,000,000.00	6,000,000.00	6,789,000.00		
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00		
6 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah paket rumah tangga yang disediakan	4 paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	8,000,000.00	8,000,000.00	5,432,000.00		
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	55,000,000.00	55,000,000.00	50,000,000.00		
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengapodaan	6 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengapodaan						Jumlah paket barang cetakan dan pengapodaan yang disediakan	12 paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengapodaan yang Disediakan	12 paket	35,000,000.00	35,000,000.00	60,485,000.00		
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	4,800,000.00		
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	6 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 paket	50,000,000.00	50,000,000.00	115,000,000.00		
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	270,000,000.00	270,000,000.00	425,000,000.00		
6 01 01 2.06 10	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	6 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD						Jumlah dokumen penatausahaan ansp dinamis pada SKPD	12 dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Ansp Dinamis pada SKPD	12 dokumen	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		
<b>6 01 1 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6 01 1 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>556,420,000.00</b>	<b>556,420,000.00</b>	<b>554,420,000.00</b>		
6 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		
6 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	67,200,000.00	67,200,000.00	67,200,000.00		
6 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	6 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah laporan penyediaan jasa perawatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00		
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	480,220,000.00	480,220,000.00	480,220,000.00		
<b>6 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6 01 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>		APBD
6 1 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 1 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,000,000.00	10,000,000.00	-		APBD
<b>6 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>19,150,000.00</b>	<b>19,150,000.00</b>	<b>12,500,000.00</b>		
6 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	10,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00		
6 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	15 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	9,150,000.00	9,150,000.00	5,000,000.00		
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>6 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP</b> <b>Opini BPK</b> <b>Maturnias SPIP</b> <b>Indeks SPBE</b> <b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>72.14</b> <b>WTP</b> <b>Berkembang</b> <b>Baik</b> <b>65.07</b>		<b>Indeks manajemen resiko</b> <b>Indeks efektivitas pengendalian korupsi</b>	<b>1.8</b> <b>1.2</b>	<b>Indeks manajemen resiko</b> <b>Indeks efektivitas pengendalian korupsi</b>	<b>1.8</b> <b>1.2</b>	<b>1,323,547,000.00</b>	<b>1,323,547,000.00</b>	<b>2,705,224,000.00</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polihukam dan transformasi pelayanan publik</b>	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6 01 02 2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang sesuai rekomendasi</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal yang sesuai rekomendasi</b>	<b>100%</b>	<b>1,240,875,000.00</b>	<b>1,240,875,000.00</b>	<b>2,565,350,000.00</b>		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 01 02 2.01 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	31 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	31 Laporan	115,300,000.00	115,300,000.00	223,400,000.00		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 01 02 2.01 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	18 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	18 Laporan	180,200,000.00	180,200,000.00	367,260,000.00		
	Revisi Laporan Kinerja	6 01 02 2.01 0003	Revisi Laporan Kinerja						Jumlah laporan hasil Revisi laporan kinerja	46 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	46 Laporan	276,625,000.00	276,625,000.00	578,150,000.00		
	Revisi Laporan Keuangan	6 01 02 2.01 0004	Revisi Laporan Keuangan						Jumlah laporan hasil Revisi laporan keuangan	1 laporan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	1 Laporan	59,350,000.00	59,350,000.00	113,750,000.00		
	Pengawasan Desa	6 01 02 2.01 0005	Pengawasan Desa						Jumlah laporan hasil pengawasan desa	24 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24 Laporan	251,575,000.00	251,575,000.00	555,890,000.00		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6 01 02 2.01 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100 Dokumen	357,825,000.00	357,825,000.00	726,900,000.00		
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6 01 02 2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						<b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	<b>100%</b>	<b>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</b>	<b>100%</b>	<b>82,672,000.00</b>	<b>82,672,000.00</b>	<b>139,874,000.00</b>		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6 01 02 2.02 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah						Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditransaksi	1 laporan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditransaksi	1 laporan	18,622,000.00	18,622,000.00	1,874,000.00		
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 01 02 2.02 0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	6 laporan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6 Laporan	64,050,000.00	64,050,000.00	138,000,000.00		
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>6 01 03</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP</b> <b>Opini BPK</b> <b>Maturnias SPIP</b> <b>Indeks SPBE</b> <b>Indeks Profesionalitas ASN</b>	<b>72.14</b> <b>WTP</b> <b>Berkembang</b> <b>Baik</b> <b>65.07</b>		<b>Level kapabilitas APIP</b>	<b>2+</b>	<b>Level kapabilitas APIP</b>	<b>2+</b>	<b>278,342,000.00</b>	<b>278,342,000.00</b>	<b>459,050,000.00</b>	<b>Memperkuat stabilitas Polihukam dan transformasi pelayanan publik</b>	
	Pendampingan dan Asistensi	6 01 03 2.02	Pendampingan dan Asistensi						<b>Level IACM</b>	<b>2+</b>	<b>Level IACM</b>	<b>2+</b>	<b>278,342,000.00</b>	<b>278,342,000.00</b>	<b>459,050,000.00</b>		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6 01 03 2.02 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	31 perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	31 perangkat daerah	13,725,000.00	13,725,000.00	23,450,000.00		
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6 01 03 2.02 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	31 perangkat daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	31 perangkat daerah	12,250,000.00	12,250,000.00	29,900,000.00		
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 01 03 2.02 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						Jumlah kegiatan koordinasi monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	1 kegiatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 kegiatan	238,642,000.00	238,642,000.00	375,800,000.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	2	perangkat daerah		13,725,000.00	13,725,000.00	29,900,000.00		
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>																	
													<b>30,992,560,800.00</b>	<b>30,992,560,800.00</b>	<b>36,472,700,600.00</b>		
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>KECAMATAN MUNTOK</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>KECAMATAN MUNTOK</b> <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel			Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkeamban Baik 65.07		11,554,570,000.00	11,554,570,000.00	12,460,500,000.00		
													6,966,490,000.00	6,966,490,000.00	7,719,750,000.00		Pemperkuat stabilitas Poltuhkankam dan transformasi pelayanan publik
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b> <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				Tertelaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00		
													300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b> <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				Tertelaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen		4,665,900,000.00	4,665,900,000.00	4,760,000,000.00		
													4,665,000,000.00	4,665,000,000.00	4,750,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b> <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	Persen		300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
													300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
													900,000.00	900,000.00	21,700,000.00		
													-	-	12,500,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	1,800,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	5,400,000.00		APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b> <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				Tertelaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Persen		266,300,000.00	266,300,000.00	127,307,000.00		
													2,000,000.00	2,000,000.00	2,880,000.00		APBD
													70,000,000.00	70,000,000.00	3,000,000.00		
													6,000,000.00	6,000,000.00	4,426,000.00		APBD
													50,000,000.00	50,000,000.00	25,072,500.00		APBD
													15,000,000.00	15,000,000.00	19,338,500.00		APBD
													3,000,000.00	3,000,000.00	2,896,000.00		APBD
													40,000,000.00	40,000,000.00	29,994,000.00		APBD
													80,000,000.00	80,000,000.00	37,700,000.00		APBD
													300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
<b>8</b>	<b>01</b>	<b>12</b>	<b>07</b> <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				Tertelaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		-	-	300,939,000.00		APBD
													-	-	20,939,000.00		APBD
													-	-	20,000,000.00		APBD
													-	-	10,000,000.00		APBD
													-	-	200,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur dan Target Lama	Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokoh Ukur	Target					
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			25,000,000.00		
7 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit			25,000,000.00		APBD
<b>7 01 12.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7 01 12.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>1,972,340,000.00</b>	<b>1,972,340,000.00</b>	<b>2,420,235,000.00</b>		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	275,000.00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	88,000,000.00	88,000,000.00	68,200,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	7,300,000.00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1,877,340,000.00	1,877,340,000.00	2,344,460,000.00		APBD
<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>7 01 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>59,250,000.00</b>	<b>59,250,000.00</b>	<b>57,569,000.00</b>		
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	Unit	Unit	Unit			30,300,000.00		APBD
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	6 Unit	34,250,000.00	34,250,000.00	12,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	3 Unit	15,000,000.00	15,000,000.00	7,500,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	23 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	23 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	5,269,000.00		APBD
<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>7 01 02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	7,825,000.00	7,825,000.00	175,000,000.00	Memperkuat stabilitas wilayah untuk mengungkap potensi dan transformasi	
<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>7 01 02 2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	<b>200 orang</b>	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	<b>200 orang</b>	<b>7,225,000.00</b>	<b>7,225,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	7,225,000.00	7,225,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2.01 0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen			5,000,000.00		APBD
<b>7 01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>7 01 02 2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	<b>8 urusan</b>	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	<b>8 urusan</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>95,000,000.00</b>		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	45,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	50,000,000.00		APBD
<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>7 01 03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	<b>100%</b>	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	<b>100%</b>	<b>21,850,000.00</b>	<b>21,850,000.00</b>	<b>62,000,000.00</b>	Mengembangkan wilayah untuk mengungkap kesenjangan dan menjamin	
<b>7 01 03 2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>7 01 03 2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>52 orang</b>	Jumlah peserta yang mengikuti koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	<b>52 orang</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>15,300,000.00</b>	<b>37,000,000.00</b>		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	15,300,000.00	15,300,000.00	37,000,000.00		APBD
<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>7 01 03 2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	<b>100%</b>	Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	<b>100%</b>	<b>6,550,000.00</b>	<b>6,550,000.00</b>	<b>25,000,000.00</b>		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	6,550,000.00	6,550,000.00	25,000,000.00		APBD
<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7 01 04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Tertakutnya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka	<b>100%</b>	Tertakutnya kordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka	<b>100%</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>	Revolusi mental dan pengubahan kebudayaan	
<b>7 01 04 2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7 01 04 2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>						Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>25 orang</b>	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	<b>25 orang</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>1,625,000.00</b>	<b>17,500,000.00</b>		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1,325,000.00	1,325,000.00	7,500,000.00		APBD
<b>7 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>7 01 05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	<b>100%</b>	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	<b>100%</b>	<b>47,300,000.00</b>	<b>47,300,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>	Revolusi mental dan pengubahan kebudayaan	
<b>7 01 05 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>7 01 05 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan	<b>7 urusan</b>	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang diselesaikan	<b>7 urusan</b>	<b>47,300,000.00</b>	<b>47,300,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan	128 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Ketuhanan Negara Kesatuan	128 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00	65,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	7,300,000.00	7,300,000.00	25,000,000.00		APBD
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06	100%	100%	4,920,000.00	4,920,000.00	90,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik		
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan	40 orang	Jumlah peserta fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan kelurahan	40 orang	4,920,000.00	4,920,000.00	90,000,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 01 06 2.01 0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	3,380,000.00	3,380,000.00	26,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01 0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1,220,000.00	1,220,000.00	27,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 01 06 2.01 0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	320,000.00	320,000.00	27,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7 01 06 2.01	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				10,000,000.00		
	<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TANJUNGPINANG</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN TANJUNGPINANG</b>										906,700,000.00	906,700,000.00	860,850,000.00		
7 01 01	<b>PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PRGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPIE Bak Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang 65.07	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	106,700,000.00	106,700,000.00	103,250,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Tertakannya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Tertakannya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	70,500,000.00	70,500,000.00	67,250,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	-	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00		APBD
7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	28,200,000.00	28,200,000.00	29,000,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,200,000.00	25,200,000.00	25,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						Terteliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terteliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	-	-	1,500,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%	100%	persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat perencanaan Kecamatan	100%	Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat perencanaan Kecamatan	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2,755,000.00	2,755,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	-	-	318,984,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	797,245,000.00	797,245,000.00	428,616,000.00		APBD
	<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SINGAI DAENG</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN SINGAI DAENG</b>										900,110,000.00	900,110,000.00	860,850,000.00		
7 01 01	<b>PRGRAM PENUNJANG URUSAN</b>	7 01 01	<b>PRGRAM PENUNJANG URUSAN</b>			Meningkatkan	Meningkatnya tata kelola	Nilai SAKIP	72.14	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan	100 Persen	100,110,000.00	100,110,000.00	103,250,000.00	Memperkuat	



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
	<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	WTP Berkembang Baik 65,07		penunjang Pemerintahan Daerah	penunjang Pemerintahan Daerah					stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik		
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Paket		Paket		-	-	3.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00		APBD
7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	25.000.000,00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		APBD
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>8.610.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diwajibkan/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diwajibkan/Direhabilitasi	1 Unit	610.000,00	610.000,00	1.500.000,00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diwajibkan/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diwajibkan/Direhabilitasi	1 Unit	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2,43%		<b>Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>757.600.000,00</b>	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						<b>Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>757.600.000,00</b>		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2.755.000,00	2.755.000,00	10.000.000,00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit	-	-	318.984.000,00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	797.245.000,00	797.245.000,00	428.616.000,00		APBD
	<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SINGAL BARI</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN SINGAL BARI</b>										<b>907.330.000,00</b>	<b>907.330.000,00</b>	<b>860.850.000,00</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SANIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72,14 WTP Berkembang Baik 65,07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	107,330.000,00	107,330.000,00	103,250.000,00	Mempertkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>70.500.000,00</b>	<b>67.250.000,00</b>		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000,00	1.000.000,00	1.250.000,00		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Paket		Paket		-	-	3.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00		APBD
7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>29.000.000,00</b>		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00		APBD
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>9.830.000,00</b>	<b>9.830.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00		
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1,830,000.00	1,830,000.00	1,500,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodasi pada saat Musyabano Kecamatan	100%	Persentase usulan Kelurahan yang terakomodasi pada saat Musyabano Kecamatan	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2,685,000.00	2,685,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rembangunan di Kelurahan	4 Unit	Rembangunan di Kelurahan	4 Unit	227,250,000.00	227,250,000.00	318,984,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	570,065,000.00	570,065,000.00	428,616,000.00		APBD
	<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MENJELANG</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MENJELANG</b>										889,710,000.00	889,710,000.00	859,850,000.00		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	89,710,000.00	89,710,000.00	102,250,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	70,500,000.00	70,500,000.00	64,250,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1Paket	1,000,000.00	1,000,000.00	1,250,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000.00		APBD
7 01 12.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 12.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terdapatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	18,600,000.00	18,600,000.00	29,000,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15,600,000.00	15,600,000.00	25,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	610,000.00	610,000.00	9,000,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajanan	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jajanan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	Unit			3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	610,000.00	610,000.00	1,500,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	7 01 03 2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodasi pada saat Musyabano Kecamatan	100%	Persentase usulan Kelurahan yang terakomodasi pada saat Musyabano Kecamatan	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1,470,000.00	1,470,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Rembangunan di Kelurahan	9 Unit	Rembangunan di Kelurahan	9 Unit	329,100,000.00	329,100,000.00	318,984,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	469,430,000.00	469,430,000.00	428,616,000.00		APBD
	<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN BERANGAN</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN BERANGAN</b>										900,710,000.00	900,710,000.00	863,850,000.00		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	100,710,000.00	100,710,000.00	106,250,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	70,500,000.00	70,500,000.00	67,250,000.00		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00	1,250,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							Paket		Paket	-	-	3,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	25,000,000,000.00		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 1 2.08 0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	24,600,000.00	24,600,000.00	29,000,000.00		
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21,600,000.00	21,600,000.00	25,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 01 2.09 0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	5,610,000.00	5,610,000.00	10,000,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatan	Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatan	Unit			3,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 03	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	610,000.00	610,000.00	1,500,000,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Unit			1,000,000,000.00		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurumnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menajamkan pelayanan	
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	Persentase usulan Kelurahan yang terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan	100%	800,000,000.00	800,000,000.00	757,600,000.00		
7 01 03 2.02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 01 03 2.02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	1,470,000.00	1,470,000.00	10,000,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2.02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 an	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	200,000,000.00	200,000,000.00	318,984,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 01 03 2.02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	598,530,000.00	598,530,000.00	428,616,000,000.00		APBD
7 01 01	KECAMATAN SIMPANGTERITIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7 01 01	KECAMATAN SIMPANGTERITIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	2,930,465,000.00 2,836,190,000.00	2,930,465,000.00 2,836,190,000.00	4,409,134,000.00 4,088,634,000.00	Mempertukar stabilitas Poltuhkancam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	8,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,000,900,000.00	2,000,900,000.00	3,210,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17Orang/bulan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3,200,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		APBD
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	900,000,000	900,000,000	22,000,000,000		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
7 01 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0003	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	300,000,000	300,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0003	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	300,000,000	300,000,000	15,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	216,300,000,000	216,300,000,000	210,000,000,000		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	20,000,000,000	20,000,000,000			
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	6,000,000,000	6,000,000,000	3,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000,000	50,000,000,000	35,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000	15,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	4,500,000,000		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000,000	40,000,000,000	35,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80,000,000,000	80,000,000,000	110,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,500,000,000		APBD
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	551,040,000,000	551,040,000,000	554,540,000,000		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25,200,000,000	25,200,000,000	25,200,000,000		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	518,840,000,000	518,840,000,000	518,840,000,000		APBD
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	65,250,000,000	65,250,000,000	60,094,000,000		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jabatan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	35,250,000,000	35,250,000,000	42,594,000,000		APBD
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	4 Unit	20,000,000,000	20,000,000,000	7,500,000,000		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	5 Unit	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	10 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirababilisasi	10 Unit	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	100%	8,675,000,000	8,675,000,000	44,000,000,000	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi manajemen publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	8,075,000,000	8,075,000,000	25,000,000,000		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,075,000,000	8,075,000,000	25,000,000,000		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	-	-	10,000,000,000		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	-	10,000,000,000		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	600,000,000	600,000,000	9,000,000,000		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangkang Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	16,825,000,000	16,825,000,000	80,000,000,000	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 Orang	16,825,000.00	16,825,000.00	80,000,000.00		
7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16,825,000.00	16,825,000.00	80,000,000.00		APBD
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM</b>	7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, dan	100%	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, dan	100%	3,825,000.00	3,825,000.00	16,500,000.00		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 Orang	3,825,000.00	3,825,000.00	16,500,000.00		
7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	11,500,000.00		APBD
7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3,525,000.00	3,525,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMMUM</b>	7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	49,000,000.00	49,000,000.00	90,000,000.00		Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	7 Urusan	Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	7 Urusan	49,000,000.00	49,000,000.00	90,000,000.00		
7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00	60,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan Pembinaan Yang Dib berikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	100%	Cakupan Pembinaan Yang Dib berikan Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	100%	15,950,000.00	15,950,000.00	90,000,000.00		Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 Orang	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 Orang	15,950,000.00	15,950,000.00	90,000,000.00		
7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10,950,000.00	10,950,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,950,000.00	3,950,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1,050,000.00	1,050,000.00	15,000,000.00		APBD
<b>KECAMATAN JERIB</b>																	
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Mutu SPK Indeks SPIK Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	4,147,520,800.00 3,815,620,800.00	4,147,520,800.00 3,815,620,800.00	4,116,746,600.00 3,688,415,800.00		Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	28,000,000.00		
7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2,998,900,000.00	2,998,900,000.00	2,610,000,000.00		
7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2,998,000,000.00	2,998,000,000.00	2,600,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.	100 Persen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7 01 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		
7 01 01 2.04 04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	7 01 01 2.04 0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00	APBD	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.	100 Persen	900,000.00	900,000.00	24,000,000.00		
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.05 03	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	300,000.00	300,000.00	15,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah.	100 Persen	226,300,000.00	226,300,000.00	210,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20,000,000.00	20,000,000.00			
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90,000,000.00	90,000,000.00	110,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00	APBD	
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	12 bulan	516,920,000.00	516,920,000.00	754,745,800.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29,100,000.00	29,100,000.00	29,100,000.00	APBD	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	30,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	480,820,000.00	480,820,000.00	693,645,800.00	APBD	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	12 bulan	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	12 bulan	70,500,000.00	70,500,000.00	52,670,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	11 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	11 Unit	35,500,000.00	35,500,000.00	2,300,000.00	APBD	
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	25,000,000.00	25,000,000.00	35,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	5 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	10,370,000.00	APBD	
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	2 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	APBD	
7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7 01 02	PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	248,720,800.00	248,720,800.00	250,595,800.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95 orang	8,075,000.00	8,075,000.00	11,550,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,075,000.00	8,075,000.00	11,550,000.00	APBD	
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	240,045,800.00	240,045,800.00	230,045,800.00		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 02 2.02 0002	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	240,045,800.00	240,045,800.00	230,045,800.00	APBD	
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	600,000.00	600,000.00	9,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00	APBD	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00	APBD	

Kode	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Memurninya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase Desa yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	Persentase Desa yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat	100%	16,825,000.00	16,825,000.00	20,000,000.00	Meningkatkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan mengajut	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	200 orang	16,825,000.00	16,825,000.00	20,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 03 2.01 0303	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16,825,000.00	16,825,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UHUM	7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UHUM	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak	100%	Terlaksananya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Pihak	100%	3,825,000.00	3,825,000.00	23,520,000.00	Revolusi mental dan pembangunan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80 orang	3,825,000.00	3,825,000.00	23,520,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3,525,000.00	3,525,000.00	13,520,000.00		APBD
7 01 05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UHUM	7 01 05	PROGRAM PENYELANGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UHUM	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	49,000,000.00	49,000,000.00	93,820,000.00	Revolusi mental dan pembangunan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselesaikan	7 Urusan	Jumlah urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah yang diselesaikan	7 Urusan	49,000,000.00	49,000,000.00	93,820,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan	100 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00	75,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 02	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 01 05 2.01 0002	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	18,820,000.00		APBD
7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas Layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	13,530,000.00	13,530,000.00	40,395,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173 orang	Jumlah peserta Fasilitas Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	173 orang	13,530,000.00	13,530,000.00	40,395,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 01 06 2.01 0001	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	9,295,000.00	9,295,000.00	17,560,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01 0002	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,355,000.00	3,355,000.00	17,560,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 01 06 2.01 0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	880,000.00	880,000.00	5,275,000.00		APBD
<b>KECAMATAN PARITIGA</b>																	
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK WTP Mutu SPSP Indeks SPIE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 Berkembang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,418,855,000.00	3,418,855,000.00	4,967,920,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 Persen	2,000,900,000.00	2,000,900,000.00	2,210,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,200,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 01 2.02 06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 01 01 2.02 0006	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000,000	300,000,000	4,000,000,000		APBD
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>6,000,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000,000	300,000,000	6,000,000,000		APBD
7 01 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	7 01 01 2.04 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	<b>100 Persen</b>	<b>900,000,000</b>	<b>900,000,000</b>	<b>18,000,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	300,000,000	300,000,000	8,000,000,000		APBD
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	17 Orang	300,000,000	300,000,000	8,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>260,700,000,000</b>	<b>260,700,000,000</b>	<b>312,000,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000,000	2,000,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,000,000,000	20,000,000,000	15,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000,000	6,000,000,000	15,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000,000	50,000,000,000	55,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaian yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000,000	15,000,000,000	20,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000,000	3,000,000,000	5,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000,000	40,000,000,000	45,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	124,400,000,000	124,400,000,000	150,000,000,000		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000,000	300,000,000	2,000,000,000		APBD
8 01 1 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	8 01 1 2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						<b>Tertindakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000,000,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	-	40,000,000,000		APBD
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Mebel	Unit	Tersedianya Mebel	Unit	-	-	20,000,000,000		APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	-	-	100,000,000,000		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jenis Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	Jenis Unit aset tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	200,000,000,000		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Jumlah Unit Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	550,000,000,000		
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	60,000,000,000		APBD
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	-	-	30,000,000,000		
7 01 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 1 2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tertindakannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>593,480,000,000</b>	<b>593,480,000,000</b>	<b>618,920,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35,500,000,000	35,500,000,000	31,500,000,000		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	550,980,000,000	550,980,000,000	575,420,000,000		APBD
7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tertindakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>Tertindakannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>73,000,000,000</b>	<b>73,000,000,000</b>	<b>116,000,000,000</b>		APBD
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	10 Unit	35,000,000,000	35,000,000,000	45,000,000,000		APBD
	Pemeliharaan Mebel		Pemeliharaan Mebel						Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	-	-	6,000,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Tertindakannya Pemeliharaan Mebel	Unit	Tertindakannya Pemeliharaan Mebel	Unit	-	-	10,000,000,000		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	5,000,000,000		
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	28,000,000,000	28,000,000,000	30,000,000,000		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangkai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	5,000,000,000	5,000,000,000	10,000,000,000		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur dan Target Lama	Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokoh Ukur	Target					
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	405,825,000.00	405,825,000.00	434,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	7 01 02 2.01	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	125 orang	8,075,000.00	8,075,000.00	28,000,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 laporan	8,075,000.00	8,075,000.00	15,000,000.00		APBD
									Jumlah Pengkajian Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	Jumlah Pengkajian Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen			13,000,000.00		
7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	7 01 02 2.02	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>						Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	397,150,000.00	397,150,000.00	400,000,000.00		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	397,150,000.00	397,150,000.00	400,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	7 01 02 2.04	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ( Kependudukan, Perzinan, Rastambaan)	100 Persen	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat ( Kependudukan, Perzinan, Rastambaan)	100 Persen	600,000.00	600,000.00	6,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perzinan	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perzinan						Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perzinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perzinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 laporan	300,000.00	300,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunny Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	16,825,000.00	16,825,000.00	55,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	7 01 03 2.01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1 Laporan	16,825,000.00	16,825,000.00	20,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 laporan	16,825,000.00	16,825,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	7 01 03 2.03	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Bina	0 lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Di Bina	0 lembaga	-	-	35,000,000.00		
7 01 03 2.03 01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	7 01 03 2.03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	0 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	35,000,000.00		APBD
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Tertakutnya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	100%	Tertakutnya Koordinasi dalam Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum dengan Pihak Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat	100%	3,825,000.00	3,825,000.00	30,000,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum</b>	7 01 04 2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum</b>						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	180 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	180 Orang	3,825,000.00	3,825,000.00	30,000,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	300,000.00	300,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 laporan	3,525,000.00	3,525,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	49,000,000.00	49,000,000.00	105,000,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	7 01 05 2.01	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>						Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	7 Urusan	Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	7 Urusan	49,000,000.00	49,000,000.00	105,000,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 orang	40,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	25,000,000.00		APBD
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan	100%	12,300,000.00	12,300,000.00	35,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	7 01 06 2.01	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>						Jumlah peserta Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120 Orang	Jumlah peserta Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	120 Orang	12,300,000.00	12,300,000.00	35,000,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	8,450,000.00	8,450,000.00	15,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,050,000.00	3,050,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	800,000.00	800,000.00	10,000,000.00		APBD
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	-	-	5,000,000.00		



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokolok Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokolok Ukur	Target	Tokolok Ukur	Target						
7 01 01	<b>KECAMATAN KELAPA</b>		<b>KECAMATAN KELAPA</b>															
7 01 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 65.07			Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	5.560.095.000,00	5.560.095.000,00	6.069.000.000,00	4.732.420.000,00	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik
7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1.500,000,00	1.500,000,00	32,760,000,00		
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000,00	300,000,00	8,760,000,00		APBD
7 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000,00	300,000,00	4,000,000,00		APBD
7 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000,00	300,000,00	4,000,000,00		APBD
7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000,00	300,000,00	8,000,000,00		APBD
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000,00	300,000,00	8,000,000,00		APBD
7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	3.145,900,000,00	3.145,900,000,00	3,862,500,000,00		APBD
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan	3,145,000,000,00	3,145,000,000,00	3,850,000,000,00		APBD
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000,00	300,000,00	2,500,000,00		APBD
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000,00	300,000,00	5,000,000,00		APBD
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000,00	300,000,00	5,000,000,00		APBD
7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,00	300,000,00	6,000,000,00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000,00	300,000,00	6,000,000,00		APBD
7 01 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 Persen	300,000,00	300,000,00	2,500,000,00		
7 01 01 2.04 04	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	7 01 01 2.04 0004	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	300,000,00	300,000,00	2,500,000,00		APBD
7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	900,000,00	900,000,00	5,000,000,00		
7 01 01 2.05 03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2.05 0003	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000,00	300,000,00	3,000,000,00		APBD
7 11 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 11 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	300,000,00	300,000,00	1,000,000,00		APBD
7 11 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 11 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang	300,000,00	300,000,00	1,000,000,00		APBD
7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	7 01 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	226,300,000,00	226,300,000,00	196,580,000,00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000,00	2,000,000,00	3,000,000,00		APBD
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	20,000,000,00	20,000,000,00			
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000,00	6,000,000,00	1,000,000,00		APBD
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000,00	50,000,000,00	100,000,000,00		APBD
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000,00	15,000,000,00	10,000,000,00		APBD
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000,00	3,000,000,00	1,700,000,00		APBD
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000,00	40,000,000,00	15,880,000,00		APBD
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	90,000,000,00	90,000,000,00	60,000,000,00		APBD
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000,00	300,000,00	5,000,000,00		APBD
7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	643,880,000,00	643,880,000,00	611,080,000,00		APBD
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000,00	2,000,000,00	2,000,000,00		APBD
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	62,400,000,00	62,400,000,00	30,000,000,00		APBD
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000,00	5,000,000,00	7,000,000,00		APBD
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	574,480,000,00	574,480,000,00	572,080,000,00		APBD

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	72,880,000.00	72,880,000.00	16,000,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Swadana	7 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Swadana					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan-Beriswawana	13 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan-Beriswawana	13 Unit	35,000,000.00	35,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 11 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	5 Unit	28,000,000.00	28,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	8 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	8 Unit	4,880,000.00	4,880,000.00	5,000,000.00		APBD
7 11 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Rehabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan	100%	479,315,000.00	479,315,000.00	160,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 Orang	8,075,000.00	8,075,000.00	10,000,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,075,000.00	8,075,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Urusan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Urusan	467,940,000.00	467,940,000.00	140,000,000.00		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	467,940,000.00	467,940,000.00	140,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 urusan	3,300,000.00	3,300,000.00	10,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurumnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	Persentase desa yang berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat	100%	18,935,000.00	18,935,000.00	33,000,000.00	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Orang	16,825,000.00	16,825,000.00	30,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	16,825,000.00	16,825,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 01 03 2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musyabarah Kecamatan	100%	Persentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musyabarah Kecamatan	100%	2,110,000.00	2,110,000.00	3,000,000.00		
7 01 03 2.02 04	Evaluasi Kelurahan	7 01 03 2.02 0004	Evaluasi Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	2,110,000.00	2,110,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesetiaan sosial masyarakat	Indeks Kesetiaan Sosial	Baik		Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, komas, dan desa	100%	Terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan pihak forkopimka, komas, dan desa	100%	3,825,000.00	3,825,000.00	16,500,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	110 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	110 Orang	3,825,000.00	3,825,000.00	16,500,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3,525,000.00	3,525,000.00	6,500,000.00		APBD
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesetiaan sosial masyarakat	Indeks Kesetiaan Sosial	Baik		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	49,000,000.00	49,000,000.00	80,000,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah						Jumlah urusan pemerintah umum sesuai pengawasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	Jumlah urusan pemerintah umum sesuai pengawasan kepala daerah yang diselenggarakan	7 Urusan	49,000,000.00	49,000,000.00	80,000,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembiinan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 01 05 2.01 0001	Pembiinan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiinan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembiinan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00	66,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	14,000,000.00		APBD
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		Cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	Cakupan pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan	100%	22,950,000.00	22,950,000.00	73,000,000.00	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 orang	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	130 orang	22,950,000.00	22,950,000.00	73,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
7 01 06 2 01 01	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 01 06 2 01 0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disilatisasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disilatisasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	10,950,000.00	10,950,000.00	23,000,000.00		APBD
7 01 06 2 01 02	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 01 06 2 01 0002	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disilatisasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disilatisasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	3,950,000.00	3,950,000.00	32,000,000.00		APBD
7 01 06 2 01 03	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 01 06 2 01 0003	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Disilatisasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Disilatisasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	1,050,000.00	1,050,000.00	18,000,000.00		APBD
7 01 06 2 01 06	Facilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	7 01 06 2 01 0004	Facilitasi Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilhan Kepala Desa	1 Dokumen	7,000,000.00	7,000,000.00	-		APBD
	<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA</b>		<b>Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.05.0001 KELURAHAN KELAPA</b>										<b>894,110,000.00</b>	<b>894,110,000.00</b>	<b>974,080,000.00</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Mutualitas SPIP Indeks SPIE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkebang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	94,110,000.00	94,110,000.00	177,080,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	70,500,000.00	70,500,000.00	148,080,000.00		
7 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2 06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2 06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,000,000.00	3,000,000.00	80,000.00		APBD
7 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2 06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	90,000,000.00		APBD
7 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 01 01 2 06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	5,000,000.00		APBD
7 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 01 01 2 06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 01 2 06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2 06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2 06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00		APBD
7 01 1 2 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 1 2 08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>15,000,000.00</b>	<b>23,000,000.00</b>		APBD
7 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2 08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12,000,000.00	12,000,000.00	20,000,000.00		APBD
7 01 01 2 08 03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	7 01 01 2 08 0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 01 2 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	7 01 01 2 09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>8,610,000.00</b>	<b>8,610,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>		
7 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2 09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelemba/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelemba/Rehabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelemba/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelemba/Rehabilitasi	1 Unit	610,000.00	610,000.00	3,000,000.00		APBD
7 11 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 11 01 2 09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelemba/Rehabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelemba/Rehabilitasi	1 Unit	3,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		Optimalisasi Pelayanan Dasar	Memurninya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>797,000,000.00</b>	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan		
7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						<b>Perentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Perentase Usulan Kelurahan Yang Terakomodir pada saat Musrenbang Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>797,000,000.00</b>		
7 01 03 2 02 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	2,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00		APBD
7 01 03 2 02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	125,000,000.00	125,000,000.00	360,000,000.00		APBD
7 01 03 2 02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	673,000,000.00	673,000,000.00	434,000,000.00		APBD
	<b>KECAMATAN TEMPILANG</b>		<b>KECAMATAN TEMPILANG</b>										<b>3,381,055,000.00</b>	<b>3,381,055,000.00</b>	<b>4,449,400,000.00</b>		
7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	7 01 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Mutualitas SPIP Indeks SPIE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkebang Baik 65.07		Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,216,080,000.00	3,216,080,000.00	4,018,900,000.00	Memperkuat stabilitas Polihukhankam dan transformasi pelayanan publik	
7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	1,500,000.00	1,500,000.00	26,000,000.00		
7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 01 01 2 01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 01 01 2 01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 01 01 2 01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD
7 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 01 01 2 01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2 01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 01 01 2 01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Tolok Ukur dan Target Lama		Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur						Target
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	100 Persen	2,455,900,000.00	2,455,900,000.00	2,810,000,000.00		
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	2,455,000,000.00	2,455,000,000.00	2,800,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	7 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		
7 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	900,000.00	900,000.00	34,500,000.00		
7 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	7 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	-	-	12,500,000.00	APBD	
7 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00	APBD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00	APBD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 orang	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	236,300,000.00	236,300,000.00	254,500,000.00		
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2,000,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20,000,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	5,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	5,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	7 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	40,000,000.00	40,000,000.00	35,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100,000,000.00	100,000,000.00	150,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00	APBD	
8 01 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	8 01 1 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	100 Persen	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintah Daerah	100 Persen	-	-	355,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 01 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	-	-	170,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	7 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	-	-	25,000,000.00	APBD	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	15,000,000.00		
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Pengadaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	60,000,000.00		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	50,000,000.00		
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	20,000,000.00	APBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	-	-	15,000,000.00		
7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	7 01 1 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhinya Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	100 Persen	460,100,000.00	460,100,000.00	458,400,000.00		
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	300,000.00	APBD	
7 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33,600,000.00	33,600,000.00	33,600,000.00	APBD	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	APBD	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	419,500,000.00	419,500,000.00	419,500,000.00	APBD	
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah						Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	12 bulan	61,080,000.00	61,080,000.00	74,500,000.00		
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 01 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Kab. Bangka Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	6 Unit	34,250,000.00	34,250,000.00	44,500,000.00	APBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	5,000,000.00		
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	-	5,000,000.00		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran	Tokol Ukur	Target					
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20,000,000.00	20,000,000.00	8,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1,830,000.00	1,830,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7 01 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00		APBD
7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	7 01 02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>84,255,000.00</b>	<b>84,255,000.00</b>	<b>130,000,000.00</b>	Memperkuat stabilitas Poltuhankam dan transformasi pelayanan publik.	
7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7 01 02 2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	150 orang	8,075,000.00	8,075,000.00	30,000,000.00		
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 01 02 2.01 0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	8,075,000.00	8,075,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7 01 02 2.02	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	Jumlah urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 urusan	75,580,000.00	75,580,000.00	60,000,000.00		
7 01 02 2.02 03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	7 01 02 2.02 0003	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	75,580,000.00	75,580,000.00	60,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8 Urusan	600,000.00	600,000.00	40,000,000.00		
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	7 01 02 2.04 0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan						Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terkait dengan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat terkait dengan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7 01 02 2.04 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	30,000,000.00		APBD
7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	7 01 03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka kemiskinan	2.43%		<b>Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>Persentase Desa Yang Berpartisipasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>16,825,000.00</b>	<b>16,825,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin	
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52 orang	16,825,000.00	16,825,000.00	80,000,000.00		
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7 01 03 2.01 0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 laporan	16,825,000.00	16,825,000.00	80,000,000.00		APBD
7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETRAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	7 01 04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETRAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		<b>Tertaksananya Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketramaman dan Kertertiban Umum dengan Pihak Terkait</b>	<b>100%</b>	<b>Tertaksananya Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketramaman dan Kertertiban Umum dengan Pihak Terkait</b>	<b>100%</b>	<b>3,825,000.00</b>	<b>3,825,000.00</b>	<b>16,500,000.00</b>	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum						Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	40 Orang	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum	40 Orang	3,825,000.00	3,825,000.00	16,500,000.00		
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7 01 04 2.01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 01 04 2.01 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3,525,000.00	3,525,000.00	6,500,000.00		APBD
7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	7 01 05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yang dilaksanakan oleh Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>124,000,000.00</b>	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	7 Urusan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	7 Urusan	49,000,000.00	49,000,000.00	124,000,000.00		
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	7 01 05 2.01 0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	40,000,000.00	40,000,000.00	100,000,000.00		APBD
7 01 05 2.01 08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 01 05 2.01 0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	9,000,000.00	9,000,000.00	24,000,000.00		APBD
7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	7 01 06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.06		<b>Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>Cakupan Pembinaan yang diberikan dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan</b>	<b>100%</b>	<b>11,070,000.00</b>	<b>11,070,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>	Memperkuat stabilitas Poltuhankam dan transformasi pelayanan publik.	
7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117 Orang	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	117 Orang	11,070,000.00	11,070,000.00	80,000,000.00		
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7 01 06 2.01 0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	7,605,000.00	7,605,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 01 06 2.01 0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2,745,000.00	2,745,000.00	35,000,000.00		APBD
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 01 06 2.01 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Kab. Bangk. Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	720,000.00	720,000.00	10,000,000.00		APBD
<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>													<b>42,635,909,850.00</b>	<b>42,635,909,850.00</b>	<b>43,723,462,935.00</b>		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan		Tokol Ukur dan Target Pemutakhiran							
									Tokol Ukur dan Target Lama	Tokol Ukur	Tokol Ukur	Target						
8 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8 01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										42,635,909,850.00	42,635,909,850.00	43,723,462,035.00			
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP Opini BPK Maturitas SPIP Indeks SPBE Indeks Profesionalitas ASN	72.14 WTP Berkembang Baik 63.07			Terpenuhi kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhi kebutuhan penunjang Pemerintahan Daerah	100 Persen	3,361,370,000.00	3,361,370,000.00	2,715,550,000.00	Memperkuat stabilitas Polikukantam dan transformasi pelayanan publik	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 persen	1,500,000.00	1,500,000.00	28,000,000.00			
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	300,000.00	300,000.00	10,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 01 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 01 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 01 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300,000.00	300,000.00	8,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	2,500,900,000.00	2,500,900,000.00	1,610,000,000.00			
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	1,600,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 01 01 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	2,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8 01 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 01 01 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00			
8 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 01 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	300,000.00	300,000.00	6,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	11,550,000.00	11,550,000.00	94,000,000.00			
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya	8 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelembagaannya						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelembagaannya	25 paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelembagaannya	25 paket	-	-	40,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.05 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 01 01 2.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	4,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8 01 01 2.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	3,750,000.00	3,750,000.00	12,500,000.00		APBD	
8 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 01 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	7,500,000.00	7,500,000.00	37,500,000.00		APBD	
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	438,300,000.00	438,300,000.00	547,000,000.00			
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	11,000,000.00	11,000,000.00	5,500,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8 01 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8,000,000.00	8,000,000.00	7,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	55,000,000.00	55,000,000.00	45,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengoperasian yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengoperasian yang Disediakan	12 Paket	35,000,000.00	35,000,000.00	30,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 01 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	8 01 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270,000,000.00	270,000,000.00	400,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 01 01 2.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	300,000.00	300,000.00	2,500,000.00		APBD	
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhi barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	Terpenuhi barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	9,000,000.00	9,000,000.00	-		APBD	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	2,000,000.00	2,000,000.00				
8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 01 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	7,000,000.00	7,000,000.00				
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	391,770,000.00	391,770,000.00	420,000,000.00			
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	24,000,000.00	24,000,000.00	48,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 01 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7,000,000.00	7,000,000.00	10,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	358,770,000.00	358,770,000.00	360,000,000.00		APBD	
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Terpenuhi barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	Terpenuhi barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	8,050,000.00	8,050,000.00	10,550,000.00			
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dineelaha/Dirababilasi	1 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dineelaha/Dirababilasi	1 Unit	5,000,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00		APBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
8 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8 01 01 2 09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Semua Kabupaten/kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Disubstitusikan	5 unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Disubstitusikan	5 unit	3,050,000,000	3,050,000,000	3,050,000,000		
8 01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANGASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	8 01 02	<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANGASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang ideologi	0 Kasus	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang ideologi	0 Kasus	1,653,200,000,000	1,653,200,000,000	2,567,400,000,000	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						Tertakutnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	Tertakutnya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 persen	1,653,200,000,000	1,653,200,000,000	2,567,400,000,000		
8 01 02 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 01 02 2 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Jumlah Dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	0 Dokumen	Jumlah Dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun	0 Dokumen	-	-	51,700,000,000		APBD
8 01 02 2 01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 01 02 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0 Dokumen	-	-	51,150,000,000		APBD
8 01 02 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 01 02 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	600 Orang	1,500,000,000,000	1,500,000,000,000	2,145,000,000,000		APBD
8 01 02 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 01 02 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	440 Orang	130,000,000,000	130,000,000,000	220,000,000,000		APBD
8 01 02 2 01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8 01 02 2 01 0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	33,550,000,000		APBD
	Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pngamatan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	8 01 02 2 01 0006	Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pngamatan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pngamatan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya Penghayatan dan Pngamatan Pancasila dalam semua aspek kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 keluarga	22,900,000,000	22,900,000,000	66,000,000,000		APBD
8 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA PARTAI POLITIK</b>	8 01 03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA PARTAI POLITIK</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Baik		Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	37,272,034,100,000	37,272,034,100,000	37,667,189,010,000	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8 01 03 2 01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	37,272,034,100,000	37,272,034,100,000	37,667,189,010,000		
8 01 03 2 01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 01 03 2 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0 Dokumen	Jumlah kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0 Dokumen	-	-	264,000,000,000		APBD
8 01 03 2 01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 01 03 2 01	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0 Dokumen	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	0 Dokumen	-	-	264,000,000,000		APBD
8 01 03 2 01 03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	8 01 03 2 01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2367 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2367 Orang	37,251,459,100,000	37,251,459,100,000	37,016,605,010,000		APBD
8 01 03 2 01 04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 01 03 2 01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	23 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	23 Orang	8,475,000,000	8,475,000,000	55,000,000,000		APBD



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kejadian/Subkegiatan				Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran
									Tokoh Ukur dan Target Lama		Tokoh Ukur dan Target Pemutakhiran						
									Tokoh Ukur	Target	Tokoh Ukur	Target					
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Desk Pilkada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Desk Pilkada, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwalian dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	12,100,000.00	12,100,000.00	67,584,000.00		APBD
8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	8 01 04	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Persentase ormas yang aktif	100%	Persentase ormas yang aktif	100%	54,700,000.00	54,700,000.00	126,500,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	1 Dokumen	54,700,000.00	54,700,000.00	126,500,000.00		
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	0 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	0 Dokumen	-	-	5,500,000.00		APBD
8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Jumlah Dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Dokumen	Jumlah Dokumen program kerja di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	0 Dokumen	-	-	5,500,000.00		APBD
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 2.01 0303	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 Orang	40,100,000.00	40,100,000.00	55,000,000.00		APBD
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 2.01 0404	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23 Orang	12,100,000.00	12,100,000.00	55,000,000.00		APBD
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8 01 04 2.01 0505	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	2,500,000.00	2,500,000.00	5,500,000.00		APBD
8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	8 01 05	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	0 Kasus	angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	0 Kasus	120,300,000.00	120,300,000.00	495,000,000.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 05 2.01	Kejadian Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8 01 05 2.01	Kejadian Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen	Tersedianya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 persen	120,300,000.00	120,300,000.00	495,000,000.00		
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah Dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	0 Dokumen	Jumlah Dokumen program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	0 Dokumen	-	-	22,000,000.00		APBD
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	0 Dokumen	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan yang disusun	0 Dokumen	-	-	22,000,000.00		APBD
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 2.01 0303	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	157 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	157 Orang	70,000,000.00	70,000,000.00	220,000,000.00		APBD
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 2.01 0404	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	57 Orang	50,000,000.00	50,000,000.00	165,000,000.00		APBD
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8 01 05 2.01 0505	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan	300,000.00	300,000.00	66,000,000.00		APBD
8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	8 01 06	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	Optimalisasi Pelayanan Dasar	Meningkatnya kesalahan sosial masyarakat	Indeks Kesalahan Sosial	Baik		Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100%	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	100%	174,305,750.00	174,305,750.00	254,673,025.00	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	
8 01 06 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 01 06 2.01	Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	174,305,750.00	174,305,750.00	254,673,025.00		
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Tersedianya Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Dokumen	Tersedianya Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Dokumen	-	-	27,500,000.00		APBD



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kode Pemutakhiran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Pemutakhiran	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Indikator	Target	Lokasi	Indikator Kinerja			Pagu Indikatif	Pagu Indikatif Pemutakhiran	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan Prioritas Pembangunan Nasional	Sumber Anggaran	
									Program/Kegiatan/Subkegiatan								
									Tolok Ukur dan Target Lama	Tolok Ukur dan Target Pemutakhiran							
Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target														
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 2.01							Tersedianya Dokumen Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	0 Dokumen				27.500.000,00		APBD	
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	183 Orang	12.363.750,00	12.363.750,00	13.600.215,00		APBD
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	25 Orang	17.325.000,00	17.325.000,00	19.057.500,00		APBD
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8 01 06 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	315.000,00	315.000,00	346.500,00		APBD
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8 01 06 2.01 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	144.302.000,00	144.302.000,00	166.668.810,00		APBD
<b>TOTAL</b>													<b>1.080.289.396.242,68</b>	<b>1.080.289.396.242,68</b>	<b>986.732.284.879,00</b>		



## BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diketahui dengan menetapkan capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penetapan indikator tersebut bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk mengevaluasi hasil kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai IKK dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Aspek tersebut dibagi menjadi beberapa fokus perbidang urusan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhitungan IKK dapat ditentukan dengan menggunakan formula yang disajikan pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penetapan Target IKK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah:

**Tabel 6.1** Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
<b>1.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>			
1.1	Persentase Penduduk di atas Garis Miskin	Persentase	97,57	Pemerintah Daerah
1.2	Persentase balita gizi buruk	Persentase	0,04	DINKES
1.3	Prevalensi balita gizi kurang	Persentase	3,16	DINKES
1.4	Cakupan Desa Siaga Aktif	Persentase	100	DINKES
1.5	Persentase PAD terhadap pendapatan	Persentase	9,39	DINDIKPORA
1.6	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan	Angka	88	DINDIKPORA
1.7	Penguatan cadangan pangan	Persentase	19,50	DISTANGAN
<b>2.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>			
2.1	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Persentase	45,49	Pemerintah Daerah
2.2	Rasio Ketergantungan	Persentase	49,37	Pemerintah Daerah
2.3	Produktivitas total daerah	Rupiah	131.600	Pemerintah Daerah
2.4	Rasio ekspor + impor terhadap PDRB	Persentase	32,67	Pemerintah Daerah
2.5	Rasio Gini	Indeks	0,210	Pemerintah Daerah
<b>3.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>			
<b>3.1</b>	<b>Layanan Urusan Wajib Dasar</b>			
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>			
1.1	APK PAUD	Angka	92,93	DINDIKPORA



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
1.2	APK SD/MI/Paket A	Angka	105,89	DINDIKPORA
1.2.1	APK SMP/MTs/Paket B	Angka	96,78	DINDIKPORA
1.2.2	APM SD/MI/Paket A	Angka	96,78	DINDIKPORA
1.3	APM SMP/MTs/Paket B	Angka	90,80	
1.3.1	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	Persentase	95,32	DINDIKPORA
1.3.2	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persentase	95,20	DINDIKPORA
1.4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Angka	0,13	DINDIKPORA
1.5	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Angka	0,92	DINDIKPORA
1.6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	91,31	DINDIKPORA
1.7	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase	100	DINDIKPORA
1.8	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	Persentase	71,25	DINDIKPORA
1.9	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	45	DINDIKPORA
<b>2. Kesehatan</b>				
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka	6,73	DINKES
2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Angka	7,69	DINKES
2.3	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka	3,09	DINKES
2.4	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Angka	48,49	DINKES
2.5	Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	1:76	DINKES
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,03	DINKES
2.7	Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	0,64	DINKES
2.8	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,67	DINKES
2.9	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase	100	DINKES
2.10	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	Persentase	100	DINKES
2.11	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase	100	DINKES



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
2.12	Pelayanan kesehatan balita	Persentase	100	DINKES
2.13	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase	100	DINKES
2.14	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	Persentase	100	DINKES
2.15	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase	100	DINKES
2.16	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase	100	DINKES
2.17	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentase	100	DINKES
2.18	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase	100	DINKES
2.19	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase	100	DINKES
2.20	Tingkat Kepuasan layanan puskesmas	Nilai	81	DINKES
2.21	Tingkat Kepuasan layanan rumah sakit	Nilai	79	DINKES
2.22	Persentase baduta Stunting	Persentase	8,5	DINKES
2.23	Persentase sediaan farmasi, alat kesehatan dan usaha makanan dan minuman yang memiliki izin	Persentase	85	DINKES
2.24	Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	100	DINKES
2.25	Tingkat pemenuhan kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar	Persentase	70	DINKES
2.26	Persentase desa/kelurahan yang ber-PHBS	Persentase	50	DINKES
<b>3.</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
3.1	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantab	Persentase	82,57	DPUPR
3.2	Persentase Penduduk Bersanitasi Layak	Persentase	107,09	DISPERKIMHUB
3.3	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persentase	88,68	DISPERKIMHUB
3.4	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persentase	88,66	DPUPR
3.5	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukannya	Persentase	100	DPUPR
3.6	Persentase jembatan dalam kondisi baik	Persentase	95,82	DPUPR
3.7	Persentase titik banjir yang dimitigasi	Persentase	58	DPUPR
3.8	Persentase bangunan gedung negara dan bangunan gedung cagar budaya yang	Persentase	87	DPUPR



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
	tertangani			
3.9	Persentase realisasi perencanaan bangunan dan lingkungan	Persentase	37,5	DPUPR
3.10	Peningkatan Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikasi	Persentase	18,12	DPUPR
3.11	Persentase sistem drainase dalam kondisi baik	Persentase	83,28	DPUPR
3.12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum jaringan perpipaan (SPAM)	Persentase	23,7	DPUPR
3.13	persentase sarana prasarana sistem air limbah domestik berkondisi layak	Persentase	4,72	DPUPR
3.14	Persentase ketersediaan sarana persampahan (TPA & TPST)	Persentase	42,86	DPUPR
3.15	Warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase	100	DPUPR
3.16	Warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persentase	100	DPUPR
<b>4.</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>			
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persentase	98,78	DISPERKIMHUB
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Persentase	0,014	DISPERKIMHUB
4.3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	Persentase	6,30	DISPERKIMHUB
4.4	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	Persentase	252	DISPERKIMHUB
4.5	Persentase rumah akibat bencana alam/ sosial yang tertangani	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.6	Persentase warga negara masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.7	Persentase rumah tidak layak huni diluar kawasan kumuh yang tertangani	Persentase	15,34	DISPERKIMHUB
4.8	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	Persentase	3,33	DISPERKIMHUB
4.9	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	Persentase	16,7	DISPERKIMHUB
4.10	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana	Persentase	100	DISPERKIMHUB
4.11	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase	100	DISPERKIMHUB
<b>5.</b>	<b>Sosial</b>			
5.1	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.2	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitas	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.3	persentase korban bencana yang tertangani	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.4	Persentase PSKS yang aktif	Persentase	100	DINSOSPEMDES



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
5.5	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.6	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.7	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.8	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase	100	DINSOSPEMDES
5.9	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase	100	DINSOSPEMDES
<b>3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar</b>				
<b>1. Tenaga Kerja</b>				
1.1	Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persentase	45	DPMNakertrans
1.2	Cakupan tenaga kerja terdaftar di bursa kerja yang ditempatkan	Persentase	36	DPMNakertrans
1.3	Cakupan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan	Persentase	100	DPMNakertrans
<b>2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>				
2.1	Proporsikursi yang diduduki perempuan di DPR	Persentase	24	DPPKBPPA
2.2	Persentase OPD yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan	Persentase	50	DPPKBPPA
2.2	Persentase ketersediaan informasi gender dan anak	Persentase	70	DPPKBPPA
2.3	Persentase Korban Kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	DPPKBPPA
2.4	Persentase peningkatan keluarga yang dilakukan KIE Kesetaraan Gender dan perlindungan anak	Persentase	80	DPPKBPPA
2.5	Persentase peningkatan kelembagaan pemenuhan hak anak	Persentase	80	DPPKBPPA
2.6	Persentase Korban Kekerasan terhadap anak yang mendapat layanan komprehensif	Persentase	100	DPPKBPPA
<b>3 Pangan</b>				
3.1	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase	12,76	DISTANGAN
3.2	Persentase penyediaan infrastruktur kemandirian pangan	Persentase	40	DISTANGAN
3.3	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Persentase	90	DISTANGAN
3.4	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persentase	50	DISTANGAN
3.5	Tingkat konsumsi pangan AKE	kkal/kap/hr	2.100	DISTANGAN
3.6	Tingkat konsumsi pangan AKP	gr/kap/hr	57	DISTANGAN
3.7	Tingkat ketersediaan pangan AKE	kkal/kap/hr	1.372	DISTANGAN
3.8	Tingkat ketersediaan pangan AKP	gr/kap/hr	61,00	DISTANGAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
<b>4</b>	<b>Pertanahan</b>			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	Persentase	18,15	DPUPR
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	Persentase	100	DPUPR
4.3	Penyelesaian izin lokasi	Persentase	100	DPUPR
4.4	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase	100	DPUPR
4.5	Persentase tanah kosong hasil inventarisasi yang telah dimanfaatkan	Persentase	67	DPUPR
4.6	Persentase ketersediaan data penatagunaan tanah	Persentase	49	DPUPR
4.7	Persentase sengeketa tanah garapan yang terselesaikan	Persentase	100	DPUPR
<b>5.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>			
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	Ada	DLH
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/ kota	Dokumen	Ada	DLH
5.3	Indekskualitas Air	Angka	91,52	DLH
5.4	Hasil Pengukuran Udara	Angka	88,81	DLH
5.5	Indeks kualitasTutupan Lahan	Angka	44,62	DLH
5.6	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Persentase	34,53	DLH
5.7	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Angka	4	DLH
5.8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ tidak ada	Ada	DLH
5.9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	Persentase	100	DLH
5.10	Timbulan sampah yang ditangani	Persentase	20,87	DLH
5.11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Persentase	0,07	DLH
5.12	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Persentase	12,61	DLH
5.13	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase	73	DLH
5.14	Persentase Pelaku Usaha yang dibina terkait Pengendalian Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase	53	DLH
5.15	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin berusaha (yang memiliki AMDAL/UKL-UPL)	Persentase	100	DLH
5.16	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait lingkungan hidup	Persentase	100	DLH
5.17	Persentase pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persentase	100	DLH



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
5.18	Persentase lokasi keanekaragaman hayati yang dikelola	Persentase	50	DLH
5.19	Jumlah sampah yang dikelola	Ton/tahun	5.260,95	DLH
<b>6.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
6.1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen administrasi kependudukan	Persentase	87,1	DISDUKCAPIL
6.2	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	Persentase	68,95	DISDUKCAPIL
6.3	Persentase ketersediaan data kependudukan	Persentase	80	DISDUKCAPIL
6.4	Persentase ketersediaan profil kependudukan	Persentase	100	DISDUKCAPIL
6.5	Persentase Penduduk Memiliki KTP	Persentase	98,76	DISDUKCAPIL
6.6	Persentase Penduduk Berakte Kelahiran	Persentase	85	DISDUKCAPIL
6.7	Persentase penduduk umur 0—18 tahun dengan kepemilikan akte kelahiran	Persentase	100	DISDUKCAPIL
6.8	Pasangan berakte nikah/ berakte perkawinan	Persentase	85	DISDUKCAPIL
<b>7.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Angka	8	DPPKBPPA
7.2	Persentase PKK aktif	Persentase	100	DPPKBPPA
7.3	Persentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	Persentase	80	DPPKBPPA
7.4	Persentase kebijakan penataan desa yang diterapkan di desa	Persentase	100	DPPKBPPA
7.5	Persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik	Persentase	100	DPPKBPPA
7.6	Persentase kerja sama yang diimplementasi	Persentase	35	DPPKBPPA
<b>8.</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persentase	1,21	DPPKBPPA
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	Persentase	2,27	DPPKBPPA
8.3	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase	8,17	DPPKBPPA
8.4	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase	18,71	DPPKBPPA
8.5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	Persentase	14,57	DPPKBPPA
8.6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persentase	86,63	DPPKBPPA
8.7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persentase	93,95	DPPKBPPA
8.8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persentase	81,88	DPPKBPPA
8.9	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	Persentase	100	DPPKBPPA
8.10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	Persentase	78,96	DPPKBPPA





NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
8.11	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	Persentase	100	DPPKBPPA
8.12	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Persentase	100	DPPKBPPA
8.13	Rata-rata usia kawin pertama wanita	Angka	25	DPPKBPPA
8.14	Tingkat pemenuhan kebijakan pengendalian penduduk	Jumlah	1	DPPKBPPA
8.15	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	Persentase	79,4	DPPKBPPA
8.16	persentase keluarga <i>stunting</i> yang mengikuti KIE 1000 HPK	Persentase	83	DPPKBPPA
8.17	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Angka	80,38	DPPKBPPA
<b>9.</b>	<b>Perhubungan</b>			
9.1	Rasio Izin Trayek	Angka	0,6	DISPERKIMHUB
9.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Org	33.267	DISPERKIMHUB
9.3	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	Org	22.365	DISPERKIMHUB
9.4	Persentase pelabuhan pengumpan lokal yang memenuhi persyaratan teknis pengelolaan pelabuhan	Persentase	100	DISPERKIMHUB
9.5	Persentase pemenuhana sarana dan prasarana LLAJ	Persentase	30,19	DISPERKIMHUB
<b>10.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat Kecamatan	Persentase	1,64	DISKOMINFO
10.2	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon	Persentase	69,09	DISKOMINFO
10.3	Proporsi rumah tangga dengana kses internet	Angka	0,95	DISKOMINFO
10.4	Proporsi rumah tangga yang memiliki computer pribadi	Angka	0,96	DISKOMINFO
10.5	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPBE	Persentase	60	DISKOMINFO
10.6	Jumlah konten informasi publik yang disebarluaskan	Jumlah	960	DISKOMINFO
<b>11.</b>	<b>Koperasi dan UKM</b>			
11.1	Persentase koperasi aktif	Persentase	89	DKUP
11.2	Persentase rekomendasi izin usaha simpan pinjam	Persentase	7,27	DKUP
11.3	Persentase KSP/USP yang berkategori sehat	Persentase	30	DKUP
11.4	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kredit	Persentase	4	DKUP
11.5	Persentase usaha mikro yang mendapatkan pembinaan	Persentase	3,45	DKUP



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
11.6	Persentase koperasi aktif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Persentase	19,23	DKUP
11.7	Persentase koperasi yang melaksanakan RAT	Persentase	51,64	DKUP
11.8	Persentase koperasi yang taat pada peraturan perundang-undangan	Persentase	60,58	DKUP
<b>12.</b>	<b>Penanaman Modal</b>			
12.1	Realisasi Investasi PMA	Rupiah	189.366.369.870	DPMNakertrans
12.2	Realisasi Investasi PMDN	Rupiah	496.206.774.396	DPMNakertrans
12.3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	685.573.144.266	DPMNakertrans
12.4	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	Angka	308,12	DPMNakertrans
12.5	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) berskala nasional (PMDN/PMA)	Persentase	50	DPMNakertrans
12.6	Persentase peningkatan layanan penanaman modal	Persentase	7,59	DPMNakertrans
12.7	Indeks Kepuasan masyarakat bidang penanaman modal	Indeks	82	DPMNakertrans
12.8	Persentase perusahaan yang menyampaikan LKPM	Persentase	24	DPMNakertrans
12.9	Persentase Investor yang mengikuti promosi penanaman modal.	Persentase	72	DPMNakertrans
<b>13.</b>	<b>Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	Persentase	100	DINDIKPORA
13.2	Persentase Wirausaha Muda	Persentase	20,27	DINDIKPORA
13.3	Cakupan Pembinaan Olahraga	Persentase	21,20	DINDIKPORA
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Angka	38,79	DINDIKPORA
13.5	Jumlah Atlet Berprestasi	Angka	66,60	DINDIKPORA
13.6	Capaian Prestasi Olahraga	Angka	7	DINDIKPORA
13.7	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	Persentase	45	DINDIKPORA
13.8	Pencab Aktif	Jumlah	29	DINDIKPORA
13.9	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	Jumlah	8	DINDIKPORA
<b>14.</b>	<b>Statistik</b>			
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Dokumen	Ada	DISKOMINFO
14.2	Cakupan data statistik sektoral yang terpenuhi	Persentase	75	DISKOMINFO
<b>15.</b>	<b>Persandian</b>			
15.1	Persentase Perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi yang aman	Persentase	60	DISKOMINFO



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
<b>16.</b>	<b>Kebudayaan</b>			
16.1	Cakupan objek kebudayaan yang dikembangkan	Persentase	15,13	DISPARBUD
16.2	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan sebagai ajang promosi Daerah	Jumlah	4	DISPARBUD
16.3	Jumlah kekayaan Sejarah Lokal yang dikelola dan atau dipublikasi	Jumlah	3	DISPARBUD
16.4	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Persentase	46,88	DISPARBUD
16.5	Persentase museum dalam kondisi baik	Persentase	100	DISPARBUD
<b>17.</b>	<b>Perpustakaan</b>			
17.1	jumlah naskah kuno yang terdaftar di Perpusnas	Jumlah	0	DPK
17.2	Persentase perpustakaan satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase	54,8	DPK
17.3	Akreditasi perpustakaan daerah	Nilai	A	DPK
17.4	Persentase perpustakaan desa yang terakreditasi minimal B	Persentase	21,15	DPK
17.5	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Persentase	10,43	DPK
<b>18.</b>	<b>Kearsipan</b>			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persentase	100	DPK
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	DPK
18.3	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/ kota yang sesuai NSPK	Jumlah	1	DPK
18.4	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tema	1	DPK
18.5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	Persentase	5.26	DPK
18.6	Persentase arsip aktif seluruh OPD yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	70	DPK
18.7	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Persentase	6,67	DPK
18.8	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Persentase	100	DPK
18.9	Implementasi e-arsip terintegrasi (SRIKANDI)	Persentase	100	DPK
18.10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten /kota yang sesuai NSPK	Kali	9	DPK
<b>5.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
5.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	48.128	DKP
5.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	263,29	DKP
5.3	Persentase ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundangan yang berlaku	Persentase	90	DKP



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
5.4	Persentase Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha perikanan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase	20	DKP
<b>3.3 Layanan Urusan Pilihan</b>				
<b>1. Pariwisata</b>				
1.1	Peningkatan jumlah DTW	DTW	8	DISPARBUD
1.2	Peningkatan kunjungan wisatawan	Jumlah	100.000	DISPARBUD
1.3	Persentase sertifikasi kompetensi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Persentase	100	DISPARBUD
1.4	Persentase produk ekonomi kreatif yang mendapatkan HaKI	Persentase	100	DISPARBUD
1.5	PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	Persentase	5,45	DISPARBUD
<b>2. Pertanian</b>				
2.1	Persentase Peningkatan Sarana Pertanian	Persentase	5	DISTANGAN
2.2	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Persentase	2	DISTANGAN
2.3	Persentase Poktan/Gapoktan yang dibina oleh Penyuluh Pertanian	Persentase	100	DISTANGAN
2.4	Persentase bencana pertanian yang tertanggulangi	Persentase	25	DISTANGAN
2.5	Persentase pengendalian izin usaha pertanian	Persentase	100	DISTANGAN
2.6	Persentase penyakit hewan dan zoonosis yang tertangani	Persentase	100	DISTANGAN
<b>3. Perdagangan</b>				
3.1	Persentase pemenuhan sarana distribusi perdagangan sesuai kriteria pasar tertib ukur	Persentase	66,67	DKUP
3.2	Stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase	3,9	DKUP
3.3	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	Persentase	100	DKUP
3.4	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase	20	DKUP
<b>4. Perindustrian</b>				
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase	100	DKUP
4.2	Jumlah Sentra IKM	Sentra	1	DKUP
4.3	Persentase pengendalian Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah	Persentase	100	DKUP
4.4	Persentase ketersediaan Informasi Industri IUI, IPU, IUKI dan IPKI	Persentase	50	DKUP
<b>Urusan Penunjang</b>				
<b>1. Perencanaan Pembangunan</b>				
1.1	Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah	Persentase	100	BP4D
1.2	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	BP4D



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
1.3	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase	100	BP4D
1.4	Persentase Konsistensi antar dokumen perencanaan pemerintah daerah - Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	BP4D
<b>2.</b>	<b>Keuangan</b>			
2.1	Persentase SiLPA	Persentase	2,95	BPKAD
2.2	Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah	Persentase	100	BPKAD
2.3	Persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase	100	BPKAD
2.4	Persentase peningkatan pajak daerah	Persentase	3,67	BP2RD
2.5	Persentase peningkatan retribusi daerah	Persentase	3,02	BP2RD
<b>3.</b>	<b>Penelitian dan pengembangan</b>			
3.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase	100	BP4D
3.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persentase	10	BP4D
3.3	Persentase kajian yang mendukung prioritas pembangunan daerah	Persentase	90	BP4D
3.4	Jumlah Inovasi Daerah	Jumlah	3	BP4D
<b>4.</b>	<b>Pengawasan</b>			
4.1	Persentase tindak lanjut temuan	Persentase	100	INSPEKTORAT
4.2	indeks manajemen resiko	Indeks	1,8	INSPEKTORAT
4.3	Indeks efektivitas pengendalian korupsi	Indeks	1,2	INSPEKTORAT
4.4	Level Kapabilitas APIP	Level	2+	INSPEKTORAT
<b>5.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>			
5.1	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.2	Persentase kebijakan daerah bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.3	Persentase Kebijakan Penataan Pemerintahan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.4	Tingkat kematangan UKPBJ	Level	3	SETDA
5.5	Persentase Kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
5.6	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Yang diterapkan oleh Perangkat Daerah	Persentase	100	SETDA
<b>6.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bangka Barat	Dokumen	Ada	SETWAN



NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
6.2	Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Dokumen	Ada	SETWAN
6.3	Terintegrasi program – program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat Dewan	Dokumen	Ada	SETWAN
<b>7.</b>	<b>Pemerintahan Umum</b>			
7.1	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	BADAN KESBANGPOL
7.2	Cakupan Partai Politik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Persentase	100	BADAN KESBANGPOL
7.3	Persentase ormas yang aktif	Persentase	100	BADAN KESBANGPOL
7.4	Angka kejadian konflik sosial berlatar belakang ekonomi, sosial, dan budaya	Kasus	0	BADAN KESBANGPOL
7.5	Persentase potensi konflik sosial yang ditangani	Persentase	100	BADAN KESBANGPOL
7.6	Angka Kejadian Konflik sosial berlatar belakang Ideologi	Kasus	0	BADAN KESBANGPOL

Terkait pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditetapkan melalui IKU, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Daerah. Target IKU Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.2** Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target	
	Satuan	Nilai
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>	%	4,47
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	6,50
Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,11
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,41
Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,86
Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Miliar rupiah	1.029
Indeks konektivitas	Nilai	0,71
Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang



Indikator Kinerja Utama	Target	
	Satuan	Nilai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	71,94
Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	52,94
Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi
<b>Pengeluaran Perkapita</b>	Ribu Rp	12.977
Angka kemiskinan	%	2,43
Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,77
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>	Indeks	70,96
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,48
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,74
Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	25,51
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,70
Prevalensi <i>Stunting</i>	%	6,40
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91,06
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Madya
Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Baik
<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	Kategori	Baik
Nilai SAKIP	Nilai	72,14
Opini BPK	Opini	WTP
Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang
Indeks SPBE	Indeks	Baik
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65,07
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	83,06
<b>Indeks Kapasitas Fiskal Daerah</b>	Indeks	1,80
Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	9,39



## BAB VII PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bangka Barat sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan serta komitmen tinggi pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan perencanaan yang telah disusun. Diharapkan penggunaan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial pada substansi perencanaan pembangunan mampu menjawab permasalahan pembangunan dan isu strategis yang ada.

Dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Bangka Barat yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 menggunakan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Tata cara penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Penyusunan dokumen Rencana Kerja Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 serta RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024;
3. *Tools* yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 yaitu melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah – Republik Indonesia milik Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019;
4. Guna memastikan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dilakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah melalui pemantauan dan supervisi pada setiap tahapan penyusunan;
5. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat berkewajiban menyempurnakan kembali dokumen Rancangan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, mempertimbangkan hasil kesepakatan terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat (RESES) oleh anggota DPRD serta memperhatikan hasil kesepakatan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program rencana pembangunan guna melakukan koreksi yang





diperlukan dan melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat;

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka Barat menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berikutnya serta penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah di tahun berjalan.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024, diharapkan perencanaan pembangunan daerah akan lebih sinergis serta lebih fokus dalam pencapaian target indikator pembangunan Kabupaten Bangka Barat yang telah ditetapkan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan secara regional dan nasional.